SEJARAH BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA



959.803
JPJ
3

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pengarah :
1. Kacung Marijan
   Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Nono Adya Supriyatno
   Plt. Direktur Sejarah

Narasumber :
1. Taufik Abdullah
2. Susanto Zuhdi
3. Azyumardi Azra
4. Anhar Gonggong
5. Mukhlis PaEni

Editor :
1. Jajat Burhanudin
2. Amurwani Dwi Lestariningsih

Penulis :
1. Restu Gunawan
2. Gusti Asnan
3. Ali Anwar
4. Galuh Ambar Sasi
5. Aminudin Kasdi
6. A.A. Bagus Wirawan
7. Lisyawati Nurcahyani
8. Anwar Hafid
9. Bernarda Meteray

Riset Ilustrasi :
1. Isak Purba
2. Tirmizi
3. Agus Widiatmoko
4. Budi Harjo Sayoga
5. Hermasari Ayu Kusuma
6. Esti Warastika
7. Dwi Artiningsih
8. Maemunah
9. Surya Agung

Tata Letak & Grafis :
Agus Antoso

Penerbit :
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp./Fax . : 021-5725044

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari penerbit

Cetakan : Tahun 2015
ISBN : 978-602-1289-25-9

SAMBUTAN
Plt. DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi, empat orang putra terbaik Sulawesi turut hadir. Mereka adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangie, Andi Pangerang Daeng Parani, Andi Sultan Daeng Raja dan Mr. Andi Zaenal Abidin.....Setiba di Makassar, Dr. G.S.S.J. Ratulangie langsung menginap di Hotel Empress bersama Mr. Andi Zainal Abidin selama seminggu. Di sini dia mengorganisir strategi perjuangan yang dimulai dengan penyebaran berita proklamasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan upaya mempertahankannya.

Kutipan dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Indonesia ini mengisahkan bagaimana berita proklamasi menyebar, misalnya, di wilayah Sulawesi. Dan media penyebarannya juga beragam. Demikian pula halnya dengan penyebaran berita tersebut di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Buku ini, memang, berupaya untuk mengungkapkan peristiwa proklamasi dan dinamika penyebaran beritanya serta respon rakyat di daerah dalam menerima berita tersebut. Buku yang ditulis tim sejarawan dari seluruh Indonesia ini, tegasnya, menggambarkan bagaimana awal berdirinya negara Indonesia dan perjuangan segenap rakyat dalam usaha mendukung kemerdekaan Indonesia.

Gambaran historis itu penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan, rela berkorban dan cinta tanah air pada generasi penerus. Generasi yang mengingat penjelasan historis ini akan menjadi generasi yang tidak hanya mengerti masa lampaunya saja, tetapi juga memahami

rencana dan tujuan bangsanya di masa mendatang. Dengan demikian, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsanya.

Oleh karena itu, diharapkan buku ini dapat memberikan nilai-nilai di balik peristiwa proklamasi sehingga memberikan wawasan sejarah dan kesadaran bagi generasi penerus untuk mencintai, membangun dan memperkokoh integrasi bangsa-negaranya.

Plt. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya



Nono Adya Supriyatno
NIP. 19580805 198503 1 002

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara-bangsa yang dimulai dengan lahirnya kesadaran nasional (kebangkitan nasional) dan dilanjutkan dengan persatuan nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peristiwa ini menjadi pembatas yang sangat penting antara masa sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kita tidak mempunyai kedaulatan apa-apa kini kita berdaulat penuh atas tanah air dan juga diri kita. Proklamasi tersebut adalah betul-betul hasil perjuangan bangsa Indonesia dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bukan pemberian pihak Jepang. Dan setelah meraih kemerdekaan pun, kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan, karena keinginan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali, hingga pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia.

Lepas dari penjajahan adalah hal yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, Suasana proklamasi diliputi rasa kegembiraan. Begitu proklamasi dibacakan di Jakarta, segera berita tersebut dengan berbagai cara dan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia disebarkan ke delapan provinsi saat itu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Berita proklamasi kemerdekaan pun diketahui oleh berbagai daerah. Rakyat dari berbagai kalangan mendukung dan berkorban demi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa kerajaan, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dari Negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman dan Sultan Syarif Kasim II dari

Siak Sri Indrapura dengan rela mendukung dan menyatakan kesetiannya kepada Republik Indonesia serta menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Tahta untuk republik. Dukungan dari segenap rakyat inilah yang memperkuat kemerdekaan Republik Indonesia, walau berbagai gangguan menghampiri, sehingga Negara Kesatuan RI tetap berdiri hingga saat ini.

Dan buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini berupaya merekam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tersebarnya berita tersebut, serta dinamika daerah saat menerima berita tersebut. Saya menyambut baik diterbitkannya buku ini. Memahami peristiwa proklamasi, khususnya penyebaran berita proklamasi di berbagai daerah, adalah mengingatkan kembali bangsa ini dalam mendirikan negara Republik Indonesia secara bersama-sama dengan semangat persatuan, pengorbanan, dan solidaritas yang sangat berguna dalam pembangunan Indonesia di masa kini. Selamat membaca.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Kacung Marijan
NIP. 1964.0325.198901.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
SAMBUTAN 1
DAFTAR ISI 1
PENDAHULUAN 1

BAB I KONSOLIDASI DAN PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA 21
1.1. Pertemuan Dalat 24
1.2. Aksi dan Reaksi Pemuda 27
1.3. Sukarno dan Hatta Diculik 29
1.4. Ahmad Subardjo Mencari Sukarno dan Hatta
ke Rengasdengklok 32
1.5. Perumusan Teks Proklamasi 37
1.6. Persiapan Proklamasi di Jakarta 44
1.7. Pembacaan Teks Proklamasi 45
1.8. Penyebarluasan Berita Proklamasi 53
1.9. Pembukaan UUD 1945 56
1.10. Pembentukan Provinsi dan Kementerian 59

BAB II BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA 67
2.1. Sumatera Sebelum Proklamasi 67
2.2. Penyebaran dan Respon Terhadap
Berita Proklamasi 71
2.3. Penyebarluasan Berita Proklamasi 72
2.4. Aktualisasi Proklamasi: "Kaum Muda"
vs "Kaum Tua" 82
2.5. "Kaum Tua vs Kaum Tua" serta Pembentukan
Pemerintahan Provinsi dan Keresidenan 94
2.6. Menentang dan Mengingkari Proklamasi 105

BAB III PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI DI JAWA BARAT
3.1. Pengantar 125
3.2. Api dalam Sekam di Wilayah Para Investor 126
3.3. Penandatanganan Kapitulasi di Subang 127
3.4. Merangkul Pejabat Pribumi dan Kaum Pergerakan 128
3.5. Mendongkrak Citra dengan Media Massa 131
3.6. Kekecewaan Kaum Pergerakan ..... 133.
3.7. Jepang Menyerah dan Pergerakan Pemuda 138
3.8. Menjelang Proklamasi 138
3.9. Proklamasi dan Penyebarannya 145
3.10. Pengambilalihan Kekuasaan 155
3.11. Konflik dengan Jepang dan Sekutu 158
3.12. Pejuang Jakarta Terdesak ke Jawa Barat 165
3.13. Bandung Lautan Api 169

BAB IV GELORA API (KE)MERDEKA(AN)
INDONESIA DI JAWA TENGAH 179
4.1. Pendahuluan 179
4.2. Penyebarluasan Berita Proklamasi 179
4.3. Yogyakarta Kooti 180
4.4. Surakarta Kooti 183
4.5. Pekalongan Syuu 186
4.6. Semarang Syuu 187
4.7. Kedu Syuu 191
4.8. Banyumas Syuu 194
4.9. Pati Syuu 194
4.10. Hari Indonesia 195
4.11. Salam Nasional 197
4.12. Masa Bersiap 200
4.13. Kota Baru 200
4.14. Magelang 206
4.15. Ambarawa 208
4.16. Semarang 217
4.17. Pekalongan 224
4.18. Ulang Bulan Kemerdekaan 226
4.19. Potret Kehidupan Sehari-hari 231
4.20. Hari Raya 231
4.21. Tahun Baru 234

4.22. Menonton Bioskop dan Pertunjukkan 234
4.23. Kelaskaran Unik 235
4.24. Berbagai Kongres 235
4.25. Penutup 238

BAB V BERITA PROKLAMASI DI SURABAYA..... 247
5.1. Pengantar 247
5.2. Surabaya Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 248
5.3. Melalui Radio 252
5.4. Pers 254
5.5. Kota – kota Lain di Jawa Timur 257
5.6. Konsolidasi Kekuasaan 259
5.7. Polisi Istimewa 263
5.8. Pembentukan KNI Daerah Surabaya 267
5.9. Pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) 274
5.10. BKR Laut dan Marine Kamanan Rakyat (MKR) 277
5.11. Pemuda Republik Indonesia (PRI) 280
5.12. Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) 284
5.13. Terbentuknya Kantor Berita Antara dan Perjuangan para Wartawan 285
5.14. Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) 287
5.15. Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya 288
5.16. Radio Pemberontakan Bung Tomo 295
5.17. Lahirnya Hizbullah Surabaya 301
5.18. Gerakan Buruh 302
5.19. Penataran Angkatan Laut 303
5.20. Kelompok non-combatant 306
5.21. Konflik – konflik di Surabaya 308

BAB VI BERITA PROKLAMASI DI SUNDA KECIL DAN RESPONNYA 331
6.1. Sekilas tentang Sunda Kecil 331
6.2. Sunda Kecil dan Momen Proklamasi 332
6.3. Respons Pemuda dan Elit Tradisional 337
6.4. Peralihan Kekuasaan 341
6.5. Negara Indonesia dan Sekutu-NICA 343
6.6. Konflik di Daerah 349
6.7. Perang Gerilya 354

6.8. Long March dari Gunung Batukaru ke Gunung Agung 362
6.9. Perang Terbuka pada Puputan Margarana 366
6.10. Dari Malino ke Denpasar 370
6.11. Refleksi 381

BAB VII BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN (BORNEO) 395
7.1. Pengantar..... 395
7.2. Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi..... 396
7.3. Peristiwa Gubernur Haga di Kalimantan Selatan..... 396
7.4. Peristiwa Mandor Di Kalimantan Barat..... 397
7.5. Medium Penyebaran Proklamasi..... 399
7.6. Respon Masyarakat terhadap Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia..... 412
7.7. Perjuangan Rakyat Dayak..... 425
7.8. Peralihan Kekuasaan 426

BAB VIII BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI SULAWESI DAN RESPONNYA 455
8.1. Pengantar..... 455
8.2. Medium Penyebaran..... 459
8.3. Pembawa Berita Proklamasi..... 474
8.4. Peralihan Kekuasaan dan Gerakan Mempertahankan
Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi..... 489

BAB IX BERITA PROKLAMASI DI MALUKU 521
9.1. Pengantar..... 521
9.2. Gagasan Awal tentang Indonesia di antara
Masyarakat Maluku 522
9.3. Maluku di Masa Pendudukan Jepang..... 525
9.4. Reaksi Warga Maluku di Luar Maluku
terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945..... 527
9.5. Orang Irian Barat dan Berita Proklamasi
17 Agustus 1945..... 545
9.6. Gerungan dan Pembentukan
Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Hollandia..... 549
9.7. Aktivitas KIM di Hollandia dan Daerah sekitarnya..... 552

9.8. Ratulangi dan Pembentukan PKII dan Aktivitas di Serui 557
9.9. Aktifas PKII di Serui dan Sekitarnya 560
9.10. Petero Jandi dan Stefanus Josef pada Peristiwa 14 Maret 1948 di Biak.... 562
9.11. Orang Irian Barat Menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) 570
9.12. Orang Irian Barat Pasca Konferensi Meja Bundar 572

DAFTAR PUSTAKA 589

BERITA PROKLAMASI DAN PENGALAMAN ANAK BANGSA DI DELAPAN PROPINSI

Taufik Abdullah

Pendahuluan

Berbagai kisah bisa dan bahkan telah berkali-kali disampaikan tentang ironi sejarah yang pernah dialami bangsa ketika masa "revolusi kemerdekaan" sedang terjadi, dan entah berapa banyak pula duka-cerita yang tidak bisa terlupakan di saat "perang kemerdekaan bangsa" harus dijalani. Tetapi ketika semuanya secara formal telah dianggap selesai, maka apa jawaban yang harus dikemukakan ketika pertanyaan tentang keutuhan negara yang diproklamasikan dalam suasana serba kekurangan bisa dipulihkan? Bukankah ketika akhirnya pemerintah Belanda, yang ingin menghidupkan kembali "Hindia Belanda", menyerahkan atau, kalau mau boleh juga—mengakui—kedaulatan negara-bangsa yang sekian lama diperjuangkan "dengan darah dan air mata" (Agustus 1945-Desember 1949) yang tampil dari pihak Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat? Bukankah R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) ini terdiri atas sekian banyak—lebih dari dua puluh—negara-bagian, sedangkan "negara proklamasi" Republik Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, secara formal hanyalah satu dari "negara bagian" yang sekian banyak itu? Apakah rahasia yang ada di belakang fakta sejarah kalau ternyata dalam waktu delapan bulan saja (17 Agustus 1950) RIS telah menjelma kembali menjadi Republik Indonesia, sebuah negara kesatuan yang melingkupi seluruh persada tanah air?

Berbagai kisah sejarah tentu bisa diberikan, tetapi "romantisme" dari gejolak semangat nasionalisme dan patriotisme tidak mudah bisa terlupakan. Tiba-tiba impian-impian masa depan tentang kehidupan

pribadi seakan-akan dengan begitu saja bisa tersapu oleh keharusan yang didorong oleh kecintaan terhadap tanah air. Maka betapapun sikap realistis dalam usaha memahami dinamika dan denyut peristiwa sejarah adalah keharusan yang selalu dipegang, tapi bagaimanakah romantisme kepahlawanan di masa revolusi kemerdekaan bisa diresapi? Proklamasi Kemerdekaan yang hanya terdiri atas dua kalimat dan ditandatangani oleh dua pemimpin yang terkemuka ternyata adalah ajakan pada pengabdian yang tanpa pamrih serta pengorbanan yang ikhlas. Perjuangan kemerdekaan bangsa ternyata bukanlah pula sekadar usaha ke arah pemenuhan impian dan cita-cita kebangsaan. Ketika itulah pengalaman kesejarahan yang keras telah mempersatukan kesemuanya

Kita pun kini bisa juga merasakan betapa rangkaian dari pembauran segala corak keragaman mitos dan pemahaman ideologis terhadap peristiwa empiris yang telah dilalui itu mencapai puncak yang menentukan. Dengan begini keleluasan dalam pemahaman sejarah pun memberi kesempatan bagi terjadinya persambungan historis yang teramat logis—sebuah bangsa yang telah diciptakan dan dipupuk serta diperjuangkan akhirnya mencapai titik kulminasinya. Maka biarlah pengalaman bangsa selanjutnya berkisah tentang berbagai ujian—kadang –kadang keras dan bahkan kejam—yang telah dialami. Semoga kearifan yang dipetik dari segala ceria kenikmatan kemerdekaan bisa terpakai untuk mendekati cita-cita bangsa yang belum kesampaian. Semoga pula segala kebodohan yang sempat menyengsarakan keserasian kehidupan kebangsaan bisa terelakkan dengan kearifan yang bisa dipetik dari pengalaman sejarah.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Jika lembaran pertama dari sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah terbuka, maka tampaklah betapa kesempatan seperti terhampar begitu saja di saat Perang Pasifik telah berakhir. Masa akhir dari sejarah panjang perjuangan yang penuh pengorbanan dan penantian yang menggelisahkan seakan-akan telah mulai berakhir. "Fajar kemerdekaan", yang didendang-dendangkan kini terasa mulai berubah menjadi "pagi kemenangan bangsa" yang menghangatkan. Tetapi seketika realitas telah mengungkapkan bentuk yang sesungguhnya, maka ternyatalah betapa semua harapan barulah

berarti di saat pengabdian dan pengorbanan yang tanpa henti telah diberikan.

Berbagai corak siksaan dan hinaan yang pernah dan bahkan masih juga sedang diderita anak bangsa—mulai dari kesulitan kehidupan ekonomis yang tak terperikan sampai dengan berbagai ragam kekejaman militerisme yang tak pernah terbayangkan—tidak mungkin terlupakan, tetapi menjelang pertengahan tahun 1945 terasa juga betapa masa akhir pendudukan bala tentara Jepang telah mulai membayang. Ketika itulah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mulai bersidang. Meskipun anggota BPUPKI ini hanya terdiri dari mereka yang dinilai pemerintah Pendudukan Militer Jepang sebagai "tokoh-tokoh yang terkemuka di pulau Jawa" (sebagaimana sebuah buku biografi terbitan di zaman pendudukan Jepang menyebutkannya) tetapi mereka praktis mewakili keragaman etnis, agama, dan ideologi anak bangsa.

Rapat-rapat BPUPKI—yang resmi dibentuk pemerintah militer Jepang pada bulan Maret 1945—ternyata adalah kesempatan pertama bagi para tokoh anak bangsa untuk mengutarakan dan memperdebatkan secara langsung segala corak pemikiran ideologis dan visi serta harapan bahkan impian tentang masa depan bangsa. Dalam sidang-sidang BPUPKI inilah landasan ideologis dan bentuk kenegaraan dirumuskan, dan batas-batas wilayah negara diperdebatkan dan dirancang. Barangkali tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa salah satu peristiwa yang sampai kini tak terlupakan ialah sidang yang diadakan pada tanggal 1 Juni. Ketika itulah salah seorang anggota BPUPKI, Sukarno, mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ketua sidang BPUPKI, Dr. Radjiman, "Apakah *philosophische grondslag* dari negara yang akan didirikan". Sebuah pidato yang disampaikan dengan penuh semangat pun mendapat sambutan yang teramat hangat. Pidato inilah yang kemudian dikenal dengan nama "*Lahirnya Pancasila*".

Begitulah ketika persidangan BPUPKI ini telah dianggap selesai, bangsa Indonesia, yang masih berada di bawah kekuasaan militerisme Jepang, telah mempunyai rancangan UUD dan draft awal dari landasan ideologis bangsa. Sidang BPUPKI pun telah pula menerima hasil kerja "Panitia Sembilan dengan komposisi keanggotaan mewakili golongan "nasionalis" [salah seorang beragama Kristen] dan "Islam". Begitulah

sebuah naskah yang secara historis disebut (atas usul Mohammad Yamin) "Piagam Jakarta" telah berhasil dirumuskan. Dan begitulah ketika sidang BPUPKI telah berakhir, "Hadiah kemerdekaan", yang dijanjikan Dai Nippon, serasa telah membayang di hadapan mata.

Untuk memperluas jangkauan pengaruh dari perumusan pemikiran ideologis dan hasrat politik yang telah dirumuskan itu, maka pemerintah militer Jepang pun membubarkan BPUPKI (tanggal 7 Agustus 1945) dan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Keanggotaan badan yang baru didirikan ini terdiri atas 12 mantan anggota BPUPKI (antara lain Sukarno dan Hatta) dan wakil-wakil dari wilayah luar Jawa, seperti tiga orang dari Sumatra, dua dari Sulawesi, satu dari Kalimantan, satu dari Maluku, dan satu dari kepulauan Sunda Kecil. Di samping itu, diangkat juga seorang wakil dari keturunan Tionghoa.

Namun, dinamika sejarah ternyata berhendak lain. Sebelum PPKI sempat mengadakan rapat pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Dai Nippon pun tidak mempunyai pilihan lain. Iapun mengibarkan bendera putih—Dai Nippon telah bertekuk lutut. Tetapi apakah dengan begini semua harapan yang telah dipupuk dan rencana yang telah dirumuskan harus pula buyar begitu saja? Apakah "janji kemerdekaan" tidak lebih dari pada sebuah janji dari negara yang telah berada di ambang kekalahan? Apakah janji kemerdekaan harus menuju ke jalan kehampaan belaka?

Seketika peristiwa yang teramat dramatis itu diketahui para pemuda yang "bergerak di bawah tanah". Jakarta pun seperti dengan begitu saja menjadi medan yang dipadati peristiwa dan bahkan percikan kejadian yang menggetarkan juga. Tanpa diketahui masyarakat ramai, berbagai corak usaha telah mulai diarahkan ke arah terwujudnya kemerdekaan bangsa. Mestikah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan sekarang—di saat berita kekalahan Jepang telah merupakan suatu kepastian—ataukah kesesuaian pandangan dengan militerisme Jepang, yang masih mempunyai senjata lengkap dan bertugas menjaga *status quo* yang harus lebih dulu didapatkan? Apakah tindakan ke arah kemerdekaan ini harus dilakukan setelah PPKI sempat mengadakan rapat pertamanya ataukah langsung saja tanpa melibatkan badan yang dibentuk oleh regime militer Dai Nippon itu? Tetapi bukankah anggota PPKI adalah pula mereka yang telah

menampilkan diri sebagai tokoh nasional di daerah masing-masing? Begitulah Jakarta telah semakin menjadi medan yang padat peristiwa dengan jumlah aktor yang semakin menaik.

Sekian tahun kemudian, di saat Republik Indonesia telah asyik dalam berbagai kesibukan negara yang baru berdaulat, kisah-kisah tentang berbagai kejadian yang simpang siur di masa itu mulai disampaikan secara terbuka. Setelah membaca berbagai kenangan tentang peristiwa dua-tiga hari yang teramat padat peristiwa itu, Bung Hatta, seorang aktor yang intens bermain dalam kepadatan peristiwa yang kritis itu, akhirnya berkomentar juga tentang betapa *Dichtung und Warheit* telah tercampur–aduk dan betapa "*legende* dan *realitet*" telah kehilangan batas. Tetapi betapapun juga perbenturan kenangan telah terjadi, dan sebuah kepastian historis tidak teringkari—Proklamasi Kemerdekaan akhirnya dikumandangkan.

Begitulah dalam suasana penuh kegalauan politik, peristiwa yang telah dinanti-nanti dengan harap-harap cemas itu akhirnya terjadi juga. Pada jam 10 pagi waktu Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945, di hadapan para anggota PPKI dan beberapa ratus pemuda Jakarta yang sempat diberi tahu, Bung Karno membacakan teks "Proklamasi kemerdekaan Indonesia" —sebuah teks keramat bangsa yang sebelumnya telah ditandatanganinya bersama Bung Hatta. Seketika Proklamasi Kemerdekaan telah dibacakan, maka seperti dengan tiba-tiba saja para anggota PPKI telah menjadi para pemimpin dari sebuah negara merdeka. Mereka telah menjadi pemimpin dari Republik Indonesia.

Sebelum rapat pertama PPKI—rapat para pentolan kemerdekaan bangsa—diadakan, sebuah peristiwa penting telah lebih dahulu terjadi. Atas persetujuan beberapa tokoh yang dianggapnya mewakili aspirasi umat Islam, Bung Hatta mengganti suasana politik dan ideologis yang tercantum dalam "Piagam Jakarta" untuk bisa menjadi landasan konstitusional kenegaraan. Sejak itu namanya pun berubah—hanya "Pembukaan" UUD saja. Perubahan kecil, tetapi teramat fundamental itu, ialah penghapusan "tujuh kata keramat" di belakang kata "Ketuhanan" ("dengan kewajiban ummat Islam menjalankan syariat agamanya") dan menggantinya dengan ungkapan "Yang Maha Esa". Tetapi, sejak itu pula dokumen yang disebut "Piagam Jakarta" itu bukan lagi sekedar kenangan historis tetapi sering juga tampil sebagai

tuntutan politik yang tidak mudah terlupakan. Rancangan UUD pun mengalami perubahan juga. Kata "beragama Islam" dari fasal tentang syarat untuk menjadi Presiden dihapus.

Begitulah, dengan perubahan yang sedemikian kecil tetapi teramat fundamental ini para pemimpin dari Republik yang baru berumur sehari itu mengadakan rapat pertama. Ketika itulah keberlakuan UUD Sementara disahkan. Sukarno dan Hatta secara aklamasi dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi apakah arti kesemua peristiwa yang teramat fundamental itu dalam kenangan pribadi para pelakunya?

Kira-kira kurang sedikit dari dua puluh tahun kemudian, ketika ia sedang berada di puncak kekuasaannya (sebagai "Pemimpin Besar Revolusi" dan Presiden Seumur Hidup) Bung Karno pun berkisah (dalam *"as told to Cindy Adams"*). Setelah ia terpilih sebagai Presiden dari negara yang baru diproklamasikan itu, katanya, ia pulang ke rumah—jalan kaki saja. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang penjual sate. Karena merasa lapar, kisahnya, *"His Excellency the President of the Republic of Indonesia"* memberikan perintahnya yang pertama. "Buatkan saya lima puluh tusuk sate ayam". Maka begitulah Bung Karno menikmati santap malamnya.

Keesokan harinya, PPKI mulai mengadakan pembagian wilayah administratif dari Republik Indonesia yang baru dilahirkan itu. Negara Republik Indonesia yang baru inipun dibagi atas 8 Propinsi, yaitu propinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Sedangkan Ibukota propinsi ditentukan berdasarkan ukuran kota yang terbesar, lokasi yang strategis dan tentu saja penilaian tentang peranan sosial-politik kota itu sejak masa kolonial. Maka Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, Singaraja, dan Ambon dijadikan sebagai ibukota propinsi, meskipun baru di atas kertas saja. Kemudian gubernur dari masing-masing propinsi pun diangkat pula. Sebagian besar dari gubernur yang baru diangkat itu berasal dari kalangan anggota PPKI yang datang dari propinsi-propinsi yang telah dibentuk. Mr.Teuku Moh. Hasan dipilih sebagai Gubernur Sumatra, Dr. Sam Ratulangi (Sulawesi), Mr. Ketut Pudja (Sunda Kecil), Ir. Pangeran Moh.Noer (Borneo), dan Mr. J. Latuharhary (Kepulauan Maluku), sedangkan gubernur dari tiga propinsi di Jawa dipercayakan kepada para mantan pejabat yaitu para

priyayi tinggi dari sejak masa penjajahan (Sutardjo Kartohadikusumo, R.P Soeroso dan R.M. Soerjo).

Tetapi ketika pelaksanaan administratif pemerintah Republik Indonesia ini belum semuanya bisa berfungsi, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII telah menyatakan bahwa Yogyakarta adalah "daerah istimewa" , yang berada di bawah pemerintahan mereka (5 September 945). Kedua penguasa daerah yang biasa disebut *vorsten landen* ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kedudukan daerah ini sebagai "daerah istimewa" bukan saja diakui, tetapi bahkan kemudian—ketika Jakarta telah semakin dikuasai oleh Sekutu dan NICA—dijadikan sebagai "ibukota perjuangan" sampai kemenangan akhir didapatkan bangsa.

Begitulah dalam tinjauan sepintas lalu tidak ada perubahan administratif yang fundamental yang diperkenalkan. Semua seakan-akan berjalan seperti biasa—seakan-akan sesuai dengan peninggalan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Meskipun demikian, penyimpangan dari keputusan yang dibuat oleh sidang BPUPKI telah terjadi. Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan ternyata hanya terdiri atas wilayah Hindia Belanda lama, bukannya wilayah *Indonesia Raya,* yang diperjuangan dengan berhasil oleh Sukarno dan Mohammad Yamin—suatu wilayah melingkupi jajahan Inggris (Tanah Semenanjung, Singapura, Borneo Utara) dan jajahan Portugis (Timor Timur). Jadi, ada perbedaan yang fundamental antara "harapan kemerdekaan yang didapatkan sebagai hadiah" dengan "kemerdekaan bangsa yang harus diperjuangkan".

Maka pelajaran pertama dalam politik kenegaraan telah diwujudkan dalam realitas. Ternyatalah bahwa revolusi kemerdekaan harus menyadari juga betapa pentingnya pembedaan antara politik yang realistis dan rasional dengan impian yang penuh kemegahan. "Apa yang tidak rasional dalam sebuah revolusi", kata Bung Hatta di saat perdebatan dengan para pemuda revolusioner masih menggebu-gebu, "tidaklah revolusioner". Apakah mungkin wilayah yang berada di bawah kekuasaan Inggris dan Portugis dijadikan sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang masih harus mempertahankan eksistensi dirinya?

Dengan penambahan beberapa orang anggota, maka PPKI pun diubah menjadi Komite Nasional Indonesia (Pusat), sebuah badan yang

mula-mula praktis menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini bahkan untuk beberapa lama berlanjut juga meskipun pada tanggal 4 September 1945, kabinet pertama yang langsung berada di bawah pimpinan Presiden (sesuai dengan UUD yang menjadikan Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Kabinet yang diejek oleh para pemuda revolusioner sebagai kabinet *Buch*, terdiri dari para tokoh yang sempat menjadi pegawai tinggi pemerintahan militer Jepang. Ternyata revolusi memerlukan juga suatu kontinuitas yang tidak langsung bersifat kontrontatif. Tetapi bagaimanapun juga gejolak pergolakan politik yang terjadi di pusat pemerintahan semakin menaik juga. Maka dalam proses selanjutnya tampaklah betapa dinamika revolusi yang penuh kegelisahan ini semakin lama semakin menjadi bagian dari kehidupan sosial politik di daerah-daerah, meskipun dengan corak dan intensitas yang berbeda-beda.

Jika pandangan sejarah ke belakang hendak dilayangkan, maka dengan penuh kepastian bolehlah dikatakan bahwa rapat raksasa, yang diadakan atas desakan para pemuda dan rakyat, di lapangan IKADA (sekarang menjadi bagian dari lapangan MONAS) pada tanggal 19 September, di bawah pengawasan tentara Jepang yang bersenjata lengkap, adalah bukti pertama dukungan rakyat atas keabsahan Republik Indonesia. Dalam suasana revolusioner yang telah semakin menaik inilah pula Wakil Presiden mengeluarkan apa yang dikenal sebagai Maklumat no. X (3 Oktober 1945). Didasari oleh semangat demokrasi yang enggan untuk melunak, Maklumat ini dengan tegas menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia-Pusat adalah dewan perwakilan rakyat sementara.

Begitulah tidak lama kemudian, kabinet *Bucho* pun digantikan oleh kabinet yang secara langsung bertanggungjawab kepada KNI-P. Indonesia pun telah memasuki periode semi-parlementer, ketika pandangan mayoritas anggota KNI-P telah bisa menjatuhkan kabinet, tetapi Presiden masih memegang kata akhir.

Seandainya lembaran sejarah dari pemerintahan Republik Indonesia akan dibalik-balik, maka akan tampaklah bahwa Sutan Sjahrir adalah satu-satunya tokoh pergerakan kebangsaan yang memegang jabatan Perdana Menteri tiga kali berturut-turut. Betapapun mungkin kekalahan politik yang dialaminya bisa menyebabkan kabinet yang dipimpinnya dijatuhkan dalam sidang KNI-P, tetapi kedudukan Sjahrir

tetap kokoh sebagai Perdana Menteri. Ia ternyata masih dipercaya Presiden. Hanyalah ketika partainya, Partai Sosialis, telah terpecah dua, Sjahrir digantikan oleh mantan temannya separtai, Amir Syarifuddin.

Ketika pada tanggal 5 Oktober 1945 Republik Indonesia telah meresmikan kehadiran angkatan bersenjatanya, maka berarti semua persyaratan sebagai sebuah negara yang merdeka telah dipenuhinya. Tetapi sejak itu pula bukan saja ancaman akan eksistensi Republik semakin menaik, dinamika politik internal di pusat dan di daerah pun semakin bergejolak. Strategi politik apakah yang harus dipakai dalam menghadapi ancaman kolonialisme Belanda yang ingin kembali itu? Apakah "perang" atau "diplomasi" adalah dua pilihan yang tersedia, ataukah keduanya adalah keharusan yang sejalan? Tetapi di beberapa daerah kemerdekaan bangsa kadang-kadang harus berhadapan dengan dampak struktural kolonialisme dalam kehidupan politik pemerintahan.

DIMENSI DAERAH REVOLUSI NASIONAL

Entah langsung ke ibukota propinsi, seperti halnya yang terjadi di pulau Jawa, atau tidak pula jarang ke kota-kota pinggiran di dalam kesatuan adminstratif yang baru diperkenalkan itu, tetapi seketika berita Proklamasi akhirnya telah diterima rakyat maka perubahan suasana pun terjadi begitu saja. Ketika berita proklamasi itu telah sampai di daerah-daerah, sebuah panorama keragaman pengalaman dalam gejolak revolusi seperti telah terbentuk dengan begitu saja. Ternyatalah pula betapa kehadiran pemerintah propinsi barulah mempunyai arti setelah perjalanan sejarah semakin menjauhi tanggal Proklamasi Kemerdekaan. Menjelang hal ini terjadi, kekuasaan nasional lebih dirasakan sebagai simbol dari kesatuan bangsa. Tetapi ketika R.I telah bisa merayakan ulang tahunnya yang pertama, seluruh wilayah Indonesia telah merasakan denyut revolusi, betapapun sejak bulan ketiga Proklamasi sebagian besar wilayah Indonesia bagian Timur telah diduduki oleh tentara Sekutu yang selalu membawa boncengan tentara dan bahkan aparat pemerintahan Belanda.

Sudah bisa dibayangkan bahwa di masa ketika radio dan telegram bukan saja masih merupakan barang langka, tetapi juga berada di dalam genggaman sistem kekuasaan; dan di saat surat kabar secara langsung masih berada di bawah penilikan militer Jepang, penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan sangat ditentukan oleh

jarak geografis dari Jakarta. Semakin dekat dari Jakarta maka semakin cepat kemungkinan berita itu bisa diketahui dan mendapat reaksi spontan masyarakat. Bisalah dimaklumi juga kalau kota-kota besar di Jawa adalah pula yang paling cepat memberikan reaksi atas Proklamasi Kemerdekaan. Hanya saja kadang-kadang di kota-kota besar daerah ini pula massa bisa tergelincir dalam konflik yang bersifat multi-dimensional. Bukankah di kota-kota besar ini pula perbedaan kelas ekonomi dan status sosial lebih sering diwujudkan dalam sistem sosial?

Sejak awal September Bandung, Semarang dan Surabaya telah mulai menghadapi kenyataan bahwa hasrat akan kemerdekaan bangsa adalah pula undangan untuk terlibat dalam konflik bersenjata yang keras. Hasrat akan terwujudnya kemerdekaan bangsa ternyata tidak bisa berhenti pada coretan revolusioner di dinding-dinding gedung. Keinginan nasionalistis berarti pula kesediaan untuk menghadapi konflik berdarah. Mula-mula hal ini berarti berhadapan dengan kehadiran bala-tentara Jepang, yang diharuskan oleh sang pemenang perang untuk menjaga keamanan sampai kekuasan yang sah telah berdiri. Maka mestikah diherankan jika saja bala tentara Jepang merasakan betapa hasrat kemerdekaan nasional telah mengancam tugas mereka, sebagai penjaga keamanan yang ditugaskan Sekutu—sang pemenang Perang Pasifik—konflik dan bahkan pertempuran sengit tidak terhindarkan. Ancaman ini semakin menaik juga jika para pemuda revolusioner telah semakin asyik menyibukkan diri untuk mencuri dan bahkan merampas senjata dari tentara Jepang, yang memang telah mulai kehilangan semangat *bushido* yang dibanggakan.

Pertempuran besar (15-19 Oktober 1945) antara pasukan Jepang dengan para pemuda revolusioner di Semarang sampai kini tak terlupakan. Dengan intensitas yang mungkin lebih ringan, hal yang sama dialami juga oleh kota-kota lain di hampir semua daerah. Suasana ketidakpastian masih berlanjut ketika ancaman lain telah mulai mendekat. Tentara Sekutu, yang terdiri dari pasukan Inggris, Gurkha, Australia, sang pemenang perang, yang ternyata membawa goncengan para pejabat dan tentara NICA, telah pula mulai mendarat sejak menjelang akhir September 1945. Maka begitulah insiden-insiden kecil telah pula mulai terjadi di berbagai kota di Jawa dan Sumatra kemudian juga di pulau-pula lain. Sampai kini pun peristiwa "Bandung lautan api" enggan lepas dari ingatan kolektif anak bangsa. Siapa

pulakah yang bisa melupakan lagu *Hallo-halo Bandung,* meskipun belum pernah melihat kota yang masyhur sebagai *Paris van Java.*

Insiden-insiden kecil di Surabaya, yang mencapai klimaks yang teramat dahsyat pada tanggal "10 November" masih tercekam di lubuk hati bangsa. Di tengah–tengah pekikan "*Allahu Akbar*" dan seruan "*Berontak*" dari Bung Tomo, ribuan anak bangsa tampil ke medan pertempuran. Entah berapa ribu jumlah mereka yang tewas dan entah berapa ratus pula yang harus merintih karena luka parah yang diderita. Ketika akhirnya Belanda menanggalkan kedok NICA–nya seluruh wilayah tanah air telah berada dalam suasana konflik yang keras.

Di saat hal-hal itu telah terjadi, maka hampir seluruh wilayah tanah air tidak obahnya seperti tebaran "Surabaya-Surabaya" kecil. Jadi mestikah diherankan kalau hampir semua kota di seluruh penjuru tanah mempunyai "makam pahlawan" dan tanggal "10 November" abadi dalam kenangan bangsa sebagai "Hari Pahlawan"? Dengan begini pula secara simbolik legitimasi dari "Hari Proklamasi Kemerdekaan" semakin dikokohkan dalam ingatan sejarah, realitas kekinian dan dalam keharusan kehidupan bangsa yang abadi.

Jauh atau dekat jarak dari Jakarta hanyalah masalah waktu yang tidak selamanya menjadi faktor penentu corak reaksi masyarakat ketika telah mendengar berita Proklamasi. Tetapi memang seketika berita itu telah sampai keragaman pengalaman dalam pergerakan kebangsaan dan corak kepemimpinan daerah ikut menentukan corak reaksi pertama masyarakat pada berita tentang "kemerdekaan bangsa"—sebuah berita yang mengejutkan tetapi yang juga dinanti-nanti.

Di saat semua konflik bersenjata sudah dianggap berakhir dan ketika kemerdekaan bangsa telah pula menjadi realitas yang tidak terpungkiri, maka di waktu itulah pengalaman yang telah dilalui direnungkan. Di saat perenungan telah dilakukan, maka terasalah betapa kesejajaran pengalaman sejarah dari beberapa daerah terjadi juga dalam suasana yang serba tidak menentu itu. Tetapi kalau sekadar perbandingan sejarah hendak dilakukan, maka tampaklah betapa daerah yang pernah mengalami kegairahan dalam pergerakan kebangsaan di masa kolonialisme Belanda adalah pula daerah yang paling cepat bergerak dalam menyambut kemerdekaan, dan—tidak

kurang pentingnya—yang paling mudah pula tergelincir ke dalam konflik internal.

Pengalaman yang keras kadang-kadang bisa juga memancing perdebatan seru di saat pola pertahanan bangsa hendak dirumuskan. Tingkat keterlibatan masyarakat dan corak pengalaman dalam pergerakan kebangsaan yang semakin menaik sejak awal 1920-an dan mengalami tekanan politik *rust en orde* yang teramat konservatif sejak pertengahan tahun 1930-an, boleh dikatakan sebagai sebuah faktor yang ikut menentukan corak situasi perlawanan ketika tantangan dari hasrat kemerdekaan telah datang. Keragaman ideologi yang sempat dialami tidak pula jarang ditampilkan sebagai pendorong intensitas aktivitas, pemilihan corak strategi perjuangan, dan bahkan penentu tingkat keberhasilan dalam penggalangan semangat revolusi. Begitu halnya di berbagai daerah dan demikian pula yang terjadi di pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Tan Malaka dengan *Persatuan Perjuangan*, yang bersemboyan berunding berdasarkan pengakuan "100 persen kemerdekaan" memang tidak berhasil menjatuhkan Perdana Menteri Sjahrir, yang didukung Sukarno-Hatta, tetapi pengaruhnya menyebabkan penggantian residen (kepala pemerintahan keresidenan—bagian dari propinsi) harus dilakukan di Sumatra Barat. Tidaklah terlalu mengherankan kalau suasana politik internal bangsa di daerah keresidenan Sumatra Barat adalah pula refleksi dari suasana ibukota Republik Indonesia, yang sejak awal Januari 1946 telah pindah ke Yogyakarta.

Corak dari suasana revolusioner dan bahkan tingkat perbenturan politik internal ketika musuh akan atau bahkan sedang dihadapi ternyata dipengaruhi juga oleh tingkat keterlibatan pemuda dalam berbagai organisasi—mula-mula bersifat pertahanan sipil, demi "Asia Timur Raya", kemudian semakin bercorak kemiliteran murni. Hampir tanpa kecuali pemuda adalah golongan masyarakat yang paling awal memberikan reaksi pada setiap berita politik yang sampai di daerah. Begitulah halnya ketika berita kekalahan Jepang diterima dan terlebih lagi di saat kabar Proklamasi Kemerdekaan telah pula diketahui. Seketika berita ini diterima, maka di waktu itu para pemuda mulai bertindak. Tetapi ternyata juga mereka lebih suka mempercayakan kepemimpinan administratif pada para tokoh daerah yang telah punya nama dalam

pergerakan kebangsaan. Ada kalanya, memang, semangat perjuangan harus mengalah pada kearifan. Seketika semangat yang menggebu-gebu didampingi kesabaran yang telah mengendur, maka tidak jarang konflik sosial yang berdarah seakan-akan tampil begitu saja, seakan-akan memang begitulah keharusan revolusi. Karena itu, mestikah diherankan kalau dalam tradisi rasa kebahasaan dalam sejarah Indonesia, kata "pemuda" sering dengan begitu saja di-sinonim-kan dengan kata "revolusioner"? Tidaklah pula terlalu sukar untuk memahami mengapa pemuda adalah pula golongan sosial yang pertama menjadi korban revolusi, meskipun tidak selamanya di medan pertempuran dan bukan pula di saat tentara kolonial telah melakukan agresi militer.

Faktor ketiga yang ikut menentukan irama revolusi nasional—di samping pengalaman dalam pergerakan politik kebangsaan dan keterlibatan pemuda dalam berbagai corak organisasi—ialah pengalaman serta keluasan dari penyebaran kebudayaan-cetak (*print-culture)*, baik surat kabar ataupun majalah, di kalangan masyarakat. Keterlibatan yang relatif lebih awal dan intens dari masyarakat Sumatra Barat dalam gejolak dinamika revolusi dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatra, atau bahkan Indonesia umumnya, antara lain dipengaruhi oleh kedua hal ini. Sejak akhir abad 19 dan semakin menaik pada awal abad 20 dan apalagi setelah Sumatra Barat berada dalam suasana perdebatan intelektual dan agama yang intens sejak tahun 1910-an, surat kabar dan organisasi sukarela telah memainkan peran sosial yang penting dalam gejolak dinamika sosial. Kebudayaan-cetak bukan saja merelatifkan jarak geografis dan waktu tetapi juga memungkinkan terjadinya penyampaian berita dan pemikiran tanpa hambatan yang berarti. Karena itu, bisa jugalah dimaklumi kalau kemudian—sebelum Sumatra dibagi atas tiga propinsi—Gubernur Sumatra menjadikan kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan.

Di samping ketiga hal ini, tingkat penyebaran pendidikan modern dan keluasan daya jangkau pemakaian bahasa Indonesia di kota-kota tentu saja adalah pula sebuah faktor yang tidak bisa dilupakan. Penerbitan buku-buku sastra yang memakai berbagai corak bahasa Melayu, mulai dari yang disebut klasik sampai pasaran dan kemudian sastra Indonesia modern, langsung ataupun tidak ikut mempengaruhi proses tumbuhnya rasa-hayat persatuan bangsa. Demikian pula halnya dengan pendidikan modern. Bukankah semua

pemimpin pergerakan kebangsaan, baik lokal dan, apalagi, nasional, adalah hasil pendidikan modern, apapun mungkin kecenderungan ideologi politik dan orientasi kultural mereka? Rasa hayat nasionalisme tumbuh di saat mereka mulai merasakan ketidakpantasan kultural dalam konteks "Hindia Belanda". Jika saja *Indonesia Menggugat/Indonesia klaagt aan* (1930) pidato pledoi Bung Karno di pengadilan Bandung dan *Indonesia Merdeka/Indonesia Vrij* (1928) pidato pembelaan Bung Hatta di pengadilan Den Haag sempat dibaca, maka tampaklah betapa pelajaran sejarah yang bersifat *Neerlando-sentris*— yaitu uraian kesejarahan yang menyepelekan kehadiran, jangankan peranan, anak bangsa—adalah kecenderungan akademis yang dengan keras menggugah kesadaran mereka. Mengapa tanah air kita hanya dijadikan sebagai panggung tanpa keikutsertaan yang berarti dari anak bangsa? Tetapi seandainya pengalaman yang dilalui daerah-daerah di masa awal revolusi diperhatikan, maka tampaklah betapa corak dan bahkan intensitas pergerakan kebangsaan dan gelora revolusi yang mereka alami dipengaruhi oleh pengetahuan akan kesamaan nasib sebangsa dan ingatan kolektif tentang hubungan dan ikatan dengan daerah dan kesatuan etnis dari masyarakat sebangsa.

Di samping pemakaian bahasa Indonesia dan tingkat keterlibatan dalam berbagai corak organisasi-massa kebangsaan, ternyatalah "faktor yang lain" ini, yaitu kehadiran dan aktivitas para perantau—mereka yang berasal dari daerah lain—mempunyai dampak yang cukup penting juga. Bukan saja ide dan rasa ke-Indonesia-an dengan serta merta bisa meniadakan atau setidaknya memperkecil rasa keterasingan, kehadiran mereka berfungsi juga sebagai rantai penghubung dengan daerah lain. Karena itulah nyaris tanpa kecuali setiap daerah menjadikan intelektual perantau sebagai bagian dalam sistem kepemimpinan. Bahkan di beberapa daerah ada juga di antara para perantau, yang telah merasakan diri dan dirasakan masyarakat sebagai "putra daerah", bisa tampil sebagai pemimpin utama. Konflik kepemimpinan internal sedaerah yang tidak terselesaikan tidak jarang pula memberi kesempatan bagi perantau ini untuk ditampilkan sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai faktor penengah.

Maka ternyatalah revolusi nasional adalah pula masa ketika segala faktor pendukung yang telah disebut di atas saling menemukan. Intensitas pertemuan ini semakin menaik sejalan dengan tingkat dan corak ancaman, baik dari luar, bahkan maupun dari dalam, telah harus

dihadapi. Dalam sistem kenangan bangsa, revolusi nasional adalah masa ketika cita-cita luhur yang telah sekian lama dipupuk ingin diwujudkan tanpa kompromi dalam realitas kesekarangan. Kesemuanya terangkul dalam kesatuan ingatan kesejarahan yang bersifat romantis dan membanggakan. Jadi bisa jugalah dipahami kalau Presiden Sukarno lebih dulu memperkenalkan sistem wacana, *discourse,* yang memantulkan suasana serba-revolusioner sebelum akhirnya mendirikan sistem pemerintahan yang disebutnya "Demokrasi Terpimpin". Hanya saja, jika rentetan peristiwa yang telah menciptakan suatu gambaran dari realitas sejarah hendak dikaji lagi, maka tampaklah betapa di masa revolusi nasional itu Indonesia bukan hanya dipersatukan oleh hasrat nasionalisme—suatu hasrat yang ternyata tidak pula selamanya dibimbing oleh impian yang sama dan harapan yang sejalan. Nasib yang dialami Sumatra dan Jawa (dan Madura) di masa revolusi ternyata berbeda dengan daerah-daerah lain di persada tanah air ini.

Belum sempat penduduk di daerah-daerah di belahan Timur kepulauan Indonesia menyadari terjadinya peristiwa historis yang telah sekian lama dinyanyikan para nasionalis, bala tentara Sekutu dan kemudian Belanda telah menduduki wilayah mereka. Dr. Ratulangi yang baru saja sampai di Makasar untuk memulai tugas kenegaraan sebagai Gubernur dari propinsi Sulawesi, seperti dengan begitu saja ditangkap Belanda. Putra kebanggaan Minahasa hanya sempat mengerjakan beberapa hal yang dianggapnya strategis bagi kelanjutan pemerintahan Republik Indonesia sebelum ia dengan begitu saja ditangkap dan diasingkan ke Papua. Ratulangi adalah pejabat penting Republik pertama yang ditawan dan dibuang—bukan di masa penjajahan, tetapi di saat ketika ia telah menjabat kedudukan tertinggi di sebuah propinsi Republik Indonesia.

Maka begitulah sebuah perbedaan pengalaman historis yang keras antara Indonesia bagian Barat dan Timur seperti telah terbentang begitu saja. Jika tokoh-tokoh perjuangan di Jawa dan Sumatra bisa berkata bahwa mereka berjuang untuk *mempertahankan* kemerdekaan, maka para pemimpin bangsa di belahan Timur seakan-akan diharuskan untuk berkata bahwa mereka memimpin perjuangan untuk *merebut* kemerdekaan. Di mata pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian berhasil mendirikan Negara Indonesia Timur, para pemimpin ini tidak lebih daripada pemberontak. Karena itulah pembersihan besar-besaran biasa pula dilakukan. Sampai kini pun kehadiran dan aktivitas kapten

Westerling tak bisa terhapus dalam ingatan kolektif bangsa. Bukankah ia yang diperintahkan untuk memimpin operasi militer dengan melakukan pembunuhan sekian ribu anak bangsa—andaikan ungkapan "40.000 nyawa korban Westerling" lebih bersifat simbolik daripada historis. Dalam suasana pemberontakan, demi kemerdekaan inilah pula sekian banyak para pejuang Bugis-Makassar berhasil juga menyeberang ke pulau Jawa. Mereka ingin berjuang sebagai bagian dari kekuatan revolusioner demi kemerdekaan bangsa. Mungkin kini telah terlupakan, tetapi pemimpin dari para pejuang ini ialah Kahar Muzakar, yang kemudian diangkat sebagai Let.Kol. TNI.

Sementara itu Minahasa, yang biasa dikenal sebagai daerah yang akrab dengan Belanda, tidak mempunyai pilihan lain daripada melakukan pemberontakan, melawan pendudukan Belanda. Pemberontakan yang terjadi di bulan Februari 1946 ini tidak pula mungkin lekang dari ingatan.

Jika saja nasib bangsa di masa pendudukan Jepang harus diingat-ingat, bagaimanakah rasa sedih yang mendalam bisa terhapus begitu saja seandainya pengalaman anak-bangsa di Kalimantan Barat sempat melintas dalam kenangan? Berapa banyakah kaum terpelajar di daerah ini yang harus berkenalan tanpa ampun dengan peluru atau pedang samurai Jepang? Kalimantan Barat meninggalkan masa pendudukan ketika sekian banyak kaum terpelajar mereka telah menjadi korban militerisme Jepang. Sedangkan rakyat di Kalimantan Selatan bisa mencatat juga betapa usaha para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan Propinsi dilarang tentara Sekutu, meskipun residen Kalimantan Selatan sempat juga diangkat. Tetapi rencana untuk mulai melangkah sebagai sebuah pemerintahan terhalang juga (Oktober 1945). Meskipun konon ada juga unsur-unsur tentara Sekutu yang bersimpati dengan jalan membocorkan berita kemerdekaan, tetapi akhirnya, setelah beberapa pertempuran harus dilalui, pada bulan Juni 1946 Sekutu secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Sejak itu hasrat perlawanan di Kalimantan akhirnya bisa diwujudkan dengan pembentukan ALRI, betapapun kekuasaan militer Belanda masih bercokol.

Kalau diingat-ingat masa revolusi kemerdekaan di persada tanah air ini maka kita sesungguhnya berhadapan dengan panorama peristiwa yang teramat kompleks. Buku pelajaran sejarah mungkin hanya berkisah

tentang keteguhan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi seketika "negeri asing" (bukankah seorang sejarawan, Hartley, pernah mengatakan bahwa "*the past is a foreign country*"?) yang disebut "sejarah" itu telah didekati, maka ternyata juga "orang berbuat yang aneh-aneh di sana" (kalau ungkapan yang diperkenalkan sang sejarawan asing ini diteruskan). Seketika realitas masa lalu telah semakin didekati, maka ternyatalah pula betapa revolusi adalah suatu situasi ketika unsur-unsur konflik yang telah lama tersimpan mendapatkan saluran yang leluasa. Kalau saluran itu telah dipakai, maka siapa pun akan menyadari juga kompleksitas dari jalan yang harus dilalui meskipun gerbang kemerdekaan telah dilewati.

Begitulah ketika berita Proklamasi sampai pulau Bali dua situasi seperti muncul begitu saja. Di kalangan pemuda kegairahan nasionalisme segera bangkit dan organisasi Pemuda Pembela Negara pun didirikan. Tetapi di saat itu pula kekuatiran muncul di sebagian kaum raja-raja. Bukankah dalam situasi yang telah mulai memperlihatkan gejala yang serba tak menentu itu apa saja bisa terjadi? Entah telah direncanakan, entah terbawa oleh semangat revolusi tetapi yang jelas pada tanggal 20 September1945 raja Gianyar diculik. Maka pintu konflik antara para pemuda revolusioner dengan kaum raja-raja pun seperti terbuka dengan begitu saja. Situasi sosial pun semakin bertambah parah karena meskipun pada tanggal 8 Oktober Jepang telah menyerahkan kekuasaan pada Gubernur Propinsi Kepulauan Sunda Kecil, tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan (pada tanggal 27 Oktober) Belanda mendarat di Buleleng. Ketika pada awal November BKR, yang kemudian menjadi TKR, didirikan, konflik anti-kolonial telah dengan begitu saja terpaut dalam suasana revolusi sosial.

Memang benar kalau dikatakan bahwa di masa-masa awal revolusi di samping Jawa, maka Sumatra adalah wilayah Republik yang terlama bisa bertahan. Tetapi berbagai corak tantangan internal harus dihadapi juga. Meskipun Mr. Teuku Mohamad Hasan, sang Gubernur, telah sampai di kota Medan, ibukota propinsi Sumatra pada tanggal 29 Agustus 1945, tetapi selama beberapa hari seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal, ketika itu di Padang, Bukitinggi dan Palembang, pemerintahan yang mengklaim diri sebagai bagian dari Republik Indonesia telah berdiri. Dalam suasana yang dirasakan sebagai kekosongan itulah, Dr. A.K. Gani, seorang perantau-intelektual Minang, yang telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat

Palembang, mengirim telegram agar kehadiran propinsi Sumatra segera diumumkan. Usul ini memang ditanggapi tetapi Medan telah mulai memperlihatkan tanda-tanda betapa konflik internal anak bangsa telah menjadi kemungkinan yang tak bisa diingkari.

Seketika renungan kesejarahan telah dilayangkan maka semakin bisalah dipahami juga mengapa Bung Hatta mengingatkan bangsa akan sebuah ucapan seorang filososof Jerman, Nietschze, bahwa revolusi adalah pula saatnya ketika suasana *Umwertung aller Werte*—penjungkir-balikan semua nilai—telah terjadi. Dalam situasi seperti ini, maka yang diperlukan hanya sebuah kasus sederhana untuk menjadikan kesemuanya meledak. Entah kebetulan, entah disengaja, tetapi ketika Sultan Deli mengadakan resepsi di istananya yang megah, ia memberi tempat terhormat bagi para opsir Inggris dan Jepang, tetapi mempersilahkan pemimpin Republik untuk duduk di belakang. Mengapa? Berbagai tafsiran pun dibuat tentang arti dari penempatan tamu yang terasa menghina ini. Kesimpulan sederhana yang didapatkan hanyalah pembenaran apa yang memang telah menjadi kecurigaan. Maka para Sultan dan kaum bangsawan Sumatra Timur dengan begitu saja telah dinilai sebagai kekuatan yang anti-republik. Kalau telah begini keadaannya, di saat semangat revolusi sedang menaik, maka keragaman etnis—Melayu, Batak, Jawa, Cina dan sebagainya—dalam konteks perbedaan kelas ekonomi dengan begitu saja bisa mewujudkan dirinya dalam apa yang kemudian disebut sebagai "revolusi sosial". Sekian banyak kaum bangsawan Melayu mati terbunuh, tetapi untung masih lebih banyak yang sempat diselamatkan oleh TRI yang telah terbentuk. Tetapi tidak berapa lama kemudian, dengan dukungan tentara Belanda, Negara Sumatra Timur (NST) pun berdiri. Mungkin bukan sebuah ironi sejarah, tetapi memang Presiden NST, Dr. T. Mansyur, adalah Ketua pertama dari Jong Sumatranen Bond, yang kemudian ketika telah bernama Pemuda Sumatra, salah satu organisasi pelopor dari Kongres Pemuda Indonesia II, yang menghasilkan "Sumpah Pemuda" (28 Oktober 1928).

Peristiwa lain terjadi di Siak Sri Indrapura. Seketika berita Proklamasi telah diketahui dan sewaktu T. Mohammad Hasan telah pula menampilkan diri sebagai Gubernur Sumatra, maka di waktu itu pula secara spontan Sultan dari kesultanan yang didirikan pada abad 18 itu—ketika Raja Kecil dari Minangkabau terpaksa mundur ke pulau Sumatra karena kalah dalam berhadapan dengan aliansi Melayu–Bugis

memperebutkan kekuasaan di kesultanan Riau-Johor—menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Atas seizin residen Riau, pada bulan November 1945, Sultan Syarif Kasim II pergi ke Medan untuk menyerahkan fl. 13.000.000 kepada Gubernur Sumatra. Dengan sumbangan ini, sang Sultan bukan saja ingin membantu perjuangan tetapi juga memperlihatkan kesetiaannya pada Republik Indonesia. lapun diungsikan ke Aceh, keresidenan Republik yang tetap kokoh berdiri, betapapun daerah tetangganya telah dianggap beraliansi dengan kekuatan kolonial. Ketika waktunya telah datang, sang Sultan pun sempat juga menyerahkan mahkotanya yang bertahtakan permata kepada Presiden Sukarno. Pernyataan kesetiaannya kepada Republik kemudian juga didukung oleh raja-raja Riau yang lain. Maka mestikah diherankan kalau kini lapangan udara dan UIN Pekan Baru memakai nama sang Sultan yang nasionalis dan patriotik ini?

Kalau diingat-ingat, pilihan sultan Siak untuk menjadikan Aceh sebagai tempat tinggalnya di tengah-tengah gelora revolusi yang telah menyebar ke Riau adalah sebuah keputusan yang penuh resiko. Memang benar keselamatannya lebih terjamin dari kemungkinan serangan kekuatan anti-revolusi, tetapi Kutaraja (yang kini bernama Banda Aceh) adalah pula medan persaingan antara *uluebalang,* para bangsawan/kepala daerah, dengan para ulama. Seketika pemerintah Republik didirikan di Kutaraja pada bulan Oktober 1945, dengan dukungan kerjasama ulama dan *uluebalang*, di waktu itu pula sebagian *uluebalang* di daerah Pidie menentang kehadiran Republik. Pertempuran antara pendukung ulama dan *uluebalang* pun tak terelakkan bahkan berkecamuk. Pada bulan Januari 1946, apa yang dikenal sebagai Perang Cumbok pun berakhir. Kaum *uluebalang* yang dicurigai sebagai pendukung Belanda telah dihancurkan, tetapi sikap negatif kaum ulama dan para pendukung mereka terhadap kaum *uluebalang* tak berhenti. Pada bulan Februari 1946, para pendukung kaum ulama, di bawah pimpinan Al Mudjadid, mendirikan Tentara Perjuangan Rakyat, dengan tujuan yang sederhana saja, yaitu menghancurkan kekuatan para *uluebalang*. Ketika mereka telah melancarkan aksi, menuju utara ke arah Kutaraja, sepanjang perjalanan ratusan keluarga *uluebalang* harus menemui Sang Pencipta atau diasingkan ke Aceh Tengah. Sejak itu, Aceh sepenuhnya berada di bawah kekuasaan golongan ulama dan Aceh adalah pula satu-satu keresidenan yang bersih (kecuali Sabang) dari injakan pasukan kolonial yang ingin kembali.

Penutup

Begitulah sebuah Proklamasi Kemerdekaan yang ditulis sesederhana mungkin ternyata berhasil membongkar segala kekuatan anak bangsa, yang tersembunyi, untuk tampil di atas pentas sejarah. Ketika yang tersembunyi itu telah keluar, maka tampaklah pula betapa ke-*bhineka*-an terhampar di atas pentas sejarah di saat tujuan yang *tunggal*—terwujudnya negara- bangsa yang merdeka—hendak dicapai. Dalam suasana inilah pula ke-*bhineka*-an itu sempat mewujudkan dirinya dalam berbagai negara-bagian, yang langsung ataupun tidak, didukung oleh kekuatan militer Belanda. Tetapi untuk berapa lamakah struktur kenegaraan seperti ini bisa bertahan?

Ketika Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Mohammad Hatta, menerima "*souvereniteit overdracht*", yang biasa diterjemahkan Presiden Sukarno sebagai "*pengakuan* kedaulatan", bukan "*penyerahan kedaulatan*", dari Ratu Juliana pada tanggal 27 Desember 1949, seluruh wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua) kembali berada dalam sebuah kesatuan kekuasaan. Tetapi dinamika selanjutnya dengan begitu saja melampuai apa yang telah disetujui bersama itu. Ombak dan gelombang dalam lautan perjuangan kemerdekaan tidak berhenti begitu saja. Pantai kemerdekaan yang sesungguhnya terasa masih menunggu.

Maka satu persatu apa yang disebut "negara bagian" itu bergabung dengan Republik Indonesia, yang beribukota di Yogyakarta, atau membubarkan dirinya. Pada bulan April 1950 hanya tinggal tiga "negara bagian" dari R.I.S., yaitu Republik Indonesia (dengan ibukota Yogyakarta, dan akting Presiden Mr. Assat), Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur, yang resmi masih berdiri. Akhirnya, setelah parlemen RIS menerima "mosi integral Mohammad Natsir", maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan. Begitulah babak pertama—sebuah babakan sejarah yang dramatis—dalam usaha mengayuh biduk kemerdekaan telah dilalui.

Tetapi biarlah ingatan dan cacatan sejarah selanjutnya berkisah dan memberikan kesadaran baru tentang ombak dan gelombang lain yang menghadang jalan ke arah terwujudnya cita-cita luhur yang sedemikian indah dirumuskan oleh Pembukaan UUD.

BAB I
KONSOLIDASI DAN PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Restu Gunawan

Menurut mitologi Jepang, Kaisar dipercaya sebagai keturunan Ameterasu Omikani, dewa matahari. Amaterasu memiliki seorang cucu bernama Ninigi, yang ditugasi turun ke bumi dan menanam padi serta memberikan tiga benda miliknya, yakni pedang Kusanagi, cermin Yata-no-kagami dan permata Yasanaki no Magatama. Ninigi adalah kakek buyut kaisar pertama Jepang, Kaisar Jimmu. Mengingat kaisar Jepang adalah keturunan dewa Matahari, maka tidak sembarang orang bisa bertemu dan berjabat tangan dengan kaisar Jepang. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang dianggap teman yang bisa berjabat tangan dengan kaisar. Itulah kepercayaan yang beredar di masyarakat Jepang.

Hal itu pula yang terjadi pada tiga tokoh Indonesia yang dipanggil menghadap kaisar pada awal November 1943. Ki Bagus Hadikusumo, Sukarno dan Moh. Hatta diberi kesempatan menghadap Kaisar Tenno Haika. Dalam kesempatan itu kaisar menganugerahi Bintang Ratna Suci. Sukarno memperoleh Bintang Ratna Suci kelas II, sedangkan Moh Hatta dan Ki Bagus Hadikusuma mendapat Bintang Ratna Suci kelas III. Dalam pertemuan dengan kaisar Agung tersebut, ada sesuatu yang banyak menarik perhatian publik, termasuk Kempeitai di Indonesia. Tenno Haika bersalaman dengan ketiga tokoh tersebut. Dengan cara demikian, ketiga tokoh tersebut dianggap sebagai tamu asing yang dihormati, tidak dianggap sebagai anak buah sendiri. Hal itu diterjemahkan oleh Shimizu sebagai penanda bahwa Jepang tidak akan menjajah Jawa, melainkan akan memerdekakan dan mengusir imperialis Belanda. Dengan pemberian anugerah Bintang Ratna Suci, maka Kempeitai tidak bisa menangkap dan menyakitinya karena sudah dianggap sebagai keluarga istana. Itulah pertemuan pertama tokoh-

tokoh Indonesia dengan pembesar Jepang di Tokyo pada masa awal pendudukannya di Indonesia.

Pada awal September 1944, tersiar kabar di berbagai media janji Perdana Menteri Jepang, Koiso, bahwa Indonesia akan dimerdekakan 'kelak di kemudian hari'. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang baru saja berada di bawah pendudukan Jepang, janji tersebut sangat menggembirakan rakyat. Bagi Sukarno, Deklarasi Koiso merupakan cahaya di ujung terowongan. Sesudah deklarasi Koiso, kesempatan berpolitik menjadi lebih terbuka dan berbagai kekuatan mulai menjalankan siasat muslihat terhadap satu sama lain.[1] Untuk itu, di berbagai kota besar diadakan persiapan-persiapan. Di Jakarta diselenggarakan rapat umum untuk menyambutnya. Sukarno dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai lainnya berpidato di lapangan Ikada. Sejalan dengan pengumuman itu, di Jawa terdapat banyak perubahan. Lagu 'Indonesia Raya' diizinkan dinyanyikan, bendera Merah Putih boleh dikibarkan bersama-sama dengan Hinomaru. Selanjutnya pada Desember 1944 diangkat beberapa orang Indonesia menjadi *sanyo*—sejajar dengan wakil—di tiap-tiap departemen. Jabatan ini diadakan sebagai latihan jika kelak diangkat menjadi menteri apabila Indonesia merdeka. Pada bulan Mei 1945 dibentuk suatu panitia bernama *Docuritsu Tjunby Tiosokai* atau lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga tersebut beranggotakan 60 orang di bawah pimpinan dr. Radjiman Wediodiningrat.

Setelah kepengurusan terbentuk, berbagai langkah persiapan, termasuk rapat-rapat anggota, segara diadakan. Sidang pertama diselenggarakan tanggal 29 Mei 1945, yang dibuka dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidatonya, dia mengangkat satu pertanyaan penting, apa dasar negara yang akan kita bentuk ini? Sebagian besar anggota tidak bersedia menjawab, karena khawatir akan membawa pertikaian filosofis yang berpanjangan.Diskusi mengenai dasar negara baru dilaksanakan pada sidang keempat, pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno saat itu berpidato panjang lebar, sekitar satu jam, yang berpokok pada lima dasar dalam bernegara. Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan yang riuh. Sebelum sidang hari itu, dr. Radjiman Wediodiningrat mengangkat suatu panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Sukarno. Mereka adalah Ir. Sukarno, Drs. Moh Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. A Maramis, R



Ir. Sukarno sedang berpidato pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945 *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Oto Iskandardinata, Mas Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Wachid Hasjim.[2] Sukarno mengusulkan lima sila sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Apabila diperas menjadi Tri sila, Sukarno mengusulkan *socio-nationalisme, socio democratie* dan ketuhanan dan jika tidak senang dengan angka tiga maka bisa diperas menjadi Eka sila yaitu Gotong Royong[4].

Dalam pidatonya, Sukarno mengatakan bahwa lima sila tersebut dinamakan Pancasila. Proses penamaan 'Pancasila" dimulai ketika malam 1 Juni 1945, sebelum berpidato, Sukarno bertemu dengan Muh. Yamin, Wachid Hasyim, Kahar Muzakkir, K.H. Masjkur yang kebetulan pada malam itu menginap di rumah Muh. Yamin. Pada malam itu, Sukarno meminta persetujuan atas rencana pidato tanggal 1 Juni 1945. Penamaan Pancasila menurut Sukarno berasal dari seorang temannya yang ahli bahasa. Pada tahun 1966, Sukarno mengatakan bahwa ahli bahasa tersebut adalah Muhammad Yamin yang menyumbangkan kata 'sila', sedangkan kata 'panca' berasal dari Sukarno sendiri.[5]

Berdasarkan keputusan Panitia Sembilan, teks Pancasila yang sudah dirumuskan kembali oleh BPUPUKI akan dimuat dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia. Untuk itu, Sukarno meminta Mr. Muhammad Yamin membuat suatu pembukaan (*preambule*) yang didalamnya dimuat teks Pancasila. Pembukaan yang dibuat Mr. Muhammad Yamin terlalu panjang, sehinga—masih melibatkan Muh. Yamin—Panitia Sembilan membuat teks yang lebih pendek, seperti yang terdapat pada UUD Republik Indonesia sekarang [6].

1.1. Pertemuan Dalat

Pada 18 Juli 1945, Ketua BPUPKI melaporkan hasil pekerjaan di atas kepada penguasa Jepang, Gunseikan Kaka. Dengan laporan tersebut, maka tugas BPUPKI dianggap selesai. Dan BPUPKI pada awal Agustus 1945 resmi dibubarkan. Untuk persiapan kemerdekaan, pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 mengumumkan berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi Hisaichi resmi melantik Ir. Sukarno sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakil[7]. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, dengan komposisi mewakili hampir seluruh elemen masyarakat. Sebagai penasehat ditunjuk Ahmad Subardjo. Untuk menarik simpati para pemuda, tanpa seizin Jepang, Sukarno melakukan penambahan enam anggota baru, yaitu Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Koesoema Soemantri dan Soebardjo.[8]

Perkembangan politik bergerak sangat cepat. Pada 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hisroshima yang menewaskan 78.000 orang. Dua hari kemudian Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang. Pada hari berikutnya bom atom kedua dijatuhkan Amerika Serikat di kota Nagasaki, yang disusul penyerbuan Uni Soviet ke Manchuria. Kondisi ini telah mendorong Panglima Wilayah Selatan, Jenderal Besar Terauchi Hisaichi, memanggil tiga anggota PPKI, Sukarno, Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat, untuk datang ke Markas Besar Tentara Wilayah Selatan di Dalat di Vietnam.[9]



Suasana Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

Maka pada 9 Agustus 1945, Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat ke Dalat. Dalam perjalanan tersebut, rombongan menginap semalam di Singapura dan semalam di Saigon. Dari Saigon mereka berangkat pagi-pagi sekali ke Dalat. Pertemuan dengan Terauchi dijadwalkan pukul 10.00 waktu Dalat. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan bagi seluruh Hindia Belanda, tidak termasuk Malaya dan bekas wilayah jajahan Inggris di Kalimantan. Sesudah itu, ia memberikan 'selamat' kepada Sukarno dan kawan-kawan yang kemudian diikuti stafnya. Hatta memandang pertemuan itu sangat spesial, yang menggangapnya sebagai hadiah ulang tahun untuknya, yang memang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus. Dalam memoarnya Hatta mengatakan: 'dalam hati kecilku aku menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah jasaku sekian lamanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia'.[10]



Suasana Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

Pada waktu itu Sukarno bertanya kepada Jenderal Terauchi, kapan putusan Tokyo tentang Indonesia merdeka dapat diumumkan kepada rakyat Indonesia. Jenderal Terauchi menjawab, 'terserah kepada tuan-tuan panitia persiapan, kapan saja dapat, itu sudah menjadi urusan tuan.' Setelah pertemuan selesai, pada pukul 12.00 mereka meninggalkan Dalat dan terbang kembali ke Saigon. Esok harinya, rombongan terbang ke Singapura, dan setelah menginap semalam mereka terbang ke Jakarta. Sesampai di Kemayoran, mereka disambut ribuan orang yang ingin mendengarkan sambutan dari Sukarno. Saat itu Sukarno hanya berkata singkat: 'apabila dulu aku katakan bahwa Indonesia akan merdeka sesudah jagung berbuah, sekarang dapat dikatakan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan dan bersorak 'Indonesia merdeka"[11].

Moh Hatta segara kedatangan Sutan Syahrir sesampainya di rumah. Dia menanyakan hasil kepergiannya ke Dalat dan menyampaikan berita dari radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Untuk itu, Syahrir menyarankan agar segera dibuat pernyataan kemerdekaan secepatnya, dan dilakukan oleh Sukarno mewakili rakyat Indonesia melalui corong radio. Menurut Syahrir, jika dilakukan Sukarno selaku

ketua PPKI, khawatir Indonesia merdeka dianggap oleh Sekutu sebagai buatan Jepang. Setelah Hatta dan Syahrir bertukar pikiran, mereka sepakat untuk membicarakannya dengan Sukarno di rumahnya. Sesampainya di rumah Sukarno, Syahrir menyampaikan gagasannya tentang pernyataan kemerdekaan. Namun, Sukarno tidak setuju. Menurutnya, dan juga Hatta, dia tidak berhak bertindak sendiri, karena hal itu adalah tugas panitia PPKI. Sangat janggal ketika kesempatan terbuka untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia, Sukarno bertindak sendiri melewati PPKI.[12]

Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo pergi ke Gunseikanbu tetapi tidak ada seorang pun pejabat di sana, sehingga mereka pergi mencari informasi kepada Rear Admiral Maeda. Dalam pertemuan tersebut Sukarno menanyakan apakah benar Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Namun, ia tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Maeda, karena belum mendapat perintah langsung dari Tokyo. Setelah itu, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Hatta mengusulkan kepada Sukarno supaya pada tanggal 16 Agustus 1945, anggota PPKI yang seluruhnya masih menginap di Hotel Des Indes untuk mengadakan rapat pada jam 10.00 di kantor dewan Sanyo Kaigi di Pejambon[13].

1.2. Aksi dan Reaksi Pemuda

Sore hari tanggal 15 Agustus 1945, Soebadio Sastrosatomo dan Soebianto mendatangi rumah Hatta. Keduanya mengabarkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Mereka juga mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diumumkan oleh Sukarno sendiri melalui corong radio dan disiarkan ke seluruh penjuru. Seperti halnya Syahrir, mereka juga keberatan jika yang mengumumkan kemerdekaan adalah PPKI karena itu buatan Jepang. Menanggapi hal itu, Hatta mengatakan bahwa dalam pertemuan di Dalat, Jenderal Terauchi mengakui kemerdekaan Indonesia dan akan diumumkan tanggal 16 Agustus 1945 jam 10.00 oleh PPKI. Pemuda tersebut menolak pernyataan Hatta, sehingga terjadi perdebatan hampir setengah jam tapi tidak menghasilkan kata sepakat. Pertemuan bubar dengan sendirinya.

Di tempat berbeda, tapi di tanggal dan waktu yang sama—sore hari 16 Agustus 1945—para pemuda mempunyai rencana lain. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di Kebun Jarak di belakang

Laboratorium Bakteriologi Pegangsaan Timur 16. Peserta yang hadir adalah Darwis, Johar Nur, Subadio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar Lubis, Eri Sudewo, Wahidin, Karimudin, Suroto Kunto, Pardjono, Wikana dan Armansyah datang menyusul. Pertemuan tersebut merundingkan bagaimana menghadapi Sukarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas kehendak rakyat, tanpa ikatan apapun dengan Jepang. Para pemuda akhirnya sepakat untuk berangkat ke Pegangsaan Timur 56. Kelompok pemuda yang lain, Chairul Saleh dan kawan-kawan, pergi ke Menteng Raya 31 untuk menemui Sukarno dan beberapa perwira Peta.

Malam harinya (sekitar pukul 21.30), ketika Hatta sedang mengetik naskah pernyataan kemerdekaan yang akan dibagikan kepada anggota PPKI besok pagi, datang Mr. Subardjo dan mengajak pergi ke rumah Sukarno. Atas desakan para pemuda, yang mulai berkuruman di kediaman Sukarno, Mr. Subardjo meminta pernyataan kemerdekaan disuarakan malam itu juga melalui corong radio. Mengapa para pemuda bersikukuh agar kemerdekaan Indonesia diumumkan segera? karena mereka tidak mau Indonesia merdeka dicap buatan Jepang. Mereka mau Indonesia merdeka buatan Indonesia sendiri, sehingga malam itu juga Sukarno atas nama pemimpin rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum pukul 24.00. Namun Sukarno dengan tegas menolak gagasan itu, begitu juga Hatta. Dalam perdebatan malam itu Wikana mengatakan:

> "Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besuk pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah. Mendengar ancaman itu, Sukarno naik darah, menuju ke Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, "Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besuk". Wikana rupanya terperanjat melihat sambutan Sukarno yang tidak disangkanya lalu berkata, "maksud kami bukan membunuh bung, melainkan kami mau memperingatkan apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besuk rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai yang dianggap pro-Belanda seperti orang-orang Ambon dan lain-lain".[14]

Dalam suasana hening yang mencekam, Sukarno memulai percakapan bahwa dalam suatu peperangan dan revolusi dibutuhkan waktu yang tepat. Di Saigon Sukarno sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini akan diselesaikan tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Tidak lebih baik tanggal 16? tanya Sukarni. Sukarno mengatakan bahwa ia percaya mistik, yang tidak bisa diterangkan secara akal, mengapa ia memilih tanggal 17. Namun, menurut perasaan Sukarno, dua hari lagi adalah hari terbaik, karena tujuh belas adalah angka suci dan keramat. Dalam bulan suci ramadhan, tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Jumat Legi, Jumat yang manis dan suci. Al-quran diturunkan tanggal 17, orang Islam menjalankan sembahyang sehari 17 rakaat, karena itu 17 bukanlah buatan manusia. Untuk itu, Sukarno merencanakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, setelah itu revolusi akan mengikuti.[15]

Meski demikian, pertemuan itu juga tidak menghasilkan kata sepakat. Para pemuda tidak merasa puas dengan kondisi itu. Mereka mempunyai cara lain untuk memaksa Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Wikana bersama Darwis melaporkan hasil pertemuannya kepada kawan-kawan yang sudah menunggu di Cikini 71. Di ruang belakang Baperpi ada Chaerul Saleh, dokter Muwardi, Johar Nur dan beberapa pemuda lain. Dalam laporannya mereka mengatakan bahwa Sukarno dan Hatta tidak dapat diyakinkan dengan gertakan Wikana, malahan mereka berdua diusir secara kasar dari Pegangsaan Timur 56. Dalam suasana tegang tersebut, Johan Nur dengan tegas mengatakan 'angkat saja!' Namun tidak tahu bagaimana menjalankannya. Perdebatan di antara pemuda terjadi. Namun, sebelum pertemuan di Cikini 71 berakhir, datang Sukarni dan dengan berbisik-bisik—yang merupakan ciri khasnya—menyampaikan sesuatu kepada Chaerul Saleh. Apa yang dikatakan tidak ada yang tahu. Sebelumnya di Menteng 31 Chaerul Saleh dan Sukarni serta beberapa perwira Peta telah berunding, tentang sesuatu yang dilakukan jika Sukarno dan Hatta menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya rapat di Cikini 71 bubar begitu saja.[16]

1.3. Sukarno dan Hatta Diculik

Sejumah pendapat dan bahkan perdebatan berkembang terkait peristiwa tanggal 16 Agustus 1945, ketika Sukarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Setidaknya ada dua pendapat. Satu pendapat

mengatakan bahwa Sukarno dan Hatta diselamatkan dengan cara dijauhkan dari Jakarta agar tidak dipengaruhi pimpinan militer dan pemerintahan Jepang. Hal ini diungkap Latief Hendraningrat[17] dan para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok, seperti Sukani dan Chaerul Saleh. Pendapat kedua, yang berkembang luas di tengah masyarakat, mengatakan bahwa Sukarno dan Hatta diculik para pemuda. Untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi, kita ikuti rentetan cerita sebelum peristiwa tanggal 16 Agustus 1945 terjadi pada diri Sukarno dan Hatta.

Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni, Singgih, dan Jusuf Kunto mengunjungi rumah Bung Hatta di jalan Diponegoro. Saat itu Ketika Bung Hatta sedang sahur. Sukarni dan kawan-kawannya menunggu di luar. Selang beberapa lama, Hatta keluar menemui para pemuda. Sukarni mengatakan bahwa pada pukul 12.00 tengah hari akan ada 15.000 rakyat yang akan menyerbu ke kota. Bersama-sama pemuda, mahasiswa dan Peta akan melucuti tentara Jepang. Untuk menghindari suasana itu, maka Sukarno dan Hatta akan dibawa ke luar Jakarta.

Menghadapi kondisi tersebut, Bung Hatta berusaha menjelaskan bahwa yang dilakukan pemuda tersebut hanyalah fantasi belaka, dan para pemuda akan berbenturan dengan kekuatan Jepang yang masih lengkap di Jawa. Namun, Sukarni mengatakan bahwa keputusan para pemuda sudah bulat dan tidak dapat dipersoalkan lagi, dan memaksa Bung Hatta untuk ikut mereka. Setelah meninggalkan beberapa pesan kepada adik dan dua kemenakan yang tinggal bersamanya, dengan terpaksa Bung Hatta ikut kehendak para pemuda tersebut. Rombongan segera menuju rumah Bung Karno.

Hal berbeda terjadi di rumah Bung Karno. Pagi dini hari sekitar pukul 03.00, Bung karno masih bangun karena tidak bisa tidur. Ketika sedang duduk sendiri di ruang makan sambil menunggu waktu sahur, terdengar suara dari balik semak-semak dan serombongan pemuda berpakaian seragam masuk secara diam-diam. Dalam waktu sekejap mereka sudah berhadapan dengan Sukarno.

> Dengan lagak seorang petualang sejati Sukarni mencabut pisaunya dan menghardik, bersiaplah Bung... waktunya sudah tiba. Ya! aku menjawab, mataku menyala marah. Sudah tiba

> waktunya bagiku untuk dibunuh! Jika aku yang memimpin pemberontakanmu ini dan gagal, kepalaku akan dipenggal. Engkau pun juga.... Begitu pun yang lain-lain. Mereka mati ada gantinya, pemimpin tidak. Kalau aku mati menurutmu siapa yang akan memimpin rakyat, bila datang waktunya nanti? Muncul pemuda yang lain sambil mengayunkan pedang Jepang. Itulah sebabnya kami akan melarikan Bung ke luar kota di malam buta ini. Sudah diputuskan untuk memindahkan Bung demi keamanan... Sekarang ini saatnya, lagi-lagi mereka mendesak dengan tidak sabar. Sekarang! Sekarang selagi moral orang-orang Jepang sedang merosot dan semangat mereka hancur. Sekarang mereka dalam keadaan putus asa. Sekarang kita harus angkat senjata[18].

Itulah drama penculikan di rumah Bung Hatta dan Bung Karno. Pukul 04.30 saat Subuh, Bung Karno, Bung Hatta, Fatmawati dan Guntur yang baru berumur 9 bulan didampingi Sukarni dan Winoto Danuasmoro yang ada di belakang kemudi, meluncur ke arah pinggiran kota. Sampai di Cipinang mereka berhenti, Bung Karno dan Bung Hatta diminta mengenakan seragam Peta. Dalam perjalanan ketika sampai di Krawang, mobil berhenti dan rombongan disuruh ganti mobil *pick up*, dengan alasan bahwa mobil sedan terlalu besar untuk jalan ke Rengasdengklok. Itu ternyata hanya siasat belaka, agar sopir pertama tidak tahu, kemana rombongan Sukarno dan Hatta pergi, sehingga memutus mata rantai informasi.[19]

Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 08.10 waktu Tokyo, sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia, Syodanco Singgih dari Daidan Jakarta memasuki halaman rumah Cudanco Subeno. Rombongan Sukarno dan Hatta dipersilakan tinggal di rumah keluarga Tionghoa yang bernama I Song. Untuk itu keluarga I Song tidak diperkenankan meninggalkan rumah dan dilarang memberitahukan kepada siapa pun tentang kedatangan tamu-tamu tersebut.

Mengenai pemilihan Rengasdengklok, menurut Oemar Bahsan dalam bukunya *Peta dan Peristiwa Rengasdengklok*, ada beberapa alasan. Pertama, dikatakan bahwa Rengasdengklok merupakan basis pasukan Peta di bawah pimpinan Cudanco Subeno. Rengasdengklok adalah daerah belakang sebelah timur Jakarta sehingga baik sekali

untuk dijadikan pangkalan mundur. Kedua, tempat ini tepat sekali untuk langkah awal penyerangan atau terobosan dengan jalan kaki ke Jakarta. Ketiga, Rengasdengklok dan Cilamaya sudah dalam posisi mengancam terhadap keberadaan Jepang di Cikampek, dan keempat pos-pos Peta yang tersebar di Tanjungpura, Karawang, Cilamaya, Sungai Batu, Cabangbungin, Pedes dan Rengasdengklok sewaktu-waktu terjadi pemberontakan secara otomatis sudah siap sebagai pos-pos yang berfungsi sebagai alat propaganda yang menyebar ke seluruh wilayah di sekitarnya dengan jumlah penduduk hampir setengah juta orang. Hal ini diperkuat juga oleh Suyono Hadiprojo dalam buku *Baperki* yang menyatakan bahwa pemilihan Rengasdengklok dikarenakan letaknya yang tidak jauh dari Jakarta dan di pelosok agak jauh dari jalan raya Jakarta-Cikampek- Cirebon.[20]

1.4. Ahmad Subardjo Mencari Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok

Desas desus hilangnya Sukarno dan Hatta didengar oleh kempetai Jepang. Sehubungan dengan itu, beberapa orang bahkan telah ditangkap, di antaranya Muhammad Yamin dan Syarief Thayib. Mereka dianggap tahu kelompok mana yang telah menculik Sukarno dan Hatta.[21]

Kebenaran berita hilangnya Sukarno-Hatta semakin kuat ketika Soediro melaporkan kepada Ahmad Soebarjo, sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 16 Agustus 1945, bahwa para pemuda telah menculik Sukarno dan Hatta, seraya mengatakan bahwa para pemuda saat ini sedang mengadakan rapat di kantor Jalan Prapatan, yang juga dihadiri Wikana. Berita tersebut sangat mengejutkan Ahmad Soebardjo, karena pada pagi itu direncanakan ada rapat PPKI. Atas bantuan Nishizima, Ahmad Subarjo segera menghubungi penguasa Angkatan Laut Jepang, dengan asumsi jika yang menculik kedua pemimpin tersebut angkatan Darat Jepang, maka dengan campur tangan angkatan Laut Jepang akan sangat dibutuhkan untuk dapat membebaskannya. Selanjutnya, ia juga menghubungi Laksamana Maeda. Mendengar laporan Ahmad Subardjo, Maeda juga sangat terkejut. Maeda berjanji dengan caranya sendiri akan berusaha mencari Sukarno-Hatta. Setelah itu Ahmad Subarjo, sekitar pukul 10.00 pagi meneruskan pencarian menuju Prapatan Gambir No. 59 untuk menemui Wikana dan kawan-kawan. Setelah bertemu dengan Wikana, Ahmad Subardjo berkata:

"apa yang telah kamu perbuat terhadap Sukarno dan Hatta?

Wikana: Hal itu merupakan keputusan kami dalam pertemuan semalam, untuk keselamatan mereka kami bawa ke suatu tempat di luar Jakarta.

Ahmad Subardjo: apakah akibat dari tindakan tersebut telah kamu pikirkan?

Wikana: putusan itu bukan keputusan pribadi saya, tetapi merupakan keputusan dari semua golongan pemuda. Tugas saja ialah membujuk Sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam kemarin dan kembali melaporkannya

Ahmad Subardjo: Sambil menatap dalam-dalam. Begini Wikana kita sudah lama bekerja sama dan saya kira tidak ada alasan bagimu untuk merahasiakan terhadapku tempat mereka disembunyikan.

Wikana terdiam sebentar, ia rupanya dalam keadaan ragu-ragu, dan akhirnya dia berkata: apakah boleh saya merundingkannya dulu dengan yang lain-lain, saya akan kembali segera.

Setelah itu, Wikana muncul dengan seorang pemuda bernama Pandu Kartawiguna, seorang pemuda yang bekerja di kantor *Domei* bersama-sama dengan Adam Malik. Dalam pertemuan tersebut, Pandu menyampaikan bahwa dia belum bisa menyampaikan berita tersebut saat itu, karena PETA merahasiakan tempat tersebut. Para pemuda sedang menunggu kabar dari seseorang pemuda lain. Meskipun kecewa, Ahmad Subardjo berusaha bersabar dan memahami situasi. Setelah itu Wikana pergi, tidak diketahui ke mana, tapi sekitar pukul 14.30 sudah kembali. Setelah itu datang pula Nishizima, yang mengatakan bahwa ia telah berbincang panjang lebar dengan Wikana di Asrama Indonesia Merdeka di Gunung Sahari. Salah satu yang terpenting dalam perbincangan tersebut adalah bahwa Angkatan Laut Jepang menjamin pelaksanaan proklamasi.[22]

Dalam suasana itu, Jusuf Kunto muncul di hadapan Ahmad Subardjo, Pandu dan Wikana. Jusuf menerangkan bahwa Sukarno dan Hatta diculik karena adanya kekhawatiran bahwa mereka akan dibunuh

oleh Angkatan Darat Jepang. Jadi, alasan keselamatan mendasari tindakan para pemuda tersebut. Selain itu, ada desas-desus bahwa PETA akan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Mendengar pembicaraan Kunto, Ahmad Subardjo mengatakan bahwa jika atas dasar keselamatan, maka Ahmad Subarjo bisa menjamin bahwa jika ada kesulitan dengan Angkatan Darat Jepang ia bisa minta bantuan Angkatan Laut Jepang. Karena itu, dia meminta beritahu di mana Sukarno-Hatta disembunyikan. Dia berkata, "saya akan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta, sehingga kita segera dapat memulai dengan proklamasi kemerdekaan. Saya sepenuhnya bertanggung jawab"[23]

Rupanya para pemuda berubah pikiran setelah mendapat jaminan dari Subardjo. Untuk itu, Kunto menemani Subardjo menjemput Sukarno-Hatta di luar kota. Subarjo mengajak Sudiro bersama-sama pergi. Sementara itu Nizhisima yang menunggu di luar pembicaraan tersebut berharap dengan cemas kondisi Sukarno-Hatta dan menawarkan untuk ikut menjemput, tetapi ditolak oleh Subardjo. Pukul 16.00 sore, dengan mobil Skoda yang bannya sudah mulai licin, Subarjo, Sudiro, Kunto dan sopir berangkat ke luar kota. Dalam perjalanan Ahmad Subardjo tidak menanyakan kemana mereka akan pergi. Dalam pikiran Subarjo, ia mengira Sukarno-Hatta di bawa ke Sukabumi kawasan Selabintana.

Selama perjalanan, mereka semua diam, hanya Kunto dan sopir yang berbicara dengan bahasa kode mereka. Mendekati Rengasdengklok, ban mobil bocor, sehingga harus diganti. Ahmad Subardjo akhirnya tiba di Rengasdengklok pukul 18.00. Setelah itu mereka istirahat sebentar di pendopo wedana, tidak jauh dari asrama PETA. Setelah menunggu beberapa lama, Kunto muncul kembali bersama Sukarni.[24] Setelah itu mereka bersama-sama ke asrama PETA. Dalam sebuah kamar kecil duduk Ahmad Subarjo, Sudiro, Sukarni, dan Kunto. Mereka bertemu dengan Mayor Subeno (PETA). Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi yang sangat menarik:

> Mayor Subeno: "apa maksud kedatangan saudara? Ia bertanya dengan nada sungguh-sungguh.
>
> Ahmad Subarjo: Kami datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dan membawa mereka kembali ke Jakarta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan.

Mayor Subeno: Bisakah saudara mengatakan pada kami apakah Jepang sudah menyerang?

Ahmad Subarjo: Kami justru datang untuk memberitahukan penyerahan Jepang kepada Sukarno dan Hatta

Mayor Subeno: Apakah saudara datang atas nama Kaigun?

Ahmad Subarjo: Tidak, tidak sama sekali. Bung Diro dan saya datang kemari dengan persetujuan penuh Wikana dari kelompok Kaigun dan teman-teman lainnya. Mereka setuju untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta dengan syarat bahwa keselamatan mereka berdua dan para pemuda dapat dijamin. Mereka pun telah menerima jaminan bahwa saya sepenuhnya bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya proklamasi.

Mayor Subeno: Apakah saudara bisa memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam.

Ahmad Subarjo: Tidak mungkin, jawab saya dengan cepat. Sekarang telah kurang lebih jam 08.00, kami harus kembali dahulu, kemudian memanggil para anggota panitia persiapan untuk suatu sidang kilat. Hal ini memerlukan banyak waktu. Saya khawatir bahwa kami harus bekerja semalam suntuk sebelum kami siap.

Mayor Subeno: Bagaimana kalau jam 06.00 pagi besuk? Mayor mendesak.

Ahmad Subarjo: Saya akan berusaha sedapat-dapatnya, kami mungkin bisa selesai pukul 06.00 tetapi menjelang tengah hari besok. Kami pasti telah siap.

Mayor Subeno: Jika tidak bagaimana? Komandan itu bertanya lagi.

Ahmad Subarjo: Mayor jika segala sesuatunya gagal, sayalah yang memikul tanggung jawabnya dan Mayor boleh tembak mati saya! Saya tegaskan secara spontan. Naluri saya berkata bahwa itulah jaminan satu-satunya yang dapat dimengerti seorang tentara Mayor Subeno, rupanya puas dengan jawaban tersebut"[25]

Setelah puas dengan jawaban itu, Ahmad Subardjo dan kawan-kawan, diizinkan pergi menjemput Sukarno dan Hatta. Melihat kedatangan Ahmad Subarjo, Sukarno-Hatta terkejut. Dalam pertemuan tersebut, segera Subarjo memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah dan mengajak Sukarno-Hatta segera kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 21.00 mereka kembali ke Jakarta. Ada tiga mobil yang berangkat bersama-sama ke Jakarta.[26]

Ketika menjemput Sukarno-Hatta, di markas tersebut terdapat juga Sutarjo Hadikusumo. Ia pada zaman Belanda pernah menyampaikan petisi Sutardjo. Oleh pemerintah pendudukan Jepang ia diangkat sebagai Gubernur Jakarta. Ia datang ke Rengasdengklok untuk memeriksa panen padi. Ia kemudian ditangkap oleh puteranya sendiri dari kesatuan PETA dan membawanya ke markas PETA.

Rombongan tiba ke di Jakarta sekitar pukul 11.00 malam. Sepulang dari Rengasdengklok, Hatta mendapat telepon dari Miyoshi, seorang penerjemah yang mengatakan bahwa apakah Hatta dan Sukarno bisa bertemu dengan Sumobuco Mayor Jenderal Nishimura. Pada sekitar pukul 22.00 Sukarno-Hatta bertemu di rumah Admiral Maeda. Pada kesempatan tersebut Sukarno menyampaikan ucapan terima kasih karena rumahnya diizinkan untuk digunakan rapat PPKI, yang dijawab Maeda bahwa itu sudah menjadi kewajibannya karena mencintai Indonesia. Setelah setengah jam berkumpul, mereka berangkat bersama ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai dengan Miyoshi sebagai juru bicara dan Maeda. Dalam pertemuan dengan Nishimura, Sukarno menyampaikan akan melanjutkan rapat PPKI sebagai persiapan untuk kemerdekaan. Namun, Nishimura menjawab bahwa dia tidak bisa membantu lagi, karena sejak pukul 13.00 siang Jepang harus mempertahankan *status quo*, dan segala perubahan keadaan harus seizin Sekutu. Mendengar hal itu Sukarno-Hatta marah.

> "Sekarang seluruh rakyat Indonesia sudah tahu Jepang menyerah kepada Sekutu dan mereka tidak lupa bahwa Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kalau Jepang tidak mampu lagi menepati janjinya, rakyat Indonesia sendiri akan memerdekakan dirinya. Semangat rakyat yang bergelora sekarang akan diperhatikan oleh Sekutu kecuali Belanda. Sebab itu Jepang tidak perlu lagi menolong kami. Kami minta jangan kami dihalang-halangi. Rakyat Indonesia dengan pemuda di muka bersedia mati untuk melaksanakan cita-cita Indonesia Merdeka".[27]

Setelah berdebat selama hampir dua jam dan tidak menghasilkan kata sepakat, maka Sukarno-Hatta meninggalkan rumah Nishimura dan menuju ke rumah Maeda yang sudah lebih dahulu pulang. [28]

1.5. Perumusan Teks Proklamasi

Mengenai perumusan teks proklamasi ada beberapa sumber wawancara dari tokoh-tokoh Jepang yang dapat digunakan. Karena pandangan dari luar sangat penting meskipun kadang-kadang sedikit bertentangan dengan tokoh-tokoh Indonesia. berdasarkan kesaksian Hatta yang ditulis dalam *Memoar Hatta* dapat diringkaskan sebagai berikut.

Sepulang dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda. Di rumah tersebut sudah ada seluruh anggota PPKI, Miyoshi dan juga Maeda. Sementara di luar banyak pemuda menonton dan menunggu hasil pembicaraan. Setelah duduk sebentar dan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Nishimura, Sukarno, Hatta, Sayuti Melik, Subardjo, dan Sukarni mengundurkan diri ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat dengan maksud membuat sebuah teks ringkas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka semua tidak ada yang membawa teks proklamasi yang telah dibuat tanggal 22 Juni 1945. Sukarno berkata, aku persilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas karena bahasanya yang terbaik. Sesudah dibahas dan disetujui bersama, teks tersebut akan dibawa ke sidang PPKI. Bung Hatta berkata 'apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktenya. Sukarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang terdiri dari dua ayat, yang diambil dari akhir alinea ketiga rencana Pembukaan UUD mengenai Proklamasi, lalu kalimat pertama menjadi: 'kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia'. Hatta menilai kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk itu harus ada komplemennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan revolusi nasional. Setelah itu Bung Hatta mendiktekan kalimat berikutnya: 'hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya'. Teks itu kemudian disetujui mereka berlima.



Foto Rumah Laksamana Maeda, tempat Perumusan Naskah Proklamasi (gambar kiri). Rumah Laksamana Maeda sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi (gambar kanan) - *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

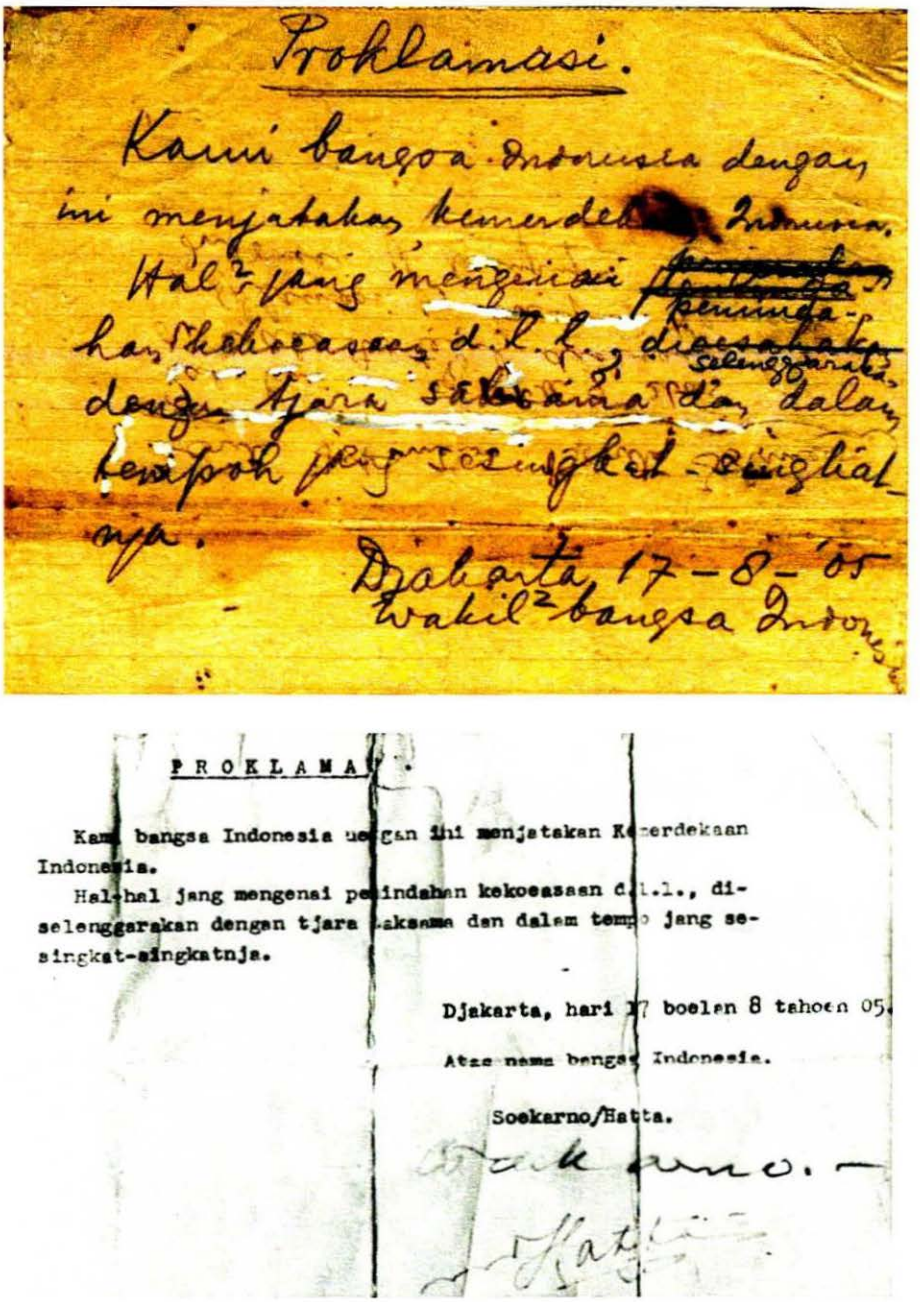
Setelah selesai, mereka berlima pergi ke ruang tengah dan bertemu dengan seluruh anggota PPKI dan juga pemimpin pemuda dan anggota BPUPKI yang berada di Jakarta. Sukarno mulai membuka sidang dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan menanyakan apakah para hadirin setuju. Setelah pembacaan itu, ternyata masih timbul perdebatan hangat lagi. Sukarnilah yang memulainya. Menurutnya, teks itu terlalu lemah dan lembek, karena tidak menegaskan tekad yang kuat untuk melemparkan kekuasaan Jepang. Namun anggota PPKI tidak setuju dengan usulan Sukarni, sehingga draft rumusan teks proklamasi yang dibacakan Sukarno disetujui semua yang hadir.

Karena semua sudah setuju, maka Bung Karno menanyakan siapa saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani seluruh hadirin yang hadir. Hatta beralasan bahwa semua yang memutuskan ikut menandatangani, seperti pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat, sehingga bisa diketahui oleh generasi berikutnya siapa yang memerdekaan bangsa Indonesia. Mendengar usulan Hatta tersebut, peserta sidang terdiam sejenak. Dalam suasana itu Sukarni yang berdiri di samping Subardjo berbisik, "Bung apa secarik kertas dari teman-teman di jalan Bogor Lama sudah diberikan kepada Bung Karno?' Subardjo terkejut dan menjawab lupa.

Sukarno menyarankan supaya proklamasi ditandatangani dengan kata-kata "wakil-wakil bangsa Indonesia". Menurut dugaan Subardjo, yang dimaksud wakil-wakil rakyat adalah anggota PPKI, ditambah para pemuda yang hadir saat itu, khususnya kelompok Sukarni. Sukarni segara maju dengan kata-kata lantang yang menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Dia tidak rela kelompoknya dideretkan senapas dengan para anggota PPKI dan para pemuda yang tidak mempunyai peran apa-apa dalam persiapan kemerdekaan dan tidak berhak menandatangani. Dalam situasi krisis

tersebut, Sayuti Melik bergerak melakukan *lobby* dan akhirnya dia membisikan kepada Sukarni, bahwa tidak ada yang keberatan jika Sukarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Dengan lantang Sukarni mengatakan, cukuplah dua orang menandatangani atas nama rakyat Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta'.[29] Hal itu didukung oleh semua peserta yang hadir.

Mengenai secarik kertas tersebut yang ditanyakan Sukarni kepada Subardjo, hal itu mempunyai kisah tersendiri. Sekitar pukul 01.00 malam tanggal 16 Agustus 1945, Subardjo diajak Sukarni dari rumah Maeda untuk menemui Sutan Syahrir di Manggarai. Sampai di Manggarai, Sutan Syahrir ternyata sudah tidak ada, sehingga mereka hanya bertemu Adam Malik, Djawoto, Chaerul Saleh, Pandu Kartawiguna dan Maruto Nitimihardjo. Ahmad Subardjo datang bersama Iwa Kusumasumantri. Dalam pertemuan tersebut, mereka memberikan secarik kertas ke Subardjo dan mengatakan kalau proklamasi ditandatangani jangan melupakan nama-nama yang tertulis dalam kertas tersebut. Subardjo buru-buru memasukkannya ke saku bajunya tanpa membacanya sedikitpun, karena yang ada dalam pikiran Subardjo adalah pertemuan di rumah Maeda.



Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdeka[illegible] Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara sebaik2nja dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil2 bangsa Indonesia

PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Soekarno.

Hatta.

Teks Proklamasi Tulisan Tangan Ir. Sukarnó (atas) dan Naskah Teks Proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik (bawah) *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Dengan disetujuinya gagasan Sukarni tersebut, maka Sukarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik bersih naskah tulisan tangan Sukarno disertai perubahan-perubahan yang telah disetujui. Dengan bantuan seorang pemuda, Sayuti Melik mengetik naskah bersih dari naskah konsep proklamasi. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah bersih tersebut, yaitu kata 'tempoh' diganti menjadi 'tempo', sedangkan 'wakil-wakil bangsa Indonesia' pada bagian akhir diganti dengan 'atas nama bangsa Indonesia'. Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yakni dari "Djakarta, 17-8-'45 menjadi 'Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05'.[30]

Sidang bersejarah tersebut berakhir pada pukul 03.00 dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu Maeda meninggalkan kamar tidurnya dan turun ke bawah beserta pembantu-pembantunya dan memberi selamat kepada seluruh yang hadir. Sementara itu Miyoshi sudah pulang terlebih dahulu. Sebelum pulang, Hatta berpesan kepada para pemuda, terutama Burhanuddin Diah, supaya memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Untuk mereka yang bekerja di kantor Domei, diminta untuk mengkawatkan berita proklamasi ke seluruh dunia yang dapat dicapai.

Menyangkut tempat penandatanganan teks proklamasi, yang dilakukan di rumah seorang pembesar Jepang, hal itu dilakukan atas anjuran dan tawaran dari Bung Karno dan Bung Hatta yang menyerahkan kepada Ahmad Subardjo untuk memilih tempatnya. Subarjo yang dekat dengan tentara Jepang mengerti bahwa seorang dari sahabatnya itu termasuk orang yang mempunyai simpati akan adanya kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda memang menyediakan rumahnya, jika Subarjo sewaktu-waktu memerlukannya. Meskipun rapat diadakan di rumah Laksamana Maeda, tetapi tidak seorang Jepang pun ikut mendengarkan dan turut serta. Menurut Adam Malik, mestinya teks proklamasi ditandatangani di Rengasdengklok, tetapi karena usul Bung Karno dan Hatta dan munculnya Mr. Subarjo, maka pengumuman proklamasi itu diundur beberapa puluh jam, sehingga ditandatangani di Jakarta, tidak di Rengasdengklok.[31]

Dalam kaitan ini, beberapa pandangan dari tokoh Jepang tersebut penting untuk dicatat di sini. Melalui wawancara dengan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Agustus 1945, dia sudah dua kali meminta kepada

Pemerintah Jepang di Tokyo agar memerdekakan Indonesia. Namun, hingga Jepang kalah, dia tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Maeda berpikir bahwa yang penting Indonesia harus memerdekakan sendiri. Untuk itu, ia tidak merintangi usaha tokoh-tokoh Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Myakodoori (Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta). Menurut Maeda, selain Angkatan Laut Jepang, Angkatan Darat Jepang di Indonesia juga setuju untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dari pendirian tersebut, menurut Maeda ada perintah tidak tertulis di antara pemimpin Jepang agar menyerahkan senjatanya sedapat mungkin kepada pejuang Indonesia, dan jika terjadi kontak senjata dengan pihak Indonesia, serdadu Jepang diminta menembakkan senjatanya ke atas. Ketika berada di penjara Glodok dan Singapura, Maeda juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya sendiri. Tidak mungkin satu orang seperti dirinya menggerakkan delapan puluh juta orang untuk menyatakan kemerdekaannya.[32]

Senada dengan itu, Shigetada Nishijima[33] mempunyai kesaksian agak berbeda dengan Hatta maupun Bung Karno. Berdasarkan wawancara Basryral Hamidy Harahap pada November 1990 di rumah Ny. Adam Malik di Jalan Diponegoro 29 Jakarta, dia berujar bahwa dirinya dan Laksamana Muda Tadashi Maeda berusaha keras menjaga nama baik Republik Indonesia, jangan sampai Belanda bisa mengecap Republik Indonesia sebagai bikinan Jepang. Belanda saat itu berusaha keras untuk mengecap Republik sebagai bikinan Jepang, karena tanggal dalam teks proklamasi ditulis '05 artinya tahun Jepang bukan '45. Meskipun ia disiksa selama empat hari berturut-turut, ia tetap tidak mengaku bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bikinan Jepang.

Shigetada Nishijima selanjutnya mencatat bahwa dalam rapat tanggal 16 Agustus malam, ketika merumuskan teks proklamasi, beberapa orang Jepang memang hadir, yakni Tuan Maeda, Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi Shukichiro dari Angkatan Darat. Sukarni, Chairul Saleh dan pemuda lain berada di luar. Mereka meminta agar teks proklamasi bernada keras, padahal menurutnya hal itu hanya akan membuat Sekutu akan memarahi Jepang. Jadi, ketika dirumuskan, ada perubahan-perubahan, seperti tentang kata 'penyerahan', dikasihkan atau diserahkan, atau perebutan yang semuanya tidak bisa diterima sehingga dipilih kata pemindahan kekuasaan, sedangkan

Sukarno sendiri menuliskan 'diselenggarakan'. Mengenai adanya anggapan bahwa pihak Indonesia tidak mau mengakui keterlibatan Jepang dalam perumusan proklamasi, Nihijima memahami perasaan pihak Indonesia bahwa proklamasi itu betul-betul peristiwa bersejarah, jadi mereka tidak mengakui bahwa orang Jepang campur tangan dalam hal ini. Hal ini pernah ia tulis bersama Koichi Kishi dalam buku berbahasa Jepang, *Indonesia Niokeru Nihon Gunsei no Kenkyu* terbit Mei 1959. Selain itu, ada saksi lain yang ikut menyaksikan peristiwa perumusan naskah proklamasi yaitu Nyonya Satsuki Mihima. Dia yang menyediakan makan sahur bagi Bung Karno dan Bung Hatta. Menurutnya, yang ikut merumuskan naskah proklamasi adalah Laksamana Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Shigetada Nishijima dan Miyoshi.[34]

Berdasarkan sumber yang tersedia, tidak ada keterlibatan orang-orang Jepang dalam perumusan teks proklamasi. Nishijima sendiri saat itu sangat letih, karena terlalu banyak minum bir. Ia kemudian naik ke atas langsung tertidur, dan baru terbangun sekitar pukul 06.00 pagi. Ketika turun ke bawah tidak bertemu dengan siapa-siapa. Kemudian ia mengendarai mobilnya ke rumahnya di Kebon Sirih 60 Jakarta dan langsung tertidur lagi hingga pukul 11.00. Saat terbangun, dia mendengar derap orang baris-berbaris. Melihat keluar rumah, ada ribuan orang dari berbagai usia dalam larikan empat berbaris seperti pasukan teratur menuju Koningsplein. Mereka membawa bambu runcing dan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nishijima heran melihat kejadian tersebut dan berusaha mencari berbagai informasi. Melalui hubungan telepon, ia mengetahui bahwa Indonesia akan diproklamasikan pada siang ini (tanggal 17 Agustus 1945) dan Sukarno akan berpidato di Koningsplein. Selain itu ia berusaha mendapatkan informasi lengkap ternyata semua kantor sudah dilumpuhkan. Baru sekitar pukul lima atau enam sore, ia mendapat keterangan bahwa rapat di Koningsplein tidak jadi tetapi dipindahkan ke rumah Sukarno di Pegangsaan dekat Stasiun Manggarai.[35]

Jadi berdasarkan keterangan Nishijima yang bertolak belakang tersebut dapat dipastikan bahwa orang-orang Jepang tidak terlibat dalam perumusan teks proklamasi dan tidak pernah menjadi saksi dalam perdebatan mengenai perumusan naskah proklamasi tersebut.

1.6. Persiapan Proklamasi di Jakarta

Menurut berbagai sumber, rencana pembacaan naskah proklamasi baru diputuskan sekitar pukul 03.00 – 04.00 dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat dari berbagai daerah di pagi harinya sudah berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada. Mengapa pula pagi itu pasukan Jepang juga sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Brosur dan pamflet juga sudah tercetak dan tersebar luas di masyarakat. Bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan?

Menurut Sudiro, pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 19.00, dia diberi tahu dr. Muwardi selaku pemimpin *Jakarta Tokubetsu shi*, bahwa esok hari Sukarno-Hatta akan mengucapkan proklamasi kemerdekaan, bertempat di Lapangan Ikada. Karena itu, Barisan Pelopor yang sudah dibentuk sejak tahun 1944, dengan anggota yang tersebar di setiap kecamatan, sudah siap di lapangan pada pukul 09.30 pagi. Setelah mendapat informasi tersebut, Sudiro segera menghubungi pimpinan Barisan Pelopor Daerah Kota Istimewa Jakarta, terutama yang berpusat di tiap-tiap kawedanan, untuk meneruskan instruksi tersebut ke kecamatan dan kelurahan. Sebagian dihubungi melalui telepon sedangkan yang tidak terjangkau dihubungi melalui sepeda. Sudiro mengendalikan instruksi tersebut dari rumahnya di Jalan Guntur 50. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, saat tiba di Lapangan Ikada, Sudiro terkejut karena sudah banyak kempetai yang berjaga-jaga. Sudiro bertanya-tanya apakah informasi proklamasi sudah bocor, sehingga dihadang Jepang. Untuk itu, Sudiro menghubungi dr. Muwardi yang tinggal di jalan Gondangdia Lama. Oleh dr. Muwardi disampaikan bahwa tempatnya berubah tidak di Ikada tetapi di Pegangsaan Timur 56. Untuk itu, semua barisan yang datang dari berbagai daerah dihadang dan langsung menuju ke rumah Bung Karno. Selain itu, Sudiro juga membuat pengumuman tertulis yang ditempel di pohon-pohon di sekitar lapangan Ikada.[36]

Bagaimana dr. Muwardi bisa mengintruksikan kepada Sudiro tentang tempat pembacaan proklamasi, menurut Bung Hatta hal itu berkaitan dengan karakter dr. Muwardi yang *impulsive*, yaitu sering mengambil keputusan-keputusan sendiri dengan cepat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sukarni. Setelah selesainya pembahasan tentang teks proklamasi, Sukarni memberitahukan bahwa rakyat sekitar kota



Pembacaan Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Jakarta sudah diserukan untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Ikada untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Namun hal itu ditolak Sukarno yang mengatakan lebih bagus di tempat kediamannya di Pegangsaan Timur, karena pekarangannya cukup luas untuk ratusan orang. "Untuk apa harus memancing-mancing insiden", kata Sukarno. Lapangan Ikada adalah lapangan umum sehingga bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Untuk itu, diputuskan bahwa pembacaan Proklamasi akan dilaksanakan di Pegangsaan Timur pada pukul 10.00 pagi[37].

1.7. Pembacaan Teks Proklamasi

Di Pegangsaan Timur No. 56, Rumah Bung Karno, pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 sudah ramai didatangi para pemuda. Pagi itu S. Suhud seorang anggota Barisan Pelopor yang menjadi komandan pengawal rumah Bung Karno, sibuk mempersiapkan upacara.



Pengibaran Bendera Merah-Putih Sesaat Setelah Pembacaan Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Sementara itu, Sudiro yang menjabat sebagai sekretaris Bung Karno, pagi itu menyuruh Barisan Pelopor untuk menyiapkan tiang untuk pengibaran bendera. Mendengar perintah itu, di antara pemuda Barisan Pelopor menyahut: "tiangnya satu atau dua". Pertanyaan tersebut dapat dimaklumi mengingat selama ini tiang bendera selalu dua yaitu untuk bendera Jepang dan merah putih. Sebenarnya di depan rumah Bung Karno sudah ada 2 tiang bendera, namun karena terburu-buru bukannya mencabut salah satu tiang tetapi Pemuda Pelopor membuat tiang bendera yang baru dari bambu yang dilubangi untuk mengerek bendera ke atas.

Setelah tiang siap, Suhud menemui ibu Fatmawati dan menanyakan apakah Ibu Fatmawati mempunyai bendera yang cukup besar. Harapan itu terkabul karena Ibu Fatmawati telah menyiapkan sehelai bendera yang dijahit dengan tangan sendiri, tetapi bahannya tidak direncanakan untuk membuat sebuah bendera melainkan untuk keperluan lain. Sudiro menyiapkan mikrofon tua untuk upacara tersebut.[38]

Di antara tokoh-tokoh yang hadir antara lain adalah dr. Buntaran Martoatmodjo, Mr. AA. Maramis, Mr. Laturharhary, Abikusno

Tjokrosuyono, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, KH. Mas Mansyur, Mr. Sartono, Sayuti Melik, dan Pandu Kartawiguna. Rakyat dari luar kota yang hadir berasal dari daerah Klender, Barisan Pelopor dan Peta. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran upacara, dr. Muwardi, komandan Barisan Pelopor Istimewa Jakarta, meminta kepada Cudanco Latief Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anggota Peta yang bersenjata lengkap menjaga keamanan bagian belakang rumah di sekitar jalan kereta api. Bagian depan ditugaskan Barisan Pelopor. Dalam kesempatan tersebut juga diatur jika ada serangan dari pihak Jepang, maka pasukan Peta segara melepaskan tembakan. Hal itu sebagai pertanda kepada Jepang bahwa rakyat sangat siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, selain untuk membangkitkan semangat tempur rakyat. Perwira Peta Arifin Abdurrachman selalu siap siaga di dekat pesawat telepon bila keadaan gawat. Ia segera minta bantuan pasukan Peta yang bertugas di asrama jaga monyet, dekat Harmoni Jakarta.[39]

Dalam suasana menunggu saat-saat yang penting tersebut, seperti biasa para pemuda tidak sabar dan gelisah menunggu pelaksanaan upacara. Sementara itu Sukarno yang ditunggu-tunggu masih berada di kamar rumahnya sedangkan Bung Hatta yang ditunggu juga belum tiba. Dalam suasana gelisah, dr. Muwardi mengusulkan bahwa walaupun belum sampai waktu yang ditentukan, pembacaan proklamasi sebaiknya segera dilaksanakan. Dengan keyakinan bahwa usulannya akan diterima Bung Karno, dr. Muwardi mengetok pintu kamar Bung Karno, dan menyampaikan usulannya agar Bung Karno segera mengucapkan proklamasi. Bung Karno menyampaikan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena Bung Hatta belum datang. Namun dr. Muwardi tidak sabar dan memaksakan agar segera dilaksanakan pidato tersebut. Akhirnya dengan nada marah Bung Karno menjawab: 'saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan baca proklamasi sendiri'.[40]

Di lain pihak, sepulangnya dari dari rumah Laksamana Maeda, Hatta tidur setelah sholat Subuh dan baru bangun sekitar pukul 08.30. Setelah mandi dan bercukur, Hatta bersiap-siap pergi ke Pegangsaan Timur 56 guna menghadiri pembacaan teks proklamasi kepada rakyat Indonesia. Kira-kira pukul 10.00 kurang 10 menit Hatta sudah tiba di

rumah Bung Karno. Tidak ada seorang pun yang gelisah menunggu kedatangan Hatta, karena semua orang sudah tahu tentang kebiasaan Hatta yang selalu tepat waktu. Sukarno pun tidak khawatir menunggu kedatangan Hatta.[41] Selain itu Mr. Ahmad Subardjo juga dihubungi untuk segera datang, tetapi karena amat lelah dan letih beliau tidak datang.

Dalam suasana perdebatan antara Bung Karno dan dr. Muwardi terdengar suara bebeberapa pemuda: "Bung Hatta datang". Beliau dengan pakaian putih-putih yang sederhana datang tepat pada waktunya 5 menit sebelum acara dimulai. Bung Hatta langsung menuju kamar Bung Karno. Melihat Bung Hatta datang, Bung Karno bangkit dari tempat tidur dan segera berganti pakaian putih-putih. Dan tiba-tiba Cudanco Latief Hendraningrat masuk ke kamar dan bertanya: "apakah Bung sudah siap?" kedua pemimpin mengangguk dan segera melangkah ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Cudanco Latief Hendraningrat memberikan aba-aba bersiap kepada Barisan Pelopor, dan setelah semua barisan berdiri tegak dalam sikap sempurna, Bung Karno dan Bung Hatta maju selangkah mendekati corong mikrofon. Bung Karno memulai pidatonya dengan pidato singkat:

"Saudara-saudara sekalian!

Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita kita. Juga di dalam jaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tugas kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat

Indonesia. permusyawarahan itu seia sekata sependapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara!

Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kita.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta hari 17 bulan 8 tahun '05.

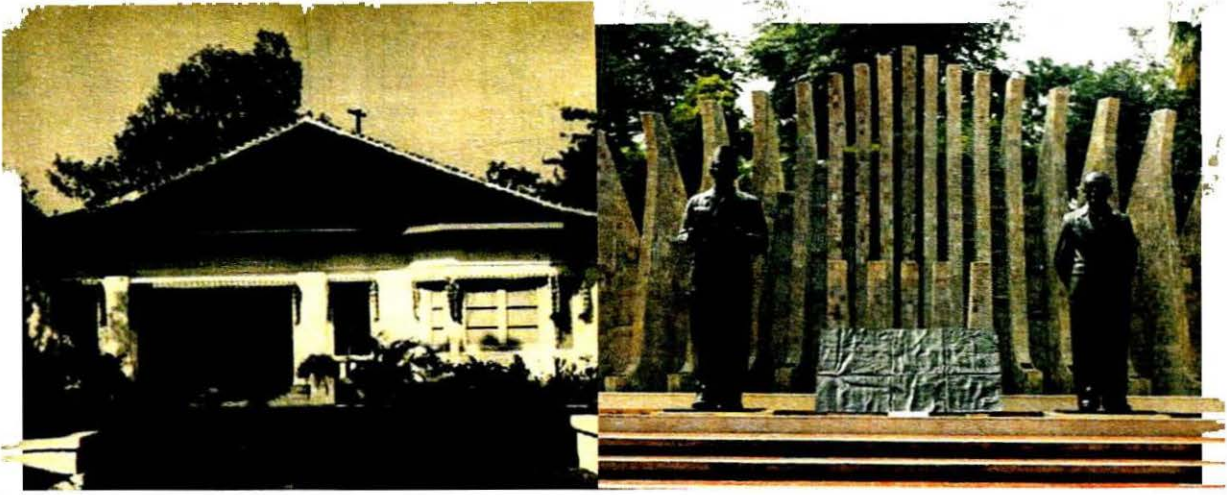
Atas nama bangsa Indonesia

Sukarno Hatta

Demikianlah, saudara-saudara

Kita sekarang telah merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun Negara kita, Negara merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."[42]

Setelah pembacaan teks proklamasi, acara selanjutnya adalah pengibaran bendera sang saka Merah Putih. Bung Karno dan Bung Hatta maju dua langkah dan berdiri di anak tangga terakhir, lebih kurang dua meter dari tiang bendera. Ibu Fatmawati dan SK. Tri Murti turun dan berdiri didekat tiang bendera. Karena tidak ada protokol jadi tidak ada yang mengatur jalannya upacara, semua berjalan begitu saja tanpa protokol yang mengikat. Ketika suasana tenang itu, tiba-tiba terdengar suara: " Yu Tri, kerek bendera Merah Putih itu. Sementara SK Trimurti menjawab: "Ah tidak yang pantas pengerek orang laki-laki dan sebaiknya dari Peta". Selanjutnya S. Suhud yang memakai kemeja



Rumah Bung Karno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (gambar kiri) & sekarang menjadi Tugu Proklamasi (gambar kanan) *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

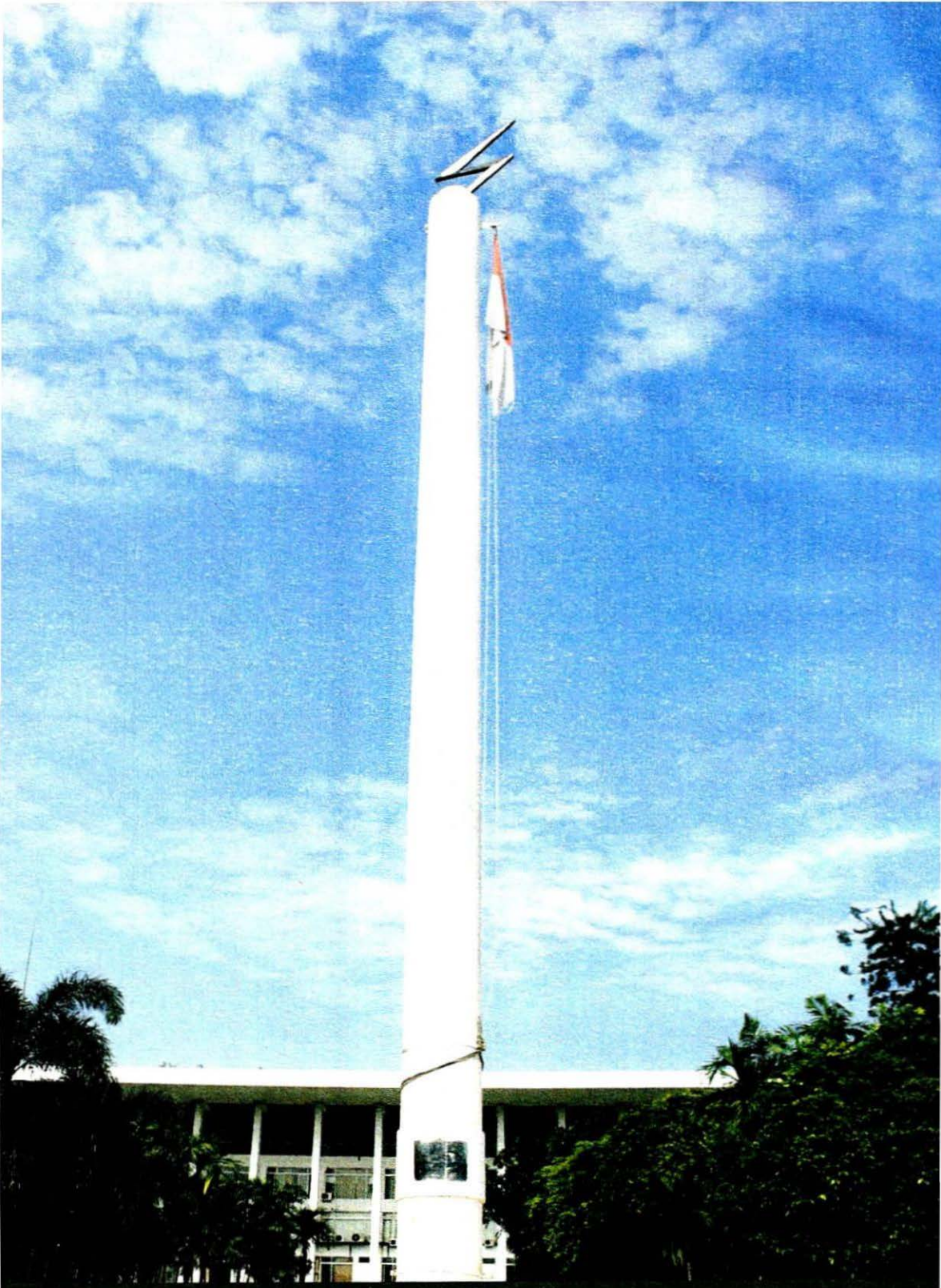
pendek kotak-kota biru bercelana pendek serta memakai sepatu Barisan Pelopor mengambil bendera yang ada di atas baki dan mengikatkannya ke tali pada tiang bendera. Sementara Latief Hendraningrat yang mengenakan pakaian lengkap perwira Peta membantu S. Suhud dengan memegang bendera dan mengerek bendera. Seiring dengan itu nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin secara spontan dan bersemangat tanpa ada yang memimpin. Setelah itu upacara selesai. Tidak ada satu jam peristiwa tersebut, tetapi mempunyai makna yang sangat penting bagi Indonesia. Peristiwa upacara tersebut tidak disiarkan langsung oleh radio, namun diabadikan oleh wartawan *Asia Raya,* Frans Soemarto Mendur dengan menggunakan kamera merk Leica. Adapun lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan berbunyi:

Indonesia Tanah Air ku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berada
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku,hiduplah negriku

Bangsaku rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya
Indonesia raya merdeka merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia raya merdeka merdeka
Hiduplah Indonesia raya.[43]

Setelah selesai ternyata masih banyak masa rakyat yang datang karena sebagian baru tahu kalau upacara dipindahkan dari Lapangan Ikada ke Pegangsaan Timur 56. Di antara yang terlambat datang adalah Barisan Pelopor dari Penjaringan di bawah pimpinan S Brata. Sebagian dari mereka meminta kepada Bung Karno agar upacara tersebut diulang kembali. Bung Karno menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak bisa diulang lagi dan hanya diucapkan sekali saja tetapi berlaku selama-lamanya. Tidak lama setelah itu, Bung Hatta pulang dan Bung Karno masuk ke rumah kembali karena kondisi kurang sehat. Untuk menjaga anggota Barisan Pelopor pimpinan Sumantojo yang bertugas menjaga Bung Karno dan Bung Hatta.

Namun, secara mendadak datang tentara Jepang memasuki rumah Bung Karno. Mereka diutus oleh Gunseikan dan menegur dengan keras kepada Bung Karno agar tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang akan menyerahkan roda pemerintahan kepada Sekutu. Mendengar itu, Sukarno mengatakan bahwa proklamasi sudah diucapkan. Namun karena jumlahnya kalah banyak dengan pemuda Barisan Pelopor, akhirnya tentara Jepang tersebut pergi begitu saja.



Tugu Petir, tempat berdirinya Bung Karno saat membacakan Naskah Proklamasi
(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Meskipun demikian masih ada satu kejadian yang belum terjawab sampai kini, bagaimana naskah otentik proklamasi yang dibacakan oleh Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa menghilang sampai 20 tahun dan baru muncul pada awal tahun 1965 di tangan D.N Aidit yang menyerahkannya kepada Sukarno selaku Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Selama naskah otentik itu hilang maka yang dikenal luas adalah naskah konsep atau *klad* yang menurut Sayuti Melik pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 itu diambil dan dibawa pulang dari rumah Laksamana Maeda oleh BM Diah yang kemudian mencetaknya di harian *Merdeka*.[44]

Revolusi Indonesia sudah dimulai dan mendapat respon luar biasa di seluruh Nusantara. Jepang bereaksi cepat. Atas perintah Panglima Militer Jepang di Jawa, Maeda beserta seluruh stafnya ditangkap dan pengumuman kemerdekaan yang dikirimkan lewat pos ke berbagai wilayah disobek oleh Kempetai. Pada hari berikutnya, Jepang mengumumkan pembubaran Peta, Heiho dan semua organisasi Indonesia bersenjata. Konsekuensi dari kebijakan itu, semua senjata yang dibawa oleh pemuda pejuang harus diserahkan kepada Jepang. Namun, pemuda pejuang bersikukuh dan tidak mau menyerahkan, bahkan di beberapa daerah terjadi perlawanan terhadap tentara Jepang.[45] Bendera kebangsaan Indonesia dilarang oleh Jepang. Akan tetapi Sukarno menganggap bahwa bendera merah putih adalah simbol perjuangan, ia memerintahkan untuk mengibarkan merah putih di gedung-gedung umum. Dalam enam minggu, bendera merah putih yang merupakan simbol revolusi Indonesia sudah berkibar di seluruh gedung penting di Jawa.

1.8. Penyebarluasan Berita Proklamasi

Berita proklamasi segara disebarluaskan. Golongan pelajar, Sukarni, dan kaigun bergerak ke seluruh kota mengatur dan menyiapkan penyebaran dan pengumuman proklamasi sampai pagi hari. Di jalan Bogor Lama, misalnya, diadakan perundingan-perundangan di antara pemuda untuk mengatur penyebaran siaran-siaran sampai pagi. Di pagi harinya, pusat perundingan berpindah ke Kepuh kemudian pindah lagi ke Def van Den Bosch 56. Di sinilah pusat dari ketiga golongan (golongan pelajar, Sukarni dan Golongan kaigun) bekerja bersama menyusun strategi. Dengan cepat dilakukan percetakan kilat (roneo) yang dibantu tenaga rakyat dan kaum buruh kantor berita 'Domei'. Pekerjaan percetakan kilat ini dapat menyelesaikan beribu-ribu surat selebaran pada pagi buta tanggal 17 Agustus 1945.



Proklamasi

Kami bangsa INDONESIA dengan ini menjatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA. Hal

Hal - hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Agoestoes 1945
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno - Hatta

Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yang disebar dalam bentuk cetak (Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

Barisan-barisan yang ditugasi menyebarkan proklamasi rupanya mendapat rintangan dari Jepang. Di setiap tempat mereka menyebarkan berita proklamasi, mobil dari kempetai Jepang segera membututinya dan memunguti proklamasi tersebut. Namun, semakin Jepang memunguti berita-berita proklamasi, para pemuda semakin giat pula menyebarluaskannya. Dalam waktu cepat berita proklamasi sudah menyebar ke seluruh Jakarta dan daerah sekitarnya. Berita proklamasi juga menyebar ke daerah luar Jakarta dengan perantaraan kereta api, mobil, telepon dan kawat. Dengan kemauan sendiri dan keteguhan keyakinan kaum buruh di kantor berita 'Domei' di Jakarta, maka penyiaran proklamasi disiarkan ke seluruh Indonesia, dan dengan gelombang pendek sudah menyebar ke dunia. Setengah jam setelah siaran, Jepang baru tahu bahwa jam siaran pemancar Domei sudah digunakan oleh buruh Indonesia untuk menyiarkan proklamasi. Pucuk pimpinan Jepang di Jakarta memerintahkan kepada Domei supaya menarik berita itu, dengan keterangan bahwa berita tersebut adalah keliru. Meski sempat diberitakan demikian, berita proklamasi sudah terlanjur disiarkan dan disambut oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan, dunia internasional juga menyambutnya. Reaksi dunia hanya satu, yaitu perebutan kekuasaan dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia sudah mulai. Dalam suasana demikian, Indonesia menyambut proklamasi, di berbagai tempat lahir dan terbentuk tentara revolusi yang tak terbilang banyaknya, sehingga muncul kelompok-kelompok pejuang—ada kelompok pelajar, kelompok Sukarni, bahkan



Penyambutan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

gerombolan Kaigun yang semuanya tidak pernah diperhitungkan oleh Jepang. Untuk itu, Jepang meminta kepada para tokoh-tokoh Indonesia mengadakan rapat untuk menghentikan suasana yang sangat tidak teratur dan tidak terkendali tersebut.[46]

Mengenai bagaimana para pemuda berhasil menyiarkan berita proklamasi melalui radio dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, entah dengan cara apa Ronodipuro melihat Des Alwi berhasil masuk studio menyampaikan berita tentang proklamasi dan pertemuan sebelumnya di rumah Maeda. Sebelumnya Sukarni berusaha masuk studio tetapi tidak berhasil. Sekitar pukul 13.00 ada sekelompok mahasiswa pejuang berhasil masuk studio. Tetapi ketika naik tangga ada pistol yang jatuh, sehingga mereka ditangkap oleh Jepang. Ronodipuro yang tetap menunggu di studio tiba-tiba melihat Sjachrudin (wartawan senior kantor berita Domei) sudah berada di dalam studio dan membawa teks proklamasi yang sudah dibacakan oleh Sukarno-Hatta. Sjachrudin berhasil masuk studio setelah melompati tembok belakang dari Tanah Abang. Pada waktu itu hanya siaran dalam negeri yang masih mengudara tetapi dijaga ketat oleh *Kempetei*, sedangkan siaran luar negeri sudah dilarang Jepang. Namun, para pemuda yang bekerja di bagian teknik berhasil menghidupkan pemancar di luar bagian luar negeri yang tidak dijaga karena tidak ada siaran lagi.

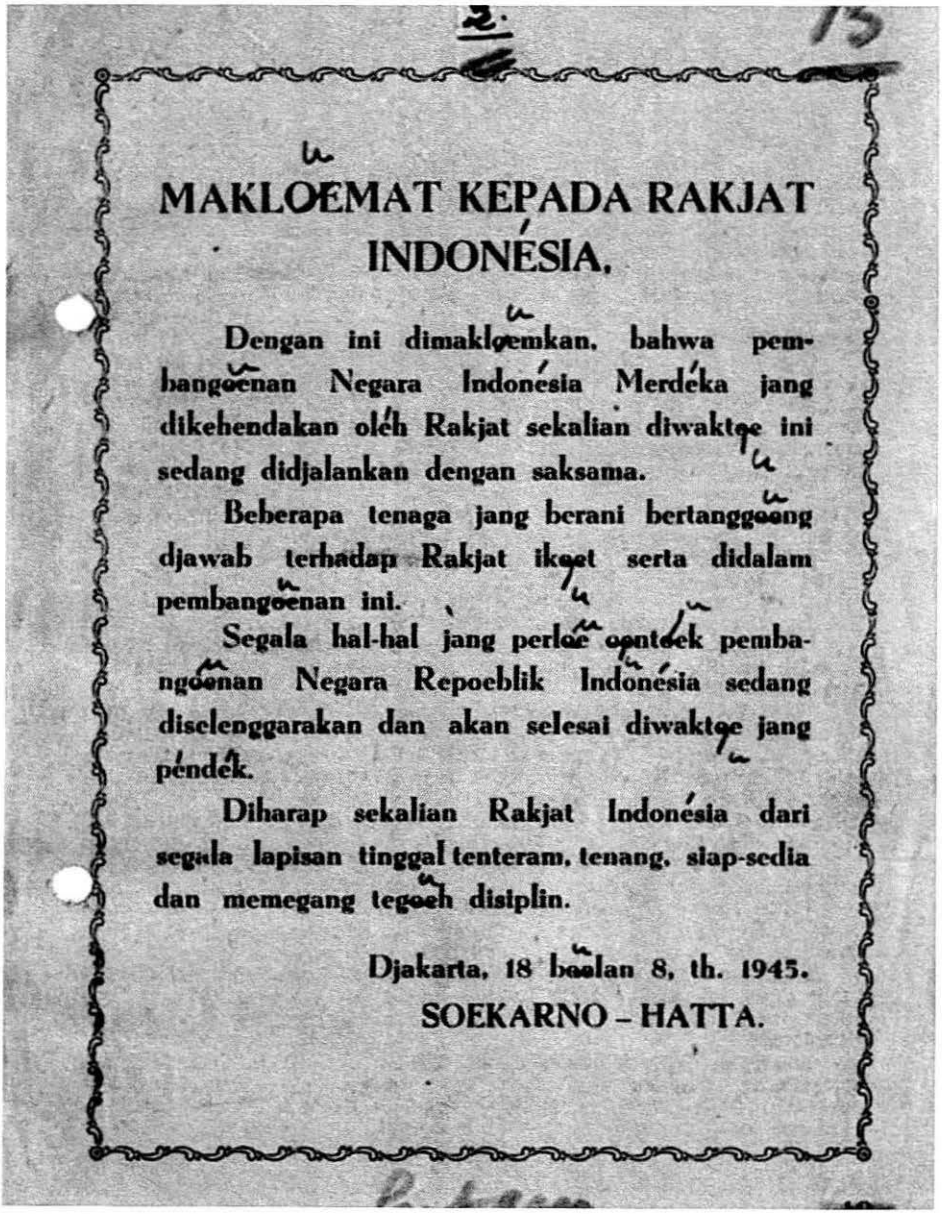
Selama tanggal 16 Agustus 1945, sepanjang hari studio terus menyajikan acara hiburan. Begitu juga pada 17 Agustus, pagi dan siang hari acara yang terselenggara hanya program hiburan, sampai akhirnya ada wartawan Sjachrudin membawa dua lembar kertas. Lembar pertama berisi surat Adam Malik, minta agar lembar kedua dibacakan sebagai berita. Lembar kedua berisi teks lengkap proklamasi kemerdekaan.[47]

Pada pukul 19.00, berita proklamasi Indonesia disiarkan untuk pertama kalinya melalui radio. Naskah lengkap proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Indonesia dibacakan oleh Jusuf Ronodipuro sedangkan terjemahannya dalam bahasa Inggris dibacakan oleh Soeprapto. Untuk menyiasati tentara Jepang, melalui pengeras suara ke dalam ruangan studio disiarkan warta berita resmi. Petugas keamanan di studio yang mengawal situasi mengangguk-nganguk mendengar berita resmi. Mereka tidak tahu bahwa yang disebarkan ke angkasa warta berita tidak resmi, yakni berita proklamasi.

Namun, akibat pemberitaan susupan tersebut, Ronodipuro bersama redaktur pemberitaan Bachtar Lubis ditangkap *Kempetai*. Mereka disiksa secara fisik. Beruntung ketika penyiksaan dilakukan datang Tomobachi pemimpin umum Radio Jepang. Setelah mereka berunding, Bachtar Lubis dan Ronodipuro dilepaskan kembali, dengan catatan agar mereka menghentikan siaran radio sama sekali. Para pemuda justru semakin giat menyiarkan radio. Ronodipuro bersama teman-temannya dengan dipelopori Dr. Abdulrachman Saleh mendirikan pemancar-pemancar gelap dengan nama Radio Indonesia Merdeka. Untuk siaran luar negeri, radio menggunakan pengenal *'This is the voice of free Indonesia'* yang terletak di Gondangdia (kini gedung BNI 46) dan di sekolah Kedokteran, Salemba Raya.[48]

1.9. Pembukaan UUD 1945

Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Hatta menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda, yang menanyakan dapatkah Hatta menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia akan mengemukakan sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia. Nishiyama sendiri akan menjadi juru bicaranya. Opsir itu datang dan mengatakan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi 'ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Sang opsir menyadari bahwa kalimat itu hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak mengikat bagi mereka yang non-Islam. Namun, pencantuman itu dalam Dasar Negara dianggapnya diskriminasi terhadap golongan bhinneka tunggal ika. Menanggapi hal itu, Hatta menyampaikan bahwa itu tidak diskriminasi sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.



MAKLOEMAT KEPADA RAKJAT INDONÉSIA.

Dengan ini dimaklóemkan, bahwa pembangoénan Negara Indonésia Merdéka jang dikehendakan oléh Rakjat sekalian diwaktoe ini sedang didjalankan dengan saksama.

Beberapa tenaga jang berani bertanggoong djawab terhadap Rakjat ikoet serta didalam pembangoénan ini.

Segala hal-hal jang perloe oentoek pembangoénan Negara Repoeblik Indonésia sedang diselenggarakan dan akan selesai diwaktoe jang péndék.

Diharap sekalian Rakjat Indonésia dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang, siap-sedia dan memegang tegoeh disiplin.

Djakarta, 18 boelan 8, th. 1945.

SOEKARNO - HATTA.

Maklumat Sukarno Hatta tanggal 18 Agustus 1945 tentang himbauan agar semua rakyat tenteram dan tenang *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*



Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945 dalam rangka memperingati satu bulan proklamasi kemerdekaan *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Selain itu, pada waktu merumuskan Pembukaan UUD, Mr. Maramis yang ikut dalam Panitia Sembilan tidak mempunyai keberatan dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatangani. Opsir kemudian mengatakan bahwa itu adalah pendirian pemimpin Protestan dan Katolik di daerah pendudukan kaigun. Mengingat begitu seriusnya usulan opsir tadi, maka Hatta berjanji bahwa ketika rapat PPKI esok hari hal itu akan dibicarakan, dan berpesan agar opsir tadi menenangkan pemimpin-pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas untuk tidak terpengaruh propaganda Belanda.

Ketika rapat tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta menemui Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera untuk mengadakan rapat pendahuluan membicarakan masalah dasar negara tersebut. Setelah dibicarakan dalam rapat terbatas, mereka sepakat untuk menghilangkan kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya' dan menggantinya dengan 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dengan penggantian kalimat tersebut, mereka menyadari bahwa semangat dari Piagam Jakarta tidak hilang.

Dalam sidang PPKI tersebut, Chairul Saleh, Sukarni dan Wikana mendesak agar rapat tidak diadakan di Pejambon, dan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan harus diubah menjadi Komite Nasional

Indonesia. Menurut Chaerul Saleh, PPKI adalah badan yang berbau Jepang. Setelah Indonesia merdeka, semestinya semua yang berbau Jepang diputus, dan menyarankan agar pembentukan pemerintahan dan pengesahan UUD dikerjakan di tempat lain. Bung Hatta mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa Sukarno dan Hatta sulit memisahkan tanggung jawabnya terhadap Jepang dan rakyat Indonesia. Tiga tokoh tersebut tetap tidak mau menerima jalan pikiran Sukarno dan Hatta, sehingga meninggalkan sidang sebagai protes terhadap golongan tua dan menyatakan rapat tersebut 'berbau Jepang dan kurang representatif'.[49] Sukarno tetap melanjutkan sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting di antaranya pengesahan Pembukaan dan UUD secara bulat, dan mengangkat Sukarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia.[50]

Sesampai di rumah, Sukarno menyampaikan berita bahwa dirinya sudah diangkat sebagai Presiden kepada Fatmawati, namun Fatmawati tidak menjawab dengan lompatan kegembiraan. Fatmawati hanya berkata 'dilarut malam sebelum Bapak meninggal, hanya tinggal kami berdua yang belum tidur. Aku memijitnya untuk mengurangi rasa sakitnya, ketika tiba-tiba beliau berkata, aku melihat pertanda secara kebatinan bahwa tidak lama lagi...dalam waktu dekat... anakku akan tinggal di istana yang besar dan putih itu. Jadi ini tidaklah mengagetkanku. Tiga bulan lalu Bapak sudah meramalkannya.[51]

Sebagai orang yang sudah diangkat menjadi Presiden, maka Sukarno seharusnya mempunyai mobil. Untuk itu, Sudiro mengusahakan mobil Buick besar yang muat tujuh orang. Mobil tersebut adalah mobil termewah di Jakarta dengan gorden di jendela belakang, milik Kepala Jawatan Kereta Api. Sudiro mencari mobil tersebut yang kebetulan sedang di parkir di garasi. Sudiro mengenal sopir mobil tersebut, dan dengan sedikit memaksa meminta agar kunci mobil diserahan kepadanya, karena akan diberikan kepada Presiden. Dengan ketakutan si sopir memberikan kuncinya kepada Sudiro dan segera disuruh pulang ke Jawa Tengah dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap oleh tentara Jepang. Atas usaha Sudiro inilah, akhirnya Presiden pertama Republik Indonesia mempunyai mobil[52].

1.10. Pembentukan Provinsi dan Kementerian

Pada sidang PPKI hari kedua, 19 Agustus 1945, suasana sidang sedikit terganggu ketika Jenderal Yamamoto menyampaikan sikap resmi pemerintahnya, bahwa sebagai konsekuensi Deklarasi Potsdam, Jepang terikat pada prinsip-prinsip tugasnya untuk menjaga *status-quo* dan tidak lagi memberikan bantuan terhadap pemenuhan janji kemerdekaan

Indonesia. Namun, pendirian kedua pemimpin Indonesia itu sudah jelas, seperti telah diutarakannya juga kepada penguasa militer Jepang sebelumnya, bahwa harapan terakhir mereka hanyalah agar Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab rakyat Indonesia. Sidang tetap dilanjutkan, tetapi sekarang menamakan dirinya untuk pertama kali dengan Komite Nasional Indonesia (KNI), sesuai dengan syarat-syarat Undang-undang Dasar 1945 yang sudah disahkan itu. Persetujuan umum dicapai, antara lain mengenai pembagian daerah bekas Hindia-Belanda yang kini bernama Repubik Indonesia (RI) menjadi delapan propinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur sebagai berikut:

1. Mr. Teuku Mohammad Hassan : Sumatera
2. Sutarjo Kartohadikusumo : Jawa Barat
3. R. Panji Suroso : Jawa Tengah
4. R. A Suryo : Jawa Timur
5 . Mr. I Gusti Ktut Puja : Sunda Kecil
6. Mr. J. Latuharhary : Maluku
7. Dr. G.S. Sjam Ratulangie : Sulawesi
8. Ir Pangeran Mohammad Noor : Kalimantan

Pada hari itu juga, PPKI menetapkan 12 kementerian, sedangkan realisasi dari penetapan itu baru dilakukan ketika pada tanggal 4 September 1945 di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Kabinet Presidensial ini, yang oleh kelompok kelompok pemuda diberi nama Kabinet "Bucho" (alias pegawai Jepang), dengan susunan kabinet sebagai berikut:

Perdana Menteri : Presiden Sukarno
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusumah
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Supomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surakhman Cokroadisuryo
Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi

Menteri Kesehatan	: Dr. Buntaran Martoatmojo
Menteri Pengajaran	: Ki Hajar Dewantara
Menteri Penerangan	: Mr. Amir Syarifuddin
Menteri Sosial	: Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Pekerajaan Umum	: Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Perhubungan	: Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara	: Wahid Hasyim
Menteri Negara	: Dr. M. Amir
Menteri Negara	: Mr R.M. Sartono
Menteri Negara	: R. Oto Iskandar Dinata[53]

Tidak diragukan lagi, istilah "kabinet Bucho" tidak menyenangkan bagi para menteri yang baru diangkat, meski dalam kenyataanya sebagian besar adalah pegawai Jepang yang sampai saat



Upacara peringatan hari Kemerdekaan RI di Tugu Proklamasi Jakarta 17 Agustus 1946 *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

itu belum diberhentikan.[54] Karena itu, mereka bersifat dualistik, dalam arti bahwa di satu pihak mereka sudah diangkat sebagai menteri Republik, tetapi di lain pihak masih menjadi pegawai Jepang yang masih berkuasa. Rata-rata mereka berusia antara 46 dan 48 tahun dan sebagian besar adalah aktivis pergerakan.

Dalam sidang PPKI pada hari-hari berikutnya beberapa keputusan penting telah diambil, antara lain pada tanggal 20 Agustus tentang pembentukan suatu badan yang dinamakan "Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BKKP) sebagai bagian untuk menghidupkan kembali Badan Pembantu Prajurit di masa perang yang pernah ada di zaman Belanda. Di dalam tubuh BKKP terdapat lagi sebuah badan, yakni Badan Kemanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi cikal-bakal organisasi militer reguler; 21 Agustus dalam sidang tertutup dibahas tentang Konferensi San Francisco mendatang dan kemungkinan untuk mengirim delegasi Indonesia ke konferensi tersebut; 22 Agustus tentang pembentukan pengurus Komite Nasional Pusat (KNIP) yang akan berfungsi sebagai Parlemen sementara dan pada hari yang sama dibentuk PNI sebagai *staatpartij.* Secara berangsur-angsur pengaruh Jepang mulai dilucuti. Keanggotaan militer PETA dan Heiho yang sudah dibubarkan Jepang sebelum proklamasi, diserukan untuk bergabung dengan BKR. Begitu pula eksistensi PPKI selepas tanggal 23 Agustus diambil alih oleh KNI[55].

Catatan Akhir :

[1] John D. Legge. *Sukarno Sebuah Biografi Politik* (terj). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1996 (cet. ketiga). hlm: 211.

[2] R.M. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. hlm: 21.

[3] Mohammad Hatta. *Menuju Gerbang Kemerdekaan: Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Kompas (Cet. III), 2013. hlm: 68.

[4] Saafroedin Bahar (Peny). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998. hlm: 102.

[5] Restu Gunawan. *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia.* Yogyakarta: Komunitas Ombak, 2005. hlm. 50; lihat juga Lembaga Soekarno Hatta. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.* Jakarta: Inti Idayu Press, 1984. hlm: 96.

[6] Merasa sudah menulis panjang dan ternyata tidak digunakan oleh Panitia Sembilan, maka Mr. Muhammad Yamin mengambil teks yang panjang itu sebagai pengganti pidato yang diucapkannya dalam sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian dimasukkan ke dalam buku yang diterbitkannya berjudul: *Pembahasan UUD 1945 Jilid I;* RM AB Kusuma. *op.cit*, hlm: 67.

[7] RM. AB Kusuma, *op. cit.*, hlm: 13.

[8] Saafroedin Bahar (Peny); *op., cit.,* hlm: 530.

[9] Susanto Zuhdi. *Proklamasi Kemerdekaan.* dalam Taufik Abdullah (ed). *Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid VI.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. hlm:109.

[10] Mohammad Hatta. *op. cit*, hlm: 68.

[11] I*bid.* hlm: 72.

[12] *Ibid.* hlm: 75

[13] *Ibid.* hlm: 76

[14] *Ibid.* hlm: 79

[15] Cindy Adams. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (terj. cet. kedua). Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2011. hlm: 253.

[16] Irna H Suwito. *Chaerul Saleh Tokoh Kontroversial.* Jakarta: Mutiara Rachmat (distributor). hlm: 30

[17] Hendri F Isnaeni (ed). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan; Kesaksian, Penyiaran dan Keterlibatan Jepang.* Jakarta: Kompas, 2015. hlm: 90.

[18] Cindy Adam. *op.cit,* hlm: 256.

[19] Mohammad Hatta. *op.cit,* hlm: 83.

[20] Irna Hadi Soewito. *op.cit.*, hlm: 32.

[21] *Ibid.* hlm: 34.

[22] Mr. Ahmad Subadjo Djojoadisuryo. *Lahirnya Republik Indonesia.* Jakarta: tanpa penerbit, 2008. hlm: 89.

[23] *Ibid.* hlm: 90.

[24] Ahmad Subardjo pernah bertemu dengan Sukarni, karena ia sering menemui Wikana di kantor Ahmad Subardjo. Ia seorang yang masih muda berumur sekitar 35 tahun, tampan, berpundak lebar dan berdada bidang. Ia bersikap waspada selalu tetapi mempunyai sifat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh oleh teori-teori yang seolah-olah revolusioner. *Ibid.*

[25] *Ibid.* hlm: 94.

[26] *Ibid.*

[27] Mohammad Hatta. *op.cit.* hlm: 90.

[28] *Ibid.*

[29] Mohammad Hatta. *op.cit.* hlm: 93.

[30] Lasmidjah Hardi, dkk. *Jakarta-ku Jakarta-mu Jakarta-kita.* Jakarta: Yayasan Pecinta Sejarah dan DKI, 1987. hlm: 175.

[31] Adam Malik. *Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45.* Jakarta: Gunung Agung, 1978. hlm: 43-44.

[32] Pernyataan di atas adalah hasil wawancara Laksamana Maeda dengan Mr. Ahmad Subarjo ketika peringatan 28 tahun Indonesia merdeka di Jalan Kebon Binatang III/1 Jakarta di rumah Mr. Ahmad Subarjo. Menurut Terutake Kikuchi yang mendampingi Maeda pada waktu wawancara tersebut, Maeda sebenarnya ingin sekali menetap di Indonesia. Ketika Sekutu tiba di Indonesia, Maeda ditangkap dan dipenjara di Glodok kemudian dipindah ke Singapura. Setelah keluar dari penjara Singapura, Maeda pulang ke negaranya dan bekerja sebagai konsultan di Tokyo. Ketika sudah tidak bekerja lagi, ia hidup sebatang kara, istrinya tidak ada dan tidak

mempunyai anak. Hendri F Isnaeni (ed). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan; Kesaksian, Penyiaran dan Keterlibatan Jepang.* Jakarta: Kompas, 2015. hlm: 189.

[33] Sebelum pendudukan Jepang, Nishijima tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bandung sebagai pegawai di toko Jepang Tjiyoda. Karena pergaulannya yang erat dengan pemuda Indonesia menjelang pendudukan Jepang, pemerintah kolonial Belanda menangkap Nishijima. Dia mendekam di kamp tahanan politik berpenghuni kira-kira 500 orang di Garut. Di antara tahanan itu ada Adam Malik, Asmara Hadi, SK. Trimurti dan lain-lain. Dia fasih berbahasa Indonesia, Inggris dan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang Nishijima adalah tangan kanan sekaligus penerjemah bagi Laksamana Tadashi Maeda. Menjelang proklamasi kemerdekaan Nishijima banyak membantu para pemuda antara lain Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, Elkana Lumban Tobing, BM. Diah, Wikana, Pandu Kartawiguna dan lain-lain. Lihat Hendri F Isnaeni. *ibid.* hlm: 243.

[34] Lihat wawancara Basyral Hamidy Harahap dengan Shigetada Nishijima dalam Hendri F Isnaeni, *Ibid.* hlm: 243.

[35] Hendri F Isnaeni. *Ibid.* hlm: 230.

[36] Hendri F Isnaeni. *op.,cit.* hlm: 71-72

[37] Ahmad Subardjo. *op.,cit.* hlm: 114.

[38] Lasmidjah Hardi. *op.cit.* hlm: 180.

[39] *Ibid.* hlm:181.

[40] *Ibid.* hlm: 182.

[41] Mohammad Hatta. *op.cit.* hlm: 94.

[42]Lasmidjah Hardi. *op.cit.* hlm: 184.

[43] *Asia Raya*; 21 Agustus 1945. Sejak proklamasi sampai dengan bulan Agustus 1948, tidak ada keseragaman dalam cara orang menperdengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam berbagai upacara. Oleh karenanya Pemerintah Republik Indonesia dengan penetapan Presiden No. 28 tahun 1948 tanggal 16 November 1948 membentuk suatu Panitia Negara yang disebut Panitia Indonesia Raya. Tugas panitia tersebut antara lain memajukan usul-usul kepada Pemerintah tentang cara melagukan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada berbagai-bagai upacara resmi dan upacara tidak resmi. Pada tanggal 26 Juni 1958, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bambang

Sularto. *Wage Rudolf Supratman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 1985. hlm: 237.

[44] Hendri F Isnaeni (ed). *op.cit.* hlm: 126.

[45] George Mc Turnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm: 173.

[46] Adam Malik. *op.cit.* hlm: 51.

[47] Hendri F Isnaeni (ed). *op.cit.* hlm: 140.

[48] Hendri F Isnaeni (ed). *op.cit.* hlm: 130.

[49] Irna H Suwito. *op.cit.* hlm: 42.

[50] Cindy Adams. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (edisi revisi, terj). Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2007. hlm: 270.

[51] *Ibid.* hlm: 271

[52] *Ibid.* hlm: 271.

[53] Susanto Zuhdi. *op.cit.* hlm: 129.

[54] *Ibid.*

[55] *Ibid.*

BAB II
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA

Gusti Asnan

2.1. Sumatera Sebelum Proklamasi

"Maluku masa lampau, Jawa masa kini, dan Sumatera masa depan". Itulah ungkapan yang digadang-gadang pejabat, penulis, dan para guru Belanda pada awal abad ke-20.[1] Dalam rangka menyiapkan "Sumatera masa depan" tersebut, maka berbagai rencana dirancang. Ada dua rencana yang sangat diprioritaskan saat itu: pertama, menyatukan Sumatera secara "fisik"; dan kedua, menyatukan pulau yang juga dikenal dengan nama Andalas tersebut secara politik. Penyatuan "fisik" akan diwujudkan dengan pembangunan jaringan jalan kereta api dan jalan raya dari titik paling utara (Kutaraja atau Banda Aceh) hingga titik paling selatan Sumatera (Teluk Betung), sementara penyatuan politik akan direalisasikan dengan pembentukan daerah administratif setingkat provinsi untuk seluruh Sumatera.

Penyatuan Sumatera dengan pembangunan jalan kereta api gagal dilaksanakan, sedangkan melalui jalan raya berhasil dituntaskan tahun 1938. Penyatuan Sumatera secara politik (menjadi unit administratif setingkat provinsi) juga berhasil direalisasikan. Kesuksesan tersebut diraih pada tahun 1938. Ibu kota provinsi adalah Medan dan pemimpinnya disebut gubernur.

Provinsi Sumatera saat itu memiliki sepuluh *residentie* (keresidenan). Kesepuluh *residentie* tersebut adalah (dari utara), Keresidenan Aceh dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh), Sumatera Timur (*Sumatra's Oostkust*) dengan ibu kota Medan, Tapanuli dengan ibu kota Sibolga, Sumatera Barat (*Sumatra's Westkust*) dengan ibu kota

Padang, Riau dan Daerah-daerah Taklukannya (*Riau en Onderhoorigheden*) dengan ibu kota Tanjung Pinang, Jambi dengan ibu kota Jambi, Palembang dengan ibu kota Palembang, Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, Lampung dengan ibu kota Teluk Betung, dan Bangka dan Daerah-daerah Taklukannya (*Bangka en Onderhoorigheden*) dengan ibu kota Pangkal Pinang. Ibu kota provinsi adalah Medan dan pejabat tertingginya adalah gubernur. Ditegaskan bahwa Sumatera adalah bagian dari "*Eenheidsstaat van Nederlandsch Indie*" (Negara Kesatuan Hindia Belanda).

Status Sumatera sebagai satu kesatuan administratif setingkat provinsi dilanjutkan oleh tentara pendudukan Jepang. Namun, berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda, bala tentara *Dai Nippon* memisahkan Sumatera dengan Jawa, dan juga dengan Indonesia bagian tengah serta timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara). Sumatera dikuasai oleh Tentara ke-25, Pulau Jawa dikuasai oleh Tentara ke-16, dan Indonesia bagian tengah serta timur dikuasai oleh Angkatan Laut (*Kaigun*). Berbeda juga dengan masa pemerintahan Belanda, ibu kota Sumatera dipindahkan Jepang ke Bukittinggi,[2] dan roda pemerintahan dijalankan oleh *Gunseikanbu* (pemerintahan militer).

Pemerintahan militer Jepang juga mempertahankan sepuluh daerah administratif di bawah provinsi yang dinamakannya *Shu* (Keresidenan).[3] Walaupun demikian ada sedikit perubahan yang dilakukan. Perubahan pertama adalah pembentukan *Shu* baru, yakni *Riau Shu*.[4] Daerah ini dibentuk dengan mengambil daerah Indragiri dan Kuantan (daerah daratan dari *Residentie Riouw en Onderhorigheden*)[5] dan menambahnya dengan sebagian daerah Keresidenan Sumatera Timur (daerah Rokan dan Siak serta pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Medang, Tebingtinggi, Padang, Bengkalis, dan Rupat), dan ditambah lagi dengan sebagian daerah Sumatera Barat (daerah XIII Koto dan Bangkinang). Ibu kota *Riau Shu* adalah Pakanbaru. Perubahan lain adalah memindahkan ibu kota *Tapanuli Shu* dari Sibolga ke Tarutung.

Sama dengan apa yang dilakukan pejabat pemerintah Hindia Belanda, para petinggi tentara Jepang juga memberikan perhatian khusus pada Sumatera. Sehubungan dengan itu, pada masa-masa awal kehadirannya, Sumatera (bersama Singapura dan Semenanjung Malaysia) dinamakan "zona inti dalam rencana-rencana Kekaisaran Jepang mengenai Wilayah Tenggara". Tidak hanya itu, Semenanjung

Malaysia, Singapura dan Sumatera nantinya akan dijadikan sebagai bagian dari Jepang.[6]

Kedudukan Sumatera yang istimewa tersebut membuat para petinggi Tentara ke-25 di Bukittinggi mengambil sikap yang banyak berbeda dari para perwira Tentara ke-16 di Pulau Jawa. Masa "bulan madu" dengan kelompok-kelompok yang mendukung kedatangannya ke Sumatera, misalnya dengan Pasukan "F-Kikan"[7] dan para ulama, terutama ulama Aceh yang tergabung ke dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)[8] berakhir dalam waktu yang singkat, bahkan setelah itu para pendukungnya, terutama para pemuda (preman) yang direkrut menjadi anggota "F-Kikan", diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak dari mantan anggota kelompok ini yang dipenjarkan oleh *kempeitai* (polisi militer Jepang) karena dituduh melanggar ketertiban serta membuat keonaran. Janji-janji kemerdekaan bagi India Timur "kelak di kemudian hari", seperti yang dinyatakan Perdana Menteri Koiso tanggal 7 September 1944 (yang direspon dengan sangat aktif oleh para perwira di Jawa) nyaris tidak terdengar di Sumatera. Petinggi Tentara ke-25 juga menggagalkan keikutsertaan Sumatera dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Di samping itu, para petinggi Tentara ke-25 juga berkali-kali menolak usulan Sukarno yang ingin mengunjungi Sumatera.

Tentara ke-16 juga melakukan kontrol yang keras terhadap media massa. Pada awalnya, Bukittinggi hanya mengizinkan satu radio untuk seluruh Sumatera yang dinamakan *Sumatera Hosokyoku* (Radio Sumatera). Kemudian diizinkan satu radio untuk masing-masing *Shu* (*Radio Hodokan*). Siaran radio lain, radio swasta tidak diizinkan mengudara. Tidak itu saja, mendengarkan siaran radio lain, apalagi siaran radio sekutu sangat dilarang (umumnya radio disegel dan banyak pula yang disita oleh penguasa Jepang). Barang siapa yang diketahui mendengarkan siaran radio asing akan dihukum dengan keras. Surat kabar dan majalah juga dikuasai dan dikontrol *Gunseikan* di Bukittinggi atau *Shu Chokan* di masing-masing keresidenan. Pada awalnya, hanya diizinkan satu surat kabar untuk seluruh Sumatera, yakni *Sumatora Sinbun* (*Kita Sumatora Sinbun*). Kemudian, pada beberapa *Shu* juga terbit surat kabar lokal yang dikontrol dengan ketat oleh *Shu Chokan* dan umumnya bernama sesuai dengan *Shu* yang bersangkutan, seperti *Atjeh Shinbun, Padang Nippo, Palembang Shimbun, Bengkulu Shimbun,* dan *Lampung Shimbun.* Di samping itu, Panglima Tentara ke-25 dan

para *Shu Chokan* mengandalkan keberadaan Kantor Berita *Domei* untuk lalu lintas berita. *Domei* adalah kantor berita resmi bala tentara *Dai Nippon*.

Karena keterbatasan tenaga, para pegawai, penyiar dan wartawan radio, serta wartawan surat kabar umumnya adalah orang Indonesia. Mereka adalah para pegawai kantor PTT (Pos, Telefon dan Telegraf di zaman Belanda atau para wartawan yang telah aktif dalam dunia pers pada masa Belanda).

Walaupun terkesan tidak rela, keadaan mulai berubah pada Januari 1945. Pada saat itu, markas besar Tentara ke-25 di Bukittinggi mengizinkan pembentukan Badan Kebaktian Rakyat (*Hokokai*). Izin ini hanya diberikan pada tingkat keresidenan, padahal di Pulau Jawa organisasi itu telah mulai dibentuk pada awal 1944 dan sampai pada tingkat desa (*ku*).[9] Pada bulan Maret 1945 (hampir dua tahun terlambat dari yang dilakukan di Pulau Jawa) diumumkan rencana pembentukan *Chu Sangi In* (Dewan Penasihat Provinsi Sumatera). Dibutuhkan pula waktu dua bulan sampai diumumkannya susunan anggota dewan tersebut. Walaupun demikian, susunan anggota dewan ini (sebanyak 40 orang) cukup merepresentasikan semua daerah di Sumatera. Sesuatu yang menarik adalah Ketua dan Sekretaris, yaitu Mohammad Syafei dan Adinegoro, diambil dari Sumatera Barat, daerah/tempat kedudukan/markas besar *Gunseikanbu*, sedangkan dua Wakil Ketua, yaitu Teuku Nyak Arief dan Mr. Abdul Abbas diambil dari Aceh, daerah yang paling utara dan Lampung, daerah yang paling selatan.[10]

Pada tanggal 25 Juli 1945 diumumkan pembentukan PPPK (Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) di Sumatera yang anggotanya (bahkan susunan pengurusnya) sama dengan *Chu Sangi In*. Segera setelah dibentuk, panitia ini (khususnya para pemimpinya) langsung bergerak. Mereka memulai perjalanan keliling Sumatera untuk mengadakan rapat, pertemuan dan serangkaian pidato. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan persoalan kemerdekaan, sekaligus memperkenalkan lembaga dan program kerja lembaga mereka kepada pejabat/pemuka masyarakat di berbagai *Shu*. Intensifnya aktivitas-aktivitas tersebut, serta didukung pula oleh media massa (walaupun sangat dikontrol oleh Jepang) mengantarkan Mohammad Syafei, A.K. Gani, dan Teuku Nyak Arief (termasuk juga dr. Ferdinand Lumban Tobing) sebagai tokoh yang popular di Sumatera saat itu.

Sayangnya, ketika PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melakukan sidang pada bulan Agustus di Jakarta, tokoh-tokoh utama PPPK yang telah bertungkuslumus menggerakan dan mempersiapkan kemerdekaan di Sumatera tidak diikutsertakan. Tidak diketahui dengan pasti alasan absennya "empat serangkai Sumatera" tersebut dalam rapat PPKI itu. Hanya ada dua "isu" yang berkembang saat itu: pertama, Tentara ke-25 menghalang-halangi keberangkatan Mohammad Syafei atau pucuk pimpinan PPPK Sumatera untuk menghadiri sidang PPKI; dan kedua penunjukan wakil Sumatera dalam sidang tersebut ditentukan oleh Singapura atau Jakarta (dengan alasan, Singapura atau Jakarta tidak percaya kepada para pemimpin yang dibesarkan oleh Tentara ke-25 yang terlalu condong kepada Sumatera).[11] Wakil-wakil Sumatera yang mengikuti sidang PPKI adalah Mr. Abdul Abbas, seorang wakil PPPK dari Lampung (yang namanya nyaris tidak pernah terdengar pada panggung politik Sumatera sebelumnya), serta Mr. T.M Hassan dan dr. Moh. Amir. Dua utusan yang disebut terakhir cenderung dikelompokan sebagai kaum cendekiawan dan tidak merupakan anggota PPPK. Kedua utusan yang disebut terakhir ini juga nyaris tidak terlibat dalam berbagai upaya persiapan kemerdekaan di Sumatera sebelumnya.[12]

Pengiriman tiga wakil yang diluar dugaan di atas juga melahirkan (diiringi) pula oleh beberapa keputusan yang cukup mengejutkan. Ketika Jakarta memutuskan Sumatera menjadi satu propinsi, maka yang dipilih menjadi gubernurnya adalah Mr. T.M. Hasan dan wakilnya adalah dr. Moh. Amir.[13] Keputusan mengejutkan lainnya adalah menjadikan Medan sebagai ibu kota provinsi.[14]

Perubahan yang drastis itulah yang mengawali era proklamasi di Sumatera. Tidak itu saja, ada banyak perubahan lain di Sumatera saat itu. Berbagai perubahan tersebut tentu diawali oleh penyebaran berita proklamasi dan adanya respon warga Sumatera terhadap berita itu.

2.2. Penyebaran dan Respon Terhadap Berita Proklamasi

Berita proklamasi diketahui dalam waktu yang sangat berbeda di berbagai kota (daerah) di Sumatera. Ada kota (daerah) yang mengetahuinya pada waktu yang relatif bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan tersebut, tetapi ada pula yang mengetahuinya beberapa hari bahkan hingga dua sampai tiga minggu

setelah itu. Perbedaan tidak hanya berbeda dari sisi waktu diketahuinya berita proklamasi, tetapi juga dari cara memperoleh berita proklamasi tersebut. Ada daerah/warga daerah yang mengetahuinya dari pegawai PTT, penyiar radio, informasi yang disampaikan oleh orang/warga lain secara perseorangan (yang telah mengetahui lebih dahulu), atau diketahui melalui perayaan hari besar keagamaan (perayaan Hari Raya Idul Fitri). Perbedaan juga telihat dari respon yang diberikan oleh warga daerah terhadap berita proklamasi. Ada warga daerah yang langsung mempercayai berita tersebut dan ada pula yang meragukan, bahkan ada yang tidak menyukai Indonesia merdeka.

Ada lima latar belakang utama yang menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan di atas. Pertama, kontrol yang ketat oleh bala tentara Jepang terhadap semua aktivitas (politik) daerah/warga daerah; kedua, perbedaan kesempatan dari masing-masing daerah/warga daerah untuk mendapatkan akses informasi; ketiga, perbedaan psikologis daerah/warga daerah dalam menyikapi/mengambil keputusan yang berskala besar dan berdampak masif, tegasnya perbedaan "darah dan semangat" dari kaum muda serta "kematangan dan kedewasaan" dari kaum tua. Keempat, perbedaaan keterlibatan daerah/warga daerah dalam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan pada masa Jepang; kelima, sikap kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hubungan istimewa dengan penjajah (Belanda).

2.3. Penyebarluasan Berita Proklamasi

Secara umum, sejak tanggal 15 Agustus warga Sumatera terisolasi dari dunia luar. Sejak saat itu, warga pulau tersebut tidak bisa lagi mendengar berita, karena "Radio Sumatera" dan radio-radio di keresidenan tiba-tiba menghentikan siarannya. Para pegawainya diliburkan. Di sisi lain warga tetap dilarang mendengarkan siaran radio asing (sekutu). Surat kabar juga tidak terbit lagi. Walaupun demikian, penguasa Jepang, terutama di tingkat *Gunsekanbu* atau pada beberapa *Shu* masih mengizinkan beberapa pegawai Kantor Berita *Domei* untuk tetap beraktivitas guna menerima berita dan beberapa pegawai sejumlah radio keresidenan masuk kantor (walaupun tidak ada siaran). Sikap seperti inilah yang akhirnya memberi peluang bagi sebagian warga Sumatera mengetahui berita proklamasi.

Pengalaman seperti di atas antara lain dialami oleh warga Sumatera Barat. Di daerah itu umumnya, dan di kota Bukittinggi khususya, berita proklamasi memang diketahui pertama kali oleh pegawai Kantor Berita *Domei* (tepatnya pegawai PTT yang diperbantukan pada Kantor Berita *Domei*) yang bernama Ahmad Basya. Berita tersebut diketahui pada hari yang sama, tepat pada tanggal 17 Agustus malam.[15]

Berita proklamasi yang diterima segera diketik oleh sejawat Ahmad Basya yang bernama Asri Aidid Sutan Rajo Nan Sati. Teks proklamasi tersebut diketik sebanyak 10 rangkap. Setelah selesai diketik, teks proklamasi itu dibawa keluar dan ditempelkan di berbagai tempat di Bukittinggi. Pengetikan dan perbanyakan teks proklamasi tersebut merupakan reaksi spontan dari Ahmad Basya dan Asri Aidid Sutan Rajo Nan Sati.

Di kota Padang, berita proklamasi juga diketahui tanggal 17 Agustus malam. Sama dengan di Bukittinggi, berita proklamasi ini pertama kali diketahui oleh pegawai PTT, namun yang dipekerjakan di kantor radio keresidenan. Salah satu penerima pertama berita proklamasi tersebut bernama Aladin. Berbeda dengan yang terjadi di Bukittinggi, berita proklamasi disampaikan/disebarluaskan kepada masyarakat banyak oleh pegawai jawatan radio tersebut secara lisan.[16]

PTT juga berperan dalam penyampaian berita proklamasi di Bengkulu. Berita proklamasi diketahui secara resmi di keresidenan yang terletak di bagian selatan pantai barat Sumatera tersebut tanggal 20 Agustus 1945 dan sumber berita tersebut adalah telegram yang dikirim dari Palembang. Telegram itu diterima pegawai PTT yang bertugas saat itu. Informasi dalam bentuk telegram ini kemudian diperkuat oleh penunjukan Ir. Indra Caya oleh A. K. Gani untuk menyusun/membentuk KNID Bengkulu (dengan penunjukan itu Ir. Indra Caya telah mengetahui adanya berita proklamasi). Walaupun demikian, berita proklamasi secara resmi dan luas baru tersebar pada tanggal 3 September, saat mana berita itu dibuat pada surat kabar *Palembang Shinbun*.[17]

Kantor Berita *Domei* berperan besar dalam penyebarluasan berita proklamasi di Aceh. Para pemuda Aceh (Gazali Yunus dan kawan-kawannya) yang bekerja di kantor berita tersebut telah berhasil mendengar informasi tentang kemerdekaan Indonesia, namun berita tersebut diketahui beberapa hari setelah proklamasi dikumandangkan

(21 Agustus).[18] Informasi kemerdekaan itu masih beredar di kalangan terbatas. Tanggal 24 Agustus Teuku Nyak Arief yang memperoleh informasi kemerdekaan dari dr. A.K. Gani, Mohammad Syafei dan Adinegoro pada tanggal 26 Agustus.[19] Semenjak itu barulah berita kemerdekaan tersebut beredar ke tengah masyarakat luas.

Kejadian yang hampir sama juga terjadi di Pakanbaru (*Riau Shu*). Instansi berita/penerangan resmi pemerintah (PTT) juga punya peran dalam penyampaian berita proklamasi kemerdekaan di daerah itu. Proklamasi kemerdekaan diketahui oleh dua orang pegawai PTT yang bertugas di kota itu, yaitu Saari dan Azwar Apin. Berita itu mereka ketahui pada hari-hari terakhir Agustus, namun sebatas informasi lisan, belum berupa teks tertulis sehingga warga belum sepenuhnya yakin dengan kebenarannya berita itu.[20]

Sikap warga segera berubah sejak tanggal 30 Agustus, saat mana teks lengkap proklamasi sampai di Pakanbaru. Teks tertulis proklamasi tersebut dibawa dari Bukittinggi oleh tiga pemuda anggota *Giyugun*, yaitu Mansyurdin, Nur Rauf, dan Rajab serta ditempelkan di beberapa tempat di Pakanbaru. Walaupun tidak lama terpajang (karena segera ditanggalkan tentara Jepang), sejumlah warga Pakanbaru sempat membacanya, dan sejak itu resmilah berita proklamasi tersebar dengan luas di Pakanbaru.[21]

Orang perseorangan (tokoh politik dan pemuka masyarakat daerah) juga mempunyai peran penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. dr. A.K. Gani dikenal sebagai salah seorang tokoh daerah yang cukup aktif menyebarluaskan berita proklamasi. Tanggal 18 Agustus misalnya dia telah mengirimkan berita proklamasi kemerdekaan ini kepada Ir. Sudarsono, pimpinan buruh di Pertambangan Minyak Jambi. Berita itu disampaikan via telepon oleh dr. A.K. Gani tanggal 18 Agustus 1945.[22]

Segera setelah menerima berita proklamasi tersebut, Ir. Sudarsono langsung menyebarluaskannya kepada masyarakat. Dalam waktu yang singkat informasi ini telah tersiar luas di Sarolangun, Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tungkal dan juga Kerinci.

A.K. Gani juga menyampaikan berita proklamasi kepada tokoh masyarakat Bangka-Belitung. Berita itu juga disampaikan sehari setelah dinyatakan di Jakarta. Salah satu tokoh masyarakat keresidenan dua

pulau itu yang pertama menerima berita proklamasi kemerdekaan tersebut adalah Sulaiman.

Seperti disebut di atas, A.K. Gani juga berperan dalam menginformasikan berita kemerdekaan kepada pemimpin politik di Aceh, yakni Teuku Nyak Arif. Namun berbeda dari informasi yang disampaikan kepada Sudarsono (di Jambi) dan Sulaiman (di Bangka-Belitung), berita proklamasi disampaikan kepada Teuku Nyak Arief hampir satu minggu kemudian.

Peranan orang perseorangan juga terlihat dari penyebarluasan berita proklamasi di Lampung. Salah seorang tokoh masyarakat yang berjasa menginformasikan berita kemerdekaan di daerah paling selatan Sumatera ini adalah Amir Hasan. Sosok yang juga menjabat sebagai Kepala Penerangan *Lampung Shu* ini menyebarluaskan berita proklamasi segera setelah dia kembali dari Jakarta. Sosok lain yang membawa dan mempertegas informasi proklamasi kemerdekaan di Lampung Mr. Abdul Abbas. Figur yang menjadi salah seorang wakil Sumatera dalam sidang PPPKI ini menyebarluaskan berita proklamasi segera setelah dia kembali dari Jakarta via Palembang (24 Agustus 1945).

Kenyataan yang sama juga berlaku di Tapanuli. Warga Sibolga mengetahui berita proklamasi dari Hadely Hasibuan yang membawa berita kemerdekaan tersebut dari Jakarta. Kebetulan dia baru datang dari Jakarta dengan menumpang sebuah kapal kecil pada tanggal 26 Agustus 1945.[23] Di Tarutung, ibu kota *Tapanuli Shu*, berita kemerdekaan resmi diketahui oleh dr. F.L. Lumbang Tobing tanggal 27 Agustus dan informasi itu dia peroleh dari T.M. Moh. Hassan, Gubernur Sumatera yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Palembang sekembalinya dari Jakarta.[24]

Seperti di beberapa kota atau daerah lain, sesungguhnya berita proklamasi telah didengar oleh beberapa warga kota Medan pada tanggal 17 Agustus. Mereka mendapat informasi tersebut melalui radio yang luput dari penyegelan Jepang. Namun mereka tidak mempunyai kekuatan atau kemauan untuk menyebarluaskannya.[25] Seperti yang akan diuraikan pada bagian berikut nanti, di samping sikap represif Jepang, pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan sekutu (dan juga Belanda) telah mulai masuk ke kota tersebut, serta ada pula sebagian warga masyarakat Sumatera Timur (kalangan kerajaan dan bangsawan)



Tampak warga Medan sedang melaksanakan perayaan proklamasi kemerdekaan di Lapangan Merdeka Medan setelah mendengar berita proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

yang tidak menginginkan Indonesia merdeka, dan sebelumnya mereka telah mengadakan kontak dengan kekuatan sekutu atau Belanda.

Di samping radio dan telegram, orang perseorangan juga punya peran dalam penyampaian berita proklamasi di Medan. Sosok yang dimaksud adalah T.M. Hassan dan dr. Moh. Amir. Namun, informasi yang disampaikan kedua orang itu juga masih beredar dikalangan terbatas. Lambatnya penyebarluasan berita proklamasi melalui jasa orang perorangan (dalam hal ini melalui T.M. Hassan dan Moh. Amir), di samping dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang dikemukakan di atas, juga disebabkan nyaris bungkamnya T.M. Hassan dan Moh. Amir hingga beberapa hari setelah kembalinya mereka dari Jakarta. [26] Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulang dari Jakarta, sesampai di Tarutung, dr. Moh. Amir nyaris tidak punya keberanian untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Medan. Dia takut dengan keselamatan dirinya

dan juga keluarganya dari gangguan berbagai pihak yang melihatnya dari berbagai sisi yang berbeda. Pada saat itu, di samping seorang pendukung republik, Moh. Amir adalah mantan dokter pribadi Sultan Langkat dan beristrikan seorang wanita Belanda. Sebuah situasi dan kondisi yang memang membuat dirinya dan keluarganya bisa terlindas roda revolusi yang anti-rezim kerajaan (bangsawan) serta kolonialisme Belanda.

Berita proklamasi yang disampaikan oleh para pegawai Kantor Berita *Domei*, pegawai PTT, penyiar radio, telegram, jasa orang perseorangan dan melalui sejumlah surat kabar daerah, kemudian diperluas oleh adanya acara perayaan hari besar keagamaan, khususnya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri tahun itu, yang jatuh tanggal 8 September, dimanfaatkan sebagai momen penyambutan dan penyebarluasan berita proklamasi. Pemanfaatan kesempatan itu dilakukan di hampir semua daerah di Sumatera, tetapi yang paling nampak adalah di Tapanuli, tepatnya di Sibolga.

Sejak berita proklamasi disampaikan oleh Hadely Hasibuan tanggal 26 Agustus, sejumlah pemuda dan warga Sibolga mulai menyebarluaskan informasi tentang kemerdekaan secara lisan kepada warga daerah. Informasi itu juga mereka sampaikan melalui pamflet berupa ketikan ulang naskah proklamasi. Namun, karena bebagai keterbatasan (apalagi kontrol Jepang masih kuat), maka upaya itu belum mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam rapat yang diadakan oleh Panitia Partai Nasional Indonesia Tapanuli Tengah tanggal 7 September disepakati untuk mengumumkan kemerdekaan RI di Sibolga besok hari, bertepatan dengan pelaksanaan shalat Hari Raya Idul Fitri 1364 H. Direncanakan pengumuman kemerdekaan itu di dua tempat, pertama di Mesjid Raya yang akan dinyatakan oleh Hanif Samosir dan di Tanah Lapang Kotapraja yang akan dinyatakan oleh Syariful Alamsyah. Sayangnya, pengumuman di Mesjid Raya batal dilaksanakan, karena panitianya tidak berani menantang larangan tentara Jepang. Rencana pengumuman di Lapangan Kotapraja tetap dilaksanakan. Bahkan, dalam kesempatan itu, Syariful Alamsyah mengajurkan kepada masyarakat yang hadir agar menaikan bendera merah putih di rumah mereka masing-masing.[27]

Pemanfaatan perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk menyampaikan pesan dan berita proklamasi juga dilakukan oleh Adinegoro. Seperti

yang akan dibicaraka pada bagian berikut nanti, tanggal 5 September, beberapa waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Wakil Ketua *Chu Sangi In* ini mengirim telegram kepada hampir semua pemimpin dan pemuka daerah di Sumatera yang isinya mengajak mereka (dan warga daerah mereka) untuk merayakan Idul Fitri dengan mengibarkan bendera merah putih.

Pengibaran bendera merah putih adalah salah satu ekspresi dukungan anak bangsa terhadap proklamasi kemerdekaan. Pengibaran merah putih sekaligus menandai pengambilalihan kekuasaan oleh para pendukung republik dari tangan Jepang khususnya dan penjajah pada umumnya. Penaikan merah putih bisa dikatakan sebagai aksi heroik dan perlawanan pertama pejuang bangsa terhadap larangan Jepang yang diperintahkan menjaga *status quo*. Menariknya lagi, penaikan bendera tersebut dilakukan di tempat-tempat strategis yang menarik perhatian, serta di lokasi-lokasi yang menjadi simbol kekuasaan penguasa Jepang. Di Bukittinggi misalnya, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jam Gadang (ikon kota tersebut sejak zaman Belanda) tanggal 21 Agustus. Di Jambi bendera merah putih dinaikan di puncak menara air kota tersebut pada tanggal 22 Agustus. Kemudian, tanggal bendera merah putih dikibarkan 25 Agustus di depan Kantor Polisi, dan setelah itu di hampir semua kantor dan instansi pemerintah. Di Bengkulu bendera merah putih pertama kali dinaikan di depan Kantor PTT dan kemudian dilanjutkan dengan pengibaran di depan Kantor *Shu Chokan*. Di Pakanbaru bendera merah putih pertama kali juga dikibarkan di Kantor PTT (15 September) dan kemudian di halaman Kantor *Shu Chokan* (16 September).

Kejadian yang sama juga berlaku di hampir semua kota di Sumatera. Namun ada lagi pengalaman warga pulau itu yang menarik, setelah pengibaran bendera bendera merah putih, sering pula diiringi dengan pelaksanaan rapat samudera (pertemuan yang dihadiri oleh massa dalam jumlah banyak dan diisi dengan pidato-pidato para pemimpin atau tokoh masyarakat) dan pelaksanaan pawai yang diikuti pula oleh warga kota dalam jumlah yang banyak. Ketika pawai berlangsung pesertanya membawa spanduk dan plakat yang antara lain bertuliskan Indonesia telah merdeka, enyahlah kolonialisme-imperialisme, dan ungkapan-ungkapan lain mengenai kemerdekaan dan pengutukan terhadap penjajahan.



Jam Gadang di Bukittinggi, salah satu tempat pengibaran bendera merah putih pada tanggal 21 Agustus 1945 *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Tidak jarang pula, karena Jepang masih berkuasa, penaikan bendera merah putih atau pelaksanaan pawai dilarang atau mendapat halangan dari tentara yang masih bersenjata lengkap. Larangan atau

halangan tersebut umumnya diabaikan oleh anak bangsa. Mereka tetap menaikan bendera merah putih atau melaksanakan pawai. Bila tentara Jepang menurunkan bendera yang tengah berkibar, maka para pemuda atau warga kota menaikannya kembali. Bila pihak Jepang tetap melarang penaikan bendera atau tetap memaksa agar pawai dibatalkan, maka warga masyarakat melawan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pemogokan. Pemogokan dipilih karena cara ini dianggap paling aman namun besar dampaknya. Paling aman karena Jepang masih bersenjata lengkap dan mereka bisa saja memuntahkan peluru senapan mereka jika warga tidak patuh atau melawan. Dianggap berdampak besar, karena akibat dari pemogokan bisa melumpuhkan aktivitas mereka.

Banyak daerah yang melakukan perlawanan seperti ini, namun salah satu yang terkenal adalah aksi mogok warga Bengkulu. Aksi mogok itu berawal dari perintah Jepang yang menyuruh warga menurunkan bendera merah putih yang telah berkibar. Tentu saja warga tidak mau, sehingga tentara Jepang yang menurunkannya sendiri. Warga tidak terima dengan perlakuan Jepang tersebut, maka besok harinya dibalas dengan pemogokan serentak yang dilakukan oleh pegawai sejumlah instansi penting, seperti PTT, Gas dan Listrik, PU, Perkapalan, dan juga para pelayan (seperti sopir, juru masak, dan kebersihan) yang bekerja untuk Jepang. Aksi ini membuat Jepang "menyerah" dan memanggil pemimpin pemogokan, di antaranya Burhanuddin dan Nawawi serta Sabri. Setelah pertemuan itu, pemogokan dihentikan dan bendera merah putih diizinkan berkibar kembali.[28]

Bala tentara Jepang yang diperintahkan menjaga *status quo* dan kemudian tentara sekutu (serta Belanda) ternyata tetap berupaya menggagalkan proklamasi. Upaya itu tidak hanya dilakukan dengan berbagai larangan dan intimidasi serta kekerasan fisik lainnya, tetapi juga lewat media massa. Hal ini terbukti dari upaya sekutu (dan Belanda) yang menyediakan satu siaran radio khusus (dari Australia) yang menyiarkan berita-berita pro-sekutu dan Belanda, serta pembentukan Kantor Berita "Aneta" yang menyediakan berita-berita yang bersifat sekutu/Belanda-sentris. Untuk mengatasi provokasi lewat media massa tersebut, para pemimpin dan pemuka masyarakat serta para pemuda sejumlah daerah di Sumatera membuat berita tandingan dengan menggunakan media massa pula.

Untuk mewujudkan upaya mereka, para pendukung republik misalnya merebut percetakan yang dikuasai Jepang atau menerbitkan surat kabar. Di Aceh misalnya para pejuang merebut percetakan dan kemudian menerbitkan surat kabar yang diberi nama *Semangat Medeka*. Di Medan terbit *Pewarta Deli*, *Kerakyatan* dan *Mimbar Umum* (tahun 1946 surat kabar yang disebut terakhir ini pindah ke Tebingtinggi). Di Pematang Siantar terbit *Suluh Merdeka*. Di Tapanuli (Tarutung), pada bulan Oktober 1945 diterbitkan surat kabar *Suara Nasional* dan di Sibolga terbit harian *Rakyat*.[29] Di Sumatera Barat (Padangpanjang) pada bulan September terbit majalah *Berjuang* dan bulan November terbit harian *Demokrasi*, di Padang pada bulan September terbit surat kabar *Utusan Sumatera* dan *Suara Sumatera*, masih di bulan September di Bukittinggi terbit harian *Pedoman Kita*, dan di kota yang sama pada bulan Oktober terbit pula surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan pemimpin redaksinya Adinegoro ini merupakan surat kabar terbesar di Sumatera Barat pada masa awal revolusi, tirasnya waktu itu mencapai 14.000 eksemplar.[30] Walaupun agak terlambat, namun masih dalam masa revolusi, di Pakanbaru, Bengkalis dan Rengat juga terbit surat kabar yang sangat penting artinya sebagai alat propaganda dan penerangan dari pemerintah RI dalam menghadapi pemberitaan Belanda yang cendrung menyiarkan berita yang salah, tidak benar serta memojokan pemerintah RI. Di Pakanbaru ada dua surat kabar, yaitu *Perjuangan* dan *Our Struggle* (berbahasa Inggris). Di Bengkalis terbit surat kabar *Obor Rakyat* dan di Rengat diterbitkan harian *Dwi Warna*.[31] Di Palembang, tanggal 5 September surat kabar *Palembang Shinbum* diambilalih dan diganti namanya menjadi *Sumatera Baru* (1Juni 1946 namanya berganti lagi menjadi *Obor Rakyat*). Tahun 1946 juga terbit surat kabar *Fikiran Rakyat*.[32]

Ada kenyataan yang menarik dari keberadaan surat kabar "nasionalis" di atas. Pemilik, pemimpin redaksi dan wartawan berbagai surat kabar itu tidak hanya "orang Indonesia asli" (bumiputera), tetapi juga ada dari kalangan Tionghoa. Dengan demikian perjuangan penegakan proklamasi melalui media massa juga dilakukan oleh kalangan Tionghoa.[33]

Di kalangan "bumiputera" terlihat peran yang berbeda antara kalangan tua dengan kaum muda. Kaum tua lebih banyak tampil sebagai penggagas/pendiri dan pemimpin redaksi, sedangkan kaum

muda tampil sebagai wartawan. Tidak itu saja, kaum muda mempunyai peran yang sangat menentukan dalam beberapa pengambilalihan percetakan atau pengalihan kepemilikan/pengelolaan surat kabar lama (Jepang) ke tangan republik.

Walaupun dalam proses penerbitan surat kabar ada kerjasama yang harmonis antara kaum tua dengan kaum muda, namun dalam pengaktualan proklamasi secara sosial dan politik terdapat perbedaan yang cukup kontras antara kedua kelompok masyarakat itu. Sejarah membuktikan bahwa ada banyak perbedaan antara kaum tua dan kaum muda di masa-masa awal revolusi. Kenyataan ini terjadi merata di hampir seluruh daerah Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu bahkan telah menjadi kajian pula oleh sejumlah sejarawan.[34] Bagian berikut menampilkan "disharmonis" di antara kedua aktor sejarah tersebut.

2.4. Aktualisasi Proklamasi: "Kaum Muda" vs "Kaum Tua"

Hari-hari pertama era revolusi kemerdekaan adalah saat-saat dominannya peranan pemuda. Bila di Jakarta pemuda berhasil "mendesak" Sukarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, maka di beberapa daerah di Sumatera, berkat desakan para pemuda pula sejumlah pemuka dan pemimpin daerah mau menyatakan sikap terhadap berita proklamasi. Dengan kata lain, atas desakan serta respon pemuda itulah proklamasi kemerdekaan bisa diaktualkan di pulau tersebut.

Seperti telah di sebut di atas, berita proklamasi telah diketahui warga Bukittinggi pada tanggal 17 Agustus malam, dan besoknya tanggal 18 Agustus informasi itu telah tersebar dengan cukup luas di kota tersebut. Berita (naskah ketikan proklamasi) juga sudah disampaikan kepada Mohammad Syafei dan Adinegoro. Dua petinggi *Chu Sangi In* dan sekaligus pemimpin terkemuka di Sumatera Barat tersebut menyikapi berita proklamasi dengan sikap "kaum tua".[35] Segera setelah menerima/mengetahui adanya berita proklamasi, Mohammad Syafei segera menyingkir ke Kayutanam,[36] sedangkan Adinegoro memperlihatkan sikap ragu dengan berita itu.[37]

Sikap Adinegoro yang ragu tersebut membuat sejumlah pemuda tidak sabar, dan tanggal 18 malam mereka mendatanginya kembali serta meminta naskah (teks) proklamasi yang berada di tangannya. Para

pemuda menyerahkan teks proklamasi ketikan itu kepada Mohammad Syafei dan mendesaknya mengambil tindakan tegas dan tepat. Secara pribadi, Mohammad Syafei ternyata tidak berani mengambil sikap yang tegas sebagaimana diminta pemuda, sehingga dia mengajak dr. Rasyidin dan Khatib Sulaiman untuk rapat guna merespon desakan pemuda tersebut. Pada rapat yang diadakan di Padangpanjang tanggal 19 malam itu diputuskan untuk memperbanyak (dengan cara mengetik berita proklamasi tersebut) dan menyebarluaskannya ke seluruh Sumatera Barat.

Berbeda dengan situasi di Bukittinggi, di kota Padang para pemuda langsung menjadi pelaku utama penyebarluasan berita proklamasi. Berita proklamasi yang diterima oleh Aladin segera disampaikan kepada Yahya Latif dan selanjutnya kepada Arifin Alif, Sidi Bakaruddin, Ismael Lengah dan sejumlah pemuda yang lain. Pada tanggal 18 Agustus dua kelompok pemuda mengadakan pertemuan di Sawahan dan Alang Laweh. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke khlayak ramai dengan segera, tetapi harus dengan cara sembunyi-sembunyi.

Merespon hasil keputusan dua kelompok pemuda di atas, tanggal 19 Agustus para pemuda dalam jumlah yang lebih banyak (juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda Padang) mengadakan pertemuan di Pasa Gadang. Pada pertemuan itu diputuskan untuk memperbanyak berita proklamasi, menyebaluaskannya kepada masyarakat dan memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menegakan merah putih. Tidak itu saja, pada pertemuan tersebut para pemuda bahkan telah merancang langkah-langkah yang akan ditempuh guna mengambilalih kekuasaan dari tangan Jepang. Segera setelah pertemuan itu, seorang pemuda yang bernama Yahya Jalil "nekad" menemui *Shu Chokan* Sumatera Barat yang bernama Yano Kenzo dan telah berbicara "dari hati ke hati" mengenai pengalihan kekuasaan dengan penguasa itu.

Para pemuda juga bersikap agresif dalam pengalihan kekuasaan. Sikap ini terlihat dari rapat pemuda yang diadakan tanggal 25 Agustus di Pasa Gadang. Dalam rapat tersebut para pemuda menegaskan bahwa kemerdekaan tanpa pemerintahan adalah tidak mungkin, sehubungan dengan itu kekuasaan harus dengan segera diambilalih dari tangan Jepang. Posisi Yano Kenzo harus dialihkan kepada pemimpin republik, yang dalam rapat itu para pemuda mempercayakannya kepada

Mohammad Syafei. Sosok ini dipercaya pemuda, karena saat itu dia tengah berstatus sebagai Ketua *Chuo Sangi In* dan juga Ketua *Seikaiganshu Hokokai*. Sehubungan dengan itu, rapat memutuskan untuk mengirim beberapa pemuda menemui Mohammad Syafei yang saat itu berada di Padang (di rumah A. Muluk di kawasan Alang Laweh).

Menurut catatan Yahya Jalil, wakil pemuda yang menemui Mohammad Syafei, pada awalnya ketua *Chu Sang In* itu terlihat ragu menerima permintaan yang disampaikannya. Dia tidak bisa memutuskan sendiri jawabannya sehingga dia berjanji akan membicarakannya lebih dahulu dengan Khatib Sulaiman di Padang-panjang dan Anwar St. Saidi di Bukittinggi. Bahkan dia sempat bertanya, bagaimana kalau saya menolak usul kalian? Namun akhirnya dia setuju. Apalagi setelah mendengar jawaban Yahya Jalil, bahwa bila dia menolak pemuda akan menculiknya, serta setelah mendengar Yahya Jalil mengatakan bahwa kedurhakaan anak muda timbul dari tidak benarnya orang tua.[38]

Keputusan setuju yang dilontarkan Mohammad Syafei saat itu ternyata belum sungguh-sunguh. Hingga akhir Agustus, sosok yang juga dikenal dengan tokoh pendidikan tersebut masih belum menunjukan sikap tegas terhadap proklamasi dan pembentukan/pengambilalihan pemerintahan Sumatera Barat. Dalam rapat lengkap yang diikuti oleh para pemuda dan pemuka daerah Sumatera Barat yang diadakan di Padang mulai tanggal 26 s.d 29 Agustus, "orang tua" itu tidak pernah hadir (padahal dia selalu diundang dan kehadirannya sangat diharapkan). Pada hari terakhir rapat, dengan salah satu agenda memilih residen dan peserta rapat telah dipastikan akan memilihnya, dia juga tidak hadir. Menurut informasi, Mohammad Syafei masih ragu dengan keamanan dirinya dan juga masih ragu dengan sikap Jepang. Hal ini diutarakannya kepada Yahya Jalil yang sekali lagi diutus untuk meyakinkannya di Kayutanam, dan kepada Yahya Jalil dia juga masih bertanya, "bagaimana dengan Jepang".[39]

Para pemuda juga mempunyai peran yang besar dalam pengibaran bendera merah putih di kota Padang. Sang dwiwarna ini dikibarkan pertama kali tanggal 21 Agustus di kota itu, tepatnya di depan kantor pemuda di Pasa Gadang. Penaikan bendera merah putih di berbagai lokasi lainnya, bahkan dilakukan oleh para pemuda/ pelajar

sekolah lanjutan yang umurnya masih belasan tahun. Beberapa peristiwa penaikan bendera yang menegangkan dan sangat heroik terjadi di halaman kantor PTT (22 Agustus), di depan markas kepolisian, serta di atap kantor pemerintahan militer (29 Agustus). Dibutuhkan keberanian yang luar biasa dan kiat yang tepat untuk menaikan bendera di titik-titik simbol supremasi pemerintahan bala tentara Jepang di kota itu. Dan itu dilakukan dengan sukses oleh para pemuda.

Keberhasilan penaikan bendera di kantor pemuda serta di tiga simbol pemerintahan Jepang tersebut memicu semangat warga kota untuk menaikan bendera di seantero kota Padang. Walaupun demikian, pada saat-saat tertentu tentara Jepang menurunkan bendera yang tengah berkibar. Namun segera setelah mereka berlalu, warga kota menaikannya kembali.

Peran historis lain pemuda Padang di awal revolusi adalah keputusan mereka untuk membentuk organisasi yang dinamakan BPPI (Balai Penerangan Pemuda Indonesia). Sesuai dengan namanya, pembentukan BPPI ditujukan sebagai lembaga pemberi informasi dan penjelasan kepada warga yang membutuhkan keterangan tentang proklamasi. Karena itu, lembaga ini sangat aktif dalam menyebarluaskan berita proklamasi serta ikut serta dalam penaikan bendera merah putih. Namun, pembentukan lembaga ini sesungguhnya memiliki arti yang sangat dalam. Melalui lembaga ini para pemuda Padang dihimpun ke dalam satu wadah sehingga suara, sikap dan tekad serta dukungan mereka terhadap republik bisa disatukan. Tujuan ini ternyata sangat bermanfaat pada hari-hari pertama era revolusi.

Segera setelah berhimpunnya para pemuda ke dalam suatu wadah, maka aksi dan respon mereka terhadap kemerdekaan semakin tegas. Di samping berperan besar dalam penaikan bendera merah putih, para pemuda juga punya peran penting dalam pengambilalihan sejumlah perusahaan Jepang dan jawatan pemerintahan yang masih dijaga bala tentara *Dai Nippon*, seperti perusahaan angkutan Tomizama Indosha, kilang rokok Kyodo Tobacco, perusahaan tenun/pemintalan benang Nichemen, Jawatan Kereta Api, Sekolah Tehnik Simpang Haru, Studio Radio Simpang Haru, Kantor PTT, dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ saja, para pemuda bahkan menulis "Hak Milik Republik Indonesia" pada gedung-gedung yang mereka ambil alih itu.

Peran pemuda semakin nampak ketika tentara sekutu hadir di Padang. Pemuda telah memperlihatkan perannya sejak kedatangan bala tentara yang dominasi oleh serdadu Inggris dan Gurkha tersebut. Para pemudalah yang "menyambut" kedatangan tentara yang dipimpin oleh Mayor Jendral H.M. Chambers di pelabuhan Teluk Bayur. Para pemuda sengaja "diselundupkan" menjadi kuli dan tukang angkat barang serta peralatan militer sekutu di pelabuhan yang di zaman Belanda bernama Emmhaven. Mereka pulalah yang lebih dahulu mengetahui bahwa dalam rombongan tersebut juga ikut-serta NICA. Mereka pula yang nyaris bentrok dengan tentara sekutu saat mana opsir sekutu itu menurunkan bendera merah putih yang tengah berkibar dan menggantinya dengan bendera Inggris.[40]

Peran historis pemuda kemudian berlanjut setelah tentara sekutu dan NICA masuk kota. Beberapa pertempuran yang terjadi di kota itu melibatkan para pemuda. Para pemuda juga menjadi tulang punggung keamanan warga kota serta keselamatan republik. Ketika BKR (Badan Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan sejumlah lasykar (milisi yang berafiliasi kepada partai politik, seperti "Hisbullah" dan "Barisan Sabillah" yang berafiliasi kepada Masyumi, "Lasykar Muslimin" dan "Lasykar Muslimat" yang berafiliasi kepada Perti, "Barisan Hulubalang" yang berafiliasi kepada MTKAAN, "Temi" ("Tentara Merah Indonesia") yang berafiliasi kepada PKI, "Saifullah" yang berafiliasi kepada PKI Lokal Islamy dan sejumlah lasykar/barisan lainnya seperti "Badan Istimewa" (PRI), "Tentara Allah" (PPTI) dibentuk, para pemudalah tenaga inti dari semua lasykar/barisan tersebut.[41]

Dominannya partisipasi pemuda di kota Padang karena "kaum tua" lebih terkonsentrasi di Bukittinggi. Seperti disebut sebelumnya, Bukittinggi adalah ibu kota Sumatera dan aktivitas sosial-politik yang melibatkan para politisi dan tokoh serta pemimpinan masyarakat, yang umumnya dari kelompok masyarakat yang telah "matang" berkumpul di situ. Sekaitan dengan itu, Padang menjadi ruang yang utuh bagi para pemuda.

Dominannya para pemuda dalam merespon berita kemerdekaan juga disebabkan oleh pengalaman mereka beberapa waktu sebelumnya, terutama pada masa Jepang. Pada masa pendudukan tersebut merekalah yang banyak diajak tampil oleh Bala Tentara *Dai Nippon*.

Mereka menjadi tenaga inti dari *Giyugun*, *Keibodan*, *Seinendan*, da lain sebagainya.

Di sisi lain, reaktifnya kaum muda dalam merespon berita proklamasi bisa juga disebabkan oleh faktor kejiwaan. Para pemuda memiliki "darah muda" dan mereka cenderung tidak sabar. Mereka reaktif dan jarang atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memutuskan sesuatu. Mereka tidak suka terhadap orang yang lamban dan terlalu banyak pertimbangan. Tidak itu saja, mereka bahkan cenderung menggunakan prinsip, kerjakan dan lakukan dulu, resiko atau akibat pikirkan kemudian. Faktor kejiwaan seperti ini diperkuat lagi oleh tempaan pendidikan Jepang yang keras, disiplin dan cenderung menyudahi operasi (pekerjaan) secepat mungkin.

Panggung sejarah Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya pada awal revolusi juga didominasi oleh aktor pemuda. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, berita proklamasi telah diketahui oleh beberapa warga Medan pada tanggal 17 Agustus. Berita itu awalnya diketahui oleh dua pemuda, yakni Abdul Manan, seorang pengusaha "Restoran Tokyo Baru" (di zaman Belanda bernama "Luxe Restaurant") dan seorang lagi bernama Abdul Razak, seorang tokoh pemuda dari kalangan gerakan anti fasis yang bergerak di kalangan *Giyugun* dan *Heiho*.[42]

Kedua pemuda itu kemudian memelopori pembentukan dua organisasi kepemudaan. Abdul Manan dan kawan-kawannya (umumnya dari kalangan "sipil", seperti tukang-tukang jahit) tanggal 18 September membentuk BKPI (Badan Kebaktian Pemuda Indonesia). Abdul Razak dan kawan-kawannya (terutama dari kalangan "militer" yang umumnya mantan anggota *Giyugun* dan *Heiho*) tanggal 21 September membentuk BPI (Barisan Pemuda Indonesia).

Beberapa kegiatan pemuda Medan yang terkenal (dalam hubungannya dengan sikap lamban "kaum tua") adalah: Pertama, pada tanggal 20 September BKPI mendatangi T.M. Hasasan. Para pemuda anggota organisasi ini mendesak T.M. Hasaan untuk segera merealisasikan proklamasi. Mereka menegaskan kepada Gubernur Sumatera bahwa ribuan anggota BKPI siap berdiri di belakang T.M. Hassan untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga dia tidak perlu ragu-ragu mewujudkan proklamasi tersebut; Kedua, para pemuda (terutama dari kalangan BPI) marah besar kepada Moh. Said, pemimpin

redaksi surat kabar *Pewarta Deli*. Kemarahan itu dipicu oleh pemberitaan surat kabar tersebut yang menyiarkan berita, berasal dari Kantor Berita Belanda "Aneta", yang isinya antara lain mengatakan bahwa "Pemerintahan Sukarno-Hatta telah bubar dan Sukarno-Hatta sekarang dikawal oleh polisi rahasia Belanda". Kemarahan pemuda tersebut menyebabkan mereka menangkap Moh. Said. Penangkapan tersebut sebagai upaya kalangan BPI untuk meminta pertanggungjawaban Moh. Said tentang maksudnya memuat berita yang berasal dari kantor berita Belanda yang bersifat provokatif, tidak benar dan bisa melemahkan dukungan anak bangsa.

Penangkapan pemimpin redaksi surat kabar itu kemudian berlanjut pada pertemuan para pemuda dengan pemuka masyarakat daerah di Taman Siswa Jalan Amplas. Dalam pertemuan tersebut para pemuda mendesak Moh. Said untuk berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya memuat berita-berita yang bersumber dari pihak Belanda yang berisi provokasi terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada pertemuan itu, para pemuda juga mendesak T.M. Hasaan untuk menyatakan bahwa Sukarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan. Tidak itu saja, pada kesempatan tersebut para pemuda juga berhasil mempengaruhi semua yang hadir, terutama dari kalangan "kaum tua" untuk melahirkan kebulatan tekad, yang isinya adalah "pemimpin-pemimpin rakyat (kaum tua) dan angkatan muda berjanji terus menegakkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia".[43]

Kelahiran BKPI dan BPI dan aksi yang dilakukannya dan kemudian diiringi pula oleh perubahan yang demikian cepat. Perubahan-perubahan itu antara lain, masuknya tentara sekutu/Belanda ke Medan (Sumatera Timur), dukungan sebagian anggota masyarakat (keluarga kerajaan atau kaum bangsawan) terhadap kolonialis, serta keluarnya Maklumat Pemerintah No. X yang mengizinkan pembentukan Partai-partai Politik. Perubahan-perubahan ini semakin memicu semangat pemuda untuk tampil membela negara yang baru saja diproklamirkan. Sama dengan yang terjadi di daerah lain, perubahan-perubahan tersebut juga menjadi dasar bagi partai politik untuk membentuk barisan-barisan perjuangannya. Sehubungan dengan itu, maka muncullah berbagai organisasi pemuda atau barisan-barisan perjuangan di Medan khususnya dan di Sumatera Timur pada umumnya. Pemuda menjadi tulang punggung utama dari bebagai

organisai dan barisan perjuangan tersebut. Beberapa organiasi pemuda dan barisan yang terkenal saat itu adalah "Kebaktian Rakyat", "Barisan Keamanan Rakyat". Selanjutnya ada "Barisan Napindo" ("Nasional Pelopor Indonesia"), "Syarikat Nelayan Merdeka" dan "Barian Harimau Liar" (berafiliasi kepada PNI), "Hisbullah" (beraliasi kepada Masyumi), "Barisan Merah" (berafliasi kepada PKI), "Bintang Merah" (berafliasi kepada PSI), "Barisan Parkindo" (beafiliasi kepada Parkindo), "Lasykar Buruh" (berafiliasi kepada Partai Buruh), "Kesatria Pesindo" (berafiliasi kepada Pesindo), dan lain-lain.[44]

Seperti yang disebut di atas, anggota organisai pemuda dan lasykar ini berasal dari semua kalangan, mulai dari pemuda pelajar terdidik hingga tukang copet, seperti yang terlihat dalam film *Nagabonar* gubahan Asrul Sani.[45]

Pada awalnya, aksi berbagai organisasi pemuda dan lasykar ini betul-betul ditujukan kepada upaya penegakan proklamasi dan perlawanan terhadap kedatangan Belanda kembali. Namun, dalam perkembangan berikutnya, tindakan-tindakan liar serta penyerobotan-penyerobotan lahan milik asing mulai terjadi. Banyaknya organisasi pemuda dan barisan rakyat serta terkonsentrasinya posisi mereka di kawasan sekitar Medan dirasa tidak menumbuhkan hasil perjuangan yang sebaik-baikinya. Bahkan, kondisi tersebut cenderung menimbulkan persaingan di antara organisasi pemuda dan lasykar, juga antar-sesama partai politik.

Tindakan-tindakan liar dan penyerobotan-penyerobotan bisa terjadi karena kurangnya biaya operasional dan pasokan makanan. Pada awalnya biaya dan kebutuhan makan para pemuda dan lasykar ditanggung oleh rakyat. Namun, karena jumlahnya sangat banyak dan kondisi ekonomi rakyat yang juga masih sulit, maka warga masyarakat akhirnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kekurangan biaya dan kelangkaan makanan itulah yang akhirnya membuat pemuda pejuang dan anggota lasykar mulai memenuhi kebutuhan mereka secara sendiri-sendiri (tidak lagi tergantung pada rakyat). Upaya kreatif dan inovatif tersebut diawali dengan membentuk ERRI (Ekonomi Rakyat Republik Indonesia) dan kemudian ENRI (Ekonomi Nasional Republik Indonesia). Kedua lembaga ini mengontrol dan mengambil "cukai" semua barang yang masuk ke kota Medan. Dengan upaya itu mereka mendapat dana segar, sehingga bisa digunakan untuk membiayai

organisasi dan kebutuhan hidup para pejuang. Namun karena aksi kedua organisasi ini bisa mengangkangi kewibawaan dan peran pemerintah, maka kegiatannya dilarang dan beberapa pemimpinnya ditahan (apalagi keuntungan yang paling besar dari aksi tersebut jatuh ke kantong para pemimpin dan petingginya saja).[46]

Pada perkembangan berikutnya, sejumlah organisasi pemuda dan lasykar serta partai politik juga membuat badan-badan (seksi-seksi) perekonomian yang ditujukan untuk mencari dana bagi biaya operasional dan kelanjutan organisasi atau partai mereka. Kondisi ini kemudian berdampak (negatif) yang besar dan itu sangat terlihat dari munculnya aksi penyerobotan atau pegambilalihan lahan perkebunan atau hak milik orang/kelompok masyarakat lain yang ada di kawasan tersebut. Aksi-aksi ini menyebabkan perjuangan menegakan proklamasi di daerah menjadi begitu dinamis, sehingga pada kondisi tertentu seakan-akan meleset jauh dari cita-cita proklamasi itu sendiri. Namun hal ini sangat mungkin terjadi di Sumatera Timur, karena sejak awal proklamasi kemerdekaan sejarah kawasan itu sangat dinamis, dan kedinamisan tersebut, seperti yang akan dibicarakan di bagian belakang nanti, sangat terlihat dari aksi sekutu/Belanda, serta sikap warga daerah (terutama dari kalangan kerajaan/bangsawan) yang sangat berbeda dari banyak kawasan lain di Sumatera.

Di tengah hiruk-pikuk dan gaduhnya aksi pemuda dalam gelindingan roda revolusi, tidak pula bisa diingkari bahwa semangat dan aksi-aksi heroik mereka pulalah yang memungkinkan "kaum tua" di Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya menjadi lebih berani tampil ke depan dan lebih sungguh-sungguh pula mengaktualkan proklamasi di daerah itu. Penaikan bendera merah putih di lapangan Esplanade tanggal 4 Oktober dan penaikan bendera merah putih di hampir seluruh kantor pemerintahan yang baru direbut bisa terlaksana karena adanya desakan serta keberanian para pemuda. "Rapat raksasa" yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Medan tanggal 6 Oktober bisa terlaksana karena desakan kaum muda. Terselenggaranya "pawai raksasa" yang juga diikuti oleh puluhan ribu peserta dengan membawa berbagai spanduk dan panji-panji yang berisikan "Down with Imperialism", "We Want Peace and Order", "Indonesian Right for Pure Democracy", "The Right of Any Nation Their Own Goverment", dan "We Are Free Nation and Never Again the Lifeblood of Any Nation"[47] juga bisa terealisir atas desakan kaum muda.

Pemuda Aceh juga memiliki pengalaman yang hampir sama dengan yang dialami pemuda Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Pemuda Tanah Rencong itu bahkan telah diajak oleh penguasa militer Jepang untuk menyambut kemerdekaan beberapa waktu sebelum kekuasan mereka berakhir. Pada bulan Juni 1945 misalnya, pembesar Jepang di Aceh menghubungi Tuanku Hasyim, seorang tokoh pemuda daerah itu. Perwira tentara Jepang tersebut memintanya untuk mengorganisir pemuda daerah sehingga terbentuk suatu angkatan muda yang kuat di Aceh. Sebagai bagian dari pertemuan itu, Tuanku Hasyim juga bertemu dengan Matshubashi (*Aceh Shu Seityo*). Hasil pertemuan dengan petinggi Jepang itu adalah keputusan untuk mengadakan rapat pemuda, dan pada rapat yang direncanakan itu akan hadir Aceh *Shu Chokan* (S. Lino) dan *Aceh Shu Seityo* (Matshubashi). Petinggi Jepang nomor satu di Aceh itu direncanakan akan berpidato pada rapat yang dimaksud.

Rapat yang digagas Tuanku Hasyim dan Matshubashi di atas terselenggara tanggal 14 Agustus.[48] Namun, tidak seperti yang dijanjikan, *Aceh Shu Chokan* (L. Lino) tidak hadir. Satu-satunya pejabat Jepang yang hadir adalah Matshubashi. *Aceh Shu Setyo* ini memang menyampaikan pidatonya, tetapi sangat singkat dan kelihatannya tidak bersemangat. Di pihak lain, para pemuda menyambut pelaksanaan rapat dengan antusiasme yang tinggi dan para pemimpinnya menyampaikan orasi mereka dengan penuh semangat pula. Para pemuda pelaksana rapat yang diadakan di Kutaraja tersebut tidak hanya mengundang rekan mereka sesama kaum muda, tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin daerah dari kalangan "tua", seperti Teuku Nyak Arief dan Tengku Mohd. Daud Bereueh.[49]

Rapat tanggal 14 Agustus tersebut selanjutnya dicacat sebagai salah satu pilar penting tampilnya pemuda Aceh dalam merespon proklamasi kemerdekaan bangsa. Pembentukan organisasi pemuda IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) segera setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan adalah bentuk lain dari hasil rapat tanggal 14 Agustus itu (walaupun dalam rapat tersebut tidak disinggung dengan tegas perlunya membentuk organisasi pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan didapat).

Sikap dan kesediaan pemuda "memasang badan" untuk membela/ mempertahankan kemerdekaan kemudian ditegaskan dengan pembentukan API (Angkatan Pemuda Indonesia, yang kadang-kadang juga diterjemahkan menjadi Angkatan Perang Indonesia) tanggal 27 Agustus oleh sejumlah pemuda di Kutaraja. Organisasi yang didirikan dengan tujuan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari para pemuda di hampir seluruh Aceh. Hal ini ditandai dengan dibentunya MWD (Markas Wakil Daerah) di daerah-daerah (kabupaten-kabupaten) yang ada di Aceh, seperti di Sigli, Bireun, Lhok Sukon, Langsa, Kutacane, Meulaboh, dan Tapaktuan. API ini kemudian ditetapkan menjadi PRN (Pasukan Resmi Negara) oleh Teuku Nyak Arief pada tanggal 12 Oktober, dan peresmian itu dilakukan oleh Teuku Nyak Arief selaku Residen Aceh atas nama pemerintah RI. API ini menjadi dasar pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan TRI (Tentara Republik Indonesia) Divisi I Gajah (Aceh).

Pemuda Aceh juga mempunyai peran besar dalam penaikan bendera merah putih di berbagai kantor yang diambilalih dari tangan Jepang. Kaum muda juga punya andil besar dalam pelaksanaan rapat samudera dan pawai raksasa mendukung kemerdekaan.

Reaksi para pemuda yang spontan dan sungguh-sungguh mendukung proklamasi sejalan dengan respon ulama Aceh. Sama dengan pemuda, kaum ulama Aceh juga langsung menyatakan sikap mendukung proklamasi dan menentang kehadiran Belanda kembali. Para ulama menegaskan bahwa perang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali adalah perang sabil, dan orang yang tewas dalam perang di jalan Allah itu ganjarannya adalah mati sahid. Sikap dan tekad ulama tersebut dirumuskan dalam sebuah maklumat yang dihasilkan pada rapat yang diadakan tanggal 15 Oktober. Lengkapnya maklumat tersebut berbunyi:

> Perang dunia yang maha dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia dibawah pimpinan dari paduka yang mulia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Belanda adalah suatu kerajaan yang kecil dan miskin, satu negeri kecil, lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur. Bangsa dan negeri seperti ini kini bertindak

melakukan pengkhianatanya terhadap tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali.

Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang mereka kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali, dan menjalankan usaha untuk menghapus agama Islam kita yang suci, serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Jawa bangsa Belanda dan kaki tangannya telah melakukan keganasan terhadap kemerdekaan Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan dipihak kita. Sungguhpun begitu mereka belum juga insaf.

Segenap lapisan masyarakat yang telah bersatu padu, dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta, kita sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dilaksanakan.

Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini, perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah, sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

Kutaraja, 15 Oktober 1945

Atas nama Ulama Seluruh Aceh.

Tgk. Haji Hasan Krooeng Kale, Tgk M. Daoed Beureueh, Tgk. Haji Dja'far Sidik Lamdjabat, Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indra Poeri.[50]

Pemuda daerah-daerah lain di Sumatera (Tapanuli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung) juga termasuk kelompok yang paling awal mendukung proklamasi kemerdekaan. Mereka juga termasuk kelompok yang secara langsung dan tegas memaklumkan bahwa mereka akan membela kemerdekaan yang telah diproklamirkan dari sikap represif Jepang yang diperintahkan menjaga *status quo* di daerahnya serta dari rongrongan Belanda yang ingin berkuasa lagi. Para pemuda juga tercatat sebagai kelompok masyarakat yang mengambil peran besar dalam penaikan bendera merah putih dan pengambilalihan gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Dan sama dengan di Sumatera Barat, Sumatera Timut dan Aceh, para pemuda dari semua keresidenan di Sumatera juga menghimpunkan diri mereka ke dalam organisasi kepemudaan atau menjadi anggota berbagai lasykar yang berafilisasi kepada partai politik. Di samping itu, mereka juga ikut menjadi saksi atau terlibat dalam berbagai peristiwa sosial dan politik yang sesungguhnya terjadi antara "kaum tua *vs* kaum tua", sebuah realitas sejarah dan romantisme revolusi di Sumatera saat itu.

2.5. "Kaum Tua vs Kaum Tua" serta Pembentukan Pemerintahan Provinsi dan Keresidenan

Tidak seperti pemuda yang langsung mempercayai dan memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan, "kaum tua" terkesan lamban merespon berita kemerdekaan. Tidak itu saja, sebagian dari mereka bahkan mempersoalkan hal-hal lain yang bisa melemahkan semangat atau mengundang perpecahan di kalangan anak bangsa.

Seperti disebut sebelumnya, Mohammad Syafei dan Adinegoro adalah dua wakil "kaum tua" di Sumatera Barat yang ragu atau tidak langsung mempercayai berita proklamasi. Mohammad Syafei juga ragu dan memberikan jawaban yang tidak tegas ketika diminta para pemuda untuk menjadi Residen Sumatera Barat. Dia juga tidak pernah hadir dalam rapat yang diadakan oleh berbagai komponen masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu guna menyambut pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Namun, di sisi lain, terlihat sikap atau rasa tidak senang atau bahkan "sakit hati" mereka terhadap T.M. Hassan yang telah ditunjuk menjadi wakil Sumatera pada sidang PPKI di Jakarta, dan kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Sikap ini

terlihat dari pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan RI yang dinyatakan dan ditandatanganinya di akhir rapat tiga hari (27 s/d 29 Agustus), sebuah rapat yang dihadiri oleh para pemuda, tokoh, serta pemuka masyarakat Sumatera Barat di Padang.[51] Di atas nama dan tandatangannya, seperti terlihat pada kutipan berikut,[52] dinyatakan bahwa dia adalah tokoh/sosok yang mengatasnamakan warga Indonesia di Sumatera.

PERMAKLOEMAN
KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikoeti dan mengoeatkan pernjataan kemerdekaan Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin2 besar kita SOEKARNO-HATTA atas nama Bangsa Indonesia seperti berikoet:

PROKLAMASI

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain2 diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat2nya.

Djakarta 17 boelan 6 tahoen 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoendjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekittinggi hari 29 bl 8 th 1945

Atas nama Bangsa Indonesia di Soematera

Moehammad Sjafei

Dari pencantuman "atas nama bangsa Indonesia di Sumatera" tersebut terlihat/terkesan bahwa Mohammad Syafei masih menganggap dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Sumatera, dan sekaligus terkesan bahwa dia tidak mengakui penunjukan T.M. Hassan sebagai orang nomor satu di Sumatera. Padahal sebelumnya, tanggal (26 dan 27 Agustus), dalam perjalanannya dari Palembang menuju Medan, T.M. Hassan singgah di Bukittinggi. Pada kesempatan itu T.M. Hassan sempat bertemu dengan Adinegoro dan sejumlah pemimpin serta pemuka masyarakat daerah.[53] Pada kesempatan itu, T.M. Hassan menyampaikan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan, penetapan Undang-Undang Dasar, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, konsepsi nasional, dan sekaligus mengatakan dirinya dipercaya sebagai Gubernur Sumatera dan Moh. Amir sebagai Wakil Gubernur Sumatera.[54] Tidak ikutnya Mohammad Syafei menanti kedatangan T.M. Hassan dan Moh. Amir di Bukittinggi saat itu (padahal dia tengah berada di Kayutanam yang secara geografis tidak jauh dari Bukittinggi) juga bisa ditafsirkan dari sikap tidak senang atau tidak sukanya Ketua *Chu Sangi In* tersebut terhadap Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera itu.

Konflik antar "kaum tua", tepatnya antara kubu *Chu Sangi In* (Mohammad Syafei dan Adinegoro) dengan kubu pemerintah Propinsi Sumatera (T.M. Hassan dan Moh. Amir) juga terlihat dari telegram yang dikirim Adinegoro kepada semua pemimpin dan tokoh setiap keresidenan di Sumatera. Dari telegram ini terkesan, bahwa dia masih menganggap dirinya sebagai salah satu petinggi Sumatera. Dalam telegram yang dikirim sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri itu Adinegoro antara lain menginformasikan kepada warga Sumatera tentang kemerdekaan RI telah diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta. Dia mengimbau agar warga pulau itu untuk mengibarkan bendera merah putih serta menjaga keamaman. Lengkapnya, telegram yang ditandatangani tanggal 5 September tersebut berbunyi:

Berdasarkan Atlantic Charter, San Fransisco, berkenaan dengan maklumat Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Kibarkanlah di seluruh Sumatera di hari Raya Mulia ini Merah Putih saja. Lambang agama dan raja-raja Sumatera dibolehkan. Keamanan sempurnakan.

Selamat Hari Raya. Selamat Merdeka.

Adinegero, 5-9-'45.[55]

Konflik antar-"kaum tua", khususnya "perlawanan" terhadap kubu pemerintahan Propinsi Sumatera (T.M. Hasan dan Moh. Amir) tidak hanya didasarkan oleh ketidakpuasan terhadap penunjukan T.M. Hassan dan Moh. Amir sebagai utusan Sumatera ke sidang PPKI, serta penunjukkannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur semata, tetapi juga didasarkan oleh pandangan yang melihat "nir-prestasinya" T.M. Hasaan dan Moh. Amir, serta pandangan yang melihat daerah utara (Sumatera Timur) nyaris tidak menunjukan kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan sebelumnya. Perlawanan dengan dasar pandangan seperti ini dikemukakan oleh dr. A.K. Gani dari Palembang.

Perlawanan A.K Gani terhadap T.M. Hassan dan Moh. Amir dilakukan dengan terang-terangan. Dia misalnya mengangkat sejumlah pemimpin PNI di Sumatera (tanpa berkonsultasi dengan gubernur). Perlawanan lain A.K. Gani terlihat dari tindakannya yang mengirim utusan pribadi menghadap Presiden Sukarno guna mengajukan protes, bahwa ".....sejak awal revolusi tidak ada satupun laporan yang terdengar mengenai perebutan kekuasaan di utara....". Protes tersebut mengisyaratkan ketidaksetujuan A.K. Gani terhadap pemilihan "orang utara" sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan Sumatera, serta pemilihan daerah (kota) di utara sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan Sumatera.[56]

Dilihat dari perspektif waktu, konflik antar-"kaum tua" ini terjadi beberapa waktu setelah pernyataan kemerdekaan RI. "Perlawanan" dari kubu penentang Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi pada saat belum dikukuhkannya T.M. Hassan dan Moh. Amir sebagai pemimpin Sumatera secara resmi. Keadaan mulai berubah setelah Presiden RI mengirim kawat Surat Keputusan (*Besluit*) pengangkatan T.M. Hassan dan Moh. Amir sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera

tanggal 29 September 1945. Perubahan itu semakin nampak setelah T.M. Hassan mengangkat residen-residen di sepuluh keresidenan yang ada di Sumatera. Residen-residen yang diangkat dan ditetapkan tanggal 3 Oktober tersebut adalah: 1). Teuku Nyak Arief untuk Aceh; 2). Mr. Moh. Yusuf untuk Sumatera Timur; dr. Ferdinand Lumban Tobing untuk Tapanuli; 4). Mohammad Syafei untuk Sumatera Barat; 5). Aminuddin untuk Riau; 6). dr. A. Syagof untuk Jambi; 7). A.K. Gani untuk Palembang; 8). Ir. Indra Caya untuk Bengkulu; 9). Mr. Abdul Abbas untuk Lampung; dan 10). A Syarif untuk Bangka-Belitung.

Dari tokoh-tokoh yang diangkat terlihat dua nama yang sebelumnya melakukan perlawanan terhadap T.M. Hassan, yaitu Moh. Syafei dan A.K. Gani. Kedua sosok ini menerima pengangkatan Gubernur Sumatera itu dan kemudian termasuk dua residen yang segera merespon wewenang yang diberikan kepada mereka. Respon cepat tersebut terlihat dari tindakan mereka yang segera membentuk dan menata pemerintahan keresidenan di daerah kekuasaan mereka masing-masing.

Sebagai indak lanjut dari keluarnya "*Besluit*" Gubernur Sumatera, tanggal 4 Oktober A.K. Gani dengan resmi mengangkat sumpah sebagai Residen Palembang di hadapan para pemimpin dan pemuka masyarakat daerah itu. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pegawai dan pejabat yang akan menduduki posisi kepala dari berbagai jawatan dan kantor yang akan menjalankan roda pemerintahan di keresidenan. Dan memang setelah pengambilan sumpahnya sebagai residen, A.K. Gani langsung melantik sejumlah pejabat yang dipercayai mengepalai jawatan di Keresidenan Palembang. Beberapa pejabat yang dilantik/diambil sumpahnya hari itu adalah:

1. Abdul Rozak, Sekretaris Pusat Pemerintahan (Residen)
2. R.M. Mursodo, Bagian Kepolisian
3. Asyari, Bagian Kepolisian
4. Nungcik, memimpin Jawatan Penerangan
5. dr. M. Isa mengelola persoalan Minyak dan Pertambangan
6. R.Z. Fanani dan H. Cikwan memimpin Sosial

7. Ir. Ibrahim Zahir, Kepala Urusan Kemakmuran
8. Mr. A. Sidik, Kepala Urusan Pengadilan
9. Baay Salim, Kepala Urusan Pekerjaan Umum
10. H. Cikwan, Kepala Urusan Agama
11. R.M. Utoyo membawahi Jawatan Perhubungan dan PTT
12. Raden Hanin dipercaya sebagai Pejabat Pemerintahan Umum (Walikota) Kota Palembang[57]

Cepatnya A.K. Gani khususnya dan pemerintahan Keresidenan Palembang umumnya dalam membentuk pemerintahan daerah dikerenakan penyelengaraan pemerintahan itu telah dipersiapkannya sejak jauh hari sebelumnya. Setidaknya, persiapan para pemimpin dan pemuka masyarakat Palembang untuk menjalankan pemerintahan daerah telah dimulai sejak tanggal 23 Agustus. Pada hari itu mereka mengadakan rapat. Dalam rapat yang diadakanan sehari sebelumnya, mereka mendengar penjelasan resmi dari *Shu Chokan Palembang* tentang berakhirnya perang. Para pemuka masyarakat daerah itu langsung merancang susunan Pemerintahan Bangsa Indonesia di Palembang. Dalam pertemuan itu langsung diputuskan untuk menempatkan dr. A.K. Gani dan Abdulrozak sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan Pusat Bangsa Indonesia dalam Keresidenan Palembang. Di samping itu, ditunjuk pula Asaari dan Mursodo untuk Kepolisian, Ir. Ibrahim untuk Kemakmuran, Nungcik untuk Penerangan, Dr. M. Isa untuk Urusan Minyak dan Pertambangan, R.Z. Faizal dan H. Cikwan untuk Pemerintahan, R.M Utoyo untuk Perhubungan (PTT).[58]

Respon yang cepat dan agresif dari pemimpin daerah dan pemuka masyarakat Palembang ternyata "disokong" oleh petinggi Jepang. Walaupun ada larangan atau teguran, ternyata para perwira tinggi bala tentara Jepang tersebut umumnya menerima gagasan dan aksi dr. A.K. Gani dan kawan-kawannya.

Dalam kaitannya dengan pemerintah Provinsi Sumatera, para pemimpin dan pemuka masyarakat Palembang adalah kelompok masyarakat yang pertama mendapat penjelasan langsung dari Gubernur Sumatera setelah mereka menghadiri rapat PPKI dan ikut-serta dalam pengumandangan proklamasi kemerdekaaan di Jakarta. Seperti telah

disebut di atas, dalam perjalanan kembali dari Jakarta (24 Agustus), Mr. T.M Hasan, dr. Moh. Amir, dan Mr. Abbas singgah di Palembang. Pada malam harinya ketiga perwakilan Sumatera tersebut mengadakan pertemuan dengan pemimpin daerah dan pemuka masyarakat Palembang, di antaranya dr. A.K Gani, dr. M. Isa, Asaari, Ir. Ibrahim, Mursodo, R.Z. Fanani, Abdulrozak, dan Nungcik Ar. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang proklamasi kemerdekaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan Jepang, mengenai penetapan UUD tanggal 18 Agustus 1945, konsepsi-konsepsi mengenai KNI, Dewan Menteri, BKR, PNI, dan rencana-rencana penggantian/pengambilalihan kekuasan dari tangan Jepang.[59]

Proklamasi di Palembang tidak hanya disambut hangat oleh para pemimpin dan pemuka masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat luas. Hampir semua masyarakat di berbagai daerah dan kota di *Palembang Shu* (termasuk di daerah pedalaman) sibuk membincangkan berita



A.K. Gani, Residen Palembang *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

proklamasi dan memberikan respon positif, dalam artian mendukung penyataan kemerdekaan oleh Sukarno-Hatta.[60] Jadi tidak mengherankan jika A.K. Gani khususnya dan Palembang pada umumnya menjadi residen dan daerah yang paling cepat merespon pembentukan pemerintahan daerah pasca-keluarnya "*Besluit*" Gubernur Sumatera tentang pengangkatan residen tanggal 3 Oktober. Satu lagi sosok yang sebelumnya "melawan" T.M. Hassan dan kemudian memberikan respon yang relatif cepat, dalam kaitannya dengan pembentukan pemerintah daerah, adalah Mohammad Syafei. Lima hari setelah mendapat *besluit* pengangkatannya menjadi residen, tepatnya tanggal 8 Oktober, Mohammad Syafei mengeluarkan Surat Keputusan No. E.I/1 mengenai menetapan Kepala Pejabat (Kantor/Jawatan) yang akan bertanggungjawab menyelenggarakan perkerjaan-pekerjaan dalam berbagai jawatan/kantor/pejabat, termasuk dan Kepala Luhak (Bupati) yang akan mengepalai pemerintahan tingkat Luhak (Kabupaten) di Sumatera Barat.

Berbeda dengan Palembang dengan susunan pejabat daerahnya yang sedikit dan sederhana, maka Sumatera Barat membentuk 24 Urusan, Kantor dan Pejabat di tingkat pemerintahan keresidenan, dan menetapkan delapan Luhak (Kabupaten) di seluruh Sumatera Barat. Susunan lengkap Urusan, Kantor dan Pejabat ditingkat pemerintahan keresidenan itu adalah:

1. Urusan Umum di Kantor Keresidenan (Muhammad Rusyad gelar Dt. Perpatih Baringek
2. Urusan Surat-menyurat di Kantor Keresindenan (D. Dt. Junjung Tinggi M.)
3. Kantor Kesejahteraan Minangkabau (Ahmad Arif Dt. Majo Urang)
4. Pejabat Pengadilan (Mr. Harun Al Rasyid)
5. Pejabat Kejaksaan (Mr. St. Mohd. Rasyid dan A. Razak gelar Sutan Malelo)
6. Pejabat Polisi (Raden Suleman)
7. Pejabat Kesehatan (Dr. Moh. Djamil)
8. Pejabat Pengajaran (A. Muluk)
9. Pejabat Urusan Pekerjaan Umum (Mohd. Yassin Dt. Kayo)
10. Pejabat Pertanian (Mohamamd Said)

11. Pejabat Urusan Ternak (A.H, Endamora)
12. PejabatUrusan Kehutanan (Amir Hakim Siregar)
13. Pejabat Perhitungan Uang Negara (R.M. Sanjoyo Sastraningrat)
14. Pejabat Kas Negara (Setti Heran gelar Sutan Namora)
15. Pejabat Administrasi Kas Negara (Agus Sastradipraja)
16. Pejabat Pajak (R. Supardi Prawiradireja)
17. Pejabat Pegadaian (Mohamamd Yakim)
18. Pejabat Duane (Abu Nawas)
19. Pejabat Cukai dan Perhubungan Laut (Syamsuddin)
20. Pejabat Candu Garam (Burhanudin gelar Dt. Majo Besar)
21. Pejabat Tera (M. Sutopo)
22. Pejabat Pos, Kawat, Telepon, dan Radio (Sudibio)
23. Pejabat Kereta Api (Marah Bagindo)
24. Pejabat Umbilin (Rusli)

Adapun delapan Luhak (Kabupaten) yang dibentuk adalah:

1. Luhak Padang dan Sekitarnya, ibu kotanya Padang
2. Luhak Painan, ibu kotanya Painan
3. Luhak Kerinci-Indrapura, ibu kotanya Sungai Penuh
4. Luhak Tanah Datar, ibu kotanya Batu Sangkar
5. Luhak Agam, ibu kotanya Bukittinggi
6. Luhak Limapuluh Kota, ibu kotanya Payakumbuh
7. Luhak Solok, ibu kotanya Solok
8. Luhak Kecil Talu, ibu kotanya Talu[61]

Tidak itu saja, *Besluit* tersebut juga menetapkan 29 Demang. Satu orang ditempatkan di Kantor Residen, 7 orang ditempatkan di Kantor Wali Luhak (Bupati) dan sisanya di berbagai Kedemangan yang ada di Sumatera Barat.[62] Jadi, berbeda dengan Palembang, Sumatera Barat memasuki era pemerintahan Keresidenan sesuai dengan instruksi Jakarta dan kemudian memantapkan pemerintahan daerahnya dengan organ-organ yang sangat lengkap.

Relatif cepatnya Mohammad Syafei khususnya dan Keresidenan Sumatera Barat umumnya membentuk organ-organ pemerintah daerah ini juga disebabkan oleh telah dipersiapkannya sosok-sosok dan lembaga-lembaga pemerintahan apa saja yang akan dibentuk. Hampir sama dengan pengalaman Palembang, ancar-ancar pengambilalihan pemerintahan daerah serta penyusunan lembaga-lembaga pemerintahan daerah telah dirancang sejak minggu terakhir Agustus.

Berbeda dengan Palembang yang memulai penataan pemerintahan daerah dengan membentuk lembaga eksekutif, maka Sumatera Barat memulai penataan pemerintahan daerahnya dengan membentuk lembaga legislatif. Proses itu diawali dengan rapat tiga hari (27-29 Agustus) yang dihadiri oleh banyak pemimpin dan tokoh daerah, serta sejumlah anggota *Hookokai* tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan juga Kenagarian. Melalui rapat itulah diputuskan pembentukan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) tingkat Keresidenan. Dalam kesempatan itu diputuskan untuk mengangkat semua anggota KNID, di mana anggota lembaga tersebut diangkat/dipilih dari pengurus *Hookokai* lama dengan jumlah anggota sebanyak 41 orang. Tidak itu saja, melalui rapat itu pula diresmikan/disahkan pembentukan KNI Cabang (tingkat Kewedanaan) dan KNI Ranting (tingkat Kenagarian), di mana anggotanya dipilih dari anggota *Si/Gun Hookokai* (Kewedanaan) dan *Son Hookokai* (Kenagarian) sebelumnya.

Setelah "dewan legislatif" terbentuk maka "dewan" tersebut mengadakan rapat tanggal 1 Oktober 1945. Salah satu keputusan penting rapat itu adalah menetapkan dengan resmi Mohammad Syafei sebagai Residen/Kepala Daerah Sumatera Barat. Sebelum rapat resmi/lengkap ini, pada pertengahan September, pemimpin KNID dan beberapa tokoh masyarakat Sumatera Barat juga mengadakan rapat. Dalam rapat itu sesungguhnya nama Mohammad Syafei telah diusulkan untuk menduduki posisi Residen Sumatera Barat. Sebelumnya lagi, pada rapat antara tanggal 27 s/d 29 Agustus Mohammad Syafei juga telah diusulkan untuk menjadi Residen Sumatera Barat.

Dalam berbagai rapat yang dilakukan, susunan pemerintah daerah juga telah dibicarakan. Pada berbagai pertemuan itu juga diperdebatkan instansi-instansi apa saja yang akan dibentuk dan siapa-siapa saja yang akan menduduki kepala kantor/jawatan itu. Karena itu tidak juga sesuatu yang mengagetkan, bila beberapa saat setelah

"*besluit*" pengangkatannya secara resmi menjadi residen dikeluarkan, Mohammad Syafei langsung mengeluarkan keputusan tentang lembaga-lembaga serta para pejabat yang akan menduduki kepala dari instansi pemerintahan yang dibentuk.

Pola yang sama hampir juga berlaku di seluruh Sumatera. Ada daerah yang menyusun pemerintahan daerahnya dengan tergesa-gesa dan hanya memiliki jawatan/kantor/urusan dengan jumlah yang terbatas. Di sisi lain ada pula yang lebih serius dan "tertib administrasi", memiliki para petinggi daerah dan jawatan atau kantor yang cukup banyak. Adanya beberapa daerah yang membentuk pemerintahannya langsung dengan jawatan yang lengkap (banyak) disebabkan oleh tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup di daerah itu dan adanya respon (dukungan yang kuat dari warga daerah) terhadap proklamasi kemerdekaan. Sumatera Barat adalah sebuah keresidenan yang memang sangat kuat dengan SDM saat itu, dan daerah tersebut juga dianggap sebagai salah satu daerah yang sangat kuat serta solid mendukung kemerdekaan.

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, ada sebuah fenomena yang menarik dari pemilihan residen dan para pejabat di berbagai instansi, kantor dan jawatan pada pemerintahan daerah saat itu. Fenomena yang dimaksud adalah tidak munculnya keinginan dan pandangan "picik" untuk memilih PAD (Putra Asli Daerah) sebagai residen di masing-masing daerah. Hal yang sama juga terlihat dari penunjukan para pejabat yang akan mengepalai berbagai kantor dan jawatan di pemerintahan daerah tersebut. Di Palembang misalnya diangkat dr. A.K Gani sebagai residen, padahal dia adalah orang Minangkabau (Sumatera Barat). Di Sumatera Barat sendiri diangkat Mohammad Syafei sebagai residen, padahal dia sesungguhnya adalah orang Kalimantan Barat (Natan) (yang diadopsi oleh Marah Sutan seorang Minangkabau). Orang Minangkabau juga dipercaya sebagai Residen Riau, yakni Aminuddin. Sejumlah pejabat yang diangkat sebagai kepada jawatan dan kepala kantor di berbagai keresidenan tidak melulu Putra Asli Daerah, namun juga berasal dari beragam etnik, tidak hanya etnik-etnik yang ada di Sumatera tetapi juga dari daerah lain, termasuk Pulau Jawa. Di Sumatera Barat misalnya ada sebanyak enam orang petinggi daerah itu yang berasal dari luar Sumatera Barat. Hal yang sama sesungguhnya juga terjadi di keresidenan-keresidenan yang lain.[63]

Menarik untuk mencermati daerah yang melengkapi pemerintahan keresidenannya dengan jawatan/instanasi yang banyak. Gejala ini sesungguhnya, di samping bisa dipahami dari segi tersedianya SDM yang memadai atau lebih dari cukup, juga bisa dilihat dari perspektif "bagi-bagi" kursi/jabatan dalam upaya memberi tempat kepada berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat, sebagai bagian dari strategi untuk menyatukan kekuatan daerah dalam rangka merangkul semua komponen masyarakat, merangkul mereka dalam upaya mendukung proklamasi. Bahkan tokoh yang semula dianggap sebagai "kaki tangan" pemerintah kolonial juga dirangkul. Dengan itu, diharapkan dia akan "tobat". Perspektif seperti ini, walaupun menyebabkan "borosnya" aparat pemerintahan daerah—sebab ada jawatan/kantor yang dibuat nyaris tidak berfungsi pada saat itu—namun sangat berarti bagi penggalangan kekuatan guna mendukung republik yang masih muda dan butuh kesolidan berbagi pihak.

Walaupun demikian, tidak bisa pula diingkari, bahwa setelah pengesahan pembentukan Propinsi Sumatera dan pembentukan serta pengesahan pemerintahan keresidenan, masih ada kekuatan asing dan kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kemerdekaan serta tegaknya pemerintahan republik di Sumatera. Tidak itu saja, sebagian dari mereka menginginkan agar negara proklamasi segera berakhir dan kaum kolonialis Belanda berkuasa kembali. Dengan kata lain, masih ada kekuatan yang menentang dan mengingkari proklamasi.

2.6. Menentang dan Mengingkari Proklamasi

Aksi penentangan dan pengingkaran proklamasi dilakukan oleh setidaknya tiga kelompok masyarakat/bangsa, begitu pula ada tiga bentuk keterlibatan anggota masyarakat/bangsa tersebut dalam penentangan /pengingkaran proklamasi. Pertama, semua anggota kelompok/bangsa tersebut tidak menyetujui kemerdekaan RI. Kedua, hanya sebagian (besar) dari kelompok masyarakat/bangsa tersebut menolak kemerdekaan RI. Ketiga kelompok masyarakat/bangsa yang "ingin" mengakui kemerdekaan, namun terpaksa (atau dipaksa) untuk tidak melakukan itu.

Kelompok yang pertama terdiri dari bangsa asing yang datang ke Sumatera untuk betul-betul menguasai/menjajah kembali. Kelompok ini terdiri dari bangsa Belanda dan pasukan sekutu. Kelompok kedua

adalah warga masyarakat (orang Sumatera asli atau imigran yang telah lama bermukim di Sumatera) yang merasa rugi bila Indonesia merdeka. Mereka merasa diuntungkan bila kolonialisme ada di negeri ini, apalagi mereka sesungguhnya telah bekerjasama dalam lapangan ekonomi dan politik, serta telah menjadi bagian dari mesin kolonialis di zaman penjajahan Belanda. Di samping itu, mereka termasuk kelompok masyarakat yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan dan sangat dirugikan selama masa pendudukan Jepang. Kelompok masyarakat yang termasuk kedalam pihak ini umumnya berasal dari kalangan raja (pihak kerajaan), kaum bangsawan, dan bangsa Tionghoa. Kelompok ketiga adalah bala Tentara Jepang, yang baru saja kalah perang dan dipaksa menjaga *status quo* di Sumatera dan Indonesia.

Sikap Bala Tentara Jepang secara tegas dimulai sejak tanggal 22 Agustus, yakni segera setelah Komandan Tertinggi Bala Tentara *Dai Nippon* di Bukittinggi serta *Shu Chokan* di masing-masing daerah secara resmi mengumumkan kekalahan Negeri Matahari Terbit tersebut. Pengumuman itu relatif sama bunyinya, yakni menyebutkan bahwa Tenno Heika memerintahkan supaya peperangan dihentikan.

Pengumuman tersebut dilakukan di berbagai tempat, dan di hadapan berbagai kalangan. Di Palembang misalnya, pengumuman yang dilakukan oleh *Shu Chokan* Myako Tosio dan dilakukan di kediamannya serta disampaikan langsung kepada sejumlah pemimpin dan tokoh daerah.[64] Di Pakanbaru pengumuman disampaikan oleh *Shu Chokan* Makino Susaburo di Gedung Bioskop (Happy) dan dilakukan di hadapan para pegawai pemerintahan *Riau Shu*.[65] Di Aceh pengumuman dilakukan oleh *Shu Chokan* (S. Lino) di kediamannya tanggal 23 Agustus dan dilakukan di hadapan sejumlah pemimpin dan pemuda daerah.[66] Di Medan, *Shu Chokan* Sumatera Timur (Tesuro Nakashima) hanya mengeluarkan maklumat resmi bahwa Jepang telah kalah.[67] Selanjutnya dinyatakan bahwa sekutu menginstruksikan Jepang untuk memegang teguh *status quo*, tidak ada perubahan politik yang boleh dilakukan, Jepang ditugaskan memelihara keamanan sampai tentara sekutu berada di daerah tersebut, dan rakyat harus patuh pada Jepang.

Dari pernyataan-pernyataan di atas diketahui bahwa Jepang mengakui bahwa dia menjadi "wakil" sekutu dan patuh pada sekutu. Dari pernyataan-pernyataan itu juga diketahui bahwa Jepang tidak mengizinkan adanya perubahan, dalam hal ini perubahan politik berupa

kemerdekaan bagi rakyat dan warga Sumatera (RI). Sikap Jepang itu kemudian dipertegas dalam setiap pernyataan yang dikemukakan oleh para *Shu Chokan* tersebut tidak satupun yang menyinggung tentang proklamasi atau kemerdekaan RI.

Selanjutnya, sikap penolakan Jepang itu terlihat pula dari keengganan sejumlah *Shu Chokan* melakukan pengoperan pemerintahan di *Shu* yang mereka pimpin/bawahi. Sebaliknya mereka sangat patuh pada sekutu, mereka dengan segera melaksanakan apa yang diperintahkan sekutu.

Walapun demikian, ada juga beberapa tindakan Jepang (penguasa Jepang) yang dipandang "mendukung" proklamasi kemerdekaan. Di banyak daerah penguasa Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih, walapun di sejumlah daerah lainnya diturunkan kembali oleh tentara Jepang. Penguasa Jepang mengizinkan adanya rapat para pemimpin dan pemuka masyarakat daerah untuk membicarakan pembentukan berbagai organisasi, termasuk pembentukan KNID dan pemerintah pemilihan residen. Pihak Jepang mengizinkan diadakannya rapat raksasa dan pawai besar-besaran yang diiringi dengan pengusungan spanduk dan pamflet berisikan kemerdekaan Indonesia dan pengutukan terhadap kolonialisme/imperialisme. Tidak didengar adanya aksi Jepang yang membubarkan rapat para pemimpin dan pemuda daerah dalam rangka pembentukan KNID dan pemilihan residen. Di beberapa daerah pengusa Jepang (*Shu Chokan*) menerima atau bahkan mengusulkan agar "residen" yang dipilih pemimpin dan pemuka masyarakat daerah yang bersangkutan diangkat sebagai Wakil *Shu Chokan*.

Sikap "mendukung" ini juga diperlihatkan oleh Komandan Tertinggi Tentara ke-25 di Bukittinggi (Jenderal Shimura) pada saat menerima Mr. Moh. Hasan dan dr. Moh. Amir. Sang jenderal, *Gunseikan* Sumatera ini malah berpesan kepada gubernur agar mengendalikan sendiri pendidikan opsir, supaya kepada mereka dapat diberi bimbingan rohani dan memupuk cita-cita kebangsaan yang sesuai.[68]

Gunseikan Tentara ke-25 atau para *Shu Chokan* se-Sumatera memang memperlihatkan sikap menentang, namun sekaligus "mendukung" semangat proklamasi warga Sumatera. Sayangnya, seorang perwira Jepang seperti Laksamana Maeda, yang mendukung

dengan sungguh-sungguh serta "mau pasang badan" untuk kemerdekaan Indonesia tidak ditemukan di Sumatera. Mereka lebih memilih sikap mengiyakan perintah/tuntutan sekutu agar tetap menjaga *status quo*, tetapi pada saat yang bersamaan juga "bermain mata" dengan pemimpin dan pemuka masyarakat Sumatera (walaupun kadarnya tidak begitu besar dan tidak begitu kuat).

Sikap para petinggi Jepang yang "bermain mata" dengan pemimpin Sumatera, kemungkinan besar diketahui oleh sekutu dan sekutu tidak ingin itu tetap berlanjut. Karena itu, pemimpin sekutu membuat Surat Pernyataan (Maklumat) dan menyuruh Komandan Bala Tentara Jepang (dalam hal ini diwakili oleh Sumobucho sebagai Wakil *Gunseikan* Sumatera) untuk menyampaikannya. Maklumat tersebut disampaikan oleh *Sumubucho* saat berlangsungnya pertemuan antara dia dengan wakil-wakil pemerintahan RI, berserta anggota KNI tanggal 1 Desember 1945. Saat itu, *Sumubucho*, atas nama Inggris membacakan satu Maklumat yang ditandatangani oleh komandan tertinggi tentara sekutu di Sumatera yang isinya antara lain:

1. Bahwa di luar kota Medan, Palembang, Bukittinggi dan Padang, tentara Jepang diperintahkan oleh sekutu untuk menjaga keamanan.
2. Jepang diperintahkan menjalankan pemerintahan sipil.

Dari cara penyampaian Maklumat ini terlihat bahwa sekutu ingin menegaskan agar Jepang tidak boleh "main mata", apalagi mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dari Maklumat itu terlihat pula bahwa sekutu sesungguhnya telah memperhadapkan Jepang dengan warga Sumatera. Kalau ada masalah, yang akan berlaga hanyalah Jepang dan warga Sumatera. Keuntungan akan diraih oleh sekutu.

Infiltrasi sekutu di Sumatera (khususnya Sumatera Timur) sesungguhnya telah terjadi sehari sebelum pernyataan penghentian perang disampaikan oleh para *Shu Chokan* se-Sumatera. Tanggal 21 Agustus pesawat-pesawat tempur sekutu telah terbang di angkasa Sumatera Timur, Aceh dan Tapanuli. Pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan pamflet-pamflet yang isinya mengatakan sekutu telah keluar sebagai pemenang dalam Perang Asia Timur Raya dan Jepang telah bertekuk lutut. Pada hari yang sama "Radio Australia" berbahasa

Indonesia juga menyiarkan secara berulang-ulang berita mengenai kemenangan sekutu dan kekalahan Jepang. Pada pamflet dan siaran tersebut juga dikatakan bahwa Belanda akan kembali menguasai Indonesia, Belanda akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan terhadap Sumatera (Indonesia). Tidak itu saja, melalui pamflet tersebut juga dikatakan bahwa Kolonel Gorenson akan diangkat menjadi Gubernur Sumatera, dan pihak-pihak yang melanggar *status quo* akan dikenai hukuman berat.[69]

Belanda memang lebih agresif di Sumatera Timur. Belanda lebih dahulu mendapatkan pengaruhnya kembali di daerah tersebut. Seperti yang akan dibicarakan pada bagian berikut, Belanda bahkan diterima dengan suka-cita oleh beberapa kelompok warga SumateraTimur (kalangan kerajaan dan bangsawan), bahkan warga tersebut mempersiapkan satu komite khusus (*Comite van Omvangst*) untuk menyambut kedatangannya.

Belanda sesungguhnya telah masuk (menyusup) ke Sumatera Timur beberapa bulan sebelum menyerahnya Jepang. Belanda mulai masuk pada bulan Juni, jadi jauh mendahului masuknya Belanda (dan sekutu) secara resmi ke daerah lain di Sumatera atau bahkan di Jawa. Mereka masuk (diterjunkan) sebagai bagian dari pasukan ADCS (*Anglo Dutch Country Section*). Hingga tanggal 15 Agustus ada empat gelombang masuknya pasukan ini ke Sumatera Timur. Tujuan utama penyusupan mereka adalah untuk mengumpulkan informasi serta melakukan kontak-kontak dengan para pendukungnya bagi pelaksanaan invasi.

Dengan menyerahnya Jepang, invasi yang dimaksud gagal dilaksanakan. Karena itu, semua pasukan yang telah diterjunkan diminta menemui pemimpin Jepang, Mereka juga ditugaskan memeriksa tawanan dan interniran, serta sebisa mungkin membebaskan dan meringankan penderitaan mereka. Dalam konteks ini pasukan tersebut juga berperan sebagai RAPW (*Rehabilitation Allied Prisoners of War and Internees*).

Aksi pasukan itu dimulai tanggal 31 Agustus. Saat itu mereka menemui komandan tentara Jepang di Pangkalan Berandan. Pada hari yang sama (malamnya) dengan menggunakan truk yang diminta kepada Jepang mereka sampai di Medan. Sesampai di Medan, karena Jepang telah menyerah maka pasukan tersebut, yang dikomandani oleh

Brondgeest, dengan leluasa membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Dan ada banyak lagi aktivitas lain yang mereka lakukan.[70]

Jumlah tentara Belanda semakin banyak di Medan khususnya dan Sumatera Timur pada umumnya setelah pasukan sekutu masuk. Dengan berbagai kemudahan dan keleluasaan yang mereka miliki, pasukan Belanda (dan juga NICA), di samping melakukan berbagai provokasi, juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan kedatangan mereka. Aksi dan provokasi mereka ini kemudian juga diikuti oleh aksi dan provokasi sekutu. Dari aksi dan provokasi tersebut jelas terlihat, bahwa Belanda (NICA) dan sekutu memang ingin kembali berkuasa. Mereka betul-betul ingin menghabisi negara proklamasi.

Berbeda dengan Sumatera Timur, pada awalnya kedatangan sekutu di beberapa daerah lain di Sumatera disambut dengan baik oleh para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat setempat. Sambutan yang baik itu, terutama sekali didasarkan oleh adanya telegram Adinegoro dari KNI yang berisikan permintaan untuk menerima kedatangan sekutu dengan baik. Dalam telegram tersebut, Adinegoro, antara lain mengatakan bahwa sekutu mengakui Republik Indonesia secara *de facto*, segala jabatan di Jawa ada dalam tangan bangsa Indonesia, dan sekutu berjanji tidak akan memberi kesempatan kepada pihak Belanda untuk mendatangkan tentaranya ke Indonesia, sebab jika itu terjadi dapat menyebabkan peperangan antara Indonesia dengan Belanda.[71] Sambutan baik terhadap sekutu ini juga didasarkan oleh pernyataan yang dikemukakan petinggi sekutu bahwa kedatangan mereka hanya untuk melucuti tentara Jepang serta mengirim mereka kembali ke negeri asalnya.

Berdasarkan telegram dan pertimbangan tersebutlah, maka tanggal 22 Oktober 1945 sekutu mendarat di Palembang, Mereka masuk kota tanpa gangguan dari masyarakat. Tentara sekutu yang ditempatkan di Palembang itu adalah bagian dari pasukan yang sebelumnya tiba di Padang. Dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk tuntas menempatkan semua serdadu sekutu di Keresidenan Palembang. Selain ditempatkan di kota Palembang, tentara sekutu juga dikirim ke daerah pedalaman, bakan sampai ke Lahat.[72]

Sebelumnya, tanggal 10 Oktober tetara sekutu masuk kota Padang (melalui pelabuhan Emmahaven atau Teluk Bayur). Mereka datang dengan 12 buah kapal dan terdiri dari pasukan Inggris dan Gurkha. Pada waktu awal kedatangan, mereka disambut baik oleh para petinggi daerah. Tidak itu saja, untuk membantu pendaratan (membongkar muatan kapal) Residen Syafei bahkan mengirim 300-an pemuda.[73] Sayangnya, masih dalam proses pendaratan tersebut hampir terjadi insiden perkelahian atau pertempuran antara tentara sekutu dengan para pemuda (warga Padang), karena tentara sekutu menurunkan bendera merah putih yang tengah berkibar dan menggantinya dengan bendera Inggris. Kejadian yang lebih buruk bisa diatasi karena adanya campur tangan petinggi Sumatera Barat. Hanya saja, dari pasukan sekutu yang baru datang, juga ikut membonceng tentara NICA, dan inilah yang kemudian menjadi pangkal bala bagi hubungan sekutu dengan warga Padang khususnya dan pemerintahan Keresidenan Sumatera Barat umumnya.[74] Apalagi, dalam kenyatannya, tentara NICA kemudian sering memprovokasi dan membikin ulah sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah bentrokan dengan warga Sumatera Barat.

Kejadian yang sama juga terjadi di hampir seluruh Keresidenan di Sumatera. Hampir semua keresidenan dan warga daerah itu menyambut kedatangan sekutu dengan baik. Namun karena adanya NICA dan juga ulah sebagian anggota pasukan sekutu yang mencederai perarasaan warga Sumatera, maka bentrokan fisik tidak bisa diihindari.[75]

Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, sebagian orang/bangsa Tionghoa tidak menginginkan Indonesia merdeka. Mereka menginginkan Indonesia diserahkan kepada Tentara Tiongkok. Karena itu segera setelah pengumuman menyerahnya Jepang, banyak pemuda atau orang Tionghoa yang mengibarkan bendera Kuomintang dan mengelu-elukan Tiongkok. Reaksi seperti ini sangat nampak di Pakanbaru, dimana orang Tionghoa di kota itu banyak yang mengibarkan bendera Kuomintang di rumah dan kapal serta tongkang milik mereka. Beberapa waktu kemudian, kapal-kapal dan perahu-perahu milik Tionghoa bahkan tidak mau lagi diperiksa oleh duane atau polisi republik, serta tidak mau singgah di Siak dan kampung-kampung lainnya. Aksi ini menyebabkan tersendatnya dan terganggunya lalu-lintas orang dan barang serta sangat merugikan masyarakat dan daerah.[76] Aksi yang sama juga terjadi Aceh, Jambi, Medan, dan Palembang. Banyak Tionghoa di Medan yang merasa senang dengan kalahnya Jepang dan sangat berharap tentara Tiongkok lah yang akan

mendarat serta melucuti tentara Jepang. Sikap dan reaksi warga Tionghoa Medan ini menyebabkan terjadinya gesekan dengan pemuda dan warga lainnya yang mendukung kemerdekaan. Akibatnya, hubungan orang Tionghoa dengan Indonesia menjadi tegang. Hubungan yang kurang baik ini bertambah rusak oleh hasutan Belanda. Hubungan yang buruk dan rusak ini semakin runcing setelah sekutu menyerahkan penguasaan wilayah di luar kota Medan kepada Jepang. Dalam situasi yang bertambah genting ini, Belanda dan sekutu yang nyata-nyata berpihak kepada orang Tionghoa memaklumkan ".....untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan maka orang Tionghoa dipersenjatai....".

Belanda dan sekutu kemudian melengkapi orang Tionghoa dengan persenjataan yang lebih banyak, bahkan disertai dengan peralatan berat. Di tengah dukungan sekutu dan Belanda itulah



Mr. T. M. Hasan, Gudernur Sumatera *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

akhirnya, tanggal 1 Januari 1946, kaum Tionghoa mengumumkan pembentukan pasukan "Poh An Tui", sebuah milisi yang terdiri dari para pemuda Tionghoa yang bertujuan melindungi warga Tionghoa dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (namun dalam kenyataannya mereka mendukung aksi tentara sekutu dan hadirnya Belanda kembali).[77]

Kelompok masyarakat lainnya yang tidak mendukung proklamasi adalah sebagian raja, keluarga kerajaan dan kaum bangsawan. Aksi penentangan dan pengingkaran proklamasi dari kelompok ini sangat terlihat di Sumatera Timur dan Aceh. Seperti telah disebut sebelumnya, para raja, keluarga kerajaan dan kaum bangsawan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan kaum kolonialis Belanda. Mereka banyak mendapat keuntungan dari kaum kolonialis dan mereka adalah bagian kolonialisme itu sendiri.[78] Sebaliknya, kolonialis Belanda juga banyak mendapat keuntungan dari mereka. Mereka dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan kolonialis untuk memerintah masyarakat, mereka dijadikan sebagai ujung tombak menghadapi dan memerintah masyarakat.

Ada yang menarik dari lokasi di mana aksi para raja, keluarga dan kaum bangsawan ini terjadi. Aksi-aksi "pengkhianatan" itu umumnya terjadi di kawasan timur bagian utara Sumatera. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh karena di kawasan itulah sistem beraja masih berlaku dan betul-betul dipelihara oleh kolonialis Belanda. Di samping itu, di kawasan itu pulalah raja-raja, keluarga raja dan bangsawan betul-betul mendapat banyak (sangat banyak) keuntungan dari kaum kolonialis.

Aksi-aksi penolakan terhadap proklamasi secara terang-terangan mulai dilaksanakan pada waktu yang sangat awal. Pada tanggal 25 Agustus misalnya, Sultan Langkat, Teuku Mansyur, beberapa orang keluarga kerajaan, dan ditambah oleh beberapa orang mantan *ambtenaar* membentuk *Comite van Onvangst*. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelu-elukan dan menyambut dengan mesra kedatangan Belanda kembali. Anggota komite ini juga mengunjungi kamp-kamp tempat orang dan pegawai tinggi Belanda ditawan Jepang. Dalam kunjungan itu mereka membawa berbagai bahan makanan.[79]

Penentangan para raja dan anggota kerajaan terhadap kemerdekaan RI juga terlihat dari sikap Sultan Deli dan Langkat

menerima Brondgeest, komandan "pasukan penyusup" Belanda yang pertama kali masuk ke Sumatera Timur. Tidak itu saja, para sultan tersebut dan sejumlah petinggi kerajaan serta mantan pegawai Belanda lainnya menegaskan kepada Brondgeest, bahwa mereka akan bekerjasama Belanda dan mendukung kehadiran Belanda kembali.[80]

Bukti keberpihakan raja dan keluarga raja terhadap hadirnya kaum kolonialis juga terlihat tindakan mereka yang melecehkan pemerintah republik. Pelecahen tersebut dilakukan pada saat penobatan Sultan Langkat. Pada waktu itu wakil-wakil Belanda, sekutu dan Jepang ditempatkan di tempat terhormat, sedangkan Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan dibiarkan duduk dan bergabung dengan undangan masyarakat kebanyakan.[81] Dalam biografinya, T.M. Hasan menyebutkan penghinaan itu dilakukan pada saat meninggalnya Sultan Deli yang bernama Amiluddin Sani Perkasa. Pada saat itu, pelecehan terhadap republik dilakukan dengan hanya menempatkan Gubernur Sumatera (T.M. Hasan) duduk di salah satu sudut (pojok) ruangan istana saja, di sisi lain keluarga Sulltan Deli yang menerima utusan Belanda dan Jepang dengan penuh hormat, menempatkan mereka di tempat kehomatan (panggung utama), serta juga ditandai dengan pengibaran bendera Belanda setengah tiang di depan istana.[82]

Sultan Deli yang baru diangkat (Sultan Osman) juga mengingkari proklamasi dan mengharapkan perlindungan sekutu atas istananya di Medan. Dia tetap bersikap angkuh terhadap republik dengan mengatakan bahwa konstitusi republik akan menempatkan daerahnya di bawah dominasi Jawa. Sebaliknya, dia menginginkan adanya hubungan langsung dengan Kerajaan Belanda di bawah seorang komisaris. Dia menginginkan agar raja-raja (kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur) berada di luar negara Indonesia.[83]

Sikap dan perlakukan raja dan keluarga raja inilah yang akhirnya menimbulkan aksi rakyat terhadap hampir semua raja dan keluarga kerajaan di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946. Pada saat itu terjadi revolusi sosial yang ditandai dengan pembunuhan keluarga raja dan tuntutan penghapusan kerajan di daerah itu. Menurut Anthony Reid ada banyak raja dan kelurga raja yang terbunuh dalam revolusi tersebut.

Perlu juga dicatat, tidak semua raja dan keluarga kerajaan yang mengkhianati proklamasi. Ada juga di antara mereka yang mendukung

republik. Salah satu contoh yang sangat bagus adalah Sultan Siak Sri Indrapura. Raja yang bernama Syarif Kasim bin Hasim Abdul Jalil Syaifuddin itu menaikan bendera merah putih di depan istananya segera setelah dia mendapat kepastian tentang proklamasi kemerdekaan RI. Pada tanggal 28 November 1945 dia mengirim telegram kepada Presiden Sukarno yang isinya menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah RI dan menegaskan untuk berdiri di belakang Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dia juga menyerahkan harta pribadinya kepada pemerintah RI yang ditaksir berjumlah f. 13.000.00,- Di samping itu dia juga menyerahkan berbagai jenis senjata, seperti senapan, meriam, tombak, pedang/klewang kepada rakyat.[84] Tanggal 28 November itu juga dia dengan segera meletakan jabatannya sebagai sultan dan menyerahkan dirinya serta harta bendanya kepada republik.[85]

Pengkhianatan terhadap republik juga dilakukan oleh para uleebalang di Aceh. Aksi mereka ini juga dilakukan pada hari-hari pertama lahirnya republik. Segera setelah mendengar penyataan *Shu Chokan Aceh*, para uleebalang segera membentuk panitia penyambutan kedatangan Belanda, mereka merencanakan penyambutan secara besar-besaran. Mereka menyatakan pula dengan terang-terangan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap rakyat dan para pemimpin rakyat yang melawan Belanda, serta menyebabkan mereka lengser dari posisinya segera setelah Belanda pergi pascapenyerahan tanpa syarat kepada Jepang.

Pada awal September mereka telah mulai memaksa rakyat untuk melaksanakan "kewajiban tradisional", melakukan kerja wajib/paksa pada kebun dan tanah mereka. Salah seorang uleebalang Sigli, tepatnya di Lammeulo, yakni Teuku M. Daud Cumbok dengan segera menghubungi pejabat-pejabat Belanda yang ditawan di Rantau Prapat (15 September) untuk menyatakan harapan agar mereka selamat dan berharap agar mereka segera kembali ke Aceh. Dia dan didukung oleh anak buahnya juga menghimpunkan mantan KNIL. Tindakan pengkianatan para uleebalang juga diungkapkan dari aksi tanggal 12 Oktober yang menurunkan bendera merah putih yang tengah berkibar di depan kantor *Guncho* di Lammeulo. Aksi penentangan terhadap republik juga dilakukan dengan mencabuti poster-poster mendukung kemerdekaan yang dipasang pemuda.[86]

Lammeulo adalah salah satu pusat perlawanan kaum uleebalang terhadap republik. Di daerah itulah rapat pertama yang diikuti oleh banyak uleebalang dalam upaya mengembalikan posisi politik mereka (seperti di zaman Belanda) dilakukan. Di daerah itu pula rapat besar uleebalang ditegaskan bahwa mereka akan mendukung berkuasanya Belanda kembali. Di daerah itu pulalah dibentuk sebuah organisasi yang dinamakan BPK (Barisan Penjaga Keamanan) yang dipimpin Teuku Cumbok, sebuah organisasi yang bertujuan menghabisi rakyat yang tidak setuju dengan mereka, merampok harta benda rakyat untuk kepentingan perjuangan mereka, serta menangkapi atau menghabisi rakyat atau pemimpin rakyat yang mendukung republik.

Aksi pengkianatan para uleebalang dilakukan di banyak tempat, antara lain di Sigli, Bireun, Idi dan bebagai tempat lainnya. Aksi nyata mereka antara lain ditandai dengan menduduki Sigli, melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat. Aksi-aksi tersebut mulai semakin agresif pada awal Desember. Mereka juga berusaha agar tentara Jepang menyerahkan senjatanya kepada mereka. Di samping itu mereka melakukan aksi penembakan liar sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa di pihak rakyat pendukung republik.

Aksi pengkianatan terhadap republik dilakukan oleh hampir semua uleebalang di kabupaten-kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Bahkan pada awal Feburari 1946, Uleebalang di Aceh Utara dan Aceh Tengah melakukan aksi besar menyerang rakyat, yang katanya dilakukan sebagai pembalasan terhadap aksi rakyat yang membasmi kaum uleebalang.

Kaum bangsawan setingkat uleebalang, yang menjadi ujung tombak pemerintahan Belanda di daerah-daerah lain di Sumatera, seperti para penghulu yang menduduki posisi *Angku Palo* (*Kepala Nagari*) di Sumatera Barat, *Kepala Kuria* di Tapanuli, *Pesirah* di Palembang, dan *Batin* di Jambi, juga banyak yang merasa senang dengan kembalinya Belanda. Namun kadar keberpihakan mereka kepada mantan bos mereka itu tidak sekuat uleebalang, sehingga aksi yang mereka lakukan nyaris tidak berkesan. Bahkan di Tapanuli, para raja dan *kepala kuria* mundur dengan segera dan menyatakan menjadi "rakyat" pada awal 1946.

Di samping menghadapi kaum bangsawan dengan senjata, serta melakukan revolusi sosial yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,

harta dan benda, aksi rakyat dan pemerintah untuk menghabisi kekuasaan dan dominasi sosial-politik para raja, keluarga raja, serta kaum bangsawan adalah dengan melakukan demokratisasi pemerintahan. Pemerintahan kerajaan ditiadakan (dihapuskan) dan jabatan-jabatan kepala pemerintahan terendah, seperti kepala nagari, kepala kuria, pesirah dan batin, yang selama ini nyaris identik sebagai posisi tradisional yang diduduki kaum bangsawan diserahkan kepada siapapun yang mampu menduduki jabatan tersebut. Untuk itu diadakanlah pemilihan *angku palo* (*kepala nagari*), *kuria*, *pesirah*, *batin* secara langsung yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan ini diatur dengan Maklumat yang umumnya dikeluarkan oleh masing-masing keresidenan. Dengan demikian berakhirlah keberadaan kelompok yang mengingkari atau mengkianati proklamasi yang terdiri dari orang Indonesia sendiri.

Upaya-upaya untuk mengagalkan tegaknya republik, terutama oleh Belanda tetap berlanjut hingga tahun 1949. Di samping itu, beberapa upaya serupa yang dilakukan oleh "orang Indonesia" yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda melalui pembentukan negara-negara boneka, seperti NST (Negara Sumatera Timur), DISBA (Daerah Istimewa Sumatera Barat), atau pengkianatan PKI tetap berlanjut. Namun, perlawanan yang sungguh-sungguh yang diberikan oleh para pendukung republik menyebabkan berbagai upaya tersebut gagal mencapai tujuannya, sehingga akhir tahun 1949—bersama-sama dengan daerah lain di Indonesia—kedaulatan rakyat Sumatera sebagai bagian dari RI diakui Belanda (dan dunia internasional), dan Sumatera menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Catatan Akhir :

[1] Mohammad Hatta. *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi: Untuk Negeriku* (Jilid I). Jakarta: Gramedia, 2011. hlm: 59.

[2] Sebelumnya, sampai April 1943 Sumatera bahkan digabungkan dengan Semenanjung Malaysia dengan ibu kotanya Singapura *(Syonanto)*.

[3] Gusti Asnan. "Sumatra's Regional Governments" dalam Peter Post (ed.). *The Encyclopaedia of Indonesia in the Pacific War*. Leiden, Boston: E.J. Brill, 2010. hlm: 61-71.

[4] Penamaan *Riau Shu* bagi daerah yang berada di bagian tengah kawasan timur Sumatra tidak tepat, sebab nama Riau berasal dari penyebutan terhadap Kepulauan Riau (*Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (2de Deel). s'Gravenhage, Leiden: Martinus Nijhoff, E.J. Brill, 1918. hlm: 605.

[5] Daerah Kepulauan Riau dimasukan ke dalam kekuasaan pemerintahan militer Singapura (*Syonanto*).

[6] Anthony Reid. *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: KITLV-Pustaka Yayasan Obor, 2011. hlm: 294.

[7] *F-Kikan* atau *Fujiwara-Kikan* (F-Organisasi) adalah kesatuan intelijen Jepang yang ditugaskan melempangkan jalan bagi masuknya bala tentara Jepang ke Semenanjuang Malaysia, Sumatera dan juga India. Kesatuan yang dikomandani oleh perwira muda Fujiwara Iwaichi ini berhasil melakukan kontak dengan setidaknya 20 orang pemuda/pejuang Sumatera dan menggembleng mereka untuk mempengaruhi warga Sumatera agar menyambut dan mengelu-elukan kedatangan bala tentara Jepang.

[8] Organisasi tempat berhimpunnya para ulama Aceh ini juga termasuk kelompok yang pertama mengadakan kontak dengan pihak Jepang di Malaysia dan termasuk kelompok yang pada awalnya mendukung kehadiran Jepang di Sumatera.

[9] Beberapa bulan kemudian, terutama sejak Maret dan April baru diizinkan pembentukan pada tingkat kewedanaan dan desa (kampung).

[10] Di samping itu menampilkan "keterwakilan" tiga daerah utama di Sumatera, kepemimpinan *Chu Sangi In* ini juga merefleksikan keberagaman penduduk masing-masing daerah (*Shu*) di pulau tersebut. Mohammad Syafei, walaupun wakil dari Sumatera Barat, sesungguhnya dia adalah orang Kalimantan Barat, Adinegoro, walaupun dia orang Sumatera Barat, tapi

sebelum mewakili daerah itu dia bermukim dan berkarir di Medan serta menjadi Wakil Ketua *Shu Sangi Kai* Sumatera Timur, Abdul Abas yang mewakili Lampung sesungguhnya adalah orang Tapanuli, dan Teuku Nyak Arief adalah orang Aceh, tetapi dari kalangan bangsawan. Keberagaman juga terlihat dari wakil masing-masing *Shu* pada lembaga tersebut. Ada wakil yang berasal dari kalangan politisi (nasionalis), ulama, bangsawan/kerajaan, dan juga dari kalangan moderat, serta tidak hanya merupakan PAD (Putra Asli Daerah), sebab juga ada wakil dari kalangan "perantau" (dari etnik lain dan juga Tionghoa).

[11] Anthony Reid. *op.cit.* hlm: 301.

[12] Mr. T.M. Hassan berasal dari kalangan bangsawan (*uleebalang*) Aceh (Pidie) dan pada masa pendudukan Jepang lebih banyak berkiprah dalam urusan sandang-pangan serta karir politiknya hanya sebagai Kepala Bio Urusan Petisi di Kantor Keesidenan Sumatera Timur. dr. Moh. Amir adalah orang Minangkabau yang lama berkarir sebagai dokter di Sumatera Timur dan pada masa pendudukan Jepang dekat dengan kalangan pergerakan serta kaum bangsawan.

[13] Dalam biografinya, T.M. Hassan mengatakan bahwa Moh. Amir lah yang mengusulkan dirinya untuk menjadi gubernur, sebaliknya, walaupun tidak dinyatakan, pemilihan Moh. Amir sebagai Wakil Gubernur berasal dari usulan T.M. Hassan. Teuku Mohamad Isa (ed). *Mr. Teuku Moehammad Hasan: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999. hlm: 232-3.

[14] Muncul protes yang kuat dari Sumatera Barat dan Palembang mengenai penetapan Medan sebagai ibu kota provinsi tersebut. Suara (tudingan) yang paling santer terdengar adalah karena Gubernur dan Wakil Gubernur adalah "orang utara" (T.M. Hassan orang Aceh dan Moh. Amir berdomisili di Sumatera Timur). Walaupun demikian, penetapan Medan sebagai ibu kota itu juga bisa diterima, karena sebelumnya (pada masa Hindia Belanda) kota itu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera, dan sejak awal abad ke-20 Medan merupakan kota terbesar serta pusat kegiatan ekonomi yang terpenting di Sumatera.

[15] Fatimah Enar. *Sumatera Barat 1945-1949.* Padang: Pemda Sumatera Barat, 1978. hlm: 20.

[16] *Ibid.* hlm: 21.

[17] *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu.* Jakarta: Dep. P dan K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984. hlm: 120.

[18] *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: Departemen P dan K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayan Daerah, 1983. hlm: 56.

[19] Rusdi Sufi et.al. *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh* (Jakarta: Dep. P dan K, 1997. hlm: 68-9.

[20] Mochtar Lutfi et.al. *Sejarah Riau.* Pakanbaru: Biro Bina Sosial Setwilda Riau, 1996. (ed. pertama 1976. hlm: 430. *Sejarah Daerah Riau.* Jakarta: Dep. P dan K Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982. hlm: 205.

[21] *Ibid.* hlm: 431; *Ibid.* hlm: 206.

[22] *Propinsi Sumatera Tengah.* Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953. hlm: 258; *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. hlm: 45.

[23] *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi.* Medan: Badan Musyawarah Pejuang Repulik Indonesia Medan Area, 1976. hlm: 138.

[24] *Ibid.* hlm: 138.

[25] *Propinsi Sumatera Utara.* Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953. hlm: 21. Sebuah sumber lain menyebut bahwa berita proklamasi diketahui di Medan tanggal 19 Agustus oleh seorang markonis PTT, namun dia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan telegram itu. Berita itu hanya beredar dikalangan dia dan teman-temannya serta bersifat sebagai desas-desus saja. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara. Ibid.* hlm: 74.

[26] Buku *Propinsi Sumatera Utara* (1953: 27) menyebut bahwa para pemimpian daerah saat itu "belum mempunyai cukup kekuatan dan kemauan untuk menyebar ucapan pernyataan prokalmasi kemerdekaan itu dengan seluas-luasnya di tengah masyarakat".

[27] *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi. op.cit.* hlm: 140.

[28] *Propinsi Sumatera Selatan.* Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953. hlm: 77.

[29] *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 512-15.

[30] *Propinsi Sumatera Tengah. op.cit.* hlm: 839-42.

[31] *Ibid.* hlm: 842-43.

[32] *Propinsi Sumatera Selatan. op.cit.* hlm: 170-72.

[33] Misalnya surat kabar *Suara Sumatera* yang terbit di Padang (Lie Un Sam) dan *Our Struggle* di Pakanbaru (Toh Bun That).

[34] Walentina Waluyanti de Jong mencoba menampilkan contoh-contoh perbedaan antara kaum tua dan kaum muda tersebut. Lihat Walentina Waluyanti de Jong. *Sukarno Hatta Bukan Proklamator Paksaan.* Yogyakarta: Galangpress, 2015.

[35] Sikap "kaum tua" disini diartikan menerima berita itu dengan sangat hati-hati, bahkan cenderung tidak percaya atau masih menunggu informasi/penegasan resmi dari pihak yang lebih tinggi (bala tentara Jepang) sebagai "mitra" mereka saat itu.

[36] Kayutanam ada sebuah nagari kecil yang berada tidak jauh, sekitar 35 km dari Bukittinggi ke arah Padang. Di nagari tersebut berdiri INS, sebuah sekolah yang didirikan Moh. Syafei pertama kali tahun 1926. Pada zaman Belanda, saat didirikan pertama kali INS diartikan *Indonesisch Nederlandsche School.* Pada zaman Jepang INS itu diartikan "Indonesia Nippon School", dan setelah Indonesia merdeka diartikan "Institut Nasional Syafei".

[37] Fatimah Enar et.al. *op.cit.* hlm: 20.

[38] Mestika Zed et.al. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya.* Padang: Citra Budaya Indoesia, 2002. hlm: 63-4; 82.

[39] *Ibid.* hlm: 83-4.

[40] *Ibid.* hlm: 104-7.

[41] *Propinsi Sumatera Tengah. op.cit.* hlm: 553-55.

[42] *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 83.

[43] *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 29-30.

[44] *Ibid.* hlm: 111-14.

[45] Film *Nagabonar*, gubahan Asrul Sani.

[46] *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 111-12.

[47] *Ibid.* hlm: 31.

[48] Seperti telah diketahui, tanggal ini adalah tanggal bertekuklututnya Jepang kepada sekutu.

[49] *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: Departemen P dan K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayan Daerah, 1983. hlm: 51.

[50] Rusdi Sufi et.al. *op.cit.* hlm: 69-70.

[51] Permakluman itu sendiri ditandatanganinya di Bukittinggi, karena dia memang tidak ikut dalam rapat tersebut.

[52] *Propinsi Sumatera Tengah. op.cit.* hlm: 85-6.

[53] Sesudah meghadiri rapat PPKI di Jakarta, tanggal 24 Agustus T.M. Hasasan, Moh. Amir dan Abdul Abbas kembali ke Sumatera dengan menumpang pesawat terbang Jepang. Namun mereka hanya bisa menumpang hingga Palembang, karena setelah itu semua pesawat Jepang dilarang terbang. Dari Palembang T.M. Hassan dan Moh. Amir melanjutkan perjalanan mereka menuju Medan dengan menggunakan jalan darat. Dalam perjalanan darat itulah mereka singgah di Palembang, Jambi, Bukitinggi, dan Tarutung, serta bertemu dengan pemimpin dan pemuka daerah-daerah yang mereka lalui. Teuku Mohamad Isa (ed), *Mr. Teuku Moehammad Hasan: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999), hlm: 236.

[54] Di kota itu, dengan didampingi oleh Adinegoro, T.M. Hassan juga bertemu dengan *Gunseikan* Jenderal Shimura. Sang jenderal berpesan agar diadakan pendidikan opsir dan pendidikan tersebut langsung berada dibawah pengawasannya sebagai gubernur.

[55] M.Z. Ranni. *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hlm: 48-49.

[56] Anthony Reid. *op.cit.* hlm: 304.

[57] *Propinsi Sumatera Selatan. op.cit.* hlm: 36; Mestika Zed, *Kepialangan, Politik, dan Revolusi: Palembang 1900-1950.* Jakarta: LP3ES, 2003.

[58] *Propinsi Sumatera Selatan. op.cit.* hlm: 36; *Sejarah Daerah Sumatera Selatan.* Jakarta: Dep. P dan K. Bagian Proyek Inventarisasi & Pembinaan Nila-nilai Budaya, Propinsi Sumatera Selatan, 1991/92. hlm: 169-70.

[59] Teuku Mohamad Isa (ed). *op.cit.* hlm: 235.

[60] *Propinsi Sumatera Selatan. op.cit.* hlm: 37.

[61] *Propinsi Sumatera Tengah. op.cit.* hlm: 89-90; Fatimah Enar et.al. *op.cit.* hlm: 41-42.

[62] *Ibid.* hlm: 90-91; *Ibid.* hlm: 46-47.

[63] Gejala yang sama sebetulnya telah terjadi di masa-masa sebelumnya, terutama dari keanggotaan *Chu Sangi In* sebagai utusan masing-masing *Shu* dan angogota PPPK. Selalu saja ditemukan adanya anggota yang tidak merupakan PAD sebagai wakil/utusan dari masing-masing keresidenan yang bersangkutan.

[64] *Propinsi Sumatera Selatan. op.cit.* hlm: 35.

[65] Mochtar Lutfi et.al. *op.cit.* hlm: 429.

[66] Rusdi Sufi et.al. *op.cit.* hlm: 6.

[67] *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi. op.cit.* hlm: 71.

[68] Teuku Moh. Isa (ed.). *op.cit.* hlm: 236.

[69] *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi. op.cit.* hlm: 72-3; *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 39.

[70] M.Z. Ranni. *op.cit.* hlm: 78-79.

[71] *Sejarah dan Peranan SUBKOSS dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950).* Palembang: DHD-45 Propinsi Sumatera Selatan, 2003. hlm: 97.

[72] Mestika Zed. *Kepialangan, Politik, dan Revolusi: Palembang 1900-1950. op.cit.* hlm: 331-33.

[73] Menurut sebagian sumber, para pemuda yang dikirim juga ditugasi untuk memata-matai kapal, muatan kapal serta aktivitas serdadu yang baru datang.

[74] Mestika Zed et.al. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 19545-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya. op.cit.* hlm: 107ff.

[75] *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. hlm: 65-66; Mochtar Lutfi et.al. *op.cit.* hlm: 435-6.

[76] Mochtar Lutfi et.al. *Ibid.* hlm: 430.

[77] *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 30.

[78] Salah satu keuntungan yang mereka nikmati adalah gaji yang besar serta sejumlah tunjangan dan pendapatan ekstra lainnya atas berbagai konsesi pembukaan perkebunan dan pertambangan di daerah mereka. Penghasilan para raja dan kaum bangsawan di kawasan itu sangat besar sehingga dikatakan kehidupan mereka menjadi sangat mewah. Mereka juga

dikatakan memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Anthony Reid. *Sumatera: Revolusi dan Elit Tradisional.* Jakarat: Komunitas Bambu, 2011. hlm: 12, 65ff.

[79] M.Z. Ranni. *op.cit.* hlm: 76.

[80] *Ibid.* hlm: 79.

[81] Anthony Reid. *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. op.cit.* hlm: 303.

[82] Teuku Mohammad Isa (ed.). *op.cit.* hlm: 260.

[83] Anthony Reid. *Sumatera: Revolusi dan Elit Tradisional. op.cit.* hlm: 342.

[84] Mochtar Lutfi et.al. *op.cit.* hlm: 443-4.

[85] Teuku Mohammad Isa (ed.). *op.cit.* hlm: 260.

[86] *Propinsi Sumatera Utara. op.cit.* hlm: 64; Anthony Reid. *Sumatera: Revolusi dan Elit Tradisional. op.cit.* hlm: 272-3.

BAB III
PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI DI JAWA BARAT

Ali Anwar

3.1. Pengantar

Suara ledakan dinamit dan mortir bersahut-sahutan di seluruh penjuru Kota Bandung, Jawa Barat, pada senja hingga tengah malam 24 Maret 1946. Ledakan disusul dengan kobaran api dan asap yang membubung ke angkasa. Kota sejuk berjuluk Paris Van Java itu pun luluh lantak. Peristiwa pertama dalam sejarah Kota Kembang tersebut disaksikan oleh sekitar 300 ribu penduduknya yang mulai menjadi mengungsi. Diiringi hujan gerimis, mereka bersama tentara pejuang bergerak ke luar kota di sepanjang jalan-jalan utama barat daya, selatan, tenggara, timur, dan barat.

Pembakaran gedung-gedung dan rumah yang kemudian dikenal sebagai "Bandung Lautan Api" itu bukan dilakukan oleh pasukan Sekutu, Jepang, atau Nederlandsch-Indies Civil Administration (NICA), melainkan oleh para prajurit pejuang Republik Indonesia yang kecewa atas kelicikan tentara Sekutu dan kelemahan pemerintah pusat.

Ini adalah puncak dari pergumulan interpretasi atas takluknya Jepang oleh Sekutu dalam pentas sejarah kolonialisme dan imperialisme dunia. Para pemuda pejuang Indonesia menginterpretasikan bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan bangsa asing sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sementara Sekutu menganggap wilayah bekas Hindia Belanda dan pendudukan Jepang itu menjadi tanggung jawabnya, dan akan dikembalikan kepada Belanda.

3.2. Api dalam Sekam di Wilayah Para Investor

Sejak diberlakukannya politik ekonomi liberal pada 1870, wilayah Jawa yang melekat dengan Ibu Kota Hinda Belanda, Batavia, dijadikan daerah investasi bagi para pengusaha mancanegara. Semua semata untuk menambah devisa bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Wilayah bagian selatan Jawa Barat yang bergunung dan berbukit serta berudara sejuk dikuasai para tuan tanah dari etnis Eropa dengan perkebunan sebagai investasi utamanya, terutama di Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Sementara wilayah Jawa Barat bagian utara di dataran rendah dan berawa-rawa berudara panas dikuasai para tuan tanah dari etnis Cina, dengan pertanian sebagai basis utama investasinya, terutama di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Tangerang, dan Serang.

Untuk menarik investor di wilayah Priyangan tersebut, sejak masa Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan pos Anyer-Panarukan. Di Jawa Barat, Jalan Daendels membentang dari Anyer-Serang-Jakarta hingga Batavia-Bogor-Cianjur-Bandung-Sumedang-Cirebon. Sementara untuk mengangkut hasil bumi di wilayah pegunungan dan pesisir, pada 1884 dibangun rel kereta api Manggarai-Bogor-Cicalengka[1] dan Manggarai-Kedung Gede-Bandung sejak 1887.[2]

Bandung dan Bogor dijadikan kota satelit baru pada 1920-an, lengkap dengan kantor-kantor pemerintahan dan swasta, pusat pertokoan, hingga sekolah dan perguruan tinggi. Untuk memberikan otonomi kepada daerah jajahan, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsie West-Java atau Provinsi Jawa Barat pada 1925 berdasarkan *Staatsblad* 1925 nomor 378.[3]

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung menjadi kota terbesar di Jawa Barat dan terbesar ketiga di seluruh Indonesia. Kota ini terletak di daratan berbentuk mangkok nasi sekitar 2.400 kaki di atas permukaan laut. Bentuk wilayahnya oval dengan panjang 25 mil dan lebar 10 mil, dikelilingi barisan pegunungan permai yang tingginya mencapai 7.500 kaki, dan dibelah oleh Sungai Citarum.[4]

Bandung pun menjadi "gula" bagi para "semut" dari mancanegara dan kota-kota lain di penjuru nusantara. Bandung yang

menjadi kota multi etnis dan kultur, melahirkan kaum profesional, para pejabat, akademisi, politikus, pengusaha, tokoh agama, hingga wartawan dan seniman. Pada masa pendudukan militer Jepang, di kota itu ditempati oleh 437 ribu jiwa.[5]

Golongan terbesar dari populasi di Kota Bandung adalah orang Indonesia sebanyak 380 ribu jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah orang Sunda yang merupakan penghuni asli kawasan pegunungan Jawa Barat, namun terdapat pula kelompk etnik Jawa yang relatif besar serta cukup banyak orang Minang, Batak, dan anggota kelompok etnik lainnya dari luar Jawa. Orang Cina yang berjumlah sekitar 40 ribu jiwa sebagian besar berprofesi pedagang. Golongan terbesar ketiga adalah orang Eropa yang terdiri dari orang Belanda asli, peranakan eurasia, dan bangsa lainnya, yang berjumlah 27 ribu jiwa.[6]

Namun, investasi besar-besaran di Jawa Barat pegunungan dan pesisir tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteran rakyatnya. Para tuan tanah dan pemerintah lebih cenderung membela kepentingan pejabat dan aparatnya ketimbang penduduk pribumi. Kepada penduduk pribumi, mereka memberikan upah yang rendah serta besarnya pajak dan retribusi. Dampaknya, sebagian besar kaum pribumi menjadi antipati terhadap penjajah. Di beberapa tempat timbul gerakan sosial.

3.3. Penandatanganan Kapitulasi di Subang

Dibanding daerah-daerah lain, Jawa Barat adalah wilayah paling strategis dalam kancah peralihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Pada awal 1942, Pemerintah Hindia Belanda kalah di berbagai pertempuran. Untuk menggenapkan pengakuan atas kekalahannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Starkenborg Stachouwer dan Panglima Militer Ter Poorten menandatangani kapitulasi di lapangan terbang Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada Ahad, 8 Maret 1942, pukul 17.15 Waktu Jawa. Isinya menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada tentara Jepang.

Pada pukul 23.00, radio Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) yang memancarkan gelombangnya melalui stasiun darurat di Ciumbuluit, Bandung, untuk terahir kalinya menyiarkan siaran ke dunia bebas. Penyiar Bert Garthoff sempat

menyampaikan salam terahir: "*Wij sluiten nu. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin!*" yang artinya,: "Kami tutup siaran ini sekarang, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di waktu yang lebih baik. Hidup Sri Ratu!"

Pemerintah Pendudukan Militer Jepang membagi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi tiga daerah pemerintahan. Pemerintahan Militer Angkatan Darat Keduapuluh Lima meliputi Sumatera yang pusatnya berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemerintahan Militer Angkatan Darat Keenam Belas meliputi Jawa dan Madura yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, yang berpusat di Makassar.

Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri dari Gunseireikan (panglima tentara) dengan Saiko Syikikan sebagai pucuk pimpinannya dan Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Panglima Tentara Keenam Belas di Pulau Jawa Letnan Jenderal Hitosyi Imamura dan Kepala Staf Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki, ditugaskan membentuk pemerintahan militer di Jawa. Koordinator pemerintahan militer disebut Gunseibu yang dibentuk di Bandung, Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur.

3.4. Merangkul Pejabat Pribumi dan Kaum Pergerakan

Setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer yang bertugas untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan membentuk pemerintahan setempat. Sebagian besar pegawainya diangkat dari kalangan bangsa Indonesia. Langkah ini dilakukan, selain Jepang kekurangan pegawai dari bangsa Jepang, juga untuk merangkul putra-putri Indonesia agar mendukung Jepang.

Karena itu, Gubernur Jawa Barat Kolonel Matsui dibantu oleh Wakil Gubernur R. Pandu Suradiningrat dan pembantu Wakil Guberrnur Atik Suardi.[7] Pada 29 April 1942, Gubernur Matsui mengangkat beberapa orang menjadi residen. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat sebagai Residen Banten yang berkedudukan di Serang, R.A.A. Sujadjajanegara sebagai Residen Bogor, R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Residen Priangan berkedudukan di Bandung, Pangeran Aria Suriadi sebagai Residen Cirebon, R.A.A. Surjo sebagai Residen

Pekalongan, dan R.A.A. Sudjiman Martadiredja Gandasubrata sebagai Residen Banyumas.[8]

Bekas *wexthouer* pada masa Hindia Belanda, R.A. Atma Dinata diangkat sebagai Sityo atau Wali Kota Bandung pada April 1943. Mr. J. Ardiwinata sebagai Fukusityo atau Wakil Wali Kota Bandung (kemudian digantikan oleh Ir. Ukar Bratakusumah) dengan Basuni sebagai Sekretaris Wali Kota Bandung. Sementara Dr. Djundjunan diangka sebagai Kepala Kesehatan Bandung Si.

Sejak 8 Agustus 1942, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan 17 daerah pemerintahan tertinggi (*Shu*) di Jawa, yakni Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura.

Berbeda dengan Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung mencurigai kaum pergerakan, pada awal kekuasaannya Pemerintah Pendudukan Jepang malah bekerja sama. Buktinya, mereka membebaskan para pemimpin pergerakan Indonesia yang ditawan atau dibuang oleh Pemerintah Hinda Belanda, seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sjahrir.[9] Tiga serangkai itu sepakat berbagi peran. Sukarno dan Hatta bergerak "di atas tanah" atau bekerjasama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir bergerak "di bawah tanah" atau tidak bekerjasama dengan Jepang. Hatta bersedia menjadi penasehat pemerintah militer Jepang. Dia dibantu oleh A.K. Pringgodigdo, Suwiryo, Sujitno Mangunkusumo, dan Mr. Hardjono.

Kerja sama juga dilakukan oleh Sukarno, Mr. Moh. Yamin, Oto Iskandardinata, Mr. Sjamsudin, dan Muchtar. Selain Sjahrir, tokoh yang memilih tidak bekerja sama antara lain Dr. Tjipto Mangunkusumo. Sjahrir lantas menyingkir ke Cipanas, Cianjur.[10] Saat dibentuk organisasi politik Tiga A—Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung asia, Jepang Cahaya Asia—, tokoh Parindra Jawa Barat, Mr. Sjamsudin, didapuk sebagai ketuanya. Sjamsudin dibantu oleh bekas tokoh Gerindra lainnya, yakni K. Sutan Pamuntjak dan Mohammad Saleh.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Jepang di Jawa Barat merekrut kalangan pemuda baik dari kubu nasionalis maupun Islam. Kaum muda dibutuhkan, karena mereka memiliki semangat dan idealisme. Mereka juga dinilai belum "tercemari" pemikiran Barat, sehingga mudah bagi Jepang untuk menjalankan propagandanya. Para

insruktur Jepang memberikan pelajaran tentang *seiyin* (semangat) *busyido* (ksatria), disiplin, dan memberantas rendah diri, melalui lembaga pendidikan sekolah dasar dan menengah. Sementara untuk kaum muda, mereka dididik di lembaga pendidikan khusus seperti A Seinen Kunrensyo yang dibentuk pada Juli 1942 dan Barisan Pemuda Asia Raya pada Agustus 1942.[11]

Namun, perekrutan kalangan muda diiringi oleh pembekuan segala kegiatan politik di Jawa Barat. Bala tentara Jepang menerapkan sistem fasisme dan menjadikan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus dianut.[12] Jepang di Jawa Barat melarang kebebasan menyatakan pendapat mengenai urusan pemerintahan, keadaan politik internasional, mendirikan partai politik yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan sendiri, atau organisasi partai politik yang berdasarkan ideologi nasional atau internasional. Bahkan, masyarakat tidak boleh mendengarkan siaran radio luar negeri, seperti Radio BBC, Radio Australia, Suara Amerika. Jepang memutus, memblokir, dan menyegel gelombang pendeknya.[13]

Sementara itu, para guru diberi tempat terpandang oleh Jepang. Mereka, selain bisa mengajar kaum priyayi, juga boleh mendaftar sebagai perwira di lembaga kemiliteran Pembela Tanah Air (PETA). Para guru yang pernah menjadi anggota PETA adalah Jenderal Sudirman dan Kolonel Sukanda Bratamenggala.[14]

Tokoh masyarakat berpengaruh di Jawa Barat direkrut Jepang. Para ulama yang berpengaruh dimanfaatkan Jepang melalui Shumubu (Kantor Urusan Agama) untuk kepentingan propaganda di tingkat pusat hingga ke desa-desa. Untuk menanamkan semangat pro-Jepang dan wawasan percaturan dunia internasional, sebanyak 50 orang ulama dilatih khusus di Jakarta pada Juli dan Agustus 1943. Pada 15 Desember 1944, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) mendirikan Kaikyo Seinen Teishintai yang lebih dikenal dengan nama Hizbullah.[15]

Pusat latihan Hizbullah di Cibarusah, Bogor, terletak di sebuah tanah lapang seluas sekitar 20 hektare dekat perkebunan karet. Beberapa bedeng terbuat dari bambu dan kayu didirikan untuk asrama, ruang belajar teori, masjid, dapur, ruang makan dan sebagainya. Barak-barak itu hanya bangunan sementara tetapi memunyai kelebihan dibanding dengan tangsi serdadu Jepang, karena bangunan tersebut

terletak di alam terbuka yang berlatar belakang desa-desa dan perbukitan. Udaranya lebih jernih dibanding dengan udara kota.[16]

Angkatan pertama latihan Hizbullah, awal 1945, diikuti oleh 150 pemuda yang dikirim dari tiap keresidenan di seluruh Jawa dan Madura, masing-masing lima orang pemuda.[17] Setiap pesantren juga diminta mengirimkan lima orang santrinya untuk dilatih di Cibarusah. Latihan berlangsung selama enam bulan di bawah bimbingan opsir Jepang, Katen Yanagawa, yang sebelumnya juga melatih PETA.[18] Hingga menjelang proklamasi kemerdekaan, jumlah anggota Hizbullah diperkirakan 50 ribu orang.[19]

Pusat latihan Hizbullah dikelola oleh Markas Tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainal Arifin, Konsul Nahdlatul Ulama Jakarta. Anggota yang lain Abdul Mukti, Konsul Muhammadiyah Madiun, Ahmad Fathoni, Muhammad Syahid, Amir Fattah, Prawoto Mangkusasmito, dan KH Mukhtar. Sementara penanggungjawab politik ada di tangan KH A. Wahid Hasyim yang didampingi oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Ki Bagus Hadikusumo, KH Masykur, dan Mr. Mohammad Roem, serta Anwar Tjokroaminoto. Sebagai sekretaris pribadi KH A. Wahid Hasyim, Saifuddin Zuhri, melakukan tugas penghubung dengan Markas Tertinggi Hizbullah di Cibarusah.[20]

Para pemimpin agama juga diberi kesempatan menjadi kepala daerah. Di tingkat pemerintahan pusat, golongan Islam memperoleh pula kesempatan yang luas, seperti di dalam badan Cuo Sangi In maupun Shu Sangi Kai. Salah seorang ulama Cirebon, Ajengan A. Halim, menjadi wakil ulama di Cuo Sangi In.

3.5. Mendongkrak Cira dengan Media Massa

Pemerintah Pendudukan Jepang berkeinginan segara mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, mereka berusaha membentuk opini publik guna mendongkrak pencitraan, dengan membentuk barisan propaganda yang disebut *Sendenbu*. Caranya dengan mengambil alih media massa, merekrut wartawan, penulis, penyair, dan seniman. Saat itu, di Bandung ada empat surat kabar berbahasa Inggris dan Sunda, yakni *Nicork Express*, *Sipatahunan*, *Sinar Pasundan*, dan *Sepakat*. Agar pemberitaannya seragam dan mendukung program Jepang, keempat pemilik dan pengelola surat kabar tersebut

dikumpulkan. *Sendenbu* memutuskan melebur keempat surat kabar tersebut menjadi satu surat kabar. Untuk menyeleksi naskah berita yang masuk, dibentuk badan sensor berita.

Para pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, hingga wartawan keempat surat kabar tersebut sempat keberatan dengan peleburan tersebut. Namun mereka tidak berdaya, karena ditekan tentara Jepang. Maka, pada Senin, 6 Roku Gatsu 2602 (1942) terbitlah suratkabar tunggal di Bandung bernama *Tjahaja* yang beralamat di Jalan Raya Wetan (Groote Post-weg Oost) nomor 54, Bandung. Pegawai Gunsei, Otto Iskandardinata, didapuk sebagai Direktur *Tjahaja*; bekas Pemimpin *Sepakat* A. Hamid sebagai Pemimpin Pusat Redaksi; bekas Direktur *Sipatuhunan*, Niti Sumantri, sebagai Pemimpin Administrasi; bekas Direktur *Nicork Express*, Bratanata, sebagai Pemimpin Propaganda Reklame; bekas Direktur *Sinar Pasundan*, Ali Ratman, sebagai Pemimpin Percetakan.[21]

Edisi perdana surat kabar *Tjahaja* pada 8 Roku Gatsu 2602, memuat foto-foto dan sambutan kolonel Matsui, Direktur Otto Iskandardinata, Pimpinan Barisan Propaganda di Bandung S. Man, M. Tanaka, dan G. Nakamura. Juga ada sambutan Bandung Shityo Atmadinata, dan tokoh propaganda dan kebudayaan Jepang, S. Ozu.[22] Kolonel Matsui dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan diterbitkannya surat kabar *Tjahaja* bukan untuk mencari untung dari keringat penyusun-penyusunnya, melainkan untuk mendidik dan memimpin penduduk Indonesia supaya menjadi hamba Teno Heika yang baru dan berusaha lengkap dan sempurna guna keteguhan Asia Timur Raya.[23]

Penguasa pendudukan Jepang juga mendirikan Jawatan Radio Bandung Hosokyoku atau Radio Bandung. Di jawatan yang amat berperan untuk mempropagandakan kepentingan Jepang itu ditempatkan pejabat Jepang, diantaranya A. Tazawa sebagai pimpinan radio sekaligus pengawas terhadap siaran radio luar negeri, Hindeki Zenda sebagai kepala siaran, dan Hoshi sebagai kepala tata usaha.

Sejumlah pemuda pribumi direkrut sebagai pekerja di Jawatan Radio Bandung. Di bagian sarana ada R.A. Darya dan B. Badru melibatkan B. Sukiun, Sam Kawengke, Sofyan Junaid, Abdul Rajak, dan Sutarno Brotokusumo. Di bagian tata usaha ada Barens Saragih. Penyiar Radio Bandung adalah Sjam Amir, Sakti Alamsjah, Hasjim Rachman,

Sambas Sujana, dan Odas Sumadilaga.[24] Beberapa anggota Gerakan Angkatan Muda Bandung direkrut sebagai pegawai Kantor Berita Domei, seperti A.Z. Palindih.

3.6. Kekecewaan Kaum Pergerakan

Sikap manis Jepang terhadap bangsa Indonesia hanya berlangsung dua tahun. Selebihnya yang tinggal setahun setengah, dinilai lebih terasa pahitnya. Bahkan di Bekasi, keakraban antara "saudara tua" dengan "saudara muda" hanya berlangsung dua pekan. Pada awalnya, Jepang mengizinkan penduduk mengibarkan bendera Merah-Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang juga memerintahkan penduduk untuk melakukan pengedoran atau penjarahan terhadap toko-toko milik pedagang Cina.

Namun, selang satu pekan militer Jepang mengeluarkan larangan pengibaran bendera Merah-Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya, mereka memerintahkan seluruh rakyat Bekasi untuk mengibarkan bendera Jepang, Hinomaru, dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo.[25]

Untuk menertibkan sitasi dan kondisi secara cepat, Jepang mengumpulkan ribuan penduduk di alun-alun, depan tangsi polisi Bekasi. Di sana, Jepang memancung salah seorang penduduk Teluk Pucung bernama Mahbub. Dia dihukum tanpa diadili dengan tuduhan sebagai mata-mata Belanda. Cara ini cukup efektif untuk menciptakan rasa takut penduduk Bekasi terhadap tentara Jepang.[26]

Upaya Jepang merekrut para ulama tidak sepenuhnya diterima oleh ulama Jawa Barat. Pada titik tertentu terjadi pergesekan nilai yang subsansial. Sebagai contoh, dalam proses *seikeirei* atau membungkuk menghadap matahari pagi dinilai tentara Jepang sebagai tanda hormat kepada Dewa Matahari. Sedangkan bagi para ulama, hormat terhadap matahari sama juga dengan mensekutukan Allah Subhanahu Wataala atau perbuatan syrik. Karena itu, sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerja sama dengan Jepang, baik secara terang-terangan maupun diplomasi. Kegagalan panen yang luas pada tahun 1944 memperburuk keadaan dan menimbulkan gelombang protes dari petani, disebabkan oleh keputusasaan secara meluas dan terbuka terhadap pemerintahan militer Jepang. Pada 25 Februari 1944 para petani di Singaparna,

Tasikmalaya memberontak di bawah pimpinan Ajengan Haji Zenal Mustafa, pemimpin pondok Pesantren Sukamanah.[27]

Penentangan terang-terangan juga dilakukan oleh Ajengan Haji Madriyas dan Haji Kartiwa di Indramayu.[28] Sedangkan ulama yang menolak secara diplomatis diantaranya Guru Noer Alie di Bekasi. Dia melakukan *seikeirei* kalau di depan tentara Jepang, itu pun hanya sebagai taktik belaka.[29]

Pembangunan sarana dan prasarana di Jawa Barat, seperti benteng bertahanan (*jinchi*), jalan raya, lapangan terbang, menggunakan tenaga muda. Memang, pada mulanya tugas-tugas *romusha* tersebut bersifat suka rela untuk kemakmuran Asia Timur Raya. Namun, dalam perjalanannya mereka diperlakukan Jepang dengan cara-cara yang kasar, memberatkan, dan penuh paksaan. Beribu-ribu *romusha* dikirim ke luar Indonesia, seperti Burma, Muangthai, Vietnam, dan Malaya.[30] Mereka diperlakukan sangat buruk. Kesehatan tidak terjamin, makanan tidak cukup, dan pekerjaan sangat berat; semua itu menyebabkan banyak *romusha* yang meninggal di tempat kerja.[31]

Hal yang sama juga bisa dilihat pada pembentukan *tonarigumi* atau rukun tetangga di desa-desa Jawa di Barat. Pada awalnya, desa dibentuk untuk meningkatkan bantuan masyarakat kepada usaha perang Jepang, namun kenyataanya menjadi basis mobilisasi penyerahan hasil panen. Rakyat Jawa Barat juga dibuat resah, karena tidak lama setelah penduduan militer Jepang, kain dan pakaian lenyap dari pasaran. Kalau pun ada, dijual secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengenakan pakaian dari bahan lembaran karet dan kain goni.

Kecewaan mendera kaum muda, baik yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah, wartawan, seniman, guru, pedagang, dan lain-lain. Kelompok-kelompok pemuda yang tidak resmi muncul di Kota Bandung. Kegiatan mereka dilakukan secara diam-diam. Jumlah kelompok tersebut, walaupun dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya kota, jelas terlalu kecil, tetapi kegiatan mereka mempunyai konsekwensi yang luas bagi perjuangan kemerdekaan.[32]

Kepala Kantor Inspeksi Pajak Jawa Barat, Sjafruddin Prawiranegara, dalam biografinya mengatakan bahwa kekejaman Jepang tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan harus berakhir serta bangsa Indonesia harus merdeka. Secepatnya, bagaimana pun

caranya.[33] Kemerdekaan, kata Sjafruddin, tidak dapat diharapkan akan diberikan oleh bangsa penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Karena itu bangsa Indonesia sendiri yang harus memperjuangkannya.[34]

Dalam suasana pikiran seperti itulah Sjafruddin mengadakan kontak dengan orang-orang yang juga merasakan apa yang dirasakannya dan memikirkan apa yang dipikirkannya. Di Jakarta, Sjafruddin menjalin komunikasi dengan kawan-kawannya semasa aktif dalam organisasi mahasiswa Unitas Studiosorum Indonesia (USI) di sekolah tinggi hukum, Rechts Hoge School (RHS), Jakarta, pada 1930-an yang sejalan dengan cita-citra merebut kemerdekaan, di antaranya Subadio Sastrosatomo, Koesoemo Soetojo, Mr. Ismet Thajeb, dan Ali Budiardjo. Melalui mereka, Sjafruddin terkoneksi dengan kelompok mahasiswa dan pemuda yang mengadakan gerakan bawah tanah piminan Sutan Sjahrir.[35]

Sementara di Bandung dia berkomunikasi dengan beberapa kelompok yang aktif dalam diskusi-diskusi tentang nasib bangsa dan negara karena memunyai cita-cita Indonesia merdeka. Saat itu, di Bandung ada kelompok Pagoejoeban Pasoendan dengan tokohnya Otto Iskandardinata dan Ir. Oekar Bratakusumah; kelompok Parindra dengan tokohnya Gondokusumo dan Dr. Erwin; kelompok Islam dengan tokohnya Arudji Kartawinata dan M. Natsir (Kepala Kantor Pengajaran di Bandung).[36]

Di samping itu, ada pula para pemuda dan mahasiswa yang umumnya berputar di sekitar kelompok-kelompok tersebut. Sjafruddin mengatakan, dirinya berdiskusi dengan para tokoh seperti Ir. Oekar Bratakusumah, Djamal Ali, M. Natsir, dan Abdul Haris Nasution.[37] Djamal Ali membubarkan organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (Korindo) yang dipimpinnya, karena tidak mau "di-Jepang-kan". Mamun Sumadipyaja menghimpun pemuda-pemuda ke dalam organisasi Barisan Pemuda Priangan. Di samping itu terdapat pula organisasi pemuda yang bernama Jasana Obor Pasundan (JOP) di bawah pimpinan Ace Bastaman, Kowara dan Sobana.

Menghadapi sikap Jepang yang keras, organisasi-organisasi pemuda itu mengambil cara perjuangan "terbuka" atau bekerja sama dan "tertutup" atau bergerak di bawah tanah, atau sama sekali tidak bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di antara gerakan pemuda yang

tidak bekerja sama dengan Jepang di Kota Bandung adalah Angkatan Muda Indonesia yang bermarkas di Jalan Ksatrian nomor 3 di bawah pimpinan D. Iskandar, Djamal Ali, Hisywara Darmaputra, Abdul Hamid, A.Z. Palindih, Royana, dan Isa Ansyari. Pada pertengahan tahun 1944 kelompok itu mengadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh Sanusi Harjadinata, H. Gani Azis, Syafrudin Prawiranegara, Moh. Natsir, Isa Ansyari, Jamal Ali, dan pejuang-pejuang lain di Kota Bandung.[38]

Pada 8 Dasember 1944, Jepang membentuk barisan pemuda Islam di Kota Bandung dengan nama Hizbullah. Di daerah Cicadas organisasi itu dipimpin oleh Aminuddin Hamzah dan di tempat lain dipimpin oleh Husinsyah.[39] Tokoh-tokoh lain yang memimpin Hizbullah ialah Utarya, Gofar Ismail, H. Junaedi, Zainal Abidin, Kadar Solihat, Syahbandar, Arustandi, Ahim, Samsudin, Hamid, dan Mokbtar. Dari barisan Sabillilah terkenal tokoh-tokoh seperti Isa Ansyari, Ismail Napu, H. Zainuddin, Toha, A. Mokhtar, dan Kiyai Yusuf Tajiri.[40]

Selain itu, dibentuk Barisan Pembantu Prajurit di setiap kecamatan dalam Kotapraja Bandung, seperti di Cicendo yang dipimpin oleh Matrais, di Lengkong dipimpin oleh Jerman Prawirawinata, di Cibeunying dipimpin oleh Suhara, di Andir dipimpin oleh H. Juned M., di Kiaracondong dipimpin oleh Wirapraja, di Bandung Wetan oleh U. Umar Akhraad, dan di Bandung Kulon dipimpin oleh T.M. Sukarya.[41]

Beberapa pemuda memimpin barisan pemuda Keibodan dan Seinendan di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kotapraja Bandung. Di Andir diangkat S.M. Thaher, di Cicendo diangkat Mr. Suwahyo dan Suprayogi, di Bandung Kulon diangkat Sudiani, di Lengkong diangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara, di Cibeunying diangkat Enjoh dan Kadma. Di daerah Astana Anyar diangkat sebagai wakil pemimpin Seinendan ialah Mashudi dan di daerah Regol diangkat Prof. Sarbini.[42]

Abdul Haris Nasution yang ketika itu bekerja sebagai pegawai menengah pembantu pamong praja dan Wakil Komandan Barisan Pelopor di Bandung, mengatakan di Bandung telah ada bermacam-macam kelompok lokal. Koordinasi tercapai sekedarnya secara pribadi di antara berbagai macam organisasi yang bercabang sampai ke desa-desa, Seinendan, Keibodan, Pelopor, Hizbullah, barisan-barisan kantor, barisan-barisan sekolah dan BPP.[43] Namun, kelompok-kelompok tersebut sulit dikoordinasikan berhubung rapinya pengawasan Jepang,

Kempeitai, dan polisi Jepang. Seorang pembantu instruktur Nasution, Sujono, yang kedapatan membocorkan rahasia meringkuk berbulan-bulan dalam tahanan Kempetai.

Tidak adanya kebebasan berekspresi bagi wartawan dalam menulis berita juga membuat mereka menjadi kian tidak suka terhadap Jepang. Beberapa wartawan, seperti Djamal Ali dan Hisywara Danasaputra makin meningkatkan hubungan dengan Bepan. Komunikasi antara wartawan *Tjahaja* dengan wartawan Jawatan Radio Bandung dan Kantor Berita Domei pun dijalin secara intensif.

Semangat merdeka juga bermunculan dari kelompok anak muda di kota-kota lainnya di Jawa Barat. Di Bekasi, sebagai contoh, berdiri Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB) pada 1943 di Mesjid Pasar Bekasi. Organisasi yang digerakkan oleh KH Abdul Hamid, Nurdin, Marzuki Urmaini, Hasan Sjahroni, dan Marzuki Hidayat, selain menyelenggarakan pengajian setiap Kamis malam, juga memberntas buta huruf bagi pemuda pasar.[44]

Mereka juga memberikan pemahaman politik kepada sesama anggota, terutama mengenai makna nasionalisme dan kemerdekaan. Inspirasi tentang kemerdekaan diperoleh dari orang tua dari Jakarta yang kerap singgah di mesjid, yakni Pak Kamal. Mereka menduga, Pak Kamal adalah anggota dari gerakan "bawah tanah" yang berpusat di Jakarta.[45] Hal ini diperkuat dengan adanya Departemen Pemuda Asrama Angkatan baru Indonesia yang mempunyai jaringan di kota-kota kecil di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, seperti Bogor, Cibadak, Tangerang, Mauk, Sepatan, Banten Utara-Selatan, Bekasi, Tambun, dan Pasuruan.[46]

Nasution mengungkapkan, ketika itu para pemuda di Bandung dan sekitarnya berkeyakinan bahwa Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang hanyalah sandiwara. Para pemuda yakin pada saatnya Soekarno dan Hatta akan memimpin pemberontakan. Atas dasar itu, para instruktur dan pemimpin pemuda sangat mementingkan latihan militer, sehingga nanti pada waktunya pemimpin-pemimpin besar nasional memiliki barisan-barisan pelaksana. Dengan demikian, kealpaan tahun 1942 tidak terulang lagi, ketika vakum beberapa hari di berbagai kota tidak dimanfaatkan untuk menegakkan Sang Merah Putih.[47]

3.7. Jepang Menyerah dan Pergerakan Pemuda

Pemerintah Pendudukan Militer Jepang menghadapi persoalan serius pada 1944. Di daerah-daerah pendudukan di Asia Pasifik, Jepang mengalami sejumah kekalahan dan terdesak. Sedangkan di dalam negeri, citra Jepang semakin merosot akibat perilakunya yang tidak baik terhadap rakyat Indonesia.

Untuk meredam emosi kaum pergerakan dan masyarakat, Pemerintah Jepang di Tokyo mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari pada 7 September 1944. Namun, Jepang tidak memberi kepastian tanggal, bentuk kemerdekaannya, serta hubungan dengan kaisar Jepang dan luas kekuasannya.[48] Konsekwesninya, Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia melonggarkan tekanannya terhadap kaum pergerakan, termasuk di Jawa Barat. Mereka antara lain membolehkan pendirian perkumpulan, rapat-rapat yang bertujuan untuk rekreasi, gerak badan, pengetahuan, pendidikan, kesenian, derma, dan pertolongan serta untuk mendistribusikan barang-barang.

Jepang mengetahui banyak pemuda aktif dalam berbagai gerakan, baik terang-terangan maupun "di bawah tanah." Untuk itu Jepang berusaha memancing mereka supaya pro-Jepang dengan mendirikan Angkatan Muda di seluruh Jawa. Beberapa tokoh pemuda yang semula dicurigai Jepang terlibat dalam gerakan bawah tanah, terpaksa ikut dalam organisasi itu, seperti Sukarni dan Chairul Saleh di Jakarta, Roeslan Abdul Gani dan Soetomo di Surabaya, Djamal Ali dan Isa Anshari di Bandung. Pada 1944 mereka mengadakan pertemuan Angkatan Muda di Bandung.[49]

3.8. Menjelang Proklamasi

Pemerintah Pendudukan Militer Jepang selalu berupaya menutupi kekalahannya saat melawan tentara Sekutu di sejumlah front pertempuran di Asia Pasifik, Asia Tengara dan Asia Selatan. Begitu juga saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara Amerika Serikat. Hal ini dilakukan supaya moral pasukan Jepang dan rakyat Indonesia tidak merosot, serta kewibawaan petinggi militer Jepang tetap terjaga.

Namun, kekalahan Jepang tersebut akhirnya terbuka. Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat yang

diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Truman, pada 14 Agustus 1945, dengan mudah didengar oleh pemimpin Indonesia yang bergerak di "bawah tanah" melalui siaran radio luar negeri. Berita bahwa Jepang akan menandatangani naskah tanda menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 diketahui secara diam-diam melalui radio minitor oleh pegawai studio Radio Bandung pada 14 Agustus 1945. Mereka lantas menyebarkannya kepada sejumlah pemimpin di Kota Bandung, wartawan *Tjahaja*, jabatan PTT, Jawatan Kereta Api, kelompok bekas PETA, dan Heiho, pimpinan Barisan Pemuda, dan Barisan Pembantu Prajurit.[50]

Beberapa orang tentara Jepang yang mendengar kabar tersebut ikut membocorkan informasi rahasia kepada pemimpin rakyat di sejumlah kota. Pada 15 Agustus 1945, pimpinan pemuda di Bandung menerima berita kapitulasi Jepang. Berita ini tidak pernah diperhitungkan karena pihak sekutu belum mendaratkan tentaranya di Jepang. Indonesia pun masih aman, terkecuali Irian Utara, Morotai, Tarakan, dan Balikpapan. Tidak ada yang menduga sama sekali perkembangan yang demikian cepat dan tidak ada yang mungkin mengetahui tentang bom atom.[51]

Setelah mendengar desas-desus tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu, lima orang pemuda Kota Bandung yang menjadi inti Barisan Pelopor mengadakan pertemuan di rumah Ir. R. Ukar Bratakusumah, di jalan Wastukancana, Bandung, pada 14 Agustus 1945 pukul 09.00. Selain Ir. R. Ukar Bratakusumah, juga ada R. Ema Bratakusuraa, Dr. R. Junjunan Setiakusumah, Duyeh Suharsa, dan Anwar Sutan Pamuncak. Mereka membicarakan situasi dunia umumnya, dan Bandung pada khususnya.

Hasil pertemuan menyimpulkan, segera membentuk suatu panitia; sudah tiba saatnya Indonesia mengumumkan kemerdekaannya; menghadapi revolusi; jika tidak segera dicegah di Bandung akan terjadi kekacauan dan banyak perampok; perlu ikut menenteramkan situasi Kota Bandung; akan meminta Wali Kota Bandung R.A. Atmadinata supaya menyerahkan kekuasaan kepada panitia tersebut. Jika kekuasaan itu diserahkan, maka panitia akan memegang kekuasaan tersebut yang dalam pelaksanaannya akan diketuai oleh R. Ema Bratakusuma; Duyeh Suharsa dan Anwar Sutan Pamuncak ditunjuk sebagai utusan untuk

menemui Wali Kota Bandung dan menyampaikan kehendak panitia, mumpung rakyat belum mengetahui kekalahan Jepang.[52]

Duyeh Suharsa dan Anwar Sutan Pamuncak segera menemui Walikota Bandung R.A. Atmadinata. Ternyata Atmadinata tidak manyetujui permintaan panitia itu dengan alasan belum ada perintah dari Jepang. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Jepang telah menyerah, dan tidak akan mengeluarkan perintah lagi, sehingga Indonesia harus berdiri sendiri. Namun, Atmadinata bersikukuh menolak permintaan mereka.

Kekalahan Jepang juga sudah diketahui oleh beberapa perwira PETA di Priangan. Mereka berpendapat bahwa saat yang paling baik untuk menentukan sikap terhadap kekalahan Jepang guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia ialah pada saat terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia, karena kekalahan Jepang dari Sekutu pasti akan menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Untuk mempersiapkan semua itu, beberapa perwira PETA melatih siswa-siswa Sekolah Menengah Atas dan Rensetai tentang kemiliteran. Sekitar 1.000 orang siswa dan pemuda diasramakan di Daidan III di Sukajadi, Bandung. Latihan-latihan yang diberikan kepada mereka berupa olahraga, keterampilan menggunakan senjata, baris-berbaris, dan penanaman disiplin, gemblengan nasionalisme dan patriotisme. Pelatihan tersebut diawasi oleh perwira Jepang.[53]

Setelah mendengar Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, terjadi perubahan sikap pada perwira Jepang. Pada 13 Agustus 1945 mereka memerintahkan PETA untuk manyerahkan senjata, dengan alasan akan diganti. Beberapa perwira dan prajurit PETA Daidan III sempat lolos untuk menyembunyikan senjata di rumah Chudancho Sukanda Bratamanggala di Jalan Nylan No. 86 A, Bandung. Jenderal Mabuchi lantas menyatakan pembubaran PETA di Hotel Orient Bandung. Saat itu semua daidancho dan perwira pengawas Jepang menghadiri pertemuan dengan Mabuchi. Para chudancho dan sodancho serta prajurit melakukan usaha untuk mendapatkan senjata dan berhasil memperoleh senjata untuk satu kompi lengkap.[54]

Seluruh pancaindera ditujukan ke Jakarta, menunggu isyarat dari dwi-tunggal nasional. Hari itu juga Nasution menanyakan kepada seorang anggota Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Yak Cwan Bing. "Menurut keterangannya, kemerdekaan sudah pasti dan sidang tanggal

16 Agustus 1945 adalah untuk meresmikannya," kata Nasution.[55] Pada 15 Agustus itu, kata Nasution, para daidanco berkumpul di Bandung, namun dia tidak mendapatkan keterangan tentang menyerahnya Jepang. "Mereka mengatakan bahwa mereka dikumpulkan untuk reorganisasi kesatuan-kesatuan PETA".

Tokoh masyarakat Garut, Ajengan Yusuf Tajiri, mengaku mendengar kekalahan Jepang dari seorang komandan Gunseikan. Tajiri lantas memberi tahu rekan-rekannya.[56] Sjafruddin Prawiranegara, aktivis pemuda yang juga pegawai pemerintah, dengan cepat memperoleh informasi kekalahan Jepang. Baberapa utusan dari Bandung pun bertolak sendiri-sendiri ke Jakarta, akan tetapi setelah tiba di Jakarta, mereka tidak kembali keesokan harinya ke Bandung.[57] Sjafruddin mengatakan, dirinya merasakan para pegawai Jepang tidak bersemangat bekerja. Mungkin, kata dia, mereka sudah tahu benar bahwa di berbagai medan pertemuran bala tentara Jepang dipukul mundur oleh tentara Sekutu, sehingga mereka sudah terpengaruh oleh perasaan sebagai pihak yang niscaya akan kalah perang.[58]

Oleh rekan-rekannya, Sjafruddin dan Ketua Persatuan Warung Bangsa Indonesia (Perwabi) Hasbullah Siregar, dipercaya mengintensifkan komunikasi dengan pemimpin Indonesia di Jakarta. Pada 15 Agustus 1945, keduanya berangkat dari Bandung ke Jakarta. Yang pertama kali ditemuinya adalah tokoh Jawa Barat yang duduk di organisasi Poetera, Otto Iskandar Dinata, di Jalan Teuku Umar.[59] Sjafruddin menyampaikan kabar bahwa Jepang sudah kalah perang, namun Otto tidak mempercayainya. "Tidak palsu, berita ini memang benar. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu," kata Sjafruddin. Otto berkata dengan suara keras dan membentak. "Mana bisa Dai Nippon menyerah! Dai Nippon tidak mungkin kalah! Tidak mungkin dikalahkan oleh Sekutu! Hati-hati, kalau berita didengar Kenpetai, Ayi (adik) bisa celaka!," kata Otto.[60]

Sjafruddin dan Hasbullah segera meninggalkan Otto Iskandar Dinata. Namun, karena takut ditangkap Kempetai seperti yang diucapkan Otto, akhirnya keduanya menginap di rumah Mr. Ismail Thayeb, sahabat Sjafruddin yang tinggal di Jalan Purwokerto, Menteng, Jakarta. Lantas mereka menginap di rumah teman Hasbullah di Jatinegara hingga 17 Agustus 1945.

Sementara itu, kabar kalahnya Jepang oleh Sekutu, malah dimanfaatkan para pemimpin pemuda di Jakarta, seperti Sukarni dan Chaerul Saleh. Mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia tidak diserahkan oleh Jepang, melainkan direbut oleh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, ketika mendengar bahwa Jepang akan menyerahan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, mereka mengatur srategi untuk menggagalkannya. Caranya, Sukarni berkomunikasi dengan Umar Bachsan, Komandan Pasukan PETA di Rengasdengklok, Karawang, pada 15 Agustus. Para pemimpin pergerakan di Jakarta dan Rengasdengklok sepakat menjadikan Rengasdenglok sebagai basis pertahanan Republik Indonesia. Mereka juga merencanakan "penculikan" terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta dan membawanya ke Rengasdengklok.

Rengasdengklok dipilih oleh kelompok Sukarni dengan pertimbangan daerah ini menguntungkan secara strategis bagi para pemuda pejuang, tetapi daerah berbahaya bagi Jepang. Rengasdengklok merupakan salah satu wilayah Batalion II PETA yang berkedudukan di Purwakarta. Di Rengasedengklok pula terdapat asrama PETA yang berkekuatan sekitar satu kompi (40-50 prajurit).[61]

Para pemuda yang kotanya akan dilalui rombongan kedua pemimpin bangsa tersebut dihubungi agar turut mengawal dan menjaga keamanannya.[62] Di titik-titik tertentu, seperti di Bekasi, Tambun, Cikarang, Lemah Abang, hingga Karawang, ditempatkan para pemuda hasil didikan militer dan semi-militer yang telah menjadi pejuang Indonesia. Mereka melakukan pengawalan secara rahasia, sehingga tidak terlalu terlihat mencolok di mata masyarakat.[63]

Aksi Sukarni sesuai rencana. Pada 16 Agustus pukul 04.15, Sukarni membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Perjalanan darat yang menggunakan mobil Power Wagon "Bedford" yang dikemudikan oleh prajurit Iding bin Salimar[64] tersebut melewati Bekasi. Di dalam mobil, juga ikut istri Soekarno, Fatmawati, dan anak pertamanya, Guntur Sukarnoputra.

Setibanya di Rengasdengklok, rombongan Soekarno-Hatta dibawa ke asrama Peta dan disambut oleh Chudanco (komandan kompi Peta) Affan. Sedangkan Chudancho Subeno dan Chudanhco Umar Bachsan sedang ke Purwakarta memenuhi panggilan Daidancho

Surjoputro.[65] Dari asrama Peta, Sukarno-Hatta dibawa ke rumah Asisten Wedana Rengasdengklok dan dipindahkan ke rumah seorang penduduk tionghoa Djiau Kie Song. Di sana dilakukan perundingan antara Sukarno, Hatta, Sukarni, dan Chudancho Singgih. Sedangkan Chudancho Affan mengamankan perundingan di depan pintu rumah.[66] Sukarni dan kawan-kawan mencoba meyakinkan Sukarno-Hatta agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan pihak Jepang. Akhirnya Soekarno menyetujui dan bersedia menyatakan kemerdekaan.[67]

Saat Sukarno-Hatta dan petinggi lain sedang di rumah Djiau Kie Song, Sukarni, dokter Soetjipto, dan Singgih, menemui Soncho (camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto di markas Chudancho. Sukarni meminta Soejono agar mengumpulkan massa dan menyiapkan bendera merah-putih. Soejono bersedia. Soal massa, dia tidak kesulitan, karena pada hari itu kebetulan sedang diselenggarakan konferensi padi seluruh kuncho (kepala desa) dan Soncho dalam kewedanaan Rengasdengklok di pendopo kewedanaan.[68]

Di hadapan ratusan aparat soncho, kuncho, dan penduduk Rengasdengklok, yang berkumpul di halaman pendopo Kewedanaan Rengasdengklok, Soejono memerintakan pasukan seinendan untuk menurunkan bendera Jepang, Hinomaru, dan mengibaran bendera merah-putih. Lantas Soejono memberikan sambutan. "Negara kita mulai saat ini sudah merdeka. Lihat bendera kita Sang Merah-Putih sudah berseri dan berkibar, menggantikan bender Nippon. Lihatlah dan camkan," kata Soejono.[69]

Massa pun bubar dan melakukan pengambilalihan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Pasukan PETA pimpinan Komandan Pasukan Umar Bachsan dan Komandan Peleton Suharyana melucuti dan menawan tentara Jepang di Rengasdengklok.[70] Malam harinya hingga 17 Agustus dini hari mereka menyerbu markas Jepang di Gedung Hingbu, Gedung Ho Ceng Po, dan Rumah Gadai, Karawang. Dalam penyerbuan, Jepang tidak melakukan perlawanan, melainkan melarikan diri ke Ciater, Subang[71].

Adapun Sukarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Soebardjo untuk kembali ke Jakarta pada 16 Agustus pukul 20.00. Sukarno-Hatta menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda hingga 17 Agustus pukul 03.00. Sementara itu, Sukarni dan kawan-kawan untuk

menghembuskan kabar bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pagi ke beberapa daerah secara beranting. Selain Karawang, kabar pembacaan proklamasi kemerdekaan pun merebak sampai ke Bekasi, Jakarta, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Serang.

Para pemimpin pergerakan di Bandung yang mengetahui kabar tersebut pada 16 Agustus 1945 menugaskan dua orang pegawai Studio Radio Bandung berangkat ke Jakarta dengan membawa peralatan radio. Salah seorang yang ke Jakarta, Jerman Prawirawinata, ditugaskan untuk menyiarkan kemerdekaan. Pertemuan antara Angkatan Muda pegawai Studio Radio Bandung dengan Angkatan Muda PTT diadakan untuk merencanakan pengambil-alihan jawatan-jawatan tersebut dari tangan Jepang, dengan sasaran utama pemancar Radio Palasari, Dayeuhkolot, di Bandung Solata.[72]

Sutoko, tokoh Angkatan Muda PTT, yang mendapat kepercayaan dari Jepang untuk memegang bagian pertahanan pada Jawatan Pos Telegraf dan Telepun memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan hubungan dengan Angkatan Muda Kereta Api yang dipimpin oleh Akhmad Tirtosudiro dalam rangka mengambilalih kekuasaan dari Jepang. Angkatan Muda Keresidenan di bawah pimpinan Suryono (Pak Kasur) berhubungan dengan Angkatan Muda Balaikota yang dipimpin oleh Suprayogi. Demikian pula Angkatan Muda Jawatan Pertambangan di bawah pimpinan Lasut berhubungan dengan Angkatan Muda Pabrik Senjata di Kiaracondong (ACW) yang dipimpin Hardoyo.[73]

Zakaria Burhanuddin, pemuda Bekasi yang ditempa di Heiho dan dilibatkan dalam proses pengawalan "penculikan" Soekarno-Hatta, juga memberi tahu rekan-rekannya di Bekasi[74]. Kabar tersebut didengar pula oleh para pemuda Bekasi yang menjadi pegawai dan buruh pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta, di antaranya Madnuin Hasibuan.[75] Madnuin mengajak beberapa orang anak buahnya untuk menghadiri proklamasi, termasuk Yakub Gani, salah seorang guru yang pengajar di madrasah Guru Noer Alie di Ujungmalang, Babelan.[76]

Para pemuda Bogor mendirikan kelompok propaganda yang sejak 16 Agustus memberikan penerangan kepada rakyat tentang rencana proklamasi kemerdekaan. Pemimpin propaganda, R. Gatot Mangkupraja, dalam musyawarah di Kantor Keresidenan Bogor pada 16 Agustus mengemukakan kedudukan dan kewajiban para propagandis,

yaitu sebagai pendorong rakyat dalam mengejar cita-cita proklamasi yang suci itu.[77]

3.9. Proklamasi dan Penyebarannya

Kabar pembacaan proklamasi yang dihembuskan Sukarni dan kawan-kawan cukup efektif. Itu Pada pagi 17 Agustus 1945, para pemuda Jakarta dan sekitarnya memasang pamflet-pamflet tentang rencana proklamasi di berbagai penjuru Ibu Kota Jakarta. Pamflet berisi kabar bahwa proklamasi akan dibacakan oleh Sukarno di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (Ikada).

Puluhan pemuda Jakarta dan sekitarnya juga telah berbondong-bondong ke Lapangan Ikada, termasuk pemuda Bandung, Jerman Prawirawinata, dan pemuda Bekasi, Madnuin Hasibuan dan Yakub Gani[78] Rupanya Ikada dijaga tentara Jepang, sehingga proklamasi dialihkan ke rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan demikian para pemuda yang sudah tiba di Lapangan Ikada berjalan kaki ke rumah Sukarno.[79] Mereka menyaksikan Sukarno membacakan teks proklamasi pada pukul 10.00.[80]

Selesai upacara, berita proklamasi langsung disebar ke pelosok Jakarta, Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penyampaiannya menggunakan berbagai media. Ada yang langsung dari mulut ke mulut oleh para pemuda yang menyaksikan proklamasi, telegram, radio, dan dan surat kabar. Dari beberapa media, yang paling cepat adalah menggunakan teknologi telekomunikasi telegram. Kantor berita Domei pusat di Jakarta, teks proklamasi diterima Domei di beberapa daerah pada tengah hari. Domei Jawa Barat di Bandung menerima telegram pada 17 Agustus pukul 12.00. Isinya sebagai berikut:

"bra djam 12.00 aug tg 17

domei : 007 djakarta = (proklamasi)

kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia titik hal-hal jg mengenai pemindahan kekoeasaan dll diselenggarakan dengan tjara yang seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singatnya titik djakarta hari tujuh belas boelan

delapan 2605 titik atas nama bangsa Indonesia Sukarno strif Hatta rd 1205"[81]

Telegram proklamasi tersebut diterima oleh para pegawai Domei Bandung, diantaranya oleh A.Z. Palindih, Muhamad Adam, Lalu Danila, dan Matullessy. Mereka lantas menyalin teks proklamasi tersebut pada papan tulis dengan huruf-huruf besar, kemudian memajangnya di depan kantor Domei, Jalan Dago, Bandung.[82] Warga yang melintas penasaran dan melihatnya, sehingga menimbulkan kerumunan massa. Dari warga yang melihat, berita proklamasi merambat ke seluruh kota, diikuti dengan cepat oleh bantahan resmi dari Jepang sejam kemudian.[83] Bupati Bandung Suriasaputra yang mendapat laporan tentang proklamasi kemerdekaan, memerintahkan pegawainya untuk menyebarluaskan berita proklamasi itu.

Redaktur harian *Tjahaja* pun menerima berita proklamasi dari kantor Domei Jakarta melalui telegram pada 17 Agustus siang. Berita yang dibocorkan oleh wartawan *Tjahaja* merambat ke seluruh kota. Pada saat yang bersamaan penyebaran berita proklamasi di hari pertama diikuti oleh bantahan resmi dari Jepang sejam kemudian, pengawas Jepang di *Tjahaja*, dan keengganan editor pelaksananya untuk membuat beritanya.[84]

Namun, sebagian wartawan yang masih muda tidak kehabisan akal. Wartawan *Tjahaja*, Bari Lukman, setelah mendapat izin dari Moh. Kurdi, menuliskan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor *Tjahaja*. Dalam beberapa saat saja rakyat berkerumun di depan tulisan tersebut untuk mengetahui isi berita proklamasi.

Bari Lukman lantas meminta kepada Isa Ansyhari agar memberikan bendera merah putih milik Jawa Hokokai kepada dirinya untuk dikibarkan di atas Gedung Denis (De Eerste Nederlands Indische Spaarbank). Bari Lukman berlari dari kantor Jawa Hokokai di depan Alun-alun Bandung menuju Gedung Denis. Di Gedung Denis, Bari naik ke lantai tiga dan mengibarkan bendera merah putih, pada pukul 13.00. Sekembali dari pengibaran bendera Merah Putih di atas atap Gedung Denis, Bari Lukman menyaksikan tulisan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor *Tjahaya* telah dihapus atas perintah tentara Jepang, Shidoin. Tapi, sekali lagi, Bari Lukman menuliskan kambali pengumuman proklamasi pada papan tulis itu. Petang harinya

Kompeitei datang dan mengepung kantor *Tjahaja*, tapi kantor *Tjahaya* sudah kosong.[85]

Meski dicopot oleh pengawas Jepang, mereka terus menerus memasang. Pergulatan ini berlangsung untuk beberapa waktu hingga akhirnya para wartawan memutuskan untuk mencetak sejumlah pampflet. Pamflet ini kemudian menjadi salah satu sarana utama penyebaran berita proklamasi di Bandung.[86]

Kebimbangan yang mendera para pemimpin *Tjahaja* membuat surat kabar yang terbit sore hari itu memutuskan tidak mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam edisi 17 Agustus 1945. Dalam edisi tersebut hanya memuat sebuah editorial dan dua artikel berita yang secara implisit mengulas kemerdekaan sebagai pemberian Jepang, namun proklamasi yang dibacakan Sukarno tidak disebutkan sama sekali. Pada edisi 18 Agustus, *Tjahaja* menayangkan berita dari Jakarta yang singkat, tapi dengan kepala berita yang besar. Barulah pada edisi 19 Agustus, untuk pertama kalinya *Tjahaja* memunculkan berita yang meyakinkan, yakni halaman ekstra dengan cetakan huruf paling besar dan memuat konfirmasi tentang proklamasi dan teks pembukaan Undang-undang Dasar.[87]

Sementara itu Percetakan Siliwangi yang dipimpin Ili Sasmita berinisiatif mencetak naskah proklamasi dalam bentuk selebaran dengan huruf bertinta merah. Selebaran itu kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Adapun usaha penyadapan pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus di Jakarta oleh Radio Hosyokyoku Bandung gagal dilakukan akibat ketatnya penjagaan dan diputusnya saluran telepon oleh tentara Jepang. Sore hari, kedua teknisi radio dari Jakarta, Sukiyun dan Mislan, tiba di Bandung. Mereka mengabarkan bahwa Jepang telah menduduki studio sehingga tidak mungkin menerobos dan menyiarkan berita proklamasi.

Namun, kegagalan tersebut tidak menyurutkan para pewarta radio untuk menyiarkan melalui udara. Para pemuda di Bandung lebih berhasil daripada rekan-rekan mereka di Jakarta dalam mengatur siaran radio. Sistem radio setempat dihubungkan kepada pemancar gelombang pendek Kantor Telegraf Pusat sehingga bisa melakukan siaran ke dunia luar.[88] Kepala Siaran Radio Jakarta, Muin, yang memiliki naskah proklamasi dari pimpinan kantor berita Antara, Adam Malik,

berinisiatif untuk mengirimkan teks proklamasi ke Radio Siaran Bandung melalui kurirnya, Mohammad Adam.

Pada saat yang bersamaan, 18 Agustus pagi, di Bandung, Sakti Alamsyah, R.A. Darya, dan Sam Kawengke, menghadap para pimpinan Radio Hosokyoku, yang didampingi sejumlah tentara Jepang. Dengan sopan ketiga pemuda ini meminta kepada pihak Jepang agar studio diserahkan kepada Indonesia. Saat berlangsung pembicaraan, tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Ternyata salah seorang anggota pemuda radio menembak tentara Jepang yang berupaya menghalang-halangi. Peristiwa ini menciutkan hati Jepang. Mereka kemudian meyerahkan kunci-kunci dan peralatan penyiaran yang semula disita dan pergi meninggalkan studio.[89]

Pukul 17.00, teks proklamasi diterima oleh R.A. Darja sebagai pimpinan siaran Radio Bandung. Pada saat yang sama, Radio Jakarta berhasil menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan dengan pemancar kecil. Pada 18 Agustus malam, proklamasi diperdengaran menggunakan alat pemancar di lingkungan PT di Palsari yang berdaya pancar 20-10 kilowatt.[90] Kamar kontrol Studio Radio Bandung Hosokyoku di Tegallega, Bandung Selatan, dijaga beberapa pemuda, di antaranya Sofyan Djunaid. Di ruang operator duduk Sakti Alamsyah, di bagian teknik adsa R.A. Darya, Sjam Amir, Odas Sumadilaga, Herman Gandasasmita, T.M. Moh. Saman, Aiyat, Memed Sudiono, Brotokusumo, Sukseksi dan Abdul Razak Rasjid.

Pada pukul 19.00, operator membuka tombol stasiun radio melalui *station call*. Berkumandanglah lagu Indonesia Raya. Suara berat Sakti Alamsyah pun mengangkasa, di mulai dengan kalimat, "di sini Bandung, siaran Radio Republik Indonesia".[91] Di sela-sela siaran terdengar lagu tradisional Sunda, degung ladrak dan lengser, Sakti membacakan naskah proklamasi.[92] Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi melalui udara pun pada pukul 20.00 dan 21.00. Proklamasi yang dikumandangkan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris ditutup dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya.[93]

Beberapa hari kemudian, sejumlah pegawai teknik dan penyiaran Radio Republik Indonesia Bandung—perubahan dari Studio Radio Bandung—berkeliling kota menggunakan dua unit mobil *pick-up*. Mereka menyebarkan proklamasi ke daerah-daerah di sekitar Bandung,

seperti Dayeuhkolot, Banjaran, Soreang, Majalaya, Ciparay, Rancaekek, Ujungberung, Lembang, Padalarang, dan Cimahi.[94]

Para pemuda Bandung, yang baru pulang dari Jakarta pada 17 Agustus malam, langsung menyebarluaskan berita kemerdekaan kepada rekan-rekannya. Dua aktifis Bandung yang diutus ke Jakarta, Sjafruddin Prawiranegara dan Hasbullah Siregar, tidak sempat mendengarkan pembacaan naskah proklamasi di Jakarta. Keduanya hanya mendapat kabar dari rekan-rekannya di Jakarta bahwa proklamasi telah dibacakan oleh Sukarno.

Setelah mendapat informasi yang cukup dan meyakinkan, keesokan harinya, 18 Agustus, Sjafruddin dan Hasbullah pulang ke Bandung. Di Bandung, dia segera menyamaikan berita proklamasi kemerdekaan kepada rekan-rekannya, termasuk Wakil Komandan Barisan Pelopor Bandung, Abdul Haris Nasution.[95] "Pemuda harus segera bertindak," kata Sjafruddin.[96]

Dalam waktu yang singkat berita proklamasi itu telah tersebar cepat ke berbagai pelosok daerah Bandung hingga seluruh Priangan.[97] Beberapa orang dapat membaca apa yang terjadi. Puluhan orang lainnya di Bandung memiliki akses ke berita radio luar negeri. Kumpulan informasi tersebar secara perlahan dalam kelompok-kelompok kecil, politisi, pemuda, dan pejabat Jepang yang terlibat dalam kejadian-kejadian krusial di Jakarta.[98]

Para pemuda yang pernah dididik militer maupun semi militer saling berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan proklamasi terakhir. Abdul Haris Nasution mengatakan, kesimpulan yang dapat ditarik oleh pimpinan pemuda ketika itu ialah bahwa pemberontakan militer harus dimulai. Maka, Nasution dan rekan-rekannya mencari hubungan dengan pemimpin Pembela Tanah Air (PETA). Di Bandung dan Cimahi hanya terdapat lebih kurang dua kompi PETA. Orang-orang kepercayaan tidak ada di dalam kota.[99]

Nasution dan Mashudi menjumpai Daidanco Aruji Kartawinata di rumahya di Cimahi. Akan tetapi, ia tidak bersedia untuk memulai pergerakan, dan fikirannya sedang diliputi oleh "formasi persenjataan" pada esok paginya. Ia menyerahkan persoalan kepada koleganya di Bandung, Ilyas Sasmita. Pemuda ini pun tidak dapat diharapkan lagi, karena Jepang sudah melucutinya. Harapan kekuatan bersenjata tinggal pada polisi dengan satu kompi Tokubetsunya. Akan tetapi, pimpinan

polisi pada taraf itu mempunyai pendirian tentang kedudukan polisi "secara internasional."[100]

Pertimbangan-pertimbangan secara militer menghadapi jalan buntu dan seluruh perhatian kemudian ditujukan kembali ke Jakarta. Sambil menunggu instruksi dari pimpinan di Jakarta, berbagai pucuk pimpinan barisan pemuda membentuk Pusat Perantaraan Pemuda. Nasution dalam hal ini menulis, "di mana saya sendiri terpilih sebagai ketuanya, karena tetap yakin bahwa instruksi-instruksi lebih lanjut akan datang".[101] Namun, Nasution menilai keyakinan adanya instruksi pada awal proklamasi amat naif. Dia menyaksikan gerakan justru muncul dari kekuatan rakyat. Meskipun masih takut kepada tentara Jepang dan polisi, rakyat desa berani berdemonstrasi, para pelajar mengadakan aksi merah putih, tentara Jepang dilucuti, sampai kendaraan-kendaraan diambil.[102]

Berita proklamasi kemerdekaan bukan hanya diterima oleh para elite sipil dan militer, melainkan juga masyarakat kebanyakan. John R.W. Smail menyataan bahwa sejumlah orang yang pulang kerja di sore hari itu telah mendengar berita proklamasi di kantornya atau melihat pampflet dalam perjalanan pulang. Namun, sesampainya di rumah, mereka menemukan bahwa isteri dan tetangganya telah terlebih dulu mengetahui berita proklamasi. Dan dalam waktu satu atau dua hari berita itu telah menjangkau seluruh kawasan, kecuali desa-desa yang paling terpencil di luar kota.[103]

Seorang tukang cukur mengatakan bahwa ia mendengar berita kemerdekaan dari tetangganya. Pada awalnya, ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Dia baru memahaminya ketika beberapa orang mengatakan bahwa sekarang Indonesia tidak lagi dikuasai oleh Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Seorang buruh perempuan juga mengaku mendengar berita proklamasi dari tetangganya. Ia merasa senang, namun kesenangannya itu baru terasa setelah dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai perwujudan dari tidak lagi dikuasai oleh Jepang. Namun, banyak juga kaum terpelajar yang tidak percaya terhadap kenyataan bahwa Indonesia telah memroklamasikan kemerdekaaannya. Mereka berasumsi bahwa proklamasi hanyalah bagian dari propaganda Jepang.[104]

Ada pula orang-orang yang memiliki gambaran cukup jelas mengenai apa yang terjadi, tapi tidak sepenuhnya siap menghadapi

kemerdekaan, termasuk mereka kalangan elite di Jakarta.[105] Alasannya, meski Jepang mengalami krisis di luar Indonesia dan secara bertahap mengundurkan diri dari Jakarta, pasukan pendudukan mereka tetap memiliki kontrol militer penuh atas Jawa dan pulau-pulau penting lainnya. Warga Indonesia, sebagai contoh, tetap harus berhenti dan menunduk memberi hormat jika melewati pos-pos militer Jepang, aliran propaganda terus berlanjut dan tidak berkurang, dan sistem totaliarian tetap bertahan. Beberapa lama setelah mendengar berita menyerahnya Jepang, barulah mereka dapat sepenuhnya membebaskan diri dari dunia Jepang yang menjadi latar kehidupan mereka sebelumnya.

Sebagian baru menyadari kalau Indonesai benar-benar merdeka setelah kalender Jepang yang berangka tahun 2605 berubah menjadi kalender Indonesia berangka tahun 1945. Begitu juga dengan waktu yang berbeda setengah jam antara waktu wilayah Tokyo dengan waktu wilayah Jawa.[106]

Masyarakat Jawa Barat lainnya ada yang menerima kabar proklamasi dari Bandung secara berantai maupun langsung dari Jakarta dan kota-kota lain. Pemuda Bekasi, seperti Yakub Gani, langsung kembali ke Bekasi setelah menyaksikan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan oleh Sukarno. Dia mengabarkan berita proklamasi kepada Guru Noer Alie. Noer Alie yang sudah merasakan gelagat kemerdekaan Indonesia menyambut hangat dan gembira kabar itu.[107] Usai salat Jumat, Noer Alie mengumumkan berita proklamasi kepada para badal, santri, dan masyarakat di Mesjid Kampung Ujungmalang. Noer Alie menerangkan makna kemerdekaan yang diartikan sebagai bentuk kebebasan bumiputera dari penjajahan bangsa lain, terutama Jepang, Belanda, dan tuan tanah Cina. Keesokan harinya, 18 Agustus, Noer Alie kedatangan anak buahnya, Poin dan Yusuf Banja, yang membawa kabar serupa.[108]

Kabar proklamasi juga diterima tokoh Bekasi lainnya, seperti Guru Abdul Hamid, Marzuki Urmaini, Hasan Sjahroni, dan Marzuki Hidayat dari Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB) di Pasar Bekasi, Zakaria Burhanuddin dan Namin Abdu Khar di Kampung Duaratus, Angkut Abu Gazali dan Bantir di Tambun, Haji Rijan serta M. Husein Kamaly dan Muhammad Haji Rijan di Kranji di Kranji, Gusir dan Haji Maksum di Cakung-Cilincing, Camat Nata di Cibitung, Haji Darip dan Haji Hasbullah di Klender.[109] Bagi sebagian tokoh dan pengikutnya, kemerdekaan

adalah terbebas dari penjajahan bangsa asing, terutama Belanda, Jepang, dan tuan tanah. Sebagian beranggapan kemerdekaan merupakan masa yang tepat untuk melakukan balas dendam terhadap siapa saja yang pernah menindas mereka.

Maka, definisi musuh di Bekasi, tidak saja individu yang dianggap penindas, tapi siapapun yang nasonalismenya patut dicurigai dan orang-orang "luar" yang kebetulan sedang ada di sana atau sedang lewat.[110] Sebagian besar orang orang-orang yang terkena amarah massa adalah tentara Jepang yang secara langsung pernah menekan rakyat. Akibatnya setiap orang Jepang yang dijumpai dilucuti senjatanya, bahkan ada yang dibunuh.[111]

Pemuda Bekasi melakukan pengambilalihan kekuasaan dan senjata Jepang pada 22 Agustus 1945. Setelah melucuri senjata tuan tanah Teluk Pucung, Ir Tan, massa rakyat menahan 9 unit truk Jepang. Senjata dan 2 unit truk dirampas, sedangkan 47 unit truk beserta tentara yang ada di dalamnya diperintahkan langsung ke Jakarta.[112] Mengetahui amarah rakyat yang tidak terbendung, pada umumnya aparat pemerintah seperti wedana, camat, polisi, dan pegawai pemerintah tidak menantikan datangnya "pemindahan kekuasaan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Mereka memilih meninggalkan kedudukan dan kantornya, seperti Wedana Bekasi, Rukadi, yang melarikan.[113]

Kabar proklamasi merembet sampai ke Karawang melalui para pemuda yang menyaksikan langsung pembacaan proklamasi di Jakarta pada 17 Agustus siang. Tokoh pemuda Karawang, seperti Mohammad Kosim, lantas mengumumkan proklamasi kepada penduduk Kampung Babakan Cianjur, Karawang.[114] Kosim berpesan kepada masyarakat agar siap siaga untuk menjaga kemungkinan terburuk, terutama bila ada reaksi balik dari tentara Jepang.[115]

Berita proklamasi tiba di Bogor pada 17 Agustus 1945 siang, disampaikan dari mulut ke mulut dan melalui radio yang umumnya diletakkan di tempat-tempat strategis. Radio ini digunakan untuk senam pagi (*taiso*). Berita proklamasi juga tiba di Desa Pasarean, Cibungbulang, Bogor, melalui radio milik H. Mohammad Arif yang ditaruh di rumah Sholeh Iskandar.[116] Kemerdekaan yang sudah lama dinantikan rakyat Bogor disambut gembira, sekaligus menimbulkan kebingungan: siapakah pemerintah sekarang? Rakyat hanya mengetahui bahwa

Indonesia sudah merdeka. Presiden dan Wakil Presiden Sukrno-Hatta dilantik PPKI pada 18 Agustus 1945, namun siapa yang berwenang menangani kantor-kantor pemerintah di daerah? Apakah aparat pemerintah yang ditunjuk Jepang, seperti kepala desa, asisten wedana? Apakah mereka perlu ditaati atau langsung diganti sesuai pilihan rakyat?

Indonesia pun memasuki masa kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*): pemerintah lama (Jepang) telah runtuh, sementara pemerintahan baru (RI) masih sangat lemah. Proklamasi juga ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan rakyat harus segera mendukung pemerintah, tetapi ada yang menafsirkan boleh bertindak bebas merdeka. Perkembangan pun berbeda-beda. Ada wilayah yang relatif aman, namun tidak sedikit yang dilanda kekacauan, kekerasan, penjarahan, bahkan pembunuhan massal, karena tidak ada kekuatan yang mampu mengatur pemerintahan.[117]

Sebelum membentuk pemerintahan, para pemuda Bogor merebut kekuasan dari tangan Jepang pada 19 Agustus. Ketika itu para pemuda yang dipimpin R. Ijok Mohamad Sirodj meminta pemerintah pendudukan Jepang menyerahkan Gedung Bogor Shucokan (Keresidenan) dan mengibarkan bendera merah putih untuk menggantikan bendera Jepang, Hinomaru. Permintaan itu diluluskan Jepang.[118] Keesokan harinya, 20 Agustus 1945, bendera merah putih dikibarkan dan Gedung Shucohan diduduki. Di hari yang sama, para pemuda pejuang dan pemimpin rakyat mengadakan rapat untuk menyusun pemerintahan. Hasilnya, mereka sepakat menunjuk pemerintahan baru dengan R Ijok M. Sirodz sebagai Residen Bogor, R.A.A. Surjanegara sebagai Bupati Bogor, R. Odang menjadi Wali Kota Bogor, dan R Sukardi sebagai Bupati Sukabumi dan Cianjur. Juga ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Kabupaten Bogor adalah Enoch Danubrata dan Hartono sebagai Kepala Kepolisian Kota Bogor.[119]

Di Cirebon, anggota PETA di Arjawinangun, Nasuha, memperoleh berita proklamasi dari siaran radio di kantor Kewedanaan Arjawinangun pada 17 Agustus.[120] Nasuha lantas menyampaikan kabar proklamasi melalui sambungan telepon kepada aparat pemerintah dan teman-temannya di sejumlah kecamatan di Kewedanaan Arjawinangun. Dari kecamatan-kecamatan berita itu disebarkan ke seluruh pelosok desa dan kampung oleh para opas kecamatan.[121] Bersama dengan itu,

Mukdas—pemuda Cirebon yang sejak 16 Agustus malam telah mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus—telah mengumpulkan rekan-rekannya di Alun-alun Cirebon. Mereka mendengarkan berita proklamasi dari Jakarta. Malam harinya mereka meminta para pemuda setempat menyebarluaskan berita proklamasi. Keesokan harinya, masyarakat Arjawinangun mengibarkan bendera merah putih.

Rakyat Garut pimpinan Ajengan Yusuf Tajiri, yang juga telah mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan sejak 16 Agustus, menyambut gembira ketika mendengar berita proklamasi secara resmi melalui radio pada 17 Agustus. Mereka menyambutnya dengan mengibarkan bendera merah-putih, dan beberapa orang memasang lencana merah putih di bajunya.[122]

Proklamasi kemerdekaan didengar para aktifis pergerakan di Sukabumi, terutama yang sering berkumpul di Jalan Cikiray 10B, pada 17 Agustsus sore. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, para tokoh pejuang Sukabumi mengutus Edeng Abdullah dan Jakaria untuk menemui Maruto Nitimiharjo di Jakarta. Mereka meminta petunjuk kepada Maruto tentang langkah-langkah yang harus dilakukan di daerah paska proklamasi. Maruto memberi pengarahan agar para pejuang Sukabumi mengambil alih pemerintahan daerah dari tangan Jepang. Mendapat sinyal positif, mereka berencana merebut pemerintahan dari tangan Jepang setelah hari raya Idul Fitri.[123]

Pada 20 Agustus 1945 para tokoh Sukabumi lainnya mengadakan rapat yang lebih luas di Asrama Nagako (sekolah pertanian), yakni Dr. Abu Hanifah, Suradiraja, Mr. Samsudin, Gatot Mangkupraja, Suriana, A. Gani, Setiaatmaja, Sasmita, Iskandar, Sukatma, dan M. Barnas. Mereka menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, seperti yang direncanakan kelompok Cikuray 10B. Dalam tempo empat hari setelah proklamasi, pada 21 Agustus, mereka bersama para tokoh PETA yang pernah dilucuti oleh tentara Jepang, bergerak mengambilalih gedung pertemuan umum Sukabumi dan bertekad merebut kekuasaan.[124]

Ada pula daerah-daerah di Jawa Barat yang memperoleh kabar proklamasi sehari atau lebih dari 17 Agustus. Tangerang yang letaknya tidak jauh dari Jakarta baru menerima berita proklamasi pada 18 Agustus. Berita tersebut pertama kali diterima oleh para pegawai

Kabupaten Tangerang, Marto Sugriwo dan Abdel Hanan. Berita tersebut diterima melalui Mr. Datuk Jamin dan Mr. Sumanang, utusan dari Asrama Menteng 31 Jakarta.[125] Mereka datang ke kantor Ken Hokokai Tangerang dengan membawa sejumlah poster dan selebaran yang berisi teks proklamasi. Kedua utusan itu juga membicarakan langkah-langkah yang harus diambil dalam masa pemindahan kekuasaan dari tagan Jepang kepada Republik Indonesia.[126] Kebetulan saat itu Marto Sugriwo dan Abdel Hanan sedang lembur untuk menyelesaikan tugas di kantor. Langkah yang diambil oleh kedua pegawai Kabupaten Tangerang itu adalah segera menghubungi para pegawai lainnya.

Para pegawai kabupaten kemudian segera mengadakan pembagian tugas. Marto Sugriwo mengatur upacara sumpah setia dari pegawai Kabupaten Tangerang dengan mengambil tempat di ruangan belakang kabupaten, sedangkan Muhammad Tobi'ie dan anggota Suisintai bertugas menurunkan bendera Jepang, Hinomaru, dan menggantikannya dengan bendera merah putih. Setelah upacara selesai, para pegawai Kabupaten Tangerang segera menempeli kantor jawatan dengan pernyataan sebagai milik Republik Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan pada badan-badan Jepang seperti kantor urusan pembagian makanan yang belum sempat dibubarkan oleh Jepang dialihkan menjadi milik Republik Indonesia.[127]

Rakyat Jawa Barat di Kabupaten Serang juga mendengar berita proklamasi dari mulut ke mulut, kemudian mereka menyambutnya dengan rasa gembira dan pengibarkan bendera merah-putih.[128]

3.10. Pengambilalihan Kekuasaan

Untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan itu tidak main-main, para pemimpin Indonesia membentuk pemerintahan. Langkah awal yang dilakukan untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 19 Agustus 1945.

Pada 22 Agustus, PPKI membentuk Badan Penolong Korban Perang (BPKKP) sebagai induk organisasi yang memelihara keselamatan masyarakat. Salah satu bagian dari BPKKP adalah Badan Keamanan

Rakyat (BKR). Guna melengkapi struktur pemerintahan di daerah, atas usul Badan Pekerja KNIP, pada 23 Agustus Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Menurut undang-undang ini, KNID dijadikan salah satu alat kelengkapan pemerintahan daerah dan badan legislatif yang dipimpin oleh kepala daerah.

Pembentukan KNID di tingkat provinsi selanjutnya diikuti di tingkat keresidenan, kabupaten, hingga kecamatan. Instruksi pembentukan KNID sampai di Bandung pada 21 Agustus. Sebuah komite khusus juga dibentuk pada 22 Agustus dengan tujuan "membantu pemerintah daerah". Pada 23 Agustus Presiden Sukarno berpidato di radio tentang pembentukan KNID.[129]

Pembentukan KNID di Jawa Barat tidak dimulai dari tingkat provinsi, melainkan di tingkat keresidenan, tepatnya Keresidenan Priangan pada 24 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena selama pendudukan Jepang, keresidenan menjadi unit dasar pemerintahan.[130] Secara praktis tidak ada entitas politik yang berkuasa di Jawa Barat waktu itu.[131] Rapat pembentukan KNID Priangan dipimpin oleh Residen Priangan R Puradireja. Jumlah anggota KNID terdiri atas 23 orang dan 3 orang wakil dari peranakan Arab, India, dan Cina. Dalam rapat itu terpilih pimpinan dan anggota yang dianggap mewakili seluruh lapisan masyarakat Keresidenan Priangan.[132]

Keesokan harinya, 25 Agustus, dua anggota KNIP, Oto Iskandar Dinata dan Kasman Singodimejo, berceramah di depan nggota KNID Priangan. Mereka menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Nasional adalah untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh rakyat. Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-cita rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan mampu menjadi benteng kokoh untuk membangun negara. Dalam rapat itu dibentuk pula Badan Eksekutif KNI Daerah Priangan. Badan Eksekutif KNID terdiri dari Bagian Penerangan yang dikepalai Moch. Syafei, Bagian Perhubungan Ir. Abdul Karim, Bagian Kemakmuran Sanusi Harjadinata, Bagian Kesehatan Dr. Supardan, dan Bagian Keuangan H. A. Gani.

Pembentukan KNID terus berlangsung di kabupaten dan kota di Jawa Barat, yakni Kotapraja Bandung dengan R. Syamsurizal sebagai ketua, kabupaten Bandung (Sutalaksana), Keresidenen Bogor (R.S. Suriadiraja),[133] Kota Bogor (Odang), Kabupaten Sukabumi (Mr.

Harun),[134] Keresidenan Cirebon (Dr. Sudarsono), Kabupten Majalengka (R. Enoch), Kewedanan Bekasi (M. Loebis).[135] Sementara di Keresidenan Banten, para tokoh masyarakat membentul KNID Kabupaten Serang dipimpin Ce Mamat, Kabupaten Lebak (Jayarukmantara), dan Kabupaten Tangerang (R.M. Kusumo).[136]

Setelah KNID dibentuk ditingkat keresidenan hingga kecamatan, barulah dibentuk KNID Provinsi Jawa Barat pada 9 September 1945 yang berpusat di Bandung. Struktut KNID Jawa Barat adalah Ketua Otto Iskandar Dinata, Wakil Ketua I Dr. Erwin Suratman, Wakil Ketua II Mr. Samsudin.[137] Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1945 tanggal 23 Nopember, KNID Jawa Barat ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Sementara tugas KNID adalah menyatakan kehendak rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka; mempersatukan rakyat Indonesia dari segala lapisan, supaya terwujud kesatuan kebangsaan yang kuat dan erat; membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan rakyat; membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan daerah serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.[138]

Meski Sutarjo Kartohadikusumo telah ditunjuk selaku Gubernur Jawa Barat pada 2 September 1945, namun dia tetap berada di Jakarta hingga November 1945.[139] Selain itu, pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi, peran gubernur belum banyak berpengaruh. Hal itu masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Jepang yang menonjolkan peranan residen. Sementara sekretariat kecil beroperasi atas nama KNID secara teroretis di Bandung.[140]

Kedudukan KNID Provinsi Jawa Barat hanya berperan sebagai penghubung antara pusat dan daerah.[141] Dalam minggu-minggu awal September, KNID Jawa Barat banyak mengurus penyebaran informasi, dengan menekankan pada kemerdekaan dan pemeliharaan ketertiban umum. Untuk memenuhi tujuan yang kedua, KNI dan anggotanya mulai terlibat dalam perencanaan pembentukan cabang lokal Badan Keamanan Rakyat (BKR).[142]

Para pejabat kepala daerah pada umumnya ditunjuk oleh KNID. Sebagian besar mereka sudah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Jepang. Pada 1 September, R. Puradireja ditunjuk sebagai Residen Priangan. Residen-residen daerah-daerah lain juga dibentuk pada awal September 1945, yakni Residen Banten Tirta Suyatna yang kemudian diganti oleh Kiai Haji Akhmad Khatib; Residen Bogor Mohammad Sirodz (kemudian diganti oleh Barnas); Residen Jakarta Sewaka, dan Residen Cirebon Dr. Murjani. Pengangkatan para bupati dan wali kota ditunjuk oleh para wakil rakyat di daerahnya masing-masing yang tergabung dalam KNID.

3.11. Konflik dengan Jepang dan Sekutu

Meski kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan dan Komite Nasional Indonesia serta struktur kabinet telah dibentuk, tetapi proklamasi belum mencapai tujuannya yang tegas, karena tentara Jepang yang telah kalah perang masih berkeliaran. Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia dan lebih memilih menunggu peralihan kekuasaan ke tangan tentara Sekutu selaku pihak yang menang perang. Oleh sebab itu, Jepang tidak menyerahkan kekuasaan dan persenjataannya kepada para pejuang Indonesia. Sementara pemimpin negara masih memperhatikan sikap para pembesar Jepang dan menunggu kedatangan Sekutu.

Atmosfer ketidakpastian itu bertahan selama beberapa minggu. Kekosongan politik di periode ini biasanya dipandang sebagai urusan dari pemerintahan yang terlibat—Jepang, Indonesia, Sekutu, Belanda. Namun, bagi sebagian besar orang Indonesia hal ini berarti bahwa mereka tiba-tiba tidak memiliki pemerintahan yang meyakinkan. Rezim yang berkuasa telah runtuh, dan situasi politik mendadak terbuka lebar sehingga segala sesuatunya menjadi mungkin.[143]

Para pemuda pejuang menilai kondisi ini tidak bisa dibiaran. Proklamasi harus diisi sebelum Sekutu datang. Karena itu, para pemuda Keresidenan Jakarta menjalin kontak dengan pemuda-pemuda lain di luar Jakarta, terutama sejumlah kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat. Mereka membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Jakarta pada 1 September 1945. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional dan rakyat bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka, para pemuda API menggagas rapar raksasa di Lapangan Ikada

pada 19 September 1945, yang dihadairi Presiden Sukarno. Di hadapan puluhan ribu peserta rapat, Presiden Sukarno meminta kepada seluruh rakyat agar tenang dan menunggu perintah dalam keadaan siap sedia.

Hampir bersamaan dengan itu, tentara Sekutu mulai mendarat di Indonesia. Pendaratan rombongan perwira Sekutu Inggris di Pelabuhan Tanjung Priok pada 15 September di bawah komando Southeast Asia Commanda (SEAC) dengan tugas mengurus RAPWI (Rehabilitation Allied Prisoners). Selanjutnya, Kedatangan Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) berlangsung pada 29 September 1945. Hal inilah yang membuat para pemuda Indonesia khawatir akan dijajah kembali oleh bangsa asing, terutama Belanda, karena di dalamnya membonceng petinggi dan pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands-Indies Civil Administration (NICA).

Dalam suasana yang mulai memanas, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 dengan Letnan Jenderal Oerip Soemoardjo sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Tentara reguler tersebut dibentuk pula di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.

Saat menjalankan tugasnya, sikap tentara Sekutu kurang bersahabat. Mereka kerap menerobos batas wilayah pertahanan Republik dengan seenaknya. Alasannya, untuk membebaskan interniran, namun dalam beberapa kesempatan tentara Sekutu bertindak kasar terhadap peduduk. Kondisi ini menimbulkan bentrokan fisik dengan para pemuda di dalam dan luar kota Jakarta hampir setiap malam.[144] Sekutu kerap mengerahkan satu batalion infanteri, dibantu tank-tank dan pesawat udara untuk menyingkirkan pertahanan barisan rakyat antara jalan Jakarta-Bogor dan Jakarta-Bekasi.[145] Para pemuda Jakarta yang terdesak merekayasa agar Bekasi dijadikan daerah pencegatan kereta api dan "pengadilan" terhadap pihak musuh maupun mereka yang dianggap merugikan perjuangan.

Pencegatan kereta api yang sempat menghebohkan terjadi pada 19 Oktober 1945. Saat itu kereta api dari Jakarta mengangkut tawanan tentara Jepang menuju Ciater. Rencananya, tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke Lapangan Terbang Kalijati, Subang, untuk selanjutnya dipulangkan ke Jepang. Namun, setibanya di Stasiun Bekasi, seluruh gerbong digeledah oleh Wakil Komandan TKR Bekasi, Letnan Dua Zakaria Burhanuddin. Dari sembilan gerbong, ternyata ada tiga

gerbong yang berisi tawanan Jepang. Masing-masing gerbong berjumlah sekitar 30 orang, sehingga semuanya berjumlah 90 orang.

Mereka menunjukkan surat perintah jalan dari menteri Soebardjo yang dibubuhi tanda tangan Presiden Sukarno. Namun nahas, salah seorang dari tawanan kedapatan membawa senjata api dan sempat melakukan perlawanan, sehingga terjadi pertempuran. Ratusan pejuang bersenjata tajam menaklukkan dan membunuh 90 tentara Jepang di Stasiun Bekasi hingga Kali Bekas. Jenazah mereka dihanyutkan di Kali Bekasi.[146]

Pemimpin Republik dan Jepang di Jakarta terperangah atas insiden kali Bekasi tersebut. Sementara sekutu tidak dapat berbuat banyak. Sebagai tanda tanggungjawab terhadap dunia internasional dan dalam rangka menenangkan Bekasi, pada 25 Oktober 1945 Presiden Sukarno datang ke Bekasi. Di hadapan rakyat Bekasi, Sukarno meminta agar rakyat jangan mencampuri urusan kereta api dan jangan mengacaukan perjalanan.[147]

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Laksaman R. Soekanto dan pegawai menteri Luar Negeri Budiarto menghadap Laksamana III Maeda. Maeda yang didampingi Staf Armada Selatan ke-II Kinoshita dan Nishizima marah. "Hal ini dapat dipandang sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia dengan sikap yang demikian itu tidak mempunyai pendirian yang teguh di dunia ini." Dengan nada menyindir Maeda menilai, "Kalau Pemerintah Republik Indonesia tidak bisa mengatur rakyat dan tidak bisa mencegah kejadian semacam ini, maka dengan sangat menyesal hal itu berarti bahwa Republik Indonesia tidak akan berdiri sebagai Pemerintah modern." R. Soekanto mengatakan bahwa "Bekasi itu sebagaimana Paduka Tuan ketahui, ialah suatu daerah di mana rakyat belum sama sekali tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia". Soekanto menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut. "Saya akan menetapkan hati untuk membereskan hal itu".[148]

Sedangkan di Bogor, pada masa awal proklamasi tidak terjadi perlucutan senjata yang berarti kecuali polisian, karena kekuatan Jepang yang cukup besar selalu menjaga jalan raya Bogor-Bandung. KNID dan BKR Sukabumi mengutus delegasi Sukabumi—R. Didi Sukardi, Emo Harja, dan K. Acun Basuni—ke Bogor untuk mendesak agar jabatan Sucokan diserahterimakan kepada pihak Indonesia.[149] Pengoperan pemerintahan sipil berlangsung lancar, sehingga kekuasaan Republik

dapat ditegakkan. Begitu pula pengambilalihan alat-alat perlengkapan dari tangan-tangan instansi-instansi sipil lainnya berlangsung dengan mudah. Pada 1 Oktober 1945 dilakukan pengoperan kekuasaan secara resmi dari Syucokan kepada Residen Bogor R. Ijok Mohammad Sirodz Harjawinangun. Serah terima tersebut disaksikan oleh sekitar 30 ribu penduduk yang berkerumun di sepanjang jalan dan di depan kantor keresidenan.[150]

Setelah upacara pengibaran bendera merah putih, Residen Ijok membacakan teks proklamasi dan menyatakan bahwa kekuasaan Syucokan sudah dipegang oleh Residen. Ijok meminta supaya rakyat pulang dengan aman memegang disiplin dan siap sedia. Atas nama semua pegawai dan tokoh Bogor, Barnas mengucapkan sumpah setia kepada Sukarno-Hatta. Sedangkan bekas Fuku Syucokan, Ajengan Haji Akhmad Sanusi, mendoakan agar Indonesia tetap merdeka.

Ketua KNID Bogor, Umar Sanusi, mengeluarkan maklumat yang isinya menyerukan kepada seluruh penduduk Bogor agar menegakkan keamanan dan ketenteraman umum supaya Indonesia terjamin kemerdekaannya, selalu siap sedia berdiri di belakang Residen dan pemerintah Republik Indonesia, menjalin hubungan dengan Sekutu serta bangsa dan golongan lain dengan dasar disiplin dan diplomasi.[151]

Meski Residen Ijok meminta seluruh pegawai menjadi pegawai Republik Indonesia, namun di beberapa tempat, seperti di Cibarusah, para pamong praja dan polisi bentukan Jepang membubarkan diri. Kekosongan pegawai itu membuat gerombolan Pak Macan menguasai keadaan. Ledakan huru-hara terjadi di distrik Depok. Penduduk yang beragama Kristen yang pada masa Hindia Belanda amat rapat dengan penjajah, menjadi korban rakyat, karena dianggap sebagai mata-mata Belanda.[152]

Kabar pengambilalihan jabatan Sucokan dari Jepang kepada Residen Ijok disampaikan Kepala BKR Sukabumi K. Acun Basuni kepada ribuan rakyat yang membanjiri halaman Gedung Societeit Soekamanah. Dia menjelaskan bahwa serah terima kekuasaan hanya di tingkat keresidenan, sedangkan untuk tingkat kabupaten, pelaksanannya ditangguhkan.[153] Selanjutnya, para pemimpin Sukabumi—K. Acun Basuni, S. Waluyo, dan Ali Basri—menemui pimpinan KNID dan BKR untuk menetapkan aksi perebutan kekuasaan, yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia lima. Panitia lima tersebut adalah Suryana dari

unsur eks-PETA, Kukoya dari unsur Kepolisian, S.Waluyo dari unsur KNID, K. Abdurohim dari unsur alim ulama, Ali Basuri dari unsur daerah. Tugas panitia lima adalah membebaskan para tahanan, mengibarkan bendera merah putih di seluruh jawatan dan instansi, serta di pelosok kota dan kabupaten, mengganti kepala-kepala jawatan yang dipegang oleh Jepang untuk diganti dengan orang Indonesia.[154]

Tentara Jepang tidak berdaya menghadapi serbuan massa yang melakukan perebutan kekuasaan. Untuk mengurangi ketegangan, tentara Jepang di Sukabumi membebaskan beberapa tahanan politik yang fisiknya amat lemah akibat siksaan Jepang selama di dalam tahanan, diantaranya A.M. Sipahutar, Adang Trenggana, dan Bainun.[155] Aksi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih di jawatan-jawatan dan kantor-kantor perusahaan. Mereka menguasai kantor perusahaan listrik Denki, kantor telepon, dan tambang emas Cikotok. Pimpinan tambang emas Cikotok diserahkan kepemimpinannya kepada Slamet Hadiatmojo dan kantor Denki kepada Ibnu dan Suhaemi. Mr Samsudin didaulat sebagai Wali Kota Sukabumi dan Mr. Haroen sebagai Bupati Sukabumi.[156]

Namun, peralihan kekuasaan yang baru berlangsung beberapa pekan itu terusik oleh kehadiran tentara Sekutu. Tentara Sekutu-Inggris bukan hanya menguasai Ibu Kota Negara, Jakarta, tetapi juga wilayah sekitarnya, terutama Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Sebab, Sekutu harus mengamankan para interniran Jepang dan orang-orang Eropa yang terjebak di Bandung dan kota-kota lain. Sekutu juga berkepentingan terhadap Bogor, karena di sana ada Istana negara dan para interniran. Adapun Bekasi dan Karawang harus ditaklukkan, karena selain memiliki para pemuda militan yang bisa menganggu perjalana kereta api dan jalan raya, juga sejak berabad-abad silam dikenal sebagai lumbung padi.

Bagi Sekutu, menguasai Bekasi dan Bogor sama juga memegang kunci pintu bagi pasukannya untuk menuju Bandung melalui Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Para pemimpin di pusat dan didaerah pun banyak terlibat dalam diplomasi.[157] Agar segera cepat tiba di Bandung, tentara Sekutu-Inggris di bawah pimpinan Kolonel Greenway memasuki Bogor pada 22 Oktober 1945. Dua hari kemudian Sekutu meminta Markas Besar Pertahanan Negara (MBPN) Keresidenan Bogor agar mengarahkan pasukannya untuk menjaga keamanan dan

ketertiban. Residen Bogor, R. Ijok Mohammad Sirodz Harjawinangun, menolak permintaan Sekutu dengan alasan Bogor sudah aman dan MBPN sanggup menjaga keamanan.[158]

Namun, Sekutu tetap berusaha menduduki Bogor. Alasannya, situasi keamanan tidak terkendali. Sejak awal Oktober, terjadi berbagai penculikan dan penggedoran terhadap orang Eropa di Bogor, yang sebagian besar justru dilakukan oleh anggota TKR dan Barisan Pelopor. Pada 7-11 Oktober, situasi di Bogor dan Depok makin kacau. Kepala Palang Merah Internasional W.A.P.C. Pennink ditawan, diinterogasi, lalu dipenjara di Penjara Paledang, Bogor. Pada akhir Oktober 1945, Penjara Paledang diinspeksi tentara Sekutu, lantas tahanannya dipindahkan ke kamp-kamp pengungsian di kamp Kedoenghalang, Ursulinenklosster, untuk interniran perempuan, kamp 14e Batalion di Pabaton dan kamp Kota Paris. Untuk mempertahankan Bogor dari penguasaan Sekutu, pada 15 November 1945 Letnan Kolonel Hussein Sastranegara membangun Resimen 2 Jawa Barat.

Pelucutan senjata di daerah Sukabumi dan Cianjur tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di daerah ini tentara PETA di empat daidan—Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cibeber, dan Jampang Kulon—dilucuti senjatanya.[159] Pelucutan senjata itu berjalan dengan lancar, kecuali beberapa senjata yang disembunyikan, seperti yang dilakukan Syudanco Kosasih. Dia berhasil melarikan 2 unit truk.

TKR kota dan Polisi Sukabumi mengadakan pelucutan senjata dari tangan kempetai. Rakyat mengepung gedung kempetai, sementara pemuka-pemukanya mendesak taico untuk menyerahkan senjata. Jepang mengulur-ulur waktu dengan jalan menelpon ke Bandung dan Jakarta untuk minta putusan dari atasannya. Akhirnya Jepang menyerahkan senjatanya. Karena tidak ada rencana pengambilan senjata secara besar-besaran, para pemuda hanya mengambil beberapa pucuk.[160] Usaha TKR untuk bernegosiasi dengan Jepang di Cilameti, Cicurug, tidak berhasil, sehingga perwira Kosasih ditahan sebentar oleh API Cicurug.[161]

Perebutan senjata di Tasikmalaya berhasil dengan baik. Para pemuda dapat mengusir Jepang dari lapangan terbang, kempetai menyerahkan markasnya, sedangkan orang-orang Belanda diinternir oleh rakyat. Begitu juga di daerah Cirebon perebutan kekuasaan dari tangan Jepang berjalan baik, meski di beberapa tempat ada

penghadangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Jepang, seperti i Kedungbunder. Mobil tentara Jepang dari Cirebon menuju Palimanan dihadang oleh rakyat di desa Weru. Tentara Jepang yang ada mobil itu dibunuh. Aksi perebutan senjata di Sindang Laut menewaskan Wakil Komadan Kempeitai Cirebon dan anggotanya.[162]

Di Majalengka terjadi insiden pada 8-10 Oktober 1945. Ketika itu opsir-opsir Jepang menemui Bupatu Majalengka Enokh dan Kepala TKR Majalengka Affandi. Namun dalam perundingan, Jepang malah menawan Bupati dan Kepala BKR Majalengka. Pada saat yang bersamaan melaju iring-iringan lima truk dan dua mobil lapis baja berisi tentara Jepang dari arah Cirebon menuju Majalengka. Mendengar balabantuan Jepang dalam perjalanan, para pemuda Majalengka melakukan penghadangan di jalan raya yang akan dilintasi tentara Jepang. Sebelum tiba di perbatasan kota, tentara Jepang ditemui Kepala Kepolisian Majalengka, Kepala Tata Usaha Pemerintah Majalengka, dan Kepala BKR Cirebon.

Dari hasil perundingan, tentara Jepang berjanji tidak akan melakukan penyerbuan ke pusat kota. Agar lebih meyakinkan, mereka meninggalkan seluruh kendaraannya di perbatasan kota. Sedangkan pasukannya berjalan kaki dari perbatasan sampai ke pusat kota Majalengka. Keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, rakyat membebaskan tentara Jepang yang ditawan penduduknya, dengan janji tentata Jepang keluar dari Majalengka secepatnya. Sebagai kompensasinya, Jepang membebaska Bupati Majalengka, sedangkan Kepala BKR Affandi dibebaskan sebulan kemudian.[163]

Perlucutan senjata Jepang oleh pemuda pejuang di Tangerang berbuntut pada pertempuran Lengkong. Pada Januari 1946, pimpinan Akademi Militer, Mayor Daan Mogot, memimpin negosiasi pengambilan senjata dengan markas Jepang di Lengkong. Agar dipercaya oleh Jepang, Daan Mogot menggunakan delapan orang serdadu India Muslim yang telah "menyeberang" ke pihak Indonesia. Serdadu-serdadu India bertindak seolah-olah utusan tentara Sekutu untuk melucuti tentara Jepang. Namun, ketika perundingan hampir selesai dan senjata sedang dikumpulkan, seorang serdadu India mengutik-ngutik senjata yang baru dikenalnya. Tiba-tiba terjadi letusan dari senjatanya. Jepang mengira letusan itu sebagai tembakan permulaan dan mereka merasa telah terjebak. Oleh sebab itu dalam sekejap mata pasukan Republik dan

India tersebut diberondong oleh tembakan dari segala penjuru. Beberapa orang gugur, termasuk Daan Mogot.[164]

Di Daerah Banten, perlucutan senjata berlangsung dengan beberapa insiden, karena Kempeitan memberikan perlawanan, Di Waning Gunung dan Rangkasbitung terjadi pertempuran yang mengakibatkan orang Jepang dibunuh pejuang. Di Rangkasbitung perlucutan senjata berjalan sempurna. Orang-orang Jepang baik sipil maupun militer diinternir oleh BKR. Kempeitai Serang tidak memenuhi ultimatum untuk menyerah, sehingga terjadi pertempuran, tapi malam harinya mereka meloloskan diri. Pegawai Jepang, termasuk syucokan, menyerah dan dikirimkan ke Jakarta dengan kereta api. Di Rangkasbitung, senjata tentara Jepang dilucuti.[165]

3.12. Pejuang Jakarta Terdesak ke Jawa Barat

Dalam suasana tegang, Jakarta dijadikan "kota diplomasi" internasional bagi perundingan pihak Inggris, Belanda, dan Indonesia. Pasukan bersenjata Indonesia, terutama TKR dan badan-badan perjuangan Indonesia diperintahkan mundur dari Jakarta. Alasannya demi menjaga keamanan agar jangan sampai terjadi bentrokan lebih lanjut antara pihak Republik Indonesia dengan pasukan Sekutu.[166] Perintah mundur oleh pemerintah Indonesia melalui tersebut tertuang dalam maklumat tanggap 19 November 1945. Pertama, memusatkan TKR di sekeliling kota Jakarta Raya. Kedua, menyerukan kepada rakyat untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap tindakan-tindakan yang harus diambil TKR dan menjaga jangan bertindak sendiri-sendiri guna tidak merugikan Republik Indonesia.[167]

Konsekwesni mundurnya TKR dan badan-badan perjuangan, Sekutu dan Indonesia menyepakati tapal batas atau garis demarkasi (*demarcasie-lijn*) di sekitar kali Cakung, Bekasi. Di sebelah barat garis demarkasi dari Kali Cakung adalah daerah dalam pengawasan tentara Sekutu. Sementara di sebelah timur kali Cakung, meluas ke arah Bekasi, Karawang, Cikampek dalam kekuasaan Republik Indonesia. Antara daerah Sekutu dan Indonesia terdapat garis pemisah, yakni garis demarkasi selebar 2 kilometer yang tidak didiami oleh suatu kekuasaan, dan lazim dinamai daerah "tidak bertuan."[168]

Meski dengan berat hati, TKR dan badan-badan perjuangan di Jakarta tunduk pada maklumat pemerintah. Mereka segera menempatkan pasukannya di sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Di sebelah barat (Tangerang) Resimen 4 TKR dikomandani Mayor Singgih, Kemal Idris, dan Daan Yahya;[169] sedangkan ke arah timur Jakarta, Resimen 5 Cikampek TKR di bawah komandan Letnan Kolonel Moeffreni Moe'min.[170]

Pasukan Batalion V Resimen 5 pimpinan Mayor Sambas Atmadinata baru saja ditempatkan di Bekasi, tiba-tiba terjadi insiden jatuhnya pesawat Dakota Sekutu-Inggris di persawahan Rawa Gatel, Cakung, Kewedanaan Bekasi, pada 23 November 1945.[171] Seluruh pasukannya yang berjumlah 26 orang dibawa ke Tangsi Polisi Bekasi. Pada awal Desember seluruh tawanan dibunuh dan dikubur di belakang Tangsi Polisi Bekasi.Tentara Sekutu marah besar. Setelah mengambil tentaranya yang telah menjadi mayat pada 5 Desember, Sekutu menyerbu Bekasi dari darat dan udara pada 13 Desember 1945. Bekasi dibom dari udara menggunakan bom-bom pembakar, dan dari darat menggunakan minyak tanah dan bensin. Pembumihangusan meluas hingga ke Tambun, Cikarang, Lemah Abang, dan Karawang.[172]

KNID Kewedanaan Bekasi melaporkan, sebanyak 3.879 jiwa dari 641 keluarga kehilangan tempat tinggal, 14 orang luka-luka, dan 3 unit mobil dibakar, terasuk 1 mobil kanor berita *Antara*.[173] Pemerntah Indonesia dan dunia internasional, terutama Amerika Serikat, mengutuk keras aksi Sekutu-Inggris tersebut. Pers internasional mensejajarkan "Bekasi Lautan Api" itu dengan pemboman dan pembakaran kota Lidice, Polandia, oleh tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia II.[174]

Di Bogor, Pada 12 November 1945, pemuda menyerbu kamp tentara (interniran) Jepang di Cigombong, Ciawi. Akibatnya, Letnan Kolonel Kawagishi dan 41 tentara Jepang tewas. Istana Bogor yang dijadikan markas pemuda pejuang direbut oleh tentara Sekutu atas dukungan Perdana Meneri Sutan Sjahrir pada 8 Desember.

Saat Sekutu melakukan penggeledahan hingga ke Sukabumi, para pejuang melakukan serangan besar-besaran terhadap konvoi pasukan Sekutu di Bojong Kokosan, Parungkuda, Sukabumi, pada 9 Desember. Namun, karena persenjataan Sekutu lebih lengkap dengan prajurit terlatih, pasukan Indonesia hanya mampu menewaskan beberapa tentara Sekutu, sedangkan jumlah yang gugur dari pihak

Indonesia sekitar 40 orang.[175] Sekutu pun bisa melanjutkan perjalanananya ke Bandung.

Pertempuran tidak terelakkan antara pasukan Indonesia dengan sekutu di Kedunghalang dan Kotaparis. Tentara Sekutu membakar Kampung Kebon Kopi. Dalam satu penyerbuan yang dilakukan para pejuang di pusat kota pada malam 14 Desember 1945, sebanyak 32 pejuang gugur dari Leuwiliang dan Jasinga, termasuk KH Djamsari.[176] Pada 16-18 Desember 1945, tentara Sekutu-Inggris menembaki, menggeledah, dan membakar rumah-rumah penduduk di Panaragan Kidul, Gunung Batu, Gang Kepatihan, dan Lebak Kantin. Sekutu-Inggris juga menyerang titik vital pertahanan Indonesia di Teluk Pinang (Ciawi), Cinangneng, Depok, Ciluar, Cijeruk, Sindangbarang, Cikereteg, dan Pagentongan.[177]

Para pejuang di Bandung yang sejak akhir Agustus hingga awal Oktober dengan mudah menyerbu markas tentara dan merebut persenjata dari gudang senjata Jepang, namun sejak pertengahan Oktober tidak leluasa lagi. Bahkan berhasil dijinakkan oleh Jepang dan Sekutu.

Perlu dijelaskan bahwa sejak masa Hindia Belanda sampai pendudukan militer Jepang, Bandung dijadikan pabrik pembuatan senjata, pusat perbengkelan senjata, gudang senjata. Lokasinya di Kiara Condong, lapangan terbang Andir, Rancaekek, dan Cilampeni. Juga terdapat kamp tahanan di Cisurupan (Cikajang, Garut) dan Ciater yang ditempati oleh Laksamana Maeda dan anggota marine dari Jakarta.

Kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kabupaten, kantor kotapraja, dan kantor pekerjaan umum, dalam direbut. Menjelang akhir September 1945 para pejuang mengusir Jepang dengan kekerasan. Kantor-kantor pusat yang strategis dikuasai, di antaranya Kantor Besar Pos, Telegraf, dan Telekomunikasi (PTT), Balai Besar Kereta Api, Jawatan Angkutan Bermotor, Jawatan Pekerjaan Umum, dan Jawatan Radio.

Para pelajar bersama bekas PETA berhasil mengepung konvoi panser Jepang di Cicadas. Jepang menyerah dan 9 unit panser di serahkan kepada polisi. Dua orang pemuda, yaitu bekas Heiho Sumarsono dan mahasiswa Batangtaris berhasil mengelabui Jepang dengan cara masuk ke gudang senjata di Dayeuhkolot dengan jalan menyamar sebagai perwira Jepang. Mereka berhasil mengangkut sejumlah senjata dari gudang tersebut. Kemudian senjata itu dibawa ke

asrama Batalion Sukanda Bratamanggala, sehingga batalion ini tergolong paling lengkap persenjataannya.[178]

Pada 2 Oktober, pabrik senjata yang besar di Kiaracondong di sebelah tenggara kota Bandung berhasil direbut pihak Indonesia. Pada 7 Oktober, sejumlah gudang senjata diambilalih.[179] Keberhasilan merebut persenjataan itu membuat massa dalam jumlah besar menjadi ikut-ikutan berani untuk merebut senjata Jepang. Dipimpin oleh Polisi Khusus, anggota BKR dan pemuda dari Departemen Kereta Api maupun instansi lainnya, massa bergerak dari berbagai arah menuju pangkalan udara di Andir di sebelah barat kota, untuk kemudian melucuti pihak Jepang di sana sekaligus memegang kendali penuh.[180]

Saat terjadi perebutan senjata, komanan militer Jepang di Bandung, Mayor Jenderal Mabuchi, melakukan negosiasi dengan sejumlah elite penguasa Indonesia, yakni Ketua KNID Jawa Barat Oto Iskandar Dinata, Residen Priangan Puradireja, dan Wali Kota Bandung Ukar Bratakusumah.[181] Ada dua versi kesepakatan dari hasil negosiasi, yakni hanya ada janji yang tidak pasti dari sang jenderal untuk menyerahkan persenjataan Jepang pada tanggal yang tidak ditentukan, sedangkan versi lainnya menyebutkan adanya perjanjian untuk melangsungkan proses penyerahan secara perlahan dan teratur.[182] Lepas dari itu, saat itu kerumunan massa yang agresif telah berkumpul di sekitar markas Kempetai di Bandung utara pada pagi 10 Oktober. Massa menyerang, dan ketika situasi semakin berbahaya, Jepang memanggil Kepala BKR Kota Bandung, Suhari, dan sejumlah pemimpin Republik lainnya untuk berunding. Namun, begitu di dalam bandungan, Jepang menodongkang bayonet dan memaksa mereka untuk menyerah. Jepang juga meminta mereka menghentikan serangan massa dan meyakinkan massa untuk bubar dengan menyatakan bahwa senjata akan dibagikan setelah proses "negosiasi" yang sedang berjalan selesai.[183]

Di bawah ancaman senjata Jepang, pada siang harinya Suhari dan beberapa orang terpaksa menaiki tank untuk berkeliling kota dan mendesak masyarakat agar menghentikan serangan terhadap Jepang. Pada saat yang sama, Jepang menyerang kantor KNI Keresidenan Priangan dan menyapu bersih markas BKR. Sore harinya, mereka menyebar di segala penjuru kota dan menembaki siapa saja yang berusaha melawan. Besok paginya, mereka membuat barikade si setiap jalan masuk ke kota dan di berbagai titik di dalam kota. Dalam beberapa

hari berikutnya, Jepang meneruskan patroli dan memperluas operasi hingga ke bagian lain kabupaten.[184]

Sepanjang Oktober-November, Bandung pun dihantui sejumlah kasus penculikan terhadap tokoh mereka. Oto Iskandar Dinata diculik pada 1 Desember di Jakarta dan dibunuh di pinggir laut dekat Tangerang pada 20 Desember 1945. Sementara Puradireja, Nita Sumantri, Ukar Bratakusumah dan sejumlah pejabat polisi penting, hanya diculik.

3.13. Bandung Lautan Api

Bersamaan dengan Jepang yang berhasil memegang kendali militer, Komandan Brigade Infanteri Hindia ke-37 Sekutu, Brigadir Jenderal N. MacDonald, bersama staf dan pasukannya yang ditugaskan untuk menduduki Bandung, tiba di kota itu pada 17 Oktober. Pada 20 Oktober ia bertemu dengan residen, bupati, wali kota, dan anggota KNI. MacDonald meminta agar rakyat menyerahkan semua senjata. Orang Belanda, Eropa, dan pegawai RAPWI juga akan dilucuti.[185]

Permintaan Sekutu ditolak para pemuda. Sepanjang Oktober 1945 hingga Maret 1946, para pemuda pejuang Bandung melakukan penyerangan, sehingga membuat Sekutu-Inggris terdesak. Kondisi ini diperparah oleh serangan para pemuda pejuang di jalur logistik Bogor-Sukabumi-Bandung. Merasa terdesak, Sekutu-Inggris menuntut kebebasan untuk mengambil pasukan-lasukan Jepang yang menginternir diri daerah Lembang dan Sukabumi. Pemerintah pusat penyetujuinya, tapi pemuka-pemuka rakyat dan TKR tidak mungkin dapat menyetujuinya. Di pihak lain, Panglima Komandemen memerintahkan peningkatan-peningkatan gangguan-gangguan terhadap konvoi-konvoi Inggris antara Puncak-Bandung, yang meliputi wilayah Divisi III.[186]

"Saya pilih tempat-tempat penghadangan di antara Puncak-Cianjur dan antara Ciranjang-Rajamandala-Padalarang, yakni dalam kompleks-kompleks pegunungan. Jika konvoi terhenti, rakyat harus menebang pohon-pohonan di depan dan di belakang konvoi untuk melintangi jalan," kata Nasution.[187]

Pertarungan sengit antara pihak pejuang Indonesia dengan Sekutu di sepanjang jalur tersebut selama lima hari sejak 10 Maret 1946 membuat rentan posisi Inggris. Setelah pasukan tambahan tersebut tiba di Bandung, ketegangan meningkat pada 19 Maret 1946. Ketika itu sejumlah mortir Indonesia jatuh di salah satu daerah permukiman orang sipil Eropa dan menghasilkan sejumlah korban jiwa. Atas dasar itu, Inggris melakukan perundingan dengan Perdana Meteri Sjahrir di Jakarta pada 22 Maret 1946. Hasilnya, Inggris akan melakukan operasi militer dan menarik seluruh unit militer dan pasukan bersenjata Indonesia dari wilayah dalam radius 11 kilometer dari pusat kota Bandung.[188]

Usai perundingan, hari itu juga, Komandan Komandemen Jawa Barat Didi Kartasasmita dan Wakil Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara, terbang dari Jakarta ke Bandung. Di Bandung, mereka memberi tahu pemimpin sipil dan militer lokal mengenai ultimatum Inggris dan menyampaikan instruksi Perdana Menteri Sjahrir yang harus diikuti.[189] Pemerintahan sipil dan militer di Bandung pun berunding. Wali Kota Bandung Sjamsurijal bersama Komandan Divisi Ketiga Kolonel Abdul Haris Nasution dan Kepala Seksi Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MP3) Sutoko sepakat bahwa hal itu harus dibahas secara lebih mendalam bersama Sjahrir. Untuk itu, keesokan harinya, 23 Maret 1946, Nasuiton terbang ke Jakarta.

Namun, saat Nasution berada di Jakarta, Komandan Divisi Hindia ke-23 di Bandung, Jenderal Hawtorn, merangsek maju. Pada 23 Maret 1946 sore, ia mengumumkan lewat radio dan pamflet bahwa Bandung selatan akan dibersihkan dari orang-orang bersenjata. Pasukan bersenjata Indonesia harus sudah keluar dari wilayah 11 kilometer sebelum tanggal 24 tengah malam untuk mencegah pertumpahan darah, dan warga sipil diminta untuk tetap tenang dan tidak meninggalkan rumah selama periode itu.

Ketika Nasution kembali dari Jakarta pada 24 pagi, Nasution terperanjat menyaksikan cara culas Hawtorn. Maka, Nasution mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari pemerintahan sipil, kepolisian, serta Badan Ekskutif DPRD Keresidenan Priangan dan Kota Bandung. Nasution menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan untuk mematuhi ultimatum Inggris dan mencegah terjadinya pertumpahan darah ataupun bentuk konfrontasi lainnya.

Nasution kemudian mencoba bernegosiasi dengan Hawtorn agar memberi waktu penarikan pasukan selama sepuluh hari kedepan, dengan alasan akan terjadi insiden bila terburu-buru. Hal yang paling penting dalam benak Nasution adalah masih tersimpan suplai dan perlengkapan militer di Bandung Selatan. Namun tawaran Nasution ditolak oleh Hawtorn. Waktu yang singkat itu jusru yang diinginkan Hawtorn untuk merampas persenjataan milik Indonesia.

Nasution berunding dengan Sutoko dan Komandan Resimen Kedelapan Omon Abdurachman. Sutoko dan Omon menggagas untuk mengevakuasi tentara dan penduduk ke luar kota, sambil membumihanguskan kota Bandung yang mereka tinggalkan. Perintah disampaikan lewat unit militer dan jarngan MP3 kepada para pemuda yang siap beraksi. Dinamit disalurkan dan tanggung jawab dibagi, dan rencana menghancurkan kota telah siap dijalankan.[190] Kabar itu tersebar di seluruh kota pada petang harinya dan setelah hujan lebat reda menjadi gerimis pada sekitar pukul 7 malam, penduduk yang masih tinggal di kota mulai bergerak ke luar kota di sepanjang tiga jalan utama ke arah barat daya, selatan, tenggara, barat, dan timur.[191]

Di belakang para pengungsi, suara ledakan dinamit dan mortir terdengar dari waktu ke waktu dan api yang disulut para pemuda menyebar di seluru sisi kota sebelah selatan rel kereta api. Suasana malam hari dalam kondisi revolusi menyebabkan api terlihat menakutkan daripada sebenarnya—bandung seolah lautan api, dan itulah gambaran melekat dalam benak mereka yang berada di dalam kota.

Catatan Akhir :

[1] Haryoto Kunto. *Seabad Kereta Api Mampir di Kota Bandung 1984-1984.* Bandung: 1984.

[2] Ali Anwar. *Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi.* Pemerintah Kabupaten Bekasi: 2015. hlm: 5-6.

[3] Edi S. Ekadjati, (et.all). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat.* Bandung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaa Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979/1980, 1980. hlm: 1-2.

[4] John R.W. Smail. *Bandung Awal Revolusi 1945-1946.* Jakarta: Ka Bandung, 2011. hlm: 3

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm: 15.

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.* hlm: 18.

[10] *Ibid.* hlm: 20.

[11] *Ibid.* hlm: 22.

[12] *Ibid.* hlm: 39-40.

[13] Edi S. Ekadjati, dkk. *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950).* Bandung: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Universitas Padjadjaran, 1981. hlm: 61.

[14] *Ibid.*

[15] Nurgoho Notosusanto. *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1979. hlm: 46.

[16] KH. Saifuddin Zuhri. *Berangkat dari Pesantren.* Jakarta: Gunung Agung, 1987. hlm: 224.

[17] *Ibid.*

[18] Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.* Surabaya: Jatayu Sala. hlm: 119.

[19] Nugroho Notosusanto. *op.cit.* hlm: 47.

[20] *Ibid.* lihat pula Ali Anwar. *Ibid.* hlm: 9.

[21] Edi S. Ekadjati, dkk. *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950). op.cit.* hlm: 79.

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.* hlm: 80.

[25] Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru.* Bekasi: Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dan Yavitra, 1992. hlm: 36.

[26] *Ibid.* hlm: 37.

[27] Edi S. Ekadjati, dkk. *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950). op.cit.* hlm: 91.

[28] *Ibid.* hlm: 26.

[29] Ali Anwar. *KH Noer Alie Kemandirian Ulama Pejuang.* Bekasi: Yayasan Attaqwa, 2006. hlm: 56.

[30] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm: 26.

[31] *Ibid.*

[32] Benedict R.O.G-. Anderson. *Java in A Time of Revolution, Occupationand Resistance 1945-1946.* Itacha, N.Y.: Cornell University Press, 1972. hlm: 35-60.

[33] Ajip Rosidi. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT.* Jakarta: Idayu Press, 1986. hlm: 50.

[34] *Ibid.* hlm: 51.

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid.*

[38] Jen Amar. *Bandung Lautan Api.* (Bandung: Dhiwantara, 1963. hlm: 31.

[39] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 105.

[40] Disjarah VI/Siliwangi. *Siliwangi dari Masa ke Masa.* Bandung: Angkasa, 1979. hlm: 23.

[41] *Tjahaja*, 23 Marat 1944.

[42] *Tjahaja*, 5 Januari 1944.

[43] Abdul Haris Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 1.* Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa, 1994. hlm: 314.

[44] Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi Sejak Pemerintaha Purnawarman sampai Orde Baru. op.cit.* hlm: 38-39.

[45] *Ibid.* hlm: 39.

[46] *Ibid.* lihat juga Wasmi Alhaziri dan Petrus. "Bermain Api di Bawah Sinar Matahari Terbit," *Historia*, nomor 1 tahun 1991. hlm: 14.

[47] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 314.

[48] *Pemandangan.* 24 April 2602.

[49] *Ibid.*

[50] Edi S. Ekadjati. *Sejarah Kota Bandung. op.cit.* hlm: 103.

[51] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 317.

[52] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm: 100.

[53] *Ibid.* hlm: 101.

[54] *Ibid.*

[55] *Ibid.* hlm: 317.

[56] *Ibid.* hlm: 86.

[57] *Ibid.*

[58] Ajip Rosidi. *op.cit.* hlm: 52.

[59] *Ibid.*

[60] *Ibid.* hlm: 53.

[61] Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru. op.cit.* hlm: 42.

[62] M. Hussein Kamaly. *Sejarah Rakyat di Bekasi Berjuang.* (Bekasi: 1983). hlm: 11.

[63] Wawancara Zakaria Burhanuddin, Bekasi 22 Desember 2006.

[64] U. Warliyah, (et. all). *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950.* Karawang: Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, 2003. hlm: 35.

[65] *Ibid.* hlm: 35.

[66] *Ibid.* hlm: 36.

[67] *Ibid.*

[68] Her Suhanda. *Rengasdengklok Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945.* Jakarta: Kompas, 2009. hlm: 54.

[69] *Ibid.* hlm: 58.

[70] *Ibid.* hlm: 44.

[71] *Ibid.* hlm: 38-39.

[72] Edi S. Ekadjati. *Sejarah Kota Bandung. op.cit.* hlm: 104.

[73] *Ibid.* hlm: 105.

[74] Wawancara Zakaria Burhanuddin, Bekasi 22 Desember 2006.

[75] Wawancara H.M. Yakub Gani, Ujungharapan Bahagia, Bekasi 27 September 1993. Lihat pula Ali Anwar. *KH Noer Alie Kemandirian Ulama Pejuang.* Bekasi: Yayasan Attaqwa, 2006. hlm: 61.

[76] *Ibid.*

[77] *Tjahaja* no. 198 Tahun ke-1, 17 Agustus 1945, hlm: 2.

[78] Ali Anwar. *loc.cit.*

[79] *Ibid.*

[80] Marwati Djoened Pospeonegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984. hlm: 86.

[81] Djajusman. *Bandung Lautan Api.* Bandung: Angkasa, 1975. hlm: 14.

[82] *Ibid.*

[83] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 45. Lihat pula Edi S. Edi S. Ekadjati. *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950). op.cit.* hlm: 108.

[84] *Ibid.*

[85] *Ibid.* hlm. 109.

[86] *Ibid.*

[87] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 47-48.

[88] Ben Anderson. *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Militer Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988. hlm: 106.

[89] Edi S. Ekadjati, dkk. *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950). op.cit.* hlm:108.

[90] *Ibid.*

[91] *Ibid.*

[92] *Ibid.*

[93] *Tjahaja*, nomor 210, 30 Agustus 1945, hlm: 2.

[94] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm:109.

[95] Ajip Rosidi. *op.cit.* hlm:54.

[96] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 316.

[97] *Ibid.*

[98] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 49.

[99] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 316.

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid.*

[102] *Ibid.* hlm: 317.

[103] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 45.

[104] *Ibid.*

[105] *Ibid.* hlm: 49.

[106] *Ibid.*

[107] *Ibid.* hlm: 45

[108] Ali Anwar. *loc.cit.*

[109] Ali Anwar. *Bekasi Dibom Sekutu: Pembumihangusan Kota dan Kampung-kampung di Bekasi oleh Tentara Sekutu-Ingris 13 Desember 1945.* Bekasi: Komunitas Baca Bekasi, 2006. hlm: 16-17.

[110] Robert Bridson Cribb. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Anara Otonomi dan Hegemoni.* Jakarta: Grafiti, 1990. hlm: 46.

[111] Tim Penulis. *Samodra Merah Putih.* Jakarta: Yayasan 19 September 1945, 1983. hlm: 52.

[112] Tim penyusun. *Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.* Jakarta: Kodam V/Jaya, 1975. hlm: 130. Lihat pula Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru. op.cit.* hlm: 47.

[113] Tim Penulis. *Samodra Merah Putih. op.cit.* hlm: 31. Lihat pula, *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru. ibid.*

[114] U. Warliyah, (et. all). *op.cit.* hlm: 38.

[115] *Ibid.*

[116] Edi Sudarjat. *Bogor Masa Revolusi 1945-1949.* Depok: Komunitas Bambu. hlm: 47.

[117] *Ibid.* hlm: 49.

[118] *Ibid.* hlm: 51.

[119] *Ibid.* hlm: 51-52.

[120] Edi S. Ekadjati. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. op.cit.* hlm: 87-88.

[121] *Ibid.*

[122] *Ibid.*

[123] Ruyatna Jaya. *Sejarah Sukabumi.* Sukabumi: Yayasan Pendidikan Islam Sukabumi, 2002. hlm: 61.

[124] *Ibid.* hlm: 61.

[125] Edi S. Ekadjati (et.all). *Sejarah Kabupaten Tangerang.* Pemerintan Kabupaten Tangerang, 2004. hlm: 161.

[126] *Ibid.*

[127] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm: 161-162.

[128] Edi S Ekadjati. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. op.cit.* hlm: 88.

[129] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 51.

[130] *Ibid.*

[131] *Ibid.* hlm: 55.

[132] Pengurus harian KNID Priangan adalah Niti Sumantri sebagai ketua, Ir. Ukar Bratakusumah sebagai wakil ketua, Anwar Sutan Pamuncak sebagai anggota, Hamdani sebagai anggota, dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai kepala sekrtariat. Lihat *Tjahaja*, no. 205, 25 Agustus 1945. Lihat pula John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 52.

[133] *Tjahaja*, no. 208, 28 Agustus 1945, hlm: 2.

[134] *Ibid.* hlm: 62.

[135] Tim Penyusun. *op.cit.* hlm: 47.

[136] Edi S. Ekadjati. *Sejarah Kabupaten Tangerang. op.cit.* hlm: 163.

[137] *Ibid.* hlm: 113.

[138] The Liang Gie. *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia.* Yogyakarta: Karya Kencana, 1977. hlm: 15.

[139] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 55.

[140] *Ibid.*

[141] *Tjahaja*, no. 217, 10 September 1945.

[142] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 55.

[143] *Ibid.* hlm: 50.

[144] Dien Majid. *Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Reolusi: Perjuangan Moeffreni Moe'min.* Jakarta: Keluarga Moeffreni Moe'min, 1999. hlm: 73.

[145] Ali Anwar. *KH Noer Alie Kemandirian Ulama Pejuang. op.cit.* hlm: 68.

[146] Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru. loc.cit.* Lihat pula Ali Anwar. "Revolusi di Daerah 1945: Insiden Kali Bekasi," *Histori*, Vol. I, No. 1, 1991.

[147] Lihat Cindy Adams. *Sukarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.* Jakarta: Gunung Agung, 1984. hlm: 359-360.

[148]Ali Anwar. *loc.cit.*

[149] Ruyatna Jaya. *loc.cit.*

[150] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 341.

[151] *Ibid.* hlm: 342.

[152] *Ibid.*

[153] *Ibid.*

[154] *Ibid.* hlm: 67.

[155] Ruyatna Jaya. *op.cit.* hlm: 66.

[156] *Ibid.* hlm: 67.

[157] *Ibid.*

[158] Edi Sudarjat. *op.cit.* hlm: 71.

[159] *Ibid.* hlm: 343.

[160] *Ibid.* hlm: 344.

[161] *Ibid.*

[162] *Ibid.* hlm: 345.

[163] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 348.

[164] Dinas Sejarah Militer Kodam V Jaya. *op.cit.* hlm: 106.

[165] Edi S. Ekadjati. *op.cit.* hlm: 341.

[166] Robert Bridson Cribb. *op.cit.* hlm: 58.

[167] *Merdeka*, 20 Novemer 1945.

[168] Abdul Haris Nasution. *op.cit.* hlm: 309.

[169] Dinas Sejarah Militer Kodam V Jaya. *op.cit.* hlm: 130.

[170] Mayjen TNI Pur. R.H.A. Saleh. *Perjuangan Bersenjata dari Jakarta & Kembali ke Jakarta Semasa Perang Kemerdekaan Tahun 1945-1949.* Jakarta: Badan Kontak BKR/TKR Jakarta, 1989. hlm: 53.

[171] Ali Anwar. *Bekasi Dibom Sekutu.* Bekasi: Komunitas Baca Bekasi, 2006. hlm: 25.

[172] *Ibid.* hlm: 61-71.

[173] *Ibid.* hlm: 72.

[174] *Ibid.* hlm: 77-84.

[175] Tim penyusun. *Sejarah Peristiwa Bojongkokosan 9 Desember 1945.* Sukabumi: Dewan Harian Cabang Angkaan '45 Kotamadya Dati II Sukabumi. hlm: 18-25.

[176] Edi Sudarjat. *op.cit.* hlm: 76.

[177] *Ibid.*

[178] Edi S. Ekadjati. *loc.cit.*

[179] John R.W. Smail. *op.cit.* hlm: 74.

[180] *Ibid.* hlm: 74-75.

[181] *Ibid.* hlm: 73.

[182] *Ibid.*

[183] *Ibid.* hlm: 76.

[184] *Ibid.*

[185] *Ibid.*

[186] Abdul Haris Nasution. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1.* Jakarta: Haji Masagung. hlm: 224.

[187] *Ibid.*

[188] *Ibid.* hlm: 178.

[189] *Ibid.*

[190] *Ibid.* hlm: 181.

[191] *Ibid.*

BAB IV
GELORA API KEMERDEKAAN DI JAWA TENGAH

Galuh Ambar Sasi

4.1. Pengantar

Apa yang terjadi di Jawa Tengah di awal masa kemerdekaan? Pekik merdeka dan aba-aba siap di berbagai penjuru? Pengambilalihan kekuasaan Jepang? Pertempuran Kota Baru, Magelang, Ambarawa, serta Semarang? Yogyakarta dan Surakarta sebagai wilayah *rendevouz* serta tempat dimana seribu satu macam "urgensi program" disusun dan berbagai paham politik dibicarakan sengit[1]?

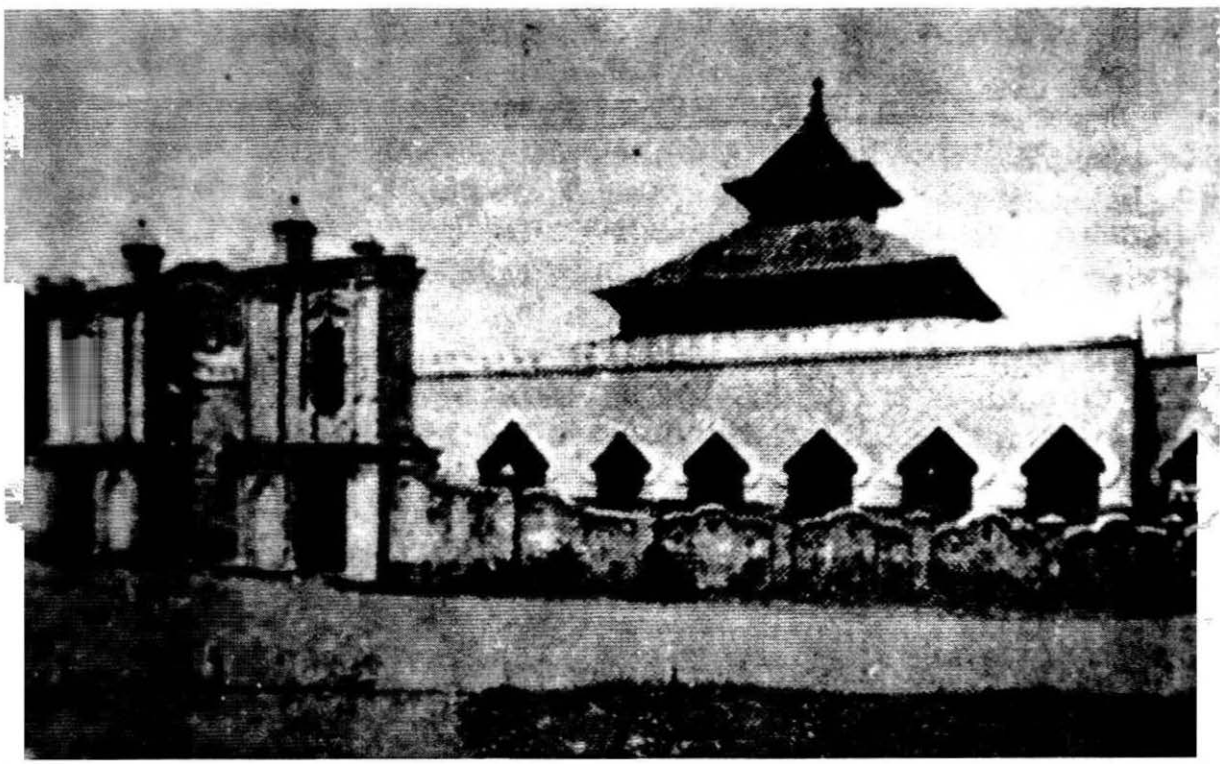
Tidak hanya menjawab pertanyaan tersebut, tulisan di bawah ini pun mencoba merekonstruksi berbagai realitas sosial di Jawa Tengah selama empat bulan pertama kemerdekaan. Jawa Tengah yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, yang kala itu terdiri dari Jogjakarta Kooti, Surakarta Kooti, Semarang Syuu, Pekalongan Syuu, Banjoemas Syuu, Kedoe Syuu, serta Pati Syuu[2].

4.2. Penyebarluasan Berita Proklamasi

Di Jawa Tengah, berita kemerdekaan Indonesia diterima dalam waktu berbeda. Ada wilayah yang menerima berita itu selang beberapa jam setelah diproklamasikan, ada pula yang baru menerimanya selisih hari, minggu, bahkan bulan. Lebih dari itu, berita kemerdekaan pun menyulut berbagai reaksi yang mencerminkan proses (membayangkan) menjadi Indonesia.

4.3. Yogyakarta Kooti

Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia mula-mula diterima Kantor Berita Domei[3] Yogyakarta pukul 12.00. Berhubung tidak memperoleh izin penyiaran, kabar itu akhirnya disebarluaskan melalui khotbah Jumat di Masjid Besar Alun-alun Utara dan Masjid Pakualaman. Berita proklamasi semakin menyebarluas berkat upaya Ki Hajar Dewantara. Bersama dengan guru dan siswa Taman Siswa, ia melakukan pawai sepeda, meriakkan kemerdekaan Indonesia, dan membagikan selebaran yang berisi pemberitahuan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta[4]. Salah seorang guru Taman Siswa yang mengikuti pawai tersebut ialah Soeratmi Iman Soegijat[5].



Tempat berita proklamasi pertama kali disiarkan ke seluruh masyarakat Semarang (karena disiarkan secara langsung oleh radio Semarang) pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang khotbah jum'at. *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

Penyebaran berita proklamasi di Yogyakarta tidak lepas pula dari peran *Sinar Matahari*. Pada tanggal 19 Januari 1945, surat kabar yang mulanya bernama *Sedya Tama* itu memuat berita proklamasi Indonesia serta teks undang-undang dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945[6]. Di samping itu, penyebarluasan dilakukan pula oleh perangkat desa[7].

Sementara itu, pada tanggal 19 Agustus 1945 pula, sebagai reaksi atas kemerdekaan yang baru diproklamasikan, Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mula-mula mengirimkan telegram yang ditujukan kepada Sukarno dan Hatta. Isi telegram itu ialah ucapan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ketinggalan, mereka pun mengirimkan telegram kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat[8].

Selain mengirim telegram, pada pukul 10.00, Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok di Bangsal Kepatihan. Dalam pertemuan itu, Sultan mula-mulai menyampaikan bahwa ia memahami luapan kegembiraan yang dirasakan oleh rakyat Yogyakarta seiring dengan kabar proklamasi yang mereka terima. Namun demikian, sebagaimana dapat disimak dalam *Yogya Benteng Proklamasi*, ia pun berpesan supaya rakyat Yogyakarta tidak meluapkan perasaan tersebut ke hal-hal yang dipandang tidak perlu bahkan menimbulkan kerugian.

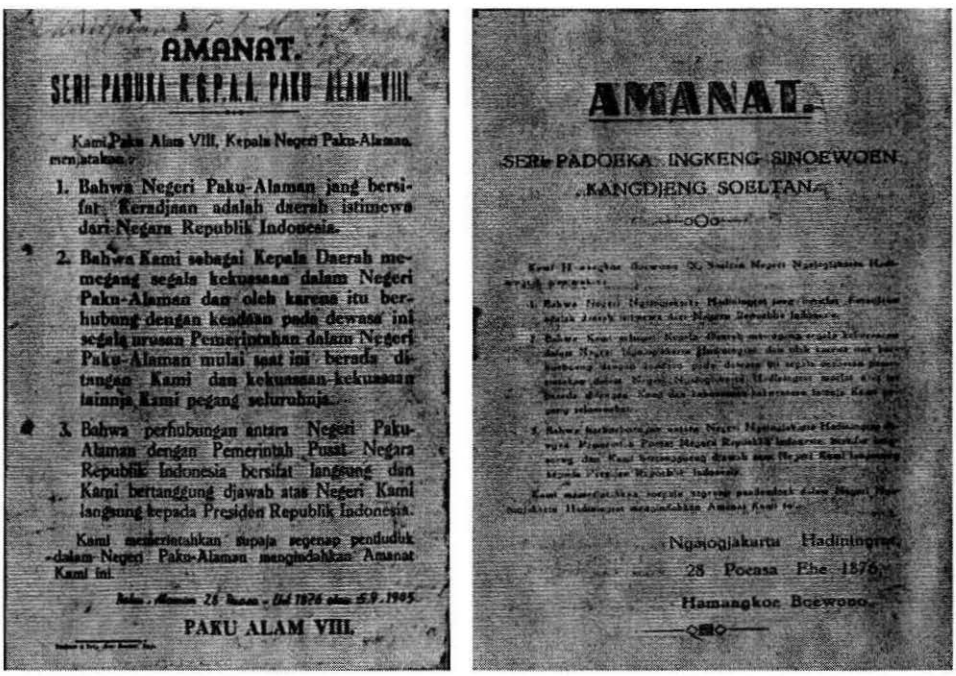
Menurut sejarah, dimana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu, saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain, jangan sampai terjadi kerusuhan, kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro[9].

Masih di hari yang sama, reaksi akan kemerdekaan Indonesia diberikan pula oleh Yogyakarta Kooti Hookookai (Himpunan Kebaktian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta).. Bertempat di Sono Budoyo, lembaga itu melakukan sidang istimewa yang menghasilkan tiga keputusan. *Pertama*, melahirkan rasa gembira dan syukur ke hadapan Tuhan yang maha esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia. *Kedua*, menyatakan keyakinan seteguh-teguhnya kepada pemerintah Indonesia akan mengikut dan tunduk pada tiap-tiap langkah dan perintahnya.

Ketiga, mohon kepada ilahi agar negara Indonesia berdiri kokoh, teguh, dan abadi[10].

Dukungan Kooti Hookookai terhadap Republik Indonesia semakin diperkuat dengan pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945. Pernyataan tersebut secara umum memuat tiga hal pokok. *Pertama*, Negeri Yogyakarta Hadiningratdan Pakualaman yang bersifat kerajaan merupakan daerah istimewa[11] Republik Indonesia. *Kedua*, Negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman berada dalam kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. *Ketiga*, hubungan antara Republik Indonesia dan Yogyakarta bersifat langsung dan baik Sultan Hamengku Buwono IX maupun Paku Alam VIII bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia[12].

Gambar 1
Amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII
Tanggal 5 September 1945


AMANAT.

SERI PADUKA K.G.P.A.A. PAKU ALAM VIII

Kami Paku Alam VIII, Kepala Negeri Paku-Alaman, menjatakan :

1. Bahwa Negeri Paku-Alaman jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku-Alaman dan oleh karena itu berhubung dengan kedaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Paku-Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku-Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku-Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

[illegible] 28 [illegible] Ehe 1876 [illegible] 5-9-1945

PAKU ALAM VIII.

AMANAT.

SERI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

oOo

[illegible]

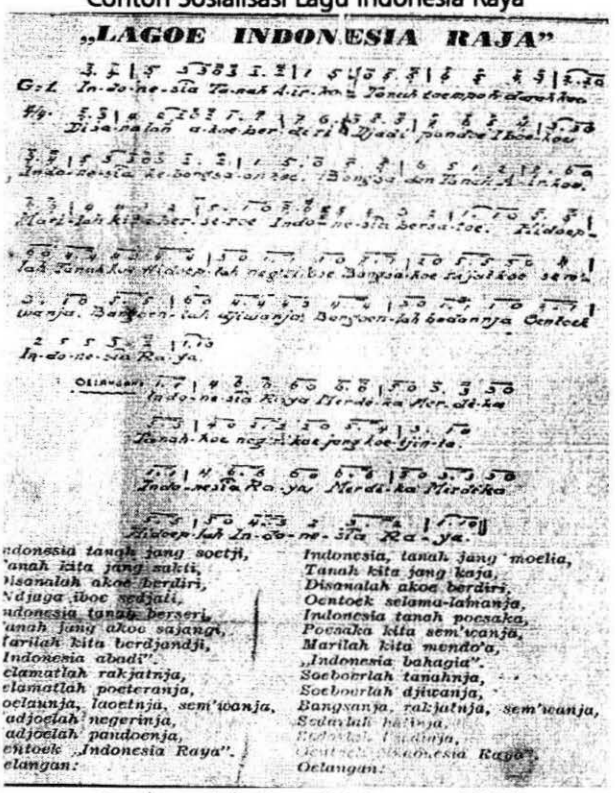
Ngajogjakarta Hadiningrat,
28 Poeasa Ehe 1876.
Hamangkoe Boewono.

Sumber: Senarai Arsip Paku Alaman VIII nomor arsip 1363 serta 1365

4.4. Surakarta Kooti

Di Surakarta, kabar proklamasi mula-mula diterima tanggal 17 Agustus 1945 melalui siaran radio. Di sore hari, kabar itupun telah menyebar luas, secara khusus di wilayah kota.[13] R. Soembardjo, mantan anggota tentara pelajar Surakarta, misalnya, mendengar kabar itu pertama kali dari salah seorang guru kelas II tempat dia bersekolah. Ia dengan mudah bisa mengetahui kabar itu karena tinggal di asrama[14].

Gambar 2
Contoh Sosialisasi Lagu Indonesia Raya


„LAGOE INDONESIA RAJA"

Indonesia tanah jang soetji,
'anah kita jang sakti,
Disanalah akoe berdiri,
Djaga iboe sedjati,
ndonesia tanah berseri,
'anah jang akoe sajangi,
arilah kita berdjandji,
Indonesia abadi".
elamatlah rakjatnja,
elamatlah poeteranja,
oelaunja, laoetnja, sem'wanja,
'adjoelah negerinja,
adjoelah pandoenja,
ntoek „Indonesia Raya".
elangan:

Indonesia, tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah akoe berdiri,
Oentoek selama-lamanja,
Indonesia tanah poesaka,
Poesaka kita sem'wanja,
Marilah kita mendo'a,
„Indonesia bahagia".
Soeboerlah tanahnja,
Soeboerlah djiwanja,
Bangsanja, rakjatnja, sem'wanja,
Sedjahtra lah hidupnja,
Mardeka lah adanja,
Oentoek „Indonesia Raya".
Oelangan:

Sumber: *Asia Raya*, 21 Agustus 1945

Tersiarnya kabar proklamasi di kota Surakarta pada tanggal 17 Agustus dituturkan pula oleh Rahinten Koesoenarno. Rahinten yang saat itu menjadi guru sekaligus anggota Fujinkai menuturkan bahwa saat itu ia berada di kota sehingga dengan mudah mmendengarnya. Sehari

berikutnya, ia bersama teman-teman Fujinkai mendapat tugas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat desa tentang makna kemerdekaan dan penjajahan. Selain itu, ia pun memberitahu dan menganjurkan nyanyian lagu Indonesia Raya di sekolah-sekolah maupun berbagai kelurahan. Ada tiga kelurahan yang dikunjungi oleh Fujinkai di tanggal 18 Agustus 1945 itu; Dayu, Jumantana, serta Jumapala[15]. Hal ini selaras dengan penuturan Surahman Partoharjono. Tanggal 18 Agustus 1945 itu, ia bersama pemuda-pemuda di desanya dikumpulkan. Selanjutnya, ia pun diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diberitahu jika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya[16].

Berita proklamasi di Surakarta disambut dengan gegap gempita. Pekik "merdeka" pun terdengar di mana-mana. Di samping itu, orang-orang di sana pun mulai mengenakan merah putih di kepalanya. Hal ini sebagaimana dituturkan Rahinten Koesoemarno berikut ini.

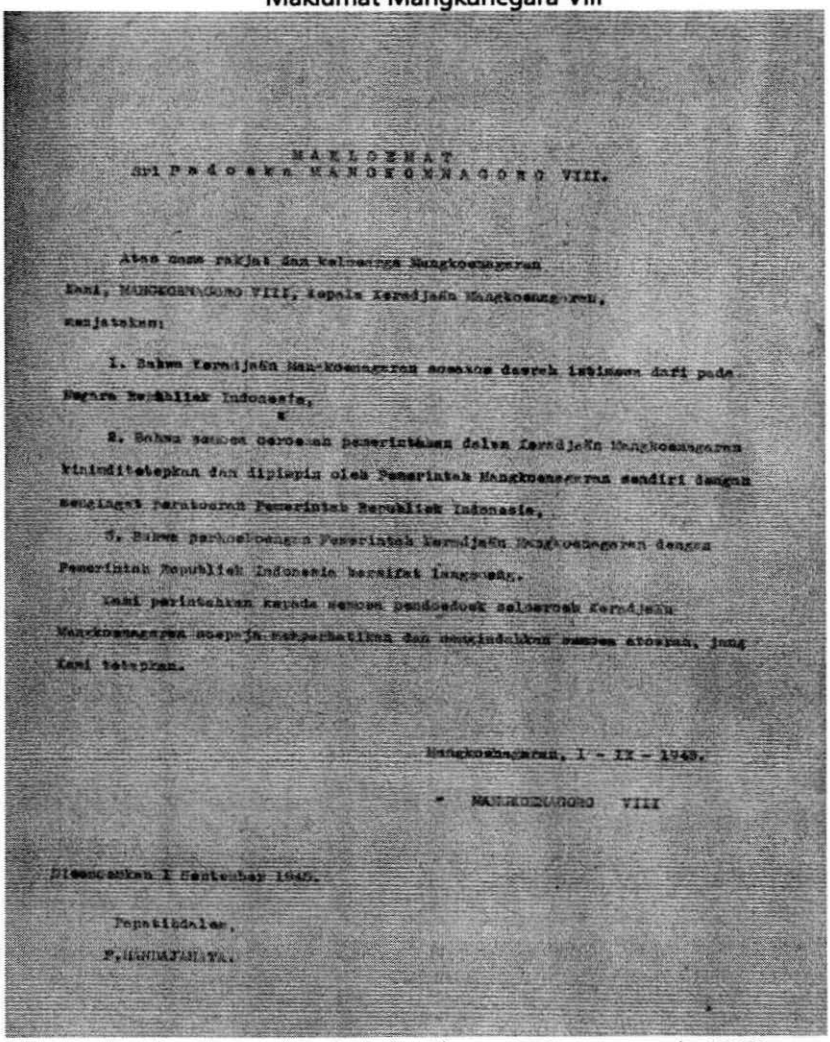
Khusus masyarakat Solo yang saya tahu pada waktu itu, rasanya senang sekali, dapat dikatakan gegap gempita, mungkin beban berat yang selama itu dirasakan tiba-tiba bisa plong. Setiap ketemu orang kita mengucapkan kata "Merdeka! Merdeka!" dan saya rasakan sekali persaudaraan pada waktu betapa rasa persaudaraan kita masyarakat Solo yang sangat erat dan kuat sekali. Kota Solo pada waktu itu, aman-aman saja. Tidak ada kerusuhan[17].

Masih mengenai penyebarluasan berita proklamasi di Surakarta, tanggal 1 September 1945 Mangkunegara VIII mengeluarkan sebuah maklumat. Ada tiga hal pokok tercantum di sana. *Pertama*, Kerajaan Mangkunegaran adalah sebuah daerah istimewa dalam Negara Republik Indonesia. *Kedua*, semua urusan pemerintahan dalam Kerajaan Mangkunegaran kini ditetapkan dan dipimpin oleh Pemerintah Mangkunegaran sendiri dengan mengingat peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Ketiga*, hubungan pemerintah Kerajaan Mangkunegaran dengan pemerintah Indonesia bersifat langsung[18].

Sementara itu, penelusuran akan penyebarluasan berita proklamasi di berbagai kota (*gun*) dalam Surakarta Kooti belum menemukan informasi jelas. Di Klaten, misalnya, penelusuran yang dilakukan hanya menekankan informasi bahwa pascapenyebarluasanluasan berita proklamasi kondisi dalam kota tenang. Pengambilalihan kekuasaan Jepang terjadi tanpa pertumpahan

darah. Hal ini dikarenakan seluruh orang Jepang yang ada di sana telah diangkut ke Baros Tampir, Boyolali. Sementara itu, untuk menjaga kemanan rakyat dari isu peracunan sumber air minum, dokter dan perawat di Klaten dikerahkan. Sementara pengambilalihan perusahaan Jepang diawasi oleh perwakilan KNI bernama R.M.T. Pringgonagoro dan Soenardi[19].

Gambar 3
Maklumat Mangkunegara VIII



MAKLOEMAT
dari Paduka MANGKOENAGORO VIII.

Atas nama rakjat dan kelonggaran Mangkoenagaran
Kami, MANGKOENAGORO VIII, kepala Keradjaan Mangkoenagaran,
menjatakan:

1. Bahwa Keradjaan Mangkoenagaran seloeroeh daerah istimewa dari pada Negara Republiek Indonesia,

2. Bahwa segala tjara pemerintahan dalam Keradjaan Mangkoenagaran ditinditetapkan dan dipiara oleh Pemerintah Mangkoenagaran sendiri dengan mengingat peraturan Pemerintah Republiek Indonesia,

3. Bahwa perhoeboengan Pemerintah Keradjaan Mangkoenagaran dengan Pemerintah Republiek Indonesia bersifat langsoeng.

Lagi perintahkan kepada segala pendoedoek seloeroeh Keradjaan Mangkoenagaran soepaja memperhatikan dan mendjalankan segala atoeran, jang Kami tetapkan.

Mangkoenagaran, 1 - IX - 1945.

- MANGKOENAGORO VIII

Diseboearkan 1 September 1945.

Pepatih dalem,

P. NOTOMATARAM.

Sumber: Senarai Arsip Paku Alaman VIII nomor arsip 1365

4.5. Pekalongan Syuu

Kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai di Pekalongan Syuu melalui radio pada tanggal 18 Agustus 1945. Sarli, salah seorang anggota Barisan Pelopor yang mendengar berita proklamasi pagi itu, segera menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Tindakan yang dilakukannya pada pukul 06.30 itupun menimbulkan kegaduhan. Sekitar setengah jam kemudian, ia dipanggil dan diperintahkan menurunkan bendera merah putih.

> Sekitar pukul 07.00...saya tiba di Kantor Kotapraja mendadak dipanggil Sumpeno (walikota Pekalongan). bersamanya hadir Harso, sekretaris kotapraja dan seorang lagi. Mereka sangat takut dan pucat sekali. Karena saya yang telah menaikkan bendera...sayalah yang harus menurunkannya, katanya kepada saya...keadaan menjadi menegangkan. Saya tetap tidak mau pergi dan menurunkan bendera...Sumpeno mengatakan telah mendengar proklamasi , tetapi tidak ada perintah mengibarkan bendera[20].

Di samping radio, penyebarluasan berita proklamasi di karesidenan Pekalongan tidak lepas dari jaringan komunikasi telepon dan kereta api. Terkait dengan jaringan komunikasi kereta api, mengutip Anton E. Lucas, gerbong-gerbong kereta api Jakarta-Semarang yang melewati keempat kabupaten dan karesidenan Pekalongan itu banyak bertuliskan "merdeka atau mati". Selain itu, penyebarluasan berita proklamasi dimungkinkan pula terjadi saat kereta api dari Jakarta berhenti di setiap stasiun di karesidena tersebut.

Tidak ketinggalan, kurir pun memegang peran penting dalam menyebarluasakan berita proklamasi. Mochammad Aswan Tary dalam Lidya Dwi Jayanti, misalnya memaparkan bahwa tanggal 19 Agustus 1945, seorang kurir dari Jakarta bernama B. Suprapto, karyawan penerbang, datang ke Pekalongan. Ia mengabarkan bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan berpesan kepada Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) untuk menyebarluaskan berita itu ke pelosok desa[21].

Menanggapi berita proklamasi yang tersiar melalui radio, jaringan kereta api, serta kurir dari Jakarta, Negen Broeders dan

Barisan Pelopor, dua barisan pemuda Pekalongan mengirimkan perwakilan ke Jakarta. Sehari kemudian, mereka pulang membawa teks proklamasi serta berbagai semboyan proklamasi yang tercetak di kertas merang rapuh kekuning-kuningan. Di samping itu, mereka pun membawa pesan supaya rakyat di Karesidenan Pekalongan berhati-hati berurusan dengan Jepang. Sebab, Jepang masih bertanggungjawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk sementara waktu.

Di hari yang sama dengan kepulangan perwakilan-perwakilan tersebut, kota Tegal dipenuhi dengan berbagai pamflet dan poster bertuliskan "Indonesia Merdeka" serta "Jagalah Kemerdekaanmu". Di samping itu, tiga sampai empat hari berikutnya, bendera merah putih pun dipasang di setiap rumah, tembok pasar, berbagai tempat yang dikerumuni banyak orang, serta berbagai jenis alat transportasi di sana; dokar, becak, bis, serta gerobak.[22]

4.6. Semarang Syuu

Di Semarang, berita proklamasi pertama kali diterima oleh Sugiarin, markonis Kantor Berita Domei Semarang. Kabar itu selanjutnya disampaikan kepada Syarief Soelaiman dan M.S. Mintardjo, dan diteruskan ke Gedung Djawa Hookookai tempat rapat persiapan kemerdekaan tengah digelar. Kabar itu dibacakan oleh Mr. Wongsonegoro sampai dua kali dan segera disambut dengan tepuk tangan dan kegembiraan meluap. Rapat dihentikan dan semua orang yang ada di gedung itu bersama-sama berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya berseru-seru, "Hidup Bung Karno! Hidup Bung Hatta! Hidup Indonesia!" [23].

Berita proklamasi disebarluaskan pula oleh Semarang Hoso Kyoku (siaran radio Semarang). Penyebarluasan berita itu mendahului siaran sholat Jumat. Salah seorang pejabat Jepang yang mendengar berita itu marah dan memerintahkan supaya siaran sholat Jumat diputus. Pemutusan tiba-tiba itu menimbulkan tanda tanya para jamaah. Namun demikian, kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu telah diterima. Jamaah yang mendengarkan siaran itupun menyebarluaskan berita proklamasi[24].

Sementara itu, di kalangan kepolisian Semarang, informasi resmi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia baru diumumkan secara resmi keesokan harinya. Mengutip Hoegeng Iman Santosa, pagi itu ia bersama rekan-rekannya sesama polisi Indonesia diperintahkan berkumpul di Kantor Pusat Kepolisian Kota Semarang.

Seluruh pimpinan dan staf sudah berkumpul...tetapi yang muncul dan kemudian memberikan *briefing* justru pak Soeprapto, teman ayah saya di kepolisian... Di tengah kelesuan orang Jepang yang diam-diam terasa mencekam, Pak Soeprapto justru memberikan *briefing* dengan gaya ringan, segar, bahkan lucu... Ia bilang, Jepang sudah kalah perang. Dan Indonesia sudah merdeka[25].

Penyebarluasan berita proklamasi yang relatif cepat di Semarang mendorong pelaksaan rapat raksasa. Sedianya, rapat yang lebih tepat dikatakan sebagai perayaan (penyambutan) proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945. Namun, penguasa Jepang di Semarang (?) tidak mengizinkan. Keesokan hari, tanggal 19 Agustus 1945, pukul 04.00 sore, rapat raksasa digelar. Rapat menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengumuman alih kekuasaan itu dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro.

Seusai rapat, penuh dengan kegembiraan, rakyat pun melakukan pawai. Mereka membawa bendera merah putih sambil berseru "Hidup Indonesia!". Rute pawai yang ditempuh ialah jalan Pandanaran, Karangteri, Purwodinatan, daerah sekitar pasar Johar, Alun-alun, dan jalan Bojong. Dari jalan Bojong, pawai itu sedianya akan dilanjutkan menuju markas Kenpeitei. Namun, perempatan jalan Duwet-Gendingan telah diblokir oleh tentara Jepang sehingga pawai pun dibelokkan ke jalan Duwet dan berakhir di sana[26].

Gambar 4
Pengumuman Resmi *Sinar Baru*


Sinar Baru

...DULILLAH !

...ERINTAH REPUBLIK
...ONESIA TELAH LAHIR !

MAKLUMAT
Kepada Seluruh Rakjat Indonesia.

Republik Indonesia sudah berdiri.

Pernjataan Indonesia Merdeka.

Kata Pembukaan Undang-undang Dasar.

Putusan dari Panitya Persiapan Kemerdekaan.

PROKLAMASI

MAKLUMAT

Perintah Pertama
Dari Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar.

Sumber: *Sinar Baru*, 20 Agustus 1945

Di hari yang sama, radio-radio di Semarang menyiarkan maklumat Mr. Wongsonegoro. Dalam maklumat itu, Mr. Wongsonegoro mula-mula menyatakan bahwa "berdasarkan pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Jakarta...atas nama rakyat Indonesia mengumumkan aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah

Semarang". Selanjutnya, Mr. Wongsonegoro mengumumkan enam aturan. *Pertama*, mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945 jam 01.00 siang pemerintah Republik Indonesia untuk Semarang mulai berlaku. *Kedua*, segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan keras. *Ketiga*, semua senjata api, kecuali di tangan mereka yang berhak, harus diserahkan polisi. *Keempat*, hanya bendera Indonesia Sang Merah Putih boleh berkibar. *Kelima*, segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. *Keenam*, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa[27].

Sehari kemudian, hal yang sama dilakukan oleh *Sinar Baru*. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, surat kabar itu mengumumkan secara resmi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan pengumuman resmi jg dimuat hari ini, dengan segala kegembiraan hati kita melihat bersama Negara kita, Republik Indonesia. Demikian pula, maklumat P.t. Wongsonagoro sebagai pemimpin daerah paling tinggi dari republik, mengepalai Semarang. Tentulah dapat kita rasa-rasakan kegembiraan bangsa kita menerima pengumuman resmi ini[28].

Tidak hanya memuat pengumuman resmi serta berita-berita seputar proklamasi, dalam edisi yang sama surat kabar itupun berusaha memberi penjelasan kepada anak-anak tentang makna merdeka. Hal itu di antaranya dapat ditemukan dalam tulisan Mbok Jah, pengasuh rubrik Taman Putera.

Adik-adikku sekalian tentu sudah maklum, bahwa mulai hari Djum'at tg. 17-8 telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia. Kita kini telah merdeka, lepas dari pengaruh bangsa lain. Kerapkali adik-adik mendengar perkataan "merdeka" hampir dalam tiap-tiap rapat, disekolah2, akan tetapi perkataan itu belum engkau maklumi benar2, bukan? Jang penting harus engkau mengerti ialah, bahwa kini pemerintahan dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri, diurus dan jang bertanggung djawab ialah bangsa Indonesia sendiri djuga... Bentuklah persatuan jg kuat diantara adik-adik sebagai penduduk setanah-air, sebangsa dan sepenanggungan[29].

Masih mengenai penyebarluasan berita proklamasi di Semarang, tanggal 20 Agustus 1945, bendera merah putih mulai dikibarkan. Di samping itu, pemuda-pemuda di sana pun memasang berbagai pamflet, buletin, dan potongan surat kabar di sertiap *tonarigoemi* (rukun tetangga) serta melakukan penjagaan di setiap desa atau kampung[30]. Di lain sisi, tersebarluasnya berita proklamasi pun menumbuhkan perasaan sentimen terhadap Jepang. Aba-aba "siap" untuk mengawali penangkapan terhadap orang Jepang, Belanda, ataupun Indo pun mulai terdengar. Situasi ini sebagaimana dikisahkan oleh Hoegeng Iman Santosa.

Para pemuda Indonesia yang mulai dijangkiti demam revolusi... Kantor kepolisian penuh dengan pengaduan...Pihak Jepang mempermasalahkan pemuda-pemuda Indonesia namun yang terakhir ini justru mempermasalahkan pihak Jepang!...Memang pemuda pejuang kita...mabuk kemerdekaan. Laporan dari pihak Jepang...menyebut pemuda demikian bertindak kurang ajar atau brutal...main bentak, main bentak, bahkan ada yang meludahi orang Jepang[31].

Sementara di Kendal, penyebarluasan berita tersebut dilakukan melalui rapat raksasa yang digelar di Alun-alun Kendal tanggal 20 Agustus 1945 pukul 11.00. Dalam rapat tersebut, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Kartowikromo, ketua Barisan Pemuda Pelopor Kendal. Pengumuman itu selanjutnya ditanggapi oleh Sukarmo selaku wakil rakyat. Dengan menggunakan bahasa setempat, baik Kartowikromo maupun Sukarmo memberikan penjelasan makna kemerdekaan. Selanjutnya, rapat raksasa yang berlangsung sampai pukul 1.30 siang itu ditutup dengan menyanyi lagu Indonesia Raya serta seruan Hidup Indonesia tiga kali[32].

4.7. Kedu Syuu

Berita proklamasi di Kedu Syuu diterima dalam waktu berbeda[33]. Di Magelang, misalnya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima tanggal 25 Agustus 1945 dan memicu rapat kecil-kecilan anggota eks-kelompok paramiliter Jepang. Hasil rapat-rapat yang dipimpin oleh Ashari, mantan komandan Seinendan, adalah kesepakatan untuk menghadap residen guna meminta izin mengambilalih kekuasaan[34].

Sehubungan itu, Ashari memimpin massa menghadap residen pada 3 September 1945. Sesampainya di sana, Legowo, Tartip, Suprodjo, Atmodiprodjo, dan Darmowisastro, wakil massa, mengajukan tuntutan kepada residen supaya kabar proklamasi disampaikan kepada seluruh rakyat di karesidenan Kedu. Di samping itu, mereka juga menuntut agar rakyat di seluruh Kedu sepakat untuk menjadi bagian Negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kedua tuntutan tersebut disetujui oleh residen dengan pesan supaya rakyat Magelang tetap menjaga perasaan Jepang pimpinan Nakamura Butaicho yang bermarkas di Jalan Kartini serta Kenpeitei yang bermarkas di sebelah barat Rumah Sakit Umum Magelang. Tidak ketinggalan, sang residen berpesan supaya pengambialihan kekuasaan jangan sampai merugikan rakyat[35].

Reaksi residen tidak memuaskan rakyat. Mengutip Ashari, residen dianggap tidak tegas. Situasi ini mendorong massa yang berkumpul di sana melakukan tindakan sendiri. Dan salah satunya yang diambil ialah melakukan berbagai propaganda anti-Jepang. Masih mengutip Ashari, tanggal 23 September 1945 hampir seluruh tembok-tembok di kota Magelang dipenuhi tulisan-tulisan seperti: "Jepang kita ganyang", "Magelang neraka bagi Jepang", "Jepang harus menyerahkan senjata kepada Pemuda", dan sebagainya[36].

Masih terkait dengan reaksi atas tersiarnya kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan kesepakatan untuk menjadi Indonesia, tanggal 24 September terjadi insiden di Magelang. Insiden yang dimaksud ialah perobekan bendera merah putih di Hotel Nitaka yang dilakukan oleh beberapa anggota tentara Jepang (?). Insiden itu memicu kemarahan rakyat. Penangkapan terhadap tentara-tentara yang diduga melakukan perobekan pun dilakukan. Seusai ditangkap, mereka diajukan kepada Nakamura untuk diadili. Tidak puas akan pengadilan tersebut, rakyat bersepakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di puncak Tidar pukul 06.00 pagi esok hari. Upacara tersebut mulanya tidak bisa berjalan lancar karena ketiadaan bendera merah putih. Upacara baru bisa dilangsungkan pukul 10.00 setelah Slamet memberikan kainnya untuk dibuat bendera. Upacara yang diawasi oleh Kenpeitei itu berakhir dengan penembakan peserta upacara. Begitu upacara selesai, dari arah markas Kenpeitei terdengar tembakan beruntun dan menewaskan empat orang. Keempat orang yang dimasud ialah Kusni, Slamet, Sastrodiprodjo, serta Djajus[37].

Penembakan di puncak Tidar membuat pemerintah Magelang tersadar untuk segera mengatur rakyat, dengan membentuk Angkatan Muda yang beranggotakan eks-PETA yang tidak bergabung menjadi BKR. Selanjutnya, pemerintah Magelang membentuk delegasi untuk mengambil alih aset Jepang. Delegasi yang beranggotakan Legowo, Tartip, Suryo Sumpeno, dan Suwito Haryoko gagal menekan Nakamura. Pengambilalihan kekuasaan dan penyitaan aset Jepang baru berhasil setelah ada tekanan massa. Singkatnya, tanggal 7 Oktober 1945, Jepang meninggalkan Magelang menuju Semarang. Senjata-senjata rampasan dari Jepang, atas inisiatif Abudan, dibagikan kepada lurah-lurah di sebelas desa di Magelang. Hal itu dimaksudkan supaya kesebelas lurah tersebut bisa mempertahankan wilayahnya jika ada serangan musuh sewaktu-waktu[38].

Sementara di Kebumen, berita proklamasi tersebar luas berkat peran asisten wedana dan lurah di masing-masing desa. Di samping itu, berita itupun diterima dari markas Jepang di benteng pendem di wilayah pesisir Kebumen. Benteng tempat pemusatan latihan militer dikosongkan oleh tentara Jepang, dan anggota organisasi paramiliter yang ada di sana dibubarkan. September 1945, berita proklamasi Indonesia telah diterima di pedesaan Kebumen. Penduduk desa yang tidak mengetahui arti merdeka diminta oleh lurah masing-masing untuk menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan salam merdeka, mengibarkan bendera merah-putih, serta membuat tanda merah putih di baju sebelah kiri.

Keterbatasan penduduk desa membuat mereka melakukan berbagai cara untuk bisa mengibarkan bendera maupun membuat tanda merah putih. Mardjan, salah seorang mantan Heiho, misalnya mencontohkan ada yang menyobek baju atau kain berwarna merah lalu menyatukannya dengan sobekan warna putih. Ada pula yang mengambil *dluwang* (kertas dari kulit pohon melinjo). Untuk memperoleh warna merah, *dluwang* yang berwarna putih pudar pun diberi pewarna merah lalu disatukan[39].

Masih di Kebumen, penyebarluasan berita proklamasi membawa perubahan sosial. Hal ini diantaranya tercermin dari istilah *papak pundak* yang dapat diartikan sebagai penyeragaman status sosial. Sehubungan dengan hal itu, orang-orang di sana tidak lagi menggunakan istilah *(n)doro* atau tuan untuk menyebut orang-orang yang memiliki status sosial tinggi melainkan memanggil pak atau menyebut nama saja.

4.8. Banyumas Syuu

Belum ada informasi jelas kapan dan darimana berita proklamasi diterima di karesidenan Banyumas. Sardiman dalam *Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman* menulis bahwa penyebarluasan berita proklamasi di karesidenan Banyumas tidak lepas dari peran Sudirman yang pada tanggal 19 Agustus memutuskan untuk pulang ke Kroya[40]. Sementara itu, Anton Lucas mancatat bahwa tanggal 5 September 1945, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, residen Banyumas, mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan menyatakan Banyumas sebagai bagian Indonesia[41].

Empat hari kemudian, berkat peran Mr. Iskaq Tjookrodisurjo dan Sudirman, Kenpeitai di sana menyerahkan senjata. Sama seperti di Klaten, proses penyerahan senjata dan pengambialihan kekuasaan berjalan tanpa bentrokan maupun pertumpahan darah[42]. Selanjutnya, pengambilalihan kekuasaan di Banyumas Syuu memberikan informasi rigid terkait persenjataan maupun barang-barang yang diambilalih, yakni antara lain 500 senapan, 700 pistol, 500 sten, 150 senapan mesin ringan, 80 senapan mesin M 23, 4 senapan mesin berat, 2 meriam lapangan, 2 meriam gunung, 5 meriam pantai, 4 gudang peluru, 1 gudang seni, 1 gudang alat perhubungan, 13 sedan, 60 truk, 4 bren carrier dan peralatan lain seperti teropong, pedang, bahkan sepeda motor[43].

4.9. Pati Syuu

Penyebarluasan berita proklamasi di Pati dilakukan oleh S. Suhud dari Barisan Pelopor, sebagaimana dikisahkan Sudiro berikut ini.

Sebagai biasa saya memberi surat perintah jalan. Tanda tangan saya waktu itu masih "laku" betul... Tetapi uang bekal tidak pernah saya beri. Itu harus mereka cari sendiri. Para anggota Barisan Pelopor Istimewa khususnya, sejak lama membuat dirinya menjadi "spesialis" bagi daerah-daerah tertentu...yang lama saya tidak mengerti, ialah tentang Saudara S. Suhud. Dia sejak dulu selalu memilih karesidenan Pati. Padahal saya tahu betul, dia bukan berasal dari Pati[44].

Sementara di Demak, informasi tentang penyebarluasan berita proklamasi diketahui dari pemberitaan *Sinar Baru* tanggal 22 Agustus 1945. Surat kabar pimpinan Parada Harahap itu melaporkan bahwa

tanggal 19 Agustus 1945 banyak pembaca dari Demak yang datang guna meminta konfirmasi sehubungan pemberitaan tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, para pembaca itulah yang menyebarluaskan berita proklamasi di wilayah tersebut. Selengkapnya, *Sinar Baru* memberitakan sebagai berikut.

Tiap2 pembatja...merupakan alat pemerintah...memberitakan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia kepada teman sedjawat dan handai taulan. Kepada pembaca kita di Demak beberapa anggota Pangreh Praja menyatakan kesanggupan bekerja menurut perintah Pemimpin Besar kita. Selandjutnya, mereka sanggup mengatasi kesukaran untuk keperluan Nusa dan Bangsa[45].

Tidak ketinggalan, proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rembang diumumkan dan disambut secara luas tanggal 20 Agustus 1945. Acara yang diselenggarakan di Balai Kebaktian Rakjat Rembang itu dihadiri seluruh pangreh praja, anggota dewan pemimpin, serta pegawai negeri. Setelah salah seorang anggota dewan pemimpin membacakan pengumuman pemerintah Indonesia, acara ditutup dengan menyanyi lagu Indonesia Raya[46].

Sementara di Grobogan, penyambutan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di stasiun Kedungjati tanggal 22 Agustus 1945. Penyambutan itu dipimpin oleh Sukindar selaku pimpinan Djawatan Kereta Api. Dalam acara itu pula, Sukindar mula-mula menjelaskan arti dari berbagai maklumat terkait kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sukindar menyatakan bahwa atas nama segenap pegawai kereta api daerah Kedungjati dengan keteguhan hati sanggup bekerja segiat-giatnya untuk tanah air dan bangsa. Penyambutan Kemerdekaan Indonesia itu akhirnya ditutup dengan seruan "Hidup Indonesia Merdeka" tiga kali[47].

4.10. Hari Indonesia

Sebagaimana pengumuman Badan Penerangan, Hari Indonesia diselenggarakan bertepatan dengan pembukaan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehubungan dengan hal itu, rakyat Indonesia pun diimbau untuk mengibarkan bendera merah

putih, yang sekaligus sebagai penanda persatuan dan kesatuan yang sudah bulat.

Marilah kita kibarkan dengan serentak bendera nasional itoe, sebagai memboektikan persatoean kebangsaan kita jang boelat. Barang siapa tidak mempoenjai bendera kain, boleh mengibarkan bendera kertas atau lainnja, asal pada hari itoe warna Merah Poetih kelihatan dimana-mana ke pelosok-pelosok desa. Sekali lagi: Marilah tg. 29 Agoestoes kita sambut dengan lambaian "SANG MERAH POETIH"![48]

Perayaan Hari Indonesia di Jawa Tengah relatif meriah. Di Purwokerto, Hari Indonesia disambut dengan mengibarkan bendera merah putih. Di malam harinya, masyarakat "mengurumuni radio umum untuk mendengarkan pidato radio wakil presiden". Sementara di Semarang, masih mengutip *Sinar Baru*, "di kala sang matahari memancarkan sinarnya yang gilang-cemerlang, penduduk sudah siap sedia mengibarkan bendera sang merah putih di rumah masing-masing[49].

Kemeriahan Hari Indonesia di Purwokerto dan Semarang ditemukan pula di Surakarta. Malam tanggal 29 Agustus 1945, para pemuda pemudi tekun membuat ratusan bendera merah putih. Keesokan harinya, bendera merah putih tidak hanya melekat "di setiap dada putera Indonesia, tapi juga ditempelkan di setiap kendaraan yang berjalan di kota itu", sehingga "menambah moleknya suasana kemerdekaan[50]".

Gambar 5
Hari Indonesia di Jakarta



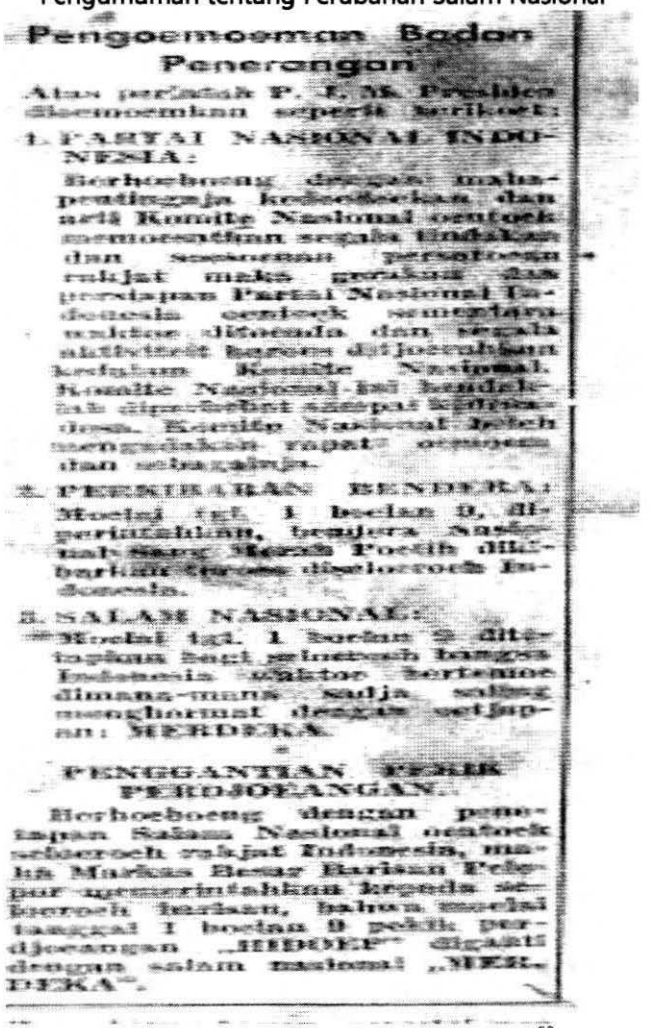
Sumber: *Asia Raya*, 1 September 1945

4.11. Salam Nasional

Tanggal 31 Agustus 1945, seiring dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia, pemerintah menetapkan pekik "merdeka" sebagai salam nasional yang baru. Menurut Sukarno, sebagaimana dapat disimak dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka*, salam yang diberlakukan per tanggal 1 September 1945 untuk menggantikan salam "Hidup" itu adalah dengungan jiwa yang merdeka, berjuang, dan bekerja. Tata cara mengucapkan salam tersebut ialah dengan

mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap muka, dan secara bersamaan memekikkan merdeka[51].

Gambar 6
Pengumuman tentang Perubahan Salam Nasional



Pengoemoeman Badan Penerangan

Atas perintah P. J. M. Presiden dioemoemkan seperti berikoet:

1. PARTAI NASIONAL INDONESIA:

Berhoeboeng dengan makin pentingnja kedoedoekan dan arti Komite Nasional oentoek memoesatkan segala oesahaan dan seloeroeh pergerakan rakjat maka gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia oentoek seterjoesnja oentoek ditoendo dan segala aktiviteit haroes ditjocahkan kepada Komite Nasional. Komite Nasional-lah kendaraan jang sempoerna.

2. PEMBERIAN BENDERA:

3. SALAM NASIONAL:

PENGGANTIAN SALAM PERDJOEANGAN.

Berhoeboeng dengan penetapan Salam Nasional oentoek seloeroeh rakjat Indonesia, maka Markas Besar Barisan Pelopor memerintahkan kepada seloeroeh barisan, bahwa moelai tanggal 1 boelan 9 jakni perdjoeangan „MERDEKA" digantikan dengan salam nasional „MERDEKA".

Sumber: *Asia Raya*, 1 September 1945[52]

Sementara itu, di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, salam "merdeka" berubah menjadi "berontak". Di berbagai tulisan di rubrik Podjok *Kedaulatan Rakyat*, salah seorang redaktur yang menggunakan

nama samaran Semprot seringkali menggunakan kata "berontak" atau menggabungkannya dengan pekik "merdeka". Perubahan memunculkan percecokan. Salah satunya adalah percecokan yang terjadi di Delanggu dan Surakarta. Salam "merdeka" dari Surakarta seringkali dijawab dengan "berontak". Di samping memunculkan percecokan, perubahan itu juga memicu kritik dari berbagai kelompok. Salah satunya lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh seseorang yang mengaku bernama Kampret. Ia mempertanyakan alasan Semprot menggunakan salam pekik "berontak". Semprot pun menjawab bahwa salam tersebut didasarkan pengalaman yang didengar dan dilihatnya. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pekik berontak telah umum digunakan di sekitar pertempuran Ambarawa, Banyubiru, Salatiga, Bringin, Getas, Kepuh, Ungaran, Mranggen, Genuk, dan Sayung. Di samping itu, salam itupun telah digunakan secara luas di Kudus, Jrangkah, Kalibanteng, serta berbagai pusat pertempuran dan desa-desa di Jawa Tengah[53].

Meskipun mengakui sebagai redaktur yang berinisiatif menuliskan pekik "berontak", Semprot membela diri bahwa meluasnya salam itu di luar kuasa dan tanggungjawabnya. Sebab, menurut Semprot, sebagai wartawan ia tidak meliki pengaruh apa-apa.

Semprot tidak koerang dan tidak lebih hanja...toekang nongkrong di podjok K.R., kerdjanja keboet2 laler dan boeboet2 djenggot. Djadi nggak poenja pengaroeh...kaloe dimana-mana sekarang terdengar seroean berontak, berontak, berontak, itoe memboektikan bahwa sekarang djiwanya seloeroeh rakjat Indonesia betoel2 telah berontak saking tidak tahannja melihat kekedjaman2 moesoeh dan kesengsaraan hidoepnja akibat dari pendjajahan2.

Masih mengenai kontroversi antara salam "merdeka" dan "berontak", Semprot pun menjelaskan bahwa pekik nasional Indonesia tetaplah "merdeka". Sementara "berontak" merupakan pekik perjuangan, khususnya di Jawa Tengah. Di samping itu, orang Jawa Tengah pun bisa menggunakan kedua salam tersebut. Sebab, pekik "merdeka" mengingatkan bahwa Indonesia telah merdeka sementara pekik "berontak" merupakan pengingat pentingnya pemberontakan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh. Dengan

demikian, mengutip Semprot, orang semestinya tidak perlu meributkan pekik berontak yang marak terdengar.

Selain "merdeka" dan "berontak", salam perjuangan lain yang populer di Jawa Tengah adalah "darah". Mengutip Anton Lucas, salam "darah" yang diteriakkan dengan dua tinju terkepal menjadi simbol persatuan—satu jiwa, satu perjuangan—untuk menentang penjajahan. Di samping itu, salam itu menjadi lambang kesiapan hati untuk menumpahkan darah penjajah serta membalas dendam atas berbagai bentuk penindasan di masa penjajahan Jepang[54].

4.12. Masa Bersiap

Masa bersiap (*bersiap tijd*) merujuk periode 4,5 bulan pertama kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, periode ini memotret perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara di lain sisi, periode ini digambarkan sebagai masa penuh kekacauan, kekerasan, dan sentimen nasional. Di samping itu, periode inipun dipenuhi dengan aba-aba maupun seruan "siap" sebagai tanda kesiapan untuk mengambil alih kekuasaan serta penolakan penjajahan (lagi).

Paragraf-paragraf di bawah ini merupakan gambaran singkat masa bersiap di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Secara khusus, paragraf-paragraf berikut ini akan menyinggung berbagai pertempuran di Jawa Tengah yang relatif sering dibicarakan atau dikenal. Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan, pertempuran-pertempuran yang dimaksud diantaranya ialah pertempuran Kota Baru, Magelang, Ambarawa, Semarang, dan Surakarta, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

4.13. Kota Baru

Amanat Hamengku Buwono IX dan Pakualam VIII memantik sentimen anti-Jepang di Yogyakarta. Penyergapan dan penangkapan tentara Jepang acap kali terjadi di sana, terutama dilakukan oleh Angkatan Muda Pathook pimpinan Kusumo Sunjoyo dan Angkatan Muda Gowongan pimpinan Wagiyono. Jenderal Nakamura yang melintasi Ngabean pun tidak luput dari sasaran. Ia dicegat oleh Angkatan Muda Pathook dan mengajak berunding di Hotel Tugu[55].

Sentimen anti-Jepang dan pengambilalihan kekuasaan semakin marak seiring dengan pembentukan Badan Sensoer. Badan yang

terbentuk seiring Maklumat No. 1 tanggal 5 Oktober 1945[56] itu mulanya ditujukan untuk mencegah salah paham, kekacauan, dan provokasi yang dapat menghalangi kelangsungan Republik. Namun demikian, dalam perkembangannya, badan ini menjadi alat untuk mengisolasi gedung-gedung yang diduduki Jepang dengan mengawasi pembicaraan melalui telepon dan pemutusan kawat telepon yang dicurigai menjadi perintang kemerdekaan[57].

Salah satu aksi pengambialihan kekuasaan Jepang ialah penurunan bendera Jepang dan menaikkan bendera Indonesia di Kooti Zimu Kyoku Tyokan yang biasa dibut Tyokan Kantai—yang sekarang dikenal sebagai gedung Agung—pada tanggal 21 September 1945. Adapun tindakan yang dipimpin oleh Jalaludin Nasution itu dikawal oleh satu kompi polisi istimewa Yogyakarta. Seusai peristiwa itu, mereka melakukan pawai sepanjang Malioboro. Di depan Bioskop Rex (Ratih), pawai tersebut dihentikan oleh pasukan Jepang.

Hari-hari berikutnya, pengambialihan kekuasaan di Yogyakarta terus berlanjut. Sebagai contoh adalah pengambialihan kantor *Sinar Matahari* dan menggantinya menjadi *Kedaulatan Rakjat* serta pemogokan pegawai kantor dan perusahaan Jepang. Pemogokan itu terjadi 26 September 1945 pukul 10.00. Mereka menuntut pimpinan Jepang menyerahkan kekuasaan kepada pegawai Indonesia. Pukul 20.00 KNID menerima laporan kantor dan perusahaan Jepang yang sudah diambilalih, yakni Pusat Nanyo Kohatsu; Jawatan Kehutanan; Daiken Sanggyo; Pabrik gula Tanjung Tirta Padokan, Beran, Cebongan Gondanglipura plered Gesikan Rewulu Medari Pundong Sewu Galur dan Salakan; serta Nanpo Ganko[58].

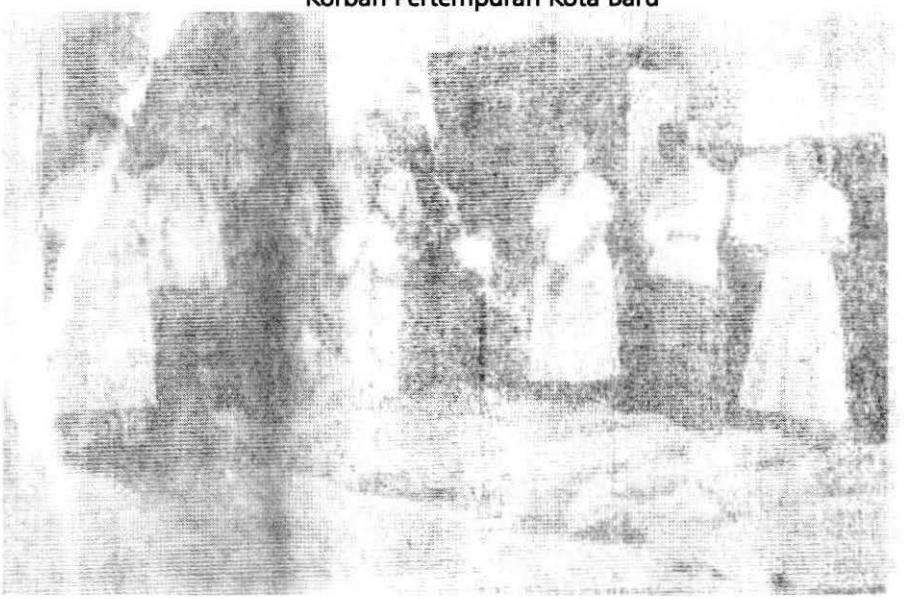
Puncak pengambialihan kekuasaan di Yogyakarta adalah Peristiwa Kota Baru tanggal 7 Oktober 1945. Peristiwa tersebut mula-mula didahului perundingan antara perwakilan Indonesia (Moh. Saleh, R.P. Sudarsono, Bardosono, dan Sunjyoto) dengan tentara Jepang (Mayor Otsuka, Kempetai Taico Sasaki, Kapten Ito, serta Cianbuco) di rumah Butaico di kota baru. Dalam perundingan itu, R.P. Sudarsono meminta mayor Otsuka (?) untuk menyerahkan senjata seluruh pasukan Jepang di Yogyakarta. Namun, permintaan itu ditolak. Mayor Otsuka (?) selanjutnya mengatakan bahwa ia baru akan bersedia menyerahkan senjata keesokan harinya, kira-kira pukul 10.00 pagi, setelah mendapat izin dari Jenderal Nakamura di Magelang.

Bersamaan dengan perundingan tersebut, di Yogyakarta telah berkumpul massa, baik dari kota Yogyakarta sendiri maupun dari luar

kota. Konsentrasi massa terjadi dikarenakan sosialisasi dari lurah desa masing-masing tentang adanya perundingan di Kota Baru. Di samping itu, konsentrasi massa juga dipengaruhi usaha Faridan M. Noto, mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang bertugas menghubungi kelompok pemuda rakyat di kampung-kampung sekitar Kota Baru, untuk turut mengepung Oshabutai, sambil menunggu komando jika perundingan di sana gagal.

Konsentrasi rakyat di sekitar Kota Baru dipengaruhi pula oleh usaha Umar Slamet. Hampir sama seperti Faridan M. Noto, mantan tentara PETA ini bertugas menghubungi pemerintah desa di sekitar Kota Baru untuk membantu memberi penjelasan kepada rakyat tentang perundingan yang sedang berlangsung dan langkah yang harus dilakukan sekiranya perundingan tersebut gagal. Di samping itu, Umar Slamet pun mendapat tugas untuk mempersiapkan sarana dan prasana yang perlukan sekiranya perundingan tersebut gagal[59].

Gambar 7
Korban Pertempuran Kota Baru



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 9 Oktober 1945

Ilustrasi tentang upaya yang dilakukan Faridan M. Noto dan Umar Slamet di antaranya dapat disimak dalam penuturan Mangkuhadiningrat, salah seorang pamong desa Danurejan. Ia diberi

tugas oleh Umar Slamet untuk mengerahkan rakyat Danurejan dengan senjata seadanya. Di samping itu, ia ditugaskan pula untuk meminjam truk pabrik paku Klitren untuk mengangkut massa Kotagede dan Umbulharjo[60].

Masih mengenai konsentrasi massa di kota Yogyakarta, malam hari tanggal 6 Oktober 1945, pukul 11.00 malam, di kampung-kampung di kota Yogyakarta terdengar suara "siap". Lima jam kemudian, tanggal 7 Oktober 1945 pukul 04.00 pagi, dari arah Kota Baru terdengar suara letusan granat tangan disusul suara letusan senjata serta teriakan-teriakan seperti siap, maju, dan gempur. Suara-suara itu menjadi penanda awal pertempuran. Dalam suasan gelap gulita karena pemadaman listrik, para pejuang pun mencoba melewati tembok berduri dan menyerang dengan senjata seadanya.

Pertempuran baru berakhir enam jam kemudian. Hal itu ditandai dengan pengibaran bendera putih di tengah-tengah pertempuran sekitar pukul 10.00 pagi[61]. 360 orang Jepang dimasukkan ke penjara Wirogunan, 9 orang Jepang meninggal dan 20 luka-luka. Kecuali senjata, barang dan uang sebesar f 36.000 milik Jepang dirampas dan diberikan kepada KNID. Di saat yang sama, di Rukun Kampung Mergangsan Lor, Mergangsan Kidul, dan Nyutran terjadi penangkapan orang Jepang, yang dipimpin Siswosubroto dan Moh. Jumali itu. Banyak orang Jepang kamudian dimasukkan ke penjara[62].

Gambar 8

Pemakaman Korban Pertempuran Kota Baru



Sumber *Kedaulatan Rakjat*, 10: Oktober 1945

Masih terkait pertempuran Kota Baru, laporan wartawan *Kedaulatan Rakjat* menarik untuk disimak. Di tengah medan pertempuran, di antara hujan peluru dan kondisi gelap gulita, ia menyaksikan seorang anak, kira-kira berumur 12 tahu ikut bertempur. Ia merangkak maju, hanya bersenjata bambu. Selanjutnya, di rumah sakit (?), ia menyaksikan seorang pelajar Sekolah Rakyat, berumur 11 tahun, dalam kondisi terluka, mengigau dalam tidurnya. Dalam igauannya ia mendorong supaya barisan rakyat maju terus dan membunuh orang-orang Jepang yang telah membunuhi orang-orang Indonesia. Masih di rumah sakit, wartawan itupun melaporkan pula rasa harunya melihat seorang ibu. Ia terharu melihat seorang ibu meletakkan tangannya di atas kepala anaknya yang meninggal, tanpa menangis sedikitpun[63].

Dalam pertempuran Kota Baru, tercatat beberapa orang meninggal. *Kedaulatan Rakjat* tanggal 9 Oktober 1945, misalnya, melaporkan pemakaman jenasah Amat Djahir dari Ngampilan di depan polisi istimewa. Di hari yang sama, pukul 16.00, penghormatan diberikan kepada Achmad Sareh pelajar Taman Madya Taman Siswa. Sebelum diberangkatkan ke pemakaman Semaki, jenazah Achmad Sareh dimakamkan terlebih dahulu di Pendopo Taman Siswa dengan tembakan salvo satu kali. Sebagaimana ketua korban sebelumnya, pemakaman itupun dihadiri oleh barisan polisi, BKR, BPR, BPU, para siswa dan penduduk.

Di samping berita-berita tentang pemakaman, pertempuran Kota Baru menyisakan banyak laporan orang hilang,[64] salah satunya adalah Djoenadi alias Badjoeri, warga Jagran berumur 25 tahun. Dia dinyatakan hilang dalam pertempuran tersebut. Tidak ketinggalan, pascapertempuran, berita seputar penjarahan pun marak, seperti Kantor Telepon Yogyakarta. Gambaran penjarahan ini selaras dengan isi Maklumat No. 4 tanggal 17 Oktober 1945.

4. Bahan-pakaian jang didapat dalam pertempuran antara bangsa Indonesia dan bangsa Djepang pada tanggal 7 Oktober 1945 di Kota Baroe jang sampai sekarang masih disimpan di Gedoeng Nasional dan di lain-lain tempat, soepaja dibagikan kepada orang-orang jang toeroet dalam pertempoeran, teroetama kepada mereka jang menjadi koerban atanja rakjatau keloerganja rakjat jelata.
5. bahan-pakaian jang seperti dimaksoed dalam pasal 4 jang pada waktoe itoe masih di tangan orang lain, soepaja selekas-lekasnja diserahkan kepada Komite Nasional Poesat Daerah Jogjakarta agar dapat dibagikan pada jang berhak menerimanja ialah rakjat Djelata.

Peristiwa lain yang menonjol di Yogyakarta selama masa bersiap ialah pengeboman stasiun radio Yogyakarta. Pengeboman itu mula-mula terjadi tanggal 25 November 1945. Pukul 7.50, sebuah pesawat Inggris menjatuhkan pamflet berisi pemberitahuan pengeboman stasiun radio di Yogyakarta dan Surakarta. Dalam pamflet itu, Inggris mengimbau supaya rakyat menjauhi kedua stasiun tersebut, setidaknya sampai jarak satu kilometer. Selang 25 menit, pukul 8.15, Inggris pun menjatuhkan bom-bom[65]. Tujuh orang penduduk dinyatakan meninggal dalam peristiwa itu.

Gambar 9
Pengeboman Inggris di Yogyakarta Tanggal 27 November 1945



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 28 November 1945

Dua hari kemudian, tanggal 27 November 1945, pukul 12.45, Inggris kembali menjatuhkan pamlet. Ada tiga hal pokok yang dimuat dalam pamflet tersebut. *Pertama*, pengeboman yang dilakukan oleh Inggris tanggal 25 November 1945 terhadap stasiun Yogyakarta dan Surakarta dipandang belum berhasil. Oleh sebab itu, Inggris memandang perlu untuk melakukan pengeboman kembali. *Kedua*, Inggris menyatakan tidak akan mencelakakan penduduk. Selanjutnya, pukul 01.00-2.30 siang, empat pesawat Inggris mengebom Yogyakarta. Pengeboman itu menghancurkan Balai Mataram dan Sono Budoyo. Di samping itu, pengeboman itupun merusak kantor telepon, gedung H.C.C.H. dan rumah penduduk. Beberapa penduduk (?) pun dinyatakan meninggal dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Hamengku Buwono mengirimkan telegram kepada presiden sukarno, menyatakan protes atas peristiwa tersebut dan mendesak Presiden mengambil tindakan tegas. Protes senada dilayangkan oleh Sunan dan Mangkunegara.

4.14. Magelang

Berbagai pertempuran di Magelang mula-mula dipicu oleh ketidaksenangan penduduk terhadap perilaku tentara Sekutu di sana. Penduduk Magelang yang ikut menyediakan beras untuk Sekutu dari Semarang harus melihat pembunuhan, perampokan, serta berbagai penyembelihan yang dilakukan oleh tentara-tentara tersebut. Dalam pertempuran di Magelang baru-baru ini ternyata tentara Gurkha dan Jepang melakukan penyembelihan terhadap penduduk. Seperti 40 penduduk di pedukuhan Tulung. 30 Oktober diserang 500 tentara Jepang.

Tidak kurang, tentara Sekutu yang didominasi oleh Gurkha membebaskan tawanan perang dan menjadikannya sebagai tentara Sekutu. Puncak fenomena tersebut adalah munculnya sentimen anti-Jepang atau anti-Gurkha yang menyulut berbagai pertempuran. Salah satunya yang terbesar adalah pertempuran yang terjadi akhir Oktober hingga awal November 1945. Pertempuran itu membawa banyak korban. Setidaknya ada 53 korban yang dimakamkan di pemakaman Giriloyo pada tanggal 3 November 1945. Hujan lebat menyertai proses pemakaman yang mengharukan itu.

Hari Saptoe djam 8 malam tanggal 3 boelan 11, soenji senjap gelap. Hanja doea boeah obor ketjil menjala. Riboean rakjat, toea moeda, dalam keadaan basah koejoep. Orang menggigil kedinginan. Dalam keadaan itu, semangat rakjat jang beriboe-riboe itoe diperkoeat dengan boenji sendjata tiga kali sebagai penghormatan kepada para pahlawan kita... Soenji senjap. Kesoenjian ini diptjahkan oleh soeara pekik "Merdeka!". Terdengar soeara mengharoekan[66].

Tidak hanya di Giriloyo, pemakaman korban pertempuran Magelang juga dilakukan di berbagai tempat. Di Semaki, Sabtu 3 November 1945 pukul 16.00 BPKKP, KNI, PMI, dan PRI memakamkan tiga orang yang tidak diketahui identitasnya. Minggu 4 November 1945 pukul 11.00 pemakaman R. Adam saudara ipar dr. Heerdjan, seorang pegawai pegadaian dan Angkatan Muda Magelang gugur. Jenazahnya dimakamkan di Kuncen bersama dengan keempat pemuda lain yang mempertahankan Roemah Pegadaian Magelang. Sementara itu, Senin 5 November pukul 10.00 dimakamkan pula dua pemuda di pemakaman Semaki. Kedua pemuda tersebut ialah Soenjoto dari Bausasran dan Sena, pelajar Taman Siswa dari Ngasem[67].

Soegijono, anggota Palang Merah Indonesia Muntilan yang tertembak dan ditawan oleh musuh menjadi saksi atas kekejaman tentara Gurkha, Nica, dan Jepang di tangsi. Mula-mula ia bercerita bahwa ia di bawa ke SMP Boton. Di sana ia melihat ada 25 orang yang dibariskan oleh Jepang lalu ditembak dengan mitraliur. Mitraliur itu berisi 50 peluru. Dari ke-50 isi peluru itu, hanya menewaskan empat orang.

Soegijo pun menuturkan bahwa di antara tawanan terdapat seorang perempuan bernama Soekesih, guru SMPP di Magelang. Ia meminta kepada opsir Inggris supaya pemuda Indonesia yang terluka dan ditawan dirawat semestinya. Selanjutnya, ia berkata, "kalau tuan tidak mau mereka, lebih baik bunuh saja kami semua ini". Sementara di bangsal perawatan rumah sakit, pemuda Indonesia ditakut-takuti akan dibunuh semua. Masih menurut Soegijo, orang-orang Jepang turut bertempur di Magelang karena dihasut Inggris dengan berkata bahwa orang Indonesia telah membunuh semua orang Jepang. Di dalam tangsi penawanan itu, setiap jam 09.00 malam selalu diperdengarkan siaran radio, di antaranya yang sering didengar oleh Soegijo ialah berita tentang keunggulan pemuda Indonesia; "pemuda Indonesia sangat

unggul. Kalau pertempuran diteruskan 2 jam lagi, niscaya serdadu Gurkha akan menyerah kalah". Ia bisa keluar dari tawanan setelah Palang Merah Indonesia mencarinya dengan perantaraan Kontak Komite[68].

Pertempuran di Magelang berhenti seusai Sukarno melakukan perundingan dengan Jenderal Bethel, panglima tentara pendudukan Sekutu di Jawa Tengah. Seusai perundingan Sukarno pun berpidato dalam siaran RRI Magelang. Dalam pidatonya, Sukarno mengimbau supaya pertempuran di Magelang dihentikan.

saja katakan bahwa saja tidak hargai semangat saoedara, saja tahoe bahwa saoedara mendasarkan usaha saoedara atas belasan jang saja hargai. Tetapi ada tjara lain untuk mentjapai kepoetoesan hati saoedara. Saya perintahkan disini soepaja saoedara menoeroet perintah ini. Hentikan pertempoeran[69].

Jenderal Bethel juga mengeluarkan kesanggupan untuk tidak mengirim tentara pendudukan di Yogyakarta. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 4 Nomber 1945 KNI daerah Yogyakarta atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan telegram berisi ucapan terimakasih atas keputusan tersebut. Namun demikian, ia mengharapkan surat pernyataan sang jenderal.

4.15. Ambarawa

Kekalahan tentara NICA di Magelang melahirkan suasana genting di Ambarawa. Hal ini bermula tanggal 21 November 1945, kertika truk-truk pengangkut tentara Inggris dari Magelang mulai berdatangan sejak pagi hari. Tidak hanya itu, Inggris pun menempatkan tanknya di rel kereta api Secang, dan selanjutnya memutus jalur kereta api serta telepon Magelang-Ambarawa[70].

Pengejaran tentara NICA yang menuju Ambarawa terus dilakukan. Berbagai pertempuran dan insiden turut mewarnai upaya itu. Salah satu contohnya adalah pertempuran yang terjadi antara desa Tempoeran-Jambu. Situasi malam yang gelap membuat suara tembakan relatif tidak terlalu terdengar di kedua belah pihak. Sementara itu, sampai hari kedua pertempuran, ada dua truk tentara Nica yang telah berhasil dirusak[71].

Gambar 10
Meriam Penangkal Pesawat Musuh dan Penyerbuan Stasiun Ambarawa



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 27 November 1945

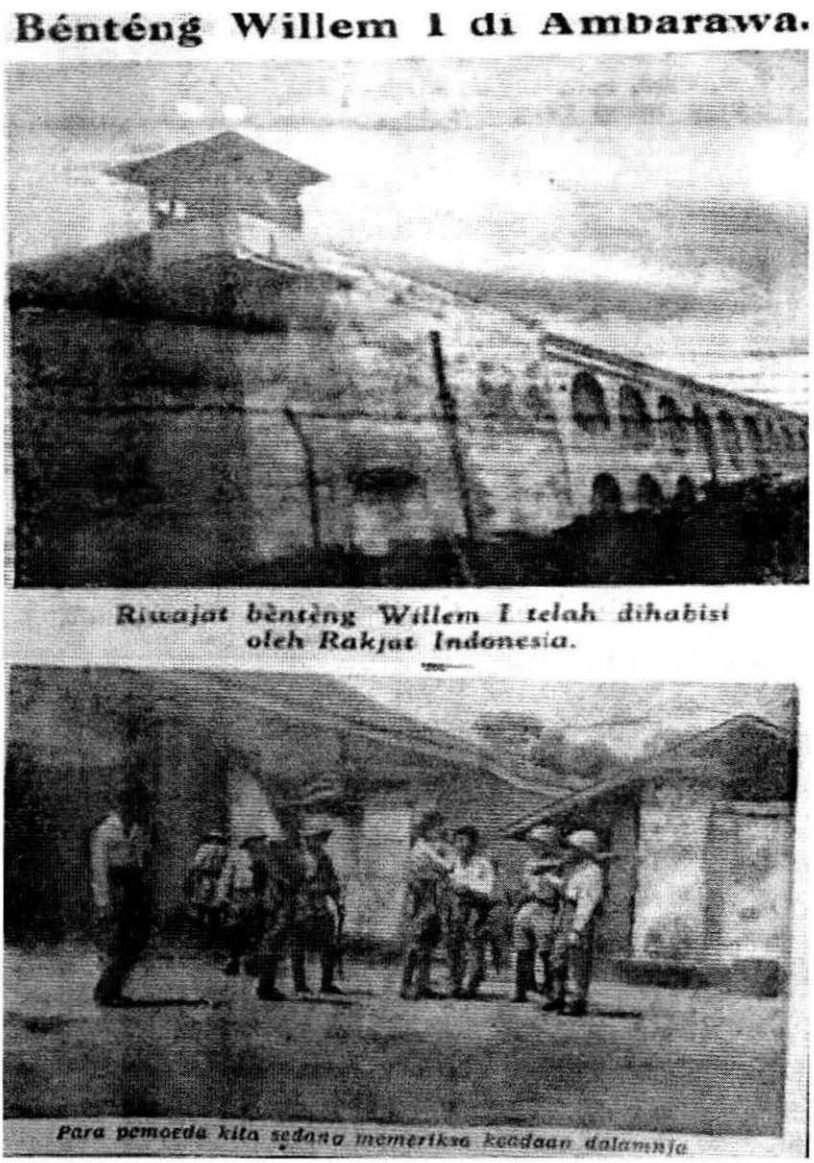
Masih di hari yang sama, Gurkha yang bergerak menuju Ambarawa membakar semua rumah penduduk, dari mulai desa Pingit sampai Jambu, Secang. Sementara di desa Bedana, mereka menyembelih seorang lurah, beserta dengan istri, anak-anaknya, serta seorang carik. Hari berikutnya, tentara Gurkha melakukan pembakaran, penyembelihan, dan membebaskan tawanan Jepang di Normaal School Ambarawa.[72]

Situasi ini mendorong pejuang Indonesia untuk semakin maju dan menghentikan tindakan-tindakan tersebut, sebagaimana dilakukan pasukan gabungan TKR Jogja, Purwokerto, Sumpyuh, Gombong, Kebumen, Cilacap, dan Muntilan tanggal 24 November pukul 12.00. pertempuran itu berhasil mendesak musuh sampai ke perbatasan Kedu-Semarang.Sisanya berhasil didesak sehingga terkumpul menjadi satu di pusat kota Ambarawa[73].

Masih terkait pertempuran Ambarawa, sekitar 200 narapidana Rumah Tahanan Ambarawa pun dibebaskan untuk membantu pasukan Indonesia. Narapidana yang sudah terampil menggunakan senjata api langsung diterima menjadi anggota TKR. Perekrutan narapidana untuk membantu pertempuran Ambarawa dilakukan pula di Bedono. Sementara itu, sebanyak 700 tentara Shik di Ambarawa menyatakan dukungan terhadap perjuangan Indonesia. Ketika pertempuran Ambarawa berkobar, masih mengutip *Kedaulatan Rakjat*, 240 pasukan itu meminta pita merah putih.

Selain narapidana dan tentara Shik, pasukan Indonesia di Ambarawa memperoleh tambahan pasukan dari para kiai. Sambil menyerukan perang sabillilah, mereka gigih menyerang musuh. Para kiai dalam Ambarawa relatif sakti. Mereka relatif kebal terhadap senjata api dan mortir musuh. Di samping mengulas keterlibatan para kiai, ada pula keberadaan seorang Nyai (?) dari Tingkir, Salatiga turut bertempur[74].

Gambar 11
Kemenangan di Benteng Willem I

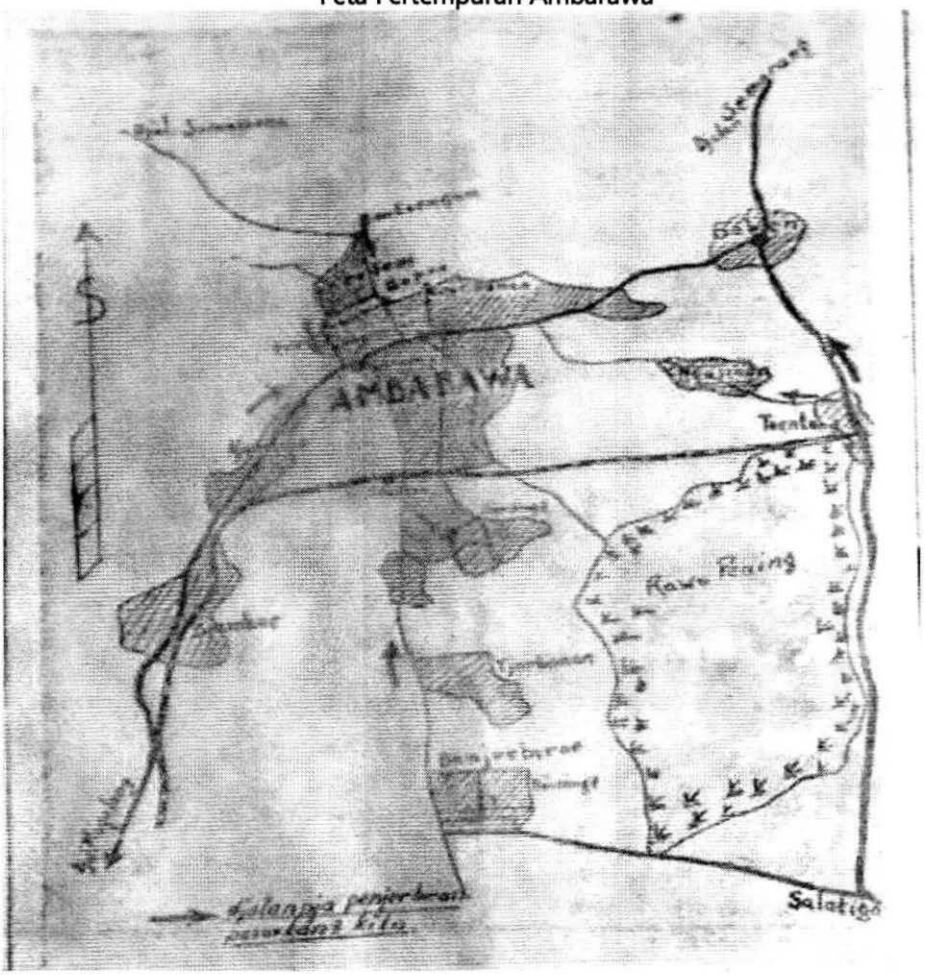

Bénténg Willem I di Ambarawa.

Riwajat bènténg Willem I telah dihabisi oleh Rakjat Indonesia.

Para pemoeda kita sedang memeriksa keadaan dalamnja.

Sumber: *Kedaulatan Rakjat,* 12 dan 18 Desember 1945

Gambar 12
Peta Pertempuran Ambarawa



Sumber: *Kedaulatan Rakjat,* 17 Desember 1945

Berbagai pasukan di Ambarawa terus bahu-membahu menyerang pertahanan musuh seperti stasiun kereta api Ambarawa maupun gereja besar Ambarawa. Selain itu, mereka pun menembak pesawat-pesawat musuh yang berusaha mengirim makanan dan senjata untuk pasukan yang telah terdesak di tengah kota.

Kemarin, tengah hari, datanglah di atas Ambarawa 8 pesawat terbang mosoeh menjambar2, 6 diantaranya...mengangkoet 240 tentara pajoeng dan berpoeloeh2 peti bantoean sendjata dan makanan. Baroe kali ini moesoeh kebingoengan datang membawa bantoean yang sedemikian besarnja. Hal ini moedah dimengerti sebab perhoeboengan darat antara Semarang-Ambarawa soedah terpoetoes dan soedah dikoeasai oleh tentara rakjat[75].

Sementara itu, pertempuran demi pertempuran di Ambarawa membuat Inggris semakin terdesak. Mereka kemudian memusatkan pertahanan terakhir di Banyubiru, yang memiliki benteng pertahanan, yaitu Benteng Wilem I. Benteng buatan Belanda itu merupakan benteng bawah tanah yang berlapis beton dua susun dengan ketebalan masing-masing 1 meter.

Tanggal 2 Desember 1945, serangan serentak dan besar-besaran mulai dilancarkan di Ambarawa. Penyerbuan serentak itu disusun oleh Soekiswo, Soejadi, dan Bambang dari Pemberontak Rakjat Indonesia Djawa Tengah. Ada 85 pemuda yang tersusun menjadi lima lapisan menyerbu Banyubiru. Penyerbuan serentak itu berhasil menduduki Benteng Willem I dan membuat musuh mulai melarikan diri dari Ambarawa[76].

Gambar 13
Pengibaran Merah Putih di Gereja Besar Ambarawa



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 19 Desember 1945

Keberhasilan serangan serentak di Banyubiru dilanjutkan dengan serangan serentak berikutnya, yang membawa kemenangan penuh. Dalam hal ini, *Kedaulatan Rakjat* edisi tanggal 17 Desember 1945 menurunkan *headline* berita "TG.17: PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA Kota Ambarawa seloeroehnja di tangan kita". Kemenangan di Ambarawa itu dimulai ketika pukul 11-12 malam, tanggal 11 Desember 1945, markas tentara gabungan di Ambarawa memutuskan untuk melakukan serangan habis-habisan. Serangan pertama dilakukan oleh Haji Moechlis dari Cilacap. Bersama dengan 60 anggotanya mula-mula ia melakukan pergerakan dari bukit di sebelah utara gereja besar. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember, kelompok ini masuk ke kota menyerang gereja besar, salah satu basis pertahanan musuh. Pada tanggal itu pula, gereja besar dapat diduduki dan bendera merah putih sebagai tanda kemenangan Republik Indonesia dikibarkan di puncak gereja.

Setelah menduduki gereja besar Ambarawa, pasukan yang dipimpin oleh Haji Moechlis melakukan serangan ke berbagai tempat penting lainnya. Beberapa diantaranya adalah stasiun dan dua benteng di Ambarawa; Benteng Ambarawa Willem I dan Benteng Pendem Banyubiru. Pergerakan pasukan ini membuka kunci kota Ambarawa dari berbagai penjuru dan memungkinkan pasukan-pasukan lain— seperti pasukan rakyat Purwokerto dan Banyumas, Yogyakarta, Kedu, Solo, dan Salatiga— masuk ke dalam kota Ambarawa.

Perjuangan merebut benteng tersebut dimulai sejak tanggal 21 November 1945, yang berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Jatuhnya kedua benteng tersebut melemahkan pertahanan musuh di sekitar Tuntang, Ngasinan, dan Bawen. Tidak hanya itu, jalan-jalan yang menghubungkan Salatiga, Tuntang, Ngasinan, dan Bawen pun dilaporkan sunyi. Untuk berjaga-jaga, pasukan-pasukan Republik Indonesia yang berada di Ambarawa melakukan pembagian tugas patroli sebagai berikut;

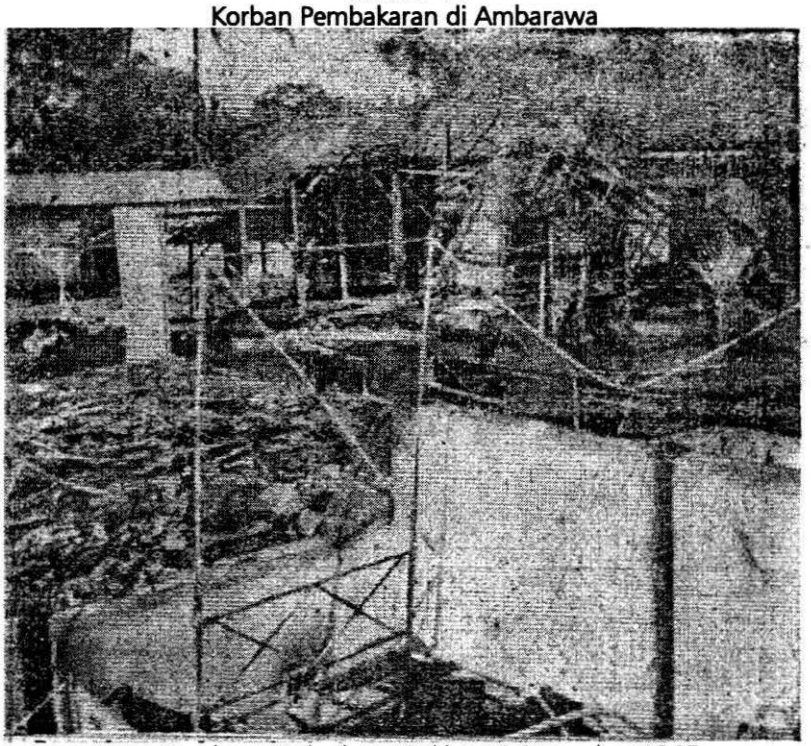
1. Pasukan Ambarawa menjaga kantor telepon, pertigaan jalan Tuntang, serta pertigaan Toko Senda.
2. Pasukan gabungan Ambarawa-Magelang berjaga di Kawedanan dan sekolah Taman Siswa
3. Pasukan Yogyakarta-Puwokerto berjaga di kantor polisi dan stasiun
4. Pasukan Yogyakarta berjaga di Kampemen dan Hotel Merdeka
5. Pasukan Solo di Warung Lanang

Sementara itu, terkait dengan keadaan dalam kota Ambarawa, rumah-rumah penduduk hampir secara keseluruhan telah terbakar habis. Gedung-gedung yang masih berdiri rata-rata dalam kondisi rusak

parah. Sementara di jalan-jalan di dalam kota hampir tidak dapat ditemukan penduduk. Mereka dilaporkan telah meninggalkan rumah masing-masing untuk mengungsi.

Di samping melakukan pembakaran, penyembelihan pun dilaporkan terjadi di Ambarawa, baik saat pertempuran maupun pasca-kemenangan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa penyembelihan yang dilaporkan ialah penyembelihan Kiai Hasjim. Dia disembelih oleh Gurkha saat sedang berdzikir di masjid Jambu.

Gambar 14
Korban Pembakaran di Ambarawa



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 10 Desember 1945

Tidak ketinggalan, perampokan pun menjadi bagian peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar Ambarawa serta jalan antara Ambarawa, Majen, Ungaran, serta Semarang. Wartawan perang *Kedaulatan Rakjat* yang melihat secara langsung peristiwa tersebut melaporkan hampir setiap hari ia menyaksikan perampokan ayam, kambing, sapi, serta beras. Selengkapnya ia menulis, "ayam sedang asyik

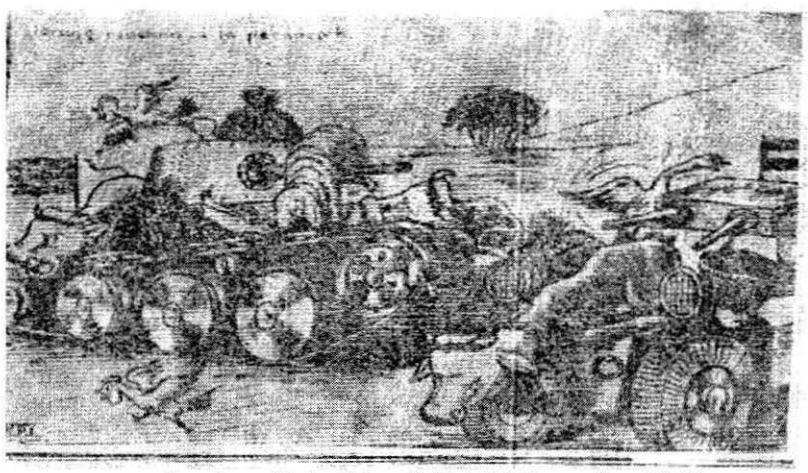
mencari makan ditembaki...ayam dan kambing digantung di tank sementara sapi diseret".

Masih mengenai pertempuran Ambarawa, pertempuran 24 hari itu menyisakan berbagai potongan cerita menarik. Diantaranya cerita tentang menu makanan yang disediakan oleh dapur umum. Mengutip Surahman Partoharjono dalam *Inventaris Sumber Sejarah di Jawa Tengah, 1945-1965*, pasukan yang bertempur mendapat kiriman nasi sehari dua kali. Nasi itu biasa diterima tengah hari, kira-kira pukul 12.00, serta lewat tengah malam. Adapun lauknya ialah tahu, tempe, gereh (ikan asin), dan kadang-kadang telur. Di samping nasi, mereka kadang-kadang mendapat kiriman jagung atau singkong.

Selain dapur umum, makanan untuk pasukan melawan musuh diperoleh dari sumbangan. *Kedaulatan Rakjat* 11 Desember 1945 misalnya melaporkan sumbangan makananan berupa 10 besek krasikan, 65 buah kelapa, 2 besek garam goreng, 2 besek serundeng, 2 besek jenang, serta 2 besek kue putu. Di samping itu, ada pula 1 besek telur, 1 besek sambel kering, 1 truk kelapa, serta 1 kwintal bawang merah.

Cerita menarik lainnya datang dari pasukan VIII dan XX. Selama 24 hari pertempuran, kedua pasukan ini terus berjuang tanpa berganti-ganti orang. Pasukan lain yang sama sekali tidak beristirahat dan berganti-ganti anggota adalah pasukan Poetri Pemberontak Mataram. Sampai pertempuran usai, pasukan pimpinan Widayati yang beranggotakan 17 orang itu tetap utuh.

Gambar 15
Ilustrasi Perampokan



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 24 Desember 1945

Kisah percintaan juga menjadi bagian dari cerita Ambarawa. *Kedaulatan Rakjat* tanggal 12 Desember 1945, misalnya, memuat surat cinta seorang pemuda Yogyakarta kepada kekasihnya. Surat yang sudah kena air dan lumpur sehingga nyaris tidak bisa dibaca itu berisi permintaan untuk diizinkan bertempur di Ambarawa.

...sarehne ing Ambarawa wektoe saiki lagi ono pertempoeran kang ora ana pedote antar Indonesia lawan Inggris, NICA, Gurca, lan mata2 moesoeh, moelane jen adik lego atimoe mas arep meloe bertempoer, dari itoe Adik setoedjoe ataoe tidak, djika tidak mas djoega tidak berangkat. pramilo njoewoen wangsoelan, koe toenggoe2 lo dik wangsoelanmu. Mas kang toehoe tresna[77].

4.16. Semarang

Pertempuran di Semarang berawal ketika Mayor Kido Sinichiro menolak menyerahkan senjata pada perundingan tanggal 13 Oktober 1945. Penolakan penyerahan Jepang itu dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. *Pertama*, senjata merupakan alat yang harus ada untuk melaksanakan perintah angkatan bersenjata sekutu, yang menentukan hidup dan mati Jepang. *Kedua*, kehilangan senjata dapat membahayakan eksistensi. *Ketiga*, senjata merupakan benda suci, lambang loyalitas, karena diserahkan oleh kaisar. Di lain sisi, bagi pihak Indonesia, penyerahan senjata dimaknai sebagai simbol penyerahan hak dan kekuasaan[78].

Penolakan Mayor Kido menyerahkan senjata direspon dengan penahanan seluruh orang Jepang dan Belanda di sana. Tidak hanaya itu, tersiar pula kabar jika orang-orang Indonesia mulai merampas senjata dan membunuhi tawanan. Berbagai kabar itu memancing kemarahan Mayor Kido. Dan kemarahan pasukan itu semakin memuncak seiring dengan kabar penangkapan Jenderal Nakamura, Panglima Tentara Jepang Jawa Tengah yang bermaskas di Magelang.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara kelompok pemuda dengan tentara Jepang pimpinan Mayor Kido. Gambaran akan permulaan pertempuran itu antara lain direkam oleh Hang Bing Siong sebagaimana dituturkannya berikut ini.

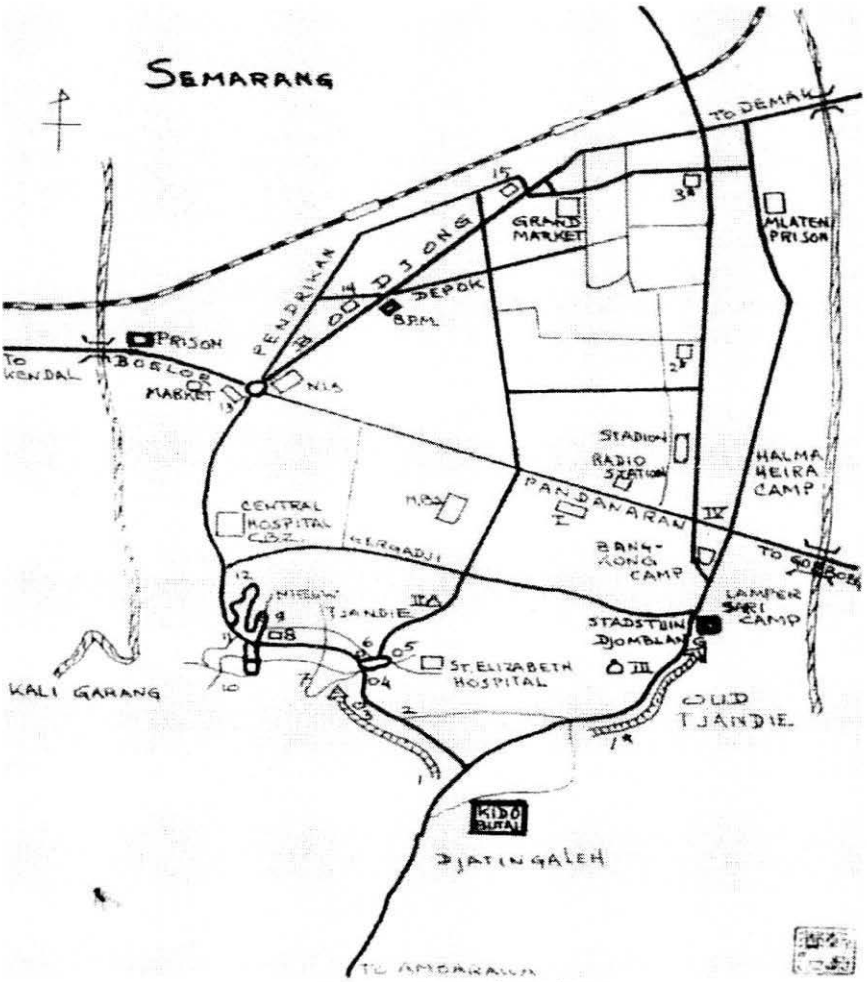
Saya menulis di buku harian saya bahwa pada tengah malam, pergantian dari tanggal 14-15 Oktober, kami dibangunkan oleh suara

senapan dan kesibukan lalu lintas di sepanjang jalan Gadjah Moengkoer yang sebelumnya bernama Dr. de Vogelweg. Salah seorang adik laki-laki saya turun ke jalan namun segera dihalau tentara Jepang... Mayor Kido Sinichiro memulai pertempuran pukul 3.30[79].

Mengutip Han Bing Siong, pagi hari tanggal 15 Oktober 1945, ia mendengar suara "Siap! Siap!" dari para tetangganya. Mereka bersenjata bambu runcing dan berkumpul perbukitan. Di saat yang sama, ia dan keluarganya melihat ada empat orang Jepang, satu orang cedera kaki, menghadap kebun rumahnya di jalan Toempang. Dalam keremangan cahaya, ibunya tiba-tiba menunjuk ke jalan Watu Gedhe dan mebuat tanda "butai! Butai!" untuk mereka. Hanya dalam waktu singkat, Han Bing Siong menulis bahwa para pemuda tetangganya itu menuju kebun singkong rumahnya untuk mencari keempat orang Jepang itu[80].

Salah satu insiden penting sekitar pertempuran Semarang adalah pembunuhan di Penjara Bulu, sekitar 600 meter di sebelah barat Simpang Lima[81]. Seusai pertempuran di Simpang Lima, para pemuda Indonesia segera menuju ke sana untuk membunuh orang Belanda dan orang Jepang yang ada di sana. Pembunuhan yang terjadi pada pukul 4.30 sore itu tanpa sepengetahuan Kenpeitei. Sebab, ketika peristiwa itu terjadi, Kenpeitei sedang menyisir kampung-kampung di sekitar Simpang Lima untuk membebaskan orang Jepang yang tertawan. Peristiwa itu baru diketahui pukul 06.00 petang[82].

Gambar 16
Peta Semarang



Sumber: Han Bing Siong

Salah seorang sersan Kenpeitei bernama Tanaka yang menjadi salah seorang saksi mata peristiwa tersebut menuturkan, ketika pintu gerbang penjara dibuka, ia melihat ada seorang Indonesia (?) yang melarikan diri dengan meloncati tembok belakang penjara. Bersamaan dengan itu, ia pun melihat seorang Jepang berlumuran darah berjalan keluar dari penjara.

Ia hanya berkata "terimakasih" lalu jatuh dan meninggal... Hari sudah mulai gelap. Di kamar-kamar, di gang-gang terdapat orang-orang Jepang yang sudah meninggal... di kamar-kamar itu dimasukkan banyak sekali orang-orang Jepang yang telah dibunuh dengan kejam...mayat-mayat itu bertumpuk-tumpuk berlumuran darah dan tak bisa dikenali lagi. Dekat jendela ada mayat yang menggantung. Darah hitam kemerah-merahan yang tak dapat mengalir membekas di lantai setebal 10 cm. Masih ada yang hidup tetapi mukanya tidak dapat dikenali lagi, seperti setan menyedihkan[83].

Pembunuhan orang-orang Jepang di Penjara Bulu adalah yang terbesar di Indonesia.[84] Dalam berbagai historiografi Jepang, peristiwa tersebut dikenal pula dengan peristiwa "tulisan darah". Konon, para tahanan Jepang yang terluka, sebelum meninggal menulis dinding-dinding penjara dengan darah. Tulisan-tulisan itu secara umum dapat dibedakan menjadi empat: "Berdoa bagi keselatan Indonesia"; "Bahagia, Indonesia merdeka, Senang mati, Benzai untuk orang Jepang, kaisar kita"; "Bahagia Indonesia Murudeka"; serta "Indonesia Merdeka"[85].

Selain di Penjara Bulu, pembunuhan terhadap orang-orang Jepang terjadi pula di Alun-alun Semarang, dekat dengan Pasar Johar. Ada puluhan orang Jepang tewas dibunuh oleh penduduk setempat. Tidak hanya dibunuh, mayat mereka pun terpancang pada ujung bambu runcing yang ditegakkan di tengah Alun-alun. Berbagai pembunuhan terhadap orang Jepang di Semarang semakin memicu kemarahan tentara Jepang. Pembunuhan, pembakaran desa, dan penyerahan terhadap rumah sakit umum merupakan beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh tentara Jepang di sana[86].

Gambar 17
Menuturkan Kekejaman Jepang dan Gurkha



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 13 Desember 1945

Berbagai pertempuran dan kekacauan yang terjadi di Semarang diselesaikan melalui perundingan dan selebaran udara tentang genjatan. Namun, semua itu tidak efektif. Akhirnya, tanggal 17 Oktober 1945 Mr. Wongsonegoro mengeluarkan maklumat yang berisi pemberitahuan penghentian pertempuran, seraya mengumumkan bahwa terhitung sejak pukul 02.00 siang seluruh tembak-menembak harus dihentikan dan kedua belah pihak tidak boleh melintasi garis pertahanan masing-masing. Akan tetapi, karena kendala komunikasi, maklumat itu baru bisa dilaksanakan sehari setelahnya.

Tanggal 19 Oktober 1945, pukul 07.45, tentara Sekutu tiba di Semarang dengan menggunakan kapal H.M.S. Gregori. Dipimpin oleh Jendral Bethel (?), pasukan yang sebagian besar terdiri dari tentara Gurkha itu bertugas untuk menghentikan pertempuran antara Indonesia-Jepang. Sehari kemudian, tanggal 20 Oktober 1945, Mr. Wongsonegoro berunding dengan Jendral Bethel. Hasil perundingan itu

adalah kesepakatan bahwa Pemerintahan Daerah Semarang akan menyediakan beras untuk kebutuhan logistik Sekutu. Di lain sisi, Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, secara khusus di Semarang, selama menjalankan tugasnya.

Dua hari kemudian, pertempuran dengan Sekutu meletus. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Indonesia menyingkir keluar kota. Sejak saat itu pula, Semarang mengalami kekacauan sekali lagi. Kekacauan itu terutama dikarenaka polisi Indonesia berantakan dan pasukan Inggris tidak dapat menjaga keamanan. Rosihan Anwar melaporkan bahwa perampokan merajalela dan kekacauan semakin menjadi-jadi. Perampokan yang terjadi di Semarang relatif tersistem. Perampokan terutama ditujukan kepada berbagai kantor milik pemerintah Indonesia. Kantor Kejaksaan, Pengadulan Tinggi, Kemakmuran, Polisi, serta Listrik dan Gas adalah kantor milik pemerintah Indonesia yang dirampok. Kantor berita, seperti surat kabar *Warta Indonesia* pun dirampok dan gudang-gudang di sekitar stasiun Tawang pun tidak karuan[87].

Seiring dengan pemberlakuan pemerintahan jajahan di Semarang, ada empat bendera yang berkibar; Jepang, Inggris, Belanda, dan Tiongkok. Dengan demikian, bendera Indonesia dilarang. Di samping pelarangan bendera, penduduk yang di dalam kota pun tidak diperbolehkan keluar. Sekitar kota dikepung dengan *landmijnen* dan mitraliur yang siap membinasakan penduduk. Di samping itu, penduduk pun dipaksa menjadi romusha di pelabuhan Tanjung Mas dan kehidupan mereka sama sekali tidak diurus. Terlebih soal makanan[88].

Masih terkait dengan kelaparan, penduduk Semarang yang berjumlah 21.000 orang kekurangan air dan menderita kelaparan. Di satu sisi, kelaparan itu terutama karena pasukan Republik Indonesia memblokade Semarang. Di lain sisi, daerah-daerah di sekitarnya pun menolak mengirimkan beras selama Inggris masih di Semarang[89]. Gambaran penderitaan Semarang dilaporkan pula oleh Rosihan Anwar. Dalam kunjungannya ke pelabuhan Tanjung Mas, ia menemukan ada 271 orang Indonesia yang ditawan. Mereka rata-rata diculik dari kampung-kampung di Semarang atau sengaja ditangkap dengan tuduhan pemberontak.

Kami masuk ke dalam sebuah gudang yang atap dindingnya terbuat dari seng. Panas hawanya di dalam. Dalam ruangan yang sempit kami lihat orang-orang Indonesia, kebanyakan pemuda. Mereka berdiri

menyahut waktu kami memberi salam. "Tetap merdeka, Bung, 70 juta", ujar mereka[90].

Rosihan Anwar pun menulis bahwa di antara mereka banyak yang terbaring karena malaria maupun disentri. Selain itu, mereka sudah tidak mandi selama 50 hari, makan hanya untuk bertahan hidup, serta sering dipukul dan ditampar oleh serdadu Jepang.

Situasi dan kondisi di Semarang yang penuh dengan kekejaman dan kebengisan disebut *Kedaulatan Rakjat* seperti neraka dunia. Hampir setiap hari tentara Jepang dan Gurkha membunuh, merampok, dan merampas harta benda penduduk. Di samping itu, makanan pun sangat sulit diperoleh, sangat mahal, serta langka. Hal itu dikarenakan pedagang-pedagang yang berusaha menyelundupkan makanan selalu dihadang oleh tentara Jepang serta Gurkha[91].

Kondisi kota Semarang pun relatif sepi, terutama di malam hari. Pintu-pintu penduduk umumnya sudah tertutup pada pukul 07.00 malam. Di samping itu, banyak wanita yang diperkosa dan rumah-rumah penduduk berukuran besar dibakar atau diambilalih tentara Jepang dan Gurkha.

Keadaan dalam kota oemoemnja sepi, lebih2 di waktoe malam ketjoeali roemah2 pendoedoek Tiong. Rata2 djam toedjoeh sore pendodoek soedah menoetoep pintoe roemah-roemah karena chawatir akan serboean tamoe2 Gurkha dan Djepang...Di kampoeng2 tidak sedikit kaoem wanita jang djadi korban perboetan mesoem jang dilakoekan dengan paksa dan perkosa...Banjak roemah2 besar jang didiami oleh keloearga Indonesia dibakar oleh serdadoe itoe ataoe...ditempati oleh Nica dan kaki tangannja[92].

Masih mengenai penderitaan rakyat, Radio Pemberontakan Poesat Djawa Tengah mengimbau rakyat Semarang untuk menggandakan perlawanan terhadap musuh, karena melawan atau tidak melawan musuh akan membinasakan mereka. Di samping itu, mereka telah dijadikan tameng oleh musuh untuk melawan bangsanya sendiri (Indonesia). Radio pun menyerukan supaya rakyat Semarang mengiklaskan hidup mereka. Pasalnya, "rakyat yang melakukan

pemberontakan sekarang seluruhnya lebih suka melihat Semarang hancur seluruhnya daripada melihat Inggris ada di sana"[93].

4.17. Pekalongan

Penyebarluasan berita proklamasi di karesidenan Pekalongan memunculkan berbagai macam reaksi, salah satunya ialah sentimen rasial yang ditujukan terhadap orang-orang Tionghoa. Sentimen itu bisa jadi karena lupa atau ketidaktahuan. Sebagai contoh, ada seorang Tionghoa di Tegal (?) yang dicambuk sampai pingsan karena lupa mengucapkan salam "merdeka" ketika melewati pos penjagaan. Ada pula yang tidak tahu menggunakan galah pengganti tiang bendera untuk memetik mangga[94].

Selain memunculkan sentimen rasial, penerimaan berita proklamasi dan tindakan pengibaran bendera menimbulkan pertentangan antara kelompok nasionalis dengan pangreh praja. Walikota Tegal, misalnya, hanya mengizinkan pengibaran bendera merah putih sebagaimana aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud ialah hinomaru di sebelah kanan dan merah putih di sebelah kiri. Kadang-kadang, pangreh praja melarang pengibaran kedua bendera tersebut[95].

Ketidakpastian tentang pengibaran bendera itu menyulut kebingungan dan kemarahan kelompok nasionalis di Tegal. Mereka menuntut penjelasan walikota. Penjelasan itu baru diberikan tanggal 11 September 1945 pukul 08.00 di Gedung Gereja Katolik di Keraton Lor. Dalam acara tersebut, walikota Tegal, Tuan Sungeb, yang datang terlambat 40 menit, menyampaikan bahwa ia belum menerima instruksi resmi tentang kemerdekaan. Lebih lagi, kata Tuan Sungeb, *Kanpo* (lembaran resmi pemerintah) pun tidak menyebut proklamasi. Mempercayai berita-berita di luar kedua sumber tersebut, menurut Tuan Sungeb, berbahaya. Belum selesai memberikan pernyataan, Kadarisman, anggota KNI, memotongnya. Menurut Kadarisman, "kemerdekaan bukan seperti orang tua yang memberikan permen kepada anaknya yang merengek-rengek. Kemerdekaan datang dari bangsa sendiri, bukan dari perintah resmi Jepang".[96]

Sementara itu, di kabupaten Pekalongan, tersebarnya berita proklamasi mendorong pemuda di sana beramai-ramai menyebarkan poster "merdeka atau mati" serta mengibarkan bendera. Di kantor karesidenan, pengibaran bendera itu menyulut ketegangan dengan

Jepang dan menuai protes baik dari penguasa Jepang maupun pangreh praja di sana. Untuk mencegah pertumpahan darah, baik bendera merah putih maupun hinomaru dilarang dikibarkan di sana.

Masih di Pekalongan, proklamasi kemerdekaan menumbuhkan sentimen anti-Jepang. Sentimen itu semakin memuncak ketika Kenpeitai menolak menyerahkan senjata dan terus melakukan pameran senjata. Kondisi ini membuat situasi semakin memanas. untuk meredamkannya, pada tanggal 4 Otober 1945, di markas Kenpeitai, Kebon Rojo, diadakan perundingan antara Residen Pekalongan dengan pimpinan kenpeitai.

Saat perundingan sedang berlangsung, kenpeitai menembaki rakyat yang menyaksikan perundingan itu. Situasi menjadi tidak terkendali. Sujono, salah seorang yang berada di sana menuturkan bahwa bersamaan dengan bunyi tembakan, ia melihat seorang pemuda berusaha mengibarkan bendera merah putih. Ada pula pemuda, berdarah di kepalanya, naik ke atap gedung kenpeitai membawa minyak tanah hendak membakarnya. Sementara itu, Kenpeitai terus menembak tanpa tujuan.

Informasi tambahan diperoleh dari Soemangku, saksi mata lain dalam peristiwa tersebut. Soemangku yang kala itu tercatat sebagai pemuda Sampang, Pekalongan, dalam surat pernyataannya menuturkan bahwa ia bersama dengan teman-temannya sengaja datang ke markas Kenpeitei sejak pagi untuk melihat perundingan antara Indonesia dengan Jepang. Ketika hari sudah siang dan bedug masjid mulai berbunyi, perundingan pun belum selesai. Rakyat yang menonton pun mulai gelisah.

Suasana panas sampai akhirnya terdengar teriakan "allahu akbar...merdeka!"...suara gemuruh dan sahut-sahutan antara allahu akbar, suara kentongan langgar, bedug masjid, tiang listik, dan lain-lain bercampur dengan tembakan mitraliyur Jepang, suasana berubah menjadi medan pertempuran[97].

Di samping suara-suara tersebut, dalam insiden yang 'memakan' 49 orang itu—37 tewas, 12 luka-luka— terdengar pula suara serbu, maju terus, aduh-aduh, serta tolong. Hal ini dituturkan pula oleh Meriati (Merry Hoegeng) yang ikut memberikan pertolongan medis dalam insiden tersebut. Menurutnya, kondisi korban di sana

menyedihkan, banyak yang terkena luka tusuk, ada pula yang disatukan dalam satu bambu menjadi satu; mereka rata-rata tertembak di dada. Tidak hanya itu, ia pun melihat ada suara memanggil di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan.

Tiba-tiba salah satu mayat itu berkata, "tolonglah saya". Kakinya telah ditembak dan telah terkapar sepanjang siang di bawah terik matahari. Ia berkata, "saya sudah mati seandainya hujan tidak turun semalam"[98].

Di karesidenan Pekalongan, kecuali kabupaten Pekalongan, proklamasi kemerdekaan Indonesia menimbulkan berbagai aksi pemecatan pangreh praja yang dianggap koruptor dan tidak mencerminkan semangat nasionalis. Tidak hanya dipecat, pejabat-pejabat yang dianggap korupsi itu pun di-*dombreng*. Mengutip Anton E. Lucas, dombreng dapat diartikan sebagai pengusiran seorang majikan oleh para pelayanannya. Tindakan ini biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang mendatangi pejabat yang dianggap korupsi, diseret, dan di pertontonkan di depan umum. Sering kali, masih menurut Anton E. Lucas, sang koruptor dan keluarganya dikalungi beras atau padi, dan diarak dengan bunyi *breng dong breng* yang berasal dari kaleng kosong yang dipukul-pukul. Peristiwa yang biasa dilakukan siang hari itu selanjutnya dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah[99].

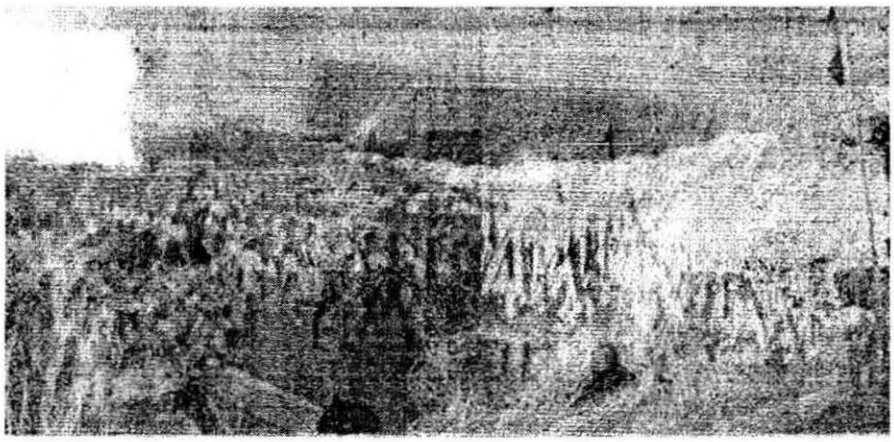
4.18. Ulang Bulan Kemerdekaan

Hal menarik lainnya terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah peringatan ulang bulan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini biasa pula disebut dengan Rapat Raksasa atau Rapat Samudera. Perayaan pertama ulang bulan kemerdekaan Indonesia terlihat dari Rapat Raksasa yang diselenggarakan di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu dilakukan *defile* oleh barisan rakyat yang bersenjatakan senapan, granggang, tombak, golok, dan sebagaimya. Acara selanjutnya diteruskan dengan *defile* Barisan Polisi Kota Yogyakarta. Mereka terlihat semakin gagah dengan menggunakan sepeda motor sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil. Setelah itu, rapat dibuka dengan pengibaran bendera

setengah tiang untuk menghormati korban Pertempuran Kota Baru, menyanyikan lagu kebangsaan, dan hormat bendera sebanyak tiga kali.

Gambar 18
Perayaan Perdana Kemerdekaan di Yogyakarta



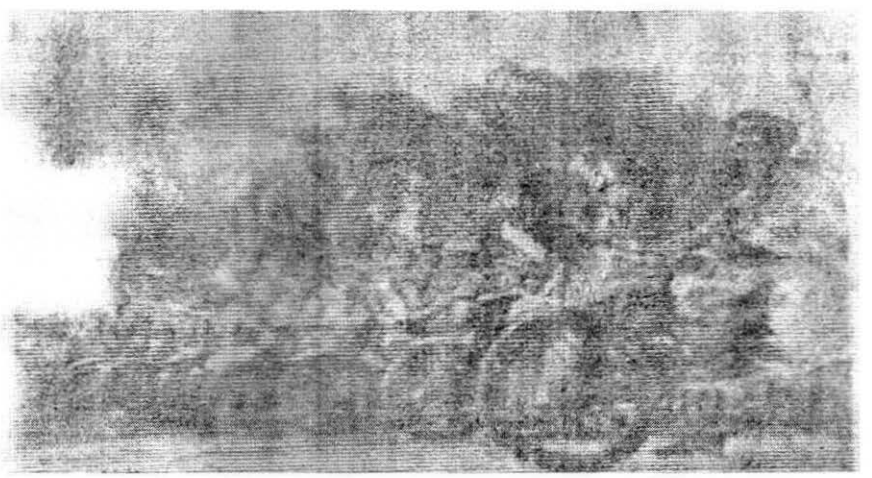
Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 18 Oktober 1945

Sementara itu, perayaan ulang bulan kemerdekaan yang kedua disambut di Yogyakarta. Pada tangga 17 Oktober 1945, di Alun-alun Utara diselenggarakan rapat raksasa yang dihadiri oleh Sultan Hamengku Buwono IX, Pakualam VIII, pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI), pembesar polisi, orang-orang terkemuka di Yogyakarta. Rapat mula-mula dibuka oleh Moh. Saleh, ketua KNI, Hamengku Buwono, dan Pakualam. Dalam upacara kemerdekaan yang diselenggarakan pertama kalinya di Yogyakarta tersebut, Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa peringatan ulang bulan kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah peringatan jiwa-jiwa pahlawan sekaligus menekankan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap bangsa.

Ta' ada djalan lain untuk memperingati djasa pahlawan-pahlawan kita itoe daripada meneroeskan perdjoeangan oentoek tetap menoentoet kemerdekaannja pada doenia internasional. Kemerdekaan adalah hak tiap bangsa[100].

Selain ketiga orang terkemuka tersebut, nyonya Imam Moeghni, salah seorang ibu yang kehilangan puteranya berseru supaya kaum ibu secara khusus di Yogyakarta jangan merintangi kemauan anak-anak mereka untuk turut berjuang. Menguatkan pidato nyonya Moeghni, tuan Moeridan, wakil Badan Keamanan Rakyat (BKR), juga menyampaikan pidato tentang tanggungjawab rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hidup mati berada di tangan Tuhan.

Gambar 19
Defile Polisi Yogyakarta dalam Perayaan Perdana Kemerdekaan



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 18 Oktober 1945

Setelah pidato tuan Soedarsono (kepala polisi), Atmodarminto enyampaikan beberapa pengumuman penting. Rapat raksasa selanjutnya ditutup dengan ucapan terimakasih oleh Moh. Saleh, menyanyi lagu kebangsaan, dan pekik merdeka tiga kali.

Peringatan ulang bulang kemerdekaan Indonesia pertama dirayakan pula di Surakarta. Sama seperti di Yogyakarta, perayaan itu disebut sebagai Rapat Raksasa, dengan penyelenggaranya adalah KNI dan Angkatan Muda Indonesia (AMI). Pada intinya, rapat tersebut memberi penerangan bahwa pendirian Republik Indonesia sekaligus

memperingati pahlawan-pahlawan kemerdekaan dan menyempurnakan apa yang sesuai untuk menegakkan Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat[101].

Upacara kemerdekaan diselenggarakan pula oleh Mangkunegara VIII. Dalam upacara tersebut, R.M. Amin Singgih mula-mula menerangkan sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan. Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan mosi pegawai di Mangkunegaran.[102]

1. Sekalian pegawai Mangkunegaran, berjanji selalu setia terhadap Sri Paduka Kanjeng Mangkunegara VIII beserta Pemerintah Negeri Mangkunegaran, dan berjanji, setiap waktu bersedia menurut dan mengerjakan semua anjuran dan perintah Sri Paduka Kanjeng Mangkunegaran VIII beserta Pemerintah Negeri Mangkunegaran.
2. Sekalian pegawai Negeri Mangkunegaran, berjanji yang dikuatkan oleh rasa tanggungjawab akan memelihara dan mempertahankan tetapnya kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Sekalian pegawai Negari Mangkunegaran berjanji, bersikap dan berjejak seksama sebagai warga Negara Republik Indonesia dan menentang segala kekuasaan asimg yang hendak memerintah dan menjajah Indonesia Merdeka Tanah Air Kita.

Ulang bulan ketiga diselenggarakan tanggal 17 November 1945. Di Yogyakarta, upacara peringatan hari ulang bulan kemerdekaan Desember dirayakan di masing-masing kemantren. Selain itu, acara dilanjutkan dengan gerak jalan yang dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat menuju ke Tegal Rejo.

Sementara di Kendal, perayaan proklamasi pertama diselenggarakan di Alun-alun dan diakhiri dengan gerakan pergantian pangreh praja. Dipimpin oleh Soekarmo (wakil KNI dan ketua BKR Kendal) dan Hutapea (teknisi pabrik gula Cepiring), mereka mendobrak pintu kabupaten, menurunkan bupati Kendal, R. Koesoemohoedojo, dari jabatannya, serta menyelenggarakan pemilihan bupati baru. Hasilnya, Soekarmo diangkat menjadi bupati baru. Dan begitu terpilih, Soekarmo segera melakukan dua langkah penting. Pertama, mengirim surat kepada presiden Republik Indonesia dan gubernur Jawa Tengah tentang pergantian pangreh praja di Kendal. Kedua, mengunjungi daerah-daerah di wilayah Kendal untuk memberi penjelasan kepada rakyat tentang pergantian bupati.[103]

Beralih ke Magelang, hari ulang bulang kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan tanggal 18 November 1945. Rapat raksasa perayaan di pusatkan di Alun-alun Magelang. Perayaan itu sekaligus menjadi ungkapan syukur atas kemenangan rakyat Magelang mengusir Nica. Dalam upacara yang dimulai sejak pagi (?) itu pula, salah seorang wakil pemuda Magelang (?) dengan lantang berpidato, "Inilah hasil perdjoeangan pemoeda2 Magelang jang dianggap betina oleh pemoeda2 loear Magelang"[104].

Sementara itu, perayaan ulang bulan kemerdekaan tanggal 17 Desember 1945 dirayakan secara nasional dipusatkan di Solo. Bertempat di Alun-alun pukul 04.00 sore, perayaan itu diikuti oleh rakyat yang membawa tulisan-tulisan berbunyi "Basmilah mata2 nica", "Laskar Rakyat bertempoer", serta "moesoeh hantjur". Selanjutnya, perayaan dihadiri pula presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, perdana menteri, susuhunan, Mangkunegara serta bangsawan-bangsawan baik Kasunanan maupun Mangkunegaran. Dalam kesempatan itu pula, perdana menteri menganjurkan supaya rakyat Indonesia mengokohkan persatuan. Sementara presiden membangkitan rakyat dengan menyerukan semangat "sekali merdeka akan tetap merdeka".

Di Yogyakarta, upacara peringatan hari ulang bulan kemerdekaan Desember dirayakan di masing-masing Kemantren. Berbagai sambutan dalam upacara bendera di Yogyakarta ditujukan untuk memberi penjelasan tentang arti kemerdekaan sekaligus menebalkan semangan perjuangan dalam membela dan menegakkan Republik Indonesia. Selain upacara bendera, masih mengutip *Kedaulatan Rakjat*, peringatan hari ulang bulan kemerdekaan dilanjutkan dengan gerak jalan yang dilakukan oleh Tentara Keamanan rakyat menuju ke Tegal Rejo[105].

Masih mengenai perayaan ulang bulan kemerdekaan 17 Desember 1945, di pedesaan Purworejo peristiwa itu dijadikan sebagai kesempatan untuk mengakhiri *pemerintahan debelan*. *Pemerintahan debelan* merupakan istilah setempat untuk menyebut penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa yang baru—seringkali dengan nama baru. Desa-desa yang tadinya dipaksa bergabung sejak tahun 1925, sebagaimana diatur dalam kebijakan reorganisasi desa, melakukan protes dan menuntut kembali ke bentuk pemerintahan semula. Dampak dari peristiwa tersebut adalah kemunculan lurah

patangpuluh dina (lurah empat puluh hari) sebagai lurah sementara, menunggu penetapan lurah baru pada Januari 1946.[106]

4.19. Potret Kehidupan Sehari-hari

Penyebarluasan berita proklamasi di Jawa Tengah tidak melulu berkaitan dengan sambutan gegap gempita, semangat perjuangan, maupun konflik. Penyebarluasan berita proklamasi tidak juga berisi narasi-narasi tentang ketegangan dan pertempuran. Tulisan di bawah ini mengulas berbagai sekrup keseharian masa itu.

4.20. Hari Raya

Idul Fitri dalam suasana kemerdekaan pertama Indonesia dirayakan 22 hari setelah proklamasi atau tanggal 8 September 1945. Hari-hari menjelang Idul Fitri disibukkan dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekitarnya. Di Wonosobo, misalnya, penduduk membersihkan masjid dan rumah masing-masing. Tidak hanya itu, mereka mengapur dinding dan pagar rumahnya serta pagar-pagar kampung. Terlepas kebiasaan rutin menjelang hari raya, ada kemungkinan pula bahwa hal itu menjadi bagian kegembiraan proklamasi kermerdekaan[107].

Sementara itu, berdasarkan rekaman-rekaman film yang ditelitinya, Bambang Purwanto menjelaskan pula bahwa hari raya itu penuh dengan keceriaan. Penduduk di perkotaan berbondong-bondong pergi ke masjid serta menikmati kue dan ketupat. Dalam suasana itu pula, ada kemungkinan penduduk bersalam-salaman mengucapkan selamat Idul Fitri sambil memekikkan kata "merdeka".

Masih terkait dengan perayaan hari Idul Fitri pertama di era kemerdekaan, sebuah artikel menarik dapat disimak dalam rubrik Taman Putera Sinar Baru. Di sana, mbak Ijah, sang pengasuh rubrik, mengajak anak-anak untuk memaknai Idul Fitri pertama mereka.

Didalam merajakan Hari Lebaran Nanti, soesana agak berobah. Kita akan merajakan Hari Besar itoe boekan didalam soesana perang, melainkan soesana damai dan tenang. Lagi poela dalam soesana merdeka. Tetapi djanganlah adik-adik sekalian meminta ini itoe karena peperangan soedah selesai....Hari Lebaran tahoen ini kita rajakan dalam soesana jg tenang, sambil bersjoekoer kepada jang Maha Esa[108].

Selain Idul Fitri, Musim juga mempunyai hari raya Idul Adha. Di Yogyakarta, Sholat hari raya Idul Adha diselenggaraakan di lapangan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Sholat yang dimulai pada pukul 7.00 dipimpin oleh H. Wasoel Djafar. Dalam khotbahnya, ia menekankan perlunya perang Sabillilah untuk mempertahankan kemerdekaan.

Kambing dan binatang lainnja, dengan ichlas hati menjerah disembelih oentoeg memenoehi perintah Agama. Kita sekalian manoesia, adalah oemat pilihan daripada makhloek Toehan, semestinja haroes lebih menjerah dan berbakti dalam memenoehi perintah2 Agama. Kini kehormatan kita, sebagai bangsa merdeka, telah dilanggar oleh moesoeh kita. Kehormatan Negara berarti poela kehormatan Agama Islam. Boektikanlah pembelaan itoe dengan njata[109].

Sementara itu, hewan korban yang disembelih ada 462 ekor,terdiri dari 450 kambing dan 12 lembu. Setelah disembelih, daging korban selanjutnya dibagi-bagikan. Beberapa tempat yang mendapat prioritas pembagian di antaranya adalah rumah yatim, miskin, wiloso-prodjo, Muhammadiyah, serta penjara. Tidak ketinggalan, Tentara Keamanan Rakyat pun mendapat bagian daging korban[110].

Masih terkait dengan perayaan Idul Adha pertama pasca-kemerdekaan, sebuah slogan menarik dimuat di *Kedaulatan Rakjat*. Slogan itu berbunyi, " biasa menjembelih kambing, siap menjembelih moesoeh". Dengan kata lain, perayaan keagamaan pun dijadikan sebagai motivasi untuk semakin mengobarkan semangat perjuangan.

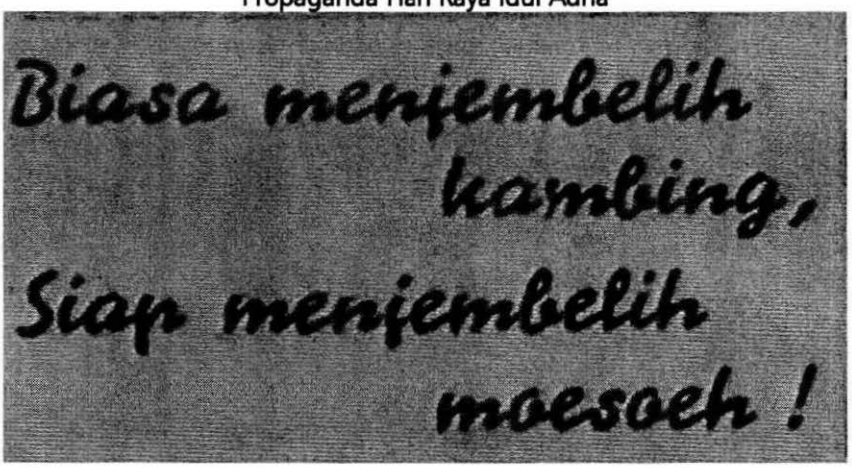
Sementara itu, Peringatan tahun baru Islam bertepatan dengan tanggal 6 Desember 1945. Dengan demikian, hari Asyura atau 10 Muharram diperingati pada tanggal 14 dan 15 Desember 1945. Sehubungan dengan itu, *Antara* mengumumkan supaya penduduk Indonesia beragama Islam melakukan puasa Sunah supaya dapat menyempurnakan kemerdekaan dan terhindar dari berbagai bencana.

Alangkah tepatnja, pada tahoen 1365 ini, berhoeboeng dengan terlepasnja kita bangsa Indonesia dari pada pendjadjahan Fir'aoen kedoea melakoekan ibadah poeasa soennat pada hari terseboet, mengikoeti djedjaknja Nabi Besar Moehammad SAW dengan memohon kehaderat Toehan jang maha bidjaksana, agar disempoernakan

kemerdekaan tanah air Indonesia ini dengan kemerdekaan jang abadi, serta lepaslah kita dari pada sekalian bentjana jang mengantjam Negara kita sekarang ini.

Lebih lanjut, *Antara* mengajak umat Islam di Indonesia untuk berpuasa. Ajakan itu antara lain tercermin dari kalimat seperti "umat Islam marilah beramai-ramai berpoeasa".

Gambar 20
Propaganda Hari Raya Idul Adha



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 14 November 1945

Masih mengenai tahun baru Islam dan Asyura, Masjumi Solo pun memperingatinya dengan menyelenggarakan sholat hajad dan Isa berjamaah di Masjid Mangkunegaran. Melalui aktivitas itu, mereka berharap tahun baru Islam dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi segenap umat Islam dan bangsa Indonesia.[111] Di samping itu, ada pula laporan tentang mbok Soebardjo. Perempuan tidak mampu dari desa Kebonan, Karanggede itu menyumbang makanan seharga ratusan rupiah untuk para laskar yang sedang berjuang di tahun baru Islam[112].

Terakhir terkait dengan hari raya natal. Tidak ada informasi jelas tentang natal pertama kemerdekaan yang dimuat di Surat kabar. Satu-satunya informasi ialah berita *Kedaulatan Rakjat* yang menyebutkan bahwa perayaan Natal untuk tawanan diizinkan dirayakan hanya selama 45 menit, terhitung dari pukul 6.15-07.00 pagi[113].

4.21. Tahun Baru

Perayan tahun baru di masa perang dilaporkan secara menarik. *Pertama*, semua orang diperbolehkan merayakan perayaan tahun baru. *Kedua*, terkait dengan jam malam, polisi tentara Yogyakarta mengeluarkan peraturan bahwa orang hanya diperbolehkan keluar malam tanggal 31 Desember 1945 pada pukul 16.00-19.00. Adapun tanggal 1 Januari 1946 diperbolehkan keluar dari 01.00-19.00. Lebih lanjut, semua perayaan dengan pembicaraan harus melapor kepada polisi tentara Yogyakarta selambat-lambatnya satu hari sebelum perayaan. Sementara menerima tamu tetap diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan[114].

4.22. Menonton Bioskop dan Pertunjukkan

Meskipun di masa perang, menonton film di bioskop ataupun menyaksikan pertunjukkan sandiwara umum dijumpai di pusat-pusat kota seperti Yogyakarta. Di sana, film dan berbagai pertunjukkan tidak hanya menjadi hiburan ataupun gaya hidup melainkan juga menjadi cara untuk mengumpulkan dana. Dana yang terkumpul dari tiket penjulan umumnya disumbangkan kepada Fonds Kemerdekaan untuk disalurkan. Di samping itu, ada pula yang digunakan untuk mengusahakan kebutuhan logistik pasukan Indonesia di front pertempuran Jawa Tengah.

Gambar 21
Contoh Pemberitahuan Pertunjukkan Amal



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 16 dan 18 Desember 1945

4.23. Kelaskaran Unik

Di Surakarta ada Barisan Kere. Barisan yang terdiri dari pelajar-pelajar Sekolah Menengah Tinggi Solo tersebut sengaja berpakaian koyak dan terkenal selalu menyerbu kedudukan musuh paling depan di berbagai sektor pertempuran Jawa Tengah.

> Barisan Kere sedikitpun tidak menghendaki kemewahan, tapi mereka lebih soeka merasakan bagaimana sebetoelnja penderitaan kaoem kere yang bergelandangan di sepanjang jalan. Hal ini menoendjoekkan bahwa kesanggoepan rakjat Indonesia oentoek berjuang, tidak ada batasnya. Meskipoen seloeroeh rakjat terpaksa menjadi kere, terpaksa berpakaian kojak2 karena akibat peperangan, toh pemberontakan masih akan diteroeskan kalaoe semoea ganggoean kemerdekaan belum pergi dari Indonesia[115].

Barisan lain yang menarik ialah barisan yang anggotanya narapidana hukuman seumur hidup dari Sragen. Di samping itu, ada pula Barisan Jenggot. Laskar yang terdiri dari orang tua ini dibentuk di Colomadu pada tanggal 14 November 1945.

4,24, Berbagai Kongres

Di samping hari raya yang telah dijelaskan di atas, periode yang menjadi pembahasan ini juga menyaksikan beberapa kegiatan kongres, salah satunya asdalah Kongres Umat Islam yang digelar di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945. Keputusan penting kongres ini antara lain ialah menolak penjajahan dan kebulatan tekat untuk berjihat fi sabilillah.

Berikutnya adalah Kongres Tani, yang diselenggarakan tanggal 7-9 November 1945 di Surakarta. Selain membentuk Partai Buruh, kongres tersebut menghasilkan enam keputusan *Pertama*, menuntut Departemen Sosial Negara supaya cabang-cabang sosial di tiap karesidenan diserahkan kepada Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). *Kedua*, Menuntut pemerintah supaya distribusi bahan makanan dan

pakaian diserahkan kepada BBI. *Ketiga*, perusahaan yang jatuh ke tangan Indonesia tetap menjadi milik negara namun dikuasai oleh buruhnya. *Keempat*, mendirikan bank buruh. *Kelima*, membentuk Laskar Boeroeh untuk mempertahankan kedudukan perusahaan-perusahaan sebagai cabang pertahanan negara. *Terakhir*, mengajukan protes terhadap negara-negara sekutu atas perbuatan Inggris di Indonesia.

Kongres Pemuda juga digelar di Yogyakarta tanggal 10-11 November 1945. Mengutip *Kedaulatan Rakjat*, kongres itu dihadiri sekitar dua ribu pemuda yang tergabung dalam dua puluh tiga organisasi kepemudaan. Selain meleburkan kedua puluh tiga organisasi pemuda menjadi satu organisasi bernama Badan Congres Pemoeda Repoeblik Indonesia, kongres tersebut menghasilkan pula berbagai keputusan. Salah satunya ialah protes kepada dunia terkait pengeboman dan penembakan melalui laut, udara, dan darat oleh Inggris di Surabaya. Sementara itu, suasana mengharukan terjadi ketika pemuda Surabaya berpamitan meninggalkan kongres lebih awal.

Pekik merdeka menggemoeroeh dalam gedoeng persidangan sebagai tanda perpisahan dengan pemoeda2 Djawa Timoer jang akan berangkat pada saat itoe djoega ke Soerabaja. Mereka berjoeang membela kehormatan bangsa[116].

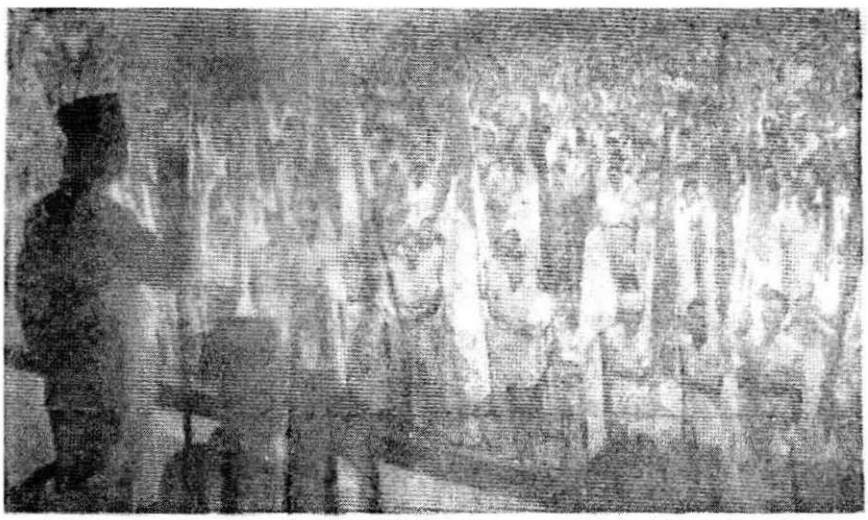
Keharuan Kongres Pemuda dilukiskan pula oleh Rosihan Anwar. Wartawan *Merdeka* itu mengisahkan bahwa kongres yang semula membahas kesetiaan Parada Harahap terhadap Republik Indonesia segera berubah topik begitu ada kabar kabar interlokal dari Surabaya.

> Soemarsono, seorang pemimpin pemuda dari Jawa Timur mengumumkan bahwa pemuda-pemuda pejuang dari Jawa Timur harus segera kembali ke front Surabaya. Maka berdirilah pemuda-pemuda tersebut dari tempat duduk mereka, dan secara demonstratif berbaris keluar... saya duduk di atas panggung Societet Mataram di pintu keluarkan... "selamat berjuang", saya ucapkan...Suasana haru meliputi...Bilakah akan berjumpa dengan mereka? Bagaimana nasib mereka?[117]

Kongres Pemuda pertama pascakemerdekaan itu ditutup dengan rapat raksasa di Alun-alun Utara. Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemuda dan rakyat Yogyakarta, Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, Sukarno, Mohammad Hatta, para menteri, keluarga keraton, dan orang-orang terkemuka pun menghadiri rapat raksasa itu. Selama rapat, seiring dengan pidato dari Legiono (perwakilan Gerpi), perwakilan pemuda Surabaya, Sukarno, Hamengku Buwono IX, dan Paku Alam VIII, ada pesawat Indonesia terbang rendah dan menyebarkan selebaran berbunyi INDONESIA, INDONESIA TANAH AIRKOE, AKOE SANGGOEP MEMBELAMOE, SAMPAI TEWAS DJIWAKOE. Rapat raksasa kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan keliling kota.

Gambar 22

Rapat Raksasa Pemuda



Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 11 November 1945

Terakhir adalah Kongres Wanita, yang pertama pascakemerdekaan diselenggarakan di Klaten tanggal 17-18 Desember 1945. Selain menghasilkan keputusan terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai organisasi wanita dalam kondisi peperangan, kongres tersebut ditandai dengan pembentukan organisasi baru. Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara

Indonesia (Wani) yang merasa memiliki kesamaan asas dan tujuan terkait dengan pembangunan perempuan di era kemerdekaan, di akhir konggres, berfusi dan berikrar menjadi satu organisasi, yakni Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)[118].

Perwani adalah wajah baru organisasi perempuan Indonesia setelah Fujinkai dibubarkan. Tujuannya, menyediakan dan mengerahkan tenaga perempuan guna membantu, memelihara, serta mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, Perwani memiliki empat tugas utama; mengucapkan salam dengan pekik merdeka, mengibarkan bendera sang Merah-Putih, memakai lencana Merah Putih, serta membantu Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah. Sementara itu, Wani adalah organisasi perempuan yang didirikan oleh Suwarni Priggodigdo tanggal 25 September 1945, atas instruksi Sukarno. Organisasi ini bergerak dalam penyelenggaraan dapur umum dan tugas-tugas sosial lainnya, seperti menolong bekas pejuang, memberi pakaian kepada bekas pejuang, dan distribusi bahan pangan.

4.25.Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah memunculkan berbagai realitas sosial menarik. Khusus di Jawa Tengah, realitas sosial yang paling menarik adalah respon cepat akan perwujudan gagasan (menjadi) Indonesia. Hal ini sebagaimana pula ditulis oleh R.E. Elson, "proklamasi menjadi tanda...terutama di seantero Jawa Tengah...kepopuleran dan pengeramatan ciri utama gagasan Indonesia: bahwa Indonesia itu ada, berwujud republik, dan merdeka"[119].

Di samping menggambarkan proses menjadi Indonesia, penyebarluasan berita proklamasi di Jawa Tengah menunjukkan tiga realitas utama. *Pertama*, kemudahan jaringan transportasi dan peran media massa dalam mempercepat penyebarluasan berita proklamasi. *Kedua*, ada kecenderungan bahwa Jawa Tengah terlihat siap merespon proklamasi kemerdekaan. Boleh jadi, Deklarasi Koiso telah tersosialisasi dan mendorong upaya persiapan kemerdekaan di sana. *Ketiga*, proklamasi kemerdekaan dan bayangan menjadi bagian dari Indonesia menyebabkan perubahan sosial di berbagai wilayah di provinsi ini. []

Ucapan Terima kasih;

Tulisan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan masukan banyak pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Bambang Purwanto, Dr. Sri Margana, serta Dr. Abdul Wahid yang telah menginspirasi penulis untuk menulis sejarah perang dengan perspektif 'orang biasa'. Tidak ketinggalan, terimakasih pula saya sampaikan kepada Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Dr. Muklis Paeni, serta Prof. Dr. Susanto Zuhdi atas berbagai saran dan kritik selama proses penulisan.

Catatan Akhir :

[1] Lihat Rosihan Anwar. *Kisah-Kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas, 2015. hlm: 115.

[2] Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah seperti sekarang terbentuk 4 Juli 1950 melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1950.

[3] Sebelumnya bernama Domei dan bertempat di bangunan yang sekarang menjadi Jogja Library Center lantai 2, kantor berita ini berlokasi di jalan Ngabean. Kepala radionya bernama Warsono dan dibantu oleh Soeparto, Soetjipto, Abdullah Umar, dan Umar Sanusi. Sementara itu, juru wartanya ialah Soetomo, Soegijono, dan Abdul Karim Daeng Patombong. Lihat Rinafika Dianasari. *Peranan RRI Stasiun Yogyakarta dalam Menggerakkan Perjuangan di Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hlm: 63.

[4] Lihat Badan Musyawarah Museum. *Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah Museum, 1985. hlm. 48. Bandingkan dengan P.J. Suwarno. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 1994. hlm. 166. Lihat pula Tashadi, dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991. hlm: 55.

[5] Penyebaran berita proklamasi di Yogyakarta tidak lepas pula dari jasa Sumarjo, salah satu anggota Barisan Pelopor Istimewa. Lihat Sudiro. *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978. hlm: 44.

[6] P.J. Suwarno. *loc.cit.*

[7] Informasi ini diperoleh dari perbincangan dengan dua narasumber selama tanggal 4-5 Mei 2015. Kedua narasumber tersebut tidak ingin namanya ditulis.

[8] Lihat "Kawat S.P. Jogjakarta Koo dan S.P. Pakualaman Koo", *Sinar Baru*, 23 Agustus 1945.

[9] Lihat Badan Musyawarah Museum. *loc.cit.* serta Tashadi, dkk. *op.cit.*, hlm: 57.

[10] *Ibid.*

[11] Kedudukan daerah istimewa dalam republik mulanya ditentang oleh Sukarno. Sukarno mengira bahwa Kooti hendak berdiri sendiri sebagai negara dalam republik Indonesia. Namun berkat penjelasan B.P. H. Puruboyo, salah anggota PPKI perwakilan Yogyakarta, ide itu bisa diterima.

[12] Amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dikeluarkan secara terpisah dan tertanggal 28 Poeasa Ehe 1876. Baca Koleksi Pribadi Yurahman dalam R. Wahyu Kartiko Condro. *KNID dan Peranannya di Yogyakarta pada Masa Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1946*. Yogyakarta: Universitas Negeri

Yogyakarta, 2009. hlm: 115-116. Lihat pula Senarai Arsip Paku Alaman VIII nomor arsip 1363 serta 1365.

[13] Tersiarnya kabar proklamasi di Surakarta tidak lepas pula dari jasa Sarwoko, salah seorang anggota Barisan Pelopor Istimewa. Lihat Sudiro. *loc.cit.*

[14] Lihat Suhartinah Sudjono, dkk. *Inventarisasi Sumber Sejarah di Jawa Tengah 1945-1965* Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004. hlm. 279. Bandingkan dengan penuturan Sunarso, hlm: 285.

[15] *Ibid.* hlm: 271.
[16] *Ibid.* hlm: 262.
[17] *Ibid.* hlm: 272.
[18] Lihat gambar 2.
[19] Lihat berita ringkas *Kedaulatan Rakjat* tanggal 6 November 1945 hlm: 2.

[20] Lihat Anton E. Lucas. *One Soul One Struggles: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia.* Yogyakarta: Resist Book, 2004. hlm: 108-109.
[21] Lihat Lidya Dwi Jayanti. *Peristiwa 3 Oktober dalam Revolusi Indonesia.* Yogyakarta: Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. hlm: 80.
[22] Anton E. Lucas. *op.cit.* hlm: 111.

[23] Lihat Wiyono, dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Jawa Tengah.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991. hlm: 46.

[24] *Ibid.*
[25] Abrar Yusra dan Ramadhan K.H. *Hoegeng Polisi: Idaman dan Kenyataan.* Jakarta: Sinar Harapan, 1993. hlm: 123.
[26] Lihat Wijono. *op.cit.* hlm: 48.
[27] *Ibid.* hlm. 49. Bandingkan dengan *Sinar Baru* 20 Agustus 1945 hlm: 2.
[28] Lihat pengantar yang ditulis oleh Parada Harahap dalam *Sinar Baru* 20 Agustus 1945 hlm: 1.
[29] *Ibid.* hlm: 2.

[30] *Ibid.*

[31] Abrar Yusna dan Ramadhan K.H. *op.cit.* hlm: 124 dan 129-130.
[32] Lihat berita "Rapat Pengumuman Indonesia Merdeka" dan "Pengumuman Indonesia Merdeka", *Sinar Baru*, 24 dan 28 Agustus 1945.

[33] Tersiarnya kabar proklamasi di Kedu tidak lepas pula dari jasa Ir. Sakirman, salah seorang anggota Barisan Pelopor Istimewa. Lihat Sudiro. *loc.cit.*

[34] Lihat Darto Harnoko. *Magelang pada Masa Revolusi Phisik Periode 1945-1949.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1984. hlm: 9.

[35] *Ibid.* hlm: 9-10.

[36] *Ibid.* hlm: 10.

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.* hlm: 11.

[39] Wawancara tanggal 3 Mei 2015.

[40] Lihat Sardiman. *Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman.* Yogyakarta: Ombak. hlm: 123.

[41] Lihat Anton E. Lucas. *op.cit.* hlm: 106.

[42] *Ibid.*

[43] Ruben Nalenan. *Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng.* Jakarta: Gunung Agung, 1992.

[44] Sudiro. *loc.cit.*

[45] Lihat "Pengumuman Indonesia Merdeka Disambut Dengan Kesukuran Disana-Sini", *Sinar Baru*, 22 Agustus 1945.

[46] *Ibid.*

[47] Lihat artikel "Menyambut Republik Indonesia", *Sinar Baru*, 24 Agustus 1945.

[48] Imbauan Badan Penerangan tersebut diantaranya dapat disimak dalam pemberitaan Asia Raya. Lihat "Kibarkan Sang Merah Poetih pada Hari Indonesia", 29 Agoestoes", *Asia Raya*, 27 Agoestoes 2605. Simak pula "Menjambut Sidang Pertama Komite Nasional Pusat: Kibarlah Sang Merah Putih dgn serentak sebagai tanda bahwa kita tetap ingin hidup merdeka di tanah-air kita!", *Sinar Baru*, 29 Agustus 1945.

[49] Lihat "Hari Nasional Indonesia: Sambutan riang gembira dimana-mana", *Sinar Baru*, 31 Agustus 1945.

[50] Lihat "Sekitar Hari Indonesia", *Sinar Baru,* 3 September 1945. Imbauan pengibaran bendera Indonesia sejak Hari Indonesia berjalan massif. T.S. Tull, Komandan Udara dari Inggris yang ditugaskan di Jawa Tengah pada pertengahan September 1945, misalnya menuturkan bahwa tidak ada satu pun rumah dan bangunan umum (di Jawa Tengah) yang tidak mempunyai bendera Indonesia. Lihat R.E. Elson. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008. hlm: 175.

[51] Lihat "Kepada Semprot", *Kedaulatan Rakjat*, 11 Desember 1945, hlm: 2.

[52] Bandingkan dengan *Sinar Baru*, 29 Agustus 1945.

[53] Lihat *Kedaulatan Rakjat* tanggal 11 Desember 1945.

[54] Lihat Anton E. Lucas. *op.cit.* hlm: 207-208. Bandingkan dengan Anton E. Lucas, "Sosial Revolution in Pemalang, Central Java, 1945", *Indonesia*, No. 24 (Oct., 1977), hlm: 105, http://www.jstor.org/stable/3350919, diakses 07-10-2015 pukul 08:02WIB.

[55] P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm: 173.

[56] Badan Sensoer berkewajiban menyensor segala macam penerbitan, siaran, percetakan, poster, plakat, semboyan, potret, clices sandiwara, surat-surat dengan perantaraan pos dan kawat serta pembicaraan dengan menggunakan telepon. Lihat Senarai Arsip Paku Alam VIII nomor 1367.
[57] P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm: 174.
[58] *Ibid.*

[59] Titin Yuni Purwati. *Pertempuran Kota Baru Perjuangan Pejuang Yogyakarta Merebut Markas Oshabutai dari Tangan Tentara Pendudukan Jepang 7 Oktober 1945.* Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. Bandingkan P.J. Suwarno. *Ibid.*

[60] *Ibid.*

[61] *Ibid.*

[62] P.J. Suwarno. *Ibid.* hlm: 182.

[63] *Kedaulatan Rakjat*, 9 Oktober 1945.

[64] Pertempuran Kota Baru meninggalkan peristiwa. Enam hari pascapertempuran, misalnya, ada desas desus bahwa Kaigun Kakutai (Kompi AL bagian Udara) yang masih di Maguwo akan bergerak dengan tank lapis baja. Tanggal 14 Oktober pukul 05.00 dilakukan perundingan antara RP Sudarsono dan BPH Bintoro dengan Kaigun Tantyoo Hajino Sosya. Tiga hari kemudian, Polisi Istimewa berhasil mengangkut 15 truk senjata, dengan berat sekitar 25 ton, dari Maguwo serta ratusan peti. Perundingan ini berjalan rahasia dan baru diumumkan dalam rapat akbar di Alun-alun. Sementara 23 Oktober, tentara Jepang di Maguwo dimasukkan ke dalam penjara tanpa perlawanan. Ada 1300 tentara yang ditempatkan di Sekolah Netral Danurejan, Genthan, Grogolan, dan Wirogunan. Lihat P.J. Suwarno. *loc.cit.*

[65] Pengeboman dilakukan dengan pesawat Mosquito dengan membawa 18 buah roket dari lapangan terbang Kemayoran. Komandannya bernama Letnan Jacon B. Hood. Lihat Rosihan Anwar. *op.cit.* hlm: 66-67.

[66] *Kedaulatan Rakjat*, 4 November 1945.

[67] *Ibid.* 8 November 1945.

[68] *Ibid.*

[69] *Kedaulatan Rakjat*, 2 November 1945.

[70] *Ibid.* 21 November 1945.

[71] *Ibid.* 23 November 1945.

[72] *Ibid.* 24 November 1945.

[73] *Ibid.* 25 November 1945

[74] *Ibid.*

[75] *Ibid.* 1 Desember 1945

[76] *Ibid.* 5 dan 6 Desember 1945.

[77] *Ibid.* 13 Desember 1945.

[78] Kenichi Goto. "Peristiwa Semarang dalam Konteks Hubungan Jepang-Indonesia" dalam Sartono Kartodirjo, dkk. *Denyut Nadi Revolusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997. hlm: 157.

[79] Lihat Han Bing Siong. The secret of Mayor Kido: The Battle of Semarang 15-19 October 1945", Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152, 3de Afl. (1996), hlm: 382-428, dipublikasikan oleh KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, http://www.jstor.org/stable/27864775, diakses tanggal 13 September 2015 17:35 WIB.

[80] *Ibid.*

[81] Lihat Moehkardi. *Revolusi Nasional 1945 di Semarang*. Yogyakarta: 2012. hlm: 223.

[82] *Ibid.*

[83] *Ibid.*

[84] Kenichi Goto. *op.cit.* hlm: 155.

[85] *Ibid.* hlm: 169.

[86] Moehkardi. *op.cit.* hlm: 225. Bandingkan dengan Abrar Yusra dan Ramadhan K.H. *op.cit.* hlm: 129-130.

[87] Rosihan Anwar. *op.cit.* hlm: 109.

[88] Lihat "Pemerintahan Djepang berlakoe di Semarang", *Kedaulatan Rakjat*, 26 Desember 1945.

[89] Lihat "*Kedaulatan Rakjat*", 20 Desember 1945".

[90] Rosihan Anwar. *op.cit.* hlm: 111-112.

[91] Lihat "*Kedaulatan Rakjat*", 3 Desember 1945.

[92] *Ibid.*

[93] Lihat "*Kedaulatan Rakjat*", 22 Desember 1945.

[94] Lihat Anton E. Lucas. *op.cit.* hlm: 111. Masih mengutip Anton E. Lucas, berbeda dengan ketiga kabupaten lainnya, sentimen anti-Tionghoa tidak terjadi di Pemalang.

[95] *Ibid.* hlm: 100.

[96] *Ibid.* hlm: 114.

[97] Lihat kesaksian Soemangku dalam lampiran tulisan Lidya Dwi Jayanti.

[98] Lihat Anton E. Lucas. *op.cit.* hlm: 132. Bandingkan dengan Abrar Yusra dan Ramadhan K.H. *op.cit.* hlm: 127-128.

[99] Lihat Anton E. Lucas. *Ibid.* hlm: 204.

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid.*

[102] *Ibid.*

[103] Lihat Moehkardi. *op.cit.* hlm: 296-300

[104] *Kedaulatan Rakjat*, 20 November 1945.

[105] *Ibid.*18 Desember 1945,

[106] Lihat Galuh Ambar Sasi. *Hidup di Altar Kematian Urut Sewu: Perubahan Lingkungan dan Patologi Sosial di Wonosari, 1925-1983.* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2015.

[107] Lihat Bambang Purwanto. "Idul Fitri Pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", dalam Dhanang Respati Puguh, dkk. *Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan.* Semarang: Undip Press, 2013. hlm: 414. Bandingkan dengan pemberitaan *Asia Raya* tanggal 7 September 2015.

[108] "Menghadapi Hari Lebaran", *Sinar Baru*, 5 September 1945.

[109] *Kedaulatan Rakjat*, 24 November 1945.

[110] *Ibid.*

[111] *Ibid.* 6 Desember 1945.

[112] *Ibid.*

[113] Lihat "Hari Natal Dizaman Kemerdekaan" dan "Hari Natal oentoek orang tawanan", *Kedaulatan Rakjat*, 26 Desember 1945.

[114] Lihat "Tahoen Baroe Kelonggaran Bagi Kaoem Peranakan", *Kedaulatan Rakjat*, 28 Desember 1945.

[115] Lihat "Barisan Kere", *Kedaulatan Rakjat*, 12 Desember 1945, hlm: 2.

[116] *Ibid.* 11 November 1945.

[117] Rosihan Anwar. *op.cit.*, hlm: 70-71.

[118] *Kedaulatan Rakjat*, 20 Desember 1945.

[119] R.E. Elson. *op.cit.* hlm: 174.

BAB V
BERITA PROKLAMASI DI SURABAYA

Aminuddin Kasdi

5.1. Pengantar

Proklamasi telah dibacakan, dan perjuangan kemerdekaan telah tiba di gerbang emas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi bagaimana informasi tentang proklamasi menjangkau para pejuang yang tersebar luas di berbagai penjuru tanah air antar satu empat dengan tempat lain, antar suatu kota dengan kota lain berbeda-beda. Demikian pula dampak yang mengiringinya, khususnya terhadap konsolidasi kekuatan dan kekuasaam serta tanggapan atau reaksi yang muncul juga berbeda.

Di Surabaya berita proklamasi diterima baik lewat radio maupun melalui media pers. Ibaratnya kondisi suhu perjuangan di Surabaya yang telah sangat panas telah membuat suasana Arek-Arek Surabaya seperti air yang segera mencapai titik kulminasinya untuk mendidih. Dampak diterimanya berita proklamasi sesuai dengan isinya di Surabaya segera dilaksanakan konsolidasi dengan membentuk berbagai lembaga sesuai dengan ketentuan Proklamasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta badan-badan perjuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan bela negara dan mempertahkan kemerdekaan dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi itu telah terjadi di Surabaya dalam waktu tidak sampai satu bulan, yang kemudian oleh Arek-Arek Surabaya dilanjutkan dengan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Konflik-konflik telah terjadi, khususnya dengan fihak asing : Jepang, Sekutu (Inggris) dan Belanda. Situasi inilah yang menjadi salah satu pemicu Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai cetusan jiwa merdeka dalam mempertahankan kemerdekaan terhadap musuh yang akan mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia.

5.2. SURABAYA MENJELANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Pada akhir jaman kolonial Belanda, Surabaya telah berkembang menjadi kota dagang dan industri yang kosmopolit. Masyarakat Surabaya tidak hanya terdiri dari berbagai suku bangsa, tapi juga dalam perkembangannya memperlihatkan ciri-ciri yang khas, yang terbuka dan blak-blakan. Dialeknya menunjukkan sifat dan sikapnya yang merakyat dan demokratis. Misalnya untuk panggilan kepada orang kedua menggunakan istilah *cak* (kakak), *rek* (kawan-kawan, saudara-saudara), *pena* atau *rika* (kamu). Di samping itu, Surabaya juga dijadikan pangkalan utama angkatan laut Belanda.[1]

Kemajemukan penduduk Surabaya juga dapat dilihat dari bercampur-gaulnya elite kolonial Belanda sebagai pengusaha, elite pribumi, rakyat rendahan, berbagai etnis atau suku bangsa. Hampir seluruh suku bangsa Indonesia di kepulauan Nusantara ada di Surabaya. Mereka menganut berbagai macam agama dan kepercayaan, miskin dan kaya, bergaul rukun. Sebagian besar penduduk Surabaya tinggal dl kampung, bangga dengan sebutan "Arek Surabaya" yang berarti "anak Surabaya".

Dari berbagai kelompok sosial yang ada, kaum buruh berjumah besar dan secara berarti mewarnai peta sosiologis kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan kedudukannya sebagai pusat industri dan perdagangan, yang telah berlangsung sejak 1920-1930an, di mana di Surabaya didirikan perusahaan atau industri besar, di antaranya pabrik mesin seperti Dapoean, Noordijck, Braat, Polichaam, dan Kalimas-Amsterdam, Phoenix. Bank juga banyak didirikan di Surabaya: Nederlandsch Indiesche Escompto (Kembang Jepun), Hongkong and Shanghai Bank Ltd, The Bank of Taiwan, Internationale Crediet en Handels Bank Ltd Rotterdam (Internatio). Perusahaan jasa: Droogdog Maatschappij dl Pelabuhan Tanjungperak, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), NV Javaansche Zuurstoffen Koolzuur Fabriek (Pabrik Gas).

Dengan semakin terbukanya lapangan kerja yang beraneka ragam, maka penduduk Surabaya jumlahnya meningkat pesat akibat urbanisasi. Sampai tahun 1920, penduduk Surabaya berjumlah 192.180 orang, pada tahun 1930 meningkat hampir dua kali lipat, yaitu 341.675 orang. Ketika pemerintah Balatentara Jepang pada 1943 menyensus penduduk Surabaya, jumlahnya membengkak jadi 518.729 orang kira-kira naik 40% dari tahun 1930. Berdasarkan kesamaan lingkungan kerja,

maka tumbuhlah rasa kesamaan nasib yang harus diperjuangkan. Untuk itu, mereka mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan mereka, antara lain Serikat Chauffeur Indonesia, Bond van Letter Zetters, Bond van Perso-neet CMS, Djongos Bond dan lain-lain.[2]

Lebih penting lagi adalah kelompok terpelajar, yang secara sigifikan mewarnai sejarah perkembangan kota Surabaya, termasuk periode yang dibahas di sini. Seiring dengan perkembangan perjuangan organisasi pergerakan nasional yang muncul di Jakarta (Batavia), maka di daerah pun tumbuh perjuangan seperti itu, teristimewa kota besar yang memenuhi persyaratan bagi kehidupan organisasi modern seperti itu, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya. Setelah Budi Utomo berdiri di Jakarta pada tahun 1908, maka Sarekat Dagang Islam (SDI, kemudian menjadi SI [Sarekat Islam]) berdiri di Surakarta, yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan kasunanan. Surabaya sebagai kota dagang, industri dan pemerintahan, dengan sendirinya menjadi tempat berkumpulnya kaum terpelajar. Mereka kemudian membentuk organisasi pergerakan yang sesuai dengan paham asing. Organisasi pergerakan nasional yang pertama di Surabaya ialah Sarekat Islam, didirikan pada tahun 1913.[3]

Pada masa-masa berikutnya, di Surabaya muncul pula organisasi pergerakan nasional dengan mendasarkan faham ideologi tertentu, yakni Kelompok nasionalis (Parindra, PNI, dan Sarekat Islam); Kelompok keagamaan (NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, juga organisasi komunitas Kristen dan Katholik). Tokoh pergerakan nasional di Surabaya antara lain: HOS Cokroaminoto, R. Cokrosudarrno. Hasan Dipo, Adiwijaya, Dokter Sutomo, Kyai Haji Mas Mansyur. Kyai Haji Hasyim Asyari, Pamuji, Kusmaji, Ruslan Wongsokusumo, Akhmad Jais, Sugiarto, Tuwana-kotta, Samekto, C, Cindarbumi, Sunyoto, R. Sudirman, Ruslan Abdulgani, Dul Amowo, Lengkong, Abdullah, Tukul Surohadinoto. Sebagian besar mereka tergabung dalam *Studie Club* dan Parindra.[4]

Perlu pula ditambahkan di sini golongan pelajar, yakni para pemuda yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka mengikuti pendidikan dengan tujuan agar nantinya mendapat pekerjaan yang layak setelah terjun dalam masyarakat. Tetapi tidak hanya itu saja tujuan mereka, sebab tidak jarang kaum terpelajar kemudian hari menjadi pelopor pergerakan nasional. Golongan ini mendorong lajunya nasionalisme modem.[5] Munculnya golongan pelajar tidak dapat

dilepaskan dari diselenggarakannya pendidikan modem. Untuk konteks kota Surabaya, sekolah yang penting untuk dicatat di sini adalah Hogere Burger School (HBS) yang berstandar Belanda.

HBS Surabaya didirikan pada tahun 1875, sejalan dengan meningkatnya penduduk bangsa Belanda di Surabaya karena mengalimya modal dan teknologi Barat akibat dilaksanakannya *Opendeur Policy,* dan dibukanya Terusan Suez.[6] Sekolah tersebut semula bertempat di Institut Buys dekat Alun-alun Contong, kemudian pindah ke bekas rumah dinas Bupati Surabaya (sekarang jadi Kantor Pos Besar), dan baru pada tahun 1881 dipindahkan ke gedung baru di daerah elite Belanda di Ketabang. Nama jalannya disesuaikan dengan gedung baru tadi, yaitu *HBS straat* (sekarang Jalan Wijayakusuma).[7] Murid pribumi hasil pendidikan HBS Surabaya antara lain: Ir. Sukarno (masuk tahun 1916 tamat tahun 1921); Dr. H. Ruslan Abdulgani, (tamat tahun 1934); Mukarto Notowidagdo (tamat tahun 1934).

Berkat bimbingan guru bahasa Jerman, di HBS Surabaya Bung Karno diperkenalkan dengan pemikiran dan filsafat Barat. Juga di HBS ini Bung Karno mengembangkan kecakapannya mengeluarkan pendapat sambil beradu argumentasi dengan murid-murid Belanda mengenai masalah kolonialisme melalui *Debating Club.* Pada waktu sekolah di HBS Bung Kamo mondok di rumah Cokroaminoto di Peneleh, kemudian pindah ke Plampitan. Di situlah Bung Karno berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan, baik golongan Islam, Sosialis atau pun Komunis. Mereka sering berdiskusi tentang usaha gerakannya melawan Belanda. Perpaduan ilmu yang diperolehnya dan cita-cita kemerdekaan yang dihirup di rumah Cokroaminoto membulatkan tekad pejuangan Bung Karno untuk memimpin bangsanya.[8]

Oleh karena itu tepatlah kiranya bila Bung Karno dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adam menyebutkan bahwa Kota Surabaya adalah sebagai daur nasionalisme. Meski jumlah murid pribumi sangat sedikit—pada tahun 1920 hanya 20 orang dari 300 siswa, tahun 1934 hanya 30 orang dari 700 siswa—tapi HBS Surabaya merupakan suatu forum pertemuan kebudayaan Barat dengan pemuda Indonesia. HBS Surabaya juga sebagai tempat transfer jiwa kemerdekaan bangsa Belanda kepada pemuda Indonesia.

Dengan datangnya tentara Jepang sejak Maret 1942, terjadi perubahan besar-besaran dalam berbagai kehidupan, termasuk

pendidikan. Perubahan pendidikan yang dilakukan pemerintah tentara Jepang terlihat nyata dengan dihapuskannya sistem dualisme pengajaran warisan Belanda. Sistemnya menjadi seragam. Jalur pendidikan diseragamkan menjadi 3 jenjang, yakni: (1) Jenjang sekolah rendah (Sekolah Rakyat 6 tahun); (2) Jenjang sekolah menengah, dibagi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT), ma-sing-masing lama belajamya 3 tahun; dan (3) Jenjang sekolah tinggi, yaitu pendidikan tingkat Universitas dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan pelajar pada jaman Jepang juga menjadi alat propaganda yang dipergunakan untuk kepentingan perang dengan melakukan *kinrohoshi* (kerja bakti), di antaranya ikut melipatgandakan produksi pertanian, menanam pohon jarak, yang dapat menghasilkan bahan penting bagi kelangsungan perang. Latihan-latihan kemiliteran mengisi sebagian besar kegiatan pelajar tiap hari. Pada tiap sekolah dibentuk barisan pelajar berupa *Seinentai*, barisan murid Sekolah Rakyat, dan *Gakutotai*, barisan pelajar Sekolah Menengah.[9]

BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI SURABAYA DAN DAERAH-DAERAH LAIN

> Berganti berkuasalah Garuda Ngawangga,
> yang ibunya berasal dari Bali,
> dan berkuasalah ia, di Tanah Jawa (Indonesia),
> dengan balatentara setan dan dhemit,
> lalu datanglah Prabu Jamus,
> dan Garuda Ngawangga mengundurkan diri sebagai
> 'pengarang', dan sang raja yang bernama Heru Cakra itu sangat sedih, lamanya seperempat abad.

Kutipan di atas berasal dari ramalan Jayabaya, seorang tokoh budaya Jawa, yang bisa dihubungkan dengan suasana masyarakat yang tengah menunggu-nunggu datangnya jaman baru, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan rakyat yang sangat menderita, tidak kuasa untuk menghindarinya, maka satu-satunya harapan adalah datangnya Ratu Adil atau sang pembebas.



Rakyat Indonesia di Surabaya sedang melaksanakan perayaan Proklamasi 17 Agustus 1949 *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

Dalam kondisi masyarakat yang demikian, hidup suburlah ramalan berbau mistik. Ramalan yang memberikan harapan masa depan yang dibisikkan dari mulut ke mulut, tersebar luas di seluruh Tanah Jawa, termasuk di Surabaya. Perasaan dan harapan itu juga menjadi perekat kaum pergerakan di Surabaya, sehingga persaudaraan dan solidaritas antar-mereka menjadi semakin erat di lingkungan Arek-arek Surabaya.

Kondisi psikologis sosial di atas tentu sangat mewarnai dinamika yang berlangsung di tengah masyarakat Surabaya menyusul tersebarnya berita kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hanya saja, sebelum sampia ke pembahasan tentang hal itu, kita akan melihat bagaimana berita proklamasi tersebut sampai ke Surabaya. Apa saja saluran yang digunakan untuk menjadikan berita proklamasi bisa sampai ke Surabaya.

5.3. Melalui Radio

Radio telah tampil amat penting dalam perjuangan Arek-arek Surabaya. Semenjak Jepang menginjakkaan kekuasaannya di Indonesia, Radio Tokyo selalu mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia

Raya. Akan tetapi, setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, semua peralatan radio milik masyarakat segera dibungkam.

Penyiaran radio di Jawa yang dimulai pada 1933 dari Solo (Solosche Radio Vereeneging-SRV) atau Radio Solo, kemudian disusul oleh Yogyarkarta (Mataramsche Vereeneging Radio Omroep) yag berdiri atas lisensi Nederlands Indische Radio Omroep-NIROM). NIROM juga memiliki perwakilan di Surabaya, yang setelah pendudukan Jepang diganti namanya menjadi *Soerabaja Hosyo Kyoku* atau Siaran Radio Surabaya. Radio ini, selain menyiarkan berbagai kepentingan Jepang, juga menyiarkan berita yang mampu membangkitkan semangat kebangsaan, baik lewat ceramah maupun lagu-lagu. Misalnya menyiarkan lagu ciptaan Maladi dengan tajuk *Di bawah Sinar bulan Purnama,* ceramah Ruslan Abdulgani mengenai ekonomi kerakyatan. *Sorabaya Hosyo Kyoku* bukan radio resmi Jepang yang berada dibawah *Sendenbu*-Departemen Propaganda), oleh karena itu radio ini tidak disegel oleh Jepang. Lewat *Soerabaja Hosyo Kyoku* dapat diengarkan perkembangan Perang Asia Timur Raya, seperti pengeboman Hirosima (6 Agustus), Nagasaki (9 Agustus) dan penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus pukul 19.00 *Radio Surabaya* telah menyiarkan teks proklamasi dengan bahasa Madura. Alasannya siaran itu tidak dimenegrti oleh pihak Jepang, namun dapat ditangkap oleh sebagian penduduk Jawa Timur di Madura dan di kawasan tapal kuda. Pemakaian Bahasa Madura itu bertujuan untuk menghindari sensor oleh *Kempeitai,* karena pihak Jepang selalu menempatkan sorang petugasnya yang mampu berbahasa Indonesia.

Penyiaran teks proklamasi kemerdekaan baru dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 saat petugasnya lengah. Kelengahan itu dimanfaatkan oleh Syahrudin yang berhasil menyelundupkan bunyi teks Proklamasi ke *Soerabaja Hosokyoku* meskipun kantor itu telah diblokir Jepang. Untuk mencek kebenaran berita yang diterima dari Syahrudin, Kartijo Harjomulyo (Cepot) menelpon ke Kantor berita Domei. Setelah ada jawaban kepastian diperoleh dari Sundoro dari Kantor Domei, barulah berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disiarkan oleh Hosokyoku. Berita itu diulang setiap setengah jam, sampai pukul 16.00 saat siaran berita berhenti.[10]

Akibat siaran tersebut, pimpinan tentara Jepang memerintahkan untuk meralat berita Proklamasi yang telah disiarkan dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Dunia menjadi lebih kaget, setelah menangkap berita susulan yang menerangkan bahwa berita Proklamasi itu tidak benar. Komentar dunia ketika itu hanya satu, yaitu perebutan kekuasaan dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia sudah mulai.[11] Para pemuda yaang bekerja di *Soerabaja Hosyokyoku* melakukan aksi penempelan plakaat yang isinya antara lai *"kami Pegawai Republik Indonesia,* atau *Pegawai Radio Milik RI...."* dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Radio Surabaja berusaha memanfaatkan pemancarnya untuk memobilisasikan rakyat guna mendukung proklamasi dengan memanfaatkan mata acara *Pancaran Asia* yang telah dikumandangkan sejak zaman Jepang. Usaha yang sama juga dilakukan melalui kolom *Pro Patria* yang selalu dimuat dalam Harian *Asia Raja.* Sejak 22 Agustus 1945 secara *de facto, Soerabaja Hosyokyoku* telah menjadi Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya. Berdasarkan penuturan Des Alwi, yang saat itu berada di Surabaya pada malam harinya, acara itu dirayakan dengan penyiaran musik berirama jazz yang sebelumnya dilarang oleh Jepang.[12]

5.4. Pers

Selain radio, rakyat Surabaya dapat mengikuti berita proklamasi surat kabar *Suara Asia.* Berita yang disiarkan oleh kedua mass-media tersebut bersumber dari Kantor Berita Domei, yang telah terlebih dahulu disensor oleh *Hodokan* (Dinas Sensor). Di Jakarta timbul usaha menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sebelum waktu pembacanaan secara resmi pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Pada jam 05.00, ketika fajar menyingsing, ara pemimpin Indonesia dan para pemuda keluar dari ruangan rumah Laksamana Maeda dengan penuh kebanggaan. Pulang ke rumah masing-masing setelah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan.[13] Sebelum pulang Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama BM Diah, untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

Di antara pemuda-pemuda itu adalah Sukarni dan kawan-kawannya yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (sekarang Dr. Suharjo). Pada malam itu mereka menyelenggarakan rapat rahasia di Kepu

(Kemayoran), kemudian pindah di van den Bosch (sekarang Jalan Bungur Besar) untuk mengatur pelaksanaan dan cara-cara penyiaran berita Proklamasi. Alat-alat komunikasi yang akan dipergunakan adalah: pamflet, pengeras suara, mobil, akan dikerahkan ke segenap penjuru kota. Ribuan pamflet berhasil dicetak pada pagi hari itu pula segera disebarkan keberbagai penjuru kota.[14]

Adam Malik menelpon Kantor Berita Domei bagian Indonesia, dan diterima Asa Bafagih. Atas saran Adam Malik, Asa Bafagih kemudian minta kepada Pengulu Lubis agar berita Proklamasi segera disebarluaskan tanpa dimintakan ijin terlebih dulu kepada *Hodokan*. Pengulu Lubis menyiarkan bunyi teks Proklamasi tadi bersama-sama dengan berita yang telah disetujui *Hodokan*. Kemudian, markonis-markonis menyiarkan dengan morse, sedang markonis Sugiarin berjaga-jaga selama pelaksanaan penyiaran.[15]

Berita Proklamasi Kemerdekaan yang disiarkan dengan morse cast melalui pemancar radio Domei Jakarta dapat ditangkap oleh pesawat penerima kantor berita Domai Cabang Surabaya yang pada waktu itu dijabat seorang Jepang bernama Ohara. Adapun pemimpin redaksinya dijabat oleh R. Bintarti dan dibantu Sutomo (Bung Tomo), Sumaji Aji Wongsokusumo (Pak Petruk) dan Fakih sebagai anggota redaksi. Bagian telkom (markonis) diketuai Hidayat dengan dibantu Sujono, Yacob, Sumadi, Suwaji, Anwar Idris, Kusnindar, Sudarmo dan Kuntoyo.[16]

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi yang bertugas di bagian markonis Yacob dan R. Sumadi, sedang di bagian redaksi Indonesia R. Bintarti dan Sutomo (Bung Tomo). Kira-kira pukul 10.00-11.00 berita Proklamasi pemancar radio kantor berita Domei dapat ditangkap oleh Yacob dalam bentuk huruf morse diterima langsung dengan memakai mesin tulis rangkap satu.[17] Jayusman menyatakan bunyi teks morse cast itu sebagai berikut.

bra djam 12.00 aug tg. 17 domeidjakarta = (proklamasi)

kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan 'indonesia titik hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dll diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo jang -sesingkat-singkatnya titik djakarta hari toedjoeh betas boelan

delapan 2605 titik atas nama bangsa indonesia soekamo strip hatta

rd at 1205.[18]

Salinan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu segera diserahkan sendiri oleh Yacob ke bagian redaksi: R. Bintarti dan Bung Tomo. Meskipun berita Proklamasi itu membuat marah orang Jepang di Domei, dan dikatakannya bahwa berita Proklamasi sebagai berita yang tidak benar, namun secara diam-diam mereka menyiarkan terus dari mulut ke mulut. Dengan semangat menggelora rakyat dan pemuda Surabaya mencari kebenaran berita Proklamasi. Stasiun Semut (Surabaya Kota) dan Gubeng menjadi sasaran mencari berita yang sebenarnya.[19]

Naskah Proklamasi itu, menurut Sungkono, telah ditempelkan di muka Kantor Domei oleh wartawan Domei pada tanggal 18 Agustus 1945 sehingga mendapatkan banyak perhatian dari rakyat dan pemuda. Pihak Kenpeitai mendatangi, kemudian tempelan naskah Proklamasi tadi dirobeknya. Mereka pergi, pemuda menggantinya dengan yang baru, sehingga terjadi ketegangan.[20]

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diterima oleh kantor berita Domei Cabang Surabaya pada saat itu pula disampaikan pada redaksi harian *Suara Asia* yang berkantor di dekat kantor berita Domei yaitu di Jalan Alun-alun 30 (sekarang Jl. Pahlawan Surabaya) dipergunakan sebagai kantor *Harian Surabaya Post*). *Suara Asia* adalah satu-satunya Surat kabar untuk Jawa Timur dengan daerah penyebarannya sarnpai ke Kalimantan Timur (Borneo Timur),Sulawesi (Celebes), Bali dan Maluku.

Masyarakat Surabaya mendengar berita itu melalui radio Jepang *Hosokyoku*. Meskipun sudah dihalangi oleh Kenpeitai, namun beritanya dapat diselundupkan oleh pemuda yang tergabung dalam "Gerakan Pemuda Kantor" pada malam harinya tanggal 17 Agustus 1945 dalam siaran berbahasa Madura. Pada sore hari tanggal 17 itu dalam ruangan Pancaran Sastra, dibacakan tulisan R. Sukarjo Wiryopranoto dalam harian *Suara Asia* berjudul *Propatria* yang mengemukakan kewajiban tiap putra Indonesia terhadap negara dan tanah airnya sesudah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Ali, anggota staf redaksi *Suara Asia* telah menerima berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari kantor berita Domei Cabang Surabaya. Semua berita itu segera dimuat secara lengkap pada halaman pertama. Tetapi tiba-tiba datang berita bantahan. Orang-orang *Suara Asia* menjadi ragu. Setelah dicek dan mendapat jawaban interlokal tentang kebenaran berita itu dari Ahmad, Redaktur Kawat Kantor Berita Domei Jakarta, berita Proklamasi kemudian dimuat dengan judul merah terbitan tanggal 17 Agustus 1945 sore. Oleh *Suara Asia* dibuat pula selebaran berita Proklamasi. Di depan kantornya ditempel selebaran Proklamasi dengan huruf-huruf besar, sehingga orang yang lewat dapat dengan gampang membacanya.

Peristiwa Proklamasi terjadi pada hari Jumat Legi, dan sorenya pada *Suara Asia* menurunkan beritanya dengan judul warna merah pada halaman depan. Namun, baru pada hari Senin Wage tanggal 20 Agustus 1945 harian *Suara Asia* memuat teks Proklamasi, Keputusan PPKI tentang Penetapan Presiden dan Wakil Prasiden, Pembukaan UUD, pembagian wilayah RI menjadi Propinsi sebagai berita yang lengkap.[21] Setelah berita Proklamasi sampai di Surabaya, Jepang dengan cepat mangambil tindakan. Tentara Peta *Daidan* Gunungsari pada tanggal 18 Agustus dilucuti persenjataannya untuk waktu yang tidak terbatas.[22]

Pada tanggal 19 Agustus 1945 malam, setelah berbagai informasi tentang Proklamasi Kemerdekaan RI tersebar luas—berdasaarkan pemberitaan radio dan berita dari penumpang kereta api yang datang dari Jakarta—para tokoh masyarakat Surabaya menyelenggarakan pertemuan, yang dihadiri pula para pemimpin dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Malang, Kediri, Madiun, Bojonegoro, dan Jember. Lewat pemberitaan para pemimpin daearah itu berita Proklamasi kemudian merata ke seluruh penujuru Jawa Timur.

5.5. KOTA-KOTA LAIN DI JAWA TIMUR

Kita mula dengan Malang. Berita proklamasi RI mestinya telah sampai di Malang melalui siaran *Hosokyoku,* namun kemudinan menimbulkan tanda tanya dengan adaanya siaran susulan yang menyatakan bahwa berita proklamasi lewat *hsokyoku* menurut Jepang tidak benar. Setelah berita itu dicek, baik lewat telpon, penumpang kereta api di Fubeng dan Pasar Turi, keragu-raguan itu hilang. Apalagi

setelah diadakan rapat di Surabaya pada 19 Agustus 1945. Salah seorang pemimpin dari Malang yang hadir di pertemuan Surabaya adalah Harjadinata, seorang pegawai kotapraaja Surabaya. Jadi wajar bila ia memiliki relasi dengan rekan sesama pegawai di berbagai kota di Jawa Timur.

Sementara di Madiun, tokoh-tokoh masyarakat setelah meyakini bahwa berita proklamasi—seperti yang didengar lewat radio *Hosokyoku,* lewat pemberitaan para pemimpin di Surabaya kepada rekan-rekannya y)ang berada di Madiun, atau informasi dari penumpang kereta api yang pada tanggal 18 dan 19 Agustus datang dari Jakarta—para pemimpin segera menindak lanjuti perintah Presiden tanggal 22 Agustus 1945 guna membentuk badan-badan pemerintah di Madiun, seperti akan dijelaskan nanti di bagian berikutnya.

Gegap gempita menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI juga terjadi di Bojonegoro, salah satu ibu kota Karesidenan di Jawa Timur. Memang, para pemimpin dan rakyat Bojonegoro semula bingung perihal berita proklamasi yang diralat pihak Jepng, sehingga suasana di Bojonegoro biasa-biasa saja seperti tidak terjadi sesuatu. Tentara Jepang juga masih berkuasa dan tetap memegang senjata. Setelah masyarakat yakin akan kebenaran berita proklamasi, mereka segera mengambil langkah-langkah penting untuk mengambil mtindakan yang diperlukan guna menghadapi segala kemungkinan. Langkah pertama yang diambil adalah menyelenggarakan rapat umum raksasa pada tanggal 24 Septemberv 1945 di suatu lapangan yang terletak di tengah kota Bojonegoro. Residen RMTA Suryo, yang sejak tanggal 19 Agustus 1945 juga telah diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur, berperan penting dalam rapat raksasa itu. Dalam rapat itu Suryo mendapat dukungan dari para pemuda dan masyarakat Bojonegoro untuk segera membentuk pemerintahan RI di Bojonegoro. Dalam hal ini RMTA Suryo menyatakan sebagai berikut.

> "... berdasarkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia merdeka oleh PYM Sukarno dan PYM hatta, presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, makaa kami atas nama seluruh rakyat seluruh Daerah Karesidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini, Senin Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Karesidenan Bojonegoro, dan terus mengadakan tindakan seperlunya. Kepadaseluruh rakyat, kami

serukan supaya tetap tinggal, tenang dan tenteram melakukan kewajibannya maisng-masing ....!

Lain lagi di Kediri. Meskipun pada 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, dan 15 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sampai akhir Agustus tentara Jepang masih memegang senjata dan kekuasaan. Hanya saja, berita proklamasi akhirnya juga tersebar di Kediri, yang segera disusul dengan berbagai upaya rakyat untuk mewujudkan apa yang telah dilakukan di Jakarta dengan membentuk badan-badan pemerintahan, khsususnya KNI dan BKR, dan hal-hal lain yang akan dibahas nanti dalam peralihan kekuasaan.

5.6. KONSOLIDASI KEKUASAAN

Penjelasan Umum

Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan dan beritanya telah didengar melalui siaran radio dan juga siaran pers. Akan tetapi, pemindahan kekuasaan yang disebut dalam teks proklamasi, yakni diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang secepat mungkin, belum dapat dilaksanakan seketika itu juga. Sebab, kekuasaan masih di tangan Jepang yang oleh Sekutu diberikan kedudukan *status quo*, sarnpai Tentara Sekutu tiba untuk mengambilalihnya. Bagi Indonesia, kekuasaan tersebut sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Tetapi untuk mengambil kekuasaan dari tangan Jepang jelas tidak mudah. Jepang telah menjadi taklukan Sekutu, sehingga wewenang untuk mengambilalihkan kepada pihak Indonesia tidak dimilikinya. Selain itu, untuk mengambilalih kekuasaan dibutuhkan suatu kekuatan besar, yang mampu menghadapi dan melucuti senjata tentara Jepang.

Dengan demikian, setelah proklamasi dibacakan, langkah berikutnya adalah mempersatukan seluruh kekuatan rakyat yang masih bertebaran, yang belum terhimpun dalam wadah yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas pengambilalihan kekuasaan. Sebelum mengambilalih kekuasaan, terlebih dulu diselenggarakan konsolidasi, yaitu langkah untuk memperteguh dan memperkuat persatuan. Konsolidasi tersebut berupa pembentukan badan-badan pemerintahan

sesuai instruksi Pemerintah Pusat di Jakarta, yakni pembentukan badan-badan perjuangan seperti BKR, PRI, BPRI dan sebagainya.

Bila di Jakarta pada tanggal 18 sarnpai 22 Agustus 1945 tokoh-tokoh nasional sibuk menyelenggarakan sidang-sidang PPKI, maka di tokoh Surabaya yang telah mendengar berita proklamasi segera menerbitkan proklamasi itu di *Suara Asia* edisi 20 Agustus 1945. Kesibukan terjadi di seluruh Surabaya. Di lingkungan pemerintah, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 di Kantor *Fuku Syucokan* (Wakil Residen), atas prakarsa dan tanggung-lawabnya R. Sudirman mengadakan upacara penyambutan Indonesia merdeka. Pada upacara itu semua pejabat kantor dipanggil. Sudirman mengucapkan pidato, di antaranya menyatakan:

> Saudara Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat Ini marilah kita renungkan sebentar, bahwa kemerdekaan ini datangnya di saat yang genting. Maka karenanya saya harap segenap kawan-kawan dari segala tingkatan dan golongan meneruskan kewajiban masing-masing dengan seksama, agar cepat tercapai kemerdekaan yang sempuma.[23]

Pidato Wakil Residen Sudirman itu disambut hangat oleh segenap peserta upacara. Ruslan Wongsokusumo, Ketua Barisan Pelopor Surabaya, menjawab ajakan Wakil Residen itu dengan pernyataan "Kami sanggup membantu menjalankan kewajiban dan tugas menjaga ketenteraman umum dengan bekerja sama serapat-rapatnya dengan berbagai badan, jawatan dan golongan lain".[24] Selanjutnya para pemuda dan golongan lain yang tergabung dalam Panitia Angkatan Muda Indonesia dipimpin oleh Dul Amowo mulai bergerak dengan menyalin teks proklamasi kemerdekaan pada kertas-kertas dan ditempelkan di tempat-tempat strategis, sehingga tersebar luas ke seluruh pelosok kota Surabaya.

Sejalan dengan kebulatan tekad rakyat dan pemimpin Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Repubiik Indonesia, Komandan Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya (*Surabaya Syu Tokubetsu Keisatsutai*), Inspektur Tingkat I Mohammad Yasin, mengkonsolidasikan polisi, kemudian menyatakan bahwa pasukan Polisi

adalah Polisi Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945 Pasukan Polisi Istimewa memproklamasikan diri sebagai berikut:

Proklamasi

Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.

Surabaja, 21 Agoestoes 1945

ttd.

Moehammad Jasin

Inspektoer Poelisi Tk. II.[25]

Pernyataan Pasukan Polisi tersebut diketik, kemudian disebarluaskan, ditempel di tepi jalan besar. Kemudian dilakukan penurunan bendera Jepang (*Hinomaru*) dan pengibaran bendera Merah Putih pada markas Polisi Istimewa di Coen Boulevard (Jl. Dr. Sutomo No.7).[26] Semua anggota diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada siapapun. Pimpinannya bangsa Jepang, Sidokan Takata dan Fuku Sidokan Nishimoto, diidolasi. Pernyataan pasukan Polisi Istimewa tersebut temyata berpengaruh besar terhadap rasa takut rakyat kepada Jepang serta mendorong keberanian bekas anggota *Heiho* dan Peta yang telah dibubarkan, untuk mengambil alih atau melucuti persenjataan Jepang. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Komandan Polisi Istimewa Mohammad Yasin menerima pernyataan dari pemuda-pemuda Dinoyo yang mendukung tindakan yang telah diambilnya.[27]

Di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, dalam sidangnya memutuskan: (1) Mensahkan UUD Negara Republik Indonesia; (2) Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil presiden; dan (3) Menetapkan KNI sebagai pembantu Presiden sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk.[27]

Kemudian sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 merumuskan: (1) Penetapan 12 (dua belas) kementrian dalam lingkungan pemerintahan; dan (2) Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi.

Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tetapi baru pada hari berikutnya (23 Agustus) diumumkan bersama-sama dengan rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) tingkat Pusat, dan Partai Nasional Indonesia PNI yang dimaksudkan sebagai satu-satunya partai negara.[28] BKR ditetapkan menjadi bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) sebagai induk organisasi untuk memelihara keamanan dan keselamatan rakyat. BKR dinyatakan sebagai organisasi bukan tentara, tetapi pernyataan itu dimaksudkan oleh para pemimpin pada waktu itu agar tidak membangkitkan sikap permusuhan dari kekuatan yang masih ada di Indonesia (Jepang). Di dalamnya terhimpun bekas anggota Peta, *Heiho*, *Keisatsutai* (Polisi), Seinendan dan Keibodan.

Dalam maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 ditetapkan pekik perjuangan "Merdeka!" sebagai salam nasional, berlaku sejak 1 September 1945, caranya dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka, bersamaan dengan itu memekikkan "Merdeka!"[28] Pekik merdeka menggema di mana-mana. Juga semboyan "sekali merdeka tetap merdeka!".. "merdeka atau mati!" dan lain-lain, menjadi ucapan umum para pemuda dan pejuang yang menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan, jika perlu nyawa sebagai taruhannya.[29]

Seperti telah diutarakan, dengan sikap Wakil Residen Surabaya Sudirman dan Komandan Pasukan Polisi Istimewa Mohammad Yasin, maka sebenarnya langkah-langkah pengambilalihan kekuasaan Pemerintahan di Surabaya telah dimulai sejak didengarya proklamasi secara pasti tanggal 20 Agustus 1945, meskipun pada umumnya para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu masih menunggu dan belum berani bertindak.[30] Namun, setelah tiga hari kemudian terdengar perintah untuk membentuk KNI dan BKR, maka pada tanggal 23 Agustus 1945 perintah itu segera dilaksanakan di Surabaya. Rapat-rapat pengambilalihan kekuasaan pemerintah pada akhir Agustus dan awal September diadakan di Embong Sawo dipimpin oleh Suyono, dihadiri oleh Dul Arnowo, Bambang Suparto, Johan Syahruzah, Suyono

Jemblung, dan Pamuji. Bahkan rencananya diadakan penculikan terhadap pejabat yang meragukan rencana pengambilalihan kekuasaan pemerintahan tersebut.[31]

5.7. Polisi Istimewa

Kekuatan bersenjata yang riil adalah polisi. Polisi Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945, empat hari sesudah proklamasi kemerdekaan, tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa mereka adalah Polisi Republik Indonesia. Bahkan, pada tanggal 23 Agustus 1945, mereka berhasil membongkar senjata-senjata yang disimpan di gudang *Tokubetsu Keisatsutai* (Polisi Istimewa Jaman Jepang).

Di Surabaya pada masa pendudukan Jepang ada dua kesatuan Polisi Istimewa yang diberi nama "*Tokubetsu Keisatsutai*". Yang satu berada di bawah pimpinan M. Yasin, yaitu Surabaya *Syu Tokubetsu Keisatsutai*, bermarkas di Coen Boulevard (Jalan Dr. Sutomo), dan beranggotakan 250 orang. Pasukan Ini mendapat latihan ketentaraan ringan dan berat dari pihak Jepang dan diberi peralatan dengan senjata ringan dan berat, serta dengan berkendaraan berlapis baja. *Tokubetsu Keisatsutai* dipersiapkan untuk mengamankan kekacauan-kekacauan berat. Markasnya juga sering dipergunakan untuk latihan Sei-nendan dan Keibodan.

Pasukan lainnya adalah Pasukan Polisi Istimewa untuk Kota Surabaya, bernama Surabaya Shi *Keisatsutai*, terdiri dari 50 orang, dibawah pimpinan Pembantu Inspektur Polisi I Suratmin. Para anggotanya biasanya adalah ex anggota Surabaya Syu *Tokubetsu Keisatsutai*. Nama *Tokubetsu Keisatsutai* kemudian diubah menjadi Polisi Istimewa. Kekuatan tersebut kemudian ditambah dengan merekrut pasukan cadangan pembantu Polisi Istimewa untuk digabungkan ke dalam Polisi Istimewa.

Kekuasan Surabaya Syu Tokubetsu Keisatsutai pada waktu itu sekitar satu kompi dengan jumtah anggotanya sekitar 150 orang dan 50 orang lagi dari Polisi Istimewa Mojokerto. Pasukan tersebut disusun menjadi 4 Seksi Senapan dan 1 Seksi Senjata Berat, sedang masing-masing seksi terdiri dari 36 orang @ 12 orang.

Betugas melatih Seinendan, Keibodan di daerah daerah Kabupaten di lingkungan Surabaya, maka sangat mungkin Polisi

Istimewa telah mempunyai hubungan erat dengan para pemuda pejuang baik di luar maupun di dalam Kota Surabaya. Dalam menanggapi barita tentang Proklamasi Kemerdekaan RI yang mulai tersiar luas di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1945, pasukan Polisi Istimewa segera memberi contoh mempelopori pengamanan kemerdekaan Indonesia. Mereka tanpa perintah atasan telah menunjukkan keberaniannya mengawal dan mengamankan proklamasi kemerdekaan.

1. Pada tanggal 19 Agustus 1945 di Markas Polisi Istimewa terjadi insiden bendera; Bendera Jepang diturunkan dan bendera Merah Putih dikibarkan.
2. Pada tanggal 20 Agustus 1945 para kader Indonesia berapat memutuskan :
   a. Menahan Pimpinan Jepang dan menetapkan M. Yasin sebagai Komandan,
   b. Hubungan telepon diputuskan,
   c. Membongkar gudang senjata yang barada di halaman belakang markas dan me-nambah senjata pasukan dengan lebih banyak senjata berat.
   d. Memproklamasikan Polisi Istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945. Poster-poster proklamasi dipersiapkan.
   e. Mengadakan appel pagi pada tanggal 21 Agustus 1945. Komandan membacakan teks proklamasi di hadapan pasukan.
   f. Mulai pukul 08.00 pagi tanggal 21 Agustus 1945 poster proklamasi Polisi Istimewa sebagai Polisi RI ditempelkan pada tembok sepanjang Jalan Tunjungan. Kemudian Pasukan Polisi Istimewa turun ke jalan "menunjukkan diri" sebagai milik RI.[32]

Pasukan Polisi Istimewa adalah satu-tatunya pasukan yang dilatih dan dipersenjatai, yang pada saat itu di Surabaya belum dilucuti Jepang. Disiarkannya berita proklamasi pada 20 Agustus 1945 dan ditambah dengan aksi Polisi Istimewa rupanya sangat menjengkelkan pihak Jepang. Pada pagi harinya tanggal 21 Agustus 1945, bersamaan

dengan appel dan aksi penempelan Proklamasi Polisi Istimewa, *Kenpeitai* (Polisi Milltar Jepang) memperingatkan kepada sekalian penduduk Surabaya melalui harian *Suara Asia* untuk tidak mengganggu keamanan dan tidak bertindak sombong dan menghina.

Peringatan tersebut tidak menyinggung soal menyerahnya Jepang atau Proklamasi Kemerdekaan RI. Masyarakat akhirnya mengetahui bahwa perang telah berakhir. Lampu penerangan listrik di jalan umum di waktu malam mulai tanggal 22 Agustus 1945 telah dinyalakan, selubungnya dibuka. Ini berkat perjuangan Angkatan Muda.[33] Pada jaman Jepang cahaya lampu tidak boleh membias keluar. Dengan bebasnya cahaya lampu di luar, masyarakat segera mengkaitkan dengan desas-desus tentang kekalahan Jepang serta Proklamasi Kemerdekaan R.I. di Jakarta. Kehidupan mulai tampak cemerlang kembali setelah sekian lama dalam keadaan serba gelap. Radio mulai berarti sebagai alat penerangan dan informasi setelah bertahun-tahun disegel.

Akan tetapi dengan semakin santernya berita Proklamasi Kemerdekaan R.I. Jepang merasa takut jangan-jangan radio *Sendenbu* digunakan oleh orang-orang Indonesia yang nakal. Akibatnya siaran radio serta merta dihentikan. Demikian pula harian-harian resmi Jepang tidak terbit lagi. Di Jakarta setelah harian *Asia Raya* lenyap, kemudian muncul harian *Merdeka* dan *Berita Indonesia* yang nasionalis, sedangkan di Surabaya *Suara Asia* lenyap mulai September, dan pada awal Oktober terbit *Suara Rakyat* yang benar-benar jadi alat para pejuang di Jawa Timur.

Peringatan *Kenpeitai* yang dimuat *Suara Asia* pada tanggal 21 Agustus 1945 tidak hanya ditujukan kepada orang Indonesia belaka, melainkan juga kepada Belanda peranakan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Sekutu, Jepang menegaskan bahwa kekuasaan masih dipegangnya, dan Jepang tetap berkewajiban untuk tetap menjaga keamanan yang harus dipatuhi oleh semua penduduk, termasuk Belanda yang merasa menang perang. Jepang dalam hal ini rupanya mengkhawatirkan tindakan Belanda yang berlebihan terhadap gerakan Indonesia yang revolusioner itu. Hal tersebut memang dapat dipahami, mengingat kesombongan para interniran yang mulai berkeliaran di luar kamp tawanan, sekali pun ada larangan Sekutu, agar mereka sementara tidak maninggalkan tempat tawanannya. Dengan sendirinya

berkeliarannya kaum interniran itu dengan sepengetahuan Jepang. Dalam hal ini Jepang bermuka dua.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pengambilalihan kekuasaan Jepang di Surabaya selesai, diadakan penataan pemerintahan kembali. Pada tanggal 20 Oktober 1945 pirnpinan Polisi Istimewa Kota Surabaya, Pembantu Inspektur Polisi II Suratmin diganti oleh Inspektur Polisi II Sucipto Danukotumo (kemudian Kapolri) setelah dilaksanakan pemilihan secara demokratis. Anggota Pasukan Polisi Istimewa Kota jumlahnya menjadi 160 orang. Markasnya di *Hoofd Bureau* (kantor Polisi Besar) di Parade Plain No. 1 (sekarang Taman Sikatan).

Pasukan Polisi Istimewa mempunyai status yang pasti dan diakui oleh Sekutu sebagai pemegang kendali keamanan yang sah, berbeda dengan badan-badan perjuangan lainnya seperti BKR, PRI, dan Hizbullah. Sekali pun demikian, sikap Polisi Istimewa Surabaya sebagai kekuatan bersenjata yang tunduk menurut hukum intenasional, ternyata tidak dapat memisahkan diri dari bangsanya yang tengah berjuang menegakkan kemerdekaan. Sikapnya sebagai patriot yang memiliki rasa kesetiakawanan, senasib dan sepenanggungan dengan bangsanya ditunjukkan secara konsisten dan konsekuen. Pasukan Polisi Istimewa terjun langsung mendampingi gerakan masyarakat dan aksi Arek-arek Surabaya untuk mengambil alih kekuasaan dan aktif mempelopori merebut senjata dari tangan Jepang. Dengan rasa gotong-royong segenap para pejuang menjadi pendukung kekuatan rakyat dan aparat yang efektif dari Pemerintah RI yang baru berdiri.

Proklamasi yang dicetuskan Polisi Surabaya di bawah M. Yasin bertujuan untuk meyakinkan rakyat, bahwa kewajiban Polisi adalah menjunjung tinggi dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan negara RI. Sebagai aparat Pemerintah, Polisi bersedia bekerja dengan pihak Jepang atau dengan Sekutu untuk menjamin ketenteraman dan keamanan umum. Ini merupakan kewajiban Polisi sebagai pegawai negeri. Naskah Proklamasi sebagai Polisi RI itu kemudian diperbanyak, disebarluaskan ke seluruh pelosok kota dan dikirimkan ke segenap instansi pemerintah tanpa menghiraukan ancaman Jepang. M. Yasin sebagai Kepala Polisi Istimewa Karesidenan terus menerus melakukan konsolidasi bersama-sama pemimpin-pemimpin masyarakat dan kalangan kepolisian untuk menjelaskan tujuan proklamasi.

Sebaliknya fihak Jepang dan Sekutu menganggap Polisi Istimewa Surabaya sebagai suatu "*doubt out factor*" atau sebagai polisi yang "tidak dapat dipercaya" untuk melindungi kepentingan mereka (yang akan menerima penyerahan "ndonesia" dari tangan Jepang) karena segala sikap dan tindakannya selalu memihak RI. Apalagi sikap itu ditegaskan oleh M. Yasin dalam pidato radio yang memerintahkan agar segenap Polisi Surabaya dimiliterisasikan dan wajib mengambil bagian dalam perjuangan.[34]

5.8. Pembentukan KNI Daerah Surabaya

Bersamaan dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar Negara RI (yang kemudian terkenal dengan nama UUD 1948) ditetapkan pula Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden R.I. yang pertama. PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan bahwa Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya Jakarta. Komite National Indonesia adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan clta-ctta bangsa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Instruksi Presiden untuk pembentukan Komite Nasional di Surabaya (daerah) jatuh pada tanggal 23 Agustus 1945. Di Surabaya dengan dipelopori oleh Angkatan Muda diadakan rapat persiapan pembentukan KNI di gedung Nasional (GNI) Bubutan selama 3 hari, mulai tanggal 25 Agustus 1945 hari Sabtu sarnpai akhirnya terbentuknya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 1945.[35] Dul Arnowo diangkat sebagai ketua, sementara Bambang Suparto dan Mr. Dwijosewoyo menjadi wakil ketua. Untuk posisi penulis ditunjuk Ruslan Abdulgani.[36]

Untuk menyambut sidang pertama KNIP di Jakarta dari tanggal 29 sarnpai 31 Agustus 1945, KNI Karesidenan Surabaya mengumumkan kepada rakyat agar mengibarkan bendera Merah Putih. Pengumuman tersebut disambut dengan serentak di Surabaya, padahal Pemerintah Pusat baru mengeluarkan Maklumat tentang pengibaran bendera pada 1 September 1945.[37] Oleh Ruslan Abdulgani pengibaran bendera Merah Putih tersebut dikenal dengan nama *Flaggen Actie*.[38] Sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan dipelopori oleh Agen Polisi III Nainggolan telah diadakan pengibaran bendera Merah Putih di Asrama Polisi Istimewa di *Coen Boulevard* No. 7 Surabaya.

Kenpeitai mencoba membendung gerakan para pemuda yang mendukung pemerintah baru Republik Indonesia, tidak dihiraukan, padahal sebelumnya *Kenpeitai* sangat ditakuti karena kekejamannya. Dengan demikian, perlawanan terhadap Jepang sebenarnya telah berkobar. Lembaran pengumuman Jepang yang ditempelkan di mana-mana, dalam Kota Surabaya dalam waktu yang singkat disobek-sobek oleh pemuda dan rakyat dalam suasana kemarahan. Tindakan yang diambil KNI selanjutnya memutuskan dan menghapuskan segala sesuatu yang berbau Jepang, membubarkan jawatan buatan Jepang seperti Jawa *Hokokai*, Keibodan, Seinendan, Badan Pembantu Prajurit *Romusyokyokai* pada akhir bulan Agustus. Kemudian pada tiap lingkungan (*syiku*), kecamatan, kelurahan, perusahaan, secara spontan dibentuk KNI-KNI. Bekas pemimpin-pemimpin Seinendan dan Keibodan menyatakan siap menerima tugas dari KNI.

Dengan demikian lembaga pemerintahan di Surabaya yang pertama kali dibentuk adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), sekalipun masih di dalam suasana di bawah kekuasaan Jepang. Para pemimpin pemerintahan bangsa Indonesia dan KNI berusaha keras untuk melepaskan diri dari kekuasaan Jepang. Untuk ini perlu dikeluarkan satu maklumat kepada rakyat dalam bentuk proklamasi juga. Masalah ini digodok oleh KNI yang dipimpin oleh Dul Amowo.

Badan-badan baru seperti BKR dan KNI yang harus dibentuk di daerah-daerah dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Para pemimpin daerah yang jauh dari Pusat masih memerlukan beberapa penjelasan. Namun tidak demikian halnya dengan para pemuda. Mereja kerap tidak sabar dengan sikap ragu-ragu para pemimpin. Tanpa menunggu komando mereka membentuk organisasi-organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan lain-lain, yang kemudian berhasil menyusun laskar laskar bersenjata, di samping BKR yang kemudian menjadi TKR.

Sementara itu pihak Belanda tidak tinggal diam. Berdasarkan *Civil Affairs Agreement* (CAA) dengan Inggris pada tanggal 24 Agustus 1945 di Chequers, di mana Inggris berjanji membantu menegakkan NICA di bekas jajahan Belanda, maka persiapan telah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan berkedok RAPWI, suatu badan rehabilitasi tawanan perang, Sekutu dan interniran dan orang-orang

sipil Belanda berdatangan ikut membonceng tentera Sekutu ke Indonesia untuk segera menyusun kekuatan. Sasaran pertamanya adalah kamp-kamp interniran Belanda untuk mengerahkan kawan-kawannya merebut kekuasaan dari Jepang dengan menduduki berbagai pos dalam pemerintahan seperti residen, asisten residen dan jabatan-jabatan lain di berbagai departemen. Pasukan-pasukan kepolisian yang terdiri dari bekas interniran segera mereka bentuk.

Tokoh-tokoh NICA seperti Van der Plas, Abdulkadir Wijoyoatmojo, Van Straten yang telah berada di Indonesia, melakukan kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di luar negeri, seperti van Mook, Helfrich dan lain-lain. Selain membina orang-orang Belanda, mereka mulai menghubungi orang-orang Jepang, baik militer maupun sipil "Sakura", serta yang bersedia bekerja sama.[39] Secara illegal mereka berkunjung ke daerah-daerah, khususnya Jawa Barat, yang akan dijadikan pusatnya. Bekas interniran akan dijadikan polisi militer guna menjamin keamanan. Letnan Gubernur Jendral Dr. H.J. van Mook akan memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, sedangkan para gubernur diberi pangkat mayor jendral, residen dengan pangkat kolonel, dan sebagainya. Maksudnya sama seperti Pemerintah R.I. untuk mengembalikan "*Rust en Orde*", ketenangan dan ketertiban.

Demikian Kolonel Spoor dengan NEFIS-nya (Netherlands Forces Intelligence Service), sudah mulai lengkap dan memainkan peranannya di Surabaya dan di kota-kota besar lainnya untuk menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda. Oleh pihak Belanda dikirim ke Surabaya antara tain Kolonel Huiyer dan kawan-kawan, dan juga Mr. Ploegman yang tewas dalam peristiwa Hotel Oranje.

Sekutu yang jeli akan bahaya kekacauan yang akan ditimbulkan pihak Belanda tidak mengijinkan kedatangan tentara Belanda, serta melarang Jepang berhubungan dengan siapa-pun, kecuali dengan pucuk pimpinan Sekutu. Bahkan Mountbatten menginstruksikan kepada Jepang agar para interniran tidak diperkenankan meninggalkan tempat kamp-kampnya, karena dia masih bertanggungjawab atas keamanannya. Dengan sendirinya sikap Sekutu ini mengecewakan Belanda, sehingga timbul tuduhan seolah-olah pro-Republik. Dan tidak kepalang murka Belanda ketika dalam perundingan di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945 tercantum pengakuan— oleh Mayor Jendreral

D.C. Hawthorn atas nama Sekutu—bahwa TKR dan Polisi RI adalah alat keamanan bersama tentara Sekutu.

Dalam situasi demikian, Belanda dan para pimpinan Indonesia berlomba menguasai seluruh wilayah masing-masing dengan cekatan mendekati hati rakyat, sambil main mata baik dengan Jepang maupun dengan Sekutu, dan masing-masing dalam posisi yang semakin kuat. Pemimpin Indonesia juga harus memperhatikan sisa kekuatan Jepang, peranan Sekutu, siasat Belanda dan tuntutan rakyat yang semakin galak. Demikian keadaan tanah air pada bulan-bulan pertama sejak Proklamasi yang pengaruhnya sangat terasa di Surabaya dan di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Kedua belah pihak giat berlomba dengan waktu untuk secepat mungkin memperoleh kemajuan dengan menggunakan berbagai macam siasat dan kekuatan.

Sementara itu Residen Suridman mendapat panggilan untuk menghadiri sidang pertama KNIP dan permusyawaratan Pegawai Negeri di Jakarta. Ia berangkat tanggal 27 Agustus dan kembali pada tanggal 3 September sore hari. Untuk mengkonsolidasikan keamanan, pada tanggal 2 September 1945 di Surabaya telah dibentuk BKR, yang anggota dan pimpinannya terdiri dari bekas para anggota tentara Peta. Pada sore hari tanggal 3 September 1945 itu mereka berada di rumah Ketua KNI Dul Arnowo. Setelah mendengar kabar Residen Sudirman telah datang dari Jakarta, Dul Amowo mengutus beberapa orang bekas perwira Peta pergi ke rumah Residen Sudirman untuk membawa surat yang harus ditandatangani oleh Residen Sudirman. Mereka berangkat beramai-ramai antara lain Isa Edris, Kholil Tohir, Usman Aji, Yahya Hasyim, Abdul Wahab. Surat diserahkan kepada Residen Sudirman. Tanpa dibaca lebih lanjut surat itu ditandatangani. Surat dikembalikan kepada para pengantar, untuk disampaikan kepada Dul Amowo.

Surat itu sebenarnya adalah Proklamasi Pemerintah Republik Indonesia Surabaya. Pada sore hari itu juga surat itu dicetak, kemudian malam harinya disebarkan ke Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan. Isi Proklamasi Daerah Surabaya tanggal 3 September itu sebagai berikut:

> "Bersandar atas Proklamasi Indonesia Merdeka tertanggal 17-8-2606, sebagai hari kebulatan kemauan bangsa Indonesia, mengikuti perintah PYM Presiden Republik Indonesia yang

disiarkan dengan pidato radio pada tanggal 23-8-2605 dengan anjuran Pusat Komite Nasional Bangsa Indonesia di dalam putusan permusyawaratan di Jakarta pada tanggal 29-8-26-05 dengan ini diumumkan :

1. Terhadap segala perbuatan yang menentang Pemerintah R.I. diambil tindakan keras
2. Di seluruh daerah Surabaya bendera kebangsaan Indonesia, sang Merah Putih harap dikibarkan.[40]
3. Keamanan dan ketentraman umum dipegang dengan keras dan menurut peraturan yang berlaku hingga sekarang.
4. Terhadap pelanggar paraturan tersebut oleh yang berwajib diambil tindakan tegas.
5. Segala pekerjaan, usaha dan urusan pemerintah tetap berjalan sebagai sediakala sebelum ada penetapan lebih lanjut
6. Kepada seluruh penduduk diperintahkan untuk melakukan kewajiban sehari- hari dengan tenang seksama dan mengikuti disiplin.
7. Kepada semua badan-badan usaha dan perkumpulan-perkumpulan diperintahkan untuk bekerja terus di dalam suasana kekeluargaan saling membantu untuk keselamatan, masyarakat, dan penduduk umumnya. [41]

Pada siang harinya Residen Sudirman mengadakan musyawarah dengan para pegawai Kantor Karesidenan untuk menjelaskan situasi yang harus dihadapi oleh para pegawai Republik Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama terbentuklah KNI Kota Surabaya dengan susunan: Ketua, Sumantri; wakil ketua, Ruslan Wongsokusumo; dan anggota antara lainDr. Sugiri. Sujamin, Sudibyo. Antara Komite Nasional Kota dan Komite Nasional Daerah wilayahnya saling menutupi (*overlap*) satu sama lain. Oleh karena itu aktivitas KNI Kota tidak mau integral dengan KNI daerah.

Dalam masyarakat kemudian timbul masalah baru, yaitu usaha kembalinya Belanda memerintah Surabaya setelah kekalahan Jepang. Orang Belanda bekas interniran yang berkeliaran mulai beraksi. Mereka

berusaha mengkonsolidasikan diri dengan membentuk Komite Kontak Sosial pada tanggal 27 Agustus 1945. Jadi bersamaan dengan terbentuknya KNI daerah Surabaya. Tokoh-tokohnya berasal dari bekas Indo Europees Verbond (IEV) seperti A.W. Bastiaans, Mr. W.V.C. Ploegman, J. Hoeksema, dan C.A. Coenink. Dengan dalih dan berlindung di bawah nama "*Intercross*" Palang Merah Internasional dengan tugas kemanusiaannya, mereka melakukan aksi-aksi politik dan mata-mata dengan mendapatkan fasilitas yang terbaik pada waktu itu, yakni Hotel Yamato (Oranje Hotel). Mereka diam-diam mendapat bantuan dari Jepang. Mereka dengan leluasa melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Belanda.

Pada akhir Agustus 1945 Belanda interniran yang telah berkeliaran di Surabaya merencanakan merayakan kemenangan Sekutu dengan mengibarkan Tiga Warna pada "*Koninginne dag*", yaitu hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Sebagai inti Hari kebangsaan Belanda itu jatuh pada tanggal 31 Agustus 1945. Kepala Keamanan Jepang, Cianbucho takut juga terhadap reaksi dari pihak Indonesia, maka untuk tidak menambah resiko permohonan orang-orang Belanda tadi ditolak. Akibatnya, orang-orang Belanda hanya merayakannya dalam lingkungan terbatas di antara mereka saja.



Hotel Yamato tempat peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia sebagai bukti dukungan rakyat Surabaya pada kemerdekaan Indonesia *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI)*

Dengan tidak diduga pada hari Sabtu tanggal 1 September 1945, bendera Merah Putih berkibar dengan megah di atas Kantor

Syucokan (Gubernuran). Hal tersebut menimbulkan kegeraman pada orang-orang Belanda yang kemudian protes kepada *Syucokan.* Para pembesar Jepang sendiri juga terkejut dan bingung dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Ketegangan itu kemudian ditengahi oleh Mr. Sumardi, Kepala Bagian Pemerintahan (Naisebu). Dia memberi saran agar bertindak hati-hati sebab bila bendera yang telah berkibar dan sarnpai dilihat oleh umum diturunkan kembali, akan merupakan penghinaan bagi bangsa Indonesia. Hal itu akan berakibat buruk bagi keselamatan orang-orang Jepang sendiri. Oleh karena itu, dianjurkan agar satu hari ini saja dibiarkan berkibar di tempatnya sarnpai sore. Pernbesar-pembesar Jepang dapat menerima nasihat itu. Dengan hati kesal orang-orang Belanda meninggalkan gedung.[42]

5.9. Pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR).

Seperi telah diutarakan, segera setelah berita Proklamasi Kemerdekaan RI sarnpai di tangan penguasa Jepang di Surabaya, dan berita kekalahan Jepang dalam perangnya melawan Sekutu juga sudah terdengar, maka Peta (Pembela Tanah Sir) dilucuti senjatanya dan dibubarkan. Peta dikhawatirkan akan melakukan perlawanan terhadap Jepang, seperti yang telah dilakukan di Blitar bulan Februari 1945.

Para anggota Peta di *Daidan* Gunungsari pada tanggal 18 Agustus dicutikan dalam waktu tidak terbatas. Tapi pembubaran Peta baru dapat dilaksanakan dengan tuntas lima hari sesudah proklamasi. Untuk menyelenggarakan keamanan rakyat, karena Jepang menyerah dan tidak dapat diharapkan lagi bantuannya, Pemerintah Pusat mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 23 Agustus 1945. Di Surabaya, karena pada bulan Agustus sibuk dengan pembentukan KNI daerah Surabaya, maka pembentukan BKR belum dapat dilaksanakan.

Baru pada 2 September 1945 berhasil dibentuk pengurus daerah Badan Penolong Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertempat di bekas Gedung Badan Pembantu Prajurit (BPP) Jalan Kaliasin 121. Rapat dihadiri oleh hampir semua bekas pimpinan Peta, Heiho, kaum pergerakan dan lain-lain. Penjelasan mengenai situasi negara yang terancam oleh bahaya, garis-garis perjuangan selanjutnya diberikan oleh Ketua KNI Karesidenan Surabaya, Dul Amowo. Kepada para bekas anggota Peta, Heiho dan lain-lain dianjurkan untuk

mengadakan kontak-kontak dengan anak buahnya serta memanggilnya untuk membela Tanah air. Dalam rapat tanggal 2 September 1945 malam berhasil diputuskan pembentukan BPKKP dan BKR untuk daerah Karesidenan Surabaya. BPKKP dipimpin oleh Dul Amowo sedangkan BKR dipimpin Drg. Mustopo.[43]

Penyempurnaan pembentukan BKR lebih lanjut dibahas dalam pertemuan di GNI Bubutan oleh para bekas Daidanco, Syudanco, Cudanco dan anggota-anggota Peta lainnya yang terkumpul pada tanggal 4 September 1945.Oleh karena kota Surabaya di samping Kota Praja, Ibukota Karesidenan Surabaya juga sebagai pusat dan Ibu Kota Jawa Timur, kemudian diputuskan untuk membentuk 3 eselon BKR yaitu: BKR Jawa Timur, BKR Karesidenan, dan BKR Kota Surabaya.[44]

Pimpinan BKR Drg. Mustopo, yang juga dosen Fakultas Kedokteran Gigi (*Shika Daigakku*), menggunakan para mahasiswanya untuk menyamar sebagai pelayan Hotel Yamato (Oranje Hotel). Hotel tersebut biasa digunakan untuk menginap misi-misi internasional dari Jakarta. Mereka dikoordinir oleh Suyono Prawirobismo, kepala bagian pemberitaan Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang berhubungan erat dengan kepala intelijen PRI Rustam Zein.

Dalam perkembanganya, dalam perundingan-perundingan dengan Jepang dan Sekutu karena pihak-pihak tersebut menghendaki wakil yang berwewenang dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai syarat berunding, maka Mustopo menggunakan nama kedudukan sebagai "Menteri Pertahanan ad interin". Tindakan Drg. Mustopo sebagai Menteri Pertahanan dan pimpinan BKR Jawa Timur sering menunjukkan hasil gemilang dan sangat menguntungkan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mustopo kerap menerima penyerahan kekuasaan dan senjata, dan sejumlah uang untuk biaya revolusi. Melalui Jaksa Agung Mr. Gatot, Pemerintah mengeluarkan pernyataan dan pengakuan agar Drg. Mustopo terus menjabat pekerjaan Menteri Pertahanan dan kepadanya diberi kuasa penuh untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Bahkan oleh Jaksa Agung diserukan kepada seluruh rakyat dan badan-badan pemerintahan agar Drg. Mustopo terus dibantu. Sebagai landasan hukumnya dikeluarkanlah surat keterangan untuk Drg. Mustopo agar dapat bertindak "secara" Menteri Pertahanan dan melaksanakan tugas-tugas Menteri Pertahanan.[45]

Kegiatan BKR Karesidenan terus bertambah sesudah terjadinya Peristiwa Bendera 19 September 1945. BKR sangat berperan dalam pengarahan massa pada peristiwa rapat raksasa di Stadion Tambaksari tanggal 21 September 1945, seraya memberikan penerangan bahwa dengan mendaftar anggota BKR berarti meningkatkan pentingnya pembelaan terhadap negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Apa lagi setelah perebutan Gedung Kenpeitai tanggal 1 - 2 Oktober 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Dekrit Residen Sudirman tanggal 2 Oktober 1945, BKR sejak tanggal tersebut diangkat sebagai Badan Pemerintah di bawah pimpinan Residen Surabaya R. Sudirman. Mengingat gentingnya situasi dan desas-desus mengenai mata-mata musuh yang masih berkeliaran, bekas antek-antek Belanda atau Jepang di tengah-tengah masyarakat, antara sesama BKR pertu diadakan tanda-tanda sandi yang membedakan anggota BKR dengan anggota badan perjuangan lainnya atau pun dengan pihak mata-mata musuh.[46]

Sebagai tengara khusus disepakati adanya gerakan kopiyah hitam. Karena kebanyakan bekas anggota Peta itu gundul, mereka diharuskan memakai kopiyah hitam (peci) sebagai tanda kawan. Gerakan bersifat konsensus lainnya dilahirkan di rumah Sampurna (bekas *Syodanco*) di mana dinyatakan bahwa setiap prajurit (*giyukai*) diharuskan memimpin ±10 orang pemuda. Situasi bapakisme yang kuat dan semangat yang timbul karena mitos merdeka atau mati, maka keharusan yang demikian menjadi kenyataan. Secara resmi BKR Pusat dan Karesidenan Surabaya mengumumkan adanya pendaftaran para pemuda bekas Peta, *Heiho*, *Heiho Kaigun*, dan *Jibakutai*.[47]

Sementara itu, BKR Kota di bawah pimpinan Sungkono juga telah mempersiapkan diri untuk membentuk TKR. Diumumkan kepada para pemuda anggota BKR bekas Peta, *Heiho* dan lain-lain untuk segera mendaftarkan diri pada kantor *Syiku* (kewedanan) masing-masing, untuk menjadi TKR. Syarat-syaratnya adalah pemuda yang berusia 14-25 tahun. Belum sampai TKR Kota terbentuk, beberapa pemuda telah membentuk batalyon TKR yang sifatnya berdiri sendiri. Batalyon atau markas instansi militer dibentuk secara spontan, seperti Batalyon Jarot Subiyantoro yang dibentuk di Julianalaan pada bulan Oktober. Juga terbentuk Markas Besar Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) dipimpin oleh Hasanudin Pasopati. PTKR ini bermarkas di bekas Gedung Kenpeitai, Jalan Alun-alun No. 17. Batalyon TKR Sambongan yang berkekuatan 500 orang dipimpin oleh Abi Siswadi dan Isma Chandra,

sedang TKR Tembaan di bawah pimpinan Masduki Abu kemudian bergabung dengan TKR Karesidenan. Lahir Pasukan Keteknikan (*Genie* Pelajar) Jawa Timur yang terdiri dari pelajar Sekolah Tehnik yang semua adalah Staf II Gabungan Pelajar. Pasukan ini dipimpin oleh gu-runya Ir. Nowo Djojosentono dan pelajar Sunarto. Kekuatan mereka 70 orang dengan senjata lengkap. Mereka bermarkas di Gedung Sekolah Tehnik Sawahan, kemudian pindah ke Darmo.

Mungkin karena perbedaan pendapat dalam strategi mempertahankan Kota Surabaya dengan Drg. Mustopo selaku Ketua BKR Jawa Timur,[48] maka sarnpai bulan November 1945 Sungkono belum membentuk TKR Kota, tetapi masih tetap mempertahankan eksistensi BKR sebagai wadah semua kekuatan rakyat dan TKR. Sungkono berpendapat bahwa kota tidak boleh ditinggalkan. Pendapat pimpinan BKR ini didukung antara lain oleh Batalyon Jarot Subiyantoro, terutama setelah Resimen Gajah Mada (TKR Karasidenan) diperintahkan oleh Yonosewoyo memindahkan markasnya dari Gedung HBS ke Ketegan Sepanjang yang jaraknya ± 12,5 km dari kota. Adapun panglimanya sendiri markasnya juga pindah ke Kletek (17,6 km dari kota). Peristiwa pemindahan ini terjadi sesudah perundingan dengan Serikat pada akhir Oktober. Sungkono juga mendapat dukungan dari kelompok pelajar yang dipimpin oleh Mas Isman, PTKR di bawah Hasanuddin Pasopati (pembentuk Markas Besar Polisi Tentara Keamanan Rakyat) di bekas Gedung Kenpeitai dan Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan di bawah Mokhamad Yasin serta Polisi Istimewa Kota di bawah Sucipto Danukusumo. Karena itu BKR Kota belum melebur diri ke dalam TKR sarnpai akhir bulan November.

Peristiwa di atas menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini kemudian dinetralkan dengan menempatkan pasukan kembali di dalam kota, hanya markas komandannya berada di luar kota. Proses pembentukan kekuatan berjalan terus.

5.10. BKR Laut dan Marine Kamanan Rakyat (MKR)

Pada jaman Jepang Penataran Angkatan Laut (PAL) disebut SE 21/24 Butai. Di tempat itu oleh Jepang didirikan suatu Badan Kebaktian (Hokodan) dan Barisan Sukarela (Dai-dan), yang kekuatannya ±3000 orang, dipimpin oleh Ali Mulyadi Notohadinoto. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu kemudian buruh SE 21/24 Butai dikumpulkan

di lapangan Ujung.[49] Kaigun mengumumkan karena perang telah selesai SE 21/24 Butai akan diserahkan kepada Sekutu. Sehabis bekerja kemudian para buruh SE 21/24 mengadakan rapat di Sidotopo, dengan dipimpin oleh Mokhamad Affandi, Wakil Ketua Badan Kebaktian SE 21/24. Rapat itu memutuskan dua hal: (1) SE 21/24 Butai diganti namanya dengan Penataran Angkatan Laut (PAL); dan (2) Hokodan (Badan Kebaktian SE 21/24 Butai) dengan 9000 anggotanya diganti menjadi Serekat Buruh Indonesia Penataran Angkatan Laut (SBI PAL),[67] MKR, dibantu oleh Gunasdi dan Affandi. Pada tanggal 31 Oktober 1945 pembentukan MKR itu secara resmi diumumkan.

Proses pembentuan MKR melalui peorses relative panjang, yang bisa dilacak pada 5 Oktober 1945, di mana dengan perantaraan radio diadakan panggilan para pelaut untuk mendaftarkan diri di PAL Ujung. Pelaut-pelaut bekas pelajar sekolah pelayaran ditampung di *Modderlust*. Ternyata dalam catatan Kelompok Kerja ini tidak dijelaskan adanya dua tempat pendaftaran *Modderlust* dan Hotel Ngemplak,[50] seperti diutarakan oleh Barlan. Mereka yang diasramakan di *Modderlust* diberi makan dari dapur umum bekas Kaigun di Ujung. Pada 5 Oktober 1945 SE 21/24 Butai secara resmi diserahkan kepada RI (Lihat pengambilalihan kekuasaan di Ujung). Menurut Nugroho Notosusanto, pendaftaran pelaut-pelaut itu dilakukan di dua tempat yaitu di Jalan Ngemplak 36 dan Benteng Timur Ujung. Panitia Ngemplak urusan pendaftarannya sedang Panitia Ujung menangani urusan penempatan. Ketua Panitianya dipegang oleh Joko dan Yakinu. Dalam rapat Panitia Pendaftaran tersebut atas usul Gunadi kemudian dibentuklah Panitia Pembentukan Marine Keamanan Rakyat (MKR) di bawah pimpinan Atmaji, yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat tadi.

Tanggal 25 Oktober 1945 Inggris masuk pelabuhan Tanjungperak. Pasukan Inggris mulai didaratkan tanggal 26 Oktober 1945 dan dimintanya (dipinjam) dua buah gedung di sekitar *Modderlust* untuk merawat tentara Inggris yang terluka. Permintaan itu disetujui. Tetapi rupa-rupanya Inggris terus-menerus mendaratkan tentaranya. Mulai jam 12.00 pasukan tersebut bergerak di Bentengmiring. Kejadian itu dilaporkan oleh Rambe.[74] Karena itu, pasukannya ditarik ke Bentengmiring untuk bersama-sama dengan PRI AL, SBI, PAL dan lain-lain badan perjuangan.

Setelah mundur ke Ngemplak pada tanggal 28 Oktober 1945, menurut Umar Said (pimpinan BKR Laut *Modderlust*), ternyata Affandi, Atmaji dan Gunadi telah membentuk Marine Keamanan Rakyat (MKR) tanpa sepengetahuan Umar Said. Jadi ia merasa dilalui. Namun, karena bertujuan menyatukan Komando dalam lingkungan pelaut, ia menerima kenyataan itu. Di Markas Besar Ngemplak inilah bercampurnya unsur BKR Laut *Modderlust* dengan Marine Keamanan Rakyat dan unsur-unsur yang semula berasal dari PAL, seperti SBI/BBI dan PRIAL pimpinan Affandi. BKR Laut Tanjungperak di bawah pimpinan Humarwoto kemudian juga ditarik mundur ke Ngemplak.

Setelah pertempuran Tiga Hari selesai, pada tanggal 2 November 1945 diadakan rapat reorganisasi unsur-unsur kekuatan Laut di Hotel Embong Wungu. Hadir dalam pertemuan Itu Munaji, Mukhtar, Gunadi, Katamhadi dan lima orang lagi dari MKR, dari BKR Laut hadir Y. Sulamet dan Suparman. Dari Tanjungperak Humarwoto dan Marjuki. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas hubungan antara badan-badan perjuangan laut itu dengan TKR. Kemudian diputuskan nama MKR diganti menjadi TKR Laut. Perubahan nama tersebut diumumkan pada tanggal 6 November 1945.[51]

Ketika membahas tentang pasukan yang dipimpin oleh Umar Said, mula-mula pasukan itu akan dimasukkan ke dalam BKR Laut dan dinamakan Pasukan Laut, namun hal itu tidak bisa diterima oleh pimpinan BKR Laut, sehingga tercetuslah ucapan dari fihak wakil MKR, Mukhtar, istilah "Pasukan Liar' bagi pasukan Umar Said. Istilah itu diterima pasukan Umar Said dan dipakai sebagai nama pasukannya, yaitu Pasukan L. Ucapan itu tercetus oleh Mukhtar dari anggapan Munaji, bahwa anggota-anggota pasukan itu masih anak kemarin sore, kurang taktis bicaranya. Karena Hotel Ngemplak sudah terlalu padat, Pasukan L mendapat tempat di Embong Malang (Hotel Sarkies) pada tanggal 7 November 1945. Di tempat itu kemudian diadakan konsolidasi antara pasukan bekas BKR Moderlust dan Tanjungperak. Mereka sepakat untuk melakukan penggabungan. Pertemuan itu menghasilkan terbentuknya Pasukan L (Liar).

Pasukan itu di Surabaya masih bergerak sendiri-sendiri. Namun, di bawah pimpinan Suparman, Pasukan L makin menjadi teratur. Suparman tampaknya lebih mampu dan lebih tua dari anggota lain, ia memiliki sifat kebapakan. Hubungan diperluas sarnpai kepada kesatuan samping guna menambah senjata dan perlengkapan. Dengan

didapatnya kendaraan berlapis baja (*panserwagon*) Pasukan L makin berwibawa.

5.11. Pemuda Republik Indonesia (PRI)

Pemuda ikut mengambil peran dalam mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi, pemuda dan rakyat Indonesia menjadi pengisi dan pembela proklamasi. Kekuasaan yang masih dalam cengkeraman Jepang harus direbut dan diambil alih. Jepang tidak mungkin akan menyerahkan kekuasaan itu kepada bangsa Indonesia begitu saja.

Di Surabaya, para pemuda bergerak cepat keluar masuk kampung menggelorakan semangat rakyat. Hanya satu cita-cita yang diusung, yaitu persatuan rakyat Indonesia yang erat guna menyusun dan menggerakkan tenaga untuk mengisi dan mempertahankan Proklamasi. Diakui atau tidaknya Republik Indonesia oleh dunia internasional adalah urusan nanti. Segala sesuatu yang penting untuk mengisi Proklamasi dilakukan tanpa ragu-ragu.[52] Surabaya yang selama tiga tahun mengalami pemadaman listrik terus-menerus, sejak tanggal 22 Agustus 1945 menjadi terang-benderang.

Pada akhir bulan Agustus *Keibodan* dibubarkan. Pada tanggal 24 Agustus 1945 secara resmi para pembesar Jepang membacakan tentang berakhimya perang dan pernyataan Tenno Heika dan Saiko Sikikan di hadapan pejabat Pamong Praja.Pada pertengahan bulan September, tentang pengambilalihan kekuasaan dan perlucutan senjata Jepang diperdebatkan oleh para pemuda di lingkungan AMI Surabaya. Tanggal 20 September 1945 sebuah rumah kediaman seorang Jepang diambil alih oleh para pemuda. Mereka itu Jamal, Pramuji, Sujono, Suyono, M. Dimyati, Suwardi (pyeng), Karyono Ys dan kawan-kawan. Rumah itu terletak di sudut *Princesselaan* no. 1 Surabaya. Jalan di sebelah rumah tadi kemudian dinamakan Jalan Merdeka (sekarang Widodaren).

Jamal mengajukan usul agar gedung itu dijadikan suatu Markas Komando Revolusi Surabaya. Usul itu disetujui dan disebarkan kepada kawan-kawan lain di Surabaya. Mereka juga bersepakat untuk mendirikan Markas Besar Pemuda Republik Indonesia (PRI) Surabaya. Pada esok harinya pagi-pagi jam 06.30, tanggal 21 September 1945,

Jamal telah memasang spanduk besar di depan gedung bertuliskan: Markas Besar Pemuda Republik Indonesia. Dengan demikian terbentuklah PRI, Pemuda Republik Indonesia Surabaya.[53] Yang menjadi masalah adalah apakah kekuasaan dengan persenjataan Jepang akan terus berlangsung? Apakah para pemuda terus menunggu-nunggu adanya instruksi dari Jakarta untuk mengambil alih kekuasaan Jepang di Surabaya? Apa harus ada prakarsa bertindak melucuti senjata Jepang berdasarkan tekad dan kemampuan sendiri?

Akhirnya, setelah melalui perdebatan seru, konsep untuk segera bergerak datang dari Sumarsono dan Ruslan Wijayasastra dan disetujui rapat. Lalu PRI mempelopori usaha mengambilalih kekuasaan dan persenjataan Jepang. Untuk mematangkan situasi dan menggelorakan semangat warga Surabaya, maka pada tanggal 21 September para pemuda menyelenggarakan rapat samodera di Tambaksari.

Rapat AMI, yang diselenggarakan tanggal 23 September 1945 memutuskan bahwa AMI berintegrasi dalam suatu bentuk organisasi pemuda, yaitu PRI. PRI dianggap lebih sesuai dengan aspirasi revolusi para pemuda waktu itu. Maka serah terima dilaksanakan dari pimpinan AMI, Ruslan Abdulgani, kepada Sumarsono sebagai pimpinan PRI. Dengan demikian untuk selanjutnya AMI tidak ada lagi.

PRI merupakan badan perjuangan atau organisasi kelaskaran yang dibentuk pertama kali di Surabaya berdasarkan spontanitas dan perasaan solidaritas yang tinggi antar-pemuda, karena panggilan jiwanya untuk menegakkan kemerdekaan. Peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi sejak bulan Oktober menyadarkan mereka perlunya segera dibentuk wadah perjuangan para pamuda. Karena itu, PRI mendapat sarnbutan dan simpati besar di kalangan pemuda. Dapat dikatakan hampir semua pemuda di Surabaya menyatakan diri masuk PRI.

Meskipun dalam suasana yang tidak menentu, PRI terus barjalan. Kepengurusan PRI sering diganti. Pemuda yang saat ini duduk dalam kepengurusan, karena dalam bebarapa hari tidak datang oleh pengurus diganti dengan pemuda lain, atau kelompok lain. Meski demikian, tugas dan kegiatan PRI berupa latihan dan penjagaan obyek vital dilakukan secara bergilir dan terus dilaksanakan. Kesibukan dan kegiatan terus berkembang. Kantor tempat lahir gerakan pemuda itu tidak mampu lagi menampung berbagai kegiatan, maka memerlukan

tempat yang lebih luas lagi. Karena itu, Markas PRI di *Princesselaan* dipindahkan ke Simpang Club (sakarang Balai Pemuda). Dengan Simpang Club sebagai kantor pusat PRI sakaligus markas besarnya, semua kegiatan pamuda dapat diatur dan dikendalikan dari tempat itu. Sebagai organisasi pemuda terbesar, PRI mencakup hampir seluruh organisasi pemuda yang dibentuk secara lokal ataupun berdasar etnis di Surabaya, dan karena besarnya maka pengendalian kegiatan dilimpahkan pada markas lokal atau setempat. Ternyata PRI setempat atau PRI lokal juga mernpunyai pasukan sendiri,

Kekuatan Inti PRI Pusat adalah Pasukan Istimewa. PRI memiliki kekuatan cukup banyak dengan senjata lengkap, sebagian besarnya diperoleh dari penjara Kalisosok dan dari merebut tempat-tempat senjata Jepang. Menurut Barlan dari pengakuan Pramuji, senjata tadi diperoleh sejak pembebasan Peta Ponorogo Daidan, berasal dari gudang persenjataan Jepang di Baruklinting (antara Saradan-Madiun), dengan bantuan Joko Suyono. Senjata-senjata itu kemudian dibawa ke Surabaya. Tetapi bagian senjata terbesar diperoleh dari gudang Angkatan Laut Jepang di Ujung, Kedung-cowek dan Gubeng lewat Atmaji dan Suwondo. Senjata angkatan darat Jepang diperoleh dari Katamhadi dan Suwondo. Atmaji, Katamhadi dan Suwondo adalah bawahan Drg. Mustopo, Komandan TKR Jawa Timur dan Menteri Pertahanan ad interim.[54]

Dalam konteks ini perlu pula disebutkan sejumlah PRI yang berbasis etnis tertentu yang ada di Surabaya, di antaranya dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Mereka juga membentuk Pemuda Republik Indonesia untuk kelompoknya masing-masing. Atas anjuran Tri Ekakoso dan M. Sapiya, pimpinan BKR Kota, Sungkono, dan BKR Karesidenan Abdul wahab, mengizinkan terbentuknya PRI Maluku. Setelah PRI Maluku terbentuk Sungkono pun memberikan surat keterangan. Lalu mereka menghadapi Residen Sudirman. Sudirman menyambut gembira. Pemuda Maluku itu diberi ijin untuk mendatangi kantor pemerintah dan mereka bergembira diijinkan, yang sekaligus guna menginsafkan suku Maluku bahwa mereka juga bangsa Indonesia. Pada tanggal 24 September 1945 Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API Ambon) terbentuk di Kamp Tambakrejo. Kemudian tanggal 27 September 1945 menyusul berdirinya PRI Maluku

Langkah PRI Maluku dan API Ambon yang pertama memperkenalkan diri kepada masyarakat. Atas prakarsa dr. Siwabessy dan Kalibongso, mereka mengadakan pertemuan dengan KNI Karesidenan Surabaya di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Bubutan. Dalam pertemuan ini Bambang Suparto berbicara sebagai wakil KNI dan Rambe sebagai kertua PRI Maluku. Dari pertemuan itu diputuskan untuk mencetak 5.000 helai maklumat yang ditujukan kepada segenap pemuda Maluku dan masyarakat luas, bahwa Maluku adalah bagian dari Republik Indonesia.[55]

Di samping PRI Maluku, di Surbaya jug dibentuk PRI Sulwesi pada September 1945 dan dan PRI Kalimantan pada Oktober 1945. Pembentukan badan-badan perjuangan dari berbagai kelompok etnis bukanlah hal yang mudah. Kecurigaan seringkali terjadi. Untuk mengatasi hal ini, Ketua KNI Dul Amowo bersama Tamboto terus mengadakan seruan lewat radio. Dalam hal ini Radio Republik Indonesia menyediakan program tetap untuk penerangan khusus mengenai hal ini. Yang berbibacara di antaranya adalah Dr. G.A. Siwabessy.

Berdirinya PRI Surabaya dalam waktu singkat disusul berdirinya PRI di tempat lain, yakni Mojokerto, Jombang, Gresik, Blora, Bojonegoro, Tuban, Sumenep Jember, Bondowoso, Malang, Kediri, Ponorogo (Jawa Timur), Magelang, Solo, Yogyakarta Purwokerto, (Jawa Tengah), Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, Garut (Jawa Barat) Sumatra Timur/Sumatra Selatan dan sebagainya. Kalau di luar Surabaya terdapat PRI yang sifatnya lokal, maka itu adalah sebagai akibat gema dari perjuangan di Surabaya waktu itu. Gerakan PRI di Surabaya ternyata mampu menarik simpati serta mampu mambangkitkan semangat patriotik dan revoiusioner kepada pemuda daerah lain. Gerakan bawah tanah juga berperan dalam hal ini. Selain dari pada itu pemuda seberang atau yang berasal dari Surabaya/Jawa, yang waktu itu tinggal di Surabaya, juga bergetar hatinya dengan semangat yang tinggi, beramai-ramai membentuk organisasi dan memilih nama PRI untuk tempat barnaung sebagai alat perjuangan. Mereka berjuang membaur dan bahu-membahu sebagai "Arek-arek Surabaya" dengan panuh solidaritas yang sangat meyakinkan.

5.12. Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI)

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tenaga kader pemudi oleh tokoh pejuang kemerdekaan dihimpun agar siap siaga mengadakan perlawanan terhadap penghalang kemerdekaan. Segenap rakyat Surabaya, para pemimpin serta para pemudanya yang terkenal berwatak spontan dan dinamis, dengan cepat siap siaga menjaga dan mernpertahankan kemerdekaan, di samping para pemuda Surabaya berhasil membentuk PRI yang sangat besar peranannya. Oleh kare itu, pemuda putri pun membentuk organisasi tersendiri.

Dalam konsolidasi dan proses pertumbuhan yang sangat singkat dari kegiatan Pemuda Puteri di Surabaya, kemudian timbul gagasan untuk mengadakan badan federasi agar rencana serta tujuan dapat terarah. Persatuan-persatuan Pemuda Putri yang terdiri dari ketiga kelompok—lingkungan pelajar-mahasiswa, kantor/pekerja, dan kampong—pada awal bulan September 1945 mengadakan rapat di GNI Jalan Bubutan Surabaya. Rapat tersebut kemudian melahirkan Federasi dengan nama Pemuda Puteri Republik Indonesia (PPRI), dengan Lukitaningsih sebagai ketua dan Murstah sebagai wakil.

Dalam aksi-aksi pengibaran Sang Merah Putih di rumah-rumah, di kantor di seluruh penjuru kota Surabaya yang masih dikuasai Jepang, PPRI ikut bergerak mengadakan aksi corat-coret, penempelan plakat, selebaran Merah-Putih di samping juga menjahit tanda pangkat BKR/TKR. Puncak aksi itu adalah diselenggarakannya rapat raksasa di Tambaksari pada 21 September 1945. Lukitaningsih, Ketua PPRI, tampil sebagai salah seorang pembicara pada rapat itu, dan menyatakan dan bersumpah atas nama rekan-rekannya untuk tetap mempertahankan berkibarnya Sang Merah Putih.

Seusai rapat, segenap penanggung jawab serta pembicara ditangkap oleh *Kenpeitai* dan ditahan di gedung *Kenpeitai*. Baru pada tengah malamnya, semua yang ditahan dilepaskan. Program PPRI disusun secara praktis: Membentuk laskar putri, mendirikan pos Palang Merah (P3K), mendirikan dapur umum dan menolong pengungsian. Dalam tempo singkat berhasil dikumpulkan 200 pemuda putri. Dari jumlah tersebut yang lulus tes medis 75%, kemudian diasramakan di Embong Sawo Surabaya. Latihan Palang Merah (ketrampilan P3K) dan

perawatan diselenggarakan di RSU Simpang (CBZ) dibawah pimpinan Dokter Sutopo dan Nyonya Sutopo.

Kelompok Pemuda Putri bergerak dalam lingkungan induk kesatuannya. Kelompok Sapiyah aktif di Markas PRI Simpang. Kelompok Yetti Zein di Markas Drg. Mustopo. Kader PPRI yang telah digembleng di Jakarta maupun di Surabaya dengan jiwa "Merdeka atau Mati" membantu para pemuda melawan Jepang. Kelompok *caraka* penyelidik dalam tugas membantu TKR menyusup ke daerah musuh dan daerah pertempuran Surabaya.

5.13. Terbentuknya Kantor Berita Antara dan Perjuangan para Wartawan

Kantor berita Antara di Jakarta didirikan oleh orang-orang pergerakan seperti Adam Malik, Sihaputar dan Mr. Sumanang. Di Surabaya sebelum terbentuknya Antara didahului dengan Kantor Berita Indonesia. Kantor berita Indonesia didirikan oleh tenaga nasionaiis revolusioner, dua minggu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tempatnya di Tunjungan 100 (sudut Embong Malang-Tunjungan). Upacara peresmian dihadiri oleh para tokoh pergerakan di Surabaya. Dengan nama "Indonesia" dimaksudkan agar pemberitaan yang disiarkan dapat segera manembus angkasa dan ditangkap dan terkenal melalui pemancar berita oleh transmitter kantor berita itu.

Berkat hubungan yang terus-menerus dengan Adam Malik dan Rakhmat Nasution di Jakarta, maka dua minggu kemudian Kantor Berita Indonesia di Surabaya dengan resmi mempergunakan nama Kantor Berita Indonesia "Antara" (*Indonesian News Agency "Antara"*). Pada tanggal 3 September 1945 Antara Surabaya mulai bekerja. Berita pertama yang merupakan *headline* hari itu adalah "Proklamasi". Residen Sudirman pada tanggal 3 September 1945 menyatakan bahwa daerah administrasi Karesidenan Surabaya adalah bagian dari Republik Indonesia.

Pihak *Kenpeitai* Jepang tidak tinggal diam. Semua plakat dan berita disita, disobek dan dimusnahkan. Namun para pemuda kemudian berduyun-duyun datang dengan bersenjatakan bambu runcing atau pentung ke kantor berita itu, dan menjaganya dengan sukarela siang dan malam terus-menerus sarnpai beberapa minggu.

Sampai tanggal 30 September 1945, kantor berita Antara bekerja dengan sokongan diam-diam tenaga dari kantor berita Domei milik Jepang. Alat penerima dan pengirim berita yang dikuasai Domei di Jalan Alun-alun 28 (sekarang Kantor Cabang Jakarta Loyd Jl. Pahlawan), secara diam-diam juga dipergunakan oleh Antara. Akan tetapi, Kantor Berita Domei kemudian diambil alih oleh karyawannya bersama sejumlah tenaga pejuang, dan dimasukkan menjadi "Antara". Jumlah pegawai serta tenaga pimpinan Antara saat itu meliputi 90 orang, dan kantor di Tunjungan dilepaskan, pindah ke kantor yang lebih besar bekas milik Domei. Tenaga penggerak dan pelopor kantor berita Antara di Tunjungan antara lain Sutomo (Bung Tomo), semula juga wartawan Domei. Tenaga lain yang mengikuti langkah Sutomo antara lain asalah Lukitaningsih (ketua PPRI), Mashud (pegawai keretaapi), Wiwiek Hidayat (pegawai keretaapi), Sujoko Hadionoto (pegawai Kotapraja, juru bahasa Jepang), Rakhmad, Karnadi (mahasiswa *Shikabu Daigaku*), Karsono, Tuty Askabul, Sutoyo, Gadio (penterjemah bahasa Jerman).[56]

Berdirinya Kantor Berita Indonesia pada tanggal 1 September 1945 dianggap sebagai "kesaksian sejarah" yang dirumuskan dalam piagam yang dilekatkan pada dinding gedung Jalan Tunjungan 100 Surabaya.

Dalam sejarah revolusi 1945, keadaan selalu berubah dan rangkaian peristiwa silih bergant. Dari gedung Jalan Tunjungan, Abdul Wahab mengabadikan peristiwa bendera di Hotel Yamato. Sutomo yang juga duduk dalam pimpinan PRI bagian Penerangan pada awal Oktober 1945 pergi ke Jakarta. Di Jakarta Sutomo melihat kekejaman tentara Sekutu dan Belanda untuk mematahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Apa yang dilihat di Jakarta itu memberikan inspirasi lain kepadanya. Sebelum bertolak ke Jakarta Sutomo dan Wiwiek Hidayat dibawa ke *Hoofd* Bureau. Di sana kedua wartawan itu ditunjukkan sebuah buku yang di dalamnya disebutkan nama P.J.G. Huiyer dan Roelofsen sebagai anggota Angkatan Laut Belanda (*Royal Netherland Navy*). Huiyer dan Roelofsen sudah di Surabaya, menyamar sebagai anggota *advance party* RAPWI dan berlagak sebagai perwira Inggris.

Perjuangan dengan Antara sebagai sarananya tidak selalu cocok bagi para pemuda saat itu. Oleh karenanya ada pemuda yang keluar dari Antara dan memilih memanggul senjata dan menggabungkan diri

di markas Drg. Mustopo. Karnadi dan Rakhmad sebagai ajudan atau kurir Drg. Mustopo. Lukitaningsih terjun di medan pertempuran memimpin bidang palang merah. Mashud dan Tuty menjadi pembantu Dul Amowo dan Radio Markas Pertahanan Surabaya. Sutoyo dan Wiwiek Hidayat menjadi wartawan perang. Sujoko menjadi wartawan di Kedaulatan Rakyat. Gadio Atmosantoso menjadi perwira Divisi Narotama diperbantukan pada Yonosewoyo.[57]

5.14. Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR)

Setelah gedung markas *Kenpeitai* diserbu dan dikuasai rakyat, bagian kanan gedung itu diduduki oleh sejumlah kecil kekuatan pemuda bersenjata. Selain kelompok kecil ini, seluruh rakyat penyerbu kembali ke tempat masing-masing. Sesuai dengan hasil perundingan antara pihak Jepang dan Indonesia, pasukan yang menduduki bagian kanan gedung Kenpeitai berada di bawah pimpinan Hasanudin Pasopati dan N. Suharyo. Pemuda bersenjata itu berintikan 6 pelajar dan bekas Peta. Hasanuddin adalah bekas Cudanco Peta sedang N. Suharyo adalah mahasiswa Ika Daigaku Jakarta, dari kelompok Prapatan 10. Pada gedung bagian sayap kiri masih terdapat sekitar satu kompi serdadu Jepang yang bersenjata. Atas perintah Jendral Iwabe, tiga hari kemudian pasukan Jepang itu dipindahkan ke tempat penampungan tahanan di Kompleks Pasar Malam (*Jaarmark*, kemudian THR) dengan meninggalkan seluruh persenjataannya dan perlengkapannya. Sejak itu gedung tadi sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Atas persetujuan pimpinan BKR Jawa Timur, Karesidenan dan Kota, Hasanuddin dan N. Suharyo membentuk Polisi Militer. Setelah peresmian berdirinya TKR, kelompok bersenjata tersebut bernama PTKR atau Polisi Tentara Keamanan Rakyat. Hasanuddin adalah Arek Surabaya keturunan Madura, bekas *Cudanco* Peta. Pada jaman Hindia Belanda bekerja sebagai guru lulusan HIK. Di PTKR pangkat Hasanuddin Letnan Jendral. Setelah ada peninjauan menjadi Letnan Kolonel.

Suharyo (panggilannya Kecik) juga Arek Surabaya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Tinggi di Jakarta, dari kelompok mahasiswa pejuang Prapatan 10 Jakarta. Latar belakang kemiliterannya: ia termasuk tiga orang mahasiswa kedokteran Jakarta (lainnya Suyitno dan Sugiyarto) yang terpilih masuk mengikuti latihan khusus Pasukan Khusus

Jepang bersama dengan pamuda pilihan dari seluruh Jawa. Sesudah ia menjadi wakil Komandan PTKR, dapat memberi bantuan berupa pakaian seragam dan senjata kepada Kelompok Prapatan 10 Jakarta. Berkat adanya kerjasama dengan Pamuda Kereta Api (Hartadi, Kepala Stasiun Kereta Api waktu itu) kiriman tersebut sarnpai di Jakarta dengan selamat pada pertengahan bulan Oktober 1945. Suharyo sebagai wakil komandan juga langsung memegang pasukan yang berkekuatan kira-kira 300 orang.[58]

Dalam bidang organisasi, PTKR memiliki bagian-bagian, di antaranya perlengkapan kendaraan, yang mengurusi perlengkapan dan kendaraan, kelancaran suplai logistik dan ma-kanan. Bagian rahasia, yang terdiri atas tenaga muda yang ditempatkan di instansi vital seperti kereta api. Selain itu ada juga bagian khusus tentang bagaimana menggunakan senjata secara taktis, yang sering menjadi hambatan. Para pemuda seringkali salah memasangnya sehingga senjata tadi tidak dapat ditembakkan. Kaliber peluru juga bermacam-macam, baik senjata yang berasal dari Jepang maupun dari Belanda, sehingga tidak tiap senapan cocok dimasuki peluru sembarangan. Untuk membantu kesulitan itu maka disusunlah kelompok untuk memberikan instruksi dan penerangan kepada badan-badan perjuangan di kampung sekitar markas PTKR tentang penggunaan senjata dengan tepat.[59]

Masalah lain yang dihadapi cukup rumit adaiah masalah mata-mata atau mereka yang dicurigai sebagai mata-mata. Pada waktu itu PTKR memiliki cukup wibawa dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Orang-orang yang dicurigai dan ditahan rakyat diserahkan kepada PTKR (ada pula yang diserahkan kepada MBPRI). Hanay saja, hal tersebut tidak jarang menyulitkan pimpinan. Karena semangat dan emosi meluap-luap pada waktu itu, maka banyak orang ditangkap karena prasangka belaka.

5.15. Radio Rapublik Indonesia (RRI) Surabaya

Peranan radio sangat vital dalam perjuangan. Sejarah telah rnencatat bahwa menjelang panyerbuan tantara Jepang ke Indonesia, Radio Tokyo dengan rajin mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini dilakukan dalam rangka propaganda untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, Tetapi begitu Jepang berkuasa, maka kumandang lagu Indonesia Raya pun lenyap. Bahkan agar rakyat

Indonesia jangan sarnpai mendengar siaran lain yang dapat merugikan Jepang, radio milik umum disegel. Kemudian NIROM (Nederlands Indiesche Radio Omroep) Surabaya namanya diganti menjadi Surabaya *Hosokyoku* (Dinas Siaran Radio Surabaya). Dengan demikian, Jepang ingin agar rakyat Indonesia menurut apa saja yang menjadi kehendak Jepang. Meskipun Surabaya *Hosokyoku* sering melakukan propaganda bagi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, tetapi Surabaya *Hosokyoku* bukan organ dari *Sendenbu* (Barisan Propaganda), melainkan berdiri sendiri.

Peranan Radio Republik Indonesia Surabaya dalam perjuangan menegakkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia besar sekali. Melalui Surabaya *Hosokyoku* diselipkan penyiaran lagu-lagu ciptaan Maladi "Di bawah sinar bulan purnama" yang menggambarkan kemiskinan rakyat di bawah kekuasaan fasis. "Mutiaraku" lagu kroncong yang memuja Kemerdekaan Ibu Pertiwi dengan istilah "kau tetap jaya sakti".[60]

Radio penerima di masyarakat umumnya disegel. Tetapi ada bagian di Hosokyoku tidak ikut disegel, yaitu bagian untuk khusus merelay Radio Tokyo. Pemuda yang berada di lingkungan itu dapat mendengar siaran radio luar negeri. Lewat siaran itulah diketahui bahwa pada tanggal 6 Agustus 1945 Nagasaki dibom atom oleh Amerika dan pada tanggal 9 Agustus 1945 menyusul Hiroshima. Berita kapitulasi Jepang kepada Sekutu telah tertangkap dari siaran Radio Tokyo tanggal 14 Agustus 1945. Berita pemboman Nagasaki dan Hiroshima disampaikan kepada Ruslan Abdulgani melalui Nyorrya Kartoyo. Sedang berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu (Amerika Serikat) disampaikan kepada Dul Amowo. Pencurian berita itu merupakan sumbangan tersendiri bagi perjuangan kemerdekaan bangsa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1945 pada siaran jam 19.00, Radio Surabaya mengumandangkan berita Proklamasi dalam bahasa Madura. Petugasnya adalah R.P. Jakfar Brotoatmojo. Pembacaan dalam bahasa Madura disiarkan dengan alasan agar orang Jepang tidak langsuhg mengerti, terutama yang berada di studio. Selain itu, sebagian penduduk Jawa Timur, Surabaya ke Timur, kebanyakan mengerti bahasa Madura. Siaran dalam bahasa Indonesia baru dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Demikianlah, mulai tanggal 22 Agustus 1945 Radio Surabaya menjadi Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya. Dalam usaha

memobilisasi massa rakyat, maka radio umum yang telah dipasang di tempat strategis oleh pemerintah Jepang diperbanyak dan diperluas.

Ketika missi RAPWI datang di Surabaya pada bulan September 1945, sejumlah perwiranya datang ke RRI bagian penyiaran di Embong Malang, minta beberapa tenaga telegrafis. Pemimpin RRI Sukirman menyanggupi asal melalui pemerintah Republik Indonesia Surabaya. Perwira RAPWI meninggalkan RRI menuju hotel Yamato *Hoteru*, dan Sukirman turut. Di hotel Yamato *Hoteru* (Hotel Oranje) Sukirman tahu bahwa yang berpakaian seragam RAPW tidak hanya orang Inggris, tapi juga terdapat orang Belanda. la juga bertemu dengan bekas kepala teknik Surabaya *Hosokyoku*, Takiuchi. Kesaksian Sukirman ini kemudian dilaporkan kepada Residen Sudirman.

Pada bulan yang sama dua truk pasukan Kenpeitai datang di RRI Embong Malang untuk mengambil pemancar. Pemuda-pemuda karyawan RRI di bawah pimpinan Sukirman bersikeras mempertahankannya. Pihak Kenpeitai bersikeras hendak mengambilnya, tetapi segera mengundurkan diri karena massa rakyat setempat telah bersiap-siap menyerbunya. Kepungan rakyat yang begitu banyak telah menggagalkan Kenpeitai mengambil pemancar RRI di Embong Malang.

RRI Surabaya juga ikut giat membantu penyelenggaraan rapat samodera di Pasarturi dan Tambaksari. Dengan modal pengeras suara, pegawai RRI berkeliling kota, menyerukan agar rakyat membanjiri rapat samodera tersebut. Juga pengeras suara yang digunakan untuk keperluan kedua rapat itu disediakan oleh RRI Surabaya. Serah terima secara resmi dari Surabaya *Hosokyoku* kepada Radio Republik Indonesia Surabaya dilaksanakan tanggal 27 September 1945, antara Moromoto dengan Residen Surabaya Sudirman.[61]

Sebelum Radio BPRI berdiri, Bung Tomo juga berhubungan dengan RRI, baik untuk berpidato (karena dia Kepala Bagian Penerangan PRI), maupun untuk memperoleh bantuan guna mendirikan pemancar sendiri. RRI Surabaya turut memobilisasi massa dan mengkonsolidasikan tiap hasil mobilisasi tersebut. Bersama-sama wartawan film dan surat kabar, wartawan radio saling mengisi tiga bidang yang berfungsi sebagai penerangan kepada rakyat demi kepentingan perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Dalam masa pergolakan itu kapan saja Drg. Mustopo selaku Menteri Pertahanan ad interim berpidato tentu segera disiarkan RRI Surabaya. Untuk siaran demikian RRI menggunakan

modulasiline, sehingga Drg. Mustopo tinggal pijat knop saja untuk berbicara di corong RRI. Drg. Mustopo sendiri tidak memiliki pemancar seperti halnya BPRI.[62]

Di bidang film, untuk mengabadikan peristiwa yang sedang bertangsung seru di Surabaya itu, R.M. Sutarto dari Badan Film Indonesia (BFI) telah menugaskan Sofyan Tanjung dan kawan-kawannya untuk membuat reportase film tentang perkembangan Surabaya sekitar 10 November 1945.



Suasana peristiwa 10 November 1945 di depan Hotel Oranje, Tunjungan, Surabaya, dimana arekarek Surabaya lari menyerang tentara Belanda yang diboncengi oleh tentara Inggris *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Untuk meliput berita selama masa pergolakan pada awal jaman Indonesia Merdeka di Surabaya diperlukan keberanian dan kelincahan. Wartawan muda Sutomo menyadari hal ini, dan ia sering keluar masuk kampung untuk memburu berita. Dia juga masuk di kalangan atas, termasuk para menteri di Jakarta. Dengan demikian, Sutomo mengetahui perkembangan masyarakat dalam menangapi berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia termasuk orang pertama di Surabaya yang mendengar berita Proklamasi di Domei,[63] yang kemudian bersama teman wartawan disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhir September 1945, Sutomo ikut dipilih massa untuk memimpin penguasaan gudang senjata Jepang di Don Basco Sawahan. Penyerahan senjata Jepang itu akhirnya ditangani oleh M.Yasin, sebagai wakil resmi pemerintah Republik Indonesia di Surabaya.[64] Ketika PRI terbentuk, Sutomo dipilih menjadi Kepala Markas *Kenpeitai* tanggal 1 Oktober 1945. Saat penggempuran asrama Angkatan Laut Jepang (*Marine Kaigun*) Gubeng, Sutomo pergi ke Jakarta. Di sana di bertemu beberapa tokoh nasional, antara lain Mr. Kasman Singodimejo. Dalam suatu rapat KNIP di Menteng Raya 31, Sutomo memberikan petunjuk bagaimana cara menguasai persenjataan Jepang seperti yang telah dilakukan oleh Arek-arek Surabaya. Dengan demikian, Arek-arek Surabaya telah mempelopori aksi-aksi pengampilalihan kekuasaan, sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi. Hal itu dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan berhasil. Pada kesempatan bertemu dengan Presiden Sukarno dan Mr. Amir Syaifuddin, Sutomo mengemukakan merasa cemas melihat keganasan NICA dan kaki tangannya terhadap penduduk Jakarta.[65] Ia mengusulkan agar dikobarkan semangat rakyat melawan NICA lewat pemancar radio. Gagasan itu disetujui oleh Menteri Penerangan Amir Syaifuddin, asal bukan radio milik resmi pemerintah Republik Indonesia.[66]

Pada pertengahan September 1945 para karyawan "*Ensuiko Seito Kaisha*" di *Herenstraat* (Jalan Rajawali) Surabaya di bawah pimpinan Sumarno dan Harsono Cokrosuwarno, mengadakan aksi pemakaian lencana Merah Putih. *Ensuiko Seito Kaisha* waktu itu dikuasai oleh Jepang. Sumarno adalah bekas anggota Gerindo. Pada akhir September 1945 Sumarno dan Amiaji atas nama karyawan melakukan aksi pengambilalihan Kantor Gula "*Ensuiko Seito Kaisha*". Namanya diganti Kantor Gula dan Perkebuanan Sejahtera. Kemudian diteruskan mengambil alih pabrik gula Jombang, Madiun dan Wlingi. Sebelum

dilucuti, orang-orang Jepang di Kantor Gula itu telah menyerahkan diri kepada BKR, malahan pimpinannya Sugawara telah ditahan di Penjara Kalisosok. Sugawara adalah orang yang menandatangani penyerahan Kantor *Ensuiko* kepada Sumarno. Oleh para karyawan Sumarno dipilih menjadi Kepala Kantor Gula dan Perkebunan Sejahtera dan mendapat perumusan instansi di Jalan Biliton No. 7 Surabaya.[67]

Sutomo sekembalinya dari Jakarta menghubungi RRI Surabaya. Ia mengemukakan keinginannya mengobarkan semangat rakyat untuk melawan NICA lewat siaran radio yang disetujui oleh Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Akan tetapi karena belum mempunyai pemancar sendiri, dia minta untuk pertama kalinya menggunakan RRI Surabaya. Pihak RRI tidak keberatan, asal mendapat ijin dari Ketua KNI Surabaya Dul Arwono atau Residen Sudirman. Sutomo mendatangkan Dul Arwono ke RRI Surabaya untuk melaksanakan keinginannya berpidato di corong RRI Surabaya.

Di Jalan Biliton No. 7 pada tanggal 12 Oktober 1945 diadakan pertemuan antara Sutomo dan beberapa temannya. Di bawah sinar lilin terbentuklah organisasi pemberontakan yang kemudian dinamakan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Keesokan harinya beritanya termuat dalam "*Suara Rakyat*", di mana antara lain disebutkan bahwa untuk memperkokoh semangat rakyat yang kini bersifat ekstremistis itu, pada tanggal 12 Oktober atas persetujuan pemimpin-pemimpin rakyat jelata (supir becak, kusir, penjual makanan, pemuda kampung yang berani mati, dan lain-lain) telah terbentuk pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia.

Didukng penuh oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas bawah, BPRI tampil sebagai satu badan ekstrim, yang bersama-sama rakyat akan menimbulkan peberontakan, bahkan berdarah, bila kedaulatan Republik tersinggung atau bila kehormatan para pemimpin yang sedang menjalankan diplomasi terancam. Pasukan penggempur ekstrim ini tidak sudi berunding dengan siapa pun juga, kalau mereka sedang berontak, selain dengan pemimpin-pemimpin Pemerintah Republik Indonesia atau badan-badan kebangsaan yang ditunjuk olehnya. Mereka pun mempunyai *Revolutie Zender*, Radio Pemberontakan yang mulai melayang di udara malam setelah jam 7.30, dan gelombangnya tidak ditentukan. Demikianlah yang termuat di "*Suara Rakyat*".

Pada malam hari tanggal 13 Oktober 1945 berkumpullah kembali anggota-anggota pucuk pimpinan pemberontakan di Jalan Biliton No. 7. Beberapa tenaga baru tampak hadir, antara lain Usman, Subejo, Sujarwo dan Kandar (Brewok). Acara pertemuan pertama kali adalah pembagian pekerjaan. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan segera dan diselesaikan secepat-cepatnya, yang senantiasa dituntut oleh tiap-tiap revolusi. Asmanu, Usman, Hernowo dan beberapa orang lainnya diserahi kewajiban membakar semangat rakyat di kampung-kampung menelanjangi politik kolonial Belanda yang disembunyikan di belakang kedok Serikat, keamanan dan perdamaian.

Sebagian dari mereka segera menuju ke berbagai karesidenan di Jawa Timur dan kemudian berhasil membentuk persiapan pimpinan pemberontakan rakyat setempat di daerah yang mereka kunjungi. Di kampung-kampung dalam kota Surabaya segera disusun pimpinan pemberontakan, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang terkemuka dan terkenal sebagai "jago" di kalangan rakyat kampung masing-masing.

Sumarno menggerakkan kekuatan pegawai perkebuanan dan pabrik bekas kaum penjajah, dengan maksud untuk dapatnya mempergunkan tenaga pegawai tersebut guna membumihanguskan perkebuanan dan pabrik bila Belanda ternyata mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sementara Abdullah ditugaskan mendampingi yang berhasil merebut kekuasaan atas pelabuhan di Jawa Timur dari tangan Jepang, terutama pangkalan Angakatan Laut di Surabaya. Sujarwo dan kawan-kawan menuju ke pasar untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang dan penjual makanan tentang arti "*boycott*" terhadap kaki tangan NICA. Semua penjual makanan dan bahan makanan di kota Surabaya dan sekitarnya dapat dipergerakkan serentak untuk tidak melayani kebutuhan orang-orang NICA, alias bersedia untuk tiap waktu tidak lagi menjual barang-barang dagangan mereka kepada pengganggu-pengganggu Republik Indonesia.

Sutomo sendiri diwajibkan untuk tetap mendekati dan ikut menyusun organisasi pertempuran yang terdiri atau dipelopori oleh kusir dokar, supir becak dan pegawai pelbagai jawatan, yang di dalam pertempuran melawan Jepang yang lalu telah terkenal sebagai "jago-jago" di kalangan mereka masing-masing.

5.16. Radio Pemberontakan Bung Tomo.

Dengan persetujuan Residen Sudirman dan Dul Arwono, RRI Surabaya memberikan bantuan yang tidak kecil terhadap berdirinya Radio Pemberotakan Surabaya. Pidato Bung Tomo pertama, kedua dan ketiga pada tanggal 17,18 dan19 Oktober 1945 dilakukan di Studio RRI Surabaya. Dengan diatur sedemikian rupa sehingga seakan-akan RRI merelay suara Bung Tomo dari Radio Pemberontakan.[68] Caranya, sebelum Bung Tomo berpidato maka penyiar RRI Surabaya mengatakan sebentar lagi RRI akan merelay pidato Bung Tomo dari Radio Pemberontakan. Lalu, terdengarlah Suara Sumiati (telefoniste RRI Surabaya, adik Bung Tomo sendiri) yang menyatakan, "Di sini Radio Pemberontak ..... "

Sebelum Bung Tomo mulai pidatonya, studio RRI diminta untuk mengantar pidatonya dengan memutar musik mars. Namun, karena studio tidak bisa menyediakannya dalam waktu singkat kepada Bung Tomo ditawarkan lagu Hawaien, "*Tiger Shark*". Bung Tomo menyetujui dan segera diputarlah lagu itu. Cara demikian ditempuh agar Sekutu tidak menganggap bahwa pidato Bung Tomo sebagai suara resmi pemerintah Republik Indonesia. Tindakan itu sesuai dengan garis kebijaksanaan yang digariskan oleh Menteri Penerangan Amis Syaifuddin.

Bung Tomo pidato dicorong Radio Pemberontakan Rakyat tanggal 20 Oktober 1945. Pemancarnya dibuat dengan bantuan RRI Surabaya, yaitu memberikan sebuah *Eindlamp* dengan seri nomor 806. Tanpa bantuan RRI Surabaya Radio Pemberontakan belum dapat di beraksi udara. Lagu *Tiger Shark* dipergunakan sebagai pengantar tiap kali Bung Tomo akan berpidato.

Radio Pemberontakan Rakyat Bung Tomo merupakan sarana komunikasi vital bagi perjuangan. Hampir seluruh rakyat mendengarkan dan memasang gelombangnya. Pada saat mendesak pada tanggal 10 November 1945 diserukan oleh Bung Tomo agar pemuda-pemuda yang berasal dari luar kota Surabaya jangan sampai meninggalkan kota. Juga pada waktu Surabaya memerlukan artileri, Bung Tomo menyerukan agar Surabaya dibantu dengan "tukang tembak" meriam. Seruan tersebut disambut oleh Markas Tertinggi TKR Yogya, yang kemudian mengirimkan Suwardi (Mayor Jenderal) bersama dengan 23 calon Militer Akademi sebagai artileris. Radio Pemberontakan dipergunakan

oleh M. Kalibongso untuk memanggil anggota PRI Maluku agar berkumpul kembali sesudah menghadiri Kongres Pemuda di Yogyakarta. Radio Pemberontakan merupakan sarana penegak moral prajurit. Dengan suara Bung Tomo yang menggeledek, sebagai pembakar semangat pemuda, hadir sebagai "*magic voice*" yang dapat membakar semangat dan naluri untuk berjuang dan merupakan komando ampuh. Mula-mula dapat dipergunakan sebuah pemancar kecil diseluruh rumah di Embong Mawar, dan jangkauan siarannya hanya cukup untuk Kota Surabaya dan sekitarnya, karena masih memakai listrik suaranya tidak sampai di semua front. Kerabat kerjanya terdiri dari Hasan Basri, Ali Urip dan Sumadi.

Di tengah-tengah gejolaknya perjuangan, dokter Sugiri berhasil menemukan seorang wanita Amerika yang kemudian menjadi salah seorang pembantu Bung Tomo, yaitu Ktut Tantri.[69] Pidatonya dalam bahasa Inggris bergema tembus sampai ke luar negeri yang ditangkap oleh kawan atau pun lawan. Ktut Tantri kemudian terkenal dengan sebutan *Surabaya Sue*, sebutan yang mengingatkan kepada sebutan *Tokyo Sue*[70] yang menjatuhkan moral para serdadu Sekutu dalam medan pertempuran. Tetapi Ktut Tantri lebih menekankan kepada dasar perjuangan Indonesia demi keadilan dan perikemanusiaan untuk menghapuskan penjajahan di Indonesia khususnya. Perhatian terhadap siaran Radio Pemberontakan sangat besar sekali.

Di tengah pertempuran di Surabaya, suara Bung Tomo bergema di atas dentuman meriam, desingan peluru dan kepulan asap, jauh sampai ke daerah-daerah lain. Ucapan takbir, "Allah Akbar" pada waktu pembukaan dan penutupan pidato Bung Tomo sangat mendalam gemanya di hati para pejuang yang kebanyakkan beragama Islam. Dalam situasi sangat terjepit semacam itu, rasanya tiada gantungan lain kecuali kekuasaan dan kehendak Allah semata.

Meskipun Menteri Penerangan tidak setuju, ternyata banyak RRI (radio pemerintah) yang merelaynya. Bukan hanya di Surabaya, melainkan seluruh Jawa Timur seperti Malang dan Madiun, Solo dan Yogyakarta. Ketika pecah pertempuran 10 November 1945, seluruh Jawa merelay Radio Pemberontakan dari Surabaya. Sekelompok pemuda Surabaya yang tengah berada di Tasikmalaya dalam rangka kerjasama perjuangan dikejutkan dengan bergemanya suara Bung Tomo sekitar jam 07.00 pagi melalui Radio Priangan Timur. Ternyata Radio itu

merelay langsung dari Surabaya. Atas panggilan Bung Tomo, semua pemuda asal Surabaya langsung bergegas kembali, sekalipun tugasnya belum selesai.[71]

Rakyat di Sulawesi selalu mengikuti Radio Pemberontakan, kemudian ikut mengobarkan perjuangan di sana seperti di Palopo dan Makale (Tanah Toraja). Selain Ktut Tantri, beberapa orang yang simpati kepada perjuangan rakyat Indonesia diminta untuk berpidato menerangkan perjuangan rakyat Indonesia kepada bangsanya. Yang diminta antara lain Konsul Swiss, Konsul Turki, T.D. Kundan, ketua perhimpunan bangsa India di Surabaya.

Menurutkan pengalamannya dalam membantu siaran Radio Pemberontakan Ktut Tantri dalam bukunya *Revolusi di Nusa Damai* mengatakan,

> " ... aku pergi menemui konsul-konsul asing dan perwakilan diplomatik atau perwakilan dagang negara-negara asing bersedia membantu mengisi siaran malam itu sebagai protes terhadap pengeboman. Aku mendorong mereka, agar menyiarkan pendapat negara mereka masing-masing tentang tindakan Inggris. Semua menyanggupi. Malam itu berkumandanglah suara kami di udara, dan akibatnya meluas. Pemancar-pemancar di negara lain yang menangkap siaran ini menyiarkan kembali kepada para pendengarnya. Surat kabar dari pelbagai negara berjauhan membuat teksnya dan memasukkannya dalam tajuk rencana. Protes yang paling keras di antara semua yang interviu adalah dari Rusia Putih. Ya, pemboman Surabaya merupakan titik-balik dalam perkembangan Revolusi Indonesia. Dan bagiku pun adalah titik-balik. Sebelum ini, kalau aku berada dipemancar ban lengan tidak kupakai. Tapi mulai dari saat itu aku tidak pernah kelihatan tanpa ban itu : ' Merdeka atau mati '. Berjalan terus dengan bangga, tak gentar dan tak menghiraukan diri sendiri. Aku akan tetap dengan rakyat Indonesia, kalah atau menang. Sebagai seorang perempuan Inggris barangkali akan dapat mengimbangi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang sebangsaku dengan berbagai jalan yang dapat kukerjakan.

Sehari setelah siaran konsul-konsul asing kami menutup Pemancar Radio Pemberontakan di Surabaya. Perlengkapan pemancar disimpan di sebuah gang tersembunyi letaknya. Kemudian aku berangkat menuju Bangil, Radio Pemberontak berkumandang di udara dengan siaran-siaran bahasa Inggris. Demikian pengakuan Ktut Tantri.

Suara Bung Tomo setiap malam terdengar melalui pemancar rahasia di Malang. Sekali atau dua kali dalam seminggu dia datang ke Bangil untuk bersama-sama dengan kami mengadakan siaran. Radio Pemberontakan adala pemancar kepunyaan barisan rakyat, pejuang gerilya, berlainan dengan radio resmi Republik Indonesia - yang berkedaulatan di jogya, kota tempat kedudukan Presiden Sukarno dan pejabat tinggi lainnya setelah meninggalkan Jakarta ketika diduduki Inggris - dan pemanca di Solo. Radio Pemberontakan kami menyampaikan beberapa stasion yang tersebar di pegunungan Jawa Timur.[72]

Selain terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Sekutu, peperangan juga terjadi lewat pemancar radio antara Radio Pemberontakan melawan perang urat syaraf `yang dilakukan oleh pihak musuh dengan melancarkan propaganda busuk terhadap Republik Indonesia, Selanjutnya Tantri mengisahkan,

" ... Setiap malam, setelah selesai siaran, kami mendengarkan pemancar yang berada di bawah pengawasan Belanda di Jakarta dan Bandung. Pusat perhatian terutama kami tujukan pada pemancar-pemancar tidak resmi, karena dari pemancar inilah dilancarkan propaganda palsu menentang Republik Indonesia.

Pada suatu malam dengan takjub aku mendengar siaran yang menjanjikan hadiah limapuluh ribu gulden kepada seseorang yang dapat menyerahkan Ktut Tantri ke markas tentara Belanda di Surabaya, atau ke tempat lain yang berada di bawah pengawasan Belanda. Siaran ini menarik perhatian kawan-kawan yang sama-sama mendengarkan denganku. Biasanya kami tidak merepotkan diri untuk menjawab siaran Belanda, kecuali jika ada hal yang sungguh-sungguh perlu ditangkis. Tapi kali ini kami merasa geli. Aku berkumbang di

udara memanggil pemancar Belanda itu, menyebut namaku dan menyatakan bahwa hadiah yang dijanjikan itu tidak berarti bagi rakyat Indonesia.

'Tuan-tuan tahu, bahwa gulden Belanda tidak berharga sekarang di Indonesia, "kataku. 'Kami mempunyai uang sendiri. Tapi kalau tuan-tuan mau menyumbangkan uang sebesar setengah juta gulden kepada bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mereka, aku akan pergi ke markas tuan-tuan atas kemauan sendiri'.

Seluruh pemancar radio di Jawa mengambil siaranku, dan siasat Belanda itu disambut dengan senyum lebar. Kami tidak mendengar apa-apa lagi tentang hal itu. Mereka tidak lagi mengulangi sayembaranya.[73]

Demikianlah, Radio Pemberontakan mempunyai pengaruh luas bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sekitar 10 November 1945 di Surabaya. Dengan direlaynya siaran Radio Pemberontakan oleh hampir semua radio pemerintah (RRI), yang bahkan dimonitor pula oleh Markas Besar Sekutu di Singapura, Saigon dan Melbourne, hal ini merupakan keunikan tersendiri dalam sejarah radio di Indonesia.

Peranan Radio Pemberontakan tercatat dengan gemilang pada 29 Oktober 1945, ketika diadakan gencatan senjata antara Indonesia dan pasukan Mallaby. Pengumuman hasil perundingan dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno dan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn di studio Radio Pemberontakan Jalan Mawar 10 Surabaya. Radio Surabaya di Simpang pada waktu itu hancur terbakar, biasanya direlay oleh pemancar RRI sehingga dapat didengar oleh pemuda pejuang yang tengah mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia.

Pejuang-pejuang yang pada tahun 1945 berada di ibu kota Bandung tentu masih gelisah karena ada gelintir pemimpin menaruh kepercayaan bahwa tentara asing yang menduduki Bandung mau membantu bangsa Indonesia mempetahankan kemerdekaannya. Para pemuda dan rakyat Bandung yang bergejolak jiwanya, tidak segera mengadakan perlawanan terhadap musuh yang masih belum sempat memperkokoh dirinya. Timbul kecekcokan di antara para pemuda sendiri, ada yang ingin segera melawan dan ada yang tidak.

Pada waktu itu ada seorang pemuda Bandung yang datang kepada Bung Tomo, dan membawa persoalan perjuangan pemuda di Kota Bandung. Dia antara lain menceritakan bahwa ada pemimpin yang melaksanakan perjuangan tidak sejalan pikirannya dengan kehendak rakyat, sehingga menimbulkan keragu-raguan di kalangan para pemuda untuk bertindak. Agar keadaan ini tidak menjadi lebih parah, maka pemuda itu minta izin kepada Bung Tomo untuk meyampaikan seruan lewat Radio Pemberontakan Rakyat Surabaya dalam bahasa Sunda agar semangat perlawanan pemuda Sunda berkobar melawan musuh. Menilik itikad baik pemuda tadi, maka Bung Tomo mengabulkan permintaannya.

Radio Pemberontakan Rakyat yang biasanya direlay oleh pemancar RRI juga direlay oleh RRI Studio Bandung. Maka ketika Radio Pemberontakan Rakyat menyiarkan pidato pemuda Bandung dalam bahasa Sunda tadi, juga disiarkan secara luas oleh RRI Bandung, didengarkan para pemuda Bandung dan sekitarnya. Karena pidato yang membakar semangat tadi, maka pemuda Bandung bertekad untuk menyerang kedudukan musuh. Pemuda itu mengajak para pemimpin yang main mata dengan pihak lawan untuk menghentikan kegiatannya, dan menyatukan diri dengan para pemuda pejuang menggempur kedudukan musuh.

Bung Tomo tidak mengerti bahasa Sunda, ia hanya tersenyum-senyum mendengarkan gaya pidato yang mirip gayanya. Ternyata banyak pendengar Sunda mengira bahwa yang berpidato dalam bahasa Sunda itu Bung Tomo Sendiri. Baru beberapa tahun kemudian, ketika Umar Ismail membuat film Toha Pahlawam Bandung Selatan, datang kepada Bung Tomo, minta agar Bung Tomo mengucapkan pidato dalam bahasa Sunda seperti tempo hari untuk hiasan suara filmya. Bung Tomo tidak dapat memenuhinya, karena memang tidak bisa bahasa Sunda. Bung Tomo tahu bahwa banyak orang mengira dialah yang berpidato membakar semangat pemuda Bandung waktu itu. Menurut Umar Ismail, para pemuda Bandung jadi panas hatinya dan terus menyerbu kedudukan musuh setelah mendengar pidato Bung Tomo yang menyindir janganlah hendaknya pemuda Bandung bersemangat "*peuyeum bol*".

Bung Tomo memberikan pidatonya juga untuk menghiasi film Toha, tetapi tanpa menggunakan istilah "*peuyeum bol*", karena

memang ia tidak mengerti artinya. Juga Amir Makhmud ketika menjadi Menteri Dalam Degeri pernah menyampaikan teguran kepada Bung Tomo mengenai peristiwa pidato Bung Tomo "*peuyeum bol*" dan Bung Tomo pun memberikan penjelasan seperlunya. Apapun yang telah terjadi, sedikit banyak di bakar oleh pidato " Bung Tomo " dengan "*peuyeum bol*"–nya, maka "Bandung Lautan Api" terjadi.

5.17. Lahirnya Hizbullah Surabaya.

Pada tahun 1944 oleh MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) telah dikeluarkan suatu instruksi kepada MIAI Surabaya (K.H. Tohir Bakri dan Anwar Zain, masing-masing sebagai ketua dan sekertaris) untuk mengirimkan 10 pemuda Karesidenan Surabaya guna dilatih sebagai kader atau instruktur Hizbullah pada tiap Kabupaten. MIAI adalah wadah dari unsur PSII, PII, NU dan Muhammadiyah.

Latihan diadakan di Cibarusa di Jawa Barat, dan berlangsung selama tiga bulan (12 Februari sampai dengan 14 Mei 1945) dipimpin oleh Yanagawa. Setelah menyelesaikan latihan, mereka membentuk Hizbullah dan mengadakan latihan-latihan. Di Surabaya latihannya dijalankan di Kawatan dan Kemayoran, di Jombang di Pondok dekat Cukir, di Mojokerto di halaman rumah K. Akhyat Khalim (sekarang jadi Pondok Najo Mejokerto), di Sidoarjo tempatnya di Madrasah NU Daleman dan di Gresik di Masjid Jamik (dekat alun-alun). Pengurus Hizabullah Surabaya terdairi dari Ketua, H. Abdannafik, Wakil KetuaTohir Bakri, Sekertaris Anwar Zain, Khusainy Tiway, Abdul Majid Asmara (ex *Cudanco* Peta) dan Wakilnya Mustakim Zain (ex *Hizabullah* Cibarusa). Di luar kota Surabaya, kemudian juga tumbuh cabang-cabang Hizbullah. Dari luar kota ini kemudian turut serta dalam pertempuran tiga hari melawan pasukan Mallaby dan 10 November 1945 di Surabaya.[74]

Sejak saat itu di seluruh Kabupaten Jawa Timur telah terbentuk Hizabullah yang intinya terdiri dari pemuda Ansor dan santri-santri pondok. Bentuk organisasinya pada ketika itu semi organisasi massa semi kemiliteran. Pada pertengahan Desember 1945 Hizabullah di pecah menjadi dua badan perjuangan: barisan muda-muda menjadi Barisan Hizabullah, sedangkan yang tua-tua di tambah para kiai menjadi Barisan Sabilillah. Senjata yang digunakan untuk latihan persenjataan pada waktu itu diperoleh dari BKR/PTKR melalui Damiri Ikhsan, sedangkan yang berasal dari PRI Bagian Pembelaan di berikan melalui K.H.A. Manan dan K.H. Husein Tiway.

5.18. Gerakan Buruh

Kaum buruh adalah kelompok sosial berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu mereka yang bekerja di pabrik atau perusahaan. Di Surabaya, di samping *preman* (orang bekerja secara bebas), buruh merupakan kelompok yang menonjol. Hal itu sesuai dengan kedudukan Surabaya sebagai pusat perusahaan, perdagangan dan industri. Di antara mereka ada yang bekerja di sektor perdagangan, perusahaan, indistri, pengangutan atau transportasi, pelabuhan minyak, angkatan laut, penerbangan dan lain-lain. Ada buruh yang telah membentuk organisasi seperti Barisan Buruh Minyak (BBI), Serikat *Chauffeur*, Serikat Jongos dan sebagainya. Pada umumnya kemampuan ekonominya rendah, sesuai pendidikan mereka yang juga rendah. Oleh karena itu, kelompok buruh secara sosial yang sangat peka terhadap perubahan. Apalagi perubahan yang menyangkut faktor produksi, faktor mati hidup kaum buruh. Buruh memiliki peranan penting dalam menunjang lancar tidaknya perekonomian negara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap politik.

Perubahan ketatanegaraan akibat kekalahan Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia segera menyadarkan buruh dalam hubungannya dalam pembelaan negara sesuai dengan tugas mereka di sektor produksi. Semangat buruh segera terbakar karena memang nasibya yang berpuluh-puluh tahun tertidas dan terkungkung di bawah kekuasaan penjajahan baik Belanda maupun Jepang. Datangnya kemerdekaan berarti datangnya jaman dan kehidupan baru yang merdeka, bebas dari segala macam penindasan, penghisapan dan penguasa penjajahan.

Namun demikian, sebelum cita-cita itu tercapai rakyat Surabaya yang terdiri dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat dengan serempak bangkit siap sedia untuk membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Tidak terkecuali dari kalangan buruh. Kelompok Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang dipimpin oleh Syamsu Harya Udaya, kemudian membentuk beberapa pasukan. Salah satu di antaranya dipimpin oleh R. Kunkiyat, seorang bekas Digulis dan bekas *Syodanco* Peta Surabaya. Sebagai seorang bekas anggota Peta, Kunkiyat mula-mula bermaksud membantu BKR Kota, tetapi ia diminta oleh kawan-kawanya untuk melatih pasukan BBI. Kunkiyat melatih pasukan itu dan sekaligus memipinnya. Anggota pasukan terdiri dari karyawan Aniem (PLN sekarang), Kereta Api dan Pabrik Gas. BBI bermarkas di Hotel Simpang. Kekuatan pasukannya terpencar di tiga tempat, yaitu di Simpang, di Stasiun Pasarturi, dan Gemblongan. Mereka yang terlatih

dan bersenjata berjumlah kurang lebih 150 orang. Pasukan lainnya yang berada di bawah naungan BBI adalah Penerbangan Angkatan Laut Surabaya (PALS).

PALS dibentuk secara resmi di GNI Bubutan pada akhir September 1945. Anggotanya terdiri dari para karyawan Pangkalan Udara Angkatal Laut Morokrembangan. Pangkalan udara ini pada jaman Hindia Belanda dikuasai oleh Marine Luchtvaart Dienst (MLD) dan kesatuan Marine Vliegkamp Morokrembangan (MVKM). Pada jaman Jepang dikuasai oleh *Kaigun Kokusyo* yang dipimpin oleh Shiina, sedangkan bengkelnya dikuasai oleh Katahira Butai.

Kekuatan PALS mula-mula kurang lebih 400 orang, kemudian ditambah bekas pasukan heiho yang menggabungkan diri berjumlah 1 peleton atau kira-kira 50 orang. Senjata yang dimiliki 125 karaben. Pada akhir Oktober PALS diperintahkan oleh Ketua KNI Karesidenan Dul Arwono, untuk meninggalkan Morokrembangan. Dul Arwono datang di Morokrembnagan beserta dua perwira Angkatan Laut Inggris dan T.D. Kundan sebagi penterjemah. Tanpa membantah sepatahpun, mereka taat terhadap perintah. PALS memindahkan alat-alat dan mesin-mesin vital yang berguna bagi perjungan ke luar Morokrembangan.

Di Pangkalan Undara Perak, juga dalam bulan September, dibentuk Angkatan Muda Penerbangan Surabaya Indonesia (AMPI). Anggota AMPI yang terdiri dari karyawan dan pemuda di sekitar Perak sejumlah satu Baralyon. Organisasi ini di pimpin oleh Riamun dan Sulaiman, yang kemudian menggabungkan diri kepada TKR. AMPI tidak masuk naungan BII. Di lain pihak, masih juga di Pangkalan Udara Perak, dibentuk juga Penerbangan Angkatan Oedara Suarabaya (PAOS) yang dipimpin oleh Sumarno. Kekuatan PAOS terbatas pada karyawannya dalam naungan BII, lengkap diperkuat dengan satu mitraliur. Markas mereka terletak di dekat Stasiuan Gubeng dan dipimpin oleh Muhammad Ali.

5.19. Penataran Angkatan Laut.

Pada jaman Hindia Belanda, di sebelah timur muara Kalimas, dibangun suatu pangkalan armada, diberi nama Marine Etablissement, sebagai kumpulan perbengkelan untuk memperbaiki dan membuat sarana dan prasarana kelautan, terutama kapal. Karena banyaknya jenis

pekerjaan yang harus digarap, maka Marine Etablissement memiliki banyak pekerja dan bermacam-macam keahliannya. Tempatnya cukup luas, namun tersisih dari masyarakat Kota Surabaya, karena menjorok ke ujung Selat Madura. Pada jaman itu Marine Etablissemnt di bawah Departement der Marine dan tidak di bawah Koninklijke Marine.

Pada jaman Jepang semula bernama Nagamatsu Butai, kemudian diganti mejadi SE 21/24 Butai (Pangkalan Armada Jepang). Pada jaman SE 21/24 dalam kekuasaan *Kaigun-Kaigun*. Mungkin merupakan "serikat buruh" satu-satunya di jaman Jepang. Serikat buruh itu didirikan pada tanggal 10 april 1945, diberi nama Hokokai (Badan Kebaktian) beranggotakan 9000 orang. Ketuanya Supono, orang yang terpecaya dan ditunjuk oleh Jepang, sedangkan wakilnya Muhammad Affandi, seorang yang berprakarsa mendirikan Badan Kebaktian dan dipilih oleh rapat untuk memipin Hokokai tersebut.

Selain Hokokai, dalam perkumpulan perbengkelan yang amat luas itu dirasakan perlu adanya pembelaan dan pertahanan, karena pada wakyu itu adalah jaman perang. Maka oleh Jepang, atas usulan para buruh, didirikan badan pembelaan, semacam Peta, yang diberi nama Hokodan (Barisan Sukarela). Anggotanya terdiri dari buruh muda yang dapat latihan kemiliteran dari Kaigun. Setelah berlatih, mereka kembali bekerja sebagai buruh biasa, tetapi sewaktu-waktu diperlukan berlatih, mereka harus berlatih. Anggotanya 3000 orang, merupakan satu *daidan* dengan *Daidanco* R.M. Aly Mulyadi Notohadiwinoto.

Sampai tanggal 22 Agustus 1945, SE 21/24 Butai masih di kuasai oleh *Kaigun*. Pada hari kaum buruh SE 21/24 dikumpulkan di lapangan Ujung. *Kaigun* mengumumkan bahwa perang sudah selesai. SE 21/24 Butai akan diserahkan kepada Sekutu. Buruh diminta tetap bekerja sebagai biasanya, agar penyerahan dapat dilakukan dengan baik.

Sehabis jam kerja buruh SE 21/24 Butai mengadakan rapat Sidotopo. Rapat dipimpihn oleh Muhammad Affandi, wakil Ketua Badan Kebaktian SE 21/24 Butai, karena ketuanya, Supono, meninggalkan Kota Surabaya. Dalam rapat itu, di samping diputuskan penggantian SE 21/24 Butai menjadi Penataran Angkatan Laut. Anggota SE 21/24 di lebur menjadi Serikat Buruh Indonesia Penataran Angkatan Laut (SBI PAL) dan menetapkan M. Affandi sebagai Ketua SBI PAL. Juga dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Penataran Angkatan Laut (KNI PAL).

Serta pernyataan kebulatan tekad untuk mempertahankan PAL sebagai milik Republik Indonesia.

Sementara di Kota Surabaya terbentuk badan-badan perjuangan, maka Penataran Angkatan Laut pun menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada tanggal 25 September, SBI PAL diganti namanya menjadi Barisan Buruh Indonesia Penataran Angakatan Laut (B.B.I. P.A.L) berdasarkan persetujuan antara PAL dengan Samsu Harya Udaya. Sedang AMPAL diganti dengan Pemuda Republik Indonesia Penataran Angkatan Laut (P.R.I A.L) berdasarkan persetujuan PAL dengan J.Rambe dari PRI Utara.

Pada tanggal 30 September 1945, karena di masyarakat Kota Surabaya dibentuk BKR, maka di Perantaraan Angkatan Laut juga di bentuk BKR Laut. Pembentukan ini atas usul Munaji, seorang yang dulunya bekerja sebagai polisi di SE 21/24. Maka komandan BKR Laut adalah Munaji. Jadi pada waktu itu PAL masih dikuasai sepenuhnya oleh *Kaigun* dengan nama SE 21/24, berarti terdir dari beberapa kelompok buruh, yaitu:

1. Barisan Buruh Indonesia PAL dipimpin oleh Muhammad Harun, seorang yang sejak *Marine Etablissment* telah berpangkat *commies* dan ikut mendirikan organisasi.
2. Laskar Buruh Indonesia PAL (pecah dari BBI PAL), LBI PAL, dipimpin oleh Aly Mulyadi, yang semula sudah memimpin Hokodan.
3. Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut (P.R.I.A.L.), yang dipimpin oleh Sutejo Eko, Sutejo Eko ini dulu kepercayaan orang Jepang, berpandangan luas, dia pulalah yang mengusulkan adanya *Hokokai* bersama Mohamad Affandi. Dia yang menghubungi Rambe untuk mendirikan PRIAL. Anggotanya sebagaian besar dari anggota *Hokodan*.
4. BKR Laut yang baru dibentuk dipimpin Munaji. Anggotanya hampir tidak ada, karena banyak yang tidak mau dipimpin Munaji. Sebab waktu menjadi Munaji polisi SE 21/24 Butai, bertindak sangat kejam terhadap para buruh. Tetapi patut dicatat, bahwa Munaji sejak semula manjadi orang kepercayaan Dokter Samsi, orang pergerakan yang banyak jasanya terhadap proses penjadian Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober 1945, SE 21/24 Butai dikuasai dan diambil alih oleh orang-orang PAL serta dinyatakan secara resmi menjadi milik Republik Indonesia. Orang-orang Jepang ditawan dan dilucuti senjatanya. Penataran Ankatan Laut menjadi nama yang resmi pula M. Affandi dipilih mejadi pemimpin umum. Untuk Kota Surabaya yang punya pelabuhan besar dan *Marine Etablissment,* diperlukan Angkatan Laut atau pelaut. Untuk itu Mokhammad Affandi minta bantuan Drg. Mustopo. Maka pada tanggal 3 Oktober 1945 bekas *Daidanco* Peta Katamhadi dan Sutopo serta *Cudanco* Suyono diperbantukan kepada PAL sebagai penasehat militer oleh Menteri Pertahanan Drg. Mustopo.

Tanggal 5 Oktober 1945 dengan perantaraan lewat radio diadakan panggilan para pelaut untuk mendaftarkan diri di PAL Ujung. Tiga hari kemudian pendaftaran mulai. Pelaut ex K.M. Belanda di asramakan di Hotel Ngemplak dan di gudang dekat kantor polisi M.E. Ujung. Sedangkan pelaut dari pelajar SPT (masih muda-muda) ditampng di *Moddelust.* Pendaftaran di lakukan oleh Andi Aris dibantu oleh Twege. Selanjutnya tentang pelaut (embrio ALRI) penyusunannya dipimpin oleh Atmaji, seorang bekas tawanan politik yang penah dipenjarakan di Sukamiskin oleh Belanda, dikirim ke PAL oleh Menteri Pertahanan Drg. Mustopo untuk membenahi Angakatan Laut.

5.20. Kelompok non-combatant

Ada juga beberapa kelompok pemuda yang *combatant* tetapi jumlah anggotanya kecil, tanpa nama, di antaranya adalah kelompok Suprapto, Widodo Budidarmo dan kawan-kawannya, sejumlah 17 orang. Mereka terdiri dari bekas tentara Peta dan *Heiho.* Kelompok ini pimpinannya kolektif, yang timbul karena solidaritas sesudah penyerbuan gedung *Kenpeitai.* Mereka memiliki mariam kaliber 7,5 mm, 2 pucuk karaben. Mereka bersiap-siap di Kedung Cowek. Juga tidak ketinggalan aalah putra Bali yang membentuk kekuatan. Organisasinya disebut Gabungan Putra Bali di bawah pimpinan I.G.P. Winten.

Menjelang pendaratan pasukan Inggris, atas prakarsa pegawai pabrik dan perusahaan yang telah diambil alih dari tangan Jepang, di bentuklah Badan Keamanan Pabrik/ Perusahaan di singkat BKP. Badan ini di bentuk pada tanggal 23 Oktober 1945, di pimpin oleh K.

Sudarmadi Cokrowidagdo. Kantor pusatnya terletak di Pabrik Mesin Republik Indonesia (bekas pabrik Braat) di Jalan Ngagel 109. Pembentukan Badan ini di maksudkan untuk mengamankan aparat pabrik dari berbagai usaha sabotase atau tindakan yang bersifat kriminal.

Kecuali badan-badan combatant, sebagaian pemuda membentuk barisan non-combatant sebagai unsur bantuan logistik. Organisasi itu adalah Barisan Sipil, Balai Oeroesan Mobil (BOM) dan Pemuda Putri Surabaya, Dapur Umum, dan Palang Merah. Barisan sipil adalah barisan yang diorganisasikan oleh Ruslan Wongsokusumo. Barisan ini adalah sisa-siasa Barisan Pelopor pada jaman Jepang. Sebagai besar telah menggabungkan pada badan perjuangan lain. Ruslan Wongsokusumo membentuk barisan ini berdasarkan surat kuasa dari Residen Sudirman untuk melaksanakan pengambilalihan kantor dan perusahaan di Kota Surabaya dari tangan Jepang. Ia di bantu oleh Sujono (becak) dan Prayitno serta di dampingi oleh Mohammad Yasin Polisi Istimewa, Basuki Polisi Lalu-lintas dan seorang dari badan perekonomian. Setelah tugas pengambilalihan kekuasaan selesai, barisan ini kemudian bergerak dalam bidang logistik. Kekuatan barisan kurang lebih 30 orang.

Balai Oeroesan Mobil berasal dari *Tobu Rikuyukyoku Syidosya* (Angkutan Darat Jawa Timur) urusan Angkutan bis dan truk dan *Doso Jimusyoku* (urusan sedan-sepeda motor), yang diambil alih dari tangan Jepang. Namanya diubah menjadi Balai Oeroesan Mobil (BOM). Kendaraan yang diambil alih dan siaga berjumlah kurang lebih 125 truk dalam kondisi baik. Jumlah ini kemudian di tambah dengan hasil rekurasi kendaran dari pemilik kendaraan pribadi dan truk-truk. BOM dipimpin oleh Abdul Majid bermarkas di Tunjungan 50. Garasi utamanya di sebelah Stasiun Semut.

5.21. KONFLIK-KONFLIK DI SURABAYA: KEKUATAN INDONESIA, JEPANG, BELANDA DAN SEKUTU (INGGRIS)

a. PENDARATAN SEKUTU DI JAKARTA

Begitu kabar Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai di Surabaya, tentara Peta dibubarkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya perintah pembubaran Peta telah disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam Sectie IV, A/113 dan A/119. Namun di wilayah Tentara ke 7 di bawah kekuasaan dan perintah Tentara ke 16 baru dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pelaksanaannya secara efektif tanggal 19 Agustus 1945. Di Jakarta pembubaran Peta dilakukan secara spontan, sedangkan *Kenpeitai* merintangi penyebarluasan Proklamasi.

Kemudian Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 memerintahkan agar rakyat menyusun kekuatan. Perintah ini disambut oleh rakyat dan pemuda. Mereka pun menyusun kekuatan guna menghadapi segala kemungkinan. Melihat keadaan yang eksplosif itu, *Shucokan* (walikota) segera membacakan sabda Tenno Heika dan amanat *Seikosikikan* di Gedung Perposos Jalan Embong Malang di hadapan seluruh pejabat Kabupaten, Karesidenan dan Jawatan di seluruh Surabaya.

Selain pihak Jepang, para Indo Belanda (Eurasian) juga merintangi gerakan rakyat yang menyusun kekuatan untuk menegakkan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Atas bantuan penuh dari Jepang, golongan Indo Belanda kemudian membentuk "Komite Kontak Sosial" dengan usaha atas nama Palang Merah Internasional atau Intercross. Anggota Komite Kontak Sosial antara lain N.N. Bastiaans, Mr. W.V. Ch. Ploegman, Y. Hoeksema, C.A. Connink. Dengan kedok Palang Merah Internasional mereka mengadakan kegiatan politik. Beberapa tempat dan gedung strategis telah mereka duduki antara lain Yamato Hoteru atau Hotel Oranje.

Para pemuda yang menyaksikan ini segera melakukan gerakan penempelan plakat pada gedung dan obyek vital tulisan "Milik Republik Indonesia". Bendera Jepang di gedung yang telah diduduki diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih. Keadaan Kota Surabaya mulai memanas. Pasukan Jepang yang lengkap persenjataannya diamankan,

diundurkan ke pedalaman sebelum tanggal 6 September 1945, sedang interniran Belanda dan Indo Belanda di kamp Darmo, Gubeng, Sawahan dibebaskan.

Pengunduan tentara Jepang ke pedalaman itu berdasarkan perintah Panglima Tentara ke 16 sebagai realisasi hasil rapat Komando Unit Pertahanan Jawa dan Madura tanggal 21 Agustus 1945 di Jakarta. Pasukan Jepang di Surabaya diperkirakan sebanyak 10.000 orang, termasuk personel angkatan lautnya. Yang ditinggalkan hanya beberapa ratus orang dari Kompi Infanteri dan beberapa puluh anggota *Kempetai* untuk mejaga keamanan di Surabaya.[75]Angkatan laut Jepang yang masih tersisa di Surabaya kira-kira 4.000 orang. Mulai 1 September 1945, senjata dikumpulkan di beberapa tempat tertentu, kecuali yang mereka pakai. Menilik keadaan Kota Surabaya demikian tegangnya dan sewaktu-waktu bisa meledak menjadi insiden, maka pihak Jepang mulai turun tangan. Pada tanggal 30 September 1945 oleh *Cianbico* (bagian keamanan kota) dikeluarkan larangan yang ditujukan kepada Belanda atau Indo Belanda terhadap pengibaran bendera Belanda, penyelenggaraan perayaan secara terbuka, atau pun perayaan perseorangan yang diselenggarakan secara besar-besaran untuk memperingati kemenangan Sekutu.

Sebaliknya di seluruh Kota Surabaya atas perintah KNI telah berkibar sang Merah Putih. Dalam peringatan kewaspadaan dan keamanan serta menghadapi hal yang tidak diinginkan, maka di tempat-tempat tertentu para pemuda telah mengadakan pemeriksaan. Pada waktu itu di kalangan masyarakat Indonesia terjangkit rasa kebencian yang mendalam kepada bangsa penjajah, terutama bangsa kulit putih. Tiap orang kulit putih dianggap bangsa penjajah. Tidak jarang teradi ketegangan antara kelompok pemuda Indonesia dengan anggota Palang Merah Internasional yang anggotanya kebanyakan juga berkulit putih. Anggota Palang Merah Internasional lalu melancarkan tuduhan bahwa tugas mereka dihambat, dipersukar atau dihadang oleh kelompok pemuda bersenjata. Anggota Palang Merah Internasional yang Indo bahkan menuduh bangsa Indonesia turut campur tangan dan mengganggu tugas kemanusiaan mereka.

Dalam situasi genting seperti itu, bertepatan pula dengan sedang ramai-ramainya pembentukan berbagai organisasi dan barisan perjuangan di Surabaya, pada tanggal 16 September 1945 di Jakarta

mendaratlah tentara Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu di bawah pimpinan panglimanya, Laksamana Petterson. Pendaratan tentara Inggris sebagai bagian dari kekuatan Sekutu di Jakarta merupakan Komando Khusus SEAC (South East Asia Command) yang diberi nama AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini terdiri dari tiga divisi :

1. Devisi India ke 23 (*23th India Division*) di bawah pimpinan Jenderal Mayor D.C. Howthorn, mendarat di Jakarta
2. Devisi India ke 5 (*5th India Division*) di bawah pimpinan Jenderal E.C. Mansergh untuk daerah Jawa Timur, mendarat di Surabaya;
3. Devisi India ke 26 (*26th India Devision*) di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers untuk daerah Sumatra, mendarat di Medan dan Padang.

Adapun perintah-perintah Gabungan Kepala-kepala Staf Sekutu yang dibebankan kepada SEAC yang harus dilaksanakan oleh AFNEI adalah: (1) Menerima penyerahan Jepang; (2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu; (3) Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan ke negerinya; (4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian diserahkan kepad perintah sipil; dan (5) Menghimpun keterangan tentang dan untuk menuntut penjahat perang di depan pengadilan Sekutu.[76]

Jenderal Christison menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Christison kemudian mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian secara *de facto* mengakui adanya Negara Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Selain itu, sebagai jawaban terhadap protes dari Nehru, dan Organisasi Muslimin Colombo kepada pemerintah Inggris tentang dipergunakannya tentara India untuk menguasai Indonesia, Christison menegaskan bahwa tentara India tidak akan dipakai untuk mencampuri urusan politik di Indonesia.

Berdasarkan pengakuan *de facto* terhadap Negara Republik Indonesia dan penegasan tidak akan dipakainya tentara India oleh

Inggris itu, maka masuknya pasukan AFNEI ke wilayah Indonesia tidak dirintangi oleh para pejabat Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Malahan mereka dibantu untuk urusan tawanan perang, baik penyerahan orang-orang Sekutu yang di tawan Jepang, maupun orang-orang Jepang kepada Sekutu. Hal ini merupakan bukti bagi dunia internasional bahwa di Indonesia telah terdapat pemerintah yang berdaulat.

Meskipun demikian, ucapan Christison dengan kenyataan yang terjadi sangat berlawanan. Pasukan Sekutu yang terdiri dari orang-orang India yang didaratkan di Indonesia sering menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga terjadi bentrok senjata, bahkan pertempuran besar, seperti yang terjadi di Magelang, Surabaya, Ambarawa, Semarang, Medan dan sebagainya. Pertempuran itu terjadi karena pasukan Inggris tidak mau menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Sikap mereka meremehkan para pemimpin Indonesia baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, pasukan Sekutu ternyata juga membawa pejabat sipil Belanda NICA (Netherlands India Civil Adminstration), yaitu pemerintah pelarian Hindia Belanda yang berada di Australia ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Mereka diselundupkan masuk Indonesia dengan tujuan menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda yang imperialistis itu. Ada orang Belanda yang duduk dalam SEAC untuk mengurusi kepentingan pemerintahnya, di antara Jenderal Van Oyen, Dr. Van Mook, dan Laksamana Helfrich.

Dalam perjanjian Civil Affairs Agreement (CAA) antara Inggris dan Belanda yang ditetapkan di Chequers tanggal 24 Agustus 1945, Inggris akan membantu Belanda untuk menegakkan NICA di Indonesia. Persiapan masuknya NICA itu diadakan di dalam dan di luar Indonesia. RAPWI adalah salah satu kedoknya. Yang telah diselundupkan ke Indonesia antara lain Van der Plas, Abdulkadir Wijayaatmaja, Van Stratten. Selain CCA, Inggris dan Belanda juga terikat perjanjian pembentukan front ABDACOM (America British Dutch Australian Command) untuk menghadapi Jepang bersama Amerika dan Australia. Dengan dipindahkannya wilayah Jawa dan Sumatra dari SWPC ke SEAC, membuat persiapan Belanda untuk kembali ke Indonesia yang telah disusun bersama-sama Mac Arthur dalam NICA (Netherlands Indies Civil Administration) berantakan. Belanda harus mulai segalanya dari awal

melalui AFNEI. Berkaitan dengan struktur perorganisasian NICA ini oleh Nyonya Dekker dijelaskan sebagai berikut.

> NICA dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Di bawah terdapat CCO NICA (*Chief Commanding Officer NICA*) merangkap Gubernur, Conica (*Commanding Officer NICA)* merangkap Residen dan seterusnya. Bentuk pemerintahan tersebut dilaksanakan di daerah-daerah Kalimantan dan Indonesia bagian timur (*Gewest Borneo en de Grote Oost*), yaitu daerah yang telah diduduki oleh Amerika dan Australia SWPC.
>
> Sedang di pulau Jawa dan Sumatra karena kekuasaan Republik Indonesia paling kuat, maka kekuasaan sipilnya merupakan cabang dari kekuasaan militernya, yang susunannya terdiri dari AMACAB (*Allied Militery Civil Affair Branch*). Di bawah terdapat CCO AMACAB (*Chief Commanding Officer Amacab*) merangkap Gubernur, CO AMACAB (*Commanding Office Amacab*) merangkap Residen. Kemudian setelah sekutu (Inggris) meninggalkan Jawa nama AMACAB diganti dengan *Tijdelijke Bestuursdients.*[77]

Baru dua hari Patterson mendarat di Jakarta pada tanggal 18 September 1945, para intelijennya yang bergabung dalam *Mastiff Carbolic* telah mendarat dengan parasut di lapangan Gunungsari Surabaya dengan kedok RAPWI yang sesungguhnya tiga hari kemudian yakni tanggal 21 September 1945 baru tiba. Menyusul Captain Huiyer muncul pada tanggal 23 September 1945.

Sebagian besar dari rombongan yang tiba dalam waktu sepekan itu orang Belanda. Ada seorang Dokter Indonesia, Dokter Rubiono. Belanda dengan berkedok RAPWI ternyata merupakan perintis (*fore runner*) NICA yang dengan sekuat tenaga dan secepatnya berusaha menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya "briefing khusus" yang diberikan kepada anggota RAPWI. Tugas samaranya adalah mengurusi masalah bekas tawanan interniran, tetapi yang terpenting dengan topeng RAPWI mereka diberi tugas untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan cara-cara agar tentara Belanda dapat segera mendarat di Indonesia di samping juga diperintahkan menyabot berita-berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[78]

Perkiraan pihak Sekutu bahwa mereka masih akan mampu menangani situasi di Indonesia sampai pasukan Sekutu mampu menggantikan kedudukan Jepang meleset karena harus menghadapi

kenyataan pahit berupa perlawanan rakyat yang semakin sengit dan meluas dipelosok Indonesia. Pada tanggal 18 September 1945, dua hari setelah mendaratnya Patterson, Sekutu telah menyiarkan larangan untuk mengadakan rapat raksasa, membawa senjata bagi bangsa Indonesia dan pengibaran bendera Merah Putih. Larangan itu merupakan penghinaan bangsa Indonesia, apalagi yang harus melaksanakan perintah itu adalah Jepang.[79]

Menghadapi pengumuman yang menjengkelkan itu, rakyat Jakarta memutuskan untuk menyelenggarakan rapat raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai protes. Diperjuangkan rapat itu jangan sampai gagal. Meskipun di bawah tekanan yang sangat berat dari tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap di tambah dengan pasukan tank yang mengawasi Lapangan Ikada dengan ketat, pada tanggal 19 September 1945 rakyat berkumpul melimpah ruah. Dalam lautan manusia itu Bung Karno hanya berpidato secara singkat. Dimintanya kepercayaan, dukungan dari rakyat kepada pemerintah dengan jalan memenuhi perintahnya serta tunduk dan disiplin. Setelah itu rapat bubar dengan tenang.[80] Rapat samodera 19 September 1945 di Ikada itu adalah manifestasi pertama yang menunjukkan kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Merupakan kemenangan moral yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.[81] Pada hari yang sama di Surabaya juga terjadi peristiwa perobekan bendera di Yamato *Hoteru*.

Pada hari berikutnya, tanggal 20 September 1945, Inggris memerintahkan Jepang untuk tetap bertanggung jawab dalam peralihan ketertiban dan keamanan. Pihak Jepang juga diwajibkan melarang adanya rapat-rapat raksasa seperti yang terjadi di Ikada, dan boleh mengambil kekerasan bila di perlukan. Dalam rapat yang sulit itu pada tanggal 21 September 1945 Tentara ke 16 menyelenggarakan rapat staf. Rapat staf itu sampai pada suatu kebijaksanaan, bahkan untuk memulihkan kehormatan Jepang, lebih aman bila segera didomilisikan. Dengan demikian nama baik Jepang dapat ditegakkan. Dalam rapat itu staf Tentara Darat Jepang ke 16 mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

- Indonesia merdeka lebih baik bagi kedudukan Jepang, terutama Tentara ke 16. Pelaksanaan dan penarikan pasukan Jepang oleh Sekutu di usahakan secepatnya, sehingga pasukan Inggris maupun Jepang dapat secepatnya meninggalkan Indonesia, dan

membiarkan Belanda dan Indonesia saling mencari penyelesaian sendiri ;

- Sikap yang sungguh akan diambil dalam menghadapi Sekutu, khususnya terhadap hal yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Beberapa konflik yang merusakkan nama baik Jepang akan dihindari ;
- Saling pengertian antara Jepang dan Indonesia harus dijaga. Karena itu penggunaan senjata dalam menjaga keamanan harus dihindari ;
- Semua orang Jepang, anggota pasukan sipil yang bekerja pada militer tanpa kecuali akan dilindungi ;
- Keadaan selanjutnya akan diatur sebagai berikut :
    - Sampai saatnya pengambilalihan kekuasaan Jepang oleh Sekutu, tugas pokok tentara Jepang adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu polisi diletakkan sebanyak mungkin di garis depan, sementara tentara Jepang membantu di garis belakang (pedalaman) ;
    - Pemindahan kekuasaan kepada tentara Sekutu dilaksanakan dalam bentuk pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu. Tetapi akan tetap dicoba untuk membantu fihak Indonesia guna mengambil prakarsa dan dicoba diusahakan agar tentara Sekutu mau mengakui kenyataan dan situasi di Indonesia.[82]

b. Konflik Indonesia-Jepang

Posisi Jepang dalam keadaan yang sangat sulit untuk melayani baik tuntutan bangsa Indonesia dan tuntutan fihak Sekutu yang akan mengambil alih kekuasaannya di Indonesia. Di samping itu tentu saja secara moral orang Jepang sudah patah semangat dengan kekalahannya dalam perang. Dalam keadaan demikian timbul tiga sikap di kalangan orang Jepang yang bertugas di Indonesia.

a. **Pertama,** ada di antara mereka yang memegang teguh instruksi atasannya dan instruksi Laksamana Petterson yang mempertahankan keadaan *status quo* tanggal 15 Agustus 1945 sebagaimana waktu mereka menyerah kepada Sekutu. Jadi mereka tidak mau tahu adanya Republik Indonesia. Mereka

hanya bersedia menyerahkan kekuasaan senjatanya kepada angkatan perang Sekutu.

b. **Kedua,** mereka yang bersikap dengan sepenuh hati membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti yang telah dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia. Mereka mengakui Republik Indonesia dan bersedia menyerahkan persenjataannya kepada Republik Indonesia, kemudian mereka akan ikut berjuang bersama-sama dengan bangsa Indonesia.

c. **Ketiga,** mereka dalam hal ini mengambil jalan dengan berpedoman pada sikap resmi tentara Jepang yang diumumkan olen Tentara ke 7. Mereka bersikap netral.[83]

Untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya sikap pemimpin Jepang di Surabaya terhadap perjuangan rakyat Surabaya, Bung Tomo, tokoh yang menyaksikan langsung berbagai peristiwa perebutan senjata dan 10 November 1945 di Surabaya, antara lain menyatakan sebagai berikut.

> Komandan Tertinggi Balatentara Nippon daerah Jawa Timur dan Panglima Angkatan Laut Nippon harus dicatat sebagai orang yang tidak kecil bantuannya kepada perjuangan bangsa Indonesia di Jawa Timur waktu itu. Kiranya mereka berdua, setelah melihat tekad rakyat yang bulat, merasa tidak berguna untuk berternpur melawan kaum Republik. Terutarna setelah mernperoleh penjelasan tentang maksud gerakan rakyat, kedua Panglima Nippon tersebut dengan sukarela mernerintahkan kepada anak buahnya masing-masing untuk menyerahkan segenap perlengkapan militer kepada bangsa Indonesia.[84]
>
> Dalam pada itu, pihak Indonesia tidak sabar lagi. Semangatnya sudah terbakar oleh suasana merdeka. Tidak lagi banyak menaruh perhatian apakah Jepang masih kuasa, berpegang teguh pada *status quo* 15 Agustus 1945, atau ada keputusan lain yang menguntungkan Indonesia; semua itu tidak lagi diperdulikan. Lebih-lebih di Surabaya. Pendek kata kalau ada yang menghalangi permindahan kekuasaan yang harus dilaksanakan secara yang singkat-singkatnya, mereka dihantam.

Pihak Jepang dalam keadaan patah semangat dan tertekan, tidak banyak yang punya harapan dapat mewujudkan segala yang diputuskan dalam rapat itu. Maka dari itu, ada juga pimpinan tentara Jepang yang menggunakan segala kesempatan segera mengakhiri tanggung jawabnya baik dari pihak Sekutu maupun Indonesia yang

mengambil alih kekuasaan dan senjatanya. Contoh yang jelas adalah tingkah Kapten P.G.J Huiyer yang mengaku sebagai wakil Sekutu mau mengambil alih kekuasaan di Surabaya.

Pemerintah Indonesia, untuk melaksanakan bunyi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak perlu menunggu sampai terjadinya penyerahan kekuasaan seperti yang dirancang Jepang pada tanggal 25 September 1945. Mereka dengan tegas memutuskan untuk mengambil tindakan berikut: (1) Memutus segala hubungan apapun dengan Jepang; (2) Menghapuskan pernerintahan yang dualistis; (3) Mendekritkan semua pegawai sebagai pegawai Republik Indonesia; dan (4) Mengambil alih apa yang mungkin dapat diambil alih darl fihak Jepang, termasuk persenjataan.[85]

Apa yang telah diputuskan di atas telah berhasil dilaksanakan dengan sukses di Surabaya. Semua kekuasaan dan persenjataan Jepang di Surabaya dapat direbut oleh bangsa Indonesia pada akhir September dan awal Oktober 1945 (Don Bosco, Pacuan Kuda, Lindetives, Ksariaan darmo, Gedung *Kempeitai*, Marine *Kaigun* Gubeng, dll). Pada tanggal 2 Oktober 1945 Pemerintah Karesidenan Surabaya mengeluarkan dekrit seperti yang dikehendaki oleh Pernerintah Pusat di Jakarta.

c. Konflik Indonesia-Belanda: Insiden Bendera di Tunjungan

Sejak datangnya orang-orang Belanda yang menyelundup ke Surabaya, dan hampir bersamaan waktunya dengan dibebaskannya kaum interniran Belanda dari kamp-kamp tawanan, maka suasana Surabaya mulai panas karena terjadi saling mencurigai antara pihak pemuda dengan pihak Palang Merah International. Pemuda Surabaya baru saja melakukan serangkaian kegiatan memperingati sebulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menyelenggarakan rapat umum di Lapangan Pasarturi pada tanggal 17 September 1945, pada saat itu ada provokasi baru tentang datangnya kelompok orang Sekutu yang pertama dari *Mastiff Carbolic* dibawah pimpinan Letnan Antonissen dengan parasut di Gunungsari Surabaya.

Mastiff Carbolic Party adalah salah satu dari sejurnlah kelompok yang diorganisir oleh Anglo Dutch Country Section (ADCS) angkatan 136. Semula selama Perang Dunia II, ADCS adalah organisasi spinonase yang dikirim ke Sumetera, Malaya (Malaysia) dan Jawa secara rahasia. Setelah Jepang menyerah mereka diterjunkan antara lain di Jakarta Surabaya untuk menghimpun informasi tentang keadaan, kamp-kamp

tawanan dengan kedok RAPWL. Pihak tentara Jepang setelah mendengar tentang pendaratan itu kemudian mejemput dan mengawalnya ke Yamato *Hoteru* (Hotel Oranje). Sebelumnya di Hotel Oranje telah berkumpul pula sebagian besar orang Indo dan orang Indonesia.[86]

Kemudian didirikanlah markas RAPWI, yang dibantu pendiriannya oleh sebagian orang Indo yang telah meninggalkan kamp tawanan secara tidak sah. Dengan RAPWI ini mereka mempunyai gerakan-gerakan berselubung, dengan berdirinya RAPWI segera saja di jalan-jalan kota berseliweran kendaraan dengan tulisan RAPWI, pada hal sebelumnya sepi-sepi saja.[87] Menurut Ruslan Abdulgani, jurnlah pasukan yang diterjunkan sebanyak 15 orang, semuanya berhasil ditawan oleh pihak Republik. Kebanyakan dari mereka bangsa Belanda, beberapa orang bangsa Inggris dan seorang bangsa Indonesia, yaitu Dokter Rubiono.[88] Tapi sumber lain tidak menyatakan bahwa sernua berhasil ditawan, dan jumlahnya pun tidak 15 orang.

Pada pagi hari berikutnya, yaitu hari Rabu Wage tanggal 19 September 1945, sementara pemimpin-pemimpin *Mastiff Carbolic* mengunjungi Markas Besar Tentara Jepang, beberapa orang anggotanya bersama-sama orang Belanda yang tergabung dalarn Komite Kontak Sosial mengibarkan bendera Belanda *Rood-Wit-Blauw* (Merah Putih Biru) pada tiang sebelah kanan gapura hotel Yamato sebagai lambang tegaknya kembali kolonialisme Belanda di Surabaya. Sikap orang-orang anggota Komite Kelompok Sosial ini sombong, congkak dan angkuh, karena mereka merasa menang dalarn perang. Mereka sama sekali tidak menghormati orang-orang Indonesia. Orang lewat yang memakai lencana Merah Putih diganggunya. Berkibarnya bendera Belanda Merah Putih Biru dan tingkah laku orang Belanda itu segera menarik perhatian rakyat dan pemuda di sekitarnya.

Melihat bendera Belanda berkibar, hati rakyat Surabaya jadi panas. Mereka tidak mau melihat bendera asing berkibar di negerinya yang baru merdeka. Berkibarnya bendera asing dianggap sebagai suatu penghalang atau penggganggu kemerdekaan. Mereka akan menindak. Tetapi tidak malam itu. Mereka menunggu sampai keesokan harinya. Pagi hari sekitar jam 06.30 tanggal 19 September 1945, hubungan telepon dengan hotel berhasil diputuskan. Mereka menghindari kontak dengan serdadu Jepang yang menjaga Markas Intercross tidak jauh dari situ. Kerumunan para pemuda mulai tumbuh. Pemuda darl segala

penjuru datang. Mereka menunjuk-nunjuk bendera di atas sambil berterlak agar lambang penjajah Belanda itu segera diturunkan.

Orang Belanda yang berada di sekitar hotel memperlihatkan sikap congkaknya. Berkacak pinggang, dan memandangi massa pemuda dengan penuh penghinaan. Rakyat yang datang berkerumun dengan membawa senjata *takeyari*, golok, kelewang dan sebagainya, dipandangnya dengan mengejek.

Dengan jalan *gethok tular, tundha rambat* (dari mulut ke mulut) dalam waktu sekejap Jalan Tunjungan di sekitar hotel telah penuh dikerumuni pemuda. Makin siang makin ramai. S. Kasmar, Sumarsono dan Ruslan dengan naik sepeda berteriak-teriak sepanjang jalan minta agar rakyat beramai-ramai menurunkan bendera Belanda di atas Hotel Oranje. Mereka bertiga mengelilingi Embong Malang, Blauran, Praban dan kembali ke selatan. Melihat massa yang makin banyak di muka hotel, pemuda Belanda yang tadi mengganggu orang lewat jadi takut dan masuk ke ruangan dalam hotel. Orang tambah ramai berteriak-teriak minta agar bendera Belanda segera diturunkan. Tetapi tidak ada yang melakukan tuntutan pemuda itu. Mereka lalu membicarakan bagaimana cara yang harus ditempuh.

Sutomo, wartawan Kantor Berita Antara yang kantornya di Jl. Tunjungan nomor 100 berhadapan dengan Hotel Oranje, juga datang ke situ bersama Abdul.Wahab, Ketua BKR Karesidenan Surabaya. Mereka menyuruh beberapa orang untuk menanyakan duduk perkaranya kepada KNIP dan Residen. Diperoleh jawaban bahwa KNI dan Kantor Karesidenan tidak tahu menahu, tetapi akhirnya datang pula Residen Sudirman di Hotel Oranye dengan mengendarai mobil hitam. Residen Sudirman dengan tegas minta kepada orang yang mengaku sebagai "Perwakilan Sekutu" supaya segera menurunkan bendera itu. Sudirman menyatakan bahwa ia pejabat Pernerintah Republik Indonesia. la melarang pengibaran bendera asing berkibar di Surabaya.

Permintaan tersebut tidak digubris oleh orang-orang yang berada di situ. Bahkan seorang pemuda Belanda mengancam dengan moncong revolvernya ke arah Sudirman. Melihat gelagat mau main kekerasan demikian, seorang pemuda Indonesia yang berada di dekat peristiwa itu, Sidik namanya, bergerak cepat menendang revolver yang dipegang oleh pemuda Belanda itu dengan tendangan silat, mulailah perkelahian massal.Dalam keadaan hiruk-pikuk itu Sudirman kembali ke kantornya.

Dari kelompok pemuda yang terlibat dalam perkelahian langsung kira-kira 20 orang. Beberapa orang opsir Sekutu (anggota *Mastiff Carbolic*) berdiri dengan sombongnya di tingkat atas hotel di bawah bendera. Tetapi rakyat terus mendesak ke arah itu, sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan. Kaca etalase dikepruk dan pecah. Beberapa pencoleng mengambil barang-barang yang diragakan. Pencoleng semacam itu di kemudian hari dinamakan BOO, atau *Barisan Oesoeng-oesoeng*.[89] Banyak pula pemuda yang berusaha naik ke atas tempat bendera berkibar dari luar, menggunakan tangga atau dengan jalan panggul-memanggul.

Beberapa orang pemuda menerobos masuk ruangan hotel, mencari jalan lewat dalam menuju tempat bendera. Seorang berhasil memanjat atap hotel, tetapi tiba-tiba terpelanting karena dipukul seorang Belanda dari belakang. Seorang jatuh, dan lainnya segera menggantikan. Penggantinya agak kesulitan untuk mencapai tempat bendera tiga warna berkibar. Akhirnya beberapa orang berhasil naik ke atas hotel.[90] Dengan cekatan pemuda itu menurunkan bendera, setelah sampai di bawah bagian birunya disobek dengan digigit. Pemuda lain membantu. Setelah birunya disobek, bendera yang tinggal merah dan putih dengan ukuran yang tidak seimbang kembali dikibarkan dipucuk tiang. Birunya dibuang kebawah diiringi teriakan "Merdeka".

Pekik itu disambut gegap gempita oleh orang yang di bawah.[91] Massa rakyat belum juga mau bubar. Bung Tomo kemudian meloncat ke atas atap kantornya (Antara). Diajaknya rakyat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah puas menumpahkan perasaannya dalam irama lagu kebangsaan itu, barulah dengan lega hati rakyat meninggalkan Tunjungan. Truk penuh rakyat yang memang berjuang dengan mengangkat senjata mereka masing-masing di atas kepala sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.[92] Serdadu Jepang yang berjaga di luar hotel tidak melibatkan diri dalam keributan itu. Mereka tidak perlu mempertahankan bendera Belanda yang tidak ada hubungan dengan tuganya.

Dalam insiden bendera tersebut pihak pemuda Indonesia jatuh korban 4 orang, yaitu Sidik, Mulvadi, Hariono dan Mulyono. Sedangkan Mr. Ploegman (Belanda) tewas akibat ditusuk dengan senjata tajam.[93] Kini terbukti, bahwa pengibaran bendera asing di Surabaya pada saat itu akan merangsang kebencian rakyat dan mengundang untuk bertindak, di pihak lain juga menaikkan semangat dan memperkokoh

persatuan. Bangsa Indonesia di Surabaya semakin menyadari arti kekuatan dan kedaulatan rakyat.

Siapa nama pemuda penyobek bendera hingga sekarang belum terungkapkan. Yang penting sikap segenap rakyat sudah seia-sekata tidak sudi melihat bendera asing di negaranya. Untuk itu mereka telah berani mengambil risiko dengan mempertaruhkan segalanya. Beberapa nama pernah disebut sebagai pelaku penyobekan bendera, antara lain Kusno Wibowo. BPRI mengatakan pelakunya Sutrisno, sedang TALRI mengemukakan Kusnadi. Menurut foto Ippos terdapat lima orang pemuda yang berada di atas hotel.[94]

Berita tentang dikibarkannya bendera Belanda di Oranye Hotel disampaikan oleh Ruslan Abdulgani. dengan perantaraan telepon ke PAL. Dimintanya agar PAL membantu ikut menurunkannya. PAL mengirimkan 19 truk dengan 350 orang pemuda bersenjatakan sangkur ke kota. Tapi tatkala tiba di tempat kejadian telah terlambat. Peristiwa penyobekan bendera sudah selesai dan dikerjakan oleh Arek-arek Surabaya sendiri.

Melihat betapa fanatiknya rakyat Surabaya terhadap bendera nasionalnya, orang Jepang tidak galak lagi menentang keinginan pemuda Indonesia agar *Hinomaru* (bendera Jepang) tidak dikibarkan lagi di muka umum. Ketika seorang pemuda Indonesia, Slamet Utomo, datang di Kantor Gubernur dan minta kepada Dul Arnowo selaku Ketua KNI dan Residen Surabaya untuk menurunkan Hinomaru dari tiang bendera Kantor Gubernur, ia tidak dihalangi. Slamet Utomo segera menurunkan Hinomaru, diganti Merah Putih. Orang Jepang yang menyaksikan peristiwa itu tidak merintanginya.[95]

Sejak tanggal 19 September 1945 tercatat sebagai berkibarnya Sang Merah Putih di Kantor Gubernur untuk selamanya. Memang pada tanggal 1 September 1945 Merah Putih telah berkibar di sana, tapi hanya untuk satu hari saja. Namun pengibaran bendera yang hanya satu hari itu telah menetapkan hati bangsa Indonesia di Surabaya untuk ikut mengibarkan Merah Putih di rumahnya dan di seluruh Kota Surabaya. Tanpa takut lagi, karena di Kantor Gubernur sudah dikibarkan Merah Putih demikian.

Dua hari kemudian, yaitu tanggal 21 September 1945, tibalah missi RAPWI yang sesungguhnya, di bawah pimpinan Letnan P. G. De Back dari Dutch Navy. Setelah mendapat laporan tentang peristiwa bendera dari Letnan Antonissen, oleh De Back, *Mastiff Carbolic Party* yang telah membuat onar di Surabaya itu segera dikirim kembali ke

Jakarta De Back kemudian memerintahkan kepada fihak Jepang untuk mempersiapkan evakuasi Interniran wanita dan anak-anak dari Semarang ke Surabaya.[96]

Semula pihak Jepang khawatir, kalau-kalau semakin banyaknya orang Belanda masuk ke Surabaya akan menambah keruhnya keadaan. Setelah dapat persetujuan dari Markas Besar Tentara Jepang, maka pemindahan interniran itu dilaksanakan dari tanggal 29 September 1945 sampai 2 Oktober 1945, tapi berlangsung seret karena situasi semakin buruk. Selama 4 hari berhasil dipindahkan ke Surabaya sebanyak 2.000 tawanan wanita, ditempatkan di Darmo dan Gubeng, hingga di kedua tempat itu terkumpul sekitar 3000 - 4.000 orang.

d. Konflik Jepang-Belanda

Pada tanggal 23 September 1945 Captein P.J.G. Huijer tiba di Surabaya. la datang atas perintah Laksamana C.E.K. Helfrich dari Colombo, yang harus secepatnya sampai di Surabaya. Laksamana C.E.L. Helfrich adalah Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. la kemudian duduk dalarn SEAC untuk mengurusi kepentingan Belanda (NICA). Dipergunakannya laporan Captain P.J.G. Huiyer dalam penulisan ini, meskipun berasal dari orang Belanda, agar membantu mendapatkan gambaran suasana yang dicatat pada waktu peristiwa terjadi.

Surat Perintah Helfrich kepada Captain P.J.G. Huiyer :

Commander – in – Chief

Netherland Forces in the East.

Colombo, 14 September 1945.

Ref : SB. 4/1/16

From : C – in – C. Netherland Forces in the East

To : Whom it may concern.

This is to cerfity that I have ordered Captain P.J.G. Huijer, Royal Netherlands Navy

to proceed forthwith to Singapore to reach Soerabaja with the earliest possible means as designated Senior Officer Royal Netherlands Navy Soerabaja and Royal Netherlands Naval Liaison Officer to N.O.I.C. Soerabaja.

I hereby request all authorities concerned to extentd to the above mention ed their fullest cooperation in order that he succesfully accomplishes his voyage

The C.-in-C. Netherlands Forces in the East.

C.E.L. Helfrich

Admiral R.N.N. [97]

Kemudian diperkuat oleh perintah Laksamana Patterson dengan tugas mengadakan inspeksi terhadap fasilitas pelabuhan serta seluruh instalasi di Tanjung Perak Surabaya. Kutipan Surat Tugas Patterson sebagai berikut :

H.M.S.
CUMBERLAND,

BATAVIA

22nd, Sept : 1945

To whom It may concern.

This is to certify that I have ordered Captain P.J.G. Huijer to proceed to Sourabaya in order to inspect the harbour works and all Naval installations at Tg. Perak.

SD . .....

REAR ADMIRAL COMMANDING,

FIFTH CRUISER SQUADRON,

for THE SUPREME ALLIED COMMANDER[98]

Beberapa hari di Surabaya, setelah menyelesaikan tugasnya, Huijer pada tanggal 27 September 1945 terbang ke Balikpapan. Pada hari berikutnya, tanggal 28 September 1945, ia kembali ke Jakarta. Dalam laporannya setelah tiba di Jakarta, Huiyer mengatakan bahwa Surabaya dalam keadaan tenang dan aman. Kepada Huijer laksamana Patterson berkata bahwa Surabaya akan diduduki oleh Sekutu kira-kira tanggal 20 oktober 1945.

Dalam laporan yang juga merupakan buku catatan harian itu dinyatakan kepada Laksamana Shibata tentang tugas utamanya. Ditekankan tidak ada wewenang Huijer untuk memberikan perintah kepada Shibata. la hanya menyampaikan perintah Patterson agar ketertiban dan keamanan dijaga oleh Shibata. Shibata menjelaskan kepada Huijer bahwa perihal keamanan dan ketertiban kota ia sudah tidak mengerti lagi. Semua warga kota dapat pergi dengan bebas tanpa ada halangan dan gangguan.[99]

Dengan demikian jelas bahwa Huijer adalah infiltran Belanda yang membawa resmi tugas dari Laksamana/Panglima Tentara Belanda di Timur untuk mempersiap secepatnya kembalinya Belanda di Surabaya. Panglima tentara Inggris Laksamana Patterson ikut memperkuat penugasan Huijer dengan surat-surat perintah yang diberikan kepadanya. Huijer tidak tahu apa yang telah bergolak di Surabaya. Dia tidak tahu Surabaya telah merebut senjata di Don Bosco, Tobu Jawa Butai, Lindetives, dll. dan terjadi insiden bendera di Oranye Hotel.

Dalam laporan Huijer juga disebutkan rasa kawatirnya terhadap para tawanan dan interniran karena Laksamana Shibata kelihatan ragu-ragu untuk menjaga keamanan para tawanan. Percaya akan laporan Huijer, kemudian Laksamana Patterson memerintahkan pada Kapten Huijer kembali ke Surabaya disertai staf, yaitu Letnan Kolonel Roelofsen, Residen Massen, Letnan Timmers dan Letnan Van Der Groot dan Hulseve sebagai penterjemah. Semua berkebangsaan Belanda kecuali Hulseve yang berasal dari Maluku. Tugas mereka mempersiapkan pendudukan tentara Sekutu di Surabaya.

Pada tanggal 29 September 1945 jam 17.00, P.J.G. Huijer dengan teman-temannya tiba di Surabaya dengan pesawat khusus atas perintah

Laksamana Patterson. Menurut Ruslan Abdulgani, kelompok Huijer tersebut ketika bertemu dengan Residen Sudirman memperkenalkan dirinya sebagai utusan Sekutu untuk RAPWI, singkatan dari Rehabilitation of Prinsoners of War and Interneers, yaitu tim untuk merehabilitasi, mengevakuasikan para tawanan perang dan kaum interniran. Tetapi bila Huijer anggota RAPWI, baik laporan De Back- (pejabat RAPWI resmi) maupun dalam laporan Huijer sendiri, tidak pernah disebutkan. Kemudian hari ketahuan bahwa Huijer di Surabaya hanyalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Tentara Belanda, C.E.L. Helfrich. Tugas itu tidak lain adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Surabaya melalui NICA, baik secara politik maupun militer. Jadi ikutnya Huijer pada RAPWI dan surat perintah Patterson itu hanya karena kelicikan Huijer belaka.

Kapten Huijer tercengang dengan perubahan Surabaya selama ditinggalkan dua hari ke Balikpapan, orang-orang Indonesia yang sebelumnya terlihat bersikap tidak menentu, sekarang tampak beringas dan penuh semangat. Ketika ditinggalkan, banyak pemuda berkeluyuran tanpa membawa senjata. Senjata masih berada di tangan Jepang. Tetapi sekarang senjata sudah berada di tangan rakyat dan pemuda Indonesia. Orang Jepang yang dulu menjaga di pintu-pintu hotel tidak tampak lagi. Melihat hal ini, Huijer segera menghubungi Laksamana Shibata dan menegor ketidakmampuan Laksamana Shibata dan Jendral Iwabe dalam menguasai keadaan kota sesuai dengan perintah Patterson lewat Huiyer. Dalam laporan Huijer tercatat sebagai berikut :

> *On my way to the Oranje Hotel i perceived that town was in a nervous and disquieting condition.*
>
> *As I had found the town in a more nervous and disquietening state. I told them I propose to Admiral Patterson stronger quards. Both the Admiral and General told me it would recall more troops from internment camps and the General decided to send 300 ex Kenpeitai as quards to the women and children's quafter.* [100]

Pada tanggal 30 September 1945 pihak Jepang menugaskan untuk memanggil kembali lebih banyak pasukan dari pedalaman. Pasukan tersebut dipersenjatai dengan 15 kotak peluru, beberapa senapan mesin dengan 100 butir peluru. Tetapi sampai awal bulan Oktober 1945 pasukan itu belum tiba di Surabaya, sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1945 Gedung Kenpetai telah direbut pemuda Indonesia.[101] Seperti telah diutarakan dalam rapat staf Tentara 16 Jepang tanggal 21 September 1945, dalam hubungannya dengan kedudukan Tentara Jepang terhadap Sekutu, telah diputuskan bahwa kekuasaan Tentara Jepang akan diserahkan kepada Sekutu secara formal dalam bentuk penyerahan kekuasaan. Bila hal ini terjadi, berarti bahwa Kedudukan tentara Jepang segera diganti oleh tentara Sekutu (Inggris - Belanda), dan Semua peralatan militer Jepang tentunya juga akan ikut diserahkan.

Bila dua hal tersebut terjadi, tentu akan sangat berbahaya bagi pemerintah Indonesia di Surabaya, padahal untuk membela dan mempertahankan Proklamasi diperlukan senjata. Sudah tentu penyerahan bulat-bulat seperti direncanakan Jepang itu pasti tidak dikehendaki oleh Arek-Arek Surabaya, sebab ini berarti Indonesia dianggap sebagai inventaris mati. Dulu sebagai jajahan Belanda, kemudian jatuh ke tangan Jepang, dan kini akan diserahkan lagi ke kepada "yang dianggap" sebagai pemiliknya yang lama, Belanda, dengan perantaraan Sekutu, yaitu Inggris.

Meskipun Jepang mencoba untuk menumbuhkan inisiatip bangsa Indonesia, tetapi hal itu tidak digubris lagi. Rakyat Surabaya yang sudah panas, meluap-luap semangatnya, tidak percaya lagi akan segala macam putusan dan ucapan Jepang. Oleh sebab itu, dalam masa tersebut, mumpung Sekutu belum datang di Surabaya, oleh tokoh-tokoh pejuang telah ditegakkan dan diorganisir bentrokan, pengambilalihan dari yang kecil-kecil sampai pengambilalihan obyek-obyek besar. Dari mulai dikibarkannya bendera Merah Putih di tiap rumah, insiden bendera di Tunjungan, Gubernuran, sampai kepada jatuhnya Don Bosco, Markas Tobu Jawa Butai, Gubeng Barrak dan Markas Kenpeitai. Seniata yang baru diperoleh mulai dipergunakan

untuk menembak. Semakin keras Jepang bertahan semakin keras pula Arek-Arek Surabaya menekan dan semakin gencar serangan dilakukan.

Menyaksikan aksi Arek-arek Surabaya yang menggelegar itu, hati Huijer semakin panas. Kedudukannya sebagai utusan Panglima Sekutu yang tidak boleh bertindak sendiri ditinggalkan. Huijer beraksi, berusaha sekuat tenaga dan mengorbankan apapun yang dapat dilakukannya untuk membela kepentingan Belanda di Indonesia, ikut memaksa Jepang untuk mengerahkan kekuasaan kepadanya. Kedok NICA-nya terbuka.

Catatan Akhir :

[1] *Encyclopedia of Americana.* Surabaya: Volume International Edition, hlm: 58.
[2] GH. Von Faber. *Niew Soerabaja.* 1930, hlm: 195. Lihat Nugroho Notosusanto. *Pertempuran Surabaya.* hlm: 51.
[3] A. G. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakjat Indonesia.* Pustaka Rakjat Jakarta. 1950. hlm: 15-17.
[4] Nugroho Notosusanto. *Pertempuran Surabaya.* Penerbit Mutiara 1984. hlm: 6.
[5] Subantardjo. *Sari Sedjarah I, Asia – Australia.* Bopkri Yogyakarta, 1951. hlm: 245.
[6] *Ibid.* hlm: 194-195.
[7] Proyek Penelitian dan Pencatatan, *Kebudayaan Daerah. Ibid.*, hlm: 139.
[8] Cindy Adam. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.* terjemahan Abdul Bar Salim, Jakarta: PT Gunung Agung, 1982. hlm: 44 - 45.
[9] I. Djumhur-Danaputro. *Sejarah pendidikan.* Bandung: CV Ilmu, cat. ka 7,1978. hlm: 197.
[10] Slamet Muljono. *Negarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya.* Jakarta: Bhatara, 1979. hlm: 282.
[11] Lembaga Riset Islam Malang. *Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri.* Gresik: Panitia Pemugaran dan Penelitian Sunan Giri, 1973. hlm: 53.
[12] Muh. Ali. *Perdjuangan Feodal Indonesia.* Jakarta: Ganaco, 1963. hlm: 102.
[13] Pitono. *Sejarah Indonesia Lama.* IKIP Malang, 1961. hlm: 129.
[14] Heru Sukadri K. *Dari Ujunggaluh ke Surabaya.* 1973. hlm: 66.
[15] Slamet Muljono. *loc.cit.*
[16] Salladin dkk. *Geografi Sosial dan Kependudukan.* Bina Ilmu Surabaya, 1979. hlm: 47.
[17] Muh. Ali. *loc.cit.*
[18] Harun Hadiwijono. *Kebatinan Islam abad XVI.* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972. hlm: 5.
[19] Muh. Ali, *op.cit.*
[20] Salladin dkk. *Geografi Sosial dan Kependudukan.* Bina Ilmu Surabaya, tahun 1979. hlm: 47.
[21] Salladin dkk, *op.cit.*, hlm: 72.
[22] Rz. Leirissa, *Sejarah Nasional Indonesia V.* BP Jakarta, th. 1984 hlm: 127.

[23] *Ibid.*, hlm: 128
[24] *Ibid.*
[25] A. G. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakjat, 1950. hlm: 15-17.
[26] Susanto Tirtoprodjo. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1980. hlm: 66.
[27] *Encyclopedia of Americana.* Surabaya: Volume International Edition, hlm: 58.
[28] Nugroho Notosusanto. *Pertempuran Surabaya*. Penerbit Mutiara, 1984. hlm: 6.
[29] Subantardjo. *Sari Sedjarah I, Asia – Australia.* Yogyakarta: Bopkri, 1951. hlm: 245.
[30] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kabudayaan Daerah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur.* Proyek IDKD 1980/1981, hlm: 123.
[31] I. Djumhur-Danaputro. *Sejarah pendidikan.* Bandung: CV Ilmu, cat. ka 7,1978. hlm: 134 - 143.
[32] Cindy Adam. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, terjemahan Abdul Bar Salim. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982. hlm: 44 - 45.
[33] I. Djumhur — Danasaputro, *ibid.*, hlm: 197.
[34] Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm: 8.
[35] Tim IDKD Dep. PDK. *Sejarah ReveJusi Kemerdekaan Daerah Jawa Timur.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, th. 1983 – 1984. hlm: 2.
[36] Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm: 10.
[37] Tim IDKD Dep. P dan K, *op.cit.*, hlm: 10.
[38] Humas Kotamadya Surabaya, *Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sepanjang Masa*, tahun 1978, hlm: 23 — 25.
[39] Nugroho Notosusanto (Ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984. hlm: 13.
[40] Arniati Prasedyowati Herkusumo, *Chuo Sangi-in*, Jakarta: Roosyda Jayapura, 1884. hlm: 105.
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*
[43] Moh. Hari Suwarno, *Ramalan Jayabaya versi Sabdopalon,* Jakarta: PT. Yudha Gama Corp. hlm: 33 dan 51.
[44] Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm: 15—16.
[45] Nugroho Notosusanto (Ed): *op.cit.*, hlm: 16.
[46] *Ibid.*, hlm: 90.
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*, hlm: 65
[49] *Ibid.*, hlm: 68

[50] *Ibid.*

[51] Lukitaningsih Irsan Rajamin. *Dasar Pembentukan Pemuda Putri Republik Indonesia (PRRI) Pejuang 1945 di Surabaya*, Makalah Jakarta. 27 Februari 1976, hlm: 1.

[52] Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm: 14.

[53] *Ibid.*, hlm: 49.

[54] Ruslan Abdulgani, *Seratus Hari di Surabaya yang menggemparkan Indonesia.* Jakarta: 1974. hlm: 13.

[55] Nugroho .Notosusanto (Ed), *op.cit.*, hlm: 61-60. Untuk menunjang pemakaian bahasa Indonesia kemudian didirikan Komisi Bahasa Indonesia dengan pemimpin: Mori (Join-bang, Ketua), Iciki, Wakil Ketua, Mr. R. Suwandi, Penulis Mr. St. Takdir Alisyahbana, Penulis ahli: Anggota-anggota: Abas St. Pamuncak, Mr. Amir Syarifuddin, Armijn Pane, Dr. Aulia, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Drs. Moh. Hatta, S. Mangunsarkoro, Dr. R. Ng. Purbocaroko, RP. Perwirodinoto, Dr. Priyono, H. Agus Salim, Sanusi Pane, Ir. Sukarno, Mr. Sumanang dan lain-lain.

[56] Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm: 50.

[57] *Ibid.*

[58] Moehkardi. *Pelajar Pejuang TGP 1945 – 1950.* Surabaya: Penerbit Yayasan Ex Batalyon TGP Brigade XVIII, 1983. hlm: 31.

[59] G. Mc T. Kahin, *op.cit.*, hlm: 112 - 115.

[60] Ahmad Fauzi DH dkk. *Pancasila ditinjau dari segi Hostiris, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi filosofis*, Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, 1981. hlm: 45 - 46.

[61] *Ibid.*, hlm: 54 - 56.

[62] Ruslan Abdulgani: *op.cit.*, hlm: 7-8.

[63] Subagyo, IN., *op. cit.*, hlm: 57.

[64] W.G.J. Remmeiink, *The New Emergence of the New Situation, The Japanese Army on Jawa after the Surrender, Militair Spectator No. 147.* February 1984, hlm: 49 - 50.

[65] Ruslan Abdulgani, *op.cit.*, hlm: 19.

[66] W. G. J. Remmelink, *op.cit.*, hlm: 49 - 50.

[67] Ruslan Abdulgani, *loc. cit*

[68] *Ibid.*, hlm: 50-51

[69] Ktut Tantri, *Revolusi di Nusa Damai,* Djakarta: Gunung Agung, 1964. hlm: 257-260.

[70] *Tokyo Sue* adalah wanita Jepang yang merayu dalam siaran Radio Tokyo untuk membangkitkan semangat prajurit Jepang di medan pertempuran.

[71] Barlan Setiadidjaya, *op.cit.*, hlm: 117.

[72] Ktut Tantri, *ibid.*, hlm: 262-263.

[73] *Ibid.*, hlm: 264

[74] Kelompok Kerja di Jakarta, *ibid.*, hlm: 192-194.

[75] GWJ. Remmelink, *The Emenergence of the New Situation : The Jalanese Army on Java after the surrender, Militair Spectator, No. 147.* Februari 1978, hlm: 57.
[76] Nyoman Dekker. *Sedjarah Revolusi Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka, 1980. hlm: 28-20.
[77] *Ibid.,* hlm: 30-31.
[78] Van der Wall. *Rapat SEAC,* September 1945, hlm: 300.
[79] GWJ. Remmelink, *ibid.,* hlm: 58.
[80] Ahmad Subardjo Joyoadisuryo, *Kesadaran Nasional,* Jakarta: Otobiografi, 1978. hlm: 374-375.
[81] GWJ. Remmelink, *op.cit.,* hlm: 56.
[82] *Ibid.,* hlm: 58-59.
[83] Nugorho Notosusanto. *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1979. hlm: 129-131.
[84] Bung Tomo, *op.cit.,* hlm: 34.
[85] GWJ. Remmelink, *op.cit.,* hlm: 57.
[86] *Ibid.* hlm: 57-59.
[87] Wawancara dengan Wiwiek Hidayat, 7 Mei 1985.
[88] Ruslan Abdulgani. *Seratus Hari di Surabaya yang menggemparkan Indonesa.* Jakarta: Idayu, 1980. hlm: 16.
[89] DHD 1945a Timur, *loc. cit.*
[90] Bung Tomo, *op.cit.,* hlm: 70-72.
[91] DHD Jawa Timur, *op.cit.* Pelaku-pelaku yang merobek bendera adalah Hariono (barisan *jibakutai*), Kusnowibowo (pegawai kabupaten, dan Sutrisno (BPRI).
[92] Bung Tomo, *ibid.,* hlm: 72.
[93] DHD 1945 Jawa timur, *loc. cit.*
[94] Barlan Setiadidjaya, *op.cit.,* hlm: 51.
[95] *Ibid.*
[96] *Ibid.*
[97] Surat Perintah (*Order*) Laksamana CEL. Helfrich tercantum dalam berkas laporan Huijer.
[98] PJG. Huiyer, capt, RNN, *Rapport on eevents in Surabaja from Surabaja occurencies from 23th September 1945 to 31 31st. October 1945,* hlm: 1.
[99] *Ibid.,* hlm: 2.
[100] *Ibid.*, hlm: 1 A
[101] GWJ. Remmelink. *loc. cit.,* menurut Wiwiek Hidayat pasukan Jepang waktu itu sampai Wonokromo, kemudian senjatanya di lucuti.

BAB VI
BERITA PROKLAMASI DI SUNDA KECIL DAN RESPONNYA

6.1. Sekilas tentang Sunda Kecil

Sunda Kecil adalah nama sebuah provinsi dari delapan provinsi di negara Republik Indonesia (RI) yang baru lahir. Beribukota di Singaraja, Provinsi Sunda Kecil dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta pada sidang hari kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pemerintahan sipil Provinsi Sunda Kecil didukung oleh badan perjuangan dari kesatuan komando militer dan organisasi pemuda yang diberi nama Markas Besar Oemoem Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (MBO DPRI) Sunda Kecil. Pemerintahan sipil yang dipimpin Gubernur Mr. I Gusti Ketut Pudja berlangsung singkat, hanya tujuh bulan (19 Agustus 1945 – 21 Maret 1946). Selanjutnya, Sunda kecil berada di bawah pimpinan MBO DPRI, Letkol I Gusti Ngurah Rai, komandan TRI Resimen Sunda Kecil, dan wakilnya Made Widjakusuma dari PRI. Periode kepemimoinan ini berlangsung lebih lama, dari 14 April 1946 sampai 24 Mei 1948 menyusul keputusan Persetujuan Renville dan pengakuan RI terhadap NIT sebagai Negara bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS). Nama Provinsi Sunda Kecil berlaku lagi setelah Indonesia kemnali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 25 Agustus 1950. Mr. Susanto Tirtoprodjo diangkat menjadi Gubernur pada 20 Oktober 1950 sampai 31 Maret 1952.

Provinsi Sunda Kecil kemudian berganti nama menjadi Provinsi Nusa Tenggara dengan ibukotanya Singaraja, dengan Mr. Sarimin Reksodihardjo sebagai Gubernur dari 1 April 1952 sampai dengan 30 Maret 1957. Pada tanggal 14 Agustus 1958, Provinsi Nusa Tenggara yang beribukota Singaraja dimekarkan menjadi tiga Provinsi Daerah

Tingkat I, yaitu Provinsi Bali yang berpusat (sejak 1960) di Denpasar, Provinsi Nusa Tenggara Barat beribukota di Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

6.2. Sunda Kecil dan Momen Proklamasi

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terdengar di Sunda Kecil sejak tdak lama setelah 17 Agustus 1945. Berita tersebut pertama kali diterima di Singaraja, Bali, oleh kelompok elite pemuda dan sebagian kecil warga masyarakat, setelah mendengar siaran radio oleh Ide A.A. Gede Agung pada tanggal 17 Agustus 1945.[1] Selain itu, kontak pemuda Bali dengan kawan-kawan pemuda di Jawa juga memfasilitasi tersebarnya berita proklamasi. Meski demikian, kepastian secara resmi diperoleh setelah kedatangan seorang anggota PPKI yang mewakili daerah Sunda Kecil, Mr. I Gst. Ketut Pudja, yang sudah diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Gubernur Sunda Kecil.

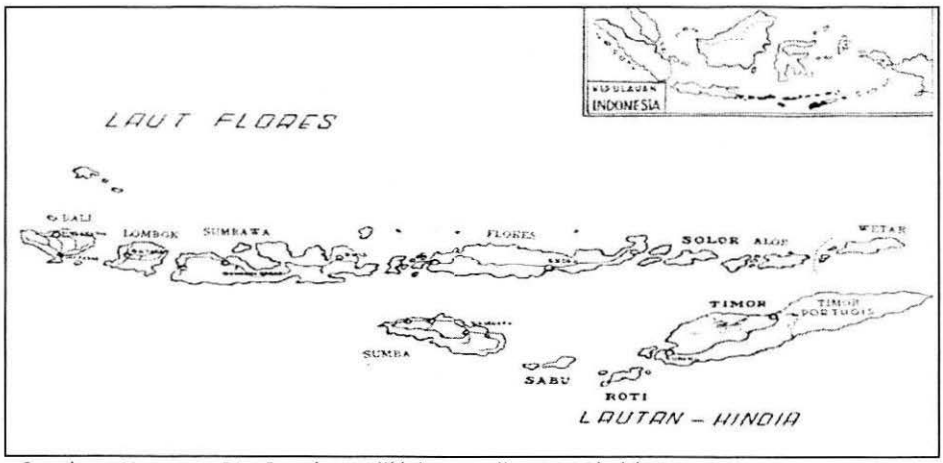
Perlu dijelaskan bahwa sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan bahwa bekas daerah kekuasaan angkatan laut Jepang (*Kaigun*) dibagi menjadi empat gubernemen yaitu: Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Tiap-tiap daerah dikepalai oleh seorang gubernur yang dibantu oleh sebuah komite (KND). Secara geografis daerah gubernemen Sunda Kecil adalah daerah kepulauan yang terdiri dari daerah-daerah pulau yang membentang dari barat (Bali) sampai ke Timur (Timor).

Mr. I Gst. Ketut Pudja kembali ke Singaraja sebagai Gubernur pada tanggal 23 Agustus 1945 untuk menata dan menyusun aparatus pemerintahan Republik di daerah. Kedatangannya membawa serta dua keputusan dari pemerintah pusat RI di Jakarta yaitu: (1) membawa kepastian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945; dan (2) sebuah mandat pengangkatan I.B. Putera Manuaba menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID atau disingkat KND) Sunda Kecil. Dua keputusan ini disampaikan kepada *Cokan*, kepala pemerintahan Jepang tertinggi di Sunda Kecil yang masih bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana.

Namun, pihak Jepang belum memberikan jawaban. Suasana keragu-raguan sangat terasa di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Kekuasaan Republik yang baru harus berhadapan dengan kekuasaan Jepang yang menjaga *status quo*. Keadaan seperti ini berjalan sampai

bulan Oktober 1945. Sementara itu, Gubernur Pudja dan Ketua KND Putra Manuaba melakukan sosialisasi dan menyebarkan berita proklamasi dan pemerintahan baru Republik ke seluruh daerah.[2]

Gambar 1. Peta Propinsi Sunda Kecil



Sumber: Kempen RI, *Sunda Ketjil* (Singaradja, 1953), hlm. 3-4.

Untuk menyebarkan berita proklamasi, Gubernur Pudja dibantu oleh para elite pelajar yang tergabung dalam ISSM yang terbentuk pada akhir pendudukan Jepang di kota Denpasar. Mereka menyebarkannya ke kota-kota lainnya di Bali dan ke pulau lain, namun hanya sampai di Lombok pada pertengahan Oktober 1945.[3]

Baru kemudian berita tersebut tersebar pula ke pulau Sumbawa. Gubernur Pudja mengirim utusan untuk menyampaikan berita proklamasi kepada Sultan Muhammad Salahuddin. Ada dua kelompok utusan yang datang ke Bima, yaitu kelompok pertama dari putra Bima yang ada di Singaraja, yaitu Muhtar Zakaria, Majid Datuk, Mochtar Sulaiman, Saleh Sulaiman, A. Rahim Ali dan Nur Husen. Menyusul kelompok kedua yang datang dari Jawa yaitu Hermanes, Husni Abbas, Kananto, Hengklare, Ishak Saleh. Mereka tiba di Bima membawa berita proklamasi pada tanggal 2 September 1945.[4] Selanjutnya, berita proklamasi baru sampai terdengar di Sumba pada awal tahun 1946 oleh utusan dari Jawa. Namun, karena menimbulkan kegemparan, maka para utusan itu dipulangkan kembali ke Jawa.[5]



I Gusti Ketut Pudja, Gubernur Provinsi Sunda Kecil *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 tentang pengibaran bendera nasional "Sang Merah Putih" dan ucapan salam "Merdeka" yang mulai berlaku pada 1 September 1945, maka seorang propagandis Soekarno yaitu Sukardani, telah membuat catatan perjalanannya dari Jawa ke Bali dan Lombok, sebagai berikut:

> "Pada tanggal 28 September 1945 saya tiba di kota Negara, tinggal di rumah I Gst. Gede Winaya. Semua kantor mengibarkan bendera Merah Putih dan rakyat umumnya antusias menyambut bendera Merah Putih dan mengikuti rapat-rapat propaganda. Para pemuda menyatakan bersedia

mengikuti contoh di Jawa. Secepat mungkin Badan Keamanan Rakyat (BKR) akan dibentuk Angkatan Muda berada di bawah perlindungan putra raja Jembrana (A.A. Bagus Sutedja). Keesokan harinya saya berangkat ke Singaraja, menginap di rumah I Made Putu, Ketua KND setempat. Di Singaraja tidak banyak bendera merah putih berkibar dan belum ada peristiwa yang terjadi seperti di Jawa karena *Minseibu Cookan* masih berkuasa. Dari delapan orang raja Bali hanya satu orang yang sanggup mengikuti contoh Solo dan Yogya pro Republik. Suatu kunjungan dilakukan ke rumah tuan Pudja, Gubernur Sunda Kecil. Tuan Pudja merasa sangat bangga mengenai berita-berita dari Jawa. Pudja menyampaikan bahwa, Bali diumpamakan sebuah dokar, kusirnya adalah tuan Pudja, kuda-kudanya adalah raja-raja, penumpangnya adalah rakyat. Rakyat sangat patuh kepada raja-rajanya. Dari 1.300.000 orang Bali hanya ada 300 yang mampu mengikuti perubahan jaman baru ini. Kunjungan dilakukan untuk mengirim seorang pemimpin besar dari Jawa agar mampu mengetuk hati raja-raja Bali mengingat KND di Singaraja mempunyai pengikut. Pada tanggal 30 September 1945 saya berangkat ke Denpasar menginap di rumah Ktut Kot. Tidak banyak bendera merah putih yang dikibarkan, mengingat orang Eropa masih ada yang tinggal di sana. Pada petang harinya di rumah raja Badung suatu pertemuan diadakan dari KND Denpasar, kira-kira 100 orang yang hadir. Pada tanggal 1 Oktober 1945 selama rapat propaganda diputuskan pembentukan cabang BKR pada tanggal 2 Oktober 1945. Siswa-siswa sekolah ditugaskan untuk membawa bendera dan plakat merah putih ke rumah-rumah, toko-toko, mobil-mobil dan kendaraan lain sehingga seluruh Denpasar berubah menjadi merah putih. Petang hari atas permintaan murid-murid dari berbagai sekolah, diadakan pertemuan di gedung sekolah Taman Dewasa di Denpasar, 300 siswa dan guru hadir. Pada jam 21.00 Dasuk datang dengan membawa berita bahwa oleh radio Jakarta telah diumumkan bahwa, pada tanggal 30 September 1945 kemerdekaan Indonesia diakui oleh internasional (Rusia, Amerika dan Cina). Pada acara resepsi itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Dari Denpasar melalui Gianyar dan Klungkung saya berangkat ke pelabuhan Padangbai untuk menyeberang ke Lombok. Di

> Gianyar belum ada merah putih yang dikibarkan. Ketika ditanya, raja menyatakan belum bisa memberikan perintah mengibarkan bendera merah putih selama dia tidak menerima instruksi dari atasannya baik *Minseibu Cookan* maupun Gubernur Pudja. Namun raja mengaku bahwa dia bangga terhadap perubahan-perubahan di Denpasar. Di Klungkung keadaannya sama dengan di Gianyar. Di Padangbai, banyak pemuda memakai lencana kain merah putih dan seorang Jepang menyatakan ingin memakainya.
>
> Pada tanggal 6 Oktober 1945 saya tiba di Mataram (Lombok) menginap di rumah R. M. Nuraksa, kepala pemerintahan di pulau Lombok, belum ada bendera merah putih yang dikibarkan. Namun rapat umum yang diadakan dihadiri oleh 400 orang termasuk dua orang Jepang. Banyak diantaranya yang memakai lencana kain merah putih dan melantunkan salam "Merdeka". Bahkan seorang warga Jepang, S. Kamy menyerahkan dana seribu gulden untuk mendukung kemerdekaan."[6]

Kedatangan propagandis Sukardani diikuti oleh kehadiran serombongan pemimpin bangsa Indonesia dan Tionghoa dari Banyuwangi dan Besuki dan berada di Bali selama lima hari, 6 – 11 Oktober 1945. Mereka mengunjungi Bali untuk memberikan penerangan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika rombongan datang di rumah kediaman *Minseibu Cookan* di Singaraja, bendera *Hinomaru* masih terlihat berkibar di sana. Melihat kenyataan itu, maka diadakan perundingan antara raja Buleleng dan anggota KND Sunda Kecil. Hasilnya adalah, atas desakan pemimpin-pemimpin dari Jawa yang didukung oleh rakyat dan pemuda di Singaraja, maka raja Buleleng mengambil tindakan keras dalam tuntutannya kepada *Minseibu Cookan*. Pada tanggal 10 Oktober 1945, seluruh kekuasaan pemerintahan Jepang di Bali dapat dipindahkan ke tangan bangsa Indonesia. Sejak itu pula, di seluruh Bali berkibar "Sang Merah Putih".[7]

Berbeda dengan di Bali, penyerahan kekuasaan di Kupang, Timor berlangsung damai pada akhir Agustus 1945. Kepala pemerintahan Jepang (*Ken Kanrikan*) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan atas kota Kupang kepada tiga orang yaitu Dr.

A. Gabeler sebagai Wali Kota, Tom Pello dan I. H. Doko, sampai datangnya tentara Sekutu, Australia.[8]

6.3. Respons Pemuda dan Elit Tradisional

Kita mulai dengan kaum pemud. Dalam suasana sebagaimana djelaskan di atas, para pemuda sebagai kaum elite di masyarakat mengorganisasikan diri dalam berbagai institusi sosial-politik, ikatan pelajar dan kelaskaran. Terdapat tiga tipe otoritas yang secara struktural memengaruhi hubungan politik di Sunda Kecil sejak Agustus hingga akhir 1945, dan khusus di Bali hingga Maret 1946. Ketiga tipe otoritas terssebut, mengutip G. Robinson, adalah: (1) otoritas eksternal yang berpusat di Jawa, yakni kekuasaan Sekutu, Jepang dan kemudian pemerintah RI yan baru lahir; (2) otoritas daerah propinsi yang berpusat di Bali; dan (3) otoritas raja-raja swapraja yang tersebar di seluruh daerah kepulauan.[9] Di tengah kondisi di mana otoritas negara masih lemah, ditambah "ganguan" baru dari sekutu, maka celah kekuasaan bagi para elit baru tercipta, yaitu kaum Republikan dan nasionalis generasi tua di KND serta organisasi pemuda nasionalis militan.

Di kota Denpasar, lahir sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Angkatan Muda Indonesia (AMI) pada tanggal 31 Agustus 1945. Setelah lawatan Made Widjakusuma ke Jawa pada akhir September 1945, dia mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Pemuda Republik Indonesia (PRI). AMI kemudian melebur diri ke dalam PRI pada 31 Nopember 1945 yang dipimpin oleh Made Widjakusuma.[10]

Pada waktu bersamaan, di kota Singaraja lahir pula AMI dibawah pimpinan Tjokorda Sudarsana. Ketika Pimpinan dipegang oleh Gede Puger, AMI Singaraja diubah namanya menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). PRI dan Pesindo mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua organisasi pemuda ini dengan cepat menyebar ke Gianyar, Tabanan dan Jembrana.[11]Tidak hanya itu, organasi ini, khususnya Pesindo, telah mendapat banyak simpatisan dan pengikut di berbagai daerah di luar Jawa. Ketika kongres Pesindo diadakan di Yogyakarta pada 11 Nopember 1945, hadir utusan-utusan dari semua keresidenan di Jawa dan Madura serta wakil-wakil dari Sumatra, Borneo dan kepulauan Sunda Kecil.

Kongres mengesahkan terbentuknya dewan-dewan wilayah untuk Jawa Barat (Jakarta), Jawa Tengah bagian utara (Semarang), Jawa Tengah bagian Selatan (Yogyakarta), Jawa Timur bagian Barat (Malang), Jawa Timur bagian Timur (Surabaya), kepulauan Sunda Kecil (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Borneo (Banjarmasin). Menurut anggaran dasarnya, Pesindo dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat berusaha yang memanfaatkan semua kesempatan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia melalui cara radikal. Akan tetapi, untuk kasus di Sunda Kecil, sikap dan gerakan Pesindo lebih diwarnai cara-cara damai dan demokratis serta konstitusional. Gerakan perlawanan mereka terfokus pada kekuasaan eksternal asing dan mendukung kekuasaan baru negara RI.

Hal ini terjadi karena perjuangan Pemuda, khususnya yang tergabung dalam Pesindo, tidak berhadapan dengan kekuatan sosial-politik tradisional, tepatnya raja-raja swapraja, yang sejak awal mendukung Republik. Di samping itu, masih kuatnya ikatan tradisional raja dan rakyat sebagai ikatan patron-klien juga turut berkontribusi bagi proses yang damai.[12] Dengan demikian, dorongan ke arah terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kekuasaan raja-raja swapraja tidak pernah terjadi di Sunda Kecil, baik pada awal maupun selama periode revolusi Indonesia.[13]

Dalam rangka menata pemerintahan propinsi di Sunda Kecil, beberapa institusi mulai dibentuk. Untuk bidan legislatif, KND Propinsi dibentuk dengan ketuanya I. B. Putra Manuaba, seorang nasionalis moderat generasi tua. KND di daerah-daerah segera menyusul pembentukannya di seluruh Bali,[14] selanjutnya di daerah-daerah pulau ke arah timur. Pada Oktober 1945, seorang utusan dari pemerintah propinsi di Singaraja, H. Tedjokusumo, datang membawa pesan dari Gubernur Mr. I Gst. Ketut Pudja dan Ketua KND I.B. Putra Manuaba agar KND di Lombok segera dibentuk. Instruksi ini segera dilaksanakan, dan KND Lombok berdiri dengan diketuai I Made Putu Wiria.

KND Sumbawa dibentuk di kesultanan Bima dengan Ishak Abdullah sebagai kertua dan M. Tajeb sebagai wakil. Menandai pembentukannya, Sang Merah Putih dikibarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober 1945. Proses di atas kemudian diikuti dengan pembentukan KND di kesultanan Sumbawa dan Dompu. Tiga minggu setelah pengibaran bendera merah putih, raja Bima, Sultan Salahuddin

mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 Nopember 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Kami sultan kerajaan Bima menyatakan dengan sepenuhnya: (1) berdiri di belakang pemerintah RI dan sebagai daerah negara RI; (2) kekuasaan-kekuasaan yang sampai ini tidak di tangan kami maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami; (3) pemerintahan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara RI; (4) kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima, sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas."

Bersamaan dengan perkembangan di atas, sejumlah organisasi pemuda juga berdiri, yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pembentukan organisasi-organisasi pemuda ini mendapat sambutan besar. Rapat umum yang diselenggarakan selalau dihadiri lebih dari 400 orang disertai pemakaian lencana kertas merah putih dan salam "Merdeka" .[15]

Terkait dengan respon elit tadisional, perlu dtegaskan bahwa hanya sebagian kecil raja-raja di Sunda Kecil yang bisa segera menyatakan dukungan terhadap proklamasi dan bersikap pro Republik. Sebagian besar tidak demikian. Ha ini terjadi pada raja-raja dari 16 swapraja di Sumba. Belum sempat menyatakan dukungan, tentara Sekutu sudah terlebih dahulu mendarat di daerah pulau itu pada 27 Agustus 1945. Akibatnya, ketika berita proklamasi sampai di Sumba pada awal tahun 1946, dan kalangan tertentu merespon dengan mengibarkan sang merah putih, beberapa orang tokoh pro Republik ditangkap dan diangkut ke Jawa.[16]

Lain lagi halnya dengan raja-raja dari 20 swapraja di Timor. Bersama-sama dengan rakyatnya, mereka memberikan dukungan kepada proklamasi kemerdekaan dan pro Republik melalui susunan organisasi nasional, Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan, beberapa diantaranya ada yang menjadi pengurus partai, seperti H.A. Koroh, raja Republikan dari swapraja Amarasi. Dan bersama-sama anggota pengurus partai lainnya, dia sangat aktif mempertahankan kemerdekaan dalam perjuangan di Timor. Hanya saja, untuk alasan keamanan, mereka memilih bekerjasama dengan NICA. Dan sikap demikian bisa dimaklumi, karena Timor sudah lebih dahulu dididuki tentara Sekutu,

yaitu pada tanggal 1 September 1945.[17] Demikian pula kondisi yang dialami raja-raja dari sembilan swapraja di Flores. Mereka belum sempat menentukan sikapnya merespons berita proklamasi, seluruh pulau sudah dikuasai oleh Sekutu.[18]

Respons raja-raja di delapan swapraja di Bali terhadap berita proklamasi menunjukkan tiga sikap, yaitu mendukung, reaksioner dan moderat. Sejak tersebarnya berita proklamasi, raja-raja di delapan swapraja di Bali merespons antusias dan menyatakan dukungannya kepada Republik. Raja Badung di keraton Denpasar adalah seorang Republikan yang penuh semangat. Dia bahkan tidak menyesal ketika harus melepaskan kedudukannya sebagai raja karena dicopot oleh pemerintah NICA pada April 1946. Kedua putranya yang bernama Cok. Ngurah Agung dan Cok. Bagus Agung terlibat aktif dalam KND dan BKR/TKR di swapraja Badung. Sikap serupa dimiliki pula oleh raja Jembrana yang dikenal sebagai nasionalis moderat karena posisinya dipengaruhi oleh sikap putranya, A.A. Bagus Sutedja, seorang pemimpin pemuda pejuang yang terpandang di daerahnya.[19]

Raja Buleleng, A.A. Nyoman Pandji Tisna, yang ditunjuk sebagai raja pada tahun 1941, lebih condong kepada metode parlementer yang damai daripada cara-cara revolusioner kebanyakan pemuda untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan. Sikapnya yang parlementaris damai secara konsisten ditempuhnya selama karier politiknya di parlemen sebagai anggota perlemen NIT sampai tahun 1949, menjadi anggota DPR RIS (1949-1950) dan anggota DPR RI sejak 17 Agustus 1950.[20]

Dua raja, Cokorda Ngurah Gede dari Tabanan dan A.A. Ngurah Putu dari Karangasem, menggelar rapat umum yang dihadiri sekitar 5.000 orang dan keduanya adalah raja-raja yang menyatakan diri mendukung pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1945. Deklarasi itu muncul keran rasa tidak aman saat harus berhadapan dengan mobilisasi pendukung Republikan, daripada komitmen yang kuat untuk mendukung Republik. Karena itu, sikap mereka berbalik ketika Sekutu dan Belanda NICA hadir kembali di Bali.[21]

Raja Gianyar merespons dengan sikapnya yang bangga terhadap kelahiran pemerintah Republik di daerah, yang diisi oleh dua tokoh teras yaitu Mr. I Gst. Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil dan I.B. Putera Manuaba sebagai Ketua KND Sunda Kecil.[22] Akan tetapi, setelah

dua kali penculikan atas dirinya oleh anggota PRI pada bulan September dan November 1945, maka sikapnya berbalik melawan gerakan penculikan PRI pendukung proklamasi.[23] Tindakan pemuda anggota PRI yang emosional tanpa dilandasi sikap santun memunculkan perasaan tersinggung raja Klungkung. Serombongan anggota PRI telah menurunkan bendera Jepang yang masih berkibar di depan kantor swapraja di Klungkung. Segera setelah itu dikibarkan sang merah putih sebagai pengganti bendera Jepang. Raja Dewa Agung Klungkung tersinggung dan salah paham terhadap simbol Republik dan menganggapnya bahwa Republik di Jawa sebagai penjajah baru.[24] Sejak peristiwa itu, raja bersikap reaksioner dan menentang gerakan revolusioner pemuda pejuang.

Sikap reaksioner dan kontra revolusi raja Dewa Agung di Klungkung telah membuatnya membentuk milisi kerajaan yang dinamakan Badan Keamanan Negara (BKN) pada pertengahan Nopember 1945.[25] Sikap raja Klungkung diikuti pula oleh raja Gianyar dan raja Karangasem. Raja Gianyar membentuk pasukan pengawal milisi kerajaan yang reaksioner dan anti revolusi diberi nama Pemuda Pembela Negara (PPN) pada akhir Nopember 1945. Demikian pula, raja Karangasem kemudian membentuk pasukan pengawal kerajaan yang diberi nama Anti Indonesia Merdeka (AIM) pada bulan April 1946 yang dipimpin langsung oleh Raja.[26]

Bersama dengan perkembangan di atas, perlu pula dicatat di sini respon pemuda pelajar, yang membentuk organisasi yang terkonsentrasi di dua kota, yaitu Denpasar dan Singaraja. Di Denpasar berdiri organisasi pelajar bernama Ikatan Siswa Sekolah Menengah (ISSM) dan di Singaraja Perhimpunan Siswa Sekolah Menengah Pertama (PSSMP). Kedua organisasi ini merespons berita proklamasi dengan cara ikut menyebarkan dan memberi penerangan tentang arti kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam aksi-aksinya mereka mendukung aktivitas anggota PRI dan Pesindo.[27]

6.4. Peralihan Kekuasaan

Organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam organisasi sosial dan kemiliteran, bersama-sama KND-KND di Sunda Kecil, memegang peranan penting dalam mengakhiri kekuasaan Jepang di daerah tersebut. Mereka dengan cara-cara damai disertai demonstrasi meminta kepada kepala pemerintahan Jepang Sunda Kecil di Singaraja, Minseibu Cookan, untuk menyerahkan kekuasaannya ke tangan Republik. Dan hal itu dilakuan pada tanggal 8 Oktober 1945, di mana

kekuasaan dialihkan kepada Mr. I Gst Ketut Pudja selaku Gubernur Sunda Kecil. Meskipun, perlu ditegaskan bahwa kenyataan otoritas Republik masih dibayangi kekuasaan militer Jepang yang ditugaskan menjaga *status quo* sampai datangnya Sekutu.

Bersamaan dengan itu, pihak Jepang jutsru mendorong para raja untuk membentuk lembaga tandingan terhadap otoritas Republik. Upaya ini kemudian membuahkan apa yang disebut Dewan Raja-raja pada awal 1946 atas dukungan Jepang. Gubernur Pudja bersama aparatur Republiknya tidak sanggup menguasai keadaan, sehingga diadakan pertemuan dengan raja-raja pada tanggal 29 Januari 1946. Pertemuan tersebut memutuskan bahwa untuk pemerintahan di Bali gubernur menyerahkan wewenang dan kekuasaannya kepada Dewan Raja-raja untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Bali. Wewenang gubernur hanya terbatas pada pengawasan wilayah sesuai dengan konstitusi RI. Keputusan dikuatkan dengan dikeluarkannya deklarasi KND (Makloemat No. 01-1-20) yang ditandatangani Gubernur Pudja dan Ketua KND I.B. Putra Manuaba pada tanggal 9 Februari 1946. Isi maklumat menyatakan, seperti dikutip dari G. Robinson:

> "Untuk menyerahkan hak dan kekuasaan yang dipegang Republik Indonesia, kepada Paruman Agung,.... dengan syarat apapun yang dibuat badan itu tidak boleh menyimpang dari konstitusi RI."[28]

Perlu diketahui bahwa Paruman Agung berdiri sejak Januari 1946, atas dukungan Jepang, dengan memiliki dua badan, yaitu Dewan Raja-Raja dan Majelis Rakyat. Anggota badan pertama adalah ke delapan raja, salah satunya menjadi ketua. Anggota Majelis Rakyat berjumlah 29 orang yang dipilih dari delapan Paruman Negara dan badan-badan penasehat legislatif yang diketuai oleh raja di masing-masing kerajaan.[29]

Penganugerahan otoritas pemerintahan formal kepada Paruman Agung sesuai dengan rencana Belanda untuk menenteramkan kawasan dan cocok dengan sikap kebanyakan raja. Prosedur selebihnya dirancang untuk memastikan dominasi raja-raja dan elemen-elemen lain yang moderat. Hanya sebagian kecil saja upaya yang dilakukan untuk menyertakan kaum pemuda dan organisasi sosial politik yang baru. Dapat dikatakan bahwa Paruman Agung adalah pelaksana keputusan

otoritas yang lebih tinggi dari pihak penjajah, mula-mula Belanda (1938-1942) dan kemudian Jepang (1942-Februari 1946).[30]

6.5. Negara Indonesia dan Sekutu-NICA

Gubernur Pudja dan aparatur negara Republik Proklamasi di daerah dihadapkan pada situasi yang dilematik, yaitu harus berbagi kekuasaan dengan Jepang sebagai penjaga *status quo* dan Paruman Agung di Bali. Di daerah-daerah pulau lain, pemerintahan Republik juga tidak bisa berjalan karena didahului pendaratan tentara Sekutu. Kondisi ini tentu saja memberi peluang bagi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Upaya pihak Belanda ini tampak misalnya dalam memorandum L.G.G van Mook dengan Panglima Sekutu di Asia Tenggara, Mountbatten, pada 2 September 1945 tentang perluasan wilayah operasi. Dalam memorandum tersebut dinyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda Timur diduduki komando sementara Australia meliputi daerah-daerah Timor, Ambon, Seram dan Makasar. Personil NICA yang didatangkan digunakan sebagai tenaga inti untuk menyusun kembali dan memperkuat mekanisme pemerintahan yang ada.

Untuk tahap pertama, perwira komandan utama NICA dengan stafnya diangkat di sub-sub wilayah: Jawa, Madura, Bali dan Lombok, Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya, Borneo dan pulau-pulau sekitarnya, Selebes, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan New Guinea. Sub pembagian ini sesuai dengan pembagian wilayah Hindia Belanda, dan juga sejalan dengan wilayah komando militer Angkatan Laut Jepang.[31] Untuk tahap ini, Ch. O. van der Plas diangkat menjadi utusan Pemerintah Hindia Belanda dan penasehat politik bagi Panglima Sekutu dan para panglima satuan tugas di daerah-daerah yang diduduki.[32]

Untuk memerjuangkan pemulihan kekuasaan Belanda di daerah kepulauan Sunda Kecil, mereka dibonceng Sekutu/Inggris dan Australia yang mendaratkan tentaranya di bawah komandan Jenderal Sir Thomas Blauney di Kupang pada tanggal 11 September 1945. Mereka membonceng Belanda NICA di bawah komandan Co-NICA, Kolonel de Rooy, untuk menduduki dan mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di Timor dan pulau-pulaunya.

Sebagai tindakan pertama, tentara NICA menangkap orang-orang Indonesia yang dituduh sebagai kolaborator pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu F. Runtuwene, I.H. Doko dari kantor *Minseibu* dan A. Adoe dari Kepolisian. Rumah mereka digeledah berungkali, karena dituduh menyimpan senjata dan barang-barang Jepang. Tuduhan yang ditimpakan kepada tokoh nasionalis Timor ini tidak terbukti, karena itu mereka dibebaskan.[33] Di dalam pembelaannya, I.H. Doko dan kawan-kawannya secara tegas menyatakan bahwa, (1) dia berkolaborasi dengan pihak Jepang hanyalah taktik untuk menyelamatkan rakyat dan raja-raja dari penindasan dan perampasan harta; (2) menolak tuduhan pernah menerima bintang jasa dari Jepang dan yang diperoleh hanya sebuah lencana emas tanda keanggotaan Dewan Penasehat Perwakilan Sunda Kecil; dan (3) sebagai nasionalis, kami telah berhasil secara terang-terangan atau secara gelap membangun perasaan kebangsaan rakyat dan raja-raja di Timor.[34]

Selanjutnya, terhadap propaganda Belanda NICA melalui media surat kabar resmi pemerintah—yang berisi mendiskreditkan kaum nasionalis—I.H. Doko dan kaum nasionalis lainnya di Timor merespons dengan cara-cara damai. I.H. Doko dan kawan-kawannya menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor tahun 1937, namun dengan mengubah namanya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada Nopember 1945. Cabang-cabang partai PDI dibentuk pula di daerah-daerah pulau lain, yaitu Rote, Sabu, Sumba, Flores dan Sumbawa pada bulan Desember 1945.[35] Azas partai yang mengusung paham kebangsaan pendukung Republik berperan penting selama perjuangan memertahankan kemerdekaan melalui cara-cara damai dan demokratis parlementer.

Kerusuhan tidak terjadi di daerah Timor, yang telah diduduki dan berada di bawah pengawasan NICA. Di Pulau Roti, Sawu dan Alor, pemerintahan NICA dibentuk pada 1 Nopember 1945. Atas nasehat komandan pasukan (Co-NICA) Timor, C.W. Schuller, untuk memperkuat pengaruh Belanda, maka para misionaris Katolik yang ditahan di Makasar segera dibebaskan dan dipulangkan ke pulau-pulau Timor, Adonara, Solor dan Lomblen. Selanjutnya dilaksanakan pengambilalihan daerah pulau Flores dari tangan Jepang. Para misionaris Katolik di pulau ini harus meneruskan kerja misinya. Rekolonialisasi atas daerah pulau Sumba terjadi pada 4 Nopember 1945. Pemerintah NICA segera dibentuk di Waingapu, dan dilengkapi dengan senjata dan

perlengkapan militer yang ditinggalkan oleh Jepang. Situasi politik di pulau ini sangat memuaskan, dan tidak ada indikasi munculnya gerakan pendukung kemerdekaan.[36]

Situasi sebaliknya terjadi di Sumbawa. Kekuatan pemberontak kaum Republikan meningkat pesat. Mereka mendapat dukungan dan bantuan dari Sultan Sumbawa dan Sultan Bima. Para propagandis ekstrim yang berasal dari Jawa di kedua kesultanan ini telah berhasil meningkatkan keresahan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Akibatnya, pengawasan yang lebih keras dilakukan di dua kesultanan ini oleh kontrolir R. Westerbeek bersama dengan pasukan Sekutu, para perwira Australia.[37]

Tanda-tanda pemberontakan dan bahkan perang berawal ketika pendaratan awak kapal Belanda "Abraham Grijns" di Pelabuhan Buleleng pada tanggal 22 Oktober 1945. Pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa berdarah, yang oleh Nyoman S. Pendit disebutnya "Peristiwa Bendera".[38] Peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng merupakan awal meletusnya respons lokal dengan cara perang untuk memertahankan simbol Republik, yaitu Sang Saka Dwi Warna oleh pemuda pejuang di Sunda Kecil.

Setelah itu, dilakukan persiapan-persiapan dan konsolidasi menyatukan kekuatan-kekuatan organisasi pemuda dan kesatuan militer Republik untuk melancarkan revolusi bersenjata melawan aparatur sipil dan militer Belanda NICA. Hanya setelah kurang lebih lima bulan, pemerintahan sipil Republik Propinsi Sunda Kecil menghadapi gangguan stabilitas, kemudian datang mendarat tentara Sekutu Inggris di Pelabuhan Benoa pada tanggal 18 Februari 1946. Pendaratan tentara Sekutu Inggris ini bertugas memindahkan tawanan perang, melucuti tentara Jepang, serta memulihkan stabilitas keamanan ketertiban di daerah pendudukan.[39] Tentara Sekutu Inggris ini kemudian membuka markas besar di Denpasar pada 24 Februari 1946.[40]

Menurut laporan perwira komandan Amacab Bali, J. van Beuge, pasukan Belanda yang terdiri dari bekas tawanan perang Jepang yang ditahan oleh Jepang di Siam, yaitu bekas anggota KNIL (tentara Hindia Belanda), sebanyak dua batalyon yang diberi nama "Gajah Merah" mendarat di Pantai Sanur pada 2 Maret 1946. Pada hari itu juga, kota Denpasar dan Lapangan Udara Tuban di sebelah selatan Kuta diduduki tanpa perlawanan. Kota-kota penting lainnya segera dikuasai, yaitu

Gianyar pada 3 Maret, Singaraja 5 Maret, Klungkung 6 Maret, dan Tabanan 7 Maret. Pos-pos jaga Jepang masih dipertahankan di Negara, Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan ke Jawa, dan Padangbai. Selanjutnya pada 8 Maret 1946 di Denpasar Panglima Divisi India Kelima dari Surabaya, Jenderal Mansergh, yang mempunyai wewenang atas wilayah Bali, menerima penyerahan dari Panglima Angkatan Perang Jepang di Denpasar. Sejauh mungkin, kontak persahabatan diciptakan dengan penduduk dan tidak ada penembakan kecuali sangat diperlukan.[41]

Kesan yang dapat ditangkap dari laporan di atas adalah bahwa, Belanda sangat optimis untuk bisa menduduki kembali Pulau Bali. Sikap optimistik dapat dibuktikan dari sebuah laporan angkatan laut Belanda sejak Nopember 1945, yang memprediksikan bahwa apabila sejumlah pasukan ditempatkan di tempat-tempat penting, kondisi tertib dan aman seperti pada masa pra-perang dapat dipulihkan dalam tempo yang singkat. Perlawanan yang dilancarkan hanyalah aktivitas segelintir kaum ekstremis dan mereka dapat ditumpas dengan mudah melalui penggunaan unjuk kekuatan yang sigap (*machtsvertoon*), yang membuat penduduk terpukau melihat aksi Belanda. Titik-titik yang rawan pergolakan hanya di desa-desa di mana struktur kekuasaan Bali tidak lagi kokoh, seperti di Denpasar dan Buleleng. Akan tetapi, seperti bisa dibuktikan, pendekatan unjuk kekuatan (*machtsvertoon*) ternyata memperparah ketegangan yang ada dan mempercepat proses politisasi dan menguatnya identitas Indonesia yang telah dimulai di bawah rezim Jepang.[42]

Persepsi bahwa orang Bali menyambut kembalinya Belanda sama dengan keyakinan bahwa orang Jawa adalah sumber agitasi politik di Bali. Persepsi ini dipegang Kapten Konig. Dalam instruksinya pada Juli 1946 kepada pasukan serbu Belanda, dia menyatakan bahwa gerakan kaum Republikan telah gagal menawan simpati rakyat Bali karena diimpor dari Jawa. Apabila militer Belanda dapat membinasakan para teroris Jawa, maka Bali akan cepat kembali ke suasana tertib dan harmonis. Sementar itu, di pihak Belandan sendiri muncul pandangan sebaliknya dari pendekatan unjuk kekuatan, yaitu pendekatan damai demokratis. Pendekatan terakhir dianut ara ahli strategi Belanda yang mengkhawatirkan bahwa kerusakan politik di Bali bisa menarik perhatian dunia dan merusak reputasi internasional Beland.[43] Karema itu, L.G.G Hubertus J. van Mook secara pribadi menyurati komandan

KNIL, Kolonel H. J. de Vries, sebelum pendaratan pada bulan Maret 1946, sebagai berikut:

> "Kalau kita berprilaku tidak patut, menembak sembarangan, mengeksekusi tanpa penyidikan yang benar, dan merusak *Pura*, hutan sakral atau tempat-tempat suci lainnya karena sembrono, maka kita akan menghancurkan negeri Belanda di Bali, dan bukan saja di Bali, tapi juga di mata dunia, di mana restorasi pengaruh Belanda di Hindia amat bergantung padanya."[44]

Pendekatan anti-kekerasan dari komandan perwira Belanda, yang megutamakan cara-cara damai demokratis seperti dianut Gubernur Jenderal dan pengikutnya seperti F.H. ter Meulen, membuat mereka ditinggalkan mayoritas prajurit dan perwira yang pernah di bawah komandonya. Pada tahun 1945-1946, banyak mantan tawanan perang yang tergabung dalam Brigade Bali-Lombok ingin kembali ke Hindia untuk membalas dendam terhadap kaum pemuda Republikan yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan merampas kendali negeri. Tatkala tentara Belanda pertama diijinkan mendarat oleh Sekutu, maka Brigade Gajah Merah atau Brigade Bali-Lombok yang kemudian diubah menjadi Brigade Y menjelma menjadi garda depan untuk melakukan pembalasan dan menduduki kembali Hindia Belanda dari kaum perampas. Dalam situasi seperti ini, pandangan ter Meulen dan van Mook tidak mendapat respons di kalangan prajurit bawahannya.

Sikap para perwira dan prajurit di lapangan, dengan otonominya dalam operasi militer, telah membawa ekses perang.[45] Pada pekan-pekan pertama setelah rekolonialisasi, tentara KNIL sering bertindak indisipliner, menembak orang-orang yang dicap teroris dan perampok. Baru enam hari setelah pendaratan, enam tembakan telah terjadi terhadap suatu gerombolan perampok di desa Penebel daerah Tabanan, dua orang di antara gerombolan itu ditembak mati. Dalam beberapa aksi yang dilancarkan kelompok teroris dan perampok, pasukan Belanda tidak menderita kerugian.[46]

Selain penggunaan kekuatan militer, strategi damai Belanda memerlukan kerjasama dengan pelbagai komponen dari kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. G. Robinson membaginya atas tiga kategori yaitu: (1) kaum elit tradisional, yaitu para raja dan anggota keluarga bangsawan berpengaruh, (2) kelompok elit kaum muda terpelajar Bali, dan (3) rakyat jelata. Strategi ini cenderung terpolarisasi

daripada menentramkan masyarakat, karena memaksa hampir sebagian besar orang untuk berpihak, entah kepada pemuda pejuang atau kekuatan damai dan rekolonialisasi oleh Belanda. Pilihan yang salah berakibat fatal dan menjadi akar konflik antar sesama warga yang terhimpun dalam kelompok-kelompok asosiasi.[47]

Muncul kesepakatan di kalangan ahli strategi militer Belanda bahwa prioritas pertama setelah pendaratan tentara adalah menjalin hubungan langsung dengan raja-raja di Bali. Sehari setelah pendaratannya di Sanur, komandan tentara Belanda untuk daerah Bali, Letnan Kolonel ter Meulen yang disertai opsir Amacab mengadakan rapat dengan raja-raja penguasa swapraja di Klungkung pada tanggal 3 Maret 1946.[48] Pertemuan itu membicarakan perkembangan politik dan pemerintahan. Letkol ter Meulen mengakui otoritas gabungan raja-raja dan Paruman Agung sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah dan bertangungjawab di Bali, sedangkan masing-masing raja bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di daerah swaprajanya masing-masing. Selain itu, kepada Gabungan Raja-raja diberitahukan bahwa kekuasaan militer di Bali merupakan otoritas tertinggi, karena itu peraturan-peraturan dari pemerintah militer harus dipatuhi dan dilaksanakan.[49]

Selanjutnya dilakukan pembicaraan informal dengan Gubernur Pudja dan beberapa tokoh Republik yang diundang atas permohonan penguasa swapraja di Buleleng, di sebuah tempat yang netral pada tangal 5 Maret 1946. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membuat Gubernur Pudja di mata para pemuda bisa membuat kesepakatan dengan seorang utusan NICA. Di situ, Letkol ter Meulen menjelaskan isi pertemuan 3 Maret 1946 sebelumnya di Klungkung, terutama penyelesaian masalah politik karena kemerdekaan Indonesia tidak ditentukan di Bali-Sunda Kecil, melainkan di tempat lain. Penuhilah panggilan untuk bekerjasama demi kepentingan rakyat di daerah Bali-Sunda Kecil. Kemudian, melalui telepon Letkol ter Meulen diberitahu bahwa Gubernur tidak bisa mengambil keputusan. Ternyata, menurut laporan komandan Amacab, sikap mengulur waktu jawaban Gubernur Pudja menghambat berfungsinya dinas-dinas umum dan memberikan dukungan bagi perlawanan fisik dan aksi boikot. Selain itu, menurut Letkol ter Meulen tidak benar apabila membenarkan wakil Republik menempati rumah Residen saat itu. Sebab rumah dinas Residen adalah simbol kekuasaan Belanda di daerah.

Situasi ini dimanfaatkan oleh unsur-unsur ekstrimis untuk melancarkan propaganda tentang kemerdekaan Indonesia dan Republik. Berdasarkan alasan-alasan ini, Letkol ter Meulen memerintahkan kepada komandan pasukan agar segera menangkap Gubernur Pudja dan pendudukan atas rumah dinas Residen serta mengibarkan bendera Belanda di sana. Pada 12 Maret 1946, penangkapan dilakukan terhadap Gubernur Pudja dan aparatur negara RI Sunda Kecil lainnya.[50]

6.6. Konflik di Daerah

Sebagaimana diketahui, revolusi Indonesia adalah perang untuk memertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dilakukan baik dengan cara gerilya maupun terbuka. Dan hal ini pula yang terjadi di Sunda Kecil. Sementara pihak Belanda menyebutnya sebagai gerakan teroris dari kelompok ektremis di daerah rekolonialisasi. Sebuah laporan resmi oleh Komandan Amacab, van Beuge, tentang pendudukan kembali pulau Bali selama dua minggu, 2-15 Maret 1946, menyatakan bahwa:

> "Di Denpasar selama enam bulan terakhir ini menjadi sarana agitasi politik para pemuda, dan daerah ini berada dalam keadaan kacau. Raja Tjokorda Alit Ngurah, penguasa swapraja di Badung adalah seorang sosok yang lemah. Termasuk juga punggawa kita di Puri Pemecutan meskipun sangat berpengaruh. Sementara Punggawa Kesiman kehilangan pengaruh di distriknya. Di Tabanan, para pemuda membunuh orang-orang yang setia kepada Belanda dan menolak Republik seperti Punggawa Penebel dan Tabanan pada bulan Februari 1946. Selain itu banyak terjadi teror, perampokan dan intimidasi. Rajanya adalah sosok yang lemah seperti juga di Badung. Namun aparat pemerintahan masih berfungsi baik. Sementara aparat kepolisian masih melakukan tugas-tugasnya. Ketika patroli militer dijalankan pada tanggal 8 Maret 1946, di desa-desa Penebel, Blayu, setelah melalui beberapa kali peringatan maka penembakanpun dilakukan. Tiga orang anggota perampok tertembak mati. Titik-titik kerawanan aktivitas teroris meliputi desa-desa: Jegu, Darma, Riang, Buahan, Sudimara, Blayu dan seluruh distrik Bajra. Pemimpin utamanya adalah I Gusti Wayan Debes, Komandan TKR Tabanan, seorang bekas Sersan Mayor Prayoda. Di Jembrana,

Raja A.A. Bagus Negara, penguasa swapraja Jembrana dibelokkan kearah nasionalis oleh putra-putranya yang dididik di Jawa dan salah satu diantaranya menjadi pimpinan TKR di daerah itu, sehingga daerah ini tetap tenang. Di Buleleng, ketika diduduki pada tanggal 15 Maret 1946 terjadi aksi teroris dengan kekerasan yang menyebabkan dua orang Cina terbunuh dan seorang diculik. Di Gianyar, Raja A.A. Gde Agung melaporkan banyak terjadi aktifitas teroris di Ubud, Peliatan dan Pejeng. Raja telah memobilisasi penduduk yang setia kepadanya untuk mengadakan patroli karena tidak ada aparat kepolisian yang setia. Pada tanggal 4 Maret 1946 konsentrasi pemuda dengan beberapa senjata api di desa-desa Keramas, Bedulu dan Ubud. Dalam suatu konflik dua orang pemuda terbunuh. Di Ubud, seorang anggota PRI bersenjata ditangkap. Dengan aksi pengamanan di Ubud dan Peliatan maka kedua punggawanya yang terlibat aksi teroris segera melarikan diri. Ribuan warga dari dua distrik ini bersumpah setia di sebuah Pura untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada Raja dan adat Bali. Pada tanggal 11 Maret 1946, pasukan kita bertindak terhadap pemuda di Singapadu. Dalam konflik ini, seorang pimpinan gerombolan dan seorang anggota gerombolan PRI terbunuh. Keduanya dinyatakan sebagai anggota teroris. Raja Dewa Agung Oka Geg, penguasa pribumi di swapraja Klungkung adalah paling berani di antara para raja. Dia nampaknya telah mengendalikan situasi dan sejak awal menyatakan menentang RI. Pada tanggal 4 Maret 1946 sekelompok pemuda Bangli menyerang prajurit-prajurit BKN, penjaga perbatasan. Ada beberapa yang terluka; serangan berhasil ditolak dan para pemuda mundur ke daerah Karangasem. Namun pada petang harinya, Sedahan Agung dibunuh dan keesokan harinya punggawa kota Klungkung telah lenyap. Akibatnya, semua bendera dan simbol-simbol merah putih lenyap di daerah ini. Sejak peristiwa pembunuhan 4 Maret 1946, penguasa pribumi, Raja Bangli A.A. Gde Agung tidak pernah menjadi figur yang kuat karena mendapat tekanan dari para pemuda. Salah seorang tokoh nasionalis Jawa di belakangnya ialah, Dokter Jawa, dr. Soekardjo yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Di daerah Karangasem, Raja Ida A.A. Anglurah Ketut Karangasem, mampu

> mengendalikan situasi dengan otoritas feodalnya. Untuk mencegah semakin buruknya situasi, komandan pasukan telah merancang operasi militer terutama di Tabanan dan Badung Utara sebagai daerah-daerah sarang teroris karena pemimpin utamanya masih bebas berkeliaran di sana."[51]

Untuk mengatasi aksi teror pemuda, pihak Belanda menambah jumlah personil militernya. Pada 19 Maret 1946, dua kompi Eropa dari Sumbawa diberangkatkan ke Bali. Pada 25 Maret 1946, satu batalyon pasukan Bali dan Lombok juga mendarat untuk memperkuat operasi militer mereka. Sementara itu, di Timor berlangsung serah terima pasukan Australia kepada komandan pasukan Hindia Belanda, KNIL.[52]

Periode dari Agustus 1945 sampai Maret 1946, daerah Sunda Kecil—dan di Indonesia secara umum—memang berada dalam kondisi ketidakpastian. Menyusul absennya otoritas Negara, anarki merajalela di pusat pemerintahan Republik Sunda Kecil, di Bali. Meskipun, seperti akan dijelaskan berikut ini, kondisi di setiap swapraja berbeda satu sama lain. Hal ini bisa dilihat misalnya di Tabanan dan Klungkung. Kondisi raja Tabanan yang lemah telah membuka kebebasan bagi para pemuda untuk bergerak dalam perlawanan, ketimbang di Klungkung.

Perbedaan antara dua swapraja ini paling jelas di bidang militer. Milisi anti-Republik, BKN, yang dibentuk di Klungkung oleh Dewa Agung pada pertengahan Nopember 1945 diperkirakan memiliki 5000 anggota pada Januari 1946. Sementara BKR/TKR hanya berhasil memobilisasi sekitar 100 orang untuk mendukung Republik. Menjelang Maret 1946, republikanisme merupakan gerakan perlawanan yang sangat lemah di Klungkung.[53] Sebaliknya, di Tabanan berkembang perlawanan politik yang militan. Para mantan pejabat swapraja di Tabanan—punggawa: Marga, Bajera, Selemadeg, Kerambitan, Kediri, Penebel, Sedahan Agung, Sedahan Pupuan dan Kepala Polisi Tabanan—menjadi pemimpin utama mobilisasi pemuda di bawah panji Republikanisme.

Sumber daya ekonomi, sosial dan politik yang pernah dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, kini menjadi basis bangkitnya perjuangan kaum Republikan di swapraja Tabanan dan sebagian besar di Badung dan Buleleng. Cita-cita politik dan gaya politik Republik mendapat respons yang luas di daerah-daerah basis melawan rekolonialisasi, yaitu kembalinya kekuasaan Sekutu atau Belanda.[54]

Pada minggu pertama bulan April, ter Meulen melaporkan dalam "Commandements and Order No. 1", 8 April 1946, bahwa 52 orang Bali telah dibunuh dan banyak lagi luka-luka selama patroli KNIL. Korbannya termasuk pemuda yang tidak penting dan orang Bali yang hanya bertindak di bawah ancaman anggota lain dan bahkan seorang perempuan dan anak kecil yang tidak ada kaitannya dengan gerakan perlawanan.[55] Secara bertahap para pegawai sipil pra-perang digantikan generasi muda yang tidak punya pengalaman di Hindia. Aparat baru ini lebih mudah bekerjasama dengan pihak berwenang militer, sehingga tercipta konsolidasi sebuah aparatur negara yang sangat otoriter di seluruh kawasan.[56] Ditahannya para pemimpin aparat Republikan moderat dan rekolonialisasi dengan agresi bersenjata oleh pihak militer Belanda, telah mengakibatkan perjuangan bersenjata dari organisasi pemuda dan tentara Republik (TKR) terkonsentrasi di Bali. Hampir selama tahun 1946, aksi-aksi KNIL cukup menggila dan direspons dengan perlawanan gerilya pemuda pejuang yang militan dan revolusioner. Dapat dikatakan bahwa untuk beberapa bulan sepanjang tahun 1946, respons revolusi di Sunda Kecil, khususnya di Bali berkarakter konflik militer antara "orang Bali Indonesia kaum republikan" melawan "negara kolonial".[57] Karakter inilah yang membedakan Bali dengan revolusi sosial lain seperti peristiwa tiga daerah di Jawa Tengah, revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur pada masa awal revolusi Indonesia.[58]

Oleh pihak Belanda, pemerintahan sipil RI Sunda Kecil dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban di wilayahnya dan telah menyerahkan kekuasaan kepada Gabungan Raja-raja. Selain itu, aparat Sekutu dan Belanda NICA sudah terlebih dahulu mendekati raja-raja di Bali dan pulau-pulau lain, yang mau bekerjasama untuk tidak mengakui pemerintah RI Sunda Kecil. Penolakan ini berdasarkan alasan bahwa kalahnya Jepang dan menangnya Sekutu memberi peluang kembalinya Belanda, sebagai anggota Sekutu, ke Indonesia, bekas daerah jajahannya sebelum perang.

Akan tetapi, kondisi Indonesia telah berubah sesudah perang. Tercipta kondisi yang berbeda antara Hindia Barat (Jawa dan Sumatera), daerah basis bagi mayoritas pendukung nasionalis, dan Hindia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil), yang masih dikuasai kaum aristokrat konservatif sehingga segera dapat diduduki kembali oleh tentara Sekutu. Tambahan pula, usul untuk mendirikan sebuah

negara Indonesia Serikat dari konsep L.G.G. Dr. H.J. van Mook, pucuk pimpinan pemerintah Hindia Belanda sesudah perang, yang mendorong terbentuknya negara-negara di luar RI di daerah-daerah rekolonialisasi, ikut memunculkan respons baik dengan cara perang maupun cara diplomasi di kalangan rakyat pro-Republik melawan Belanda dan kaki tangannya selama periode revolusi.[59]

Penahanan aparat sipil RI Sunda Kecil yang dipenjara oleh pihak Belanda NICA yang bekerjasama dengan aristokrasi konservatif (raja-raja) di Sunda Kecil, tidak dapat menghentikan gerakan pendukung revolusi yang disertai dinamika pergolakan internal. Ini ditandai konflik internal antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat yang ikut mewarnai wajah revolusi di tingkat lokal. Kelompok-kelompok kepentingan memiliki prinsip dan cara-cara berbeda dalam merespons gelombang revolusi yang melanda daerahnya di Sunda Kecil. Berdasarkan konsep "non" dan "co" yang muncul pada periode pergerakan nasional dan revolusi nasional Indonesia, dapat diidentifikasikan golongan-golongan yang memiliki kepentingannya masing-masing.[60] Mereka dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu: (1) golongan "co" yang pro federalis dari kalangan elite terpelajar; (2) golongan "co" yang pro Belanda dari para birokrat pemerintah keresidenan; (3) golongan "co" yang pro-aristokrasi konservatif tradisional, yaitu raja-raja yang sebagian besar pro-Belanda, dan hanya beberapa yang tidak terang-terangan pro-Republik; dan (4) golongan "non" yang pro-Republik terbagi atas dua berdasarkan asal usul pembentukannya, yaitu pemuda pejuang revolusioner yang memang berasal dari tentara terlatih sebelumnya (Prayoda pada masa kolonial Belanda dan Peta pada masa pendudukan Jepang) yang tergabung dalam TKR kemudian berubah menjadi TRI, dan pemuda revolusioner yang berasal dari organisasi pemuda PRI dan Pesindo.[61] Golongan "non" yang disebut terakhir inilah menjadi pendukung cara perang melawan kekuatan dan kekuasaan yang anti Republik dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sebaliknya, golongan "co", penguasa *status quo* dari aristokrasi konservatif tradisional yaitu raja-raja yang menyatakan diri mendukung NICA, kini menjadi kekuatan reaksioner dan kontra revolusi.[62] Golongan "non" pemuda revolusioner kaum Republikan memertahankan kemerdekaan, berhadapan dengan kekuatan asing NICA yang mendapat dukungan dan beraliansi dengan raja-raja kontra revolusi. Intensitas

pergolakan sangat ditentukan oleh faktor geografis, antara daerah pusat dan pinggiran. Semakin dekat dengan pusat, yaitu pusat kekuasaan propinsi, dalam hal ini Bali dengan Jawa pusat kekuasaan Republik, maka perlawanan pendukung Republik dan revolusi semakin kuat dan sering. Kondisi ini dapat dijelaskan karena wilayah administratif propinsi Sunda Kecil cukup luas, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil membentang dari Bali sampai pulau Timor dan pulau-pulau lainnya.[63]

Akibatnya, konflik bersenjata telah mewarnai respons lokal kaum republikan pendukung revolusi dengan cara berperang memertahankan Republik Indonesia, baik yang berskala besar maupun yang beskala kecil, termasuk bergerilya mengikuti arus revolusi dalam perjuangan Republik di Jawa.

6.7. Perang Gerilya

Di tengah usahanya untuk memperoleh bantuan senjata dari pemerintah pusat, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin rombongan tokoh masyarakat Bali ke Jakarta (19 Desember 1945 hingga April 1946), diangkat sebagai Komandan TRI Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Bersama dengan itu, dia juga diminta untuk membentuk sebuah badan perjuangan yang bernama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) Sunda Kecil, yang mengkoordinasikan TRI Sunda Kecil, PRI dan Pesindo.

Ngurah Rai sempat menyampaikan laporan tentang situasi di Bali ke Presiden Sukarno, dan Presiden berpesan "agar tetap memperjuangkan Bali sebagai daerah Republik. Tentang bantuan persenjataan disetujui, dan teknis pelaksanaannya dibicarakan dengan Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifuddin."[64] Akan tetapi, karena senjata-senjata tersebar di perbagai front pertempuran, maka bantuan yang diterima berupa senjata beserta personilnya. Bantuan ini disediakan oleh TRI Laut dalam bentuk pasukan yang dipersiapkan oleh Munadji dan Markadi.[65]

Bantuan senjata belum diperoleh, karena itu Ngurah Rai menunda keberangkatannya ke Bali, yang sedianya dapat dilaksanakan pada pertengahan Februari 1946. Selama bulan Februari, Subroto Aryo Mataram, staf penghubung Jawa-Bali telah berulang kali menemui

Kepala Staf Umum Oerip Soemohardjo di Yogyakarta, dan Panglima Divisi VIII, Imam Soerdja'i, di Malang. Hasil dari pembicaraan itu disimpulkan dalam sebuah telegram tanggal 6 Maret 1946 kepada Ngurah Rai di Banyuwangi. Isinya menyatakan bahwa Subroto Aryo Mataram telah menghadap Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima Besar dan Kepala Staf Umum, yang menyimpulkan: (1) DPRI Sunda Kecil taktis berada di bawah TRI Sunda Kecil, mengadakan aksi perjuangan totaliter; (2) Widjakusuma dan Mantik sebagai pimpinan pemuda pejuang di Bali supaya mengadakan persiapan untuk bisa menerima rombongan dari Jawa.[66]

Kontak senjatapun tidak terhindarkan baik di lautan, di lintas laut Banyuwangi (Jawa) dan Bali, maupun di darat di seluruh Bali yang menjadi medan pertempuran. Operasi lintas laut Banyuwangi–Bali dimulai pada minggu pertama bulan April 1946; diawali pendaratan rombongan pertama, yaitu rombongan Waroka di Celukan Bawang pada 4 April 1946, kemudian bergerak ke timur, ke desa Musi dekat Seririt; sampai di Seririt diterima informasi bahwa tentara Belanda membakar desa Ringdikit,[67] beberapa kilometer di selatan Seririt. Pasukan Waroka bersama pemuda pejuang Bali dan seorang bekas tentara Jepang ikut bergabung bernama Bung Ali, seorang Letnan Satu Angkatan Darat Jepang, yang ahli membawa senapan mesin *tekidanto*. Terjadi baku tembak. Pasukan Waroka mundur karena kekuatan tidak seimbang. Rombongan bersama kembali ke Banyuwangi.[68]

Rombongan kedua adalah rombongan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Ikut bersamanya adalah pimpinan inti perjuangan rakyat Bali, yaitu Mayor Wisnu, Kapten Cok. Ngurah, Kapten Cok. Dharma Putera, Letnan Gede Merta, Sersan Kadet Taruna I Gusti Ngurah Agung Bonjoran Bayupathy, dan Inspektur Polisi I.B. Mahadewa. Rombongan Ngurah Rai diberangkatkan dari Muncar sebanyak 15 buah *jukung* pada tanggal 3 April 1946.[69] Selama pelayaran *jukung* yang ditumpangi tiga orang keluarga puri yaitu Cok. Oka Sudarsana, Cok. Rai Gambir dan Cok. Dharma Putera bertemu dengan *motorboat* Belanda yang sedang patroli. Setelah dekat, patroli Belanda menembak orang-orang seisi *jukung*. Cok. Rai Gambir tertembak dan tewas seketika, sedangkan Cok. Dharma Putera terkena tembakan dipinggangnya, kemudian di tangkap bersama dua orang lainnya, dan ditahan di Gilimanuk. Tujuh *jukung* lainnya yang berada di belakangnya menghindari tempat insiden itu, dan berhasil mendarat di pantai Yeh

Kuning pada tanggal 4 April 1946. Mereka kebanyakan dari anggota kepolisian. Tujuh *jukung* lainnya lagi, pengangkut Gusti Ngurah Rai dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali ke Muncar. Pelayaran selamat sampai tujuan, mendarat di Yeh Kuning pada tanggal 5 April 1946.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju daerah basis Republik di Munduk Malang, tempat Markas Besar Daerah Tabanan, di bawah pimpinan Gusti Wayan Debes. Pertemuan Munduk Malang, diselenggarakan pada tanggal 14 April 1946, memutuskan pembentukan wadah organisasi perjuangan diberi nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) Sunda Kecil seperti yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat RI di Yogyakarta sebulan sebelumnya.[70] DPRI Sunda Kecil adalah wadah organisasi-organisasi perjuangan yang berfusi, yaitu Resimen TRI Sunda Kecil dengan organisasi perjuangan pemuda PRI dan Pesindo. Mereka membentuk pusat komando untuk Sunda Kecil yaitu Markas Besar Umum (MBU) DPRI Sunda Kecil, di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai dan wakilnya adalah Made Widjakusuma dari PRI. MBU membawahi Markas Besar (MB) untuk setiap daerah swapraja, dengan rincian tugas: menginsyafkan rakyat, mengajak pemuda revolusioner, membersihkan daerah dari kaki tangan dan mata-mata musuh, mengusahakan persediaan logistik, melatih petugas palang merah. Inti dan induk pasukan bersenjata dalam sentral komando, MBU DPRI Sunda Kecil pada waktu itu berjumlah 800 orang atau 1 batalyon.[71]

Rombongan ketiga adalah rombongan Markadi, seorang Kapten laut. Rombongan Markadi sebanyak 138 anggota pasukan diberangkatkan dari pelabuhan Banyuwangi pada tanggal 4 April 1946. Hampir sampai ke tempat pendaratan yang dituju di Candi Kusuma, perahu yang ditumpangi Markadi bertemu dengan dua *motorboat* Belanda yang sedang patroli. Terjadi kontak senjata selama 15 menit, mengakibatkan Sumeh Dartono tertembak dan jatuh ke laut, dan seorang anggota lainnya Sawali luka-luka. Di pihak Belanda seorang juru mudi *motorboat* tertembak mati. Pada saat kontak senjata, salah seorang anggota Markadi berhasil melemparkan granat tangan ke dalam salah satu *motorboat* Belanda yang mengakibatkan kebakaran kapal dan segera mundur ke Gilimanuk. Satu *motorboat* patroli Belanda lainnya juga mundur sambil melepaskan tembakan mengenai perahu

yang ditumpangi Markadi hingga bocor. Demi pertimbangan keselamatan, rombongan kembali mendarat di Sukowidi hari itu juga.[72]

Keesokan harinya, penyebrangan kedua diberangkatkan ke tujuan pendaratan semula, yaitu di Penginuman, Klatakan, Melaya dan Candi Kusuma, kemudian menuju titik konsolidasi di desa Ngepeh. Mereka bergabung dengan 30 orang anggota pasukan yang dipimpin Muhadji dan Manggara Simamora yang telah mendarat lebih dulu. Dari desa Ngepeh, direncanakan untuk menyerang pos Belanda terdekat di Negara pada tanggal 9 April, namun gagal. Atas usul Letnan Gusti Ngurah Dwinda, pejuang dari Jembrana, pasukan M (Markadi) dipindahkan dari posnya di desa Ngepeh ke desa Gelar. Di sana, Markadi mengadakan konsolidasi dan reorganisasi pasukannya dengan pemuda pejuang di daerah Jembrana, yang menghasilkan terbentuknya Markas Besar (MB) DPRI Sunda Kecil, diketuai oleh Ida Bagus Gde Dosther dan wakilnya adalah Markadi. Sejak itu, desa Gelar diberi nama julukan "Lembah Merdeka", karena pada sebuah lembah di desa itu bendera Merah Putih selalu berkibar.[73]

Dari Gelar, pasukan Markadi berpindah ke Pulukan, terus ke Desa Munduk Belatung. Dari basisnya di Munduk Belatung, Markadi mengirimkan laporan ke Jawa, bahwa rombongannya telah sampai di daerah basis, karena itu supaya segera mengirimkan bantuan senjata ke Bali. Pada akhir Mei 1946, Ngurah Rai datang ke Munduk Belatung. Ngurah Rai dan Markadi sepakat bahwa pasukan Markadi di bawah komando TKR Sunda Kecil. Untuk mengamankan bantuan yang datang dari Jawa, mereka memutuskan untuk mengadakan gerakan-gerakan ke arah timur agar perhatian tentara Belanda tertuju di timur, sehingga kawasan barat aman bagi pendaratan pasukan Republik. Namun, pihak Belanda mengetahui taktik gerilya ini dan tetap memperkuat pertahanannya di kawasan barat.[74]

Apa yang disinyalir pihak militer Belanda dan apa yang disebut sebagai langkah pemanasan perjuangan oleh pihak Republik menjadi kenyataan. Insiden kontak senjata terjadi dan tersebar dimana-mana, terutama di daerah-daerah yang dijadikan basis gerilya Republik. Oleh pihak Belanda disebutnya daerah-daerah basis teroris atau ektremis, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem. Daerah-daerah lainnya, yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi daerah-daerah pendukung kontra revolusi dan anti-Republik. Di sebagian besar

bahkan di seluruh daerah swapraja terdapat kekuatan-kekuatan yang membantu operasi militer Belanda yang anti-Republik, seperti di Buleleng dibentuk barisan Anti Pemberontak (AP), di Sangsit dan Sudaji. Di Jembrana muncul sebuah milisi anti-Republik di bawah Westra Utama kerabat punggawa kota atas bantuan Belanda, diberi nama Badan Pemberantas Pengacau (BPP). Di Bangli muncul milisi bantuan polisi yang anti-Republik, yaitu *Hulp Politie Corps (HPC)* dibawah patih kerajaan, A.A. Gde Oka. Di Denpasar dikenal sebuah organisasi anti-Republik yang dinamakan Nara Sadu (NS) di bawah pimpinan Gusti Ngurah Kanta. Untuk Gianyar, Klungkung dan Karangasem, peranan pasukan milisi kerajaan PPN, BKN dan AIM yang terbentuk paling awal, tetap kukuh pada pendiriannya yang anti-Republik. Kemudian di Tabanan muncul pula pasukan milisi anti Republik yang terkenal dengan nama Polisi Desa (PD) di bawah pimpinan Gusti Ngurah Alit Degi dengan NICA *Gandek*-nya dan pasukan bantuan polisi NICA *Hulp Politie (HP)* di bawah pimpinan Wayan Keramas.[75]

Munculnya kekuatan anti Republik dengan pasukan milisinya di setiap daerah menambah rumitnya konflik-konflik internal berdarah sesama rakyat yang semakin terpolarisasi antara kelompok "non" dan "co" rekolonialisasi kekuasaan kolonial Belanda.

Sebelum insiden kontak senjata di pusat kekuatan militer Belanda di Bali, yaitu di tangsi-tangsi, sejumlah insiden kontak senjata telah terjadi di kota Denpasar. Pada pertengahan Maret 1946 dilakukan penghadangan terhadap patroli NICA di sebelah utara desa Blahkiuh, Badung Utara oleh pasukan "Beruang Hitam" di bawah pimpinan Sugeriwa. Setelah itu, dilakukan penghadangan di desa-desa lainnya yaitu Kutri, Angantaka, Benculuk, Kedua, Singapadu di bawah pimpinan Suwetja dan Tiaga. Dalam penghadangan itu, sepuluh orang tentara Belanda tewas.[76] Penghadangan terhadap patroli NICA dilakukan pula di Gelatik, Tabanan, yang dilanjutkan dengan penyerangan pos NICA di Kalanganyar, di sebelah selatan kota Tabanan pada awal April 1946. Bantuan personil dalam jumlah yang lebih besar didatangkan dan para pemuda terpaksa mundur tanpa ada korban. Meletus lagi pertempuran di dekat desa Lumbung, Tabanan yang dilancarkan oleh pasukan "Kucing Hitam" di bawah pimpinan Nengah Kredek terhadap tentara NICA.[77]

Penghadangan dan kontak senjata terjadi di desa Bondalem, Buleleng, pada 6 Maret 1946 di bawah pimpinan Hartawan Mataram. Para pemuda menghadangnya dari tempat ketinggian terhadap satu truk tentara Belanda yang melintasi jalan menuju desa Tejakula untuk membangun pos di sana. Para pemuda hanya bersenjatakan senjata tajam; mereka melempari dengan batu, namun seisi truk turun dan menembak ke arah pemuda. Kali ini banyak korban berjatuhan di kalangan pemuda. Sebanyak 32 orang pemuda tewas diterjang peluru tentara NICA.[78]

Insiden kontak senjata meletus di desa Bebetin, Buleleng, yaitu pada tanggal 9 April 1946. Seorang penduduk I Djuita yang baru keluar dari kamarnya ditembak oleh tentara NICA, seketika tewas. Para pemuda terdesak, karena persenjataan yang tidak memadai, dan mereka memutuskan untuk mundur sehingga tidak ada jatuh korban. Akan tetapi, seisi desa disuruh keluar oleh NICA, beberapa di antaranya disiksa, kemudian rumah-rumah penduduk dibakar.[79] Kontak senjata terjadi antara pasukan pemuda dibawah pimpinan I Gede Muka Pandan, yang berada di Banjar Jawa, kota Singaraja dengan pasukan NICA pada tanggal 4 April 1946. Terjadi tembak menembak antara dua kekuatan, dan I Gede Muka Pandan tertembak hingga tewas.[80]

Posisi dan gerak pasukan DPRI Sunda Kecil senantiasa diketahui tentara NICA, tentu berkat bantuan informasi pasukan milisi yang bertugas menjadi kaki tangan dan mata-mata. Selain itu, personil pasukan DPRI tidak sepenuhnya berlatar belakang tentara, sehingga sangat berat ketika menghadapi kehadiran lebih dari 2000 serdadu KNIL yang dibantu pasukan milisi anti-Republik di seluruh swapraja di Bali. Aksi-aksi KNIL cukup menggila sepanjang tahun 1946, dan demikian pula dihadapi oleh para pemuda pejuang dengan perlawanan gerilya yang cukup sengit, untuk membuat sebagian penduduk desa berpihak pada kaum revolusioner.[81]

Pertempuran-pertempuran yang dilancarkan pihak pemuda adalah pertanggungjawaban kewajiban yang diberikan oleh rakyat yang sangat antusias mendukung Republik. Mereka memberi bantuan logistik di desa-desa basis. Hal ini sudah diketahui pihak militer NICA, karena itu mereka lebih intensif mengawasi hingga ke desa-desa dan senantiasa disertai pembakaran rumah-rumah dan lumbung-lumbung padi. Perjuangan bersenjata mendukung cara perang oleh DPRI Sunda Kecil di Bali sangat bergantung pada dukungan rakyat. Selain itu, pemerintahan di ibukota propinsi Sunda Kecil dan penguasa swapraja sudah dikuasai

dan dikooptasi oleh Komandan AMACAB/NICA. Dengan demikian, perjuangan bersenjata DPRI Sunda Kecil tidak mempunyai demarkasi dan garis belakang dan harus menuruti kehendak rakyat meskipun tidak memenuhi syarat strategi militer profesional. Tegasnya, kehendak dan dukungan rakyat di basis-basis perjuanganlah ikut mendorong pilihan yang diambil pimpinan DPRI Sunda Kecil, Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bertempur terus.[82]

Prinsip untuk mendukung cara perang dan bertempur terus jelas dapat diketahui dari pernyataan Ngurah Rai dalam surat balasannya kepada Overste ter Meulen:

"..... tg 18 Mei 1946

Kepada Jth.

Toean Overste ter Meulen

di Denpasar

Merdeka!

Soerat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan djawaban sebagai berikoet: Tentang keamanan di Bali adalah oeroesan kami. Semendjak pendaratan tentara toean, poelau mendjadi tidak aman. Boekti telah njata, tidak dapat dipoengkiri lagi. Lihatlah, penderitaan rakjat menghebat. Mengantjam keselamatan rakjat bersama. Tambah-tambah kekatjauan ekonomi mendjirat leher rakjat.

Keamanan terganggoe, karena toean memperkosa kehendak rakjat jang telah menjatakan kemerdekaannja.

Soal peroendingan kami serahkan kebidjaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Djawa. Bali boekan tempatnja peroendingan diplomatik. Dan saja boekan kompromis. Saja atas nama rakjat hanja menghendaki lenjapnya Belanda dari poelaoe Bali atau kami sanggoep dan berdjandji bertempoer teroes sampai tjita-tjita itu tertjapai.

Selama toean tinggal di Bali, poelaoe Bali tetap mendjadi belanga tumpahan darah, antara kita dan pihak toean.

Sekian, harap mendjadikan makloem adanja.

Sekali merdeka, tetap merdeka!
a/n Dewan Perjoeangan Bali
Pemimpin
(I Goesti Ngoerah Rai)"[83]

Situasi yang penuh pergolakan di daerah mendapat perhatian pula Menteri Pertahanan RI, Sjarifoeddin di Yogyakarta, ketika memberi keterangan kepada para wartawan dalam negeri tentang reorganisasi tentara. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa penyebab dari banyaknya pembesar-pembesar Republik ditangkap oleh Belanda di Sulawesi, Borneo, Bali adalah karena kekuasaan *"de facto"* tidak ada di daerah-daerah tersebut. Pada waktu ini, teori yang dianut di Belanda adalah "tulang punggung Republik Indonesia terdapat di Jawa. Jika Jawa hancur, berarti lenyaplah Republik Indonesia." Sekarang, dapat dilihat Belanda sudah mengadakan blokade pada pulau Jawa, dengan menduduki lapangan-lapangan terbang di Denpasar, Banjarmasin, Muntok dan Palembang. Tujuannya apabila sudah tiba saatnya mereka akan menggempur secara besar-besaran dan dengan mudah dapat merebut Jawa dari segala penjuru.[84]

Mengingat gentingnya suasana pada masa ini, maka Panglima Besar Soedirman mengamanatkan kepada seluruh tentaranya terdiri atas lima pasal, sebagai berikut: (1) percaya pada diri sendiri; (2) teruskan perjuangan; (3) pertahankanlah kemerdekaan dan rebut kembali apa-apa yang sudah dirampas musuh; (4) jangan ada yang menyerah demi kepentingan tanah air kita; dan (5) tunduklah lahir dan bathin kepada disiplin tentara.

Amanat Panglima Besar tentara diikuti dengan sumpah seluruh anggota tentara (1) sanggup memertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan; dan (2) sanggup taat dan tunduk pada pemerintah negara Republik Indonesia

yang menjalankan kewajibannya menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnya. Pada kesempatan yang sama dinyatakan bahwa tentara harus bisa bekerja bersama-sama dengan badan-badan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan tanah air kita sebaik-baiknya.[85]

6.8. *Long March* dari Gunung Batukaru ke Gunung Agung[86]

Posisi markas pasukan di Munduk Malang sudah diketahui NICA. Untuk mempersempit gerakan pasukan DPRI, mereka membangun pos-pos di sekitar Munduk Malang, yaitu Antosari, Blimbing, Kebun Jagung, Jatiluwih, dan Penebel. Serdadu NICA, yang dibantu NICA *Gandek,* membakar rumah-rumah penduduk yang dianggap mendukung perjuangan, di Sari Buana, Bijahan, Kukulbatu, Ketime,dan Kempinis. Mengingat posisi yang tidak aman lagi, komandan menginstruksikan untuk memindahkan markas ke desa Bengkel Anyar, suatu desa di hutan lebat di lereng Gunung Batukaru. Di Bengkel Anyar bergabung pula pasukan TRI Angkatan Laut di bawah pimpinan Kapten Markadi dan MB Jembrana di bawah pimpinan Letnan Dwinda.[87]

Pimpinan MBU DPRI dan Komandan TRI Resimen Sunda Kecil, Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama induk pasukannya memutuskan untuk bergerak dari Bengkel Anyar menuju ke arah timur dengan melintasi Gunung Batukaru pada tanggal 1 Juni 1946.[88] Dari Gunung Batukaru, induk pasukan berjalan terus menuju ke daerah Buleleng di Utara. Dari Buleleng mereka melintas ke Badung Utara, Bangli menuju Karangasem. Terjadi kontak senjata di desa-desa yang dilalui.Selama melaksanakan tugas suci perjuangan Republik, para pemuda bersemboyan "merdeka atau mati", "sekali merdeka tetap merdeka".[89]

Ketika induk pasukan sampai di desa Sangkankuasa, sebuah desa yang terletak paling atas di lereng Gunung Agung, pimpinan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua bagian. Sebagian dipimpin oleh Mayor Wisnu meneruskan perjalanan pada sore itu juga, dan sebagian lagi dipimpin Letkol Ngurah Rai sendiri berangkat keesokan harinya. Pasukan Wisnu terdiri dari pasukan Tabanan di bawah pimpinan Kapten Widjana dan pasukan TRI Laut dipimpin Kapten Makadi. Pasukan Ngurah Rai, bersama-sama pasukan Badung di bawah pimpinan Kapten Suwidja. Ketika sampai di desa Pesagi, pada 2 Juli

1946, sempat terjadi kontak senjata dengan serdadu NICA selama satu setengah jam. Enambelas serdadu NICA tewas kena tembakan mortir Letnan Ngurah Pindha, dan seorang pemuda terluka dan ditawan NICA.[90]

Dari Pesagi, perjalanan dilanjutkan sampai tiba di Tanah Aron pada 5 Juli 1946. Mereka disambut A.A. Suryaningrat dan Reni, pimpinan pejuang di Karangasem. Informasi dari penghubung mengatakan bahwa NICA memperbanyak pos-posnya, meliputi desa-desa Babi, Pidpid, Abang, Culik sampai jalan yang menuju Tulamben dan Kubu.[91] Pertempuran meletus di Tanah Aron pada pukul 9.30 hingga pukul 15.00, yang menewaskan 82 serdadu NICA. Sementara di pihak pasukan pemuda, dua orang luka-luka dan lima orang ditawan NICA.[92]

Malam itu pula, Pak Rai memerintahkan pasukan supaya pindah dan terus naik masuk hutan di lereng Gunung Agung untuk menghindari kepungan. Keesokan harinya, pesawat-pesawat tempur NICA menghujani bom dan granat di lokasi pertempuran sebelumnya.[93] Induk pasukan melanjutkan perjalanan ke puncak. Perjalanan dilanjutkan menurun ke arah utara dan tiba di tanah Mel. Disini, para *penyakap* tanah penulis (A.A. Gde Ngurah) dari Penaga Landih, juga dari Nongan, datang membawakan beberapa keranjang (*bodag*) berisi ketupat dan lauk pauk. Pak Rai memberitahu anggota pasukan dengan kata-kata, "ambil satu ketupat untuk satu orang, jangan lebih. Siapa ingin lebih maka lebihnya akan saya berikan dari pistolku ini", sambil mengokang pistolnya.[94] Demikian gambaran bantuan logistik yang diterima dari penduduk.

Induk pasukan sampai di kawasan di atas Danau Batur sebelah selatan pada 14 Juli 1946, terus ke desa Trunyan, dan pagi harinya, 15 Juli 1946, naik menuju desa Belandingan di timur laut Danau Batur. Ketika istirahat makan, tiba-tiba pesawat tempur NICA menembakkan senjata ke sasaran. Pasukan pemuda terkurung dari sebelah timur dan barat sambil dihujani tembakan. Anggota induk pasukan kelabakan, terpencar sambil mencari tempat-tempat perlindungan sehingga dapat lolos dari kepungan dan tembakan serdadu NICA. Pada saat yang sama, tanggal 15 Juli, pasukan yang bergerak dari Kintamani untuk kembali ke Buleleng dihadang tentara NICA sehingga tercerai berai dan mengalami kerugian besar.[95] Setelah berhasil berkumpul lagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara kemudian ke barat menyusuri dataran tinggi

di sebelah utara Gunung Batur, melalui Gunung Andeng, lewat Saka, Banjar He dan sorenya sampai di desa Sangambu. Dari itu pasukan terus ke desa Cenikgaan, yang penduduknya disiapkan oleh NICA untuk menangkap para pemuda yang melewati desanya. Namun berkat penyamaran, mereka lolos hingga sampai kawasan hutan dekat desa Pengajaran.

Perjalanan induk pasukan dilanjutkan dengan berjalan di air sungai sejauh tiga kilometer ke utara sampai di pemukiman penduduk desa perbatasan Bangli-Buleleng. Salam "merdeka" untuk pertama kali terdengar di kawasan perkebunan di desa Pakisan, Buleleng Timur, pimpinan Wirta Tamu (Bung Tjilik). Suguhan berupa jajan, buah-buahan bekas sajen usai hari raya Galungan diberikan kepada anggota pasukan yang kelaparan. Mereka disambut oleh pemuda-pemuda desa, yang memegang bambu runcing dan di dadanya kelihatan lencana merah putih. Para wanita memersiapkan makanan dan rakyat dikerahkan mengambil dan membawa makanan, apa saja yang ada untuk diberikan kepada anggota pasukan yang baru datang.[96]

Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke desa Ambengan, di mana induk pasukan bertemu dengan pimpinan pemuda lascar rakyat setempat yang dengan semangat menyerukan "Merdeka Pak! Merdeka Bung! Sekali Merdeka Tetap Merdeka!". Mereka berdatangan sambil menyerukan "Merdeka Pak! Merdeka atau Mati! Kita Pasti Merdeka!". Kemudian, rombongan diantar ke Jembong, suatu lembah yang ditanami ketela. Semuanya menikmati suguhan. Orang-orang Jepang, I Sukera dan I Sukeri dapat merokok sepuas-puasnya.[97] Akan tetapi, hanya sehari di desa Ambengan, tentara NICA mengepung dan melancarkan tembakan ke posisi induk pasukan yang sudah tanpa peluru.

Pada 23 Juli 1946, kira-kira jam 9.00, Pak Rai memanggil komandan-komandan pasukan dan pimpinan sipil yang ada untuk rapat. Komandan yang hadir adalah Pak Rai, Pak Wisnu, A.A. Anom Mudita, I Nyoman Sayan (Herauci), Sugianyar, Tjok. Ngurah, Swidja, Mudana, Pindha dan lain-lainnya. Ketika rapat dimulai, Pak Rai menyampaikan beberapa hal berikut, seperti dikutip Pindha:

> "Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan pertimbangan dan pendapat saudara-saudara tentang apa yang harus kita perbuat sekarang. Apakah kita tetap berkumpul terus menerus seperti sekarang? Ataukah kita pecah-pecah pasukan kita

menjadi pasukan kecil-kecil? Memang dengan pasukan besar begini baik sekali, jika kita masih mempunyai perlengkapan terutama peluru. Namun, sekarang keadaannya sudah lain. Peluru kita sudah habis. Pengalaman sejak turun dari Gunung Agung, kita dikejar-kejar dan diserang musuh tanpa mengadakan perlawanan sama sekali. Dalam keadaan begini, rakyat yang kita datangipun kasihan. Mereka membantu kita, tetapi setelah musuh datang, kita tinggalkan mereka tanpa pembelaan sama sekali. Saya merasa malu dalam keadaan demikian. Cobalah beri pertimbangan langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan ini".[98]

Selanjutnya disambung Pak Wisnu yang mengatakan:

"Tindakan kita ini bukan tindakan ksatria lagi, tetapi tindakan pengecut karena setelah kita diterima dengan gembira oleh rakyat di suatu tempat dan diberi nasi dan segalanya, lalu setelah NICA datang kita lari tanpa perlawanan. Rakyat disiksa oleh NICA tanpa ada pembelaan sama sekali dari kita. Dalam keadaan begini kita tidak dapat melawan musuh kecuali kalau kita ingin hancurkan semua, jadi terpaksa harus mengubah taktik untuk kelanjutan perjuangan kita. Oleh karena itu, saya mengusulkan, sebaiknya pasukan di pecah-pecah menjadi grup kecil-kecil supaya lebih mudah bergerak. Grup-grup kecil misalnya satu regu kembali ke daerah masing-masing: Tabanan, Badung, Singaraja, Bangli, dll. Apabila sudah sampai di tempat, tugas utama adalah memperbaiki daerah, karena sebagian besar daerah kita sudah dikuasai musuh. Apabila keadaan sudah memungkinkan, baru kita melanjutkan dengan gerakan operasi. Harus tetap ada hubungan satu sama lain dan terpenting adalah jangan sampai ada yang mengkhianat."[99]

Demikian saran Pak Wisnu yang didukung oleh Kapten Sugianyar dengan mengulangi mengatakannya, kalau tetap begini—pasukan besar tanpa peluru—maka akan mudah diserang musuh, dan lama kelamaan kita akan kelaparan karena rakyat tidak berani dan tidak dapat memberi kita makan.

6.9. Perang Terbuka pada Puputan Margarana

Markas Resimen MBU DPRI Sunda Kecil dan kesatuan pasukan komando atau pasukan istimewa, diberi nama pasukan Ciung Wanara, dipimpin langsung Letkol I Gusti Ngurah Rai. Dari Munduk Pengorengan desa Cengana, Buleleng, pasukan Ciung Wanara melanjutkan perjalanan ke desa basis perjuangan yaitu desa Marga, Tabanan.[100]

Sejak 13 Juli, wilayah Republik Propinsi Sunda Kecil diklaim menjadi wilayah pendudukan atau rekolonialisasi Belanda di luar Jawa. Keputusan Letnan Gubernur Jenderal N0. 5/1946 menyatakan bahwa sistem administrasi dua keresidenan (Bali, Lombok dan Timor) dihidupkan kemali. Raja-raja di daerah swapraja menyatakan bekerjasama dan diakui eksitensinya. Sebaliknya, pihak Republik tetap mendapat dukungan dan dipertahankan eksistensinya oleh kaum pejuang Republikan dalam wadah organisasi perjuangan DPRI Sunda Kecil di Bali.

Karena itu, pertempuran-pertempuran kecil masih terus terjadi di Bali. Pertempuran agak besar meletus di daerah Jembrana. Semua perahu dan sampan (*jukung*) milik rakyat di pantai Bali Barat, dikumpulkan oleh pihak Belanda agar tidak menjalin kontak dengan pulau Jawa. Selain itu, pesawat udara Belanda giat mengadakan patroli di atas Selat Bali, dan kapal perangnya tampak berlabuh di pangkalan laut Gilimanuk dan pantai barat Bali yang berjarak 6-7 km dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pada tanggal 3 Agustus 1946, jam 9.10 pagi, sebuah kapal motor Belanda datang dari Bali menuju pantai Watu Dodol, Banyuwangi Utara, dan melepaskan tembakan 50 kali dengan mitralyur antara jarak 300 meter. Rakyat tidak memberikan perlawanan, oleh karena itu korban dan kerusakan tidak ada.[101]

Setelah gagal menyeberang ke Jawa untuk melaporkan perjuangan di Bali dan meminta bantuan senjata beserta personil pasukan, maka induk pasukan pimpinan Letkol Ngurah Rai mengalihkan perhatiannya ke desa Marga, Tabanan. Selain sebagai basis perjuangan dengan persediaan logistik, dengan bergabung di markas Marga, langkah itu diambil untuk memudahkan kontak dengan pemuda pejuang yang ada di kota Tabanan dan Denpasar, serta menyusun rencana penyerbuan merebut senjata di tangsi militer dan polisi NICA. Mayor Debes, Komandan Markas Besar Tabanan menyarankan untuk melucuti senjata di tangsi polisi NICA di kota Tabanan.

Usaha rahasia ini ditugaskan kepada seorang tenaga wanita bernama Ibu Lasti untuk memata-matai posisi polisi NICA di kota Tabanan. Ibu Lasti berhasil membujuk komandan polisi NICA yang bernama Wagimin, agar mau memihak kepada Republik, dan membantu pemuda pejuang memeroleh senjata yang ada di tangsi polisi yang dipimpin Wagimin.[102] Bujukan dan ajakan Ibu Lasti disetujui oleh Wagimin. Kemudian, rencana penyerangan ditetapkan, yaitu tanggal 18 Nopember 1946 tengah malam hingga subuh. Satu pasukan TRI dibantu oleh pemuda dari DPRI mengadakan serangan terhadap tangsi polisi di Tabanan, serta berhasil melucuti pasukan polisi Belanda dan merampas senjata berserta amunisi yang tersimpan di sana, tanpa terjadi kontak senjata.

Segera setelah merebut senjata, induk pasukan bersama pasukan penyergap meninggalkan kota Tabanan, dan menjelang pagi sampai di Banjar Ole. Letkol Ngurah Rai menyusun kembali induk pasukan Resimen Sunda Kecil yang berjumlah personil 70 orang dengan senjata api melimpah. Sebagai kekuatan resmi dari angkatan bersenjata untuk memertahankan wilayah Republik Indonesia di Sunda Kecil, maka dibuat sebuah lencana Merah Putih dihiasi huruf berbunyi "Ciungwanara" yang dilekatkan pada pakaian seragam, sebagian hitam-hitam dan sebagian lagi hijau. Letkol Ngurah Rai memanggil staf pimpinan lainnya—Mayor Debes, Mayor Wisnu, Mayor Sugianyar dan bekas komandan Wagimin—membicarakan dan merencanakan siasat perlawanan selanjutnya. Selama pertemuan berlangsung, personil lainnya mengikuti acara hiburan yaitu pertunjukan tari "Janger" yang didatangkan dari Banjar Tunjuk.[103]

Pada tanggal 20 Nopember 1946, sejak pukul 06.00 desa Marga sudah dikurung tentara NICA dari arah selatan maupun utara. Selain itu, beberapa truk tentara NICA melintas di jalan raya Marga-Tunjuk. Di desa Marga, tentara Belanda sudah mulai meneror penduduk, tua-muda, laki-perempuan, anak-anak disuruh keluar rumah; semuanya digiring ke pasar dengan ancaman ditodong, ditendang, dipukul agar mau menyebutkan di mana pemuda pejuang berada.[104]

Letkol Ngurah Rai mengetahui keadaan ini, dan memerintahkan anggota pasukan untuk mengalihkan tempat ke arah utara pada pukul 08.30 dan memersiapkan *steling* di sana, di tengah-tengah sawah yang ditanami jagung dan ketela. Satu pasukan terdiri dari 24 orang tiba dari

arah timur, selesai melaksanakan tugasnya untuk menanamkan semangat terhadap rakyat agar setia kepada Republik. Mereka segera menggabungkan diri dengan induk pasukan dibawah pimpinan Letkol Ngurah Rai. Kini, induk pasukan beranggotakan 94 orang. *Steling* disiapkan, oleh karena persawahan di Uma Kaang agak berbukit, maka *steling* diatur secara bertingkat, yang di bawah agak kuat daripada diatasnya. Pihak tentara Belanda sudah mulai masuk mendekati posisi *steling* pasukan. Pukul 9.00 tembakan komando tanda memulai serangan berbunyi, yang diikuti dengan tembakan personil pasukan lainnya yang mengakibatkan barisan terdepan pasukan Belanda terkena dan tewas. Barisan belakang segera mundur sampai ke jalan besar. Dalam waktu satu setengah jam, pasukan Belanda tidak dapat bergerak maju. Ketika pasukan Belanda mundur, pihak pemuda bersorak sambil memekikkan "Merdeka! Merdeka! Merdeka!", dan pasukan Belanda mundur terus ke arah barat sampai di desa Tunjuk dan ke arah timur sampai di desa Sungi. Untuk membuat medan agak lebih luas, pasukan Ciung Wanara dibagi tiga barisan. Barisan depan, sayap kanan dan sayap kiri. Dan pimpinan berada di tengah-tengah.[105]

Pukul 11.30, bantuan pesawat udara tiba. Mula-mula pesawat intai (jenis Pipercub) berputar-putar yang disusul pesawat pembom dan pesawat tempur. Pasukan darat Belanda maju lagi, dilindungi pesawat-pesawat udara dari atas. Seorang penerbang pesawat intai, dari suku Ambon, tewas tertembak. Pesawat tempur menghujani dengan tembakan mitralyur, bersama-sama tentara Belanda di darat melancarkan tembakan kearah posisi pasukan Ciung Wanara. Terjadi pertempuran sengit. Sementara itu, bantuan tentara NICA berdatangan dari Buleleng, Jembrana, Gianyar, dan Bangli untuk ikut mengepung pasukan Ciung Wanara. Dari udara tidak henti-hentinya ditembakkan mitralyur, bom dan granat tangan dijatuhkan termasuk juga bom asap dan gas air mata. Ledakan bom-bom asap ini menyebabkan medan pertempuran jadi gelap. Bau mesiu memenuhi seluruh medan. Setiap tentara Belanda yang berani mendekat, terkena tembakan pemuda.

Akan tetapi, pihak pasukan Belanda lebih gencar memuntahkan peluru-peluru, senapan mesin otomatis, granat, bom, mitralyur dari pesawat udara sehingga di pihak pasukan Ciung Wanara sudah mulai ada yang tewas kena tembakan musuh. Dari segala penjuru, peluru dan bom datang menghujani posisi anggota pasukan Ciung Wanara. Pada saat itulah, sebuah peluru telah menembus kepala Mayor Sugianyar,

menyebabkan dia tewas seketika. Melihat ini, Letkol Rai sangat berang dan dengan perintahnya kepada anggota pasukan agar mereka menuntut balas sampai titik darah penghabisan. Mendengar perintah dari pimpinan, maka seluruh anggota induk pasukan Ciung Wanara maju sambil berteriak "Puputan! Puputan! Puputan!".[106] Dari pihak tentara Belanda tidak seorangpun berani maju, sebaliknya anak-anak pasukan Ciung Wanara maju dan mengamuk. Tentara Belanda tidak berani menghadapi mereka satu demi satu, kecuali memuntahkan peluru dari semua jurusan di darat dan dari udara. Akibat semburan banjir peluru ini, satu per satu anak-anak pasukan Ciung Wanara roboh ke tanah dan tewas. Serangan dan pertempuran heroik berlangsung sampai pukul 15.00.[107]

Meski tidak seimbang—pasukan Belanda jauh lebih unggul dari segi kuantitas dan kualitas personil serta teknologi persenjataan—Letkol Ngurah Rai dan pasukannya tidak ingin menyerah dan tetap teguh dengan semangat "Puputan", seperti telah dilaksanakan oleh raja Badung dengan pengikutnya pada 20 September 1906, dan Raja Klungkung dengan semua keluarga dan pengikutnya pada 28 April 1908 dalam perlawanan terhadap Belanda. Letkol Ngurah Rai beserta semua staf dan anak buahnya melakukan "Puputan", pertempuran sampai titik darah penghabisan untuk membela dan memertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.[108] Dengan semangat nasionalisme, Letkol I Gusti Ngurah Rai dengan staf serta pasukan Ciung Wanara-nya membuktikan bahwa semangat Puputan yang telah dipamerkan raja-raja tradisional di Bali dengan rakyatnya pada masa silam masih hidup berbaur dengan ideologi modern, dan berkobar dalam dada putra-putra Bali.[109]

Meskipun perjuangan di Bali tidak dihiraukan pemerintah RI di pusat, karena sibuk menggelar politik diplomasi, pejuang-pejuang Republik di bawah pimpinan Ngurah Rai terus berperang untuk memertahankan Republik. Sebaliknya, harus diakui pula realitas yang terjadi bahwa Sunda Kecil telah berlaku pemerintah sipil yang dikuasai aparatur Belanda NICA. Sementara raja-raja sudah menjadi kaki tangan NICA. Dalama suasana demikian, maka andalan hanya tertumpu pada rakyat untuk mendukung perjuangan bersenjata hingga pada titik kulminasinya pada peristiwa pertempuran terbuka di Marga (Puputan Margarana) tersebut.[110] Tentu sudah disadari oleh Pak Rai bahwa jika bertahan di selatan desa Marga dengan kekuatan pasukan yang sebagian besar tanpa latihan militer, maka pasukan segera dapat

dihancurkan. Akan tetapi, kehancuran demi melindungi rakyat lebih diterima. Lebih baik mati di pangkuan rakyat Marga daripada lari.

Demikianlah, Pak Rai bersama staf dan pasukannya memutuskan bertahan hingga titik darah penghabisan disertai pekik "Puputan! Puputan! Puputan!" sambil maju menerjang musuh. Dan satu persatu roboh tertembus peluru tentara NICA dari darat dan udara.[111]

Beberapa orang dari pihak pejuang yang masih hidup—Made Widjakusuma, Ketut Widjana, I.B. Tantera, Gusti Ngurah Mataram, I.B. Tamu, Anang Ramli, Nengah Tamu (Tjilik), Subroto Aryo Mataram, Nyoman Mantik, Nengah Pantjer, I.B. Kalem, dan Gusti Ngurah Bondjoran (Bayupati)—melanjutkan perjuangan memertahankan kemerdekaan RI dengan taktik yang disesuaikan untuk menghadapi kekuatan Sekutu yang didukung penuh militer Belanda.[112]

Pada 22 Nopember 1946, mereka segera menggelar rapat darurat di desa Buahan, Tabanan, untuk memilih pimpinan organisasi perjuangan MBU DPRI Sunda Kecil. Pertemuan menghasilkan keputusan darurat: yaitu (1) apa pun yang terjadi, perjuangan Republik Indonesia Merdeka harus dilanjutkan sampai di titik tujuan terakhir; dan (2) DPRI Sunda Kecil melanjutkan perjuangan di bawah pimpinan Made Widjakusuma dan wakilnya Kapten I Gusti Ngurah Mataram serta Ketut Widjana.[113]

Puputan Margarana telah memberi arah baru dalam perjuangan masyarakat Bali Sunda Kecil, yang berada di tangan kepemimpinan kaum muda militan yang berhaluan politik. Pergeseran ini telah bertanggungjawab atas keterbukaan yang lebih besar terhadap pelbagai strategi yang melibatkan manuver politik, kecerdasan dan diplomasi daripada kekuatan militer semata.[114]

6.10. Dari Malino ke Denpasar

Sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 200 orang digelar di kota Denpasar pada 4 Desember 1946. Peserta pertemuan mendeklarasikan pembentukan sebuah partai politik bernama Partai Rakyat Indonesia, disingkat Parrindo.[115] Setelah itu, segera disusun program kerja partai, yaitu: (1) menyelenggarakan kursus-kursus dan penerangan di kalangan anggota; (2) memasyarakatkan asas-asas demokrasi; (3) menyelenggarakan aktivitas yang berfaedah dan patut untuk mencapai tujuan perhimpunan; (4) asas-asas demokrasi diselenggarakan di kalangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat; (5) menerbitkan majalah; (6) bekerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan yang sehaluan; dan (7) menyelenggarakan segala aktivitas

yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara untuk mencapai tujuan perhimpunan.[116] Rapat juga berhasil memilih pengurus partai, yakni I Gusti Putu Merta sebagai Ketua dan Ir. Soewarno sebagai Wakil Ketua; sekretarus (Penulis) adalah I Ketut Soebrata dan I Gede Poeger; dan bendahara dijabat I.B. Pidada.[117]

Setelah beberapa perundingan Indonesia-Belanda mengalami kegagalan, Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook pada Februari 1946 menjajaki kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin dan pemuka masyarakat sebagai tindak lanjut konsolidasi kedudukannya di seluruh wilayah Timur Besar. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu bentuk tatanegara baru mengikuti garis politik pemerintah Belanda. Utamanya tentang persemakmuran Hindia Belanda, persekutuan dalam kerajaan, yang tersusun dari negeri-negeri yang mempunyai hak memerintah sendiri dengan tingkat masing-masing.[118]

Sebagai tindak lanjut dari prakarsa politiknya, van Mook mencurahkan perhatiannya di wilayah pendudukan tentara Sekutu di Timur Besar. Dari situ dibuat satu keputusan untuk menyelenggarakan perundingan dalam sebuah konferensi yang akan melibatkan wakil-wakil daerah di seluruh wilayah Timur Besar, Kalimantan, Bangka, Riau dan Belitung. Konferensi ini diselenggarakan di Malino pada 16 Juli 1946, dengan didahului suatu upacara serah terima kekuasaan di bidang keamanan, ketertiban umum dan pemerintahan dari tangan tentara Sekutu ke tangan pemerintah Hindia Belanda-NICA di Makasar pada 15 Juli 1946.[119] Seusai upacara serah terima kekuasaan pemerintahan, van Mook mengumumkan keputusannya, untuk menghapuskan keadaan darurat perang di wilayah Timur Besar kecuali daerah Bali yang masih bergolak.[120]

Konferensi Malino dibuka secara resmi oleh van Mook di hadapan peserta yang hampir 100 orang jumlahnya. Mereka terdiri dari staf aparaturnya, peninjau dari kalangan pers, film dan radio dan sebagian besar dari wakil-wakil daerah. Wakil-wakil daerah yang diundang berjumlah 51 orang meliputi daerah-daerah Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimanatan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangihe dan Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Irian, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor.[121]

Dalam pidato pembukaannya, van Mook menyarankan bahwa sudah tiba saatnya sekarang untuk merencanakan dan merundingkan tindakan-tindakan yang layak diambil guna menyusun suatu tata

pemerintahan dan pembangunan ketatanegaraan di wilayah ini, di mana putra-putra Indonesia mengambil bagian yang penting. Dalam hal ini, ada dua opsi di antara dua sistem susunan ketatanegaraan, yaitu sistem unitarisme dan federalisme. Dari dua opsi tersebut, van Mook secara tegas menyarankan menganut sistem federal.[122]

Dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para utusan, van Mook menyimpulkan bahwa: (1) semua utusan tidak menerima kembalinya kolonialisme di bumi Indonesia; (2) hubungan Belanda dan Indonesia harus diteruskan demi pembangunan dan perkembangan Indonesia di masa depan; dan (3) kesatuan Indonesia harus dipertahankan sebagai suatu bangsa yang dijelmakan dalam suatu sistem federal, yaitu federasi Indonesia yang berbentuk Negara Indonesia Serikat. Dalam hubungan ini, van Mook menyimpulkan, seperti yang dikehendaki sebagian besar peserta, untuk mewujudkan dua negara bagian di Timur Besar dan Kalimantan.[123]

Dalam notulen rapat kabinet tanggal 29 Juli 1946, Letnan Gubernur Jenderal van Mook menyatakan bahwa Konferensi Malino, yang berakhir pada 25 Juli 1946, telah berhasil. Sebaliknya, pihak Republik menyambut dingin diselenggarakannya Konferensi Malino. Dalam pidato radio, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta ketika menyambut perayaan peringatan RI satu tahun pada tanggal 16 Agustus 1946, menyatakan bahwa:

> "Memang, Belanda mempergunakan segala akal dan kekuatannya untuk meniadakan kita, untuk memaksa kita masuk kedalam lingkungan kerajaannya. Mereka mencoba memecah Indonesia dengan memisahkan daerah-daerah yang dikuasainya dari Republik Indonesia. Mereka mengatakan permusyawaratan Malino untuk memikat daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera masuk ke dalam lingkungan kerajaan Belanda. Dengan menanam dasar *Commonwealth* di Malino berdasarkan atas daerah-daerah yang dikuasainya, mereka mau memaksa kita tunduk kepada keputusan mereka. Tetapi sandiwara Malino itupun tidak menguntungkan sama sekali kepada Belanda. Cita-cita "*rijksverband*" pada dasarnya retak dalam permusyawaratan itu. Sebagian besar dari utusan yang ditunjuk itu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah menjadi tujuannya yang terakhir. Dan suara rakyat di daerah

itu, sekalipun ditindas dengan ujung bayonet, menyatakan keinginannya masuk ke dalam Republik Indonesia. Sampai kedalam sidang Konferensi di Malino itu terdengar jeritan rakyat meminta diijinkan mengibarkan bendera "sang merah putih" yang dilarang oleh Belanda.

Kebenaran dan keadilan dapat diperkosa dan ditindas sementara waktu. Lambat laun ia akan berlaku juga. Daerah Indonesia sebagai Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil tidak dapat dipisah dari Republik Indonesia. Dengan memperkosa dasar-dasar hak menentukan nasib sendiri, perpisahan dapat dipaksakan untuk sementara waktu. Tetapi akhirnya, semangat persatuan bangsa Indonesia yang kuat akan menang. Perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuh-penuhnya belum lagi selesai, mungkin panjang".[124]

Persetujuan Linggajati menghendaki pembentukan suatu sistem federasi dan dengan jelas ditentukan oleh Belanda dan Republik secara bersama-sama. Akan tetapi, H.J. van Mook mengadakan tindakan sepihak untuk menciptakan suatu sistem federal yang sesuai dengan interpretasinya berdasarkan pasal-pasal yang dimuat dalam persetujuan. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 ayat (1), dari Persetujuan Linggajati, van Mook mempraktekkan kebijakan politik federal yang sudah dirancang di Malino, kemudian ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan konferensi kedua di Denpasar pada tanggal 18 Desember 1946.

Gambar 2. Konferensi Denpasar, Bali, 18 Desember 1946



Sumber: Kempen RI, *Sunda Kecil* (Jakarta: Kempen, 1953), hlm. 116.

Untuk memulai realisasi gagasan sistem federalnya, van Mook membentuk sebuah negara bagian, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT), yang menjadi unsur utama dalam sistem federal. Tindakan aksi sepihak ini diperkuat Undang Undang Dasar yang dihasilkan oleh konferensi Denpasar. Menurut syarat-syaratnya, "negara" baru, yaitu NIT, secara efektif dikontrol dari Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda, di bawah kendali Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Sementara rakyat dan pimpinan mereka dalam NIT hampir sepenuhnya dianggap sebagai boneka.[125]

Perundingan-perundingan dalam konferensi yang diselenggarakan di Denpasar itu rencananya dibuka oleh van Mook pada 7 Desember 1946. Namun, van Mook ternyata baru tiba di Denpasar tanggal 17 Desember 1946, karena ia harus tetap berada di

Jakarta berhubung dengan perdebatan sengit untuk membahas Persetujuan Linggajati di parlemen Belanda. Sementara itu, para utusan dari seluruh Indonesia Timur telah tiba di Denpasar tanggal 7 Desember 1946. Sambil menunggu kehadiran van Mook, para utusan menyelenggarakan serangkaian perundingan dan pembicaraan pendahuluan yang dipimpin oleh Dr. W. Hoven, Komisaris Pemerintahan Umum untuk Borneo dan Timur Besar. Pembicaraan-pembicaraan pendahuluan membahas naskah rancangan pembentukan Negara Indonesia Timur yang telah disusun di Jakarta sebelumnya oleh Komisaris Pemerintahan Umum bersama Panitia Tujuh.[126]

Tidak banyak masalah diajukan dalam ketiga pertemuan pendahuluan atau sidang-sidang informal tersebut, karena Dr. W. Hoven tidak memiliki otoritas untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan prinsip yang diajukan para utusan. Tanggapan dan pertanyaan para utusan untuk sementara ditampung dulu, untuk selanjutnya akan dibicarakan setelah konferensi dibuka secara resmi oleh Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook.[127] Meskipun demikian, pembicaraan dan tukar pikiran di antara peserta selama sidang-sidang informal telah menetapkan acara konferensi yang dibuka secara resmi pada tanggal 18 Desember 1946. Menurut jadwal, konferensi digelar selama 7 hari, tanggal 18-24 Desember 1946. Peserta konferensi seluruhnya 215 peserta terbagi atas, 70 orang utusan, 11 orang dari pemerintah dengan staf-nya, 22 orang dari Komisariat Pemerintah Umum Untuk Borneo dan Timur Besar, 12 sekretaris daerah-daerah, 10 orang peninjau dan pendengar, 17 orang dari utusan penerangan pemerintah, 20 wakil pers, 54 orang dari panitia konferensi dan 10 orang dari PTT.[128]

Selama rapat pada acara penutupan diisi beberapa ketetapan dan pengesahan yaitu: (1) pada tanggal 1 Maret 1947, ditetapkan sebagai hari tanggal mengundang untuk bersidang pertama kali Badan Perwakilan Sementara; (2) diberikan kesempatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan keliling tentang bendera, lambang negara; (3) ditetapkan ordonansi tentang pembentukan Negara Indonesia Timur; (4) Panitia Pemilihan mengesahkan Toean Soekawati sebagai Kepala Negara; dan (5) Ketua Badan Perwakilan Sementara, Toean Mr. Tadjoedin Noer, disumpah oleh P.J.M. Letnan Gubernur Jenderal. Kemudian, Toean van Mook menyerahkan pimpinan sidang kepada Ketua Badan Perwakilan Sementara. Ketua Badan Perwakilan Sementara

mengangkat sumpah 70 orang anggota dan Kepala Negara, dan setelah para anggota diberi kesempatan luas untuk menyampaikan pidato ucapan selamat kepada Ketua Badan Perwakilan Sementara, Mr. Tadjoedin Noer dan Kepala Negara Tjok. Gde Rake Soekawati. Kepala Negara Tjok. Gde Rake Soekawati, menurut pasal 15 ayat 2, Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur yang baru saja disahkan, bergelar Presiden.

Setelah selesai pemberian ucapan selamat, maka P.J.M. Letnan Gubernur Jenderal mengucapkan pidato sekaligus menutup Konferensi Denpasar pada petang hari tanggal 24 Desember 1946.[129] Akan tetapi, sebelum van Mook mengucapkan pidato penutupan, terlebih dahulu Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), Tjok. Gde Rake Soekawati diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato ucapan terimakasih kepada hadirin atas kepercayaan yang diberikan untuk memangku jabatan Kepala Negara atau Presiden NIT. Sebagai Presiden NIT, Sukawati berjanji untuk berusaha dalam batas-batas kemampuannya tidak mengecewakan para anggota BPS yang telah memilihnya secara demokratis.

Sesuai dengan pandangan politiknya yang sangat moderat, bahkan konservatif, jelas tampak keinginannya mewujudkan kerjasama yang erat dengan pihak Belanda dalam bidang pembangunan Indonesia. Selanjutnya, dinyatakan bahwa:

> "Saya juga insaf bahwa kedudukan saya ini ada di satu tingkatan antara rakyat dan tingkatan lebih tinggi yaitu Pemerintah Indonesia seluruhnya yang sekarang masih dalam tangan Gubernemen, tetapi kelak hari dalam tangan Indonesia Serikat. Haluan politik saya adalah "Kemerdekaan Indonesia", untuk mencapainya, saya mengerjakan cita-cita ini secara damai, dengan menghargai sepenuhnya persahabatan dengan Belanda. Saya menghargai kebudayan dan ilmu pengetahuan Belanda serta alat teknis dan ekonomi Belanda karena berguna bagi tanah air saya, Indonesia. Saya akan tetap mengejar tujuan itu, tetapi saya juga akan tetap bekerjasama dengan Belanda. Siapa yang menyetujui pendirian saya, "banyak terima kasih", siapa yang tidak menyetujui "maaf".[130]

Setelah pidato Presiden Soekawati, Letnan Gubernur Jenderal van Mook menyampaikan pidatonya. Dia mengibaratkan Konferensi

Denpasar ini sebagai suatu usaha mendaki gunung. Apabila satu puncak sudah dapat dicapai, maka timbul lagi suatu puncak baru yang harus dicapai dengan perjuangan pendakian yang lebih berat. Artinya, suatu sukses gemilang pendakian telah dicapai di Denpasar. Namun, pembangunan ketatanegaraan Indonesia belum selesai hanya dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur. Lebih banyak usaha dibutuhkan untuk mewujudkan ketatanegaraan Indonesia, yaitu terbentuknya Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.[131] Akhirnya, van Mook mengharapkan agar NIT yang muda ini dapat berkembang menjadi suatu negara yang kuat dan memiliki identitas sendiri. Dengan demikian, NIT menjadi merdeka dan berdaulat serta sederajat dengan Belanda.[132] Sebelum Ketua Tadjoedin Noor membubarkan rapat, Presiden Soekawati mengumumkan bahwa dia mengangkat Nadjamoedin Daeng Malewa sebagai pembentuk kabinet pertama NIT.[133]

Sementara itu, sejak terbentuknya NIT sudah nampak perbedaan pandangan di antara pejabat negara baik di eksekutif maupun di badan legislatif. Dua pejabat negara tertinggi NIT, Presiden Soekawati dan Ketua Badan Perwakilan Sementara (BPS) Tadjoedin Noor, keduanya mewakili suatu aliran politik tertentu yang menyeret ke suasana konflik di lembaga kenegaraan maupun respons di masyarakat. Presiden Soekawati mewakili aliran nasionalis-konservatif dan asiosiatif yang ingin mengulurkan tangan ke pihak Belanda, sesuatu yang sangat penting dalam proses pembangunan Indonesia seluruhnya, khususnya dalam ketatanegaraan federal atau serikat. Sebaliknya, Tadjoedin Noor seorang nasionalis-progresif-revolusioner yang mewakili golongan Republikan, yang melihat bahwa NIT tidak dapat dipisahkan dari RI, dan Makasar sebagai pusat pemerintahan NIT harus bekerjasama erat dengan Yogyakarta, pusat pemerintahan RI.[134]

Meskipun muncul kritik atas kehadiran NIT sebagai ciptaan dan tindakan sepihak H.J. van Mook, Ide A.A. Gde Agung menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Apa yang dicapai dalam Konferensi Denpasar untuk menghasilkan peraturan pembentukan NIT adalah hasil perundingan yang bebas dan demokratis antara wakil-wakil dari utusan daerah dengan van Mook. Namun diakui pula bahwa sikap yang sangat legalistik pihak Belanda tekah memunculkan kritik. Pihak Belanda yakin bahwa mereka masih berkuasa secara *de facto* dan *de jure* di Indonesia Timur, karena itu Belanda menginginkan agar hasil yang dicapai dalam

konferensi Denpasar dituangkan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan tatanegara Hindia Belanda. Untuk mewujudkan keinginan ini, maka pengesahan dan penetapan organisasi pemerintahan NIT dituangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda, Nomor 143 Tahun 1946.[135]

Usaha H.J. van Mook di atas jelas berangkat dari pandangan yang sangat legalistik, karena itu hasil Konferensi Denpasar kurang memiliki dampak politik. Bahkan, di beberapa kalangan muncul salah pengertian dan respons pro dan kontra. Respons pro dan kontra kemudian melahirkan polarisasi antara kelompok pendukung federalis dan kelompok pendukung unitaris. Selain itu, harus diakui bahwa kondisi dan proses politik di wilayah NIT sangat berbeda dengan perkembangan yang terjadi di wilayah kekuasan RI. Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara revolusioner pemerintah RI telah mengambil kekuasaan *de jure* dan *de facto* di seluruh Indonesia.[136] Akan tetapi, pernyataan pemerintah RI ini ditentang oleh pemerintah Belanda sejak rekolonialisasi dan kehadirannya kembali bersama-sama anggota Sekutu lainnya dan menduduki beberapa daerah secara tersebar. Pertentangan antara keduanya telah mengakibatkan perang, dan diadakannya perundingan-perundingan yang menghasilkan Persetujuan Linggajati.

Kedua belah pihak menyetujui bahwa kekuasaan *de facto* pemerintah RI diakui di Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan daerah-daerah di luarnya, terutama di Timur Besar atau Indonesia Timur, berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Hal ini berlaku sejak pendudukan tentara Sekutu pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946. Lebih-lebih pada akhir 1946 telah berhasil dibentuk NIT di Denpasar. Proses pembentukannya berlangsung secara evolusioner melalui perundingan-perundingan antara wakil-wakil daerah dengan Pemerintah Hindia Belanda yang pada akhirnya disahkan oleh perundang-undangan Belanda.[137]

Pembentukan NIT adalah praktek sistem ketatanegaraan federal secara sepihak oleh pemerintah Hindia Belanda. Langkah ini merupakan dasar persiapan pembentukan federasi yang lebih luas, yakni Negara Indonesia Serikat yang merdeka, berdaulat dan demokratis sesuai bunyi pasal 2 Persetujuan Linggajati.[138]Tindakan sepihak Belanda ini menimbulkan protes ketika konferensi berlangsung terutama dari kutub

Republikan, Mr. Tadjoeddin Noor, Mr. S. Binol, G.R. Pantouw sebagai wakil-wakil daerah Sulawesi Selatan, Ajoeba Warta Bone dan Tom Olie wakil-wakil dari Sulawesi Utara, Inchi Moch. Dachlan dari Sulawesi Tengah, J. Tatengkeng dari Sangihe dan Talaud, E.U. Pupella dari Maluku Selatan, I Made Mendra, I Gusti Bagus Oka dan Lalu Serinata dari Bali dan Lombok, I.H. Doko dari Timor.

Mereka menyampaikan pendapat dan pandangannya pada sidang-sidang selama konferensi berlangsung. I Made Mendra ketika diberi kesempatan menyatakan keinginannya agar Bali dipersatukan dengan Republik di Jawa yang merdeka. Beberapa wakil mengemukakan kecurigaan akan maksud-maksud ketatanegaraan dari pemerintah Belanda dan Hindia Belanda. A.A. Gde Agung menyatakan bahwa sejak Malino setengah tahun telah berlalu tidak ada pembaharuan-pembaharuan yang terjadi. Raden Nuna Nuraksa (Lombok) menyebut perasaan penjajahan kuno masih terdapat pada orang-orang, karena permintaan yang bersifat kebenaran sering ditolak. Tadjoedin Noor menuntut kemerdekaan bagi NIT. Semua kecurigaan pendapat wakil-wakil daerah itu ditanggapi van Mook, pemangku pemerintah Hindia Belanda, secara diplomatis, bahwa masalah penggabungan daerah, pembaharuan dan kemerdekaan NIT baru bisa dipecahkan setelah Persetujuan Linggajati diratifikasi dan dilaksanakan.[139]

Sementara itu, di luar gedung pertemuan tempat konferensi berlangsung, di Bali Hotel Denpasar, terdapat kebutalan tekad para pemuda dengan menyebarluaskan propaganda bahwa "Kemerdekaan 100%" tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain itu, dalam rapat Parrindo setelah Konferensi Denpasar, yang dihadiri 100 orang, mendengarkan penjelasan dari pengurus partai tentang penentuan sikap partai menunggu keputusan KNIP meratifikasi Persetujuan Linggajati.[140]

Selama berlangsungnya konferensi di Denpasar Bali, kelompok-kelompok pendukung Republik di Timor juga bermunculan. Mereka bergerak melalui saluran organisasi sosial politik. Kelompok Republik di Sumbawa Besar mengorganisasikan diri dalam Gerakan Sosialis Indonesia (GESINDO), setelah pembubaran cabang Partaij Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tanggal 19 Desember 1946, mereka menegaskan pandangan politiknya untuk mengakui hanya dan satu-satunya

kekuasaan Republik dan menolak ketiga konferensi (Malino, Pangkalpinang dan Denpasar).[141]

Begitu juga di Sumbawa, organisasi kelompok Republik yang menyebut dirinya Badan Penerangan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) di bawah pimpinan seorang dokter pemerintah Hindia Ario Tedjo, mengadakan rapat pada tanggal 22 Desember 1946. Seusai rapat, mereka melakukan aksi menempelkan plakat memakai kertas merah putih bertuliskan "100 Persen Merdeka". Pada pertemuan sebelumnya, peserta rapat juga mendukung kedua tokoh Republikan, dr. M.S. Ario Tedjo dan Sumadi, dan menyatakan bahwa rakyat Sumbawa tetap berdiri di belakang RI. Kemudian di Bima, sebuah organisasi Angkatan Demokrasi Luhur (ADIL) dibentuk di bawah pimpinan Noer Soelaiman pada 7 Januari 1946. Tujuannya adalah mengajak semua lapisan masyarakat atas dasar demokrasi mendukung Republik menjadi bagian Negara Indonesia Serikat sesuai bunyi pasal 17 Persetujuan Linggajati.[142]

Perlu ditegaskan bahwa kekhawatiran masuknya pengaruh Republik di kalangan wakil-wakil daerah, sebagai peserta konferensi, tampak dari tindakan aparat keamanan NICA yang melarang wartawan Republik meliput jalannya acara konferensi di Denpasar. Kemudian terjadi satu persitiwa yang dikenal "Insiden Denpasar", di mana tiga orang wartawan Republik—M. Loebis, Mendoer dan Sjaaf Aat—dipulangkan ke Jakarta dengan tuduhan sebagai propagandis Republik yang membangkitkan semangat pemuda.[143] Kehadiran wartawan-wartawan Republik ini oleh aparat keamanan NICA dikaitkan dengan iring-iringan massa mengiringi upacara pemakaman jenazah almarhum Letkol I Gusti Ngurah Rai di tempat kelahirannya di desa Carangsari, Badung Utara pada 26 Desember 1946.

Ungkapan belasungkawa oleh warga masyarakat menurut adat Bali dianggap demonstrasi besar-besaran oleh pihak Belanda. Di Denpasar, sekelompok pemuda merespons positif panggilan bagi dorongan menuju kemerdekaan 100%, yang jelas terbukti dari dua demonstrasi besar yang digerakkan pada kesempatan pemakaman Letkol I Gusti Ngurah Rai yang tewas tertembak pada 20 Nopember 1946 di Marga, Tabanan.[144]

Demonstrasi pertama terjadi pada 26 Desember 1946, ketika mereka berangkat, dengan enam mobil penuh orang, ke Carangsari

untuk menghadiri pemakaman jenazah almarhum. Perjalanan ini dihentikan oleh aparat keamanan NICA atas instruksi Residen Bali dan Lombok, M. Boon. Demonstrasi kedua diadakan pada tanggal 29 Desember 1946, tepat pada upacara tiga hari (*ngetelunin*). Oleh keluarga hari itu telah dipakai kesempatan untuk memobilisasi massa. Ketika itu hadir lebih dari 1000 orang dengan pengawalan ketat. Akan tetapi, insiden ini memberikan bukti bahwa suara anti Belanda terus berlangsung meskipun dilakukan penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang bergerak secara rahasia. Pulau Bali sejak dahulu selalu berorientasi ke Jawa, seperti ditunjukkan para pemuda pelajar yang memasuki sekolah menengah dan sekolah tinggi di Jawa yang tetap berhaluan pro-Republik. Apabila Persetujuan Linggajati diratifikasi, berarti aliran politik yang muncul di Bali jelas akan berorientasi ke Jawa. Kondisi ini sangat menyulitkan pemerintah Belanda setempat.[145] Karena itu, wartawan-wartawan Republik di Jakarta menyatakan dalam tulisannya yang diberi tajuk "Belanda di Bali duduk di atas dinamit".[146]

6.11. Refleksi

Respons terhadap berita Proklamasi di Sunda Kecil menghadirkan kondisi paradoks, bahkan hingga saat ini, terutama dari sudut pandangan resmi pemerintah pusat dan masyarakat daerah, sebagaimana disuarakan institusi veteran pejuang. Negara RI atau pemerintah pusat memberikan gelar pahlawan nasional terhadap sosok pejuang I Gusti Ngurah Rai yang memilih cara perjuangan fisik bersenjata, dan Sosok pejuang Ide A.A. Gde Agung yang memilih cara perjuangan non-fisik diplomasi.

Kedua tokoh di atas sama-sama merespons berita Proklamasi di daerah. Dan keduanya adalah representasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses revolusi Indonesia, yang bercirikan proses dialektika antara perang dan diplomasi selama kurun waktu 1945–1949. Ciri-ciri inilah yang membedakan revolusi Indonesia dengan revolusi-revolusi di belahan dunia lain.

Paradoks yang terjadi dan membayangi generasi sekarang perlu diberikan pemahaman bahwa kehidupan kepahlawanan senantiasa dilekati ciri-ciri yang paradoks. Kita bisa belajar dari surat-surat I Gusti

Ngurah Rai sebagai komandan militer Sunda Kecil kepada Overste ter Meulen, komandan militer NICA, sebagai berikut:

> "..... saya bukan kompromis. ..... kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita itu tercapai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Soal perundingan kami serahkan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik."

Perjuangan Igusti Ngurah Rai berperang terus hingga tewas pada perang Puputan Margarana 20 November 1946.

Sementara sosok Ide A.A. Gde Agung telah memilih cara perjuangan melalui perundingan dan diplomasi, terutama ketika dia lengser sebagai raja Gianyar (1943 – 1946) dan menyerahkan kekuasaan kepada adiknya A.A. Gde Oka pada akhir tahun 1946. Kiprah Ide A.A. Gde Agung dilanjutkan di luar swapraja Gianyar, karena (1) Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi, dan (2) Ide A.A. Gde Agung sangat aktif dalam perjuangan diplomasi—diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri NIT di Makasar, kemudian menjadi Perdana Menteri NIT (1947–1949).

Berkat kecerdasan diplomatiknya, ia telah menjadi inisiator dan mediator menghadapi Belanda dan Republik Indonesia yang bersengketa selama periode revolusi Indonesia. Arsitek dan penggagas model federalism nasional dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah berhasil mengalahkan model federalism van Mook dalam Negara Indonesia Serikat (NIS). Federalisme dalam RIS memutus hubungan sama sekali dengan negeri induk dibawah Ratu Belanda dan pemerintahan hanya oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebaliknya Federalisme van Mook dalam NIS menghendaki hubungan di bawah negeri induk Ratu Belanda tetap dilakukan selama masa transisi. Realitas yang terjadi adalah Ratu Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada puncak perjuangan diplomasi pada akhir Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949. Memang telah terjadi paradoks. RI Prokalamasi menjadi pengusung kemerdekaan dan RIS adalah penerima serta pengusung kedaulatan. Akan tetapi, memasuki tahun 1950 kedua pengelola Negara (RIS dan RI) berunding lagi karena desakan dari rakyat di negara-negara bagian yang menghendaki bentuk kesatuan unitaris. Gerakan rakyat dan para elit di pusat-pusat kekuasaan akhirnya sampai pada pilihan bentuk unitaris, yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), yang berlaku bagi segenap bangsa di seluruh tanah air Indonesia, kecuali Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Pemerintah Indonesia menggabungkan Irian Barat menjadi bagain dari Indoneia. Dan itu menjadi agenda perjuangan diplomasi Ide A.A. Gde Agung sejak menjabat Perdana Menteri NIT sampai KMB, RIS dan NKRI.

Dapat dikatakan bahwa respons berita Proklamasi berimplikasi pada terjadinya polarisasi yang paradok dikalangan elite tradisional dan modern. Dikalangan elite tradisional, raja-raja mendukung RI Proklamasi dengan cara diam, cukup dengan pernyataan seperti oleh Sultan Bima pada tanggal 22 November 1945, sama dengan pernyataan Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada September 1945, dan juga raja-raja di Timor, Buleleng dan Jembrana di Bali. Ada juga yang menempuh cara mengundurkan diri seperti yang dilakukan Tjokorda Alit Ngurah, Raja Badung di Puri Satria. Sebagian lainnya mendukung NIT yang masih dibawah negeri induk Ratu Belanda termasuk Tjokorda Gde Sukawati, Presiden NIT.

Namun, di antara raja-raja tesebut patut disebutkan Ide A.A. Gde Agung, Raja Gianyar-Bali. Melalui jalur formal ketatanegaraan, dia berjuang dengan diplomasi untuk memeroleh kedaulatan, yang kemudian melahirkan kesepakatan nasional antara RI Proklamasi pengusung kemerdekaan dan RIS pengusung kedaulatan, menjadi NKRI pewaris kemerdekaan dan kedaulatan hingga sekarang. Perjuangan dengan cara-cara moderat bagi elite modern yang kooperatif di daerah ditempuh oleh I.H. Doko di Timor. Sebaliknya, perjuangan dengan cara moderat bagi elite modern yang non-kooperatif ditempuh oleh Mr. Gusti Ketut Pudja, Gubernur Sunda Kecil yang ditangkap dan ditahan oleh pasukan NICA, sama seperti yang dialami Gubernur Sulawesi Dr. G.S.S. Jacob Ratulangi.

Respons berita Proklamasi di Sunda Kecil berimplikasi pada cara-cara perjuangan yang dipilih oleh kaum elite bersama pengikutnya. Cara-cara perjuangan yang dipilih semuanya bertujuan memertahankan kemerdekaan dan memeroleh kedaulatan selama bergejolaknya revolusi Indonesia. Implikasi dari perjuangan mereka telah mengisi lembaran sejarah berita Proklamasi, dan sejarah Indonesia secara umum, hingga sekarang dan masa yang akan datang.

Catatan Akhir :

[1] Ide A.A. Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali* (Jakarta: YOI, 1993), hlm: 224, Ktut Tantri, *Revolusi di Nusa Damai* (Djakarta: Gunung Agung, 1965), hlm: 228.

[2] Nyoman S. Pendit, *Bali Berjuang* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm: 69-70.

[3] Charles Tilly, *The Vendee* (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1994), Chap. 9; R. B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm: 112-113.

[4] M. Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* (Mataram: Penerbit Lengge, 2004), hlm: 175-76.

[5] Kempen RI, *Sunda Kecil* (Jakarta: Kempen, 1953), hlm: 172.

[6] Dokumen No.53, "Fd. Directeur van Binnenlands Bestuur (van der Plas) aan Lt. G.G. (van Mook), 19 Nov 1945; S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, II, 9 Nov-31 Des 1945 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1972), hlm: 121-123.

[7] "Sang Merah Putih Berkibar di Bali, Seluruh Rakjat Berdiri di Belakang Pemerintah Republik", *Warta Indonesia*, Djoemat 26 Oktober 1945, Th I, No. 20 (Semarang); *Mikrofilm Perpusnas* (Jakarta), hlm: 2; S S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, III, 1 Jan-30 Mart 46, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1972), hlm: 581; Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 85.

[8] I.H. Doko, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hlm: 110; M. Widiyatmika, dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1941) Daerah Nusa Tenggara Timur* (Kupang: Proyek IDKD NTT Depdikbud, 1984), hlm: 42-43; Paul J.A. Doko. *100 Tahun I.H. Doko: Mengenang Perjuangan dan Pengabdian Sang Pahlawan Nasional* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm: 94.

[9] G. Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm: 174.

[10] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 70-71.

[11] *Ibid.*

[12] Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm: 12-22; James C. Scott (Penyunting), *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: YOI. 1993), hlm: 1-9.

[13] Gubernur Pudja berusaha memerkuat administrasinya dengan berusaha menggalang kerjasama dengan raja-raja. Banyak pemimpin pemuda, termasuk yang berkasta rendah (*jaba*) sepakat bahwa, para raja tidak boleh

dimusuhi, tetapi sedapat mungkin dibina sebagai sekutu. Revolusi, bukanlah anti raja atau antifeodal melainkan pro-merdeka, G. Robinson, 2006, *op.cit.,* hlm: 183; Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 80-81.

[14] Pada tanggal 10 Oktober 1945 diadakan rapat dengan raja-raja di Bali yang memutuskan untuk membentuk KND di tiap-tiap swapraja guna menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama-sama raja-raja yang berkuasa di daerah itu, Ide A.A. Gde Agung, *Dari NIT ke RIS* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1985), hlm: 43-44.

[15] Dokumen No. 53, S.L. van der Wal, II, *op.cit.,* hlm:123; Kempen RI, 1953, *op.cit.,* hlm: 112; L. Wacana, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1977/78), hlm: 182.

[16] Kempen RI, 1953, *op.cit.,* hlm: 171-172.

[17] *Ibid.*, hlm: 219-220; M. Widiyatmika, dkk. *op.cit.,* hlm: 46-47.

[18] *Ibid.*, hlm: 193-194.

[19] G. Robinson, 2006, *op.cit.*, hlm: 186.

[20] *Ibid.*, hlm:156; I Gst. Ngurah Gorda, *Biografi A. A. Pandji Tisna: Raja Buleleng, Budayawan, Pendidik dan Pelopor Pariwisata* (Denpasar: Asta Brata Bali, 2005), hlm: 21-23.

[21] G. Robinson, *op.cit.,* hlm: 187.

[22] Ide A. A. Gde Agung, 1993, *op.cit.,* hlm:225.

[23] Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 81.

[24] *Ibid.,* hlm: 79; C. Tilly, *The Vendee.* Cambridge: Harvard Univ. Press, 1994, Chap. 9.

[25] *Ibid.,* hlm: 79-80.

[26] *Ibid.*

[27] Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 71; A. A. Gde Putra Agung, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Bali* (Jakarta: Depdikbud, 1992/93), hlm: 38.

[28] G. Robinson, 2006, *op.cit.,* hlm: 184.

[29] Dokumen No. 313, "verslag....van Bali van commanding officer Amacab (van Beuge) over de periode 2-15 Maart 1946", S.L. van der Wal, III, *op.cit.,* hlm: 581-582.

[30] G. Robinson, 2006, *op.cit.,* hlm: 185, Nyoman S. Pendit., *op.cit.,* hlm:123-126.

[31] "Dokumen No. 46 dan 47", dalam S.L. van der Wal, *Offiel. Besch. Betref. de.Ned.Indon.Betrek, 1945-1950,* I, *'s-Graven-hage,* hlm: 79-80.

[32] *Ibid.*; P.M.H Groen, *Marsroutes en Swaalsporen: Het Nederlands Militair Strategisch Beleid in Indonesie, 1945-1950* (S-Gravenhage: SDU uitgeverij, 1991), hlm: 23-25, 27.

[33] I.H. Doko, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di NTT* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hlm: 110-111; M. Widiyatmika, dkk., *loc.cit.*; Paul J.A. Doko, *loc.cit.*

[34] *Ibid.*, hlm: 114-115, Tim Penyusun, *Monografi Daerah NTT,* (Jakarta: Depdikbud, tth), hlm: 25.

[35] *Ibid.*, I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial,* 1915-1950 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm: 332-333, 340; M. Widiyatmika, dkk., *op.cit.*, hlm: 47.

[36] "Timor en Onderhoorigheden", S.L. van der Wal, II, *op.cit.*, hlm: 33.

[37] *Ibid.*, hlm: 34; R. Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik, terj.* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm: 209-212.

[38] Peristiwa Bendera 27 Oktober 1945, di Pelabuhan Buleleng menyangkut pemasangan bendera yang silih berganti antara bendera Belanda dan bendera Indonesia. Bendera Indonesia yang sudah berkibar di depan kantor pemerintah sejak 23 Agustus 1945 digantikan dengan bendera Belanda oleh awak kapal Belanda "Abraham Grijns", kemudian digantikan lagi dengan bendera Indonesia. Pada peristiwa itu seorang pemuda yaitu I Ketut Merta dari Banjar Liligundi, Singaraja tewas tertembak peluru tentara Belanda. Nyoman S. Pendit, *Bali Berjuang* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm: 82-91; Kedatangan Belanda ini menimbulkan terjadinya insiden-insiden pertama di Bali. Pada tanggal 20 Oktober 1945, mendaratlah tentara Belanda. Mereka segera menurunkan Sang Merah Putih yang berkibar di pantai dan menggantinya dengan bendera Belanda dan seterusnya dijaga oleh tentara Belanda siang malam. Seminggu kemudian pemuda-pemuda Singaraja mengambil tindakan menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera Merah Putih. Pemuda Bali pertama yang gugur adalah Ketut Merta. Insiden yang terkenal ini adalah insiden "Bendera", di depan Gedung KPM Buleleng. A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1: Proklamasi,* (Bandung: Angkasa, 1977), hlm: 433.

[39] Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 137.

[40] "Dokumen No. 313", S.L. van der Wal, III, *op.cit.,* hlm: 580.

[41] *Ibid.*

[42] G. Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm 201-203.

[43] Dalam catatan kakinya disebutkan bahwa, masalah Indonesia dibahas di PBB untuk pertama kalinya pada Januari 1946. Dalam penilaian L.G.G van Mook

tidak diragukan bahwa, segala perhatian terarah ke Belanda pada Maret 1946, khususnya di Bali, Sunda Kecil. Tidak munculnya operasi Belanda di Bali dalam *New York Times* dapat dianggap sebagai indikasi kedamaian yang menyesatkan dalam pendaratan itu, atau sebagai bukti bahwa dunia, sesungguhnya tidak menyoroti Bali, *Ibid,* hlm 204.

[44] Seperti dikutip G. Robinson, *Ibid.* Penentang penggunaan metode kekerasan dan pendekatan kekuatan lainnya ialah Letkol F. H. ter Meulen. Dia terang-terangan menolak penggunaan kekerasan, kecuali tidak ada pilihan lain, *Ibid.* Pendekatan yang terkendali, kuat tapi manusiawi, akan memberi hasil terbaik dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perilaku yang damai dan tenang tidak pernah dianggap sebagai tanda kelemahan, *Ibid,* hlm 204-205.

[45] *Ibid.*, hlm: 206-207.

[46] "Dokumen No. 313", S. L. van der Wal, III, *loc.cit.*

[47] G. Robinson, *op.cit.*, hlm: 210.

[48] "Dokumen No. 323", S. L. van der Wal, I, *op.cit.*, hlm: 566-570; "Dokumen No. 313", S. L. van der Wal, III, *op.cit.*, hlm: 584; Ida A.A. Gede Agung, *Dari NIT ke RIS* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1985), hlm: 46.

[49] "Dokumen No. 313", S. L. van der Wal, III, *op.cit.*, hlm: 585, Ide A.A. Gede Agung, *op.cit.*, hlm: 47.

[50] "Dokumen No. 313", S.L. van der Wal, IV, *op.cit.,* hlm: 585-286; Selain Gubernur Pudja ditangkap pula Ketua KNI, I.B. Putra Manuaba dan Kepala Jawatan Pajak Gusti Nyoman Wirya. Ketiganya diangkut dengan Jip Militer ke Denpasar dan ditahan di sana. Serentak setelah penangkapan pemimpin pemeritahan RI Sunda Kecil ini, di daerah Gianyar bergolak situasi yang sangat cepat, PPN bekerjasama dengan tentara NICA memburu para pemuda pejuang Republik, Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 144-145.

[51] "Dokumen No. 313", S.L. van der Wal, III, *op.cit.,* hlm: 586-591; sebagian besar rakyat masih setia kepada rajanya. Hal ini adalah bukti ikatan patron-klien tradisional (*gusti-panjak*, raja-rakyat) masih kuat di Bali dan Sunda Kecil, James C. Scott (Penyunting), *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: YOI, 1993), hlm: 11-24; Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm: 12-22.

[52] "Dokumen No. 333" dan No. 358, S.L. van der Wal, III, *Ibid.*, hlm: 630, 669.

[53] G. Robinson, *op.cit.,* hlm: 189-193.

[54] *Ibid.*, hlm: 195.

[55] Lampiran "Dokumen No. 82", S.L. van der Wal, IV, *op.cit.,* hlm: 195-196; seperti dikutip juga G. Robinson, *op.cit.,* hlm: 207-208.

[56] *Ibid.*, hlm: 209.

[57] Menyusul pula penahanan aparat sipil (KNI) di Lombok yaitu Hasmosuwignjo, Soewodjo dan Wayan Roema, Kempen RI, *Sunda Ketjil,* (Djakarta: Kempen RI, 1953), hlm: 114; G. Robinson, *loc.cit.*

[58] Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), Bab 5, Bab 8; Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), Bab VI, Bab VII dan Bab VIII; James C. Scott (Penyunting), *op.cit.*, hlm: 26-28.

Kahin, Audrey R., *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan.* Jakarta: Grafiti, 1980, hlm: 12-16; A.H. Nasution, 3, *Diplomasi Sambil Bertempur, op.cit.,* hlm: 304; The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I,* (Jakarta: Gunung Agung, 1967), hlm: 133.

[60] Persoalan "non" dan "co" terinspirasi dari gerakan non-cooperative Mahatma Gandhi di India. Di Indonesia menjelma menjadi taktik kaum pergerakan nasional, organisasi-organisasi pergerakan yang mau bekerjasama (cooperative) dan menolak (non-cooperative) dengan pihak pemerintah berkuasa Belanda. Kedua kelompok ini bercita-cita sama yaitu kemerdekaan Indonesia, Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta: Pembangunan, 1970), Bab III. Konsep "non" dan "co" sesudah kemerdekaan tercapai menjadi konflik kepentingan bagi pendukungnya. Konfliknya tidak lagi taktik, tetapi menyangkut "prinsip" antara golongan "non" membela, memertahankan kemerdekaan dengan golongan "co" yang bekerjasama dengan rekolonialisasi Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia selama periode revolusi nasional Indonesia, Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia* (Djakarta: Pembangunan, 1966), Bab II.

[61] Golongan-golongan pemuda revolusioner muncul menjelang proklamasi kemerdekaan dan peranannya di Jakarta dijelaskan oleh Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Widjaja, 1975), hlm: 29-37. Golongan "co" dari aristokrat tradisional, raja-raja swapraja, sebagian besar menyatakan mendukung kembalinya kekuasaan Belanda NICA pada tanggal 29 Maret 1946. Raja-raja dengan pasukan milisi kerajaannya yang anti Republik: BKN di Klungkung, PPN di Gianyar, AIM di Karangasem, Anti Pemberontak (AP) dari Sangsit, Buleleng, yang jelas-jelas membantu tentara NICA melawan perjuangan pemuda, mendorong terjadinya kontak senjata yang terus menerus di seantero Bali, Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 161-167.

[62] Adam Malik, *loc.cit.,* C. Tilly, *The Vendèe* (Cambridge: Harold Univ. Press, 1994), Chap. 13 dan Chap. 9; C. Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Michigan: Ann Arbor, 1978), Bab 7; W.F. Wertheim, *Gelombang Pasang*

Emansipasi: Evolusi dan Revolusi yang Diperbaharui (Jakarta: Garba Budaya, tth), Bab VIII, dengan tajuk "Prospek bagi revolusi atau kontra-revolusi dibawah populisme", hlm: 420-426.

[63] C. Tilly, 1994, *op.cit.,* Chap. 9.

[64] R. Hardjawiganda, dkk., *Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali* (Jakarta: Pusjarah ABRI, 1982), hlm: 56-57.

[65] *Ibid.*, hlm: 59.

[66] R. Hardjawiganda, *op.cit.,* hlm: 70-71.

[67] *Ibid.,* hlm: 93-98.

[68] *Ibid.*, hlm: 99-100; Gst. Bagus Meraku Tirtayasa, dkk., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RakyatBuleleng 1945 – 1950*, (Bandung: Ganeca Exact, 2000), hlm: 78-80.

[69] R. Hardjawiganda, *op.cit.,* hlm: 104-106.

[70] *Ibid.*, hlm: 107-114.

[71] *Ibid.*, hlm 114; Nyoman S.Pendit, *op.cit.,* hlm: 158-160; A.H. Nasution, 3, *op.cit.,* hlm: 301.

[72] "Pertempuran Laoet di Selat Bali", *Kedaulatan Rakjat*, Th. I, No. 176, Rebo Wage 17-04-'46 (Jogjakarta), hlm: 1; R. Hardjawiganda, *op.cit.,* 115-119.

[73] *Ibid.*, hlm: 125-127; Ketika penyerangan atas pos NICA di kota Negara, seorang bekas tentara Jepang, Kataoka, ikut memihak pasukan Markadi, kemudian dia diberi nama "Bung Selamet" atas usul Sudijono, anggota pasukan Markadi, I Ketut Wedha, *Studi Tentang Revolusi Fisik di Daerah Jembrana,* (Jembrana: tp, 1990), hlm: 53, 40-41.

[74] R. Hardjawiganda, *op.cit.,* hlm: 127-130, Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 174-175.

[75] Nyoman S. Pendit, *op.cit.,* hlm: 165-166. Sebutan "NICA *Gandek*" muncul ketika seorang anggota dari mereka jatuh dan tertangkap tangan para pemuda gerilya. Dia menggendong kotak anyaman tempat sirih, yang lazim dalam bahasa Bali disebut "*gandek*". Ternyata bukan sirih isinya, melainkan senjata pistol dan surat-surat kepercayaan dari Belanda NICA, untuk memata-matai gerak gerik dan tempat keberadaan para pemuda gerilya. Sejak penemuan itu, setiap mata-mata dan kaki tangan Belanda NICA dikenal dengan sebutan "NICA *Gandek*", *Ibid.*, hlm: 166.

[76] I Gst. Ngurah Pindha, *Gempilan Perjuangan Phisik Pasukan Induk Ngurah Rai.* Denpasar: Upada Sastra, 1990, hlm: 1.

[77] Nyoman S. Pendit, *op,cit.,* hlm: 162.

[78] Gst. Bagus Meraku Tirtayasa, dkk., 2000, *op.cit.,* hlm: 76-77.

[79] *Ibid*, hlm: 80-81; Nyoman S. Pendit, hlm: 161-162.

[80] NICA menyebarkan mata-mata sampai ke pelosok-pelosok. Diantaranya ada yang ditangkap oleh rakyat. Mr. Djelantik, adik raja Buleleng, telah berkhianat, memihak NICA. Dia memaksa pegawai bekerja bersama-sama dengan NICA, "Keadaan di Bali"; *Kedaulatan Rakjat*, tahun I, No. 185, Sabtu Wage, 27-04-'46, (Jogjakarta), hlm: 1; I Gst. Ngh. Rai Mirsha, "Revolusi Fisik 1945 di Bali", *Laporan Penelitian* Universitas Udayana (Denpasar), 1985, hlm: 66-68.

[81] G. Robinson, *op.cit.*, hlm: 208-209; I Gusti Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 42.

[82] I Gusti Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 77-78.

[83] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 199; I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 92.

[84] "Kekoeasaan 'de facto' Haroes Berlakoe Diseloroeh Indonesia. Tentara Kita Disempoernakan Menoeroet Soesoenan Tentara International.", *Kedaulatan Rakjat*, No. 196, Jumat Pahing 10 Mei 1946 (Jogjakarta), hlm: 1.

[85] *Ibid.*, "Soempah Anggota Pimpinan Tentara", *Ibid.*, No. 209, Sabtoe Paing 25 Mei 1946.

[86] Istilah *long march* digunakan oleh Nyoman S. Pendit, yang diberi arti perjalanan panjang induk pasukan di bawah Ngurah Rai yang disertai perang gerilya dari Munduk Malang di lereng Gunung Batukaru ke Gunung Agung selama dua bulan (Juni-Juli 1946), Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 177-189.

[87] I Gusti Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 79-84; I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 66-74.

[88] I Gst. Bagus Meraku T,.dkk., 2000, *op.cit.*, hlm: 85.

[89] *Ibid.*, hlm: 172; I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 128; A.A. Gde Ngurah, *loc.cit.*; Digambarkan bahwa betapa berat perjuangan selama hampir dua bulan menempuh perjalanan panjang dan betapa beratnya rakyat, laki perempuan menyiapkan logistik makanan dengan menempuh jarak berkilo-kilo meter sambil menghindari patroli NICA.

[90] I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 195, 201, 203.

[91] *Ibid.*, hlm: 205; I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 124.

[92] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 183; I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 216; Berbeda dengan informasi pelaku adalah laporan dokumen Belanda yang menyatakan bahwa setelah kontak senjata itu, seorang sersan Eropa tewas, "Dokumen No. 54", S.L. van der Wal, V, *op.cit.*, hlm: 147.

[93] Laporan Belanda menyebutkan bahwa gerombolan I Gusti Ngurah Rai mundur untuk menuju Buleleng yang diperkirakan akan sampai pada 15 Juli 1946, "Dokumen No. 54", S.L. van der Wal, V, *op.cit.*, hlm: 147; A.A. Gde

Ngurah, *op.cit.*, hlm: 1; I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 217-218; I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 126.

[94] A.A. Gde Ngurah, *op.cit.*, hlm: 3; I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 230.

[95] "Dokumen No. 54", S.L. van der Wal, V, *op.cit.*, hlm: 147; Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 185.

[96] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 187; I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 256; A.A. Gde Ngurah, *op.cit.*, hlm: 7.

[97] I Gst. Ngr. Pindha, *op.cit.*, hlm: 263-268.

[98] *Ibid.*, hlm: 269.

[99] *Ibid.*, hlm: 270.

[100] I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 138-139.

[101] "Pertempoeran di Bali","Watoe dodol diserang 50 kali", *Antara*, 5 Agustus 1946, hlm: 124.

[102] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 208-209; I Gusti Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 296; A.H. Nasution, 4, *op.cit.*, hlm: 117-118.

[103] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm 213-214.

[104] *Ibid.*, hlm: 216.

[105] *Ibid.*, hlm: 218-219, A.H. Nasution, 4, *op.cit.*, hlm: 119-120.

[106] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 220-221; A.H. Nasution, 4, *op.cit.*, hlm: 121.

[107] *Ibid.*, Nyoman S. Pendit, *loc.cit.*

[108] Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.*, hlm: 127.

[109] *Ibid.*, hlm: 128; Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 221-222; A.H. Nasution, 4, *op.cit.*, hlm: 121; Proses pembauran nilai budaya "Puputan" antara tradisi dan modern dalam merespons revolusi dapat disebut fenomena perubahan dalam proses alkulturasi, termasuk juga gerakan nasionalisme, Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi, II* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm: 102.

[110] I Gst. Ngurah Pindha, *op.cit.*, hlm: 304-305.

[111] *Ibid.*, hlm: 306-308.

[112] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 226; Tindakan refresif totaliter militer Belanda NICA untuk memertahankan keamanan dan ketertiban diterapkan selama pergolakan, R. Dahrendorf, *op.cit.*, hlm: 394-400.

[113] Nyoman S. Pendit, *op.cit.*, hlm: 226-227; I Gst. Bagus Meraku T., 1994, *op.cit.*, hlm: 153-154.

[114] G. Robinson, *op.cit.,* hlm: 230; G. McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca: Cornell Univ. Press, 1952, Bab VII, VIII, IX dan X; Anthony J. S. Reid, 1996, *op.cit.,* Bab 4 dan Bab 5; Sartono Kartodirdjo, 1981, *op.cit.,* hlm: 4-5; A.H. Nasution, 2, *op.cit.,* hlm: 89-90; G. Kraaf en G. Teitler, *De Verenigde Oost-Indische Compagnie: Tussen Oorlog en Diplomatie* (Leiden: KITLV Uitgeverij, 2002), hlm: 3-4.

[115] "Pembentoekan Partai Ra'jat Indonesia", *Penjoeloeh Bali,* Djoemat 6 Desember 1946, *op.cit.*, hlm: 1.

[116] *Ibid.*, hlm: 1-2.

[117] *Ibid.*, hlm: 2.

[118] "Dokumen No. 1", S.L. van der Wal, V, *op.cit.,* hlm: 1-2; Ide A.A. Gde Agung, *Dari NIT ke RIS* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 1985), hlm: 93-95.

[119] *Ibid.*, hlm: 96; "Dokumen No. 1", S.L. van der Wal, V, *loc.cit.*

[120] Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 98; "Dokumen No. 54", S.L. van der Wal, V, *op.cit.,* hlm: 146-147.

[121] "Dokumen No. 2 dan No. 3", S.L. van der Wal, V, *op.cit.,* hlm: 3-4; W.A. van Goudoever, *Malino Maakt Historie* (Batavia: RvD, 1946), hlm: 54-60; Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 102.

[122] *Ibid.*, hlm: 103-106.

[123] *Ibid.*, hlm: 108-112; "Dokumen No. 4", S.L. van der Wal, V, *op.cit.,* hlm: 8-15; Ketika pembicaraan pembentukan dua negara bagian, muncul keinginan agar kepulauan Sunda Kecil menjadi negara tersendiri dan merasa keberatan terhadap penggabungannya dalam negara Timur Besar dengan alasan ikatan kultural yang terbentuk antar daerah di Sunda Kecil, "Dokumen No. 15", *Ibid.*, hlm: 41-43.

[124] "Repoeblik Indonesia Satu Tahoen: Pidato Radio Wakil Presiden, Drs. Mohammad Hatta", *Antara,* 16-8-1946 (Jakarta: ANRI), hlm: 17-18.

[125] George McTurnan Kahin, 1952, *op.cit.,* hlm: 250; Supomo, *Negara Indonesia Serikat dan Uni Belanda Indonesia* (Djakarta: Jajasan Dharma, 1948), hlm: 5-13.

[126]Panitia Tujuh adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Malino, dengan tegas bersama-sama wakil pemerintah Hindia Belanda, yaitu Komisariat Pemerintahan Umum di Jakarta merundingkan pembaharuan susunan ketatanegaraan di Timur Besar, Borneo, Bangka, Belitung dan Riau. Anggota dari Panitia Tujuh yang ditunjuk oleh konferensi adalah: Tjok. Gde Raka Soekawati (Bali), Nadjamoedin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan), E.D. Dengah (Minahasa), Kapten Tahja (Maluku Selatan), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan), Oeray Saleh (Kalimantan), dan dr. Liem

Tjae Le (Bangka), W.A. van Goudoever, 1946, *op.cit.,* hlm: 49-58; Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 115.

[127] *Ibid.*, hlm: 140-142; ARC. Borneo & Groote Oost, I, *loc.cit.*, W.A.van Goudoever, 1947, *op.cit.,* hlm: 17-20.

[128] ARC. Borneo & Groote Oost, *Kort Overzicht..., op.cit.,* hlm: 8.

[129] *Ibid.*, hlm: 9-10, 80-81; ARC. Voor Borneo en De Groote Oost, *De Coferentie .....*, II, *op.cit.,* Lampiran IV; "Negara Indonesia Timoer Telah Lahir", Toean Tjok Gde Rake Soekawati President, Toean M.A. Tadjoedin Noor, Ketoea Parlemen Sementara", *Penjoeloeh Bali,* Djoemat 27 Desember 1946, *op.cit.,* hlm: 1-2.

[130] "Pidato P.J.M. Presiden Negara Indonesia Timoer pada Persantapan Penghabisan Moe'tamar Denpasar", *Ibid.*, Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 174-175.

[131] *Ibid.*, hlm: 176, "Pidato P.J.M. Letnan Gubernoer Djenderal", *Penjoeloeh Bali,* Djoemat 27 Desember 1946, *loc.cit.*

[132] *Ibid.*, Ide A.A. Gde Agung, 1985, *loc.cit.*

[133] *Ibid.*, Presiden Tjok. Rake Soekawati beserta Toean Nadjamoedin Daeng Malewa seusai konferensi berangkat ke Jakarta berkonsultasi mengenai pembentukan kabinet NIT pada tanggal 31 Desember 1946, *Penjoeloeh Bali,* Selasa 31 Desember 1946, *op.cit.,* hlm: 2.

[134] *Ibid.*, ARC. Borneo & Groote Oost, *Kort Overzicht..., op.cit.,* hlm: 10-12

[135] *Staatsblad* 1946/143; Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 77; Nyoman S. Pendit, dalam bukunya menyatakan bahwa, sidang-sidang selama Konferensi Denpasar, sejak 18-24 Desember 1946 diatur dan diselenggarakan oleh arsitek besar kolonialisme modern separatis H.J. van Mook berhasil, yang disusul dengan tindakan-tindakan legalistik formal: (1) mengesahkan Toean Tjok Gde Rake Soekawati, sebagai "Presiden" NIT dan dilantik oleh Letnan Gubernur General, dibekas gedung Raad van Indie, Jakarta, pada tanggal 13 Januari 1947. Saat yang sama dilantik pula kabinet NIT dan Perdana Menteri NIT, yakni, Nadjamoedin Daeng Malewa; (2) Letnan Gubernur General menyumpah Toean Mr. Tadjoedin Noor sebagai Ketua BPS NIT; dan (3) 1 Maret 1947 ditetapkan sebagai hari tanggal mengundang untuk bersidang pertama kalinya, Badan Perwakilan Sementara (BPS) NIT, Nyoman S. Pendit, 1979a, *op.cit.,* hlm: 237-238.

[136] Lihat Subbab 6.1. Medium yang Digunakan di Daerah

[137] Ide A.A. Gde Agung, 1985, *op.cit.,* hlm: 178-179.

[138] Mr. Soedarisman berkomentar dalam artikelnya bahwa jika kita ingin mengerti tentang Negara Indonesia Serikat dalam pasal 2, maka pasal 2 harus dihubungkan dengan pasal 3 dan pasal 4 yaitu NIS akan mengikuti

Hindia Belanda seluruhnya terdiri dari RI, Borneo dan Timoer Besar yang harus dibentuk oleh pemerintah RI dan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda dengan mendirikan Negara Indonesia Timur itu "sendirian" –dengan meninggalkan pemerintah RI– dengan sendirinya telah menyalahi naskah", "Naskah dan NI Timoer", *Kedaulatan Rakjat*, Kemis Kliwon 8 Mei 1947 (Jogjakarta), hlm: 2; Tidak heran jika dalam tulisan "Podjok", NIT bukannya singkatan dari Negara Indonesia Timur, tetapi "Negara Ikoet Toean" atau "Nadjamoedin Is Teleurgesteld" (Nadjamoedin Hatinya Kecewa), "(N)egara (I)koet (T)oean" "NIT" Singkatan resmi yang dipakai oleh rakyat di Makasar, *Kedaulatan Rakjat,* Rebo Pon 21 Mei 1947, hlm: 2; *Kedaulatan Rakjat*, Selasa Pahing 24 Juni 1947, hlm: 1.

[139] "Bali Maoe Ke Jawa", *Penjoeloeh Bali,* Selasa 7 Januari 1947, *op.cit.,* hlm: 1; ARC. Borneo & Groote Oost, *Kort Overzicht..., op.cit.,* hlm: 32-33.

[140] "Dokumen No. 327 Politik Verslag Bali...", S.L. van der Wal, VI, *op.cit.,* hlm: 709-710.

[141] "Dokumen No. 326 Politik Verslag Timor...", *Ibid.,* hlm: 708.

[142] *Ibid.*, hlm: 708-709; "Rakjat Soembawa Tetap Dalam Repoeblik", *Antara,* 6-12-46.

[143] "Sekitar wartawan-wartawan Repoeblik dan Denpasar", *Antara,* 18-12-46; "Belanda di Bali Doedoek diatas Dinamit: Peristiwa Wartawan Repoeblik", *Antara,* 20 Desember 46.

[144] "Dokumen No. 327, Politik Verslag Bali...", S.L. van der Wal, VI, *op.cit.,* hlm: 713-714.

[145] *Ibid.*, hlm: 714; Residen Bali dan Lombok menerbitkan pemberitahuan resmi pada tanggal 26 Desember 1946, yang berbunyi, "Pada hari ini saya telah mengambil beberapa tindakan supaya janganlah upacara penguburan almarhun I Gusti Ngurah Rai dilakukan secara yang mungkin menerbitkan pelanggaran keamanan umum....Marilah pada masa peralihan yang sulit ini kita menjauhkan segala apa yang mungkin membahayakan hasil-hasil kita yang ternyata.", "Pemberi Tahoenan Resmi", *Penjoeloeh Bali,* Djoem'at, 27 Desember 1946, *op.cit.,* hlm: 7.

[146] "Belanda di Bali Doedoek Diatas Dinamit: Karena Perdjandjian", *Antara,* 20-12-1946.

BAB VII

BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN (BORNEO)

Lisyawati Nurcahyani

7.1. Pengantar

Nama Borneo digunakan bangsa Eropa untuk menyebut pulau yang kini bernama Kalimantan, nama asli yang diberikan masyarakat. Ada dua pendapat yang beredar tentang arti Kalimantan. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Kalimantan berasal dari kata "*kali*" berarti sungai, dan "*mantan*" adalah besar. Jadi, Kalimantan berarti pulau yang sungainya besar-besar. Pendapat kedua, Kalimantan berasal dari nama pohon yang buahnya asam yang banyak tumbuh di pulau ini.[1] Terlepas dari arti nama itu sendiri, masyarakat lebih senang menyebut nama Kalimantan dari pada Borneo.

Nama Kalimantan mengacu sejumlah wilayah di pulau dengan nama yang sama, yang pernah dikuasai pemerintah kolonial Belanda dan kemudian, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia.[2] Kalimantan atau Borneo pada saat proklamasi dibacakan di Jakarta berada dalam kekuasaan Pemerintahan Jepang yang melarang penyiaran radio dan penerbitan surat kabar, kecuali *Borneo Simboen* dan Radio Domei yang memang miliki Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, pulau Kalimantan berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut, yaitu *Borneo Minseibu Chokatsu Kuiki* yang berpusat di Banjarmasin, yang kemudian ditetapkan kembali pada Juni 1944 dengan dikembangkan menjadi beberapa wilayah.[3]

Berdasarkan *Staadsblad* nomor 64 tanggal 1 Januari 1946, Belanda telah membagi Borneo atau Kalimantan menjadi tiga wilayah Keresidenan: *Zuid Borneo* (Borneo Selatan) dengan ibukota di Banjarmasin, *West Borneo* (Borneo Barat) beribukota di Pontianak, dan *Oost Borneo* (Borneo Timur) di Samarinda. Dalam penulisan ini, pembahasan didasarkan pada pembagian wilayah yang dibuat Belanda.

7.2. Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi

Sebelum mencapai kemerdekaan Republik Indonesia, banyak peristiwa pahit yang harus dilalui bangsa ini pada masa penjajahan Jepang. Bagi rakyat Kalimantan, peristiwa pahit tersebut berupa kekejaman Jepang. Hampir di seluruh Kalimantan, Angkatan Laut Jepang terkenal dengan tangan besi dalam memerintah, termasuk membunuh. Bukan hanya itu, penderitaan masyarakat juga terkait dengan peritiswa–peristiwa yang akan dijelaskan berikut ini.

7.3. Peristiwa Gubernur Haga di Kalimantan Selatan

Nama lengkapnya adalah Dr. B.J. Haga, yang diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai gubernur untuk wilayah Kalimantan. Setelah kehadiran pemerintah Jepang, Haga bersama sejumlah pejabat Belanda dan pasukan KNIL, juga keluarganya, lari mengungsi ke Puruk Cahu. Ratusan serdadu Belanda dan Inggris yang masih berada di Banjarmasin segera menyingkir di Pangkalan Bun menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pelampiasan kemarahan dan kebrutalan pasukan Jepang memakan banyak korban. Bukan saja pada bangsa Belanda, tetapi juga bangsa Indonesia. Dengan politik Nipponisasi Jepang memaksakan kepada siapapun budaya Jepang yang jelas tidak sesuai dengan tradisi dan budaya rakyat Kalimantan. Dalam usaha melancarkan politik Nipponisasi, Jepang selalu bersikap curiga kepada setiap orang. Dan Jepang tidak segan- segan melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang yang dicurigai akan melakukan pemberontakan, baik bangsa Indonesia maupun bangsa asing.

Begitu juga yang terjadi pada Dr. B.J. Haga dan kawan–kawan. Dia memang sempat mengirim surat kepada pemerintah Jepang pada tanggal 31 Maret 1942 untuk menyerahkan diri, yang kemudian dimuat surat kabar *Kalimantan Raya* pada 1 April 1942. Namun, pada 21

Desember 1943 tersiar berita yang dimuat dalam *Borneo Shimboen* bahwa telah dihukum mati lebih dari 200 orang yang terdiri dari orang Belanda, orang Indonesia,dan Tionghoa. Dua ratus orang tersebut menurut Jepang adalah komplotan Gubernur Dr. B.J. Haga. Nama-nama yang dibunuh oleh Jepang antara lain adalah dr. Susilo seorang ahli malaria dan merupakan adik kandung almarhum Dokter Sutomo pendiri Budi Utomo, Hausman Babu mantan *Gunco* Sampit seorang pelopor suku Dayak dan pendiri Pakat Dayak, B.J. Haga dan istrinya.[4]

7.4. Peristiwa Mandor Di Kalimantan Barat

Peristiwa ini bermula dari pembubaran organisasi pemuda di Kalimantan Barat, kecuali organisasi *Nissinkai* yang ijinkan Jepang. Dipelopori oleh Noto Soedjono dan dr. Roebini, *Nissinkai* hanya berpura-pura memihak Jepang; *Nissinkai* adalah gerakan bawah tanah yang mempengaruhi para sultan dan tokoh masyarakat untuk berjuang melawan pendudukan Jepang. Para pemuda yang dilatih dalam berbagai organisasi Jepang seperti *Seinendan* (barisan pemuda), *Heiho* (prajurit pembantu tentara Jepang), dan *Keibodan* (barisan pembantu polisi) menjadi pasukan inti untuk melawan pemerintah Jepang.

Dengan alasan berunding untuk menyelesaikan masalah huru hara yang sedang terjadi di Pontianak, Syuutizityo mengadakan rapat yang dihadiri oleh 12 Sultan dan Panembahan serta para pejabat tinggi setempat di Pontianak pada 14 April 1943. Rupanya rapat itu hanya akal-akalan Jepang untuk menangkap para Sultan dan Panembahan tersebut pada tanggal 23 April 1943. Dan mereka memang ditahan di Markas Kempetai dan akhirnya menghilang tidak ada kabar. Berita tentang penangkapan para Raja dan tokoh masyarakat telah tersebar di masyarakat, tetapi tidak ada penjelasan apapun dari Jepang. Sebaliknya, Jepang memperlihatkan sikap yang baik dan bersahabat dengan para keluarga Raja seolah-olah tidak pernah terjadi apa–apa.

Meski demikian, tokoh masyarakat dan pemuda tidak bisa menerima begitu saja. Mereka tahu bahwa semua itu adalah perbuatan Jepang. Untuk itu, mereka yang tergabung dalam *Nissinkai* menyambut baik rencana Jepang untuk mengadakan rapat akbar yang akan dihadiri berbagai kalangan di masyarakat. Dalam rapat akbar di gedung Medan Sepakat di *Landraagweg* nomor 12[5] para pejuang ingin mempertanyakan nasib para Raja dan tokoh masyarakat yang ditangkap

oleh Jepang setahun yang lalu. Disamping itu, mereka juga berencana membalas tindakan Jepang dengan meracuni opsir-opsir Jepang. Maka pada tanggal 24 Mei 1944, para Sultan, Panembahan, Pemuda dan tokoh masyarakat berkumpul di gedung Medan Sepakat. Hanya saja, mereka tidak mengetahui bahwa rencana untuk meracuni opsir Jepang itu sudah bocor, sehingga acara rapat itu justru menjadi kuburan bagi para pejuang Indonesia. Jepang mengepung gedung dan tidak membiarkan satu orangpun lolos dalam gedung, dan kemudian semua orang yang hadir ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk dan di bawa pergi entah kemana.

Setelah kejadian tanggal 24 Mei 1944 itu, Jepang mulai memperketat keamanan dengan memberlakukan jam malam dan melarang masyarakat untuk berkumpul–kumpul lebih dari dua orang. Dan Jepang secara terang-terangan menangkapi orang-orang yang dicurigai dengan alasan yang dicari-cari, baik secara paksa maupun halus, dan orang yang ditangkap tidak pernah kembali lagi ke keluarganya sampai sekarang. Keadaan ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Kejadian penculikan dan penangkapan tokoh–tokoh masyarakat dan para Sultan dikenal dengan nama *penyungkupan*.

Latar belakang pembunuhan dia atas—yang dilakukan secara berantai dari 23 April 1943 sampai 24 Mei 1944—adalah karena Jepang menganggap rakyat Kalimantan Barat berkomplot untuk melakukan pemborotakan, terutama para intelektual dan para pemuda. Di samping itu, Jepang juga menganggap komplotan di Kalimantan Barat masih ada kaitanya dengan komplotan Dr. B.J. Haga di Banjarmasin.

Keberadaan para sultan, tokoh masyarakat dan para pejuang yang menghilang akhirnya terjawab. Seperti tertulis surat kabar *Borneo Shimbun*, edisi nomor 135 tahun II tanggal 1 Juli 1944:[6]

> Komplotan besar jang mendoerhaka oentoek melawan Dai Nippon soedah di bongkar sampai ke akar-akarnja. Salah satoe Angkatan Laoet di Pontianak jang sedjak dahoeloe mengetahoei tentang tersemboenjinja rantjangan komplotan melawan Dai Nippon jang sangat besar oekoeranja di daerah Kalimantan Barat Pontianak, Saingkawang dan sekitarnja sebagai poesatnja senantiasa meneroeskan pengintipan dengan seksama hingga pada soeboeh tanggal 23 Zyurgatatahen jang

lampaoe melangsoengkan penangkapan besar jang pertama,dan pada soeboeh 24 Itigatu tahoen ini dioelangi penangkapan besar sekali lagi.

Sedjak itoe pemeriksaan teliti telah diteroeskan terhadap Dokoh pontianak serta beberapa ratoes orang jang bersangkoetan jang soedah ditahan, maka achirnja terbongkar dengan senjata-senjatanja komplotan besar oentoek melawan Dai Nipponjang sangat mengejoetkan orang. Oleh karena itoe baroe2 ini dalam sidang Madjelis Pengadilan Hoekoem Ketentaraan Angkatan Laoet kepala2 komplotan serta lain-lainja telah didjatoehkan hoekoeman mati, maka pada tanggal 28 Rokugatu mereka pun telah ditembak mati.

Kecurigaaan Jepang muncul karena informasi dari mata-matanya, baik orang Jepang maupun orang Indonesia yang bekerjasama. Jepang curiga akan terjadi pemberontakan besar-besaran yang akan dilakukan para raja dan kaum Intelektual. Dengan berbagai cara, Jepang berusaha menangkap dan menteror rakyat agar hidup dalam ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Namun justru Jepang yang merasa ketakutan, sehingga secara membabi buta menangkap rakyat yang sebenarnya tidak bersalah.

Peristiwa Mandor terjadi di desa Kompyang Kecamatan Mandor, tempat Jepang melakukan pembataian besar-besaran terhadap segala lapisan masyarakat. Menurut *Borneo Shimbhun* (1 Juli 1944), Jepang selama masa pendudukannya telah membunuh rakyat sebanyak 21.037 orang di Kalimantan Barat. Oleh Pemerintah Indonesia, korban-korban tersebut dimakamkan dalam 9 cungkup (nisan) di desa Kompyang Mandor dan diberi nama "Makam Juang Mandor".

7.5. Medium Penyebaran Proklamasi

Seperti halnya di daerah lain, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia terlambat sampai ke Kalimantan. Disamping faktor sarana dan prasarana, sikap dan tindakan represif Jepang menjadi faktor penting dalam hal ini, sehingga seminggu setelah peristiwa bersejarah Proklamasi tidak terjadi apa-apa di masyarakat. Meskipun begitu, informasi Proklamasi kemerdekaan akhirnya sampai juga di

Kalimantan, melalui gelombang radio, surat kabar, para pejuang yang datang dari Jawa, pamlet, maupun ekspedisi- ekspedisi yang dilakukan oleh para pemuda pejuang dari Jawa seperti BPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo dari Surabaya.

Dalam suasana ketakutan, seorang pemuda di Pontianak—salah satu kota terbesar di Kalimantan Barat—bernama M. Sukandar, mendengar berita proklamasi dari radio yang berhasil disembunyikan. Sukandar mendengar siaran radio dari Fransiso dalam bahasa Indonesia pada 18 Agustus 1945 di malam hari, yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di Jakarta.[7] Namun, berita itu tidak bisa langsung disebarkan. Sukandar secara sembunyi-sembunyi dan bertahap memberitahukan hal tersebut kepada kawan-kawan terdekatnya, yang akhirnya menyebar dari mulut ke mulut.

Meski terlambat, berita proklamasi kemerdekaan telah membuat rakyat merasakan kebahagian. Tindakan patriotik pun dilakukan seorang pejuang yang bekerja sebagai juru rawat, Ali Anyang. Dia mengibarkan bendera Merah Putih untuk pertama kalinya pada pertengahan Desember di Rumah Sakit Sungai Jawi, Pontianak.[8] Sementara pengibaran bendera Merah putih secara resmi dan disaksikan oleh banyak rakyat Kalimantan Barat terjadi pada saat diadakannya rapat di Kebun Sayok (sayur) yang diprakarsai oleh GAPPI pada tanggal 24 Oktober 1946. [9]

Lain halnya dengan Ketapang, kota lain di Kalimantan Barat. Berita proklamasi secara resmi di terima melalui seorang pejuang yang baru datang dari Jawa, yaitu A. Halim H. Abdul pada 24 Agustus 1945. A. Halim H. Abdul mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia telah resmi di umumkan dan pimpinan Bangsa Indonesia adalah Soekarno–Hatta. Berita ini sungguh menjadi berita yang menggembirakan bagi para pejuang Ketapang yang segera melakukan persiapan untuk menyongsong kemerdekaan.

Singkawang sebelum dimekarkan menjadi dua wilayah adalah ibukota dari Kabupaten Sambas dan dikuasai oleh Sultan Sambas. Pada masa Pemerintahan Jepang, Singkawang dijadikan daerah Ken Cho. Di Singkawang dan Bengkayang, berita proklamasi diterima dari pejuang anggota PPRI, Ya' Ahmad Dundik, pada 2 Oktober 1945, yang memang ditugaskan PPRI untuk menyebarkan berita proklamasi di daerah.

Begitu juga apa yang terjadi di Sambas yang letaknya cukup jauh dari Singkawang. Berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah diketahui oleh rakyat Sambas melalui siaran radio Sarawak. Namun, berita ini tidak cepat tersebar karena Jepang masih bercokol di Sambas. Rakyat Sambas mendapatkan kepastian tentang berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari pemuda Sambas Zainuddin Nawawi dan Gifni Ismail yang tinggal di Pontianak. Sejak itu, semangat para pejuang Sambas untuk menyongsong dan mempertahankan kemerdekaan semakin berkobar. Dengan segenap jiwa dan raga mereka siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia.

Keadaan kota Pemangkat yang letaknya berada di tengah – tengah antara Singkawang dan kota Sambas hampir sama. Setelah menerima berita Proklamasi Kemerdekaan dari seorang pemuda yang berasal dari desa Semparuk Pemangkat, masyarakat sangat senang. Pemuda itu bernama M. Akir yang baru pulang dari perantauannya di Semarang pada pertengahan Oktober 1945. Dia mengabarkan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno–Hatta. Setelah mendengar berita proklamasi para pejuang menyatakan dukungannya kepada bangsa Indonesia.[10]

Lain lagi dengan apa yang terjadi di Sintang, tempat berita itu sebenarnya telah diketahui pada saat upacara yang diadakan oleh Bunken Kanriken di Nanga Pinoh. Pada saat itu, penguasa Jepang menaikan Bendera Jepang dengan diiringi bendera Merah Putih. Bunken dalam pidatonya mengatakan "bahwa ia dan tentara Jepang akan meninggalkan Nanga Pinoh menuju Sintang dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi, peliharalah semangat perjuangan pemuda pemudi Nanga Pinoh dan kalian akan merdeka", katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih.[11] Dalam upacara itu, Kankuriken juga meminta kepada pelajar yang ikut serta dalam upacara itu untuk mengatakan "Merdeka".

Akan tetapi, apa yang dilakukan Jepang itu tidak membuat yakin para pemimpin dan pejuang di Sintang, lagi-lagi karena sikap Jepang yang bisa dipercaya. Di sisi lain, berita tentang proklamasi juga sampai ke telinga para pejuang. Keraguan tentang kemerdekaan Indonesia akhirnya terjawab setelah beberapa pemimpin pejuang Sintang dan

Nanga Pinoh mendengar berita proklamasi lewat siaran radio pada tanggal 15 Oktober 1945. Keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat sendiri copy teks dari Proklamasi Kemerdekaan yang dibawa oleh pemuda Sintang, H.M Yusuf Aris dari Sumatera, pada bulan Desember. [12]

Sikap patriotik ditunjukan oleh rakyat Landak Ngabang sebelum berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahamid Bersib dan Hasan Basri didukung oleh para pemuda Sambas melakukan tiga aksi yang menujukkan semangat patriotisme:

1. Pada tanggal 8 Juni 1945 jam 08.00 pagi bertempat di halaman rumah kediaman Bunken Kanrikan Ngabang diadakan upacara menaikkan bendera Merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Upacara tersebut dihadiri pasukan *Seinendan*, semua pegawai *Menseibu* Ngabang, para pelajar SR dan pembesar-pembesar Jepang. Sang Merah Putih naik dengan lancar, sedangkan bendera Jepang naiknya tertahan-tahan tiba-tiba talinya putus dan jatuh ke tanah. Bendera tersebut segera diambil oleh N. Tsuchinochi dan dibawa masuk ke rumah Bunken Kanrikan. Selesai upacara diadakan demonstrasi mempertahankan kota Ngabang.
2. Pada tanggal 8 Juli 1945 dibentuk pasukan *Seinendan* Distrik Sengah Temila dan pada saat dilaksanakan upacara hanya bendera Merah Putih saja yang dinaikkan tanpa bendera Jepang. dipimpin oleh G.M Saleh Alimin dan Bardan Nadi
3. Tanggal 8 Agustus 1945 dibentuk *Seinendan Onderdistrik* Menyuke di Darit dengan upacara menaikan bendera Merah Putih dan tidak disertai bendera Jerpang yang dipimpin oleh Hamdan Bunjang, Kimas Akil dan G.M. Saleh.[13]

Berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga diterima oleh para pejuang Landak yang kebetulan pada saat itu berada di Pontianak, antara lain Abdul Hamid dari tentara Australia yang datang ke Pontianak pada permulaan Oktober 1945. Tentara Australia membawa dokumen yang berisi tentang strategi perjuangan yang ditulis oleh aktivis Indonesia yang berada di Australia. Oleh Abdul Hamid, informasi itu dikirim ke Landak melalui telpon dan mengirim langsung ke Ya"Mustafa Tayib dan Kadaruddin Mundit di Landak.[14]

Masyarakat Dayak pada umumnya hidup di dalam hutan jauh di pedalaman dengan sarana transpotasi yang masih sangat sulit. Begitu juga di Kalimantan Barat, mayoritas masyarakat Dayak hidup di hutan. Mereka memang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di hutan. Oleh karena itu, berita proklamasi kemerdekaan sangat terlambat sampai pada mereka. Pada masa itu masyarakat Dayak hidup berkelompok dan terisolasi di pedalaman. Jadi, perubahan yang terjadi di dalam kota tidak dapat diketahui dengan cepat. Rakyat dayak hanya mengandalkan informasi orang yang datang ke tempatnya untuk berdagang ataupun keperluan lain.

Meskipun berita proklamasi belum sampai kepada mereka, tapi mereka bersyukur bahwa Jepang telah dikalahkan oleh Sekutu. Penderitaan masyarakat Dayak telah terbayar dengan kalahnya Jepang. Maka, masyarakat Dayak pergi ke kota dengan membawa kepala-kepala orang Jepang yang berhasil dikayau untuk menghadap Sultan Pontianak.

Masyarakat Cina lebih mengedepankan bidang ekonomi dari pada bidang lain seperti politik. Sekalipun masyarakat Cina berpikir tentang politik, tetapi hal itu lebih banyak berkaitan dengan posisi mereka di bidang ekonomi. Sepanjang pemerintahan yang ada tidak merugikan posisi mereka secara ekonomi, maka mereka lebih bersifat pasif. Dalam masa pemerintahan Jepang posisi Cina sama–sama menderita dan dijadikan mesin uang oleh Jepang. Begitu juga dalam bidang sosial dan politik, mereka mendapat perlakukan yang sama degan pribumi.

Sepanjang sejarahnya, Banjarmasin dikenal sebagai bandar dagang yang besar dan ramai, tempat di mana pedagang manca negara maupun dalam negeri melakukan transaksi dagang. Berbagai macam barang dagangan diperjualbelikan di Banjarmasin, sehingga menarik perhatian orang untuk datang. Banjarmasin dikenal sebagai kerajaan Islam yang kaya dan makmur dengan hasil bumi dan hutannya yang berlimpah seperti lada, damar rotan dan kayu serta hasil alam seperti batu bara, emas dan batu permata.

Masyarakat Banjar dikenal taat beragama. Islam menjadi urat nadi dalam kehidupan rakyat Banjar. Ulama menjadi panutan dan tuntunan bagi masyarakat. Begitu pula Islam menjadi bagian dari kehidupan politik yang mempersatukan masyarakat Banjar yang

berlatar-belakang suku yang berdeda- beda. Berkat Islam, apapun sukunya mereka tetap mengakui sebagai "Urang Banjar".

Peristiwa menarik menjelang proklamasi yang perlu diingat adalah keputusan pemerintah Jepang tanggal 8 September 1944 yang dimuat dalam majalah *Kun–Po*, yang berisi tentang ijin pemasangan bendera Merah Putih di samping Hi-no-Moro serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sesudah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dalam suatu upacara, telah sampai beritanya di Kalimantan Selatan.

Untuk pertama kalinya rakyat Banjarmasin menyaksikan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam suatu upacara yang diselanggarakan untuk memperingati hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. Peristiwa tersebut begitu melekat dalam jiwa para pejuang dan tentu saja menambah semangat patriotik untuk selalu berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Ini ditambah lagi dengan penemuan surat selebaran yang oleh seorang pemuda di pelabuhan yang ditujukan untuk rakyat Borneo yang isinya sebagai berikut:[15]

RAKYAT BORNEO

Dengan dentoeman meriam serta gemoeroehnya tank dan mesinterbang, sekarang ini sedang ditoelis sedjarah tanah toempah darah dan rakjatmoe kedalam boekoe sedjarah doenia.

Kamoe sekalian sekarang menghadapi saat tegakberdiri atas hantjoer leboenja waisan nenek moejangmoe

Timboel atau tenggelamnja rakjat dan tanah airmoe sekarang tergantoeng kepada keinginanmu oentoek pembela warisanmoe itoe didalam kantjah peperangan ini. Kewajibanmoe sekarang tidak lain ialah : menoenjoekan dalam sedjarah dunia itoe, bahwa kamoe tetap berdjoeang oentuk memilih tanah air Borneo sebagi bagian dari tanah air Indonesia bagi rakjat Borneo sebagai bagian dari pada Rakjat Indonesia.

Kita di lain- lain bagian dari pada tanah air kita Indonesia sekarangpoen berdjoeang sekoeat tenaga oentuk mewoejoedkan Negara Indonesia Merdeka bagi Rakjat. Dalam keadaan jang bagaimanapoen kita haroeslah menoelak tiap-tiap serangan yang hendak memisahkan kita antara kita. Ingatlah

> kepada tjita-tjita kita jang senantiasa kita dengooeng-dengoengkan sedjak api pergerakan Kebangsaan kita menjoeloehi seloeroeh alam tanah air kita Indonesia dari Atjeh hingga ke Papua, sekarangpun menjala-njala dan berkobar-kobar dalam dadamu.Kita tetap berdjuang oentoek mendirikan Negara Indonesia Merdeka jang bersatoe . Kita tetap berdjuang oentoek Kedaoelatan Rakjat Indonesia.

Dari maklumat tersebut, rakyat merasa tidak sendiri karena ada banyak para pejuang di seluruh Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa harus memintanya kepada Jepang. Namun, situasi yang ada saat itu membuat para pejuang dalam kebingungan antara takut, rasa tidak percaya dan keinginan untuk berjuang. Pengalaman Sunaryo dan Syahrul penting dicatat di sini. Mereka memang sempat mendengar kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui radio secara sembunyi–sembunyi. Namun, berita itu tidak dapat diinformasikan kepada orang lain karena Jepang selalu mengawasi gerak-gerik rakyat. Jadi, jelas bahwa di dalam msyarakat masih ada yang memiliki radio secara sembunyi-sembunyi dan tidak menutup kemungkinan proklamasi kemerdekaan juga sudah diterima lebih awal. Hanya saja, saat itu tidak memungkinkan untuk langsung memberitahukan kepada yang lain secara terbuka.

Berita proklamasi secara resmi diperoleh dari seorang pejuang Banjarmasin, A.A Hamidhan, yang diutus oleh Jepang sebagai perwakilan dari surat kabar *Borneo Simboen* terbitan Banjarmasin untuk meliput kegiatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta pada 15 Agustus 1945.[16] A.A Hamidhan menjadi salah satu saksi dalam pembacaan konsep proklamasi dan pada saat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumah Sukarno Jalan Pegangsaan Timur. Juga A.A Hamidhan yang mengikuti sidang- sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 dan 19 Agustus.

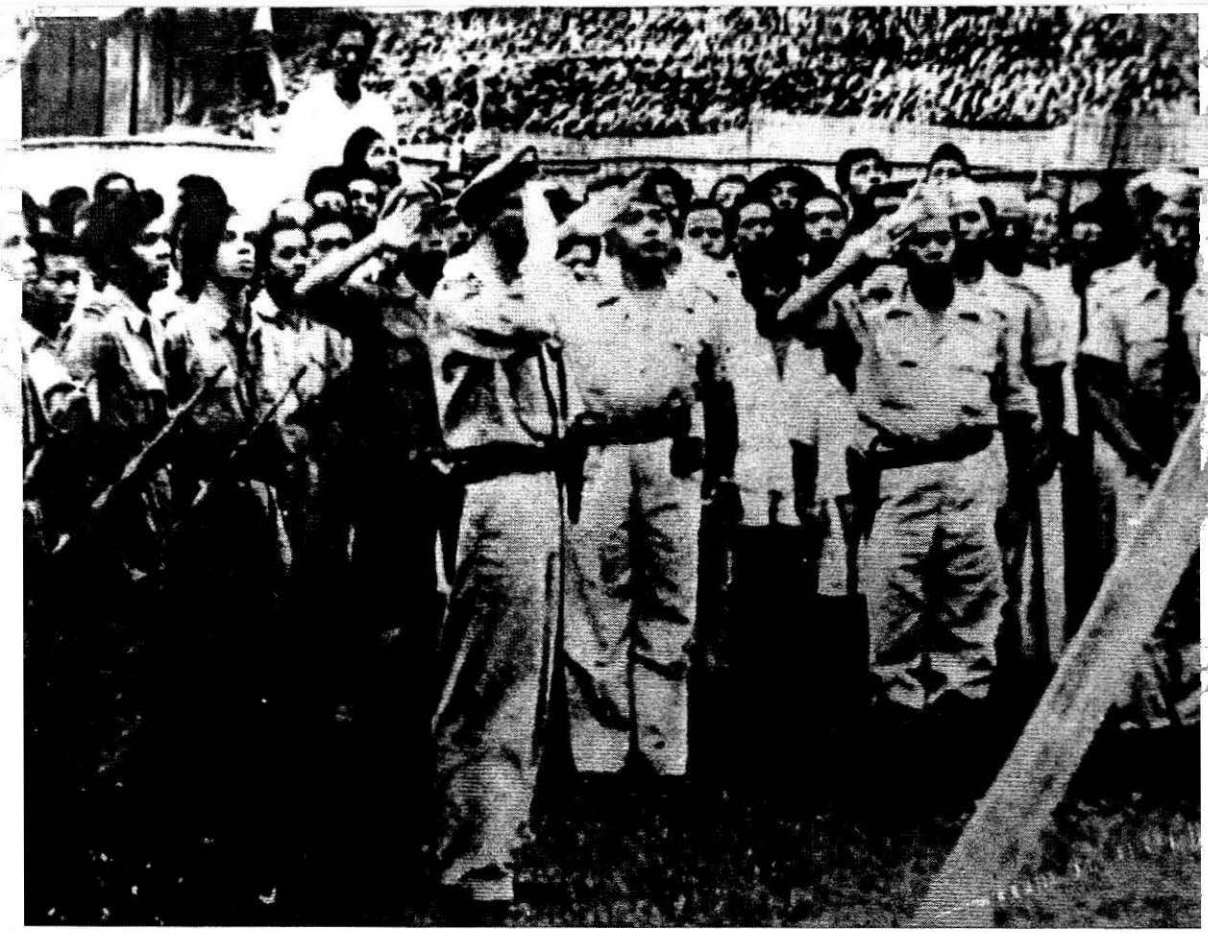
Setelah kembali ke banjarmasin pada 20 Agustus, dia seharusnya mempunyai berkewajiban untuk menyampaikan berita penting tersebut kepada seluruh rakyat Banjarmasin. Namun, kenyataanya tugas tersebut tidak dapat dilakukan karena ada larangan dari Meinsebu Chokan agar tidak menyebarkan berita proklamasi dan

bertemu dengan siapapun. Menseibu Chokan bahkan menawarkan kepada A.A Hamidhan mengisolasikan diri di Jakarta bersama keluarganya, namun ia lebih memilih untuk bersembunyi di Rantau tempat kelahiranya.

Namun sebelum kepergiannya ke Rantau, A.A Hamidhan diijinkan untuk bertemu dengan tokoh pejuang Banjarmasin, yaitu Pangeran Musa Andi Kesuma, Mr Roesbandi, dan Dokter Sosodoro Djatikesuma. Dan Surat pengangkatan dari PPKI untuk Mr Soebandi sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Dokter Sosodono sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah.[17] Pada kesempatan itu pula, Hamidhan menyerahkan surat kabar *Asia Raya* pimpinan B.M. Diah dari Jakarta yang memuat berita tentang proklamasi dan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Koran *Borneo Simboen* edisi Banjarmasin baru diijinkan oleh pemerintah Jepang untuk memuat berita proklamasi pada tanggal 26 Agustus 1945.

Berita proklamasi justru disiarkan oleh surat kabar *Borneo Simboen* terbitan Hulu Sungai di kota Kandangan, yang langsung mendapatkan sumber berita dari radio Domei di Jakarta secara diam-diam. Berita proklamasi juga disebarkan lewat Pasar Malam yang diselenggarakan di Kandangan tanggal 20-30 Agustus 1945. Bahkan, pada saat itu teks Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-undang dasar 1945 dibacakan selengkapnya oleh Ahmad Basuni. Di daerah Kandangan ini, para pejuang tidak mendapat halangan untuk mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, berita proklamasi juga diterima dari bocoran para pegawai Indonesia yang bekerja di siaran Radio Banjarmasin Hosokyoku khususnya kepada pelajar Tyugakko.

Kota Baru adalah ibukota dari Kabupaten Tanah Bumbu sebelum dimekarkan yang letaknya jauh dari ibukota Banjarmasin. Namun, justru lokasi Kota Baru lebih mudah berhubungan lewat laut dengan pulau Jawa, Sulawesi dan Balikpapan. Oleh karena itu, berita proklamasi diterima oleh pejuang Kota baru dari para pelaut yang sedianya akan berlayar menuju ke Sulawesi . Pada pertengahan bulan September, akibat cuaca yang buruk, tiga pelaut yang terdiri dari suku Bugis, Jawa dan Batak terpaksa untuk sementara waktu berlabuh di Kota Baru. Ketiga pelaut itu mengabarkan tentang proklamasi kemerdekaan indonesia dan situasi di Jawa, khususnya Surabaya,



Rakyat Indonesia di Kalimantan Barat sedang melaksanakan perayaan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1949 *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

kepada para pemuda *ex Boei Teisin Tai* dan *Kaigun Heiho* yang diwakili oleh Peran Kamar, Mastari Missin, Ahmad Kawi, dan Marsyid Saberani.[18]

Berita Proklamasi yang telah sampai di Kota Baru kemudian menyebar ke daerah–daerah sekitar, termasuk Pagatan—satu wilayah otonom imigran suku Bugis yang berasal dari Kerajaan Wajo, Sulawesi Selatan. Pagatan dibangun oleh seorang hartawan yang bernama Puanne Dekke yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan di bawah kesultanan Banjarmasin dengan rajanya bergelar Arung.

Selain semua sumber yang telah disebut di atas— radio , surat kabar dan dari orang per orang—informasi tentang berita Proklamasi juga diperoleh dari tentara Australia yang tergabung dalam Sekutu. Mereka adalah Charles Fostar dan Victor Little yang mengaku dari Partai Komunis Australia. Keduanya menyerahkan 5 lembar pamflet yang telah

dikeluarkan kaum politisi Indonesia yang berada di Australia. Isi pamflet tersebut segera diterjemahkan oleh M. Afiat ke bahasa Indonesia, yang intinya menerangkan bahwa bangsa Indnesia telah merdeka, mengajak semua lapisan masyarakat dan golongan (pegawai, polisi, buruh dan rakyat umumnya) untuk bersatu dan supaya menolak kedatangan NICA.[19] Pada tanggal 1 oktober 1945, pamflet disebarkan ke seluruh masyarakat Kalimantan Selatan secara serempak. Di Banjarmasin, penyebaran dipelopori oleh Hadhariyah M, F. Mohani, Hamli Tjarang, dan Abdurrahman Noor. Di Rantau dan Kandangan dipelopori oleh H.M. Rusli dan Hasnan Basuki, di Barabai oleh H. Baderun. Sementara di tempat lain seperti Puruk Cahu, Martapura , Marabahan, dan Pelaihari dibawa oleh tentara Australia yang bertugas melucuti tentara Jepang. [20]

Berikutnya adalah Kota Waringin, yang kini menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat beribukota di Pangkalan Bun dan Kabupaten Kota Waringin Timur beribukota di Sampit. Pangkalan Bun adalah sebuah kota pelabuhan yang cukup maju di Kalimantan (sekarang termasuk wilayah Kalimantan Tengah) yang banyak dikunjungi oleh kapal-kapal dari Jawa maupun dari Nusantara. Rakyat Kota Waringin pun sering berlayar ke Pulau Jawa bahkan sampai ke Singapura.

Jalur perdagngan laut ini pula yang kemudian berperan penting dalam penyeberan informasi tentang Proklamasi. Rakyat Kota Waringin mendengar berita proklamasi langsung dari Jawa melalui beberapa pelabuhan—Sampit, Pangkalan Bun, Pagatan/Mendawai, Kuala Kapuas, dan Pulang Pisau; para pelaut ataupun pejuang yang baru datang dari Jawa umumnya membawa kabar tentang perkembangan politi yang berlangsung, teristimewa tentang Prokamasi Kemerdekaan Indonesia.[21] Mungkin karena penyebaran informasi tersebut, pada 24 Agustus 1945, Bunken Kanrikan, pemimpin pemerintah Jepang di Pangkalan Bun, menemui Raja Kota Waringin untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu:[22]

a. Atas nama Pemerintah kerajaan Jepang , Bunken Kanriken akan menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Sultan Kota Waringin.
b. Bunken Kanniken juga memberi selembar bendera merah Putih dengan satu permintaan bahwa pengibaranya menunggu setelah orang-orang Jepang tidak lagi di Kota waringin.

c. Kepada raja, Bunken kanriken memberikan harapan bahwa Indonesia pasti merdeka tetapi penuh dengan perjuangan.

Sebagai bentuk dukungan atas masyarakat Kota Waringin yang menyambut gembira proklamasi kemerdekaan, secara spontan dikibarkan bendera Merah Putih di Pangkalan Bun. Jepang tidak melarang tindakan dari para pejuang yang mengibarkan bendera Merah Putih diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat upacara di depan Kantor Pemerintah daerah tanggal 29 Agustus 1945.[23]

Sementara untuk daerah Sampit, pemerintah Jepang meninggalkan Sampit secara diam–diam dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Kesempatan itu tidak disia–siakan oleh para pejuang untuk mengambil alih kantor pemerintahan dan mengibarkan bendera Merah Putih sekitar akhir Agustus.

Berbeda hal nya dengan Rakyat Kumai, mereka menerima berita proklamasi melalui seorang pejuang yang bernama Abdullah Machmud. Kumai adalah daerah pelabuhan yang letaknya tidak terlalu jauh dari Pangkalan Bun. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Abdullah Machmud kembali dari Jawa dan membawa berita secara resmi tentang Indonesia yang telah merdeka.[24] Abdullah Machmud adalah seorang pejuang pertama dari Kota Waringin yang memperoleh mandat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari pusat.

Begitu juga dengan daerah Puruk Cahu dan Muara Teweh, di mana pengibaran bendera dipimpin oleh Kepala Daerah mereka masing-masing. Di kantor-kantor pemerintah mulai dikibarkan bendera Merah Putih dan menurunkan bendera Jepang. Di Kuala Kapuas, bendera Merah Putih dikibarkan di desa Anjir Sarapat, sepulih kilometer dari pusat kota Kuala kapuas. [25]

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan rakyat Dayak yang tergabung dalam Pakat Dayak bercita-cita agar urusan yang menyangkut wilayah Dayak dipimpin oleh putera Dayak. Keinginan itu disampaikan kepada pemerintah Belanda dan juga pemerintah Jepang. Pada masa Belanda permintaan ini dipenuhi dan diangkat sebagai Kepala Distrik Dusun Timur, maka muncullah nama Temanggung Jaya Karti, Temanggung Raden Suta Ono, Raden Suta Negara, Kiai Guntik,

Demang Gaman hingga kira – kira tahun 1921.[26] Namun pada saat Pemerintahan Jepang permohonan ini ditolak. Maka, begitu mendengar berita proklamasi Kemerdekaan dari surat kabar *Borneo Shimbun* yang beredar di Banjarmasin, rakyat Dayak—khususnya yang masuk dalam wilayah Dayak Besar—langsung menyatakan dukunganya dengan mengibarkan bendera Merah Putih dan disertai pernyataan sikap bahwa tanah Dayak beserta dengan masyarakat Dayak bergabung dengan Negara Republik Indonesia.[27]

Kita sekarang ke Balikpapan, yang dikenal sebagai kota minyak yang banyak kekayaan alamnya telah lama dieksploitasi sejak masa kolonial Belanda. Sumber minyak ini sedianya bisa membuat Balikpapan berkembang menjadi sebuah kota yang maju. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Kekayaan alamnya yang melimpah justru membuat kota ini selalu diperebutkan oleh banyak bangsa lebih buruknya lagi, setiap pergantian pemerintah yang berkuasa kota Balikpapan selalu menjadi sasaran kemarahan dengan cara membumihanguskan kota Balikpapan agar sang lawan tidak menikmati hasilnya.

Begitu juga kondisi pada saat kekalahan Jepang oleh Sekutu. Mereka dengan sengaja menghancurkan Balikpapan menjadi puing-puing, sehingga sarana dan prasarana yang ada rusak berat. Belum lagi pengeboman yang dilakukan oleh Sekutu sendiri telah membuat Balikpapan semakin hancur. Apa yang terlihat dimana-mana hanya reruntuhan dan tunggul arang sisa–sisa kebakaran.

Kondisi ini diperparah dengan penderitaan rakyat Balikpapan yang kelaparan karena sulitnya memperoleh bahan pokok terutama beras. Selama ini Balikpapan mengandalkan pengiriman bahan-bahan pokok dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Sementara hubungan laut sulit dilakukan dan hanya mengandalkan perahu-perahu kecil yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ditujuan. Belum lagi hubungan darat yang masih sangat buruk.

Dengan Kondisi tersebut, rakyat Balikpapan terlambat memperoleh berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disiarkan pada tanggal 17 Agustus. Dalam situasi ini, muncul seorang pemuda bernama Abdul Moethalib yang membentuk organisasi yang diberi nama KIM (Komite Indonesia Merdeka), dibantu oleh Husein Yusuf dan kawan- kawan. Sementara di Nenang dibentuk Komite Penyambutan Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh M Rasjid.

Balikpapan baru mendapatkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia justru melalui pekerja BPM yang datang dari pulau Jawa untuk merehabilitasi kilang minyak yang rusak akibat perang. Walaupun begitu, berita proklamasi tidak langsung tersebar kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya dikalangan terbatas. Setelah para pemuda dan pejuang—terutama ex Heiho, Kaigun, dan Romhusa— mendengar berita tersebut, mereka sepakat untuk mengirimkan perwakilan untuk berunding bahwa masyarakat Balikpapan mendukung Pemerintahan Republik Indonesia. Maka munculah nama-nama Abdul Moethalib, Raden Achmad, Aminudin Nata, Machmudin Nata, Siebold Mewengkang, M. Sjachli Achmad. Mereka sepakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih di kawasan Pandansari, Karang Anyar, sebagai bentuk dukungan pada Pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1945.

Di Samarinda—kota yang didirikan pada tahun 1703 oleh PUA Adong' La Mohang Daeng Mangkona asal Bugis[28]—berita kekalahan Jepang atas Sekutu menjadi rahasia. Pemerintah Jepang sengaja menutup-nutupi berita tersebut dengan menyita radio milik penduduk. Namun, beberapa tokoh pergerakan yang terus mengikuti perkembangan perang Asia Pasifik telah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kalah. Atas kemenangan tersebut, Sekutu melakukan penyebaran selebaran melalui pesawat udara yang isinya antara lain agar pasukan-pasukan Jepang yang masih berkumpul atau bersembunyi di hutan-hutan supaya keluar dan menyerahkan diri. Pembesar-pembesar Jepang di Samarinda menyerahkan senjata-senjatanya kepada para tokoh Indonesia AM Sangadji, Dr. Suwadji dan Dr. Suwondo. Kekalahan Jepang disusul dengan kedatangan Tentara Sekutu di Samarinda pada tanggal 16 September 1945. Disisi lain kemerdekaan yang telah dicapai Indonesia sangat terlambat sampai di Samarinda. Kira- kira Sebulan sesudah berita proklamasi di kumandangkan, rakyat Samarinda baru menerima berita tersebut.

Sama hal nya yang terjadi di Sanga-sanga, yaitu daerah yang dikuasai oleh Kutai Kertanegara. Setelah tentara Sekutu pada tanggal 11 September 1945 melucuti tentara Jepang, baru rakyat tahu bahwa Sekutu resmi menduduki Sanga-sanga. Begitu juga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan Sudirin, seorang petugas penerima berita dari stasiun radio Tentara Sekutu, baru diterima setelah kurang lebih sebulan setelah proklamasi itu dikumandangkan di Jakarta.

[29] Berita itu tentu saja memberikan spirit perjuangan bagi pejuang Sanga-Sanga, yang secara spontan mendukung dan menyatakan Sanga-Sanga sebagai bagian dari Republik Indonesia. Segera setelah mendengar berita proklamasi, para pejuang yang tergabung dalam BPPD menyebarkannya kepada para anggota dan masyarakat di pelosok daerah dan mengibarkan bendera Merah Putih.

Masa perjuangan fisik di Kalimantan Timur, pada tahun 1946, sempat terbit tiga buah surat kabar, yaitu *Masjarakat Baroe* dan *Dharma* terbit di Samarinda dan *Soera Foni* di Balikpapan. Surat kabar ini terbit dua kali seminggu dan berkembang menjadi tiga kali seminggu. Surat kabar *Masjarakat Baroe* masih menggunakan ejaan lama, dan hadir dengan bentuk apa adanya, dan bahkan Belanda sempat menjulukinya dengan sebutan *koran sapu tangan*. Hal ini disebabkan karena ukurannya kecil sebidang saputangan dan dicetak dengan mesin *handset*.[30]

7.6. Respon Masyarakat terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Seperti halnya di daerah lain, masyarakat Kalimantan atau Borneo juga memiliki respons yang beragam terhadap proklamasi. Latar belakang etnis, status sosial-ekonomi, dan juga pola hubungan politik yang digangan dengan kelompok kekuasaan turut mempengaruhi pola respons yang diberikan terhadap perkembangan baru menyusul proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Dalam hal ini, kita mulai dengan kota Pontianak di Kalimantan Barat. Di sini, masyarakat yang dipelopori oleh para intelektual dan tokoh masyarakat menyambut baik kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Mereka segera menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI dengan membentuk PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia) pada tanggal 15 September 1945, dengan Muzanni A. Rani sebagai ketuanya, dan beberapa bekas anggota Khaigun Heiho menjadi pengurus.[31]

Prinsip dasar PPRI adalah menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia. Maksud dan tujuan dibentuknya PPRI terangkum dalam 3 butir ketetapan yang dihasilkan dalam rapat yaitu : (1) Daerah Kalimantan Barat adalah adalah wilayah Republik Indonesia;

(2) Rakyat Kalimantan Barat hanya patuh di bawah Pemerintahan Republik Indonesia; dan (3) Mulai hari ini (15 September) PPRI mengangkat Asikin Noor selaku Residen Republik Indonesia untuk daerah Kalimantan Barat yang pertama. Ketetapan ini dibacakan oleh Syukri Noor dan disebarkan ke seluruh Borneo Barat.

Selain PPRI, respon masyarakat terhadap berita proklamasi di Pontianak juga melahirkan terbentuknya PKO (Penjaga Keamanan Oemum), yang dibentuk oleh kelompok Tionghoa Indonesia dan didalamnya terdapat berbagai macam unsur yang ada di masyarakat seperti bekas Kaigun, Heiho, dan pemuda pergerakan. Perlu ditegaskan bahwa sebelum proklamasi, orang–orang Tionghoa telah mendirikan organisasi bernama Sie Min Hui (Persatuan Rahasia Anti Jepang), yang berpusat digunung Pasi dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, baik dari hasil selundupan maupun hasil rampasan dari Jepang. Sie Min Hui telah berkembang di beberapa daerah di Kalimantan Barat dan hal ini membuat pemerintah Jepang berusaha keras untuk membasminya. Setelah berdirinya PKO, organisasi Sie Min Hui ikut bergabung di dalamnya. Kelompok Tionghoa mengisyaratkan bahwa pihak sekutu yang menang perang terhadap Jepang adalah Amerika–Inggris–Cina-Belanda, di mana beredar kabar bahwa daerah Kalimantan Barat akan diserahkan kepada RRC.[32] Anggapan bahwa kemenangan Sekutu adalah kemenangan Cina memicu perselisihan antar-masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak.

Rakyat suku Dayak menanggapi berita proklamasi Kemerdekaan dengan menuntut dikembalikannya kedudukan Sultan sebagai penguasa di Kalimantan Barat. Pada awal Oktober 1945, mereka datang ke Pontianak beramai–ramai menginginkan pengganti sultan yang telah di bunuh oleh Jepang, dengan membawa kepala-kepala bangsa Jepang yang telah dikayau. Di sepanjang pedalaman Kalimantan Barat, dari Ngabang sampai ke Kapuas Hulu, masyarakat Dayak bergabung dengan pemuda-pemuda pejuang untuk mendirikan organisasi. Rakyat Dayak melakukan pemberontakan balas dendam kepada pemerintah Jepang. Aksi pertama yang mereka lakukan adalah dengan membunuh Ngatami, Kepala Keibetai Jepang di Kapuas Hulu, kemudian disusul aksi–aksi lain sehingga membuat Jepang cukup repot untuk mengatasinya, di samping harus menghadapi Sekutu. Rakyat Dayak dipimpin oleh Panglima Burung menyerbu ke Markas Besar Tentara Jepang di Pontianak dengan membawa semua persenjataan mereka, mandau, sumpit, tombak, dan parang. Salama ini, masyarakat Dayak menjadi bagian dari kesultanan Pontianak sehingga dengan kekalahan Jepang,

rakyat Dayak menginginkan Sultan mengambil alih kekuasan dari tangan Jepang.

Sementara itu, para pemuda Dayak ynag berada di Sanggau juga telah beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Jepang yang telah melanggar adat istiadat masyarakat dan berlaku kejam dan sewenang–wenang. Peristiwa itu antara lain adalah peristiwa di desa Suak Garong dan di desa Sekucing Lebai di daerah perkebunan kayu milik Jepang. Peristiwa itu ditandai dengan beredarnya Mangkok Merah ke seluruh masyarakat Dayak, yang membakar semangat rakyat Dayak. Peristiwa Kunyil yang dipimpin Temenggung Madi adalah patriotisme melawan Jepang, sehingga banyak tentara Jepang yang tewas.[33]

Pada perkembangan selanjutnya, di Pontianak muncul lagi organisasi-organisasi seperti GAPI (Gabungan Persatuan Indonesia) pimpinan dr. Sudarso pada 18 Desember 1946, kemudian PBI (Persatuan Buruh Indonesia) yang dipimpinan S.H. Marpaung. Begitu pula yang proses yang sama berlangsung di Singkawang. Wan Abbas Mansyur, setelah menerima berita Proklamasi dari Ya' Dundik, mengajak teman-temannya untuk mendirikan TRI (Tentara Republik Indonesia). Organisasi ini didirikkan terutama untuk merespon isu terkait dengan etnis Tionghoa yang mengklaim bahwa Kalimantan akan diduduki Tiongkok. Sementara itu, di sisi lain Belanda juga menekan mengancam pimpinan TRI yang terpaksa harus berpindah-pindah tempat. TRI akhirnya bubar karena sulitnya melakukan koordinasi antar-anggota. Sebagian Anggota TRI mendirikan organisasi baru, Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI) yang di pimpin dr Salekan dan Bero Mertosoetikno dan didukung oleh BPIKB pimpinan Ali Anyang.

Sementara itu di Sambas, meskipun berita tentang proklamasi datang terlambat, semangat rakyat untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tidak surut. Atas prakarsa dari para pejuang Sambas, maka terbentuk organisasi PERBIS (Persatuan bangsa Sambas) pada 23 Oktober 1945 dengan pimpinan H.Siraj Sood, Naim Razak, M. Kemad, Umar Sood, dan U.A. Hamid. Tujuan dari PERBIS iniadalah menyatukan dan menghimpun rakyat Sambas agar bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia. Di samping PERBIS, juga berdiri Komite Nasional Sambas. [34]

Satu peristiwa yang mengharukan bagi rakyat Sambas dan Kalimantan Barat secara umum, adalah seorang pejuang yang dengan semangat dan keberanian luar biasa berusaha mengibarkan bendera

Merah Putih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 di gedung bioskop Sambas, di mana rapat umum yang dihadiri oleh rakyat Sambas dalam segala lapisan sedang dilaksanakan. Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpin PERBIS yang menyalakan semangat untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali Kalimantan Barat. Dengan semangat yang menyala, rombongan rakyat Sambas berkeliling kota dengan membawa bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya dan meneriakkan kata-kata "Merdeka". Rombongan berhenti di kantoor Controlleur Sambas dan menurunkan bendera tiga warna Belanda serta menyobek bendera warna biru dan kemudian menaikan bendera Merah Putih. Mereka menuju Istana Sultan Sambas pada jam 11.00 siang.

Setibanya di sana, Haji Siradj Sood pimpinan PERBIS memulai pidatonya untuk mengobarkan semangat rakyat Sambas melawan NICA dan Belanda. Selesai berpidato Haji Siradj Sood memerintahkan untuk menaikkan bendera Merah Putih, namun sebelum bendera dinaikan beberapa kendaraan truk dan Jeep milik pasukan Belanda pimpinan kapten Van Der Shoor menuju halaman kraton dan memerintahkan kepada rakyat Sambas untuk tidak melakukan gerakan. Kemudian Kapten Van Der Shoor diiringi oleh para pengawalnya mendatangi Tabrani yang kala itu membawa bendera Merah Putih dan memerintahkan untuk menyerahkan kepada Kapten Van Der Shoor. Tabrani tidak mau menyerahkan bendera merah putih bahkan dengan gagah berani mengangkat bendera Tabrani memekikkan kata "Merdeka" sebanyak tiga kali. Pada saat itulah rentetan peluru menghujani tubuh Tabrani hingga gugur sebagai seorang pejuang yang tidak kenal takut dan menyerah. [35] Sementara para pejuang dan tokoh masyarakat yang tidak sempat menghindar dtangkap Belanda dan ditawan di penjara Singkawang. Untuk mengenang keberanian para pejuang dan jasanya untuk sambas, maka di simpang tiga jalan masuk ke Sambas didirikan tugu peringatan pejuang, dan di halaman istana dekat tiang bendera telah didirikan sebuah prasasti tentang peristiwa tersebut.

Sementara di kota Ngabang, ibukota Landak, para pejuang yang diprakasai oleh Gusti Abdul Hamid—bersama dengan Gusti Lagum, Jim Kadaruddin, Ali Durja, Gusti M. Said, Gusti Seman Abas dan M. Tayib—membentuk PRI (Persatuan Republik Indonesia) pada bulan Maret 1948. Tujuan dari PRI yang diketuai Gusti Abdul Hamid ini adalah

menyatukan seluruh masyarakat Landak untuk mewujudkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.[36] PRI berkembang dengan cepat dan telah mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah.

Pada 9 Oktober 1946 PRI Landak diganti namanya menjadi GERAM (Gerakan Rakyat Merdeka) yang lebih bersifat revolusioner, meskipun susunan pengurusnya tidak mengalami banyak perubahan.[37] Untuk memperlancar perjuangan rakyat Landak, mereka melakukan komunikasi dengan para pejuang yang ada didaerah-daerah lain seperti Pontianak, Singkawang, Sintang, Sanggau, dan juga membuka cabang-cabang GERAM di daerah setingkat kecamatan.

Semangat perjuangan rakyat juga berkembang di Ketapang. Langkah-langkah persiapan segera dilakukan oleh para pejuang Ketapang antara lain : [38]

1. Membentuk Barisan Pengawal Kemerdekaan yang dipimpin oleh Harkan Jamani, dengan kegiatan mengadakan latihan –latihan ketentaraan dengan menghimpun eks Kaihun Heiho dan *Seinendan* guna periapan menghadapi tekanan dari Belanda
2. Barisan Pembela Proklamasi dipimpim oleh Khaerani Bagal, dengan menghimpun kekuatan rakyat , membangkitkan semangat kesadaran dan patriotisme di kalangan generasi muda
3. Angkatan Muda Indonesia (API) pimpinan A. Khalik Hasan yang statusnya adalah Cabang Kalimantan Barat berpusat di Pontianak , dengan arah perjuanganya mempersatukan diri dengan Negara Republik Indonesia
4. Terbentuknya organisasi Perjuangan Rakyat Ketapang (PERAK) yang dipimpin oleh Supomo dengan tujuan menggerakan rakyat ketapang untuk siap mempertahankan dan menegakan kemerdekaaan RI di wilayah Ketapang

Juga perlu dicatat di sini usaha seorang bernama Ade Mohammad Johan dari Nanga Pinoh. Dia bersama lain berinisiatif menggalang kekuatan rakyat agar penjajah Belanda tidak kembali lagi Nanga Pinoh dan juga Sintang. Untuk itu, Ade Mohammad Johan dan kawan–kawan membentuk sebuah organisasi Pemberotak Daerah Melawi,[39] yang kemudian berubah nama menjadi BOPMP setelah bergabung dengan TKR di bawah pimpinan Kapten Markasan.

Seperti halnya dalam pembahasan isu sebelumnya, Banjarmasin adalah kota pertama untuk diberi perhatian di Kalimantan Selatan.

Meyangkut respon terhadap proklamasi, masyarakat Banjarmasin menyadari bahwa kemerdekaan sangat penting agar bisa terlepas dari penjajahan yang mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Karena itu, sebelum hari proklamasi tiba, rakyat Banjarmasin telah melakukan rapat-rapat rahasia dan pembentukan organisasi yang bertujuan menghimpun kekuatan guna melawan pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945 diadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh M Amir Effendi, Dr. Sosodono, Mr.Rusbandi, Achmad Ruslan, dan Pangeran Musa Andikesuma. Dari pertemuan itu terbentuk sebuah organisasi yang bernama Badan Pertahanan Perlawanan Jepang. Hal yang sama juga berlangsung di daerah lain, Barabai dan Amuntai.

Beberpa hari setelah itu, tanggal 15 Agustus 1945, Tuan Hayakawa, Borneo Meinsebu Cokan, memanggil para tokoh Banjarmasin, yaitu antara lain Hadhariyah M, Mr Rusbandi, dan Pangeran Musa Andikesuma. Pada pertemuan itu pemerintah Jepang mengumumkan kekalahannya terhadap sekutu, sehingga dalam waktu dekat pemerintah Sekutu akan datang ke Banjarmasin. Pemerintah Jepang menyarankan kepada para tokoh Banjarmasin untuk mendirikan partai politik. Maka atas saran tersebut, pada tanggal 16 agustus 1945 berdiri PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) dengan Pangeran Musa Andikesuma sebagai ketua.[40] Tidak lama setelah itu, PRI segara membuka cabang dibeberapa daerah, seperti Martapura, Amuntai dan Kandangan. Selain itu, PRI juga membentuk organisasi untuk kaum pemuda dan wanita. Sebagian besar anggotanya adalah mereka yang pernah menjadi anggota organisasi Jepang, yaitu *Seinendan*, Boei Teisin Tai, dan Fu Jin Kai.

Setelah memasuki masa kemerdekaan, PRI ikut aktif membentuk KNI Daerah sebagai tindak lanjut dari pembentukan KNI Nasional. Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 5 Oktober 1945, dan dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda, PRI menhasilkan keputusan sebagai berikut:[41] (1) Mengangkat ketua PB PRI Pangeran Kesuma Ardikesuma sebagi Residen Kalimantan; dan (2) Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan di Banjarmasin, dengan S. Ruslam diangkat sebagai ketua.

Keputusan ini secara resmi diproklamirkan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Mayor Van Assenderp (Pimpinan NICA), pemimpin tentara Australia Kolonel Rabson , para kyai dan pejuang.[42] Hal ini mengherankan karena dari pihak NICA maupun Sekutu tidak melarang

ataupun bereaksi terhadap pembentukan KNI daerah maupun pengangkatan Residen Kalimantan versi PRI.

Sikap NICA di atas membuat semangat para pejuang semakin besar. Karena itu, para pemuda yang tergabung dalam barisan PRI merencanakan peresmian dan perayaan berdirinya Pemerintah Republik Indonesia daerah Kalimantan Selatan dan KNI Daerah Kalimantan pada 10 Oktober 1945. Dalam acara tersebut akan dilaksanakan penurunan bendera Belanda dan menaikan bendera Merah Putih serta pawai keliling kota serentak di daerah–daerah Kalimantan Selatan. Namun rencana ini digagalkan oleh tentara NICA dan Australia. Hal ini tidak mengherankan sebab sehari sebelum peristiwa itu, tanggal 9 Oktober, para pemuda pejuang telah berbicara dengan Kolonel Robson, dan dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu akhirnya mengijinkan perayaan kenerdekaan dengan melakukan pawai dan membawa bendera Merah Putih.[43]

Hal yang sama juga bisa dilihat di Hulu Sungai dengan ibukota Kandangan. Atas inisiatif para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan, semua rakyat menaikan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyebaran pamlet dan pembuatan tugu lilin sebagai simbol api kemerdekaan dipelopori oleh Hamli Tjarang dan kawan-kawan. Bersama dengan itu, para pejuang Kandangan lainnya juga membentuk organisasi kelaskaran yang bernama GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia) pada tanggal 23 Agustus 1945. GERMERI tumbuh dari berbagai organisasi bawah tanah yang ada pada masa Jepang.[44] Jadi tidak mengherankan kalau sejumlah peristiwa patriotik di Kandangan dipelopori para tokoh GERMERI, seperti Baseri alias Hasnan Basuki, Baderun alias Bayam S, H.A. Jingga, Masdar, dan Amir Kasan. Mereka antara lain memuat berita proklamasi kemerdekaan di surat kabar *Borneo Simboen*, mengadakan pasar malam selama 7 hari di Kandangan disertai penyebaran berita kepada masyarakat, pembuatan tugu lilin sebagai peringatan api kemerdekaan, dan lain–lain. Selain GERMENE juga dibentuk PPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia) pada akhir Agusus 1945 di bawah pimpin an M. Yusi.[45]

Begitu pula potret yang sama juga terjadi di Kota Baru, kota lain di Kalimantan Selatan. Selain pengibaran bendera Merah Putih, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia, masyarakat Kota Baru juga membentuk organisasi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan. PPRI (Persiapan

Pemerintah Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan berlokasi di sekolah rakyat di kampung Baharu Kota Baru.

Begitu juga halnya di Pagatan, sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis. Sebagai ungkapan kegembiraan, rakyat Pagatan secara serentak mengibarkan bendera Merah Putih dan meneriakan yel-yel penolakan terhadap pemerintah NICA dan segera mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh para pejuang Pagatan. Rapat tersebut menghasilkan satu kesepakatan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Pagatan (KNI Daerah) yang dipimpin oleh Andi Ancong dan juga membentuk TKR, Polisi Militer, pada tanggal 5 Oktober 1945, serta BKR yang telah dibentuk lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 1945.

Hal yang sama juga terjadi di Pangkalan Bun. Ketika pemerintah Jepang tiba-tiba menghilang, para pejuang dan tokoh masyarakat telah berunding untuk menyikapi situasi. Dari perundingan yang bersifat rahasia itu, diputuskan beberapa hal berikut: (1) Pemuka/tokoh masyarakat merupakan satu badan Perwakilan Rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi ; (2) Pangeran Arianingrat: Kepala Pemerintahan yang akan diangkat oleh Perwakilan rakyat. Dia akan memerintah di bekas kerajaan Kota Waringin di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Bun. Semua pegawai yang ada, bersama seluruh anggota polisi, akan ditetapkan menjadi pegawai atau pejabat daerah; (3) Seluruh badan bentukan Jepang, seperti *Kounan Hokokudan*, *Buei Tai Sintai* dan *Seinedan*, dijadikan Badan Kelaskaran Rakyat penerus perjuangan bersenjata; (4) Menentukan waktu pengoperan pemerintahan dari kekuasaan Jepang atas dasar instruksi Pemerintah RI.[46]

Dalam rangka melakukan konsolidasi perjuangan, para tokoh masyarakat di Pangkalan Bun mengadakan pertemuan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 33 orang tokoh masyarakat dan pemuda yang melahirkan organisasi yang diberi nama KPRIM (Komite Penyokong Republik Indonesia Merdeka) dengan H.M. Saleh sebagai kaetua.[47] Keesokan harinya, tanggal 18 Oktober 1945, Ketua KPRIM beserta seluruh anggotanya mengibarkan bendera Merah Putih di Kantor Lanschap Kota Waringin di kota Pangkalan Bun. Sikap ini sebagai langkah awal dari kesepatan rakyat Pangkalan Bun. Selanjutnya, para pemuda tidak tinggal diam segera membentuk Organisasi

Angkatan Muda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, disebut AM, dan diketuai M. Idris Hadiparmono pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah susunan kepengurusan terbentuk AM segera mengirim semua anggotanya ke daerah untuk menyebarkan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, selain membentuk cabang-cabang AM di daerah.

Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, utusan pemerintah dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Kota Waringin melakukan rapat umum di Gedung Nasional kota Pangkalan Bun. Dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh daerah Kota Waringin, dalam rapat tersebut semua rakyat Kota Waringin menyokong sepenuhnya perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia dan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia. Keputusan ini selanjutnya di bawa Abdullah Machmud ke Jakarta untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia di Yogyakarta.[48]

Peristiwa lain yang tidak kalah menarik adalah sikap-sikap patriotik rakyat Pangkalan Bun untuk menyikapi berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia,terutama dalam mengambil inisiatif di bawah ini:

- Pada tanggal 29 Agustus 1945, upacara resmi pengibaran sang saka Merah Putih diadakan di muka Kantor Pemerintahan Daerah Pangkalan Bun. Dalam hal ini Pemerintah Jepang tidak menunjukan reaksi apapun terhadap rakyat Pangkalan Bun. Sikap Jepang ini meningkatkan semangat dan keberanian rakyat.
- Pasar malam diadakan mulai tanggal 5 September 1945, dan berlangsung selama tiga malam. Tindakan ini adalah kelanjutan perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia
- Tanggal 10 September 1945 penyerahan kekuasaan Pemerintahan dari kekuasaan Jepang kepada pemerintahan baru yang dijalankan oleh Pangeran Arianingrat sebagai Kepala Distrik Kota Waringin, Sultan dalam pemerintahan.
- Pada tanggal 25 September 1945, tentara Australia yang tergabung dengan tentara Sekutu /NICA mendatangi Kumai untuk mengangkut tentara Jepang sebagai tawanan perang ke Banjarmasin.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut, pada tanggal 12 November 1945 Pengeran Arianingrat secara resmi ditetapkan sebagai Kepala Distrik Pangkalan Bun dan merangkap sebagai Sultan dalam Pemerintahan Republik Indonesia di daerah Kota Waringin, berkedudukan di Pangkatan Buun berdasarkan Surat Ketetapan tanggal 11 November 1945 no. 1/ KPRI . Untuk Kepala Distrik Pangkalan Bun di tunjuk seorang yang bernama Mas Oemarhan.

Apa yang terjadi di Pangkalan Bun juga terjadi di daerah Sampit dan Semuda, di mana para pejuang Sampit merespon berita proklamasi dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Selain itu, para pejuang juga segera membentuk BPRI (Badan Perjuangan Republik Indonesia) pada akhir November 1945 yang dipimpin Abdul Hamid dan Hasyim Djapar. Walaupun BPRI melakukan perlawanan terhadap pemerintah Sekutu, karena keterbatasan persenjataan dan personil, mereka akhirnya kalah dan kemudian menyingkir ke daerah pedalaman. Pada bulan Januari tahun 1946 Sampit dan Semuda dapat diduduki oleh Belanda sepenuhnya.

Di Puruk Cahu, pengibaran bendera Merah Putih dipimpin A.M. Sangaji, Mahir Mahar dan Adonis Samad pada 9 Oktober 1945. Ini dilakukan sebagai perwujudan dari kegembiraan menerima berita proklamasi. Para pejuang juga mengeluarkan pernyataan bahwa Barito Hulu mendukung Negara Republik Indonesia.[49] Pernyataan Tanah Dayak dan rakyat Dayak bergabung dengan Negara Republik Indonesia (NRI) ini disaksikan Tjilik Riwut dan Abdoel Moetalib Sangaji.[50]

Kegembiraan juga terlihat pada masyarakat Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dengan dipelopori oleh BPRI yang ada di Anjir Serapat, markas BPRI pimpinan H. Dahlan, telah dikibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 12 Desember 1945. Disamping itu berdiri cabang Sarekat kerakyatan Indonesia yang diketuai W.A. Samat Helmut Kunun danZailani Noor.[51]

Sementara itu untuk menindaklanjuti perintah dari pemerintah RI untuk membentuk Badan perjuangan di daerah, maka J.M Nahan, tokoh Dayak Banjarmasin mengajak para pejuang untuk mendirikan sebuah organisasi. Pada pertemuan yang dihadiri oleh pemuda, tokoh politik dan masyarakat disepakati pembentukan badan perjuangan yang diberi nama GP3 (Gerakan Pelopor Penegak Kemerdekaan). GP3 bertujuan menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat dan

pejuang senasib dan sepenanggungan dalam membentuk jaringan komando perang gerilya dalam menghadapi tentara Belanda/NICA dan juga menghindari upaya-upaya politik adu domba (*devide et impera*) yang dijalankan pemerintah Belanda/NICA. GP3 kemudian berganti nama dengan GRRI (Gerakan Revolusi Republik Indonesia).

Selain GRRI, di Kalimantan juga berdiri organisasi Dayak lainnya, yakni Pemuda Indonesia Merdeka di Barito pimpinan Batara Linggar, Pemuda Indonesia Merdeka di Muara Teweh pimpinan Achmad Kusasie, Pemuda Republik Indonesia di Marabahan/Bakumpai pimpinan Bahaudin. Namun, pada Desember 1945, semua organisasi dan badan tersebut diperintahkan untuk melebur dengan pasukan kesatuan Tentara Rakyat dibawah komando PP BPRI/BPOG seluruh Indonesia pimpinan Mayor Djendral Bung Tomo.

Situasi di Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai kota minyak, berbeda dari situasi di Kalimantan lainnya. Para penjajah bercokol lebih awal dan karenanya berkuasa lebih lama di di Kalimantan Timur. Keberadaan minyak telah mengubah wajah daerah. Penduduknya kebanyakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Makasar, Banjarmasin, dan Jawa. Sementara masyarakat Dayak terdesak oleh rakyat pendatang dan memilih masuk ke dalam hutan.

Kita mulai dengan kota Samarinda. Hampir sebulan setelah Kemerdekaan Indonesia dibacakan, baru terbentuk organisasi yang dipimpin oleh Dokter Soewaji Prawiroharjo yang diberi nama P3KRI (Panitia persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia). Ada empat dokter yang dianggap sebagai tokoh pejuang Kalimantan Timur, yaitu dr. Sendok di Bulungan, dr A. Rivai, dr. Soewondo, dan seorang dokter lagi yang bertugas di Berau.[52] Kemudian berdiri sebuah gerakan yang diberi nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) pada tanggal 23 September 1945 dengan pemimpinnya R.P. Yoewoono, Bustani H.N, Djunaid Sanusie, M. Asnawie, dan Chairul Badar.

Organisasi–organisasi inilah yang mempelopori setiap gerakan yang ada di Samarinda, termasuk pengibaran bendera Merah putih di depan rumah sakit Karang Mumus. Atas peritiwa tersebut, dr. Suwaji oleh Belanda dipindah-tugaskan ke Palu di Sulawesi. Belanda selanjutnya mengeluarkan larangan berorganisasi yang ditandatangani oleh Kapten Bhinkuizen dan Komandan Kepolisian Inspektur Van De

Neste. Meski demkian, para pejuang tetap melakukan gerakan dengan sembunyi–sembunyi, sehingga berdirilah Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di bawah pimpinan R.P. Joewono.[53] Keberadaan organisasi ini semakin berkembang ke berbagai daerah seperti di Balikpapan yang dipimpin oleh Kasmani dan Dasuki.

Lain halnya di Sanga-Sanga, di mana pembentukan organisasi justru berlangsung pada saat penjajahan Jepang. Organisasi Ksatria dibentuk pada bulan Desember 1943 yang dipimpin Sudiyono. Organisasi Ksatria didirikan oleh orang–orang Jawa yang didatangkan Jepang, terutama dari Malang, Jawa Timur. Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja, yang dinamakan romhusa. Pada april 1942 didatangkan romhusa sebanyak 1.000 orang yang dikenal dengan nama Malang I, disusul pada Juli Malang II sebanyak 1.000 orang. Mereka diangkut dengan kapal maupun perahu Bugis dan dipekerjakan di bangsal-bangsal distrik, Sangga-sanga, Muara, Anggana dan lain-lain.[54] Organisasi Ksatria yang bersifat sosial ini berganti nama menjadi BPPD (Badan Penolong Perantau Djawa) pada 15 September 1945. Tujuannya tetap sama, yaitu menolong anggotanya apabila dalam kesusahan, memperkokoh kesetiakawanan, dan saling tolong-menolong jika ada anggota yang sakit, meninggal dunia atau memerlukan pertolongan. Organisasi BPPD yang dipimpin oleh Sukardi keanggotaanya semakin berkembang, bukan saja etnis Jawa tetapi juga masyarakat etnis lain seperti Banjar, Maluku, dan Sulawesi.

Pemerintah Sekutu menjalin hubungan baik dengan BPPD, sebab Sekutu membutuh tenaga untuk melancarkan semua kegiatanya. Begitu juga BPPD menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Sekutu sehingga bantuan bahan makanan seperti beras, sayuran, garam dan sarana transpotasi berjalan lancar sepanjang tidak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat.[55] BPPD juga diijinkan menggunakan lencana Merah Putih dan mengibarkan bendera Merah Putih. Namun, ini tidak berlangsung lama. Setelah Sekutu menyerahkan Sanga-Sanga kepada tentara NICA-Belanda pada 11 September 1945, BPPD dan rakyat Sanga-Sanga merasa tertekan dengan berbagai larangan, seperti penggunaan lencana Merah Putih dan pengibaran bendera Merah Putih.

Di Balikpapan, selain BPRI yang telah disebut di atas, sebelumnya telah terbentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) dengan Abdul Mutalib sebagai ketua. Di daerah Nenang (daerah Balikpapan seberang) dibentuk Komite Penyambutan Indonesia Merdeka (KPIM) yang diketuai Moh. Rasijd. Pada 13 November 1945, dengan dipelopori Komite Indonesia Merdeka (KIM) pimpinan Abdul Mutalib, diadakan pengibaran Bendera Merah Putih yang mengambil tempat di lapangan terbuka Karang Anyar Balikpapan (kompleks BPM) dengan diikuti oleh ribuan massa rakyat yang mengenakan lencana merah putih. Pengibaran bendera tersebut dipimpin Abdul Mutalib sendiri dan Husein Yusuf, sedangkan dalam acara pembacaan do'a dipimpin oleh Penghulu Ibrahim Nur.

Upacara yang diikuti oleh ribuan massa dari Balikpapan ini diketahui oleh tentara NICA. Dengan pasukan militernya mereka bertindak kasar dan membubarkan rapat tersebut dan menangkap para pemimpinnya. Namun, tindakan militer NICA tersebut tidak mengecilkan semangat juang para pemuda. Sesudah Peristiwa demonstrasi tersebut, para pejuang segera membentuk kelompok-kelompok perjuangan bersenjata, antara lain: (1) Kelompok Abdurrachman Muhidin yang bermarkas di daerah Balikpapan Seberang; (2) Kelompok Kasmani yang bermarkas di Gunung Samarinda; (3) Kelompok Anang Acil yang bermarkas di Gunung Malang-Dam; (4) Kelompok Amir Hamzah Yusuf dan Moh. Rasijd yang bermarkas di Nenang; dan (5) Kelompok Djura yang bermarkas di Samboja. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok pejuan bersenjata tersebut, mereka melaksanakan aksinya secara gerilya.

Selanjutnya di Balikpapan juga dibentuk organisasi Fonds Nasional Indonesia (FONI) dan Partai Politik Ikatan Nasional Indonesia (INI) yang juga diketuai oleh Aminudin Nata.[56] FONI didirikan di Balikpapan pada 29 November 1945 dengan tujuan menghimpun dana-dana perjuangan dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara INI yang dibentuk pada tanggal 5 Juni 1946 bertujuan untuk memudahkan penyampaian berita-berita umum, dari INI pusat di Balikpapan kepada seluruh cabang-cabang di daerah di Kalimantan Timur. Penyampaian berita tersebut dalam bentuk majalah mingguan dengan nama "Suara FONI" yang diasuh oleh Aminudin Nata dibantu Abidin dan Najaluddin

7.7. Perjuangan Rakyat Dayak

Selama ini perjuangan rakyat Dayak belum banyak diungkapkan kepermukaan, hal ini karena informasi tentang perjuangan rakyat Dayak masih sedikit. Selain itu, masyarakat Dayak sendiri lebih menyukai hidup dalam kedamaian dan ketenangan, sehingga mereka lebih memilih untuk hidup bersama-sama kelompoknya. Masyarakat Dayak mempunyai prinsip, selama kehidupan mereka tidak diganggu maka mereka tidak akan mengganggu kehidupan orang lain .

Rakyat Dayak sejak awal menyadari pentingnya organisasi dalam memperjuangkan hidupnya. Perjuangan rakyat Dayak dimulai dengan berdirinya organisasi yang bernama Serikat Dayak yang dipelopori antara lain oleh Hausman Babu.[57] Sarekat Dayak berdiri pada tahun 1919 dan berakhir pada tahun 1926. Selanjutnya berdiri organisasi Pakat Dayak yang bertahan sampai berakhirnya pemerintahan Belanda. Pakat Dayak bertujuan memajukan rakyat dari ketertinggalan. Kemudian pada masa kemerdekaan berdiri Persatuan Dayak yang berpusat di Pontianak dan mempunyai beberapa cabang di Kalimantan. Tujuan organisasi Persatuan Dayak ini tetap sama, yaitu memajukan rakyat Dayak terutama di bidang pendidikan, karena mereka sadar bahwa rakyat Dayak masih tertinggal. Maka para pemimpin Dayak seperti J.Uvang Uray, F.J. Palaunsuka, A. Djarlani, T. Brahim, dan F.D.Leiden berusaha untuk memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Di Kalimantan Timur berdiri Persukai (Persatuan Suku Kalimantan Indonesia) yang dipimpin Kamuk Tupak, W, Bungai, Muchtar, dan R. Magat. Sementara pemuda-pemuda Dayak Kalimantan Tengah yang belajar di luar daerah mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh M. Mahar pada 1937. Mereka mendirikan organisasi yang diberi nama Komite Kesadaran Suku Dayak yang dipimpin Hauman Babu. Tujuan dari Komite Kesadaran Suku Dayak adalah untuk menyuarakan hak masyarakat Dayak yang selama ini tidak pernah di dengar pemerintah Penjajah. Sekembalinya dari Jawa, M. Mahar mendirikan organisasi yang bernama Pakat Dayak pada 20 agustus 1938.

Tujuan dari Pakat Dayak pimpinan M.Mahar tercantum dalam Anggaran Dasarnya, yaitu: (1) Mengejar ketinggalan derajat suku baik pun dalam soal politik, sosial, dan ekonomi, (2) Persatuan seluruh suku Dayak, (3) Mengejar segala hak-hak yang diakui oleh hukum negara, dan (4) Mempertinggi kembali adat leluhur serta kebudayaan suku.[58]

Maka dalam waktu setahun Pakat Dayak sudah mempunyai cabang-cabang di seluruh tanah Dayak di Kalimantan.

7.8. Peralihan Kekuasaan

Menyusul kalah perang oleh Sekutu, Jepang sedianya harus menyerahkan seluruh wilayah penjajahan kepada pihak Sekutu. Hanya saja, sementara tentara Sekutu mendarat, kemerdekaan Indonesia sudah diproklamiran pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, kevakuman politik tidak bisa dihindari. Dan suasana itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Meski kerap terlambat sampai ke daerah, informasi tentang proklamasi kemerdekaan telah memberikan kesadaran kepada rakyat bahwa kemerdekaan tidak dapat dicapai tanpa adanya perjuangan.

Karena itu, ketika mendengar kekalahan Jepang atas Sekutu, para pejuang sangat bersemangat membebaskan daerah mereka dari pemerintah Jepang. Di Kalimantan, tindakan pertama yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan untuk menghimpun kekuatan, mempersiapkan kemerdekaan dan mempertahankan Kalimantan dari bangsa asing. Dalam waktu yang sangat sempit itu, banyak organisasi bermunculan sebagai salah satu wadah untuk mempersatukan kekuatan di masyarakat, dan sekaligus sebagai suatu cara mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Meskipun muncul dengan nama yang berbeda–beda, tujuan dan misi dari semua organisasi adalah menolak adanya penjajahan dalam bentuk apapun dan menginginkan kemerdekaan negara Indonesia.

Awalnya kehadiran tentara Sekutu hanya untuk melucuti dan membebaskan tahanan Jepang, namun dalam perkembanganya Sekutu justru menyerahkan semua jajahan Jepang kepada NICA-Belanda. Walaupun akhirnya peralihan kekuasaan itu tetap terjadi, tapi NICA-Belanda harus berhadapan dengan rakyat Kalimantan yang begitu gigih mempertahankan kemerdekaan daerahnya. Berbagai organisasi pemberontakan dibentuk sebagai bentuk penolakan terhadap Pemerintahan NICA dan mengembalikanya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan wilayah Kalimantan oleh Sekutu kepada Belanda/NICA dilakukan pada 24 Oktober 1945. Bersamaan dengan itu, Belanda tidak lagi menggunakan istilah "Pemerintahan NICA" tetapi

kembali menggunakan sebutan "Hindia Belanda". Antara kurun waktu tahun 1946-1947 di beberapa daerah di Kalimantan terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh Belanda.[59]

Bagian berikut ini akan membahas proses pengambilalihan kekuasaan oleh para pejuang dan tokoh masyarakat Kalimantan. Untuk hal ini, kita mulai dengan kota Pontianak di Kalimantan Barat, di mana PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia) tampil sebagai organisasi gerakan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal ini, PPRI yang dipelopori kaum muda dan tokoh masyarakat segera menduduki kantor Syuntiyoo dan mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah Republik Indonesia, dan rakyat kalimantan barat hanya patuh pada pemerintahan RI dan Asikin Nooor sebagai Residen Sementara wilayah tersebut. Pernyataan ini segera disebarluaskan ke seluruh daerah.Untuk langkah selanjutnya PPRI membagi tugas sebagai berikut:

1. Menugaskan Kuzanni A. Rani untuk mengambil kesempaatan menggunakan sonder radio Jepang untuk menghubungi sonder perjuanagan di Jawa, serta mengumumkan tentang berdirinya PPRI di kota Pontianak;
2. Mengugaskan Jayadi Saman dan Anang Salim untuk ke Jakarta menghubungi Pemerintah RI agar mengirim pejabat-pejabatnya ke Pontianak;
3. Menugaskan Nurdin Siregar mengkoordinir pemuda-pemuda ex Heiho dan ex polisi Jepang dari bangsa Indonesia untuk mengumpukan senjata Jepang
4. Pimpinan PPRI mengadakan hubungan dengan tokoh–tokoh pejuang pergerakan serta pejabat-pejabat tingg Jepang. Dari PPRI diwakili oleh dr. Soedarso , AB Jampi, Sukotjo Katim, RM Sanjoto , Rajikan, Asikin Noor untuk mengambil alih pemerintahan di kota Pontianak
5. Mempersiapkan anggota PPRI terutama pejuang pemuda agar ikut terlibat dalam persiapan pemerintahan RI di kota Pontianak [60]

Kelompok masyarakat Cina dengan organisasi PKO juga ingin mengambil alih kekuasaaan dari tangan Jepang ke pemerintah Cina Tiongkok. Dengan menghembuskan isu tentang pemerintahan Tiongkok yang akan mengambilalih kekuasaan di Kalimantan Barat , PKO

mencoba memperkeruh keadaan. PKO mengibarkan bendera Kwomintang dan gambar Chiang Kai Shek diarak berkeliling kota. Perbuatan PKO ini jelas memperlihatkan sikap bermusuhan dengan para pemuda dan pejuang di daerah, sehingga terjadi bentrokan senjata di dipusat-pusat masyarakat Cina di Pontianak, Singkawang, Djintan, dan Zsedau. Dengan bantuan masyarakat Dayak maka para pemuda dapat mengkhiri bentrokan itu dengan adanya perjanjian perdamaian.

Sementara masyarakat Dayak sangat menghendaki agar Sultan baru dinobatkan secepatnya sebagai pengganti Sultan lama yang dibunuh Jepang. Pasukan Dayak Majang Desa yang dipimpin oleh Panglima Burung dan para panglima adat suku Dayak lain berhasil mencapai kesepakatan dengan para pejuang dan tokoh masyarakat untuk mengangkat Sultan Syarif Thaha Alkadri sebagai sultan Pontianak pada tanggal 21 September 1945. Penobatan Sultan syarif Thaha Alkadri diselenggarakan di halaman Istana Kadriah disertai pengibaran bendera Merah Putih oleh Gusti Matan dan Abdul Muthalib Rivai sebagai bukti dukungan kerajaan Pontianak dan PPRI terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

Di lain pihak, pendaratan pasukan Sekutu di Pontianak tengah berlangsung, yang dilakukan dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 13 Oktoober dengan kapal perang HMAS "Barcoo" yang berkapasitas 2000 ton dan bermuatan 7 divisi pasukan militer Australia, pasukan militer Belanda (NICA), mantan tahanan perang, 3 pejabat pemerintahan sipil, seorang dokter dan seorang inspektur keuangan. Rombangan pertama dipimpin oleh Letkol Sir. Thomas Blamey. Kemudian gelombang kedua datang pada tanggal 14 Oktober 1945 dari Balikpapan yang dipimpin oleh Australia dengan menggunakan pesawat Catalina (jenis pesawat amphibi).[61] Selanjutnya menyusul tentara KNIL yang datang ke Pontianak melalui Kucing.

Kehadiran pasukan Australia dan NICA langsung menduduki kantor Residen dan juga bekas kantor Jepang. Dengan didudukinya Kantor Residen dan dikibarkanya bendera Belanda, maka secara tidak langsung Belanda ingin menguasai kembali Kalimantan Barat. Belanda mendatangkan lebih banyak pasukan dan menempatkan kembali pegawai-pedawainya serta mengangkat kembali Dr. J. van Der Swaal sebagai *Resident der Westerafdeeling van* Borneo.

Keadaan ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh rakyat Kalimantan Barat, yang sudah bersusah payah untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pasukan Sekutu yang diboncengi tentara NICA mempunyai persenjataan cukup lengkap dan modern. Ditambah lagi dengan jumlah personil yang semakin banyak. Namun hal ini tidak membuat rakyat Kalimantan Barat menyerah dan memberi kesempatan kepada Belanda untuk menguasai kalimantan Barat. Salah satu usaha untuk mengetahui secara pasti kedatangan pasukan Sekutu ke Kalimantan Barat, maka PPRI mengutus delegasi yang terdiri dari Radjikin, Abi Hurairah Fattah, Jayadi Saman, A. Syukri Noor, Ya'Umar Yasin, Ya'Serman Yasin, Ya' Ahmad Dundik menghadap Sir Thomas Blamey. [62]

Namun, pertemuan itu gagal dalam mengambil suatu kesepakatan. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945 PPRI mengadakan rapat massal di lapangan kebun Sayuk (sayur) Pontianak. Rapat massal tersebut menghasilkan keputusan mosi tidak percaya kepada Thomas Blamey sebagai pimpinan tentara Australia dan menuntut agar Australia mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia. Thomas Blamey menyatakan dengan jelas tentang sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia, bahwa ia tidak akan mencampuri permasalahan tersebut. Australia hanya mengemban tugas dari tentara Sekutu untuk melucuti persenjataan Jepang, membebaskan tawanan perang dan menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan akan menuntutnya dalam pengadilan serikat.

Pernyataan Tomas Balmey jelas berbeda dengan keinginan tentara NICA yang ikut membonceng tentara Australia. Untuk mewujudkan keinginan menguasai kembali Kalimantan Barat, maka pada tanggal 17 Oktober 1945 tentara NICA mengadakan pertemuan dengan para pemimpin PPRI yang diwakili oleh dr. M. Sudarso, Raden Wariban, Radjikin dan Rd. Sukotjo Katim, sementara dari perwakilan pemuda 4 orang dari golongan Cina 4 orag dan dari pihak NICA diwakili oleh 6 orang yang dipimpin lansung oleh V.D. Brink didampingi Bochen. [63] Hasil dari pertemuan tersebut tidak mengubah apapun sebab Tentara NICA tetap pada tujuanya dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia serta pemerintahan sipil sementara yang dijabat oleh Residen Kalimantan Barat Asikin Noor. Sedangkan rakyat Kalimantan Barat menolak NICA dan sampai kapanpun akan tetap mengakui

pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan Republik Indonesia, dan Kalimantan Barat merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Kekacauan yang sengaja diciptakan oleh NICA menjadi alasan bagi mereka untuk mengambil alih pemerintahan dari Residen Asikin Noor yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan dan ketentraman di Pontianak. Maka pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1945 Asikin Noor dipaksa untuk mundur dan menyerahkan kekuasaan pemerintah sipil wilayah Kalimantan Barat kepada Pemerintahan NICA dan mengangkat Dr. van der Zwaal sebagai Residen. Kemudian, sehari setelah NICA berkuasa, Sultan Hamid II Alkadri diangkat oleh Gubernur Van Mook menjadi Sultan Pontianak untuk menggantikan sultan Thaha Alkadri pada tanggal 23 Oktober 1945. Sementara itu, Asikin Noor segera dipindahkan pemerintah NICA ke Banjarmasin untuk menghindari kemarahan rakyat Kalimantan Barat atas pengambilalihan kekuasaan oleh NICA.

Rakyat bukan saja marah tetapi juga merasa dikhianati oleh Asikin Noor, sehingga terjadi banyak perlawanan politik yang dilakukan para pemuda dan tokoh masyarakat. Keadaan semakin sulit bagi rakyat dengan terpilihnya Syarif Hamid Alkadri sebagai Sultan Pontianak karena campur tangan Belanda. Sebagai Sultan Pontianak yang baru, Syarif Hamid II Alkadri mencoba mempengaruhi para pemuda dan tokoh masyarakat dengan mengajak mereka bergabung dalam pemerintahanya, bahkan Sultan akan mengakui keberadaan negara RI tapi dalam bentuk Federasi. Namun, keinginan Sultan ini ditolak oleh PPRI karena Sultan dianggap mendukung pemerintahan NICA. Atas penolakan itu, para pemimpin PPRI ditangkap oleh pemerintah NICA, seperti Muzanni A. Rani, Abi Hurairah Fattah, dr. Sudarso, dan Radjikin.

Meski demikian, semangat rakyat untuk melawan pemerintah NICA makin berkobar, seperti bisa dilihat dari sejumlah perstiwa berikut: pembakaran gudang kopra di Sungai Jawi yang dipimpin A.M. Dhamhar, penyerbuan terhadap tangsi militer NICA, perebutan kapal "selamat" yang bermuatan senjata, dan pembakaran gudang senjata Balanda. Memang, semua perlawanan yang dilakukan pada bulan Oktober ini mengalami kegagalan karena kurangnya koordinasi dan bocornya rencana tersebut oleh agen rahasia NICA. Namun, semua kegagalan itu memberikan pembelajaran yang berharga bahwa perlawanan harus dilakukan dengan strategi yang tepat.

Disisi lain, Sultan Hamid II dinobatkan pada tanggal 29 Oktober 1945 sebagai penguasa kerajaan Pontianak dan sekaligus wali negara NICA untuk Kalimantan Barat. Kedudukan Sultan Hamid semakin kuat dengan dikeluarkannya *besluit* No 3/L tanggal 30 September 1946 oleh Gubernur Jendral Belanda. *Besluit* itu berisikan tentang pemberian wewenang pemerintahan sendiri kepada Kalimantan Barat dan pembentukan Dewan Kalimantan Barat (DKB). Maka pada 22 Oktober 1946, Sultan Hamid II mengadakan pertemuan dengan para raja dan panembahan di seluruh Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu disepakati terbentuknya Dewan Borneo Barat (Kalimantan Barat) yang akan berkuasa atas 12 *landschappen* dan tiga neo *landschappen* yang ada di Kalimantan Barat. Adapun ke 12 landschappen dan tiga neo *lansdschappen* itu adalah kerajaan Pontianak, kerajaan Sintang, kerajaan Sanggau, kerajaan Mempawah, kerajaan Sambas, kerajaan Landak, kerajaan Kubu, kerajaan Sekadau, kerajaan Tayan, kerajaan Sukadana, kerajaan Matan, dan Simpang, dan tiga neo landschappen meliputi Meliau, Pinoh, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya secara resmi pemerintah Belanda mengeluarkan *Besluit Luitnan Gourvemeur General Nederlands Indie no* 8 tanggal 2 Maret 1948 tentang pembentukan DIKB (Daerah Istimewa Kalimantan Barat) yang merupakan federasi dari 12 landschappen dan tiga neo *landschappen*.

Tidak hanya di Pontianak, Perlawanan juga menjalar di berbagai daerah Kamimantan Barat. Sikap patriotik dilakukan pejuang bernama Ali Anyang, yaitu dengan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman Rumah Sakit Sungai Jawi. Akibat keberanianya itu, Ali Anyang ditangkap dan dikirim ke penjara di Sungai Jawi. Setelah keluar dari penjara, Ali Anyang dan kawan-kawan kembali melakukan perlawanan dengan mendirikan Barisan Pemberntakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) yang bermarkas di Singkawang. Untuk menghindari dan mengelabui Pemerintah NICA, Ali Anyang menggunakan nama-nama samaran di beberapa daerah. Perlawanan Ali Anyang di Singkawang dan Bengkayang menyamar dengan nama Indra Marjuki, di Kecamatan Pemangkat dengan nama Bung atau Pak Bung, di Kecamatan Tebas dengan nama Pak Suamat, A.Muin atau Usu Muin.[64] Sepak terjang Ali Anyang dengan memimpin penyerangan ke tangsi militer Belanda di beberapa daerah membuat kedudukan Belanda terancam. Maka Belanda mengerahkan pasukanya untuk menangkap Ali Anyang. Namun, berkat strategi menggunakan nama samaran dan sering

berpindah–pindah tempat, Ali Anyang selamat dari penangkapan Belanda.

Sejak NICA kembali memasuki Sambas pada tanggal 28 Oktober 1945, PERBIS selalu berjuang untuk mengusir NICA dari Sambas. Segala upaya dilakukan oleh Belanda untuk mengambil hati pimpinan PERBIS, yaitu Naim Razak dan Kapten Schor untuk bekerjasama dengan Belanda memerintah Sambas. Namun, usaha Belanda itu sis-sia karena PERBIS menolak dengan tegas apa yang ditawarkan oleh Balanda. Dengan penolakan PERBIS, Belanda atau NICA tidak segan–segan melakukan kekerasan kepada PERBIS. Belanda menembak Haji Sirad Sood dan Tabrani ketika mengadakan demonstrasi di istana Kerajaan Sambas pada tanggal 27 Desember 1945, sehingga mengakibatkan Tabrani Meninggal. Tidak hanya sampai disitu saja, Belanda semakin berani menekan rakyat dan menangkap anggota PERBIS seperti Naim Razak, Umar Sood, Uray Hamid, H. Malik. Mereka semua kemudian dipenjarakan.

Di tengah suasana genting itu, datang Andriani Hardigaluh sebagai utusan dari Ir. Pangeran Muhammad Noor, Residen Kalimantan yang berkedudukan di Joyakarta untuk membantu perjuangan rakyat Sambas. Adriana bekerjasama dengan PIM dan GERINDOM pimpinan Arif Santtok menyerang tangsi militer Belanda di Singkawang. Dengan melibatkan para pejuang di Singkawang dan Pemangkat, usaha itu mengalami kegagalan, karena Belanda sudah mengetahui rencana tersebut sebelum dilaksanakan.

Dengan kekalahan itu, para pejuang tidak berputus asa dan tetap membangkitkan semangat para pemuda. Pada tanggal 11 November 1945, para pemimpin mendirikan lagi organisasi antara lain PERMI (Persatuan Muslim Indonesia Sambas) yang diketuai oleh H. Siradj Sood , Arief Sattok, Fahrie Sattok , dan juga GERPINDO (Gerakan Pemuda Indonesia) pimpinan Tan Moch Saleh serta Persatuan Bhakti pimpinan Naim Razak dan Samiri H.N. Dan salah satu tujuan dari organisasi di atas adalah untuk memecah perhatian pemerintah Belanda. [65]

Sekembalinya para pejuang Pemangkat dari Sambas, mereka ikut berdemo dengan para pejuang Sambas di istana Sultan Sambas pada tanggal 29 Oktober 1945. Rombongan pejuang Pemangkat antara lain H. Juhdi Imran, Urip Mahmud, serta Mahsam Bakar. Mereka pulang dari Sambas melalui sungai Sambas untuk menghindari kejaran Belanda.

Belanda datang ke Pemangkat menggeledah rumah Dain Harun yang dijadikan markas dari Aksi Pemuda Pemangkat dan juga ingin menangkap Dain Harun. Namun, sebelumnya Dain Harun telah menyelamatkan diri dibantu kawan–kawannya bersembunyi ke Singapura dan kemudian ke Tegal. Belanda hanya menemukan istri Dain Harun dan para pemuda pejuang dari kampung Sungai Kelambu yang didatangkan Abd. Mustafa dan H. Saleh yang rencananya akan melakukan sabotase dan pencegatan. Namun, sebelum rencana itu dilakukan pihak Belanda sudah mengetahui, sehingga terjadi baku tembak yang mengakibatkasn dua orang pejuang tewas dan tiga orang luka-luka. Pejuang yang tewas adalah Johan dan Mohammad Budjang.

Perjuangan tidak berakhir di situ saja, meski banyak para pemimpin mereka ditangkap. Sisa anggota Aksi Pemuda Pemangkat yang dapat menyelamatkan diri kemudian berkabung dengan BPIKB yang dipimpin Ali Anyang. Sementara di Bengkayang pada tanggal 16 April 1946 berdiri PORI (Persatuan Olah Raga Indonesia) yang dipimpin oleh Uray Bawadi, Misni Gaffar dan Hakim. Tujuan organisasi PORI tidak semata-mata melakukan pembinaan kepada para pemuda di bidang olah raga, budaya, sosial-ekomi, tapi juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebelum terjadinya pemberontakan di Pemangkat, di rumah A. Samad Mustafa diadakan rapat gelap yang dihadiri oleh beberapa utusan dari Mempawah, Semparuk dan juga Bengkayang. Namun rapat tersebut tercium pihak Belanda, sehingga terjadi penggeledahan tetapi tidak ada yang ditangkap.

Untuk menghindari penangkapan Belanda, maka A. Samad bersembunyi di Sungai Pinyuh, kemudian ke Anjungan, Sanggau Ledo, Bengkayang dan akhirnya ditangkap di Sambas dan dipenjarakan di sana. Kemudian A. Samad bersama kawan-kawannya seperti Munzilli Nawawi, Alius Jamal, Lelek M. Rani, dipindahkan ke penjara Mempawah, Pontianak, Cipinang dan akhirnya Nusa Kambanga. [66] Penangkapan para pemimpin pejuang di Pemangkat menandakan mata-mata Belanda mengawasi dengan ketat, sehingga sangat susah untuk melakukan perjuangan. Karena itu, banyak yang melanjutkan perjuangannya di Jawa. Pejuang Pemangkat hijrah ke Jawa melalui Singapura, seperti Uray Bawadi, Dain Harun, Murni Gafar, M. Thoyib Mustafa, Zainuddin, Ibrahim Budjang, Ali Ahmad Gazali, Doleng Naim, Sy Syalim Sy Ambun dan lain-lain.[67]

Perlawanan yang tidak kalah hebatnya dilakukan oleh Laskar GERAM di Ngabang kabupaten Landak. Demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, telah gugur para suhada di medan perang yang berjumlah 38 orang, dihukum tembak 1 orang, kurang lebih 300 orang ditawan di penjara di Pontianak, Cipinang, dan Nusa Kambangan. Para pejuang dari Ngabang ini tertangkap dari berbagai peritiwa pemberontakan melawan Belanda. Peristiwa-peristiwa itu adalah: (1) peristiwa 10 Oktober 1946 (menyerang tangsi militer, rumah Controleur dan pos polisi); (2) peristiwa Sengah Temila pada 11 dan 12 Oktober yang dipimpin Bardan Nadi (menghadang serdadu belanda di sepanjang jalan Ngabang sampai Sebadu dan dari Ngabang sampai Sidas); (3) Pertempuran Sidas dipimpim Bardan Nadi dan Pa' Kasih tanggal 29 Oktober 1946, di mana dalam pertempuran ini telah gugur para pejuang sebanyak 23 Orang, termasuk seorang panglima Dayak Pa' Kasih; (4) Peritiwa Menyuke pimpinan Bunyamin dan A karim pada tanggal 10 Oktober 1946 (menyerang penguasa Belanda di Kecamatan Menyuke); dan (5) Pertempuran di Kampung Ambarang tanggal 15 Oktober 1946. Semua perlawanan itu mengorbankan harta benda, bahkan nyawa para pejuang kita, tetapi tidak sedikit yang menjadi pengkhianat sehingga sering menggagalkan perlawanan yang sudah direncanakan oleh para pejuang.

Perjuangan rakyat Ketapang untuk mengusir Belanda dilakukan dalam beberapa perlawanan, di antaranya adalah: (1) Tanggal 12 Desember 1945 perjuangan yang dipimpin oleh Abdul Rahim Galeng untuk menyerang markas Belanda di Kedawangan; (2) Ekspedisi Rahadi Usman untuk menyerang Tangsi militer Belanda yang direncanakan pada tanggal 8 Desenber 1945. Tetapi sebelum hal itu terjadi justru Rahadi Usman beserta rombongannya mendapat serangan mendadak dari Belanda di markas Air Besar sehingga Rahadi Usman gugur dalam medan perang; (3) Ekspedisi ke 2 datang dari Jawa pimpinan pejuang dari Kalimantan Barat, yaitu Letnan Mazwar dan Ahmad zaidi Adrus pada bulan Januarai 1946. Ekspedisi lain pasukan Sabibillah yang dipimpin oleh Husin Hamzah dan Firmansyah pada tanggal 2 Pebruari 1946. Perjuangan rakyat Ketapang melahirkan para pejuang yang terbaik yang dimiliki oleh Kalimantan Barat yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan.

Begitupun Rakyat Dayak pada dasarnya tetap menginginkan kemerdekaan agar dapat mengatur wilayah mereka sendiri. Dengan kedatangan NICA yang menguasai kembali daerah mereka, maka rakyat

Dayak mendukung perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Kalimantan Barat. Selain secara diplomasi (Mosi), Para pemuda Dayak juga melakukan aksi penolakan dengan cara fisik. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi pemberotakan yang banyak bermunculan di daerah. Di samping itu masyarakat Dayak juga membantu perjuangan di daerah dengan menyediakan logistik, dapur umum dan juga penunjuk jalan terutama di hutan–hutan tempat mereka tinggal.

Berikutnya adalah pengalaman kota Sintang dan Nanga Pinoh. Kedatangan Belanda di Sintang berlangsung pada akhir Desember 1945. Dan Belanda langsung membentuk pemerintahan di mana Sintang dipimpin oleh seorang Asisten Residen Noukers dan untuk Nanga Pinoh dipimpin seorang Countroleur. Setelah beberapa saat di Nanga Pinoh, Belanda mengetahui keberadaan organisasi BOPMP yang dipimpin Ade Johan. Dengan segala cara, Belanda berusaha untuk berlaku kompromis dengan mendekati Ade Johan sebagai ketua BOPMP. Dan untuk menjauhkan Ade Johan dari kawan-kawannya yang tergabung dalam OPDM, maka Belanda mengangkat Ade Johan sebagai pimpinan NIGIO (Nederland Indische Gurnerven Import Eksport Organisation) yang berkedudukan di Sintang.[68]

Kepergian Ade Johan memang telah membuat kecewa para pejuang Nanga Pinoh. Akan tetapi, hal ini tidak membuat para pejuang putus asa dan segera menggantikan kedudukan Ade Johan dengan Sultan Jamaluddin sebagai pimpinan. Walaupun berada di Sintang, Ade Johan berusaha tetap berkomunikasi dengan kawan -kawannya di Nanga Pinoh. Bahkan, Ade Johan di Sintang mendirikan lagi organisasi partai rakyat bersama dengan M. Bakrie yang mempunyai tujuan memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia.

Pimpinan Laskar MN 001 Tjilik Riwut mengutus Kapten Markasan, bersama dengan lima orang kawannya, datang ke Nanga Pinoh untuk bekerjasama dengan para pejuang Nanga Pinoh guna melakukan perlawanan dengan Belanda atau NICA. Satu peristiwa penting yang terjadi ialah pada saat penyerbuan tangsi militer Belanda di Nanga Pinoh, di mana penyerbuan tidak mendapat perlawanan oleh Kmd Polisi dan wakil Controleur. Polisi menyerahkan senjata berupa 12 putjuk karabin, beberpa granat dan peluru, juga bahan makanan. Kapten Markasan dan para pejuang dapat menguasai Nanga Pinoh setelah berhasil menangkap Controleur I.J. Herman yang sedang melakukan

tour ke Nanga Serawai dan menawanya di Kota Baru.[69] Dengan keberhasilan para pejuang dalam merebut Nanga Pinoh, maka pada 10 November 1946 bendera Merah Putih berkibar.

Setelah Nanga Pinoh, Kapten Markasan dan para pejuang berencana menyerang Belanda di Sintang. Pada tanggal 15 November 1946, Kapten Markasan, Saad Aim Taib membawa pasukan ke arah Sintang melalui sungai, namun baru sampai di Kampung Kambut mereka bertemu dengan pasukan Belanda berjumlah 4 Nirub bermotor. Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi antara pasukan Kapten Markasan dengan pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap. Pertempuran tidak seimbang itu akhirnya dimenangkan Belanda, dan banyak korban di pihak para pejuang. Sisa dari pasukan Kapten Markasan ada yang menyelamatkan diri mundur ke hutan dan ada pula yang tertangap. Tidak berhenti di situ saja, Pasukan Belanda melanjutkan lagi perjalananya ke Nanga Pinoh dan dapat merebut kembali Nanga Pinoh setelah dipertahankan para pejuang sampai titik darah penghabisan.

Demi memperjuangkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia, Sultan Jamaluddin sebagai pimpinan BOPMP menghimpun kekuatan dari rakyat namun dia sadar bahwa kekuatan BOPMP tidak mungkin sanggup melawan Belanda yang bersenjata lengkap. Untuk itu, Sultan Jamaluddin bersama dengan Abang Patul pergi menemui Tjilik Riwut yang ada di Kota Waringin Kalimantan Tengah, dan juga Kapten Mulyono, untuk berkoordinasi dan merencanakan penyerangan terhadap Belanda. Tjilik Riwut menyambut baik rencana Sultan Jamaluddin dan akan mengirim MN 001 ke Nanga Pinoh. Tjilik Riwut sebagai Komando MN 001 membagi strategi militernya menjadi dua, yaitu sektor Timur di bawah pimpinan Kapten Mulyono dan dibantu oleh Kapten Markasan dalam operasionalnya sehari –hari. Sektor Barat dipegang oleh Ade Johan bermarkas di Sintang. Maka pada 9 November 1946 penyerangan dilakukan para pejuang dengan dibantu laskar MN 001.

Sekarang kita ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Tentara Sekutu yang berjumlah 250 orang personil datang ke Banjarmasin untuk pertama kalinya pada tanggal 17 September 1945 di bawah pimpinan Kolonel Robson. Kehadiran tentara Sekutu ternyata dibarengi oleh tentara NICA yang berjumlah 100 orang personil yang dipimpin oleh

Mayor A.L. van Assenderp. Langkah awal yang dilakukan pasukan NICA di Banjarmasin adalah menghimpun kekuatan agar bisa menguasai Kalimantan Selatan. Tentara NICA mulai merekrut kembali bekas anggota KNIL dan Heiho, Polisi Jepang, serta bekas pegawai—pegawai sipil Belanda maupun Jepang yang mau bekerja dengan NICA. Kekuatan NICA semakin bertambah besar dengan kedatangan Kompi X dari Balikpapan yang terdiri dari orang-orang Indonesia bekas serdadu Belanda, bekas Romusha Jepang dan orang-orang politik yang dibawa ke Australia pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia. [70]

Setelah kedudukanya dirasa kuat di Banjarmasin, secara terbuka Mayor A.L.Van Assenderp mengumumkan tentang penyerahan kekuasaan dari Sekutu kepada NICA pada tanggal 24 Oktober yang ditanda tangani oleh Thomas Blamey pada tanggal 1 Oktober 1945. Pemerintah NICA memanggil para tokoh masyarakat seperti Pangeran Musa Ardikesuma, A. Ruslan, dan Hadhariyah A.M untuk menjelaskan tentang kedudukan pemerintah NICA di Kalimantan Selatan dan memintanya membantu pemerintah NICA.

Sementara rakyat Kalimantan sudah merasa bahwa NICA akan kembali menjajah Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Untuk itu, mereka tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan NICA. Hampir di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, rakyat menyuarakan tidak menerima kehadiran bangsa asing. Para pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Pengurus Besar PRI segera mengadakan pertemuan untuk menyikapi rencana NICA yang akan mengundang para Kiai untuk membentuk Pemerintahan NICA. Dalam pertemuan Pengurus Besar PRI tersebut, beberapa keputusan dibuat, yakni mengangkat Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia untuk kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin dan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) di daerah pada tanggal 9 Oktober 1945. Esok harinya, tanggal 10 Oktober 1945, PRI mengumumkan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan dan sekaligus mengundang seluruh rakyat untuk merayakan dan menyaksikan pelantikan Residen. Dalam perayaan yang diselenggarakan di halaman kantor gubernur itu, bendera Merah Putih rencana akan dinaikan dan bendera Belanda diturunkan. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena NICA hanya membolehkan penaikan bendera Merah Putih selama sehari dan melarang penurunan bendera Belanda.

Peristiwa 10 Oktober 1945 di Banjarmasin menyulut kemarahan dan kekecewaan rakyat di daerah. Dan kekecewaan semakin bertambah ketika mendengar para pemimpin dan ulama mereka berkhianat dengan menjadi pendukung Pemerintah NICA. Pemerintah NICA mengangkat Ibrahim Sedar sebagai Commisie Kepala, Pangeran Musa Ardikesuma menjadi Kiai Besar, dan banyak Kiai dan orang Indonesia bekas pegawai Belanda kembali direkrut NICA. Maka tidak mengherankan kalau banyak terjadi perlawanan di daerah yang menolak kehadiran tentara Sekutu dan NICA.

Bentuk-bentuk perlawanan rakyat yang terjadi dilakukan secara perorangan atau berkelompok dan terorganisir, secara fisik dan non-fisik. Bentuk perorangan non-fisik bisa dilihat dari apa yag dilakukan oleh Witono, seorang penyiar radio, yang memberikan semangat kepada para pelajar di kelas. Bentuk perlawanan berkelompok non-fisik dilakukan oleh para pemuda dan rakyat yang secara spontan mengibarkan bendera Merah Putih dan berkeliling membawa bendera sambil meneriakan "merdeka". Perlawanan secara fisik paling banyak ditemui di daerah, sebab hampir semua daerah di Kalimantan Selatan menolak kehadiran tentara NICA.

Di samping bentuk perlawanan yang telah disebutkan diatas, ada bentuk organisasi perlawanan yang memang direncanakan untuk melakukan perlawanan bersenjata, walaupun sederhana dan terbatas. Misi organisasi ini adalah untuk melakukan sabotase, penyebaran pamflet, propaganda, pembunuhan terhadap antek-antek NICA dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pola gerakan demikian:

1. Badan Pembrontakan Rakyat Kaimantan (BPRK) diketuai oleh A. Ruslan mempunyai misi untuk merealisasikan pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi ini dipelopori oleh pemuda PRI. Selain itu, tugas BPRK adalah mencari dan mengusahakan alat-alat perang bekas Jepang, penyebaran pamflet yang isinya menentang kehadiran NICA, mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, membangkitkan rasa permusuhan di kalangan rakyat terhadap NICA dan pendukung-pendukungnya. BPRK berhasil dalam penyerangan pada tanggal 9 November 1945di Banjarmasin terhadap NICA, membakar mobil NICA di Padang Rantau, menyerang pos polisi dan merampas karahijn. NICA menganggap

BPRK sangat berbahaya bagi keamanan, maka kemudian NICA menangkapi anggota BPRK dan menembak mati H Hasbullah Yasin di rumahnya di Alahio pada tanggal 26 Oktober 1945.

2. BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia) dibentuk atas instruksi dari Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor yang bermarkas di Jogyakarta. M. Jusi bersama teman-temanya membentuk organisasi yang diberi nama BPPKI yang diketuai oleh Gusti Saleh dan bermarkas di Martapura. BPPKI mempunyai komisi di setiap Kawedanan yang berada dibawah koordinasinya. BPPKI melakukan gerakan di bawah tanah dengan cara melakukan sabotase, infiltrasi ke daerah musuh dan pembunuhan terhadap para pendukung NICA. BPPKI berhasil melakukan pemutusan alat telekomunikasi di seluruh Benua Lima, melakukan infliterasi ke penjara Tanjung, pembakaran gudang karet, pembakaran pesanggrahan Hantakan di Barabai, pembakaran Sekolah *Inheemse* MULO di Barabai, pembakaran *Freubelschool*, pembakaran pasar malam dalam perayaan hari ulang tahun Ratu Balanda, pembakaran gedung NIRUB di pasar Rantau yang berisikan 15 ton karet, pembakaran pelabuhan Bnjarmasin yang menyimpan 100 ton karet yang akan dikirim ke Belanda.
3. Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka (GERPINDOM) di Amuntai yang dipimpin oleh Abdul Hamidan dan kawan–kawan. Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka (GERPINDOM) di Birayang diketuai oleh Abdurrahman Karim dan kawan kawan. Gerakan GERPINDOM mempunyai cabang–cabang hampir di setiap desa atau kampung. Program dari GERINDOM adalah mencegah NICA membentuk pemerintahan di Kalimantan, melancarkan perang psikologi dengan jalan melancarkan propaganda, menyebarkan pamlet-pamlet di tempat umum, melakukan sabotase dan pembakaran gudang-gudang karet, memutuskan kawat–kawat telepon, mencari senjata dan melakukan hubungan dengan pemerintah Indonesia di pusat.
4. Laskar Hisbullah

   Nama Laskar Hisbullah diambil dari Laskar Hisbullah yang bermarkas di Jogyakarta yang dipimpin oleh Sangaji. Atas saran Sangaji, R. Sudirman bersama dengan kawan-kawannya membentuk Laskar Hisbullah yang wilayahnya meliputi Martapura, Karang Intan, Pelaihari sebagai sektor 6V. Laskar Hisbullah yang dipimpin oleh

Kapten Sudirman dan kemudian diganti oleh Kapten M.Hammy A.M melakukan aksi pemutusan kawat telepon dan pembakaran gudang karet pasar Rantau. Aksi ini sangat merugikan perekonomian NICA sehingga NICA melakukan penangkapan terhadap para pemuda yang dicurigai.

5. GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia). GERMERI lahir di Kandangan pada tanggal 23 Agustus 1945 dan dipimpin oleh seorang pejuang Kandangan yang bernama Hasnan Basuki atau Buseri dan kawan-kawan. Program pertama yang dilakukan oleh GERMERI adalah melakukan pelatihan militer pada setiap anggota Untuk merekrut anggota baru, para pemimpin dan anggota lama diwajibkan untuk mencari sepuluh orang anggota baru. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama keanggotaan GERMERI sudah mencapai 2000 orang. Atas Instruksi dari Kapten Amir yang datang dari Jawa dengan membawa Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh S Dakono No 003/K-II/B7 memerintahkan agar GERMERI dilebur menjadi TRI.

6. Pasukan Berani Mati (PBM)
   Pertemuan para ulama dan tokoh masyarakat di Kandangan, seperti H. Rusli, H. Sias, Zafri Zam Zam, Achmad Basuni, H.Amran Abdullah, dan Bastani Jamera membuat suatu keputusan dan kesepakatan yaitu: (1) Mensahkan atau membenarkan perjuangan kemerdekaan sebagai suatu kewajiban menjalankan syariat agama; (2) Menghukum kafir terhadap mereka yang memusuhi gerakan untuk memperoleh kemerdekan bangsa, terlebih terhadap mereka yang menindas gerakan tersebut. Dengan adanya keputusan ini maka para ulama mendukung setiap perjuangan untuk melawan penjajah dan menyatakan yang meninggal adalah mati syahid. Tentu saja keputusan para ulama ini berpengaruh besar terhadap semangat para pejuang. Atas dasar inilah maka lahir PBM yang dipimpin oleh H. Hasbullah Yasi dari Alabio pada tanggal 23 September 1945. PBM menyebarkan semangat perjuangan kepada kaum musimin melalui khutbah atau dakwah dan juga pamlet. Sepak terjang H. Hasbullah yang ssangat berani dalam setiap dakwahnya ini merupakan ancaman bagi NICA. H. Hasbullah Yasin akhirnya meninggal pada tanggal 26 Oktober 1945 di muka rumahnya di Alabio. Beliau ditembak oleh Adjung Hasan.

7 Laskar Syaifullah

Hasan Basri, seorang pemuda Kalimantan lulusan Pesantren Gontor di Jawa, terpanggil untuk berjuang di daerahnya. Maka sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri melakukan propaganda anti pemerintah NICA di kalangan para pemuda. Pada akhirnya aksi Hasan Basri diketahui oleh NICA, sehingga dia menyingkir ke pedalaman pergi ke Haruyan. Di Haruyan Hasan Basri bersama-sama dengan para pejuang mendirikan organisasi Laskar Syaifullah. Organisasi yang dipimpin oleh Hasan Basri ini merekrut anggotanya kebanyakan dari eks organisasi jepang.

Segenap rakyat Kalimantan mengirimkan mosi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan juga Gubernur Kalimantan di Jogyakarta antara lain:

Mosi Golongan Dayak

Gubernur Borneo di Yogyakarta mendesak pemerintah, Perdana Mentri Sjahrir, menuntut kemerdekaan 100%. Kalau tidak golongan rakyat Ot Danum/Dayak akan mengadakan pemberontakan.

Atas nama seluruh golongan Dayak

Kalimantan Utusan Dayak

Mosi Rakyat Indonesia di Pangkalan Bun, ibu kota Daerah Istimewa Kotawaringin

Pada tanggal 17 Desember 1945, bertepatan dengan hari berdirinya Negara Republik Indonesia, maka oleh rakyat Indonesia di Pangkalan Bun, dengan diusahakan oleh Komite Nasional Indonesia telah dilangsungkan rapat terbuka yang dikunjungi oleh kurang lebih 5000 orang penduduk dari segenap lapisan dan golongan. Hadir juga dalam rapat itu Sri Paduka Yang Mulia Pangeran Mohammad Kusuma Anom, sultan Kotawaringin dan Sri Paduka Yang Mulia Permaisuri. Dengan suara bulat rapat tersebut mengambil mosi sebagi berikut:

Mengetahui :

Bahwa Imperialis Belanda ingin kembali untuk menjajah Indonesia dengan mendirikan Pemerintah Sipil Hindia Belanda (NICA), yang sengaja berusaha melakukan segala macam tipu muslihat

Menimbang:

a. Bahwa NICA yang bersifat Imperialis berbahaya sekali bagi kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan mengacaukan ketentraman serta keamanan
b. Bahwa sifat Imperialisme dan Fasis mesti dibasmi selekas mungkin dari tanah air Indonesia

Memutuskan

a. Bahwa rakyat Kotawaringin dan daerahnya hanya mengakui Presiden sukarno dan Wakil Presiden Hatta dalam Kesatuan Indonesia Merdeka
b. Menyatakan hanya bersetia bakti kepada Republik Indonesia dan berdiri tegak serta tunduk kepada Pemerintah Republik Indonesia
c. Sanggup berkorban harta benda, bahkan jiwa dan raga, untuk menegakan Negara Indonesia Merdeka
d. Berjuang dengan sekuat tenaga, lahir dan bathin, untuk membasmi NICA dan kaki tangannya, malahan siapa saja yang berani menghalangi serta merintangi Kemerdekaan Indonesia

Pangkalan Bun, 17 Desember 1945

Atas nama rakyat Pangkalan Bun dan K.N.I. Pangkalan Bun

Sementara itu di Pagatan, kota lain di Kalimantan Selatan, kehadiran tentara NICA pada 7 Pebruari 1946 berpura-pura menjadi pasukan Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih, sehingga berhasil menipu pasukan TKR Pagatan. Belanda kemudian melucuti senjata pasukan TKR yang dipimpin oleh M. Baderi dan menawannya. Setelah itu, Belanda menuju ke kota Pagatan dengan melancarkan tembakan secara membabi buta sehingga banyak korban berjatuhan di sepanjang jalan. Meskipun para pejuang tahu bahwa kekuatan lawan lebih tangguh dan dilengkapi oleh senjata modern, tetapi hal ini tidak membuat mereka gentar. Banyak pahlawan Pagatan yang gugur sebagai pejuang yang gagah berani dalam peristiwa 7 Pebruari 1946, sebanyak 37 orang, belum lagi yang ditawan dan disiksa di luar batas kemanusian hingga meninggal maupun cacat seumur hidup, berjumlah 62 orang. Di antara para pejuang Pagatan terdapat nama H. Mohammad Nurung, Pua Tengah. La Kamila, La Semang, dan La

Pattirai. Mereka adalah contoh pejuang yang mempertahankan kemerdekaan di Pagatan.

Setalah berhasil menguasai Pagatan, tentara NICA langsung menyerang Kota Baru. Serangan NICA yang tak terduga terjadi pada tanggal 8 Pebruari waktu dini hari. Dengan pasukan yang besar, NICA menyerang Kota Baru dari dua arah, yaitu arah selatan dari Banjarmasin dan arah utara dari Balikpapan. Penyerangan yang tak terduga dengan kekuatan yang besar tidak mampu dibendung oleh BKR, sehingga banyak korban yang jatuh dan tertawan, di antaranya adalah pimpinan BKR Kota Baru Guru Alwi, Peran Kamar, dan lain-lain berjumlah 17 orang.

Pemberontakan juga terjadi di Marabahan, masih di Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Desember dan dilakukan oleh gabungan antara PPRI yang didirikan pada tanggal 1 September1945 di bawah pimpinan M. Ruslan dengan rombongan IX pelopor BPRI yang dikirim oleh Bung Tomo dan dikepalai oleh H. Achmad Hassan dan Djaderi. Penyerangan dari gabungan pemuda dipimpin oleh H. Taberidji dan M. Bahaudin, sementara dari pihak NICA diwakili oleh Anang Kaderi. Penyerangan ini dimenangkan H. Taberidji dan kawan-kawan, sehingga Marabahan dan sekitarnya menjadi daerah bagian RI dan murunkan bendera Belanda dan menaikan bendera Merah Putih.

Demikianlah, organisasi di atas terbentuk sebagai reaksi penolakan terhadap pengambilalihan kekuasaan Pemerintah NICA dan tidak diakuinya kemerdekaan Republik Indonesia. NICA mulai melakukan penangkapan terhadap para tokoh pejuang dan memasukan mereka ke penjara di Banjarmasin. Selain itu, dari pihak pemuda pejuang banyak yang tewas dalam pembrontakan itu, karena kekuatan dan persenjataan yang tidak seimbang, sehingga kemenangan ada di pihak NICA.

Daerah–daerah yang telah dikuasai oleh pemuda-pemuda itu akhirnya dapat direbut kembali oleh NICA. Secara berturut–turut pada permulaan tahun 1946 NICA sudah menyatakan telah menguasai daerah–daerah Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah. Namun, rakyat tetap melakukan perjuangan secara sembunyi-sembunyi dan membantu para pejuang yang melakukan perang gerilya. Untuk meredam kemarahan rakyat dan mengatasi situasi yang ada, maka Belanda menyetujui keinginan rakyat Kalimantan Tengah seperti Kota

Waringin, Kapuas, Kumai, dan Barito untuk membentuk Dewan Dayak Besar pada akhir tahun 1946. Sikap kompromis yang dilakukan oleh Belanda maupun para pejuang Dayak tentu mempunyai tujuannya masing–masing. Para pejuang ingin agar Belanda tidak mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya Sementara Belanda ingin tetap dapat mengendalikan para pimpinan Dewan Dayak Besar.

Perjuangan pemuda Dayak tidak hanya sampai di situ. Mereka yang berada di pulau Jawa juga ikut andil dalam perjuangan bangsa secara nasinal, seperti George Obus seorang pemuda dari Kasongan, Kalimantan Tengah, yang menempuh pendididkan di Surabaya. Dia mengabdikan dirinya untuk perjuangan bangsanya. Sepak terjang George Obus tidak diragukan lagi dalam organisasi politik yang tumbuh di Surabaya. Sebagai Komesaris Pemuda Borneo Surabaya, dia diutus menjadi perwakilan Kalimantan dalam Konggres Pemuda 28 Oktober 1928. Geooge Obus ikut berjuang dalam penyerangan sengit di hotel Orange terhadap pemerintah Jepang pada tanggal 19 September 1945. Selain itu, Goerge Oobus juga berperan dalam pengiriman ekspedisi ke Kaliamntan dan berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Awal Januari tahun 1945, Sekutu sudah melakukan serangan udara di Kalimantan Timur sehingga banyak pesawat Jepang yang tidak bisa mendarat di Sepinggan, Manggar, dan Lamuru. Begitu juga pesawat Catelina yang biasa mendarat di lautan menjadi lenyap karena serangan tersebut. Ditambah lagi, pada awal Mei serangan mortir dan meriam juga datang dari laut, sehingga keadaan Balikpapan sangat mencekam. Akibat tembakan itu, banyak kilang minyak terbakar yang menimbulkan asap hitam bergulung-gulung di udara, tembakan meriam dan peluru menimbulkan nyala api yang terang benderang di malam hari. Untuk itu, Sekutu melalui udara menyebarkan pamfet kepada masyarakat untuk mengungsi paling tidak 10 km dari kota Balikpapan. Pada bulan April 1945, operasi pembebasan pulau minyak dimulai. Armada gabungan dari armada ke 7 Amerika dan angkatan laut Australia bergerak dari Mortai menuju pantai Tarakan. Meskipun akhirnya NICA dapat menguasai Tarakan , tapi harus dibayar mahal oleh NICA dengan ratusan nyawa prajuritnya, instalasi minyak hancur, pasar Lingkas rata dengan tanah, lapangan terbang Juata rusak berat.

Pada akhir Juni 1945, kembali pesawat-pesawat Sekutu melintas dan menyebarkan pamlet–pamlet di Balikpapan yang berisi informasi bahwa kota Tarakan telah dikuasi oleh Sekutu. Pada keesokan harinya, tanggal 1 Juli 1945 pagi, Pasukan Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia telah melakukan pendaratan. Siang harinya, Sekutu yang diboncengi tentara NICA sudah menguasai kota Balikpapan. Dalam pertempuran itu, 5700 prajurit Jepang tewas akibat pemboman dari pesawat B 29 dari Marianan. Kota Balikpapan hancur dan segala fasilitas minyak rusak berat akibat taktik bumi hangus Jepang, sehingga Balikpapan hanya tinggal puing-puing . Perlahan tapi pasti tentara Sekutu dan NICA melakukan operasi besar-besaran untuk merebut satu demi satu daerah-aerah yang ada di Kalimantan Timur.

Hal yang pertama dilakukan tentara NICA adalah menata kembali secara perlahan-lahan pemerintahanya, terutama administrasi dengan jalan merekrut kembali pegawai-pegawai yang pernah bekerja dengan Belanda, ex KNIL, Politie (polisi) dan siapa saja yang ingin menjadi militer atau polisi. Tentara NICA memanggil para Wedana/kiai dan kepala Kampung untuk menghimbau masyarakat agar kembali ke kota Balikpapan dan mendaftar kembali untuk mendapatkan santunan, obat-obatan, pakaian, dan pangan, yang semuanya itu didapat dari pemerintah UNESCO/Sekutu.

Jadi sebelum Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, Sekutu telah menguasai Balikpapan dan Tarakan. Setelah Jepang menyerahkan kekuasaanya kepada Sekutu secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945, barulah Sekutu mulai mempersiapkan diri untuk melucuti dan menawan tentara Jepang. Baru pada awal September NICA mulai mendirikan kantor Polisi (Algemeene Politie Kantoor) bertempat di rumah sakit bersalin (sekarang RS bersalin Sayang Ibu), kemudian barak penjara i depan kantor Camat Kampung Baru, Kantor Pos dan lain-lain.

Sejalan dengan itu, pada saat terjadi transisi kekuasan antara Jepang dan Sekutu, Pemerintah Republik Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, berita proklamasi Republik Indonesia belum terdengar di kalangan para pemuda dan pejuang apalagi rakyat. Sementara masyarakat Balikpapan merasa senang bisa terlepas dari pemerintah Jepang yang sangat kejam. Kehadiran tentara Sekutu awalnya disambut dengan gembira

oleh rakyat yang tidak mengetahui sama sekali rencana Sekutu dan NICA pada waktu itu. Namun setelah mendengar sendiri dari Jendral Sir. Thomas Albert Blamey pada tanggal 24 Oktober 1945, barulah masyarakat tersadar bahwa pemerintah NICA kembali menduduki Balikpapan.

Berbagai bentuk penolakan dilakukan oleh rakyat kalimantan Timur, salah satunya dengan melakukan pemberontakan di berbagai tempat di kalimantan Timur, seperti Balikpapan, dan Samarinda. BPRI didirikan sebagai gerakan pemberontakan pada tangga 13 Januari 1946 di Balikpapan dengan diketuai oleh Kasmani. Di Samboja, Muara Jawa, Sangkulirang, dan Samarinda berdiri anak cabang BPRI yang dipimpin oleh Mandar, Anang Guntha, Sastrowardoyo, dan M Thahir. BPRI pimpinana Kasmani melakukan penculikan, sabotase, mata-mata, perampasan senjata, pembunuhan, penghadangan terhadap pasukan NICA. Pada Maret 1946 banyak kaki tangan Belanda yang melarikan diri dan bergabung dengan BPRI seeperti Herman Runturambi dari kepolisian NICA Balikpapan, Johan Masael dari kepolisian KILAT NICA , Tjetje dari Militaire Politie Balanda dan sebagainya.

Kedatangan Tentara NICA di Sanga-Sanga membuat rakyat dalam keadaan tertekan dan ingin melakukan pemberontakan. Pada tanggal 30 Desember 1945 pengurus BPPD mengadakan pertunjukan sandiwara yang berjudul "Meja Hijau". Ternyata pementasan ini hanya berjalan satu kali, karena pemerintah NICA menangkap anggota BPPD. Seluruh aset dan dokumen BPPD disita dan para pemimpinnya ditawan dan dipenjara di Balikpapan. Meskipun BPPD dibubarkan tetapi para pejuang membentuk organisasi baru yang diberi nama BPRI (Badan Pembela Republik Indonesia) yang dipimpin oleh R Soekasmo. BPRI adalah gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk melawan kekuasaan NICA dan merebut kota Sanga-Sanga.

Pada tanggal 16 Juli 1946, di Malino Sulawesi Selatan Let. G.G. Dr. H.J. van Mook telah membuka secara resmi "Muktamar Malino" yang akan mendirikan Negara-negara boneka Indonesia Timur dan Borneo. Adanya berita ini maka pihak I.N.I menyatakan menentang keras Muktamar Malino tersebut dan Kalimantan Timur tidak mau dijadikan Negara boneka, serta menolak undangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kesultanan Kutai.



Suasana Mukhtamar Malino *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

Pada tanggal 12 Desember 1946, penasehat I.N.I Mas Sarman memerintahkan kepada Syachli A. dan Umar Arab bin Talib untuk menemui Kasmani pimpinan Pasukan Merah Putih di markasnya Gunung Samarinda, guna menjelaskan maksud dan tujuan FONI dan I.N.I. setelah menerima surat pengantar, Syachli A. dan Umar Arab bin Talib berangkat dari kampung baru menuju Gunung Samarinda. Sampai di Markas Pertahanan Kelompok Kasmani, utusan Mas Sarman tidak diperbolehkan masuk. Namu, setelah menjelaskan maksud kedatangannya, akhirnya utusan tersebut bisa masuk dengan dikawal oleh seorang anggota kelompok Kasmani dan langsung bertemu dengan Kasmani beserta Staffnya. Selanjutnya, Syachli A. dan Umar Arab bin Talib menjelaskan bahwa mereka utusan Mas Sarman dari FONI dan I.N.I Balikpapan. Kedatangannya ke Samarinda membawa maksud dan tujuan menyampaikan pesan bahwa:

a. FONI berjuang di bidang sosial dengan mengumpulkan dana untuk kepentingan perjuangan politis dan perjuangan fisik (perjuangan bersenjata),

b. Partai Politik I.N.I berjuang secara politik, terang-terangan dan tegas memperjuang dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, berdaulat dan tidak mau bekerja sama dengan Pemerintahan NICA/Belanda.

Dalam perjalanan pulang dari gunung Samarinda menuju Kampung Baru Balikpapan, tepatnya di Muara Rapak, utusan tersebut bertemu dengan beberapa buah truk yang penuh memuat anggota polisi NICA/Belanda dan dibantu oleh militernya menuju ke arah gunung Samarinda. Kejadian tersebut dilaporkan Syachli A. dan Umar Arab bin Talib kepada Mas Sarman di kantor FONI Balikpapan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 13 Desember 1946 bertempat di Kantor FONI, Mas sarman mendapat informasi bahwa pasukan polisi dan militer NICA/Belanda telah menyerbu dan menyerang tempat pertahanan markas Kasmani. Akhirnya, markas tersebut dipindahkan dan digabungkan dengan Markas Pertahanan Kelompok Anang Acil di Dam. Penyerbuan dan penyerangan secara mendadak oleh tentara NICA ini dipicu oleh seseorang dari pos penjagaan ke satu yang dekat dengan jalan besar, yang melepaskan tembakan kepada rombongan Menteri Polisi NICA yang mengendarai Jeep menuju arah KM 5 Samarinda.

Pada tanggal 23 Desember 1946, tokoh Partai Politik I.N.I, yaitu Machmuddin Natta, Mas Sarman dan S. Mawengkang ditangkap waktu tengah malam di Balikpapan. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1947, Syachli A, wakil keuangan I.N.I, juga ditangkap pihak NICA di Banjarmasin dalam perjalanan tugas menemui Gusti Ramli, pemegang Fond Perjuangan Kalimantan di Banjarmasin, sedangkan Seman Rasmy sempat lolos dan melarikan diri ke Pulau Jawa.

Selanjutnya adalah kota Tarakan. Setelah kurang lebih tiga tahun Jepang menguasai Tarakan, Pada tanggal 1Mei 1945 tentara Sekutu mendarat untuk pertama kalinya di daerah Lingkas. Tidak banyak megalami halangan, Sekutu menguasai pulau Tarakan dengan bantuan serangan dari udara. Sebanyak 20.000 ribu tentara Sekutu dikerahkan untuk mengalahkan Jepang. Selama empat hari kota Tarakan dibombadir oleh sekutu lewat udara sehingga Tarakan menjadi lautan api. Perlawanan tentara Jepang begitu gigih untuk mempertahankan pulau Tarakan dari pihak Sekutu. Jepang melakukan pertahanan

seadanya dengan bertahan dibenteng Fukukaku yang letaknya ditengah pulau, sehingga sulit dijangkau oleh kendaraan tank sekalipun. Dengan usaha yang keras dan pengorbanan dari 225 pasukan Sekutu yang tewas, akhirnya Jepang dapat ditakhlukan walaupun harus mengorbankan kurang lebih 2000 orang pasukan Jepang yang gugur maupun yang hilang.[71] Sedemikian pentingnya Tarakan bagi bangsa asing, terutama Jepang dan Sekutu sehingga harus dibayar dengan nyawa yang tidak sedikit. Ssbagai tanda peringatan pendudukan Jepang dan Sekutu, maka di Tarakan dibangun Monumen Australia di jalan pulau Kalimantan Markoni dan Monumen Perabuan Jepang di jalan Imam Bonjol Markoni.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroshito mengumumkan kekalahan Jepang tanpa syarat dan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang kepada pihak Sekutu dilakukan secara resmi tanggal 2 September 1945. Sementara pemerintah Sekutu sudah merebut Tarakan dari Jepang pada tanggal 14 Mei 1945. Kesempatan terbuka bagi pemerintah NICA atau Belanda untuk kembali menjajah Tarakan karena tugas Seekutu hanya untuk membebaskan tawanan dan sekaligus melucuti tentara Jepang.

Keadaan Tarakan tahun 1945 setelah perang benar-benar hancur sehingga tentara Australia yang tergabung dalam tentara Sekutu harus bekerja keras untuk memperbaikinya dengan bantuan BPM, dan Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Perbaikan dilakukan di sektor–sektor sarana dan prasarana, seperti jalan dan pemukiman, juga sarana pertambangan dan Bandara Juanta. Tarakan menjadi kota yang mempunyai keunikan tersendiri di mana ada 9 bunker yang dibangun Belanda pada waktu itu dengan tujuan memberikan perlindungan kepada rakyat dalam situasi perang. Tentara Australia banyak mengubah nama-nama jalan dan tempat dengan alasan politis sebagai suatu strategi militer dan membangun suasana Tarakan seperti Australia.

Dalam masa pendudukan yang tidak lama itu, populasi tentara Australia, Amerika dan Belanda mencapai 15.500 orang. Sementara penduduk asli hanya berkisar 5.000 orang termasuk Jawa dan Cina.[72] Untuk mengamankan penduduk dari penyusupan Jepang, tentara Sekutu memindahkan penduduk dari kampung dan desa ke kamp pengungsian sementara. Sedangkan wilayah-wilayah perbatasan banyak

didirikan pos penjagaan sehingga kota Tarakan benar-benar tertutup bagi aktivitas sipil. [73]

Untuk mendapatkan pengakuan dan izin dari Sultan Bulungan tentang pengambilalihan Tarakan, maka Belanda mencoba mengambil simpati Sultan Bulungan X Maulana Djalaluddin. Belanda memberikan pangkat Letnan Kolonel kepada Sultan Bulungan pada saat perkawinan anak Sultan. Namun, usaha yang dilakukan oleh Belanda tidak berhasil untuk menguasai Tarakan dari Sultan karena Sultan Bulungan tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia.[74] Sampai pada akhirnya Sultan Bulungan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat dan menyusul kemudian penyerahan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada RIS. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 17 Agustus 1949, maka pulau Tarakan diserahkan kepada Wedana Tarakan Haji Abdullah dengan gelar Aji Amarsetia dari tangan JD. Emeis Gress.

Catatan Akhir :

[1] Tjilik Riwut. *Kalimantan Membangun Alam Dan Budaya, (cetakan 2).* Yogyakarta: NR Publising, 2007. hlm: 101.

[2] Bekas jajahan wilayah Hindia Belanda tidak termasuk Kalimantan Utara yang merupakan wilayah negara Malaysia dan negara Brunai Darusalam

[3] Chokatsuiki yang baru dibagi dalam 7 buah Ken yaitu: (1) Banjarmasin, (2) Hulu Sungai, (3) Kotabaru, (4) Barito, (5) Dayak (Kabupaten Kapuas), (6) Sampit, dan (7) Kotawaringin; Pontianak Syu dibagi dalam 4 Ken yaitu: (1) Pontianak, (2) Singkawang, (3) Sintang, dan (4) Ketapang; Balikpapan Syu dibagi dalam 2 Ken yaitu: (1) Balikpapan, dan (2) Samarinda; Tarakan Syu dibagi dalam 2 Ken yaitu: (1) Tarakan, dan (2) Berau.

M.Suriansyah Idcham BA dkk, *Sejarah Banjar.* Banjarmasin: Pemprop Kalimantan Selatan, 2003. Hlm: 316

[4] *Ibid.* hlm: 310.

[5] Sekarang bernama Jalan Jendral Urip Pontianak.

[6] Syafaruddin. *Tanah Mandor Bersimbah Darah.* Pontianak: Kopma Untan, 1996. hlm: 63 – 64 coba banding kan juga dengan M. Surinsyah Idcham B.A dkk. *op.cit.*, hlm: 311.

[7] Tim Penulis BPSNT. *Tokoh Dan Peristiwa Sejarah di Kalimantan Barat.* Pontianak: BPSNT, 1997-1998. hlm: 18

[8] Umar Affandi. *Sejarah Pejuang Mohammad Ali Anyang: Seorang Pemuda Putra Daerah Kalbar Dalam Kancah Revolusi 1945 -1950.* Pontianak : Korem 121/ Alambhana Wanawai. 2010, hlm: 20

[9] Mawardi Rivai. Kalimantan Barat Masa Pendudukan Jepang . Pontianak: Dedikbud , hlm: 121

[10] Anshar Rahman dkk. *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah.* Sambas: Pemda Kabupaten, 2001. hlm: 124

[11] Sudarto dkk. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat*, (naskah revisi).

Pontianak: Pemprop Kalimantan Barat, 1989.

[12] *Ibid.* hlm: 236

[13] Ya'syarif Umar dkk. *Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat Landak, Pontianak*, Cetak stensil tidak terbit, 1988. hlm: 15 -16.

[14] *Ibid.* hlm: 19

[15] Depdikbud. *Sejarah Revolusi kemerdekaan 1945 -1949: Kalimantan Selatan.* Jakarta: Depdikbud, 1993. hlm: 48

[16] M. Suriansyah Idcham, B.A. dkk. *Sejarah Banjar.* Banjarmasin : Pemprop Kalimantan Selatan, 2003. hlm: 338

[17] *Ibid.* hlm: 338

[18] *Ibid.* hlm: 357

[19] Tjilik Riwut. *op.cit.*, hlm: 170

[20] Depdikbud. *op.cit.*, hlm: 49

[21] Fathul Futuh Tamam. *Peranan Masyarakat Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Kajian Desa Pahandut di Palangka Raya tahun 1945-1958.* Pontianak: BPSNT, 2009. hlm: 13.

[22] Juniar P. dkk. *Sejarah Sosial Kota Pangkalan Bun.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2004. hlm: 350.

[23] Depdikbud. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah.* Jakarta: Depdikbud, 1983. hlm: 36.

[24] J.U. Lontaan dkk. *Mengenal Kota Waringin Barat.* Kota Waringin: Pemda Tk II Kabupaten Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, 1976. hlm: 520 .

[25] Depdikbud. *op.cit.*, hlm: 36.

[26] M. Suriansyah Idcham. *op.cit.*, 2003. hlm: 314.

[27] Fatul Futuh Tamam. *Peranan Masysrarakat Manuhing dalam Mempertahankan Kemerdekaan.* Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2011. hlm: 41

[28] Fidi Finandar dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperalisme Kalimantan Timur.* Jakarta: Depdikbud, 1991. hlm: 62.

[29] Juniar P. dkk. *Sanga –Sanga Kota Bersejarah Di Propinsi Kalimantan Timur.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2006. hlm: 31.

[30] Juniar Purba. *Haji Umar Dachlan: Tokoh Pers Kalimantan Timur (hasil karya dan pemikirannya).* Pontianak: BPSNT Pontianak. hlm: 10.

[31] Drs. H Sudarto dkk. *op.cit.*, hlm: 198.

[32] *Ibid.* hlm: 202.

[33] Jacobus E. Frans Layang. *Pangsuma Sejarah Perang Majang Desa (cetakan 2).* Sanggau: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau Propinsi kalimantan Barat, 2014. hlm: 21, 25, 31.

[34] Drs Anshar Rahman dkk. *op.cit.*, hlm: 117.

[35] Dana Lisiana. *Tokoh, Peristiwa, Dan Tempat Bersejarah Di Pontianak – Kubu – Mempawah Sejak Masa Kesulanan Hingga Masa Republik (bunga rampai) dalam Nukilan Sejarah Kalimantan Barat.* Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2011. hlm: 171.

[36] KODAM XII Tanjungpura. *Tanjungpura Berjuang.* Pontianak: SENDAM XII Tanjungpura, 1970. hlm: 108.

[37] Ya'Syarif Umar. *op.cit.*, hlm: 27.

[38] H. Sudarto dkk. *op.cit.*, hlm: 241.

[39] KODAM XII Tanjungpura. *op.cit.*, Hlm: 109.

[40] M Suriansyah dkk. *op.cit.*, hlm: 344.

[41] H. Ramli Nawawi dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah kalimantan Selatan.* Jakarta: Depdikbud, 1991. hlm: 72.

[42] *Ibid.* hlm: 76.

[43] Syarifuddin. *Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalsel Periode 1945 – 17 Agustus 1950.* Banjarmasin: Tesis FKG Unlam, 1974. hlm: 87.

[44] H. Ramli Nawawi dkk. *op.cit.*, hlm: 80.

[45] *Ibid.* hlm: 87.

[46] JU. Lontaan. *Mengenal Kabupaten Kota Waringin Barat.* Pangkalan Bun: PEMDATI II Kota Waringin Barat 1976. hlm: 50.

[47] *Ibid.* hlm: 53.

[48] *Ibid.* hlm: 55.

[49] *Ibid.* 42.

[50] S. Ahim Rusen dkk. *Sejarah Kalimantan Tengah.* Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dengan Pemprop Kalteng: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prop Kalteng, 2006. hlm: 94.

[51] Asnaini dkk. 2007. Kabupaten Kapuas Dalam Lintasan Sejarah (Propinsi Kalimantan Tengah). Pontianak :BPSNT Pontianak. hlm: 25

[52] Juniar Purba dkk. *Samarinda dan Pasir.* Pontianak: STAIN Pontianak Press Kalimantan Barat, hlm: 15

[53] *Ibid.* hlm: 17

[54] BPRI Sanga–Sanga dan Jarahdam IX/Mulawarman. Palag*an Perebutan Kota Minyak Sanga–Sanga.* Balikpapan: Yayasan 27 Januari, 1982. hlm: 49 .

[55] Juniar Purba. *Sanga–Sanga Kota Bersejarah Di Propinsi Kaliamantan Timur.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2006. hlm: 22.

[56] Iksan dkk. *Inventarisasi Tokoh Sejarah Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2004. hlm: 26.

[57] Tjilik Riwut, *op.cit.*, hlm: 166.

[58] *Ibid.* hlm: 167.

[59] Fatui Futuh Taman. *Peranan Masyarakat Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan : Kajian Desa Pahandut Di Palangka Raya (1945- 1959).* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2008. hlm: 29.

[60] Sudarto dkk, *op.cit.*, hlm: 201.

[61] Bambang H. Suta dkk. *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa.* Pontianak: Pemkot Pntianak, 2004. hlm: 171.

[62] *Ibid.* hlm: 174

[63] *Ibid.*

[64] Anshar Rahman dkk, *op.cit.*, hlm: 129.

[65] *Ibid.* hlm: 169.

[66] *Ibid.* hlm: 127.

[67] *Ibid.*

[68] Sudarto dkk. *op.cit.*, hlm: 236.

[69] Tim Penulis KODAM XII Tanjungpura. *op.cit.*, hlm: 109.

[70] M. Suriansyah Idcham BA. dkk. *op.cit.*, hlm: 349 -350. (Catatan tanpa judul M. Hammy A.M. hlm: 179), lihat juga tulisan H. Ramli Nawawi. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di Daerah Kalimantan Selatan.* hlm: 61, disebutkan NICA membawa 160 orang ditambah tentara bekas KNIL yang melapor sebanyak 170 orang.

[71] Juniar Purba, *op.cit.*, hlm: 25.

[72] Tina Budiarti, *op.cit.*, hlm: 171.

[73] *Ibid.* hlm: 172.

[74] Juniar Purba. *op.cit.*, hlm: 26.

BAB VIII
BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SULAWESI DAN RESPONNYA

Anwar Hafid

8.1. Pengantar

Ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi, empat orang putra terbaik Sulawesi turut hadir. Mereka adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangie, Andi Pangerang Daeng Parani, Andi Sultan Daeng Raja dan Mr. Andi Zaenal Abidin. Datang sebagai delegasi Sulawesi untuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), mereka ikut terlibat dalam berbagai pertemuan penting, termasuk pertemuan di rumah Laksamana Tadachi Maeda yang penuh kehangatan sehari sebelum proklamasi 17 Agustus 1945.

Dr. G.S.S.J. Ratulangie dan Andi Pangerang Daeng Parani adalah anggota PPKI mewakili Sulawesi. Sementara Andi Sultan Daeng Raja diutus para pemimpin pejuang Sulawesi untuk mengikuti sidang-sidang PPKI di Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat Sulawesi (Selatan) yang sangat berpengaruh dan juga atas perannya sebagai anggota SUDARA (Sumber Darah Rakyat), sebuah organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia di Makassar yang sebelumnya dikenal dengan nama *Ken Koku Doshikai*. Mr. Andi Zaenal Abidin bertugas selaku sekretaris dari perutusan Sulawesi di PPKI.[1]

Selama berada di Jakarta, keempat utusan Sulawesi itu sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan politik dan menghadiri acara-acara penting menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka juga datang pada rapat dan pertemuan politik di hari-hari awal pasca-

kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berempat mengikuti sidang pertama PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia dan menjadi menjadi saksi hangatnya perdebatan pada sidang PPKI yang menentukan perjalanan sejarah Indonesia kemudian. Pada sidang itulah disepakati untuk mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada sidang itu juga dibicarakan tugas-tugas yang dibebankan kepada KNI (Komite Nasional Indonesia) dalam mekanisme pemerintahan Republik Indonesia.

Utusan Sulawesi tersebut juga mengikuti sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan agenda khusus: Pembentukan perangkat pemerintahan, pengukuhan anggota-anggota kabinet, pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam delapan propinsi serta pengangkatan gubernur-gubernur disetiap propinsi. Satu di antaranya adalah pengangkatan Dr. G.S.S.J. Ratulangie menjadi Gubernur Sulawesi.[2] Pada hari yang sama di sore hari, segera setelah sidang PPKI Dr. G.S.S.J. Ratulangie dan rombongan segera bergegas kembali ke Sulawesi dan mendarat dengan selamat di sebuah lapangan terbang kecil di Bulukumba ± 160 KM selatan Kota Makassar. Sementara itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sampai ke Sulawesi hanya diketahui oleh segelintir orang saja yang memiliki radio. Berita kemerdekaan Indonesia barulah tersebar secara luas di Sulawesi pada tanggal 20 Agustus 1945 bertepatan dengan kedatangan kembali Dr. G.S.S.J. Ratulangie di Makassar.

Bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya anggota SUDARA, kemerdekaan Indonesia adalah sebuah karunia Tuhan yang diberikan sebagai buah dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Namun, bagi Dr. G.S.S.J. Ratulangie tentu tidak hanya itu. Dengan status sebagai gubernur Sulawesi, maka bagiannya mengisi kemerdekaan adalah sebuah perjuangan yang tidak kalah beratnya. Atas pengangkatannya sebagai Gubernur Sulawesi, ia diberi mandat dan kekuasaan penuh tidak hanya sekedar mempermaklumkan diri secara formal sebagai Gubernur Sulawesi, tetapi dituntut untuk segera membentuk KNI–D (Komite Nasional Indonesia Daerah) yang akan membantunya sebagai media pelaksana dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi. Dr. G.S.S.J. Ratulangie ditugaskan juga segera mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dan menyiapkan kantor gubernur yang akan menjadi pusat kegiatan aparatur negara di

Propinsi Sulawesi. Uraian tugas-tugasnya selaku gubernur Sulawesi telah tertuang dalam amanah sidang PPKI 19 Agustus 1945.

Karena itu, maka pembentukan KNI-D di Sulawesi sangat mendesak. Dengan KNI-D, maka tugas dan tanggung jawab seorang gubernur akan berjalan dengan baik, dan selanjutnya secara *de facto* Republik Indonesia berkuasa di Sulawesi. Namun, dalam praktiknya, apa yang terjadi tidak sesuai harapan. Rakyat Sulawesi kecewa karena Dr. G.S.S.J. Ratulangie tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan perannya selaku gubernur. Keragu-raguan dan kehati-hatian sang gubernur dalam penataan administrasi pemerintahan berawal dari keragu-raguannya dalam hal pengambil-alihan pemerintahan di Sulawesi dari tangan penguasa Jepang yang ketika itu sudah berstatus kalah perang dan tidak berdaya.

Sikap Dr. G.S.S.J. Ratulangie yang sangat hati-hati itu didasari oleh pertimbangan yang sangat dalam, terutama masalah keamanan Sulawesi. Bagi Dr. G.S.S.J. Ratulangie, sebuah kekuasaan harus dilindungi oleh kekuatan bersenjata. Faktor utama itulah yang tidak dimiliki oleh Propinsi Sulawesi, karena bagi Dr. G.S.S.J. Ratulangie, dukungan yang besar dari berbagai organisasi pemuda dan badan-badan perjuangan di Sulawesi belum cukup dan belum dapat diandalkan sebagai perisai yang melindungi kekuasaan Republik Indonesia di Sulawesi. Baginya para pemuda bukan tentara yang terlatih dan mereka juga tidak memiliki persenjataan modern yang tangguh. Karena itu, jika terjadi pertempuran bisa dibayangkan akibatnya.

Untuk itu, Dr. G.S.S.J. Ratulangie mengutus dua orang tokoh pemuda pejuang Sulawesi ke Jawa, Moh. Saleh Lahade dan Manai Sophian untuk menemui Bung Karno agar pemerintah pusat dapat mengirim bantuan pasukan, senjata serta peralatan perang lainnya ke Sulawesi. Atas sikapnya yang hati-hati itu, Dr. G.S.S.J. Ratulangie seakan tidak dapat menangkap kegelisahan para pemuda pejuang Sulawesi, yang ketika itu sudah berada dalam suasana revolusi yang hampir tidak dapat dibendung lagi. (Maulwi Saelan, 2008) Namun demikian, tampaknya perbedaan pandangan antara para pemuda dengan gubernur Sulawesi tidak menyebabkan para pemuda dapat bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan sang Gubernur, karena bagaimanapun juga Dr. G.S.S.J Ratulangie adalah seorang gubernur yang diangkat langsung dari pusat.

Sembilan bulan lamanya Dr. G.S.S.J. Ratulangie berjalan pada prinsip kehati-hatian, penuh pertimbangan bahkan mendekati keraguraguan, termasuk satu setengah bulan lamanya Sulawesi dalam keadaan vakum dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 September 1945, atau sejak pernyataan kekalahan Jepang pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 hingga kedatangan Tentara Sekutu yang membawa serta NICA (Nederlandsch Indie Civil Administratie) di Makassar.[3]

Kedatangan Sekutu yang membawa NICA turut serta bersamanya ke Indonesia adalah sebuah babak baru dalam sejarah Kolonial Belanda di Indonesia, karena ketika itu NICA menemukan realitas yang tidak diduga sebelumnya, ialah bahwa *Nederlands Indie* yang dulu sebagai negeri jajahannya kini telah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dengan nama Republik Indonesia. Walaupun teritorialnya secara *de facto* hanya terbatas di Indonesia Bagian Barat terutama di Jawa dan Sumatera—sementara di Indonesia Bagian Timur, khususnya di Sulawesi, kekuasaan Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya berdiri—tetapi keadaan ini tidak berarti bahwa NICA dapat dengan mudah menguasai Indonesia bagian timur khususnya Sulawesi.

Hal ini terjadi karena di Sulawesi telah terbentuk organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga untuk menguasai Sulawesi memerlukan perjuangan yang berat. Atas dasar itulah NICA melakukan penekanan dan pendekatan kepada Dr. G.S.S.J. Ratulangie agar mau berdamai dengan NICA. Keadaan ini membuat Dr. G.S.S.J. Ratulangie menjadi sangat terpojok. Ia memang pernah mengutus Moh. Saleh Lahade dan Manai Sophian untuk meminta bantuan pasukan, senjata, dan peralatan militer agar segera dikirim ke Sulawesi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Namun, bantuan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Karena itu, ia memilih untuk berunding demi menjaga ketentraman Sulawesi sambil menunggu datangnya bantuan pemerintah pusat. Walau akhirnya bantuan dalam jumlah sangat besar itu tiba di Sulawesi, tetapi sang gubernur sudah lebih dahulu ditangkap oleh KNIL dan dibuang ke Serui tanggal 5 April 1946.[4]

8.2. Medium Penyebaran

1. Tokoh PPKI dan Pengiriman Delegasi

Setiba di Makassar, Dr. G.S.S.J. Ratulangie langsung menginap di Hotel Empress bersama Mr. Andi Zainal Abidin selama seminggu. Di



Dr. G.S.S.J. Ratulangie, Gubernur Sulawesi
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

sini dia mengorganisir strategi perjuangan yang dimulai dengan penyebaran berita proklamasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan upaya mempertahankannya.

Selaku Gubernur Sulawesi, Dr. G.S.S.J. Ratulangie menyadari bahwa posisinya amat sulit. Para pemuda menganggap tindakan gubernur terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, para pemuda mulai merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital, seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri atas kelompok Barisan Berani Mati, bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP.

Segera setelah Dr. G.S.S.J. Ratulangie kembali ke Makassar, ia menyebarkan berita proklamasi dan menata pemerintahan sekaligus mengorganisir perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam wadah organisasi Pusat Keselematan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangie, dengan menghimpun segenap tokoh-tokoh lintas etnis yang ada di Makassar, seperti: Lanto Daeng Pasewang dari Sulawesi Selatan, Saleh Daeng Tompo dari Sulawesi Selatan, Latumahina dari Maluku, Soewarno dari Jawa, Mr. Andi Zainal Abidin dari Sulawesi Selatan, I.P.L. Tobing dari Sumatera, dan W.S.T. Pondang dari Sulawesi Utara.[5]

Rakyat Sulawesi menyambut hangat berita proklamasi dan memberikan dukungan penuh kepada Dr. G.S.S.J. Ratulangie untuk melakukan konsolidasi pemerintah RI di wilayah Sulawesi. Rakyat mendesak untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang, maka Dr. G.S.S.J. Ratulangie mengadakan diplomasi dengan pimpinan Tentara Jepang di Makassar. Namun pihak Jepang tidak bersedia memberikan kekuasaan kepada Bangsa Indonesia karena takut kepada Sekutu yang akan segerah datang. Dr. G.S.S.J. Ratulangie menasehati para pemuda untuk tidak melakukan tindakan revolusioner melawan Jepang, demi mencegah pertumpahan darah dan meyakini bahwa Jepang akan segera meninggalkan Nusantara untuk selamanya.

Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu disebarkan secara formal, melalui Tim Dr. G.S.S.J. Ratulangie menuju ke Utara sedangkan Tim Lanto Daeng Pasewang ke Selatan. Hal itu dimaksudkan untuk menyusun kekuasaan dan menggalang persatuan dengan makin santernya berita pendaratan tentara Sekutu di Sulawesi Selatan. Dr. G.S.S.J. Ratulangie tetap mempertahankan pendiriannya untuk tetap menghindari perlawanan bersenjata dan menggantikannya dengan jalan diplomasi, berdasarkan suatu perhitungan yang matang.

Sebelum Gubernur Sulawesi menyampaikan secara resmi berita proklamasi, maka beberapa pemuka masyarakat yang dekat dengan prajurit Jepang telah mengetahui kabar penting itu. Ada yang mendengar langsung dari radio miliknya, ada pula lewat pemberitahuan tidak resmi dari orang Jepang. Hal ini hampir terjadi disemua kota-kota kecil di Sulawei Selatan, seperti Pare-pare, Soppeng, dan Palopo. Selain itu, perlahan-lahan muncul semacam pusat-pusat kegiatan pemuda pendukung kemerdekaan, yang tersebar di berbagai daerah: Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kota Watampone, Kota Watangsoppeng, dan Kota Sengkang.

Dari daerah-daerah tersebut, yang paling menonjol adalah Bone. Ini terkait dengan figur Andi Mappayukki, selaku Raja Bone yang sejak awal tergabung dalam perjuangan mempersiapkan kemerdekaan dan Andi Pangeran Daeng Parani selaku putra Raja Bone (tokoh PPKI yang hadir dalam proklamasi kemerdekaan di Jakarta). Kedudukan Bone pada awal proklamasi dapat disamakan dengan Bulukumba, yang memiliki Andi Sultan Daeng Raja berada, tokoh yang hadir dalam proklamasi kemerdekaan di Jakarta.[6]

Kesibukan para pemuda di Kota Makassar dalam mendukung Proklamasi kemerdekaan menarik perhatian rakyat Gowa. Di Jongaya, pinggiran daerah Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar, sejumlah pimpinan pemuda mengadakan pertemuan. Pada akhir Agustus 1945, mereka mengibarkan bendera Merah Putih di bawah pimpinan Abd. Rasyid Daeng Lurang. Sementara itu, pemuda Gowa di Katangka pada pertengahan September 1945 berusaha mencari senjata. Atas petunjuk Badollahi, beberapa pucuk karaben Jepang ditemukan, juga beberapa pucuk pistol genggam. Hanya saja, peluru senjata api itu amat kurang, sehingga manfaatnya tidak seperti yang diharapkan. Di Pannara, atas usaha Supu dan kawan-kawan, ditemukan senjata karaben Jepang. Dengan demikian, pemuda pendukung kemerdekaan di Gowa telah memiliki sekitar 10 pucuk senjata Karabeng Jepang dan beberapa pistol. Pusat kegiatan pemuda ialah Katangka dan Tidung. Masih di sekitar Gowa, di Limbung Pemuda Muhammadiyah kembali aktif, dengan Pandu Hisbul Wathan sebagai intinya. Hal yang sama nampak pula pada penduduk Kampung Pallangga, dan Barombong.

Juga atas pengaruh Kota Makassar, proses yang sama juga berlangsung di Takalar dengan pusatunya di Polombangkeng pada akhir

Agustus 1945. Ketika itu, Fakhruddin Daeng Romo, pemuda belasan tahun, datang ke Polombangkeng dari Kota Makassar. Berita proklamasi kemjudian makin berkembang melalui Madinah Daeng Ngitung, dan selanjutnya Makkaraeng Daeng Manjarungi dan Syamsuddin Daeng Ngerang. Pada hari itu juga, di Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle menyatakan dukungannya terhadap proklamasi. Kemudian, raja menyampaikan perintah kepada pemuda dan sanak keluarganya agar: (a) menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, (b) siapkan seluruh rakyat Polobangkeng untuk mempertahankan kemerdekaan, (c) bentuklah organisasi yang dapat menggalang massa, bersatu padu menghadapi segala kemungkinan yang akan menggangu kemerdekaan.[7]

Perintah Raja Polombangkeng itu membuka lembaran sejarah yang amat penting di daerah itu. Rakyat Polombangkeng bangkit dan bersiap membela proklamasi. Ikrar kebulatan tekad dipertegas dalam semboyan *"siri na pace"* yang bermakna tanggung jawab yang tinggi dan solidaritas yang amat dalam. Pada awal September 1945, segenap keluarga raja—berintikan Syamsuddin Daeng Ngerang, Makkaraeng Daeng Manjarungi, Madinah Daeng Ngitung, dan Fakhruddin Daeng Romo—menyelenggarakan upacara keteguhan hati bersama anggota keluarga dan sahabat terdekat di Bontokadatto. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa distrik Polombangkeng merupakan "wilalayah RI" yang pertama terbentuk di Sulawesi Selatan.[8]

Dukungan terhadap kemerdekaan semakin tegas dengan kedatangan Lanto Daeng Pasewang pada pertengahan bulan September 1945. Kepada utusan Gubernur Sulawesi itu, disampaikan bahwa raja dan rakyat Polombangkeng telah berkebulatan tekad mendukung proklamasi kemerdekaan. Tindakan nyata rakyat Polombangkeng nampak pada rapat yang dihadiri massa dalam jumlah yang cukup besar jumlahnya. Rapat tersebut berlangsung di lapangan terbuka, pada tanggal 18 September 1945. Ketika diadakan penyematan lencana merah putih di dada baju masing-masing, para pemuda, murid-murid sekolah usia 12 tahun ke atas, bahkan rakyat biasa ramai-ramai menyematkan lencana. Pada saat itu pula, mulai di resmikan salam perjuangan dengan ucapan "Merdeka" sambil mengancungkan tangan ke atas.

Hingga aparat NICA datang, dukungan masyarakat Takalar terhadap kemerdekaan cukup besar. Hal ini didorong oleh gerakan pemuda dan Raja Polombangkeng serta usaha Moh. Saleh Lahade yang membentuk PKPNI (Penjaga Keamanan Pemerintahan Nasional Indonesia). Wadah perjuangan itu didirikan pada pertengahan bulan September 1945 diketuai Moh. Saleh Lahade. Berhubung terjadi dualisme pusat gerakan dengan adanya latihan di samping Polombangkeng, maka Sale Lahade menghentikan aktivitas PKPNI di Takalar, dan pada bulan Oktober 1945 semua kegiatan pemuda di pusatkan di Polombangkeng.[9]

Dukungan kemerdekan oleh pemuda dan masyarakat Jeneponto bermula dari organisasi SUDARA, yang diperkuat kunjungan Lanto Daeng Pasewang. Hasil kunjungan Lanto ialah pengambil-ahlihan kekuasaan dari Jepang pada awal September 1945. Pimpinan SUDARA Malajong Daeng Liwang bersama pemuda militan seperti Anwar Said, Abd. Aziz Tutu, Ahmad Abdullah, mengorganisir para pemuda. Kecuali itu, tampil Kepanduan Hisbul Wathan dari Muhammadiyah Jeneponto. Kekuatan pendukung kemerdekaan bertambah, berhubung Raja Binamu Haji Mattewakkang Daeng Raja dengan sepenuh hati mendukung Proklamasi 17 Agustus 1945. Pernyataan dukungan diikrarkan dalam suatu rapat dihadiri sekitar 1000 di lapangan terbuka Jeneponto.

Di Bantaeng (Bonthain) SUDARA di bawah pimpinan Andi Mannapiang bersama anggota pengurus lainnya mengorganisir dukungan terhadap proklamasi. Pada masa kekuasaan Jepang, cukup banyak pemuda Bantaeng memasuki latihan kemiliteran. Beberapa orang anggota Boei Teisin Tai dibentuk latihan khusus yang dipersiapkan untuk pertempuran. Wanita dilatih dalam *Fujin Kai* dengan materi latihan pertempuran garis belakang. Andi Mannapiang menjalin hubungan dengan Raja Gantarang Andi Sultan Daeng Raja di Bulukumba, yang menampung pemuda untuk latihan khusus.

Jalinan hubungan Andi Mannapiang dan pimpinan pemuda republik Bantaeng dengan Andi Sultan Daeng Raja berlangsung terus. Karena itu, pengaruh Andi Sultan cukup kuat di Bantaeng. Atas petunjuk Andi Sultan, maka Andi Mannapiang menyusun pemerintahan RI sambil menunggu berita dari Kota Makassar. Dan atas dasar itu, sejak 27 Agustus 1945, Andi Mannapiang menyerukan kepada penduduk agar mengibarkan bendera merah putih.

Semangat perjuangan bertambah kokoh menyusul kedatangan beberapa tokoh kemerdekaan dari Makassar ke Bantaeng. Mereka tiba

pada awal Septembar 1945 yang terdiri dari Lanto Daeng Pasewang, Manai Sophian, A.N. Hajarati, A. Majid, dan Achmad Massiara. Andi Mannapiang, sebagai Raja Bantaeng yang ditemui tokoh politik itu, segera menyatakan bahwa Bantaeng sebagai wilayah RI. Melihat gejala para pemuda akan bertindak, maka pasukan Jepang meninggalkan Bantaeng. Mereka melarikan diri ke gunung-gunung dan semua persenjataan milik Jepang dibawa serta sebelum dirampas oleh pemuda.

Di daerah kediaman Andi Sultan Daeng di Bulukumba, gerakan kemerdekaan cukup menonjol. Andi Sultan, yang juga menjadi Raja Gattarang, suatu kerajaan kecil di Bulukumba, sejak masa pemerintahan Jepang sudah sering kali menyelipkan ide kemerdekaan dalam setiap pidatonya. Ia membuka pintu bagi berkembangnya pertahanan kemerdekaan seperti Muhammadiyah, PNI, dan organisasi SUDARA yang dibentuknya. Melalui organisasi itu, dukungan terhadap kemerdekaan dibina. Ketika berita kemerdekaan dibawa oleh Andi Sultan dari Jakarta, 19 Agustus 1945, tokoh pergerakan dan organisasi pemuda menyambut dengan amat gembira.

Para pemuda di Daerah Sinjai pada awal kemerdekaan tampil dan konsekuen atas pernyataan dukungan mereka terhadap proklamasi pemerintahan RI. Kepala pemerintahan RI yang pertama ialah Andi Mappotaba, dibantu oleh Andi Indar dan Andi Jayalangkara. Dengan demikian, kevakuman kekuasaan setelah pemerintah militer Jepang menyerah kepada Sekutu diisi oleh pemerintah RI yang berlangsung sampai munculnya NICA pada pertengahan bulan Oktober 1945.

Di Selayar, pulau kecil di sebelah selatan yang agak dekat dengan Bulukumba, dukungan rakyat dibuktikan pada tanggal 10 Oktober 1945, ketika mereka menurunkan bendera Belanda dan menaikkan bendera merah putih. Pelopor kemerdekaan yang disegani rakyat Selayar ialah Aruppala. Wadah organisasi yang mempersatukan pendukung kemerdekaan, PKR (Perkumpulan Kedaulatan Rakyat) dibentuk dengan diketuai oleh Aruppala. Maka sejak hari itu bendera merah putih berkibar di ibu kota Selayar. [10]

Kota kecil yang terdekat di sebelah utara Makassar ialah Maros, pusatnya di Desa Turikale di bawah kepeloporan Karaeng Turikale dan Abd. Hamid Daeng Manassa. Ia juga menjabat sebagai pimpinan organisasi SUDARA di Maros pada akhir kekuasaan Jepang. Berita kemerdekaan yang diketahui umum pada akhir Agustus 1945, dengan cepat tiba dan meluas di Maros. Di Kassi Kebo, masih dalam Kota Maros, Abd. Hamid Sahaban Daeng Pabeta memimpin rapat untuk menyatukan gerakan dalam mendukung dan mempertahankan kemerdekaan. Pertemuan itu dihadiri tidak kurang dari 120 orang

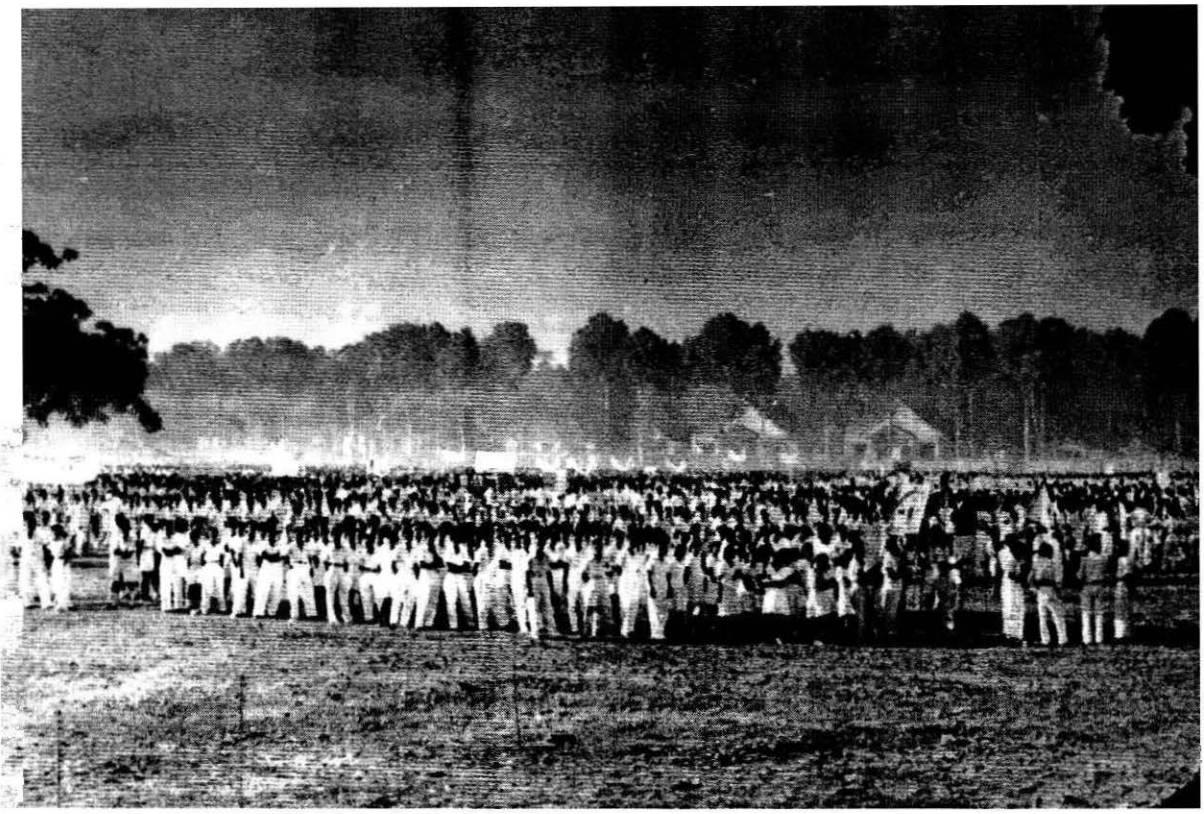


Foto peringatan Hari Kemerdekaan RI pertama kali diadakan di Sulawesi setelah sebelumnya dilarang oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur tanggal 17 Agustus 1946 *(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)*

pemuda, seperti M. Tajuddin Daeng Masiga (karaeng), Abd. Kamaruddin Sahban, Abd. Hamid, H. Muh. Kasim, dan Mansyur Iskandar. Sementara itu, Mania Sophian dari Makassar mengundang 25 orang tokoh-tokoh utama pejuang melakukan pertemuan tertutup di Kantor Karaeng Turikale. Pertemuan itu membahas tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

2. Pemberitaan Melalui Media Radio

Penyebaran berita proklamasi juga berlangsng melalui berita radio dan informasi dari prajurit-prajurit Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Bangsa Indonesia. Di Soppeng, berita kemerdekaan mulai dibicarakan secara berbisik sejak 22 Agustus1945. Kemudian, setelah organisasi PNI (Pemuda Nasional Indonesia) terbentuk atas inisiatip Andi Mahmud, berita kemerdekaan tersebar luas. Andi Mahmud yang memiliki pesawat radio sempat mendengar adanya proklamsi itu. Ketika itu ia menjabat sebagai Kepala Distrik

Liliriaja *Onderafdeling* Sopeng. Di Kota Pare-pare, Andi Abdullah Bau Masspe mendengar berita proklamasi kemedekaan melalui radio miliknya, sehingga dengan cepat menyebarkan ke segenap kerabat dan rakyat, dan selanjutnya Andi Abdullah Bau Masspe menjadi salah seorang pelopor pendukung kemerdekaan di antara para raja dan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan.

Berita Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kolaka diterima dari orang Jepang yang mendengar melalui radio, yaitu oleh Kabasima Taico, Komandan tentara Jepang yang bertugas di daerah pertambangan Nikel Pomalaa-Kolaka. Patut dicatat bahwa Kabasima Taico, kemudian berganti nama menjadi Mansur, bersama temannya yang bernama Sukri tidak mau dipulangkan ke Jepang. Mereka ikut berjuang bersama pemuda Kolaka menentang pendudukan Belanda di Kolaka Utara (Lasusua). Mereka mendirikan gerakan Kipas Hitam untuk menentang NICA.[11]

Sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Luwu, Kolaka dikenal memiliki barisan pemuda yang telah melakukan langkah maju. Sejak tanggal 18 Agustus1945, mereka telah membentuk organisasi pemuda militan, GKR (Gerakan Kebangunan Rakyat). Wadah itu dibentuk atas izin Kabasima, Angkatan Laut Jepang yang bertugas di wilayah pertambangan Nikel Pomalaa. Pimpian GKR ialah M. Jufri Tambora, dibantu oleh Andi Punna. Dari pihak Jepang duduk sebagai penasehat Kapten Kabasima dan Kapten Fujiyama.

Pada tanggal 20 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan dari Palopo sudah sampai pada para pemuda GKR dan masyarakat luas di Kolaka karena dibawa pula para perantau yang baru datang dari Palopo. Atas dasar itu, M. Jufri Tambora yang masih memiliki hubungan keluarga dengan bangsawan Luwu, berangkat menuju Palopo. Tujuannya ialah untuk mendapat berita resmi seikap Raja Luwu terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Insonesia. Jufri Tambora kembali ke Kolaka pada pertengahan September 1945 membawa kepastian sikap Raja Luwu terhadap kemerdekaan itu.[12]

Turut sertanya beberapa orang Jepang dalam perjuangan menentang Belanda/NICA menggambarkan betapa jauhnya oknum tentara Jepang membantu mendirikan kekuasaan RI di Sulawesi Tenggara. Di Kendari berita Proklamasi mulai diketahui dari kalangan Kaigun dan Heiho yang disampaikan juga oleh Tentara Jepang yang

bertugas memimpin Heiho tersebut yaitu Idie Heiso dan Sadamitsu Heiso.

3. Peran ParaTokoh

Pengibaran bendera merah putih di Kota Makassar pada hari Senin 17 September 1945 diinspirasi oleh kedatangan seorang tokoh PSII Sulawesi dari Jawa, Jusuf Samah. Dia menceritakan tentang perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, sehingga para pemuda dan tokoh yang mendengar sangat bersemangat untuk segera mengibarkan bendera merah putih. Bertempat di Halaman Perguruan Islam di Jalan Datu Museng No. 8 Makassar, pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh 2 orang pelajar sekolah dan disaksikan seluruh pelajar, segenap masyarakat sekitar dan beberapa orang Bekas Heiho yang menyamar dengan membahwa geranat tangan. Para pelajar dengan penuh percaya diri memakai lencana merah putih di dadanya. Peristiwa ini dipimpin oleh Kepala Perguruan tersebut, Ustaz Gazali Sjahlan.

Meski kemerdekaan Indonesia sudah diplokamirkan 17 Agustus 1945, tetapi tokoh-tokoh perjuangan di Bolaang Mongondow belum melihat naskah proklamasi itu. Untung ada seorang penduduk Desa Molinow yang menjadi guru di SD Molibagu (Bolsel), Siata Paputungan, yang memperoleh salinan naskah proklamasi yang berasal dari Gorontalo. Maka dengan berjalan kaki ia datang ke Desa Molinow memperlihatkan naskah proklamasi kepada tokoh PSII. Tokoh-tokoh PSII bersama bekas pemuda Heiho dan beberapa anggota tentara Jepang yang tidak mau dipulangkan ke tanah leluhurnya datang mengibarkan bendera Merah Putih di lapangan Desa Molinow. Pengibaran Merah Putih, berlangsung pada tanggal 19 Desember 1945, didukung Lettu Hirayama yang pagi itu bermarkas di rumah JFK Damopolii, yang akhirnya markas Lettu Hirayama dikepung Polisi Belanda yang bermarkas di Kotamobagu pimpinan Lettu Kambey. Dalam pertempuran itu, Kambey terkena tembakan di paha, sehingga polisi Belanda mundur kembali ke markasnya di Kotamobagu.

Di Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara, berita proklamasi dibawa oleh para pelayar yang baru datang dari Jawa dan Sumatra, seperti yang dilakukan oleh La Ola pada bulan September 1945. Di bawah Komando BKR Laut pimpinan Mayor S. Daeng Mangatta, La Ola

berlayar ke Singapura dan bertemua dengan Sumitro Djojohadikusumo. Mereka sepakat memuat senjata dari Singapura ke Jawa. Dalam perjalanan pulang dari Singapura, pada bulan September 1945, mereka singgah di Tanjung Pinang, dan kemudian mendapat tugas tambahan menyelamatkan Soepardjo Rustam dari Rumah Tahanan di Tanjung Pinang. Dari situ mereka berlayar menuju ke Cirebon dan selanjutnya ke Ambarawa ,Jawa Tengah. La Ola juga terlibat dalam perjuangan melawan Sekutu/NICA pada bulan November 1945 di Surabaya.[13]

Berita proklamasi kemerdekaan di Daerah Sulawesi Tengah mula-mula terdengar dan diketahui oleh tokoh-tokoh pejuang di Poso dari pemberitaan orang Jepang sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di atas Daerah Poso pesawat-pesawat Sekutu menyebarkan pamflet berwarna kuning berisikan pemberitahuan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Oleh kepala Kampung Malei (bagian kerajaan Tojo), Abu Maloco, secara rahasia selembar dari pamflet itu dikirimkan kepada Abdul Latief Mangitung di tempat persembunyiannya di atas kampung Malei. Ia telah menjadi buronan polisi Jepang sejak peristiwa Gerakan Merah Putih tahun 1942 di Ampana-Tojo.

Setelah membaca isi pamflet tersebut, Abdul Latief Mangitung berangkat ke Poso pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mengetahui dari dekat situasi yang sebenarnya dan bermalam di rumah Lanokang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kira-kira jam 15.00 sore, Abdul Latief Mangitung dikunjungi di tempat penginapannya oleh seorang perwira Jepang yang dikawal oleh dua orang anggota Heiho asal Sulawesi Selatan bernama Saleh Topetau dan Djafar. Perwira Jepang itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Mula-mula berita ini dianggap hanya pancingan Jepang terhadapnya, sehingga ia tidak berani menanggapinya. Baru setelah dua orang Heiho membenarkan berita itu dengan menyatakan bahwa mereka berdua langsung mendengar berita proklamasi dari radio milik Jepang saat sedang bertugas, barulah berita itu diyakini kebenarannya.

Sementara itu dari keterangan I Latanco Talamoa diperoleh penjelasan bahwa berita proklamasi diketahuinya dari seorang tentara Jepang kenalan baiknya bernama Nakamura dari Angkatan Darat. Setelah mendengar dari radio tentang proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Nakamura dengan segera ke rumah I Latanco Talamoa dan berkata; "Jepang sudah kalah, tapi Indonesia sudah merdeka

menghadapi Belanda. Belanda, Amerika ganti Jepang." Ketika I Latanco Talamoa bertanya "Mengapa begitu?" Dijawab oleh tentara Jepang tersebut: "Ada berita dari Batavia, Indonesia ada proklamasi kemerdekaan melalui radio oleh Sukarno-Hatta".[14]

Menurut catatan harian R.G. Ratupamusu, tidak lama sesudah berita proklamasi didengar di Poso, pada tanggal 25 Agustus 1945 tibalah di Poso utusan Gubernur Sulawesi Dr. G.S. S.J. Ratulangi dari Makassar melalui jalan darat dari Palopo ke Poso. Utusan tersebut adalah A.N. Hajarati dan Hamzah Ilahude untuk membentuk Pemerintahan Nasional di Poso serta memberi penerangan tentang telah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.[15]

Pada saat kedatangn A.N. Hajarati dan Hamzah Ilahude inilah bendera Merah Putih dinaikkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebuah pertemuan diadakan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat sekitar 40 orang. Pada pertemuan itu dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional dengan mengangkat Wongko Lemba Talasa sebagai Kepala Pemerintahan Nasional Wilayah Poso. Untuk Dewan Pertahanan Nasional dipimpin Ibrahim Muhammad, dan sebagai delegasi utusan ke Palu untuk membawa dokumen propaganda Merah Putih/lambang Merah Putih dipilih R.G. Datupamusu.

Ada 9 dokumen/surat yang harus dibawanya ke Palu, masing-masing untuk: (1) Raja Parigi, Tagunu, (2) Raja Tawaeli, Lamakampali, (3) Raja Palu, Janggola, (4) Raja Banewa, Rohana Lamarauna, (5) Raja Biromaru, Lamasaera; (6) Raja Kulawi, Djiloi, (7) Raja Moutong, Kuti Tombolotutu, (8) Kepala Pemerintahan Negeri Palu, Tjatjo Ijazah, dan (9) Kepala Polisi di Palu. Menyusul pada bulan November 1945 tiba lagi utusan Pemuda Republik Indonesia (PRI) dari Palopo ke Poso melalui jalan darat. Utusan tersebut terdiri dari M. Landau selaku pimpinan rombongan, bersama Umar Abdullah dan Nur Apala. Tujuannya ke Sulawesi Tengah umtuk membantu cabang PRI di Poso sambil mengadakan pertemuan untuk memberikan penerangan tentang proklamasi kemerdekaandan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan.

Dari Poso M. Landau dengan rombongan ke Ampana, Bunta dan Pagimana. Di Ampana, Raja meminta M. Landau dan kawan-kawannya memberikan penerangan kepada rakyat Ampana dan sekaligus mengibarkan bendera Merah Putih. Pada saat M. Landau dan kawan-kawan tiba di Bunta, mereka disambut dengan hangat oleh

masyarakat setempat. Begitu pula ketika mereka tiba di Pagimana, mereka mendapat kesan tokoh-tokoh politik dan masyarakat di tempat itu memang telah memiliki kesadaran dan jiwa nasionalisme yang telah mendalam karena sudah mengalami perkembangan sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang. Mengenai sikap Jepang terhadap ini semua, mereka hanya diam saja, akan tetapi di Poso Jepang tidak melarang pemuda mengambil senjata yang sudah terkumpul sambil mengatakan "Indonesia Senjata boleh curi-curi ".[16] Pada waktu itu pimpinan pemuda di Kota Poso adalah Sidik Utina, Yakob Lamadjuda dan W.L. Talasa.

4. Majalah, Koran dan Radio

Pernyataan kemerdekaan yang disampaikan oleh Gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangie juga dimuat harian *Pewarta Selebes* pada 29 Agustus 1945. Pemuda Minahasa pendukung proklamasi RI tanggal 8 Oktober 1945 mendirikan organisasi Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Suatu media penerangan dan propaganda dilancarkan oleh BPNI dengan penerbitan majalah yang bernama *Catapult* dan *Suara Indonesia Moeda*, di bawah asuhan Chris Pontoh dan John Rahasia. *Catapult* berbahasa Belanda karena masyarakat terpelajar umumnya berbahasa Belanda.[17] Melalui media penyiaran ini, maka rakyat dapat mengikuti keadaan perjuangan di Jawa dan pembangkitan semangat untuk berpartisipasi. Sumber-sumber berita diperoleh dari Dokter Senduk dan Dr. W.J Ratulangi yang menangkapnya dari pesawat-pesawat radio yang ditingkalkan oleh dinas PHB-Jepang.

Perlu pula ditambahkan di sini Kantor Berita Jepang *Domei*, khususnya bagi para pemuda Minahasa di mana berita Proklamasi pertama kali diketahui pada 18 Agustus 1945. Dalam hal ini, A. S. Rombot dan A. Siga, yang saat itu tengah bertugas di Markas Angkatan Laut Jepang di Tondano, mendengar berita proklamasi yang disiarkan oleh Kantor Berita Jepang (*Domei*) di Tokyo. Berita yang sangat penting itu hanya diselipkan di antara berita-berita lain mengenai bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kapitulasi Jepang (10 Agustus), perintah gencatan senjata yang dikeluarkan oleh Kaisar Jepang, dan sebagainya. Kedua pemuda itu lalu menyampaikan berita itu antara lain kepada Wangko F. Sumantri yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Benteng Pertahanan Tanah Air di Tondano. Sebab itu tidaklah mengherankan kalau para pemuda di Tondanolah yang memulai gerakan pembelaan Proklamasi.

Kegiatan para pemuda di Tondano pertama-tama tampak di Sekolah Kepolisian (*Nippon no Tokibetsu*) yang didirikan pada masa

pendudukan Jepang di sebuah gedung gereja Advent di Rerewoken (Tondano). Jumlah siswanya sekitar 70 orang yang rata-rata berusia 17 dan direkrut dari seluruh penjuru Minhasa. Segera setelah menerima berita baru dari Sigar-Rombot, pada 19 Agustus 1945 para pelajar di sekolah Kepolosian di Tondano itu mengadakan apel dan menaikan Merah-Putih serta menyanyikan Indonesia Raya.

Badan pemerintah Sementara (Komite Tenaga Rakyat) dibawah pimpinan E.H.W Pelengkahu kemudian memutuskan agar pada tanggal 23 Agustus 1945 Merah Putih dikibarkan serentak di beberapa tempat di Minahasa, seperi Tondano, Kawangkoan, Kombi, dan Sonder.[18]

5. Perjuangan Putra Sulawesi di Jawa

Menjelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda dari Sulawesi terlibat dalam kegiatan persiapan kemerdekaan, termasuk di BPUPKI seperti Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. Ia duduk dalam Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta. Mereka bekerja merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau turut menandatangani rumusan ini pada 22 Juni 1945. Rumusan Pembukaan UUD 1945 ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Mencermati kegiatan putra asal Sulawesi di Jawa masa perjuangan kemerdekaan, meski akhirnya mereka bersatu dalam brigade XVI, dalam perkembangannya dapat dibagi menurut laskar kegiatan mereka, yaitu: (1) di Jawa Tengah pimpinan Kahar Muzakar; (2) di Jawa Timur (Malang) Angkatan Darat pimpinan Warouw; (3) di Jawa Timur (Lawang) Angkatan Laut pimpinan Aris dan Hamzah Tuppu; dan (4) Di Jawa Timur (Porong) Angkatan Kepolisian pimpinan M. Jasim.[19]

Kahar Muzakar semakin perhatian ketika berhasil mendapat izin membebaskan narapidana Suku Bugis Makassar yang telah menjalani hukuman dua zaman di penjara-penjara Nusa Kambangan, Cipinang Jakarta, Sukamiskin Bandung, Ambarawa dan Sragen. Para narapidana dua zaman adalah mereka yang dihukum pada zaman Hindia Belanda dan masih menjalani hukumannya pada masa pendudukan Jepang. Mereka terdiri dari orang-orang yang dihukum karena membunuh.

Kemudian para tahanan yang baru dibebaskan jumlahnya lebih dari 1.000 orang secara bergelombang dididik jiwanya dan dilatih menjadi prajurit tanah air di asrama ini, sebelum mereka diterjunkan ke dalam pertempuran. Sementara para anggota senior dimasukkan untuk

pendidikan opsir antara lain: KS. Gani, Puddu Mas'ud, H. Moh. Idrus G.P, Daeng Mangatta dan lain-lain. Bersama pelarian dan perantau yang kemudian datang di Jawa dari Sulawesi Selatan, Mereka menjadi pasukan Kahar Muzakar.

Kegigihan Kahar Muzakkar memperjuangkan para tahanan menjadi kader-kader pejuang republik tidak berhenti dalam periode ini. Pada 1951 kembali Kahar Muzakkar menyatakan bahwa seluruh pemuda pejuang/gerilyawan harus diangkat menjadi prajurit TNI. Namun, pada Maret 1951, berdasarkan kesepakatan sementara, para gerilyawan dilebur menjadi Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang terdiri atas 5 batalyon. Sambil menunggu hasil seleksi, mereka kembali ke tengah masyarakat. Kondisi inilah yang ditentang Kahar Muzakkar, sehingga sejak 17 Agustus 1951 ketika diadakan upacara penggabungan pasukan, Kahar Muzakkar sudah tidak hadir, dan selanjutnya mereka kembali ke hutan. Sejak tahun 1952 Kahar Muzakkar menerima tawaran Pimpinan Darul Islam (DI) Kartosuwirjo untuk bergabung melawan pemerintah Jakarta dan menerima Jabatan Komandan Divisi IV Hasanuddin Tentara Islam Indonesia (TII).[20]

Aksi tersebut, kelak dikenal sebagai Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara yang berlangsung sampai tahun tahun 1962, saat mana Kahar Muzakar tertembak mati pada awal Februari 1962 di tepi Sungai Lasolo oleh Koptu Sadeli dari anggota Komando Operasi Kilat yang dipimpin oleh Kolonel Solichin G.P.[21]

Pada bulan Januari 1946 tibalah di Yogyakarta dua orang tokoh pemuda Sulawesi Selatan, yaitu Andi Mattalatta dan Saleh Lahade. Kedua tokoh ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk melaporkan keadaan di Sulawesi dan melaporkan usulan Gubernur Ratulangie, mereka diutus untuk: (1) meminta bantuan pasukan dan persenjataan kepada Pemerintah Pusat di Yogyakarta, (2) menyampaikan resolusi raja-raja yang menolak kerjasama dengan NICA.

Pada tanggal 25 Januari 1946, presiden mengeluarkan dekrit menggantikan nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia, yang kemudian disusul dengan perombakan besar-besaran organisasi ketentaraan. Pada 21 Juni 1946 menghadaplah ke MBT Yogyakarta 4 orang tokoh-tokoh pejuang Sulawesi Selatan, yakni Kahar Muzakar, Andi Mattalatta, Mas'ud, dan Muhamadong dengan diantar oleh Kol. Martono Subroto. Keempat tokoh ini mengusulkan TRIPS (Tentara

Republik Indonesia Persiapan Sulawesi). Usul diterima dan tak lama kemudian keluarlah penetapan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk pembentukan TRIPS dengan tugas menyelenggarakan ekspedisi ke daerah-daerah seberang yang telah diduduki Belanda. Untuk kepentingan ini, bintara-bintara atau opsir-opsir berasal dari Sulawesi Selatan yang berada di berbagai kesatuan dipanggil untuk menggabungkan diri ke dalam TRIPS. Mereka antara lain datang dari Jawa Barat (Siliwangi), Overste Sarifin, Letnan A. Latief, Mayor Mas'ud, Sersan Syamsul Bahri dan Kopral PT. (Polisi Tentara) Bahar Mattaliu.

Sebagai komandan TRIPS diangkat Kahar Muzakkar dengan pangkat Letkol, Andi Mattalatta sebagai kepala stafnya dengan pangkat Kapten. Sementara itu Saleh Lahade diangkat menjadi Komisaris TRIPS Indonesia Timur. Persiapan untuk mengirim ekspedisi ke seberang segera dimulai. Perlengkapan dan peralatan sudah didapat dari MBT. Berton-ton gula disediakan untuk pembiayaan Letnan M. Jusuf dan Letnan Syamsuddin Rakka yang ditugaskan ke Singapura membawa gula untuk dibarter dengan pakaian dan senjata.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus1945, putera-putera Indonesia di Jakarta asal Sulawesi membentuk berbagai wadah/organisasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pertama yang dibentuk adalah GEPIS, kemudian APIS. Setelah itu pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

Dalam waktu singkat organisasi perjuangan ini telah dapat mendirikan cabang-cabangnya hampir di seluruh kota penting yang berada dipulau Jawa. Pada akhir tahun 1945, anggota KRIS di Jakarta, Haji Lamban dan Haji Kaddase, diberangkatkan ke Sulawesi Selatan melalui Tegal dengan menumpang perahu layar dan berhasil mendarat di pantai Polewali. Sementara anggota KRIS di Jawa Tengah, Hasan bin Tahir dan Daeng Parani, diberangkatkan ke pantai Barat Teluk Bone. Keberangkatan Kedua rombongan KRIS ini belum merupakan expedisi bersenjata, tetapi hanya sekedar rombongan penerangan terutama untuk meyakinkan para raja-raja di Sulawesi Selatan untuk turut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, dan jangan sampai dapat bekerja sama atau diperalat oleh NICA. Expedisi ini berhasil mendarat di tempat tujuan masing-masing sesuai rencana semula, dan berhasil pula mengadakan pendekatan dengan raja-raja sesuai mandat

dari KRIS di Jawa. Namun sayang tidak lama sesudah itu satu-persatu anggota KRIS ditangkap oleh NICA dan dibunuh secara kejam.

Organisasi perjuangan KRIS yang telah terbentuk hampir di seluruh kota penting di Jawa turut ambil bahagian dalam berbagai peristiwa pertempuran dan perjuangan lainnya bersama badan perjuangan lain. Simbol KRIS berupa senjata tradisional, yang dianggap identik dengan *badik* bagi orang Bugis-Makassar, telah berhasil menggugah hati putera-putera Sulawesi, baik yang berada di rantau maupun yang berada di Sulawesi sendiri, untuk turut serta ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan.

Selain itu, ada dua orang opsir PETA bagian laut yang berasal dari Sulawesi Selatan, M. Aris dan Hamzah Tuppu. Keduanya bersama-sama dengan J. Tamboto, Tuege, J. Bolang, Luntungan, Sutrisno, Muchtar dan lain-lain, membentuk BKR laut yang kemudian menjadi TKR laut, di samping organisasi PRIAL (Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut) di Surabaya. Pada akhir tahun 1946 menjelang tahun 1947 dimulailah ekspedisi pasukan TRIPS ke Sulawesi, ada yang selamat mendarat, ada yang terpaksa kembali dan ada yang tertangkap di perjalanan. Ekspedisi tentara ke Sulawesi Selatan itu menumpang perahu layar sebagaimana kebiasaan anak-anak Bugis-Makassar. Tercatatlah nama-nama Andi Mattalatta, Saleh Lahade, Andi Sarifin, Andi Sapada, Murtalak dan lain-lain sebagai pelopor-pelopor perjuangan kemerdekaan untuk Sulawesi Selatan yang berhasil mendarat setelah bertempur mati-matian melawan tentara Belanda.

8.3. Pembawa Berita Proklamasi

Sementara Dr. G.S.S.J. Ratulangie menunggu-nunggu kedatangan para pemuda pendukung kemerdekaan di tempat ia menginap di Hotel Empress, muncul Sanusi Daeng Mattata dari Palopo. Sanusi diutus Pemerintah Kerajaan Luwu di Palopo atas desakan organisasi Sukarno Muda. Pertemuan antara Sanusi dengan Dr. Ratulanggi pada tanggal 26 Agustus1945 mendorong segera diumumkannya berita proklamasi secara resmi. Sehari sebelum tanggal 25 Agustus1945, Panglima Pangkalan Istimewa XXIII Jepang, Laksamana Muda Sugi Mori Kadzu, mengundang sekitar 20 orang tokoh *Heiho* unsur *Kaigun*, antara lain Abd. Syukur, Dahlan Tahir, Alex, dan Z.A. Sugianto. Sugimori berharap agar meraka berusaha menjamin

keamanan pada waktu Sekutu mendarat. Abd Syukur akan menemui perwira Jepang tersebut guna merundingkan pelaksanaan tugas-tugas keamanan dan soal senjata. Sugimori bersemangat memberikan senjata secukupnya, asal melalui persetujuan dengan kepemimpinan politik Bangsa Indonesia pro-kemerdekaan di Makassar ketika itu.[22]

Bersama Abdul Syukur, Letnan Kawamura menemui salah seorang pemuda pendukung kemerdekaan. Ternyata, Manai Sophian kurang tertarik dengan rencana bekas *Kaigun Heiho*. Dalam pertemuan tanggal 27 Agustus 1945 itu, Manai Sophian menganjurkan pembentukan organisasi dengan pendukung kemerdekaan tanpa persenjataan militer. Rupanya Manai Sophian dalam sikapnya itu berdasarkan jalan pikiran Dr. G.S.S.J. Ratulangie yang dalam kepalanya penuh pertimbangan matang bahwa dalam waktu singkat Sekutu akan mendarat dengan persenjataan lengkap. Tentu saja, Manai Sophian disalahkan dalam penolakan itu, dan sangat mengecewakan para pemuda militan.

Dalam keadaan kecewa di kalangan pemuda, pada tanggal 28 Agustus1945, Dr. G.S.S.J. Ratulangi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh SUDARA di Makassar. Di sini pun terdengar nada-nada kekecewaan, yang ditujukan kepada Dr. G.S.S.J. Ratulangie. Kecaman tajam dilemparkan sebagian anggota rapat, terutama oleh Najamuddin Daeng Malewa, yang memang memiliki haluan politik berbeda. Setelah aparat Belanda/NICA mengambil alih kekuasaan dari Sekutu, Dr. Ratulangie ditangkap pada 5 April 1946, dan Najamuddin Daeng Malewa menjadi aparat NICA terpercaya. Para pemuda semakin yakin akan kegagalan perjuangan diplomasi yang dikembangkan oleh Ratulangi.[23]

Sesungguhnya rakyat Sulawesi Selatan mendukung Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gubernur. Mereka bersama para raja bersedia bekerjasama dengan gubernur. Akan tetapi, sang gubernur bersikap terlalu hato-hati, khawatir akan timbul pertumpahan darah apabila berhadapan dengan pasukan Sekutu yang akan mendarat. Dr. Ratulangi mengadakan perjalanan ke Pare-pare terus ke Wajo dan Watampone, sedangkan ke Luwu dikirim A.N. Hajarati yang meneruskan perjalannan ke Poso Sulawesi Tengah. Daerah-daerah sebelah selatan Kota Makassar dikunjungi Lanto Daeng Pasewang, mulai dari Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng (Bonthain), Bulungkumba; Lanto Daeng

selanjutnya menuju ke wilayah utara bersama A.N Hajarati menemui Andi Burhanuddin dan Andi Mallarangeng di Pankajene Kepulauan. Kemudian, pada awal September 1945, dia menuruskan perjalanan ke Pare-pare menemui Andi Abdullah di Bau Masspe. Dua bangsawan terkemuka di Pare-pare, Andi Abdullah Bau Masspe dan Andi Makkasau, yang sekaligus sebagai tokoh utama SUDARA, menjadi pelapor penyebarluasan berita proklamasi.

Dari Kota Pare-pare, berita resmi proklamasi kemerdekaan disebarluaskan ke Rappang, Sidenreng, Enrekang bahkan terus ke Tanah Toraja. Berita proklamasi juga disebarkan ke arah utara Kota Pare-pare, yakni Suppa, Pindrang, terus ke Daerah Mandar. Berita resmi kemerdekaan bangsa Indonesia telah tersebar luas dan diketahui penduduk Sulawesi Selatan menjelang pertengahan bulan September 1945.

Di Palopo, ibukota pemerintahan Kerajaan Luwu, pemuka masyarakat telah mempersiapkan diri dalam perjuangan kemerdekaan pada akhir pemeritahan Jepang 1944. Berkali-kali tokoh pergerakan kemerdekaan datang ke Palopo, seperti Wahab Tarru, Siarahmal, serta pimpinan PSII dan mauhammadiyah. Ketika itu pula, Sakata yang menjabat Tokketai Pelabuhan Palopo membentuk perkumpulan seni. Ia menghimpun beberapa orang seniman, seperti Rudhy Kamph, Wimpoli, Ani Assah, Bram hitaria, dan juga putera Datu Luwu Andi Akhmad serta beberapa puteri Luwu.

Sakata adalah juga perwira intel Jepang. Ia mengikuti terus situasi peperangan yang menyudutkan pasukan Jepang. Perasaannya yang gundah gulau akibat kekalahan pasukan Jepang di berbagai front, dicetuskan dalam Kesenian Band Hawaianya. Rahasia Jepang sering dibuka oleh Sakata tanpa sadar, namun para anggotanya kurang peka menerimanya. Kepada Andi Akhmad ia berkata bahwa seandainya Jepang kalah, kira-kira bagimana selanjutya. Andi Akhamd menjawab, maka saat itu kesempatan Indonesia merdeka.

Selang beberapa hari, tepatnya 17 Agustus1945 sore, Sakata memberitahukan kepada Andi Akhmad tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno-Hatta, disaksikan oleh perwira Jepang Maeda. Pada malamnya, kelompok Sakata tidak mengadakan latihan band, melainkan membuat pamflet untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Setelah disepakati, kalimat pamflet ditulis oleh

Wim Poli, yang berbunyi: "dengan disaksikan Laksamana Maeda, Sukarno-Hatta telah megumumkan kemerdekaan Insonesia". Lewat tengah malam, sementara penduduk kota yang muslim sibuk santap sahur, kelompok Sakata memasang pamflet pada dinding kantor-kantor, tembok pagar pinggir jalan, dan pohon-pohon besar. Keesokan hariya, tanggal 18 Agustus1945, penduduk kota tersentak melihat pamflet. Pembicaraan pun berkisar pada isi pamflet, dan tentang siapa yang memasangnya.[24]

Berita proklamasi sampai di Tanah Toraja sampai seminggu kemudian, yakni pada tanggal 24 Agustus1945. Seorang pimpinan pemuda, bernama Mahmud (biasa disebut Guru Mude), menjadi pelopor dalam penyebarluasan berita proklamasi. Di Kota Makale, ibukota Afdeling Tanah Toraja, Mahmud bekerjasama A. Y. K. Andi Lolo dan Baledeng Makawaru menyusun rencana menyebarluaskan berita kemerdekaan. Ketika itu, kelompok Mahmud hanya dikenal sebagai perkumpulan Muhammadiyah dengan adanya A. Y. K. Andi Lolo dalam kelomok itu, perlahan-lahan anggapan sekitarnya berubah. Sedangkan para pendukung kemerdekaan menyebarluaskan kemerdekaan, tentang arti dan kebaikannya bagi peduduk, dan masyarakat luas menerima dan menyambut baik usaha para pemuda itu.

Berita proklamasi kemerdekaan dibawa oleh Andi Pageran Daeng Parani ke Watampone ketika ia kembali dari Jakarta tanggal 19 Agustus1945. Melalui istana Mangkau (raja) Bone, berita penting ini tersebar dari mulut-kemulut. Pihak Heiho pun telah menduga masih akan ada perubahan situasi di Indonesia. Hal itu nampak dari adanya pembubaran latihan para Heiho dan Seinendan. Tentara Jepang di mana-mana kelihatan lesu dan tidak bersemangat. Dari istana Raja Bone, berita kemerdekaan disebarkan ke pedalaman. Pimpinan barisan Heiho, Seinendan, dan pendukung PNI Mr. Tajuddin Noer menyambut proklamasi, dan menjadi juru penerang.

Di Soppeng, berita kemerdekaan mulai dibicarakan secara berbisik sejak tanggal 22 Agustus1945. Kemudian, setelah organisasi PNI (Pemuda Nasional Indonesia) terbentuk atas inisiatip Andi Mahmud, berita kemerdekaan tersebar luas. Andi Mahmud yang memiliki pesawat radio sempat mendengar adanya proklamsi itu. Ketik itu, ia menjabat sebagai Kepala Distrik Liliriaja Onderafdeling Sopeng.

Penyebarluasan berita proklamasi di Wajo dimulai oleh putera Andi Ninong bernama Andi Mahmud. Andi Mahmud atau nama lainnya Andi Arif Muliyadi, datang dari Kota Makassar ke Kota Sengkang, ibu Kota Kerajaan Wajo. Ia menyampaikan kepada ibunya, Andi Ninong, bahwa di Kota Makassar para pemuda amat sibuk menyambut proklamasi. Sesudah Lanto Daeng Pasewang tiba di Sengkang, rakyat semakin banyak mengerti makna kemerdekaan yang baru saja diumumkan.

Sesungguhnya berita proklamsi sudah masuk ke Wajo ketika utusan dari Palopo menuju Makassar pada tanggal 24 Agustus1945. M. Sanusi Daeng Mattata bersama M. Yusuf Arief yang menjadi utusan Luwu, M. Sanusi Daeng Mattata, singgah di Wajo dan Bone menemui Andi Panggaru dan Guru Anwar di Sengkang, sedangkan di Bone menemui pemuda dan raja Bone. M. Sanuasi Dg. Mattata menyampaikan kepada mereka tujuan perjalanannya dari Luwu ke Makassar, yakni untuk menemui Dr. G.S.S.J. Ratulangi, dan menanyakan kepastian proklamasi kemerdekaan.[25] Namun demikian, Andi Panggaru dan Anwar hanya menyebarkan berita penting itu di kalangan sahabatnya dalam Muhammadiyah.[26]

Setelah pihak keluarga Andi Ninong—bangsawan tinggi dan pemangku salah satu jabatan utama dalam Kerajaan Wajo—menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan dan menyebarluaskan berita proklamasi, penduduk Wajo baru yakin kebenaran berita itu. Andi Ninong adalah Ranreng Tua Kerajaaan Wajo bertempat tinggal dalam istananya di Tempe, pinggiran Kota Sengkang.

Dr. G.S.S.J. Ratulangie bersama Lanto Daeng Passewang tiba di Sengkang pada awal September 1945. Rombongan dari Makassar itu langsung berhadapan dengan masyarakat Kota Sengkang pada hari kedatangannya. Dalam pertemuan itu, dijelaskan tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan cara-cara yang akan ditempuh dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Peserta rapat umum mengucapkan ikrar, bahwa Rakyat Wajo berdiri di belakag RI. Keesokan harinya, Dr. G.S.S.J. Ratulangie bersama Lanto Daeng Passewang meneruskan perjalanan ke Bone.

Berita proklamasi kemerdekaan telah mencapai seluruh pelosok Sulawesi Selatan pada pertengahan September 1945. Mereka mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta bersiap

mempertahankanya. Rakyat pada umumnya tahu bahwa Belanda berupaya kembali melanjutkan penjajahan, akan tetapi pengalaman selama masa penjajahan telah menjadi pelajaran berharga. Rakyat tidak ingin mengulangi pengalaman pahit itu. Karena itu, kemerdekaan dari pejajahan berdasarkan proklamasi 17 Agustus harus ditegakkan.

Hubungan komunikasi yang jauh dari sempurna pada awal proklamsi telah meyebabkan para pemimpin dari Makassar melakukan kunjungan maraton ke pedalaman. Kemudian, tokoh masyarakat dan pemuda pada setiap kota kecil di pedalaman, menyebarluaskan berita kemerdekaan itu beserta penjelasan-penjelasan seperluya kepada rakyat pada umumnya. Ketika itu, media komunikasi seperti radio masih langka, diperkirakan hanya ada sekitar 10 orang di Sulawesi Selatan yang menyimpan radio di rumahnya saat Jepang menyerah (Agustus1945). Di Kota Pare-pare, hanya Andi Abdullah Bau Masspe yang memiliki radio, sedangkan Andi Makkasau, Datu Suppa Towa (bekas Raja Suppa) tidak menyimpan radio. Kendaraan roda empat amat jarang kelihatan di jalan raya. Mereka yang berduit sudah boleh berbangga jika memiliki sepeda. Oleh karena itu, penyebarluasan berita proklamasi lebih banyak dilakukan dengan berjalan kaki. Meskipun keadaan serba sulit, rakyat Sulawesi Selatan umunya mengetahui bahwa mereka telah bebas dari cengkraman asing.

Kesibukan para pemuda di Kota Makassar dalam mendukung proklamasi kemerdekaan menarik perhatian Rakyat Gowa. Kampung Jongaya, yang berbatasan dengan Kota Makassar, ditempati sejumlah pimpinan pemuda yang sering mengadakan pertemuan. Di tempat itu juga Andi Mappanyukki bermalam bila ke Makassar. Pada akhir bulan Agustus1945, rakyat mengibarkan bendera merah putih di bawah pimpinan Abd. Rasyud Daeng Lurang. Pengibaran bendera dimulai di Kampung Pao-pao, sekitar makam Sultan Hasanuddin. Bahkan, muncul perkumpulan pemuda kampung pada pinggiran kota.

Pemuda Gowa di Katangka pada pertengahan September 1945 berusaha mencari senjata. Atas petunjuk Badollahi, beberapa pucuk karaben Jepang ditemukan dan juga pucuk pistol genggam. Hanya peluru senjata api itu amat kurang, sehingga manfaatnya pada masa itu tidak seperti yang diharapkan. Di Pannara, atas usaha Supu dan kawan-kawan ditemukan lagi senjata Karaben Jepang. Dengan demikian, pemuda pendukung kemerdekaan di Gowa telah memiliki sekitar 10 pucuk senjata karabeng Jepang dan beberapa pistol. Pusat kegiatan

pemuda ialah Katangka Tidung. Meskipun kota kecil, Sungguminasa kurang nampak kegiatan dukungan terhadap proklamasi, tetapi di desa-desa Gowa penduduk bersemangat. Di limbung, pemuda Muhammadiyah kembali aktif, dengan pandu HW sebagai intinya. Hal yang sama juga nampak pada penduduk kampung Pallangga dan juga Barombong. Pada dasarnya, penduduk Gowa memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan, terutama pada awal perjuangan.

Kota Pare-pare merupakan kota tersibuk kedua setelah Makassar dalam masa awal proklamasi. Di kota itu telah lama dikembangkan ide kemerdekaan lewat pergerakan politik. Usia pergerakan telah berusia 17 tahun ketika proklamasi dikumandangkan di Jakarta. Tercatat PSII dominan di tempat itu, kemudian Muhammadiyah. PSII yang tersebar di Sulawesi Selatan pada dasarnya dikembangan dari Pare-pare. Misalnya, Haji Yahya membina Daeng Risaju dari Luwu pada tahun 1930 yang menyebabkan PSII berdiri di Luwu yang cukup berpengaruh. Pada akhir 1944, terjadi konsentrasi Heiho dan pemuda lainnya di Pare-pare seperti siswa sekolah pelayaran Kai in Yoseijo.[27]

Tokoh utama dan paling berpengaruh di Pare-pare dan sekitarnya adalah Andi Abdullah Bau Masspe. Ia menjabat Datu (Raja) Suppa, dan pada masa Jepang sebagai Bunken Kanrikan. orang kedua ialah Andi Makkasau, Datu Suppa yang diganti oleh Bau Masspe. Terhadap kedua tokoh itu ditambah lagi keuletan Yusuf Binol, sehingga dukungan akan kemerdekaan bangsa Indonesia bertambah kokoh di kota itu. Sebagai bekas aparat Jepang, Bau Masspe masih memiliki sejumlah fasilitas serta berkehidupan yang terbilang berkecukupan, kemurahan hati dan sifatnya yang membuat orang lain hormat kepadanya.

Meski berhubungan baik dengan Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Bau Masspe lebih progresif. Ia mengisyaratkan diadakannya perlawanan bersenjata. Karena itu, di Pare-pare dukungan terhadap proklamasi tidak hanya dengan cara diplomasi, tapi lebih diutamakan persiapan perlawanan bersenjata. Rakyat dan pemuda siap menunggu komando. Hanya yang menjadi hambatan ialah kekurangan senjata, sementara pimpinan Jepang di Pare-pare tidak mau merundingkan penyerahan senjata, sedangkan rakyat dan pemuda belum tahu cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh senjata.

Seperti halnya di Makassar, sebagian tokoh pemuda berpengaruh mengikuti langkah-langkah Dr. G.S.S.J. Ratulangi, yakni mengambil jalan damai. Pikiran orang tua yang menyayangi nyawa anak-anaknya bagai menghambat diadakannya perlawanan bersenjata terhadap musuh kemerdekaan. Padahal, pemuda saat itu tidak menyayangi jiwanya, tergambar dalam tekad Merdeka atau Mati.

Dari Pare-pare, berita dan dukungan proklamasi meluas ke Soppengriaja Barru, terus ke Tanete, sekitar 70 KM sebelah selatan Kota Pare-pare. Di Daerah Barru, cita-cita kemerdekaan telah cukup lama diperkenalkan kepada penduduk. Organisasi PSII dan Muhammadiyah secara sembunyi-sembunyi menarik perhatian masyarakat ketika Jepang masih berkuasa. Pada awal kemerdekaan, pihak PSII kembali meningkatkan kegiatannya. Para pimpinan organisasi pergerakan nasional itu menjadi juru penerang berita kemerdekaan. Hanya saja, mereka segera tertangkap ketika Barru diduduki NICA.

Para pemuda asal Barru yang berdiam di Makassar seperti, Andi Mattalatta dan teman seperjuangannya, tidak henti-hentinya memberikan kesadaran akan kemerdekaan kepada penduduk Barru, termasuk yang berusia muda. Pada tanggal 28 Agustus1945 di Lapangan Sumpang Minangae Barru, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Andi Mattalatta. Pengibaran bendera tersebut sebagai isyarat komando kepada penduduk Barru agar bangkit mempertahankan kemerdekaan.

Tanete biasanya disebut berkaitan dengan Barru, sehingga menjadi Tanete-Barru. Di daerah itu pada awal September 1945 berita kemerdekaan diterima penduduk, dan dengan cepat tokoh masyarakat menyatakan dukungannya, sebab berita kemerdekaan sudah lama dinanti-nantikan. Pemuka PSII yang mempunyai banyak pengaruh di Tanete cukup besar andilnya menyadarkan penduduk tentang kemerdekaan. Berita kemerdekaan tiba di Tanete dibawa oleh Abd. Rakhman Gazali bersama H. M. Jauharuddin. Abd. Rachman Gazali mendengar berita itu dari Ali Malaka di Kota Makassar. Sebagai seorang Kadhi di Tanete, maka berita yang disampaikannya dinilai sangat penting oleh masyarakat. Mesjid di Tanete menjadi pusat pemberitaan proklamasi kemerdekaan. Kadhi Abd. Gazali bersama H. M. Jauharuddin melaporkan berita penting kepada Kepala Pemerintahan Tanete, Andi Abd. Muis.[28]

Dukungan kuat yang diberikan Andi Abd. Muis dan pemuka agama di Tanete menyebabkan semua penduduk turut serta. Mereka bangkit menyatakan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 15 September 1945 di Kampung Peppae, Padaelo, di Kompleks Galangan Kapal milik Japri. Rapat umum diadakan, yang dihadiri sekitar 500 orang, serta lima tokoh masyarakat Ternate, yakni Haji Sulaiman, Muhamad Amin, Ambona Ilili, H. M. Jaharuddin, dan Abd. Gazali. Para pemuda pengawal dipimpin oleh Abd. Karing yang pada saat itu juga meresmikan berdirinya wadah Satuan Pemuda Tanete.

Di Sidenreng-Rappang, ide kemerdekaan dimotori oleh PSII, karena sejak tahun 1928 di Tetaji Tellu Limpoe Daerah Sidenreng didirikan PSII. Tidak lama setelah berdiri, pimpinan pusat PSII Haji Umar Said Cokroaminoto berkunjung ke Sidenreng, langsung ke Tetaji. Raja Sidenreng ketika itu, Andi Sulolipu, sempat berbincang-bincang dengan Cokroaminoto tentang perjuangan menuju kemerdekaan. Dukungan raja dan penerangan oleh para guru lembaga pendidikan Nasrul Hak di Amparita, seperti Usman Isa, membuat dukungan terhadap proklamasi dengan mudah diperoleh dari rakyat. Demikian pula adanya PNI Tajuddin Noer yang didirikan Andi Sulolipu di Parita, turut memperkokoh semangat kemerdekaan. Massa rakyat mempertahankan kemerdekaan, yang diketahui dari pemuda Pare-pare. Haluan lunak pada diri Dr.Ratulangi dan Tajudin Neor dianut pula oleh Andi Sulolipu.

Andi Abdullah Bau Massepe, sebagai Raja atau Datu Suppa, dengan segera menyatakan bahwa Sappu adalah wilayah RI. Orang yang tidak setuju dengan pernyataan Datu itu dilarang tinggal di Suppa. Pelaksanaan gerakan kemerdekaan di Suppa digerakan oleh Andi Selle, dibantu Andi Baso Daeng Ngerang dan Usman. Di daerah Sawitto atau Pinrang, para pendukung kemerdekaan dipelopori oleh Andi Saping. Sebagaimana halnya dengan Suppa, hubungan dengan Kota Pare-pare cukup intensif, sehingga setiap perubahan yang terjadi di Pare-pare dengan cepat tiba di Pinrang, karena hanya berjarak 30 KM sebelah utara Kota Pare-pare. Kaum pergerakan dari PSSI di Pinrang menjadi pendukung utama proklamasi kemerdekaan.

Berita proklamasi kemerdekaan di Deerah Enrekang didukung oleh unsur-unsur bekas *Heiho, Boei Teinsin Tai, Seinendan*, dan dari badan pandu, yaitu SIAP dan Hizbul Wathan. Hubungan dengan Kota Pare-pare dan Rappang yang cukup lancar mempercepat berita-berita

berbagai hal yang berhubungan dengan kemerdekaan dari kota pelabuhan itu ke Enrekang. Para pelopor yang dikenal di Enrekang adalah Rahman Kulau, Abubakar Lambogo, dan Umar Hafsah. pada November 1945 di Enrekang dilakukan penerangan dan usaha mengembangkan potensi para pemuda. Karena itu, ketika diadakan pembentukan wadah perjuangan melawan musuh kemerdekaan, penduduk Enrekang mendukung sepenuhnya.

Di Daerah Mandar yang berpusat di Balanipa, para pendukung kemerdekaan berasal dari badan organisasi pada masa Jepang, yakni API (Angkatan Pemuda Islam) pada awal kemerdekaan, pimpinan API mengubah nama organisasi menjadi KRIS MUDA (Kebaktian Rahasia Islam Muda). Nama yang baru itu mempunyai kaitan dengan tampilnya Ibu Depu yang oleh masyarakat Mandar menyebutnya Ibu Agung Meradia Towaine. Hj. Andi Depu menggerakan para pemuda, dan sejumlah bangsawan menyambut dan mendukung proklamasi kemerdekaan. Pada akhir kekuasaan Jepang, pada tahun 1944, Ibu Depu tampil memimpin pengibaran bendera merah putih di Campalagian, dihadiri oleh ribuan pemuda dan rakyat, karena itu setelah kemerdekaan diproklamirkan Rakyat Mandar segera bangkit dan mendukung.

Sementara di Majene, sekitar 10 km sebelah utara Balanipa, H.M. Syarif mempelopori dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan. Pada awal proklamasi itu Rakyat Mandar bangkit membela kemerdekaan dan kedaulatan RI. Penyebaran berita Proklamasi di Luwu diawali dengan adanya pamflet yang dijatuhkan Tentara Sekutu dari udara. Selanjutnya dibuat pula pamflet berisi kemerdekan pada subuh pagi tanggal 18 Agustus1945 yang dibuat para kelompok Sakata, di mana Andi Achmad ikut serta. Semula pampflet itu menimbulkan tanda tanya penduduk, akan tetapi, setelah menjadi bahan pidato di mesjid-mesjid dalam suasana bulan Ramadhan 1867 H, akhirnya penduduk menjadi yakin dan menyambut dengan gembira. Pada malamnya, tujuh Petaka Masyarakat yang republiken mengadakan rapat rahasia. Andi Achmad termasuk pula dalam kelompok itu, bersama kakaknya Andi Makkulawu, sebagian dari mereka merupakan juru pidato kawakan pada waktu itu, seperti Martin Guli, Yusuf Arief, dan Haji Kadir Daud. Andi Makkulawu, Andi Achmad, Andi Tenriajeng, dan Mungkasa, meskipun jarang berpidato, tetapi menjadi sumber berita adanya kemerdekaan RI. Dalam tempo dua hari saja, penduduk Kota Palopo

telah mengetahui adanya kemerdekaan dan menyambutnya dengan amat gembira.

Organisasi Sukarno Muda yang dibentuk ketujuh tokoh dibawah pimpinan Andi Makkulau melakukan jalinan gerakan semi rahasia. Pengatur strategi ialah M. Yusuf Arief, bekas guru yang telah menjadi wartawan *Pewarta Selebes*. Ia meniru gerakan pemuda Hitler di Jerman, dengan sistem informasi 1.7, artinya seorang anggota hanya boleh menghubungi 7 orang lainnya. Dan hasilnya memuaskan, karena dalam waktu yang amat singkat, seluruh Luwu telah berada dalam suasana kemerdekaan. Kaum pergerakan dan muhammadiyah, di tambah para bekas Heiho dan Seinendan, menjadi inti pendukung kemerdekaan. Kemudian, pemuda anak bangsawan republiken kelompok Datu Luwu Andi Jemma menambah dukungan proklamasi. Pada tanggal 19 Agustus 1945, berita demokrasi kemerdekaan diumumkan di lapangan. Ditambahkan, bahwa umat Islam yang menjadi Juru Pidato menambah bumbu dengan membakar emosi kegamaan, agar mereka rela berkorban apa saja, termasuk jiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. Wakil Datu Luwu dalam sambutan hari lebaran di Palopo menyampaikan pernyataan Pemerintah dan Rakyat Luwu, bahwa daerah ini menjadi wilayah RI. Karena itu, semua pegawai dan aparatnya juga pegawai dan aparat pemerintah RI. Kerajaan Luwu saat itu meliputi Luwu sekarang, Tanah Toraja dan Kabupaten Kolaka. Daerah Poso masih menjalin tali hubungan kuat dengan Luwu, berhubungan dengan latar belakang sejarah.[29]

Hubungan dengan Bone semakin erat, karena Puteri Andi Mappanyukki yang bernama Andi Tenripadang menjadi permaisuri Datu Luwu Andi Jemma. Perkawinan dilangsungkan pada awal Agustus1945. Dengan demikian informasi yang ada di Luwu cepat diketahui di Bone, demikian pula sebaliknya. Susunan pemangku pemerintah Kerajaan Luwu disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Para pejabat yang tidak medukung proklamsi/kurang sepaham diganti atau mengundurkan diri, sehingga Adat Luwu yang baru tersusun menjadi barisan pendukung Kemerdekaan RI. Sebelum Sekutu datang di Palopo pada Oktober 1945, dua kali dikirim utusan ke Watampone Bone untuk menyampaikan sikap dan pandang Datu Luwu kepada Raja Bone, yang pada akhirnya disepakati untuk memperkuat dukungan kemerdekaan dengan mengadakan Konperensi Raja-raja di Watampone pada Oktober 1945. Hasil konperensi ini memperkuat jalinan kerja sama dan arus

informasi di antara raja-raja di Sulawesi untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada masa revolusi fisik, Andi Djemma begitu besar perannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan istananya di Palopo sejak tanggal 24 Januari 1946, demi memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam rangka tegaknya Republik Indonesia, dan memilih hutan belantara dan benteng alam batu Putih sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia di Luwu.[30]

Di Wilayah Sulawesi Tengah, tempat yang pertama mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945 adalah Poso, karena pada 17 Agustus1945 sore Abdul Latief Mangitung dan I Latanco Talamoa serta Yusuf Manoarfa mendengarnya dari seorang Tentara Jepang. Abdul Latief Mangitung salah seorang tokoh dari Gerakan Merah Putih 1942 di Poso, selanjutnya mengambil inisiatif mengaktifkan kembali pasukan Gerakan Merah Putih 1942 dengan membentuk Laskar Tanjumbulu. Begitu mendengar berita proklamasi dari seorang tentara Jepang yang disertai 2 orang anggota Heiho, Abdul Latif mengundang kedua orang anggota Heiho tersebut untuk menghadiri pertemuan pada malamnya jam 19.00, di mana turut pula hadir tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih Poso tahun 1942. Hasil pertemuan itu adalah terbentuknya organisasi Laskar Tanjumbulu dengan Abdul Latief Mangitung sebagai Komandan.[31]

Sebagai Markas Induk Pasukan diputuskan Kampung Malei. Pada tanggal 18 Agustus1945 Saleh Topetau dan Jafar datang melapor pada komandan lasykar bahwa mereka telah berhasil menyembunyikan 5 pucuk senjata karabin Jepang dan beberapa granat tangan. Senjata itu ditanam di Kuburan Cina dan dijaga oleh Maleda seorang Suku Mandar.

Berita Proklamasi Kemerdekaan juga dikumandangkan oleh Kurir-kurir yang diutus Gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangi. Misalnya, sekitar bulan September 1945 dia telah mengirimkan utusan ke beberapa daerah termasuk ke Sulawesi Tengah untuk menyampaikan instruksi dan pedoman perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Melalui Palopo dikirim utusan ke Poso terdiri atas Landau, kemudian menyusul Sulaeman Umar. Dari Manado datang kurir Ali Lemato dan dari Gorontalo A. Tumu. Selanjutnya, berita proklamasi ke Daerah Sulawesi Tengah juga disampaikan oleh A.N. Hadjarati dan Hamzah Ilahude dari

Makassar yang membawa amanat dari Gubernur dan mereka berhasil mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh terkemuka di Poso. Amanat Gubernur Sulawesi dan penjelasan mengenai Proklamasi 17 Agustus1945 yang dikemukakan dihadapan para undangan berhasil membentuk Dewan Nasional dengan Kepala Pemerintahannya Wangkalembah Talasa dan undangan lainnya sebagai pembantu. Di samping itu, dibentuk juga Dewan Pertahanan Nasional, kesatuan pertahanan dengan intinya dari pemuda-pemuda bekas Heiho yang dipersenjatai tombak, keris dan senjata hasil rampasan dari Jepang.

Sebelum tentara NICA datang, telah tiba di Buol Mohammad Mahmud dan Ahmad Mahmud yang diutus oleh Nani Wartabone, pimpinan Pemerintahan Nasional Gorontalo yang membawa sehelai bendera Merah Putih untuk dikibarkan di Buol. Kedua orang tersebut datang di Leok pada pertengahan Oktober 1945 dan langsung menaikkan bendera Merah Putih di Leok yang sempat berkibar selama 3 minggu. Kemudian tentara NICA pimpinan Sersan Lumoa datang dan menurunkan bendera merah putih, dan menggantikannya dengan bendera merah putih biru.

Pada tanggal 20 Agustus1945 Abdul Latif Mangitung mulai keluar dari Poso untuk menghubungi bekas-bekas pejuang 1942 lainnya guna menggalakkan kembali Pasukan Gerakan Merah Putih 1942 sambil menyampaikan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945. Daerah-daerah yang dikunjunginya adalah: Pusat Markas Induk di Kampung Malei (dia menghubungi Mohammad Amin Dahlan), Pusat Gerakan Merah Putih 1942 Ampana-Tojo(R.G. Datupamusu dan M. Sunusi Patimbang), Wilayah Kecamatan Bunta (Haji Sunusi Mangaco, Baba Hamzah dan Lamusa), dan Wilayah Kecamatan Pagimana-Luwuk (A.R. Lanasir dan Laicu Lanasir).[32]

Ia meneruskan perjalanan ke Tojo-Ampana, Pagimana, Bunta dan Palu untuk menghubungi tokoh-tokoh pejuang di tempat tersebut agar membentuk pula barisan lasyar mempertahankan kemerdekaan apabila Sekutu datang, yang berarti Belanda akan kembali menjajah sebab Belanda berada dalam koalisi Sekutu.

Wilayah Donggala dan Palu diutus Abd. Gani dan kawan-kawan untuk membawa saran-saran tertulis dari Gubernur Sulawesi untuk dijadikan pedoman dalam gerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertemuan diadakan di bekas Kantor Kenkanrikan

Donggala, dipimpin oleh Muhammad Amu dan Umar Papeo, pada tanggal 7 November 1945. Dari pertemuan itu dibentuk organisasi kelaskaran bernama Laskar Pemuda Indonesia, suatu organisasi bersenjata yang bergerak di bawah tanah dan melancarkan aksi gerilya.

Masyarakat Donggala menanggapi berita proklamasi terbagi dua: ada yang pro dan ada yang kontra. Oleh rakyat yang pro dengan tokoh-tokoh pimpinannya, segera mengusahakan kontak dengan pejuang-pejuang di Wani, Tawaeli, Palu, Biromaru, Kaleke, Bambara (Keris Muda) untuk mengadakan kerja sama dan saling membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sementara Alwi Muhammad dan Muhammad Amu (Klerk pada kantor Kei Kanrikan Donggala) sibuk menyusun program perjuangan tiba-tiba datanglah Alexander Monoarfa September 1945 yang ketika itu sebagai kepala kantor Minsen Unkookai (kepala bagian pelayaran perahu) di Donggala, dari Ujung Pandang membawa petunjuk dan program/perjuangan.

Atas anjuran Alexander Monoarfa, maka pada tanggal 21 September 1945 Alwi Muhammad, Mohammad Amu dan kawan-kawan mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan di kampung Ganti (5 km dari Donggaia). Dalam pertemuan itulah dihasilkan suatu bentuk organisasi perjuangan yang dinamai Gerakan Merah Putih dengan Rohana Larnarauna (Raja Banawa) sebagai pelindung dan Alwi Muhammad (Penilik Sekolah Donggala) sebagai Ketua Umum.[33]

Kepada semua anggota Gerakan Merah Putih diberi lencana Merah Putih berukuran 2x 3cm sebagai tanda pengenal dan sebagai kode dipergunakan salam 2 jari selaku simbol merah putih. Menyusul pula penggabungan diri dalam Gerakan Merah Putih seluruh ex anggota *Seinendan Limboro* yang dipimpin oleh Abdul Wahid Maluku dan Labaci serta bekas *Seinendan Towale* di bawah pimpinan Mislaini Laujeng dan Abubakar.

Kesemua aktivitas Gerakan Merah Putih di Donggala ini baru pada taraf persiapan dalam bentuk organisasi politik karena mereka belum memiliki senjata. Tiba-tiba pada akhir bulan September 1945 Alexander Monoarfa ditangkap oleh kesatuan KNIL yang telah mengkonsolidasi diri dan mengambil alih tugas keamanan dari Jepang, kemudian dipenjarakan di tangsi militer Palu. Penangkapan Alexander Monoarfa merupakan suatu pukulan bagi Gerakan Merah Putih.

Dari Donggala Abd. Gani (Isa Piola) terus ke Palu dan bertempat di rumah Lolon Tamene Lamakarate di Biromaru diadakan pertemuan untuk membicarakan instruksi-istruksi Gubernur untuk dilaksanakan. Di wilayah Palu dan sekitarnya dibebankan kepada Lolon Tamene Lamakarate untuk melaksanakannya. Hasilnya, terbentuk laskar-laskar Merah Putih di wilayah kerajaan, yakni Sigi Dolo, Palu, dan Tawaeli dipimpin oleh Dr. Pawindu, Moh. Djarudin Abdullah, Thalib Lasinala dan Daeng Pawata Lahusaeni. Pimpinan Pemuda Laskar Merah Putih untuk Sigi dan Palu dipimpin oleh Lolon Tamene Lamakarate, Wilayah Dolo dipimpin oleh Daeng Mangera Gagaramusu dan Wilayah Tawaeli dipimpin oleh D. M. Lamakampali dan Dj. Jotolembah.[34]

Di Sidera, sekitar 15 km dari Palu, para pemimpin Laskar Merah Putih mengadakan pertemuan di rumah Djaruddin Abdullah untuk mengutus Lolon Tamene dan Daeng Mangera Gagaramusu ke Makassar melaporkan situasi perkembangan terakhir pada Gubernur Ratulangi dan harus pulang cepat membawa instruksi-instruksi baru. Saat pertemuan berlangsung, tiba-tiba rumah tempat petemuan dikepung tentara NICA dipimpin oleh Komandan Qune Indo. Dokumen-dokumen penting dirampas, rapat dibubarkan dan Lolon Tamene Lamakarate ditangkap kemudian dibawa ke Palu, tetapi keesokan harinya dibebaskan kembali atas tanggungan iparnya Tjatjo Idjazah yang waktu itu menjadi Raja di Palu.

Meskipun terjadi penangkapan atas anggota gerakan merah putih, tetapi tokoh-tokoh lainnya yang masih bebas, dan mereka kemudian membentuk organisasi kelaksaran bernama Lasykar Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) pada November 1945. Kemudian tiba pula utusan dari Sulawesi Selatan bernama Abdul Gani (nama samaran Piola Isa) dengan menumpang perahu membawa surat-suat dokumen untuk perjuangan di Donggala dan Palu. Awal tahun 1946 Umar Papeo ditangkap dan pertengahan tahun 1946 menyusul penangkapan atas diri A. T. Nurdin, dan ditahan pada Tangsi Besusu Palu selama sebulan. Menyusul penangkapan atas diri Piola Isa, Filips Ranti, dan Umar, akibat bocornya rahasia rencana penyerbuan pada tangsi di Kota Palu.

Pembakaran gudang Yayasan Kopra Fonds Donggala di Tanjung Batu oleh Ladising dan kawan-kawan yang mengakibatkan ribuan ton kopra habis terbakar. Pemuda Gerakan Merah Putih membentuk suatu perkumpulan seni drama yang bernama Sandiwara Pemuda Kita (SPK).

Pimpinannya adalah Abdullah Bachmid dan Muhammad Amin Pettalolo di Donggala yang menampilkan cerita-cerita yang bertemakan perjuangan. Oleh kaki tangan Belanda, SPK ditantang dengan mendirikan Persatuan Pemuda Donggala (PPD) yang menampilkan drama-drama dan menyanyikan lagu yang bernuansa Eropa (Belanda). Karena situasi makin panas, maka mulailah dibentuk sektor-sektor pertahanan di wilayah Donggala. Pihak NICA pun makin sering melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang, termasuk di antaranya Alwi Muhamad, pimpinan gerakan Merah Putih. Oleh karena itu, makin banyak pejuang ditahan, maka semakin pemuda laskar PIM merencanakan suatu penyerbuan atas Tangsi Militer Palu. Akan tetapi, rahasia penyerbuan itu dapat diketahui oleh Belanda dari kaki tangannya.[35]

8.4. Peralihan Kekuasaan dan Gerakan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi

Setelah tiba kembali di Makassar pada tanggal 20 Agustus 1945, Dr. G.S.S.J. Ratulangie segera mempersiapkan pemerintahan peralihan dari pemerintahan Jepang dan menyusun struktur aparat pemerintahannya.[36]

Selanjutnya di Kerajaan Bone setelah kedatangan Andi Pangeran Daeng Parani dari Jakarta tanggal 19 Agustus 1945, maka ia bersama ayahnya Raja Bone Andi Mappanyukki segera menata pemerintahannya dan menyatakan Kerajaan Bone bersama rakyatnya mendukung Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pendiriannya makin teguh setelah menerima utusan datu Luwu Andi Djemma yang menyampaikan bahwa Pemerintah dan rakyat Kerajaan Luwu menyambut baik kemerdekaan Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendukung proklamasi, maka pada tanggal 8 Oktober 1945 para tokoh pergerakan nasional di Makassar, seperti Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Mr. Zainal Abidin, Suwarno dan Malajong Daeng Liwang mendirikan sebuah Perguruan Nasional, yang bertujuan memupuk semangat kebangsaan dan menghasilkan kader bangsa bagi pemuda-pemuda yang ada di Makassar. Ide-ide nasional Republiken dipompakan kepada anak didik melalui pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Dari sekolah inilah

muncul pemuda militan seperti Wolter Mongisidi, Rivai Paerai dan sejumlah tokoh pejuang yang menentang kekuasaan NICA.[37]

Pertengahan bulan Oktober 1945, Raja-raja di Sulawesi Selatan mengadakan Konferensi di Watampone yang diprakarsai Andi Djemma (Datu Luwu) bersama Raja Bone Andi Mappanjukki, untuk mempersatukan pendirian para raja-raja di Sulawesi agar tetap di belakang Proklamasi RI. Melalui telpon, maka Andi Abdullah Bau Massepe dari Pare-pare menyatakan mendukung Konferensi, yang tidak dapat dihadiri karena kesibukan dalam perjuangan. Konferensi ini sebagai gerakan tandngan atas gerakan yang sama oleh NICA di Makassar yang mengundang Raja-raja Sulawesi Selatan untuk mengadakan Konferensi Kopromi yang disampaikan Komondan Brigadier General Iwan Dougherty di Makassar dan disaksikan komandan NICA Mayor Wegner.[38]

Kuatnya upaya Raja Bone menyatukan pandangan para raja di Sulawesi nampak dari adanya tiga kali pertemuan raja-raja terkemuka dari Sulawesi di Watampone yang terakhir dalam bulan November 1945. Pernyataan Raja Bone Andi Mappanyukki bahwa Bone berdiri sepenuhnya di belakang RI dalam keadaan bagaimanapun, menggugah pemuda pemuda membentuk kekuatan bersenjata dan selanjutnya para pemuda se-Sulawesi mengadakan Konferensi di Sengkang pada tanggal 12 Oktober 1945. Sebagai tindak lanjutnya, maka pada tanggal 19 Oktober 1945 di Watampone didirikan PTB (Pengawal Tana Bone), dan pada tanggal 20 Oktober 1945 dilakukan pengibaran bendera Merah Putih di kantor-kantor.

Di wilayah Kerjaan luwu, segera setelah memperoleh kepastian berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada pertengahan bulan September 1945, Andi Maradang mengubah Adat Luwu atau susunan pemangku pemerintahan Kerajaan Luwu disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Mereka yang kurang sepaham diganti atau mengundurkan diri.[39]

Adat Luwu yang telah tersusun itu dinilai sebagai Kabinet Revolusi Kemerdekaan RI, maka Datu Luwu pun merasa lega karena memperoleh pembantu yang dijamin kesetiaannya terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa hari kemudian setelah terjadinya penyerbuan pemuda dan rakyat Indonesia di Palopo untuk merebut senjata/kekuasaan dari tangan tentara Jepang, Sukarno Muda menjelma menjadi Pemuda Nasional Indonesia (PNI) di bawah pinpinan Andi Muhammad Kasim sejak tanggal 17 September 1945, dan

diubah lagi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada tanggal 5 Oktober 1945 di bawah pinpinan Andi Makkulau Opu Daeng Parebba.

Berdasarkan desakan Pimpinan PNI Luwu, maka pada tanggal 2 Oktober 1945, di lapangan sepak bola Palopo, Andi Baso Petor Besar Memproklamasikan Daerah Luwu secara resmi sebagai bagian dari Negara RI. Pegawai dan rakyat Luwu adalah Pegawai/Rakyat Republik Indonesia. Badan pemerintahan akan mengadakan pemogokan jika NICA datang. Luwu akan menentang NICA/KNIL dengan segala konsekuensinya yang telah diperhitungkan. Pernyataan resmi ini disampaikan kepada Gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangie dan Brigadier General Iwan Dougherty Komondan tentara Sekutu/Australia di Makassar.

Para pemuda juga mengadakan Konferensi di Sengkang pada tanggal 12 Oktober 1945, yang diprakarsai oleh M. Jusuf Arief, Andi Paggaru, dan Anwar. Konferensi ini dihadiri oleh utusan-utusan Pemuda Republik Indonesia dari seluruh Jazirah Sulawesi: mewakili Sulawesi Utara ialah R. M. Kusno Dhanupojo, Ahmad Dahlan, Muhammad Djazuli Kartawinata; dari Sulawesi Tengah ialah Raja Muda Wongkolemba Talasa dan Ince Moh. Dachlan. Tujuan Konferensi ini ialah mendesak raja-raja di Sulawesi agar tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan hasil Konferensi Raja-raja di Watonpone, dan untuk menggalang kesatuan gerakan/asksi melawan NICA dan KNIL yang mulai merajarela.

Dalam suatu kesempatan Gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangi membuat petisi yang ditandatangani oleh pemuka masyarakat Sulawesi. Dalam petisi itu dinyatakan bahwa seluruh Rakyat Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Oleh karena petisi itu, pada tanggal 5 April 1946, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, J. Latumahina, W.S.T Pondaag, I.P.L Tobing, dan Suwarno ditangkap dan ditahan di Penjara Hogepad di Makassar.

Menanggapi hal itu, maka H. Mansjur Daeng Tompo Ketua Persatuan Islam bersama Nurdin Sjahadat membuat sepucuk surat permohonan pembebasan tokoh-tokoh pejuang tersebut kepada pimpinan Sekutu di Makassar bernama Brigadier General Chilton. Namun, permohonan itu ditolak, sehingga pada tanggal 18 Juni 1945 para tokoh tersebut dibuang ke Serui (Irian Barat/Papua).

Kolaka diproklamirkan oleh Andi Kasim sebagai Kepala Pemerintahan setempat sekaligus sebagai wakil Kerajaan Luwu di Kolaka yang disebut Mincara Ngapa, menjadi bagian dari Wilayah Republik Indonesia, dan segera mengambil alih pemerintahan setelah Jepang menyerah. Proklamasi ini dicetuskan atas desakan Pemuda Kolaka yang tergabung dalam organisasi API (Angkatan Pemuda Indonesia). Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 September 1945, merupakan penjelmaan dari organisasi bawah tanah PETA (Pembela Tanah Air) yang dibentuk setelah berita proklamasi diterima. Sebagai organisasi bawah tanah, maka penerimaan anggota harus melalui pengucapan ikrar untuk mempertahankan kemerdekaan dan setia kepada RI. Pimpinan PETA ialah Andi Punna, Abu Baeda, dan Syamsuddin Opa.[40]

Setelah PETA menjelama menjadi API pada tanggal 10 September 1945, sifatnya yang bergerak di bawah tanah berubah menjadi terbuka dan berusaha menggalang persatuan dan potensi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 12 September 1945 para pimpinan dan anggota API mendatangi rumah-rumah penduduk Kolaka yang diragukan pendiriannya terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Atas tindakan para pemuda yang tergabung dalam API, maka Andi Kasim selaku Kepala Pemerintahan Kolaka mengadakan pertemuan dengan para Pimpinan API. Dalam pertemuan itu para Pimpinan API dapat meyakinkan Pemerintah Kolaka akan kesiapan pemuda dan rakyat untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya atas usul API, maka Kolaka diprolamirkan menjadi wilayah RI pada tanggal 17 September 1945 dalam suatu upacara bendera di depan rapat umum di mana Bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan lagu Indonesia Raya.

Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1945, API menjelma menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia). Namun demikian semua Kepala Pemerintahan setempat tampak ragu-ragu dan bersikap menunggu perkembangan dalam menerima berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kecuali Andi Kasim di Kolaka. Melihat potensi dan atas dorongan Para Pemuda Kolaka Andi Kasim dalam upacara bendera memproklamirkan Kolaka sebagai bagian dari RI. Upacara pengibaran bendera merah putih di Kolaka dilaksanakan pada tanggal

17 September 1954 diiringi lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Andi Kasim Petor (Kepala Pemerintahan) Kolaka, didampingi oleh anggota Swapraja, yaitu Sulewatang Indumo, Bokeo Puwatu, Guru Kapitan, Sapati Baso Umar Daeng Marakka, selanjutnya mengumumkan bahwa Kolaka dan sekitarnya adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pengibaran bendera Merah Putih oleh Kepala Pemerintahan di Kolaka (Andi Kasim) dihadiri dan disaksikan Pula oleh Kabasima Taico Komandan Tentara Jepang di Pomalaa.

Pengibaran Merah Putih di Lasusua pada tanggal 5 Oktober 4945 dihadiri oleh Kepala Distrik Patampanua dan beberapa pimpinan Pemuda Republik Indonesia dari Luwu. Di Wawotobi kota kedua terbesar di wilayah Kerajaan Laiwoi dan tempat kediaman Raja II Laiwoi bendera Merah Putih dikibarkan pada Akhir Oktober 1945 oleh para pemuda setempat atas dorongan utusan Pemuda Kolaka dan Pemuda Luwu yang saat itu berkunjung ke sana. Pengibaran bendera merah putih dilakukan pula di Bupinang pada akhir November 1945 atas dorongan Pemuda Kolaka/Luwu dihadiri oleh Kepala Distrik (Gunco) setempat.

Sebagai salah satu bentuk semangat juang rakyat Kolaka, maka pada tanggal 29 Agustus 1945 pemuda Kolaka terdiri atas 19 orang melakukan sumpah setia terhadap proklamasi kemerdekaan dengan keris terhunus dan dengan menggoreskan tanda tangan darah pada bendera merah putih bertempat di rumah Andi Kamaruddin (di tepi sungai Kampung Sakuli). Mereka membaca Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan masing-masing berikrar/berjanji: sekali merdeka tetap merdeka; merdeka atau mati; merah putih tidak diturunkan sebelum melangkahi mayatku; segalanya kukorbankan untuk kemerdekaan bangsaku; maju mati mundur mati, lebih baik maju mati; tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan; saya sedia gugur untuk bangsaku.

Dari Kolaka sinar perjuangan kemerdekaan memancar ke sekitamya sampai ke Kendari dan Bupinang yang masuk dalam kesultanan Buton. Utusan Pemuda Kolaka bersama Pemuda Luwu merangsang semangat terpendam dari Pemuda Wawotobi untuk membela kemerdekaan. Pemuda kota Kendari dan sekitamya cukup berusaha dan berambisi, tetapi gagal dalam mewujudkan suatu organisasi perjuangan sehingga kegiatannya terselubung, walaupun terbentuk semacam organisasi pemuda dengan pimpinan Makmun Dg.

Mattiro. Hal ini disebabkan karena Makmun Dg Mattiro sebagai seorang Pamongpraja terlalu berhati hati dan ragu-ragu menghadapi keadaan pada saat itu. Sesudah datangnya NICA, Makmun Dg. Mattiro bekerja pada Belanda. Masih di Wawotobi, setelah pengibaran bendera Merah Putih berhasil pula dibentuk Sinar Pemuda Konawe dengan pimpman Saido Johan Syah, M. Jamil Muchsin, Assadiq Mekoa, dan Hamzah. [41]

Nuhung Silondae, Mokole (Kepala Distrik) Andoolo (Kendari Selatan) bersatu dengan para pemuda yang tergabung dalam Pemuda Rakyat Kendari dan mendapat dukungan dari rakyat Andoolo dengan tegas menyatakan Andoolo sebagai wilayah RI. Pada waktu tentara Australia/NICA mendarat di Kendari dan diterima oleh Raja Laiwoi (Tekaka), maka Nuhung Silondae mengirim utusan ke Kolaka di bawah pimpinan M.Ali Silondae dan menyatakan bahwa Andoolo ikut Kolaka sebagai wilayah RI. Oleh Pemerintah RI di Kolaka pernyataan Andoolo itu diterima dengan baik. Setelah utusan tiba kembali, maka secara resmi diumumkan di depan umum bahwa Andoolo adalah bagian dari RI dan bergabung dengan Kolaka. Rapat umum itu diakhiri dengan penaikan bendera Merah Putih akhir Nopember 1945. Pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan di Andoolo adalah: (1) Nuhung Silondae, (2) Ali Silondae, (3) Abdullah Silondae, (4) Jacob Silondae, (5) Aburaera Silondae, (6) A. Parenrengi, (7) Saiman, dan (8) Saradia (V. Bolo).

Pada awal bulan Desember 1945 delegasi rakyat Distrik Buapinang (Bunken Buton) yang terletak di sebelah selatan wilayah Kolaka mengirim pula utusean ke Kolaka dan menyatakan Bupinangi sebagai wilayah RI. Pimpinan delegasi adalah: Mappeare Daeng Mananrang, Abd. Fattah, Daeng Makkita, dan Pabottinggi Daeng Maroa.[42]

Di Muna para pemuda yang dipimpin oleh M. Idrus Efendi tidak dapat meyakinkan Raja Muna La Ode Ipa untuk segera secara resmi menyatakan Muna sebagai bagian dari wilayah RI dan mengibarkan bendera merah putih. Maka, pengibaran merah putih di wilayah Kerajaan Muna dilaksanakan di Labalano diluar ibu kota yang dimpin oleh M. Idrus Efendi. Pelayar-pelayar Buton yang berasal dari Wakatobi yang baru pulang dari Jawa dan Sumatra membawa berita proklamasi dan berhasil mengibarkan bendera marah putih untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Desember 1945.

Tidak berapa lama setelah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan, pimpinan pemuda Wawo dan sekitamya (Kolaka Utara) M. Ali Kamry mengunjungi Kabasima Taico di Pomala untuk meminta senjata dengan diantar oleh Sigimitsu. Tapi Kabasima tidak dapat memberikan senjata, karena senjata di Pomalaa telah didaftar oleh Australia. Kabasima hanya menjanjikan 1000 pucuk yang akan diambil dari Kendari. Kemudian M. Ali Kamry datang menagih janji Kabasima, tetapi tidak dipenuhi karena senjata di Kendari telah dibuang ke Teluk Kendari. Kali ini M. Ali Kamry hanya mendapatkan beberapa samurai, sejumlah pistol, dan sejumlah granat tangan. PETA yang bergerak di bawah tanah setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada awal September 1945 berhasil mendapat 2 pucuk senjata dari Jepang. Sejak terbentuknya API, pemuda Kolaka di bawah pimpinan Tahrir dan M. Ali Kamry berhasil mendapatkan 49 pucuk karabin, yaitu senjata yang dibuang Jepang di pelabuhan Pomalaa. Penyelaman senjata ini tidak mendapat rintangan dari Jepang.

Turut sertanya beberapa orang Jepang dalam perjuangan menentang Belanda/NICA menggambarkan betapa jauhnya oknum tentara Jepang membantu mendirikan kekuasaan RI di Sulawesi Tenggara, walaupun kemungkinan di dalamnya terselip alasan pribadi masing masing. Di antara mereka malah ada yang berpangkat perwira (*Taico*=Kapten).

Pada tanggal 5 September 1945, Andi Punna selaku Kepala Penyelidik Barisan API, mengutus Salampessy untuk melaporkan bahwa nama barisan PETA diganti menjadi barisan API (Angkatan Pemuda Indonesia). Kapten Kabasima meneriama baik perubahan nama PETA menjadi API. Kapten Kabasima menyampaikan telah bertemu Tokoh Islam K. H. Mahading dan memberi senjata api sebanyak 51 pucuk. Pemberian senjata api dari Kapten Kabasima dilakukan secara rahasia melalui seorang Goco (sersan) dibuang (ditenggelamkan) ke dasar laut, dan pemuda Suku Bajo berusaha mengambil dengan menyelem yang diawasi pemuda API.

Pada tanggal 18 September 1945 Kapten Kabasima memberi bantuan Pemerintah RI dan barisan pejuang bersenjata berupa 1 Kapal Motor Boat untuk angkutan laut, 6 Mobil Truk untuk angkutan darat, dan beberapa perlengkapan kemiliteran.

Satu ekspedisi tentara Sekutu berangkat dari Kendari ke Kolaka pada tanggal 19 Nopember 1945 dengan maksud menjemput bekas tentara KNIL yang ditawan oleh Jepang dan dipekerjakan di Tambang Nikel Pomalaa. Pada pagi hari itu, pukul 07. 00 Andi Kasim Tuan Petor Kepala pemerintah RI Kolaka didampingi M. Yunus Ketua API, menunggu kedatangan tentara Belanda/Sekutu dari jurusan Kendari di tempat itu dipasang penghambat jalan mobil menuju ke Pomalaa.

Senjata Laras panjang digunakan 30 pucuk. Pengatur Rakyat Repulik bersenjata tajam, Indumo Daeng Makkalu Kepala Distrik Kolaka dibantu M. Nur Kepala Kampung Kolaka. Pada pukul 11. 00, kedengaran deru mobil dari arah Kendari. Tentara Belanda/Sekutu dengan 3 pengawalnya lengkap senjata api turun di tempat penghalang jalan. Komandan Tentara Belanda/Sekutu bertolak pinggang, berkata: "Kurang ajar siapa yang pasang kayu penghalang di sini?" Ada 4 orang tentara Jepang tanpa senjata dan topi baja, dua orang sopir mobil truk persiapan mengangkut bekas KNIL yang tinggal di Kampung Huko-Huko. Komandan Tentara Belanda/Sekutu memerintahkan keempat tentara Jepang mengangkat dan menyingkirkan kayu penghalang jalan. Sementara keempat Tentara Jepang hendak mengangkat kayu penghalang, tiba-tiba Andi Kasim yang didampingi M. Yunus muncul langsung berhadap-hadapan dengan tentara Belanda/Sekutu, akhirnya terjadi dialog antara Andi Kasim dengan Komandan Tentara Belanda/Sekutu.

(AK) Selamat siang Tuan, Saya Andi Kasim Petor Kepala Pemerintah RI Kolaka Daerah Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta.

(TB) Saya Letnan John van Boon Tentara Sekutu, atas perintah Komandan Tentara Sekutu di Makassar saya mau ke Pomalaa untuk memeriksa keadaan dan peninggalan tentara Jepang, dan mengambil bekas KNIL yang pernah di tawan tentara Jepang di Pomalaa.

(AK) Dimana surat perintah Komandan Tentara Sekutu?

(TB) Letnan John van Boom diam pura-pura meraba saku bajunya, tidak dapat memperlihatkan Surat Perintah Komandan Tentara Sekutu

(AK) Tuan melanggar memasuki Daerah RI tanpa izin Pemerintah RI Kolaka, Tuan tidak boleh melanjut melanjutkan perjalanan ke

Pomalaa, senjata tuan-tuan dititip di Markas Barisan PETA/API/PI Kolaka. Bila Tuan-tuan kembali dari Pomalaa senjatanya boleh diambil. "Keamanan Tuan-tuan selama berada dalam Daerah RI Kolaka tanggungan kami. Kalau Tuan-tuan tidak menghiraukan permintaan kami, keselamatan Tuan-tuan diluar pengetahuan kami[43].

Letnan John Van Boon dengan congkak tanpa kata-kata melanjutkan perjalanan ke Pomalaa melewati pos-pos barisan PETA/API/PI. Letnan John Van Boon dan pasukannya jelas adalah Tentara NICA, yang tidak mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menghina serta memandang enteng Pemerintah dan Pejuang bersenjata Pembela Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sore hari pada pukul 15. 30 tanggal 19 November 1945 rombongan kembali dari Pomalaa, pada saat akan melewati Pos penjagaan Sabilambo, maka para pemuda menghadang mereka. Tembakan pertama di mulai disusul tembakan beruntun dari pemuda pejuang. Tentara NICA membalas tembakan beruntun, seorang pemuda Republik kena tembakan.

Tentara Jepang lompat berlindung di selokan tidak melepaskan tembakan, kemudian berteriak "Indonesia". Tembak, di sini Nippon Tuan, Nippon Indoneia Banzai. Seluruh tembakan Pejuang bersenjata di arahkan pada mobil Tentara NICA. Pemuda pejuang serempak menembak sambil berteriak, kalau mau hidup menyerah Tentara NICA diserbu Barisan Tombak, Letnan John van Boon menghilang (lari meninggalkan pasukannya sambil bertempur). Satu orang Tentara NICA (berkebangsaan Indonesia) mati tertombak oleh pemuda Lantema dengan menggunakan Tombak Karada. Ada 2 orang Tentara NICA (Bangsa Indonesia) menyerah dengan senjatanya Yunggle Gun (Jenggel), dua orang Tentara Jepang luka ringan bagian paha, setelah mendapat pertolongan Palang Merah Indonesia mereka bergabung dengan pemuda pejuang. Pada pukul 17. 00 para pejuang bersenjata mengadakan apel konsolidasi dan pemekaran organisasi perjuangan di Markas Pemuda Pundoho. Selesai santap siang dan istirahat, Opu Topatampanangi anggota BPR (Badan Pertimbangan Revolusi) mengumumkan Terbentuknya PKR (Pembela Kedaulatan Rakyat).

Satu pelaton anggota penyelidik yang dipimpin Andi Punna memburu Letnan John van Boon dan memberitakan pos-pos penjagaan API sektor distrik Rate-rate. Pada tanggal 22 November 1945, barisan API yang ada di distrik Rate-rate (Abdul Hamid dkk), pos kampung Poli-Polia Ladongi, menyergap Letnan John van Boon bersama senjatanya. Letnan John van Boon menampakkan dirinya, ia menyangka sudah masuk Daerah Kendari. Letnan John van Boon kemudian dibawa ke Kolaka dan dimasukkan dalam Penjara Kolaka.

Di Sulawesi Tengah, pada tanggal 25 Agustus 1945 utusan Gubernur Sulawesi bernama Hajarati datang dari Makassar tiba di Poso untuk membentuk pemerintahan sipil di Poso di mana W. L. Talasa diangkat sebagai Kepala Pemerintah di Poso. Untuk menghubungi raja-raja di wilayah Donggala-Palu dikirim R.G. Datu Pamusu dan ke Luwuk dikirim Abdul Muis Lanasir untuk menemui Raja Banggai. Keduanya membawa dokumen dari Gubernur Sulawesi Dr. G.S.S.J. Ratulangie. Juga dibentuk PNI (Pemuda Nasional Indonesia) dipimpin Sidik Utina dan Jakob Lamadjuda. Mengenai perjuangan di Poso menurut Abdul Latief Mangitung adalah sebagai berikut: Pada waktu itu pemuda dipersenjatai dari hasil pencurian senjata Jepang karena sejak pasukan Jepang yang ada di poso mengetahui kekalahannya pada sekutu, maka mereka melepaskan dan menumpuk begitu saja senjatanya di gudang untuk diserahkan apabila tentara sekutu datang.

Secara terang-terangan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda, tapi apabila senjata itu dicuri maka Jepang membiarkan. Pada awal bulan Nopember 1945 datang di Poso utusan dari PRI (Pemuda Republik Indonesia) Palopo, M. Landau bersama 2 (dua) orang kawannya Umar Abdullah dan Nur Apala dengan tujuan membentuk cabang PRI di Poso.[44]

Terbentuklah Cabang PRI Poso yang dipimpin oleh Abdul Latief Mangitung, akan tetapi pada awal Nopember 1945, datanglah pasukan tentara Sekutu (Australia) dan membawa NICA yang disambut baik oleh Raja Tua Poso bernama W.L. Talasa. Karena raja tua tak mengizinkan pemuda-pemuda melakukan perlawanan di Poso, maka para pemuda PNI pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda menyerahkan senjatanya sebelum bertempur.

Utusan M. Landau dari PRI Palopo melihat setuasi ini, selanjutnya dengan cepat kembali ke Palopo untuk melaporkan setuasi di Poso melalui Tentena dengan dikawal satu regu kesatuaan Lasykar

Tanjumbulu dipimpin Martinus. Pada akhir Nopember 1945 utusan Organisasi pemuda Poso Y. K. Yanis dan Ahmad Dahlan menuju Sengkang untuk menghindari Konferensi Pemuda se-Sulawesi. Konferensi tersebut menghasilkan kebulatan tekad menolak kedatangan Belanda di Indonesia. Konferensi pemuda itu juga mengusulkan agar dapat memberikan bantuan persenjataan dari pihak manapun untuk mengusir penjajah NICA yang dibantu oleh Sekutu di Indonesia.

W. L. Talasa ikut pula menghadiri pertemuan Pemuda di Sengkang, kemudian meneruskan perjalanan ke Watampone. Karena Kota Poso sudah dikuasai oleh Belanda, maka markas perjuangan depindahkan ke luar Kota Poso yaitu Malei. Pada tanggal 31 Desember 1945 kesatuan Lasykar Tajungbulu ditingkatkan susunan personaliannya karena wilayah kegiatannya meliputi seluruh Sulawesi Tengah. Para pejuang tersebut menjadi pimpinan Lasykar Tanjumbulu Sulawesi Tengah dan bermarkas Induk di Kampung Malei, dan segala kegiatan dipertanggung jawabkan kepada masing-masing pimpinan di daerah yang telah ditentukan dan senantiasa kompak dengan pimpinan Komando Markas di Malei.

Sejak tanggal 12 Oktober 1945 pasuka Sekutu (Australia) ditempatkan di Kota Tomohon sekaligus menjadi markas NICA. Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan, juga tempat pusat-pusat pimpinan Agama Kristen dan Khatolik sejak puluhan tahun.[45] Di Manado, baik pemuda maupun militer sepakat bahwa aksi perebutan kekuasaan harus dimulai oleh kalangan tentara bersenjata, yaitu dari Teling Manado, tempat berpusat potensi militer Belanda. Seorang tokoh pejuang yang telah turut dalam barisan Tentara Sekutu yang memimpin Tangsi-Hitam di Teling adalah Letnan Lembong. Bulan Januari 1946 ia meninggalkan Kota Manado untuk seterusnya bergabung dengan tentara revolusi di Jawa.

Niat untuk menumbangkan kekuasaan militer Belanda di daerah ini diambil alih Ch.Ch. Taulu, seorang bekas KNIL yang mengepalai gudang-gudang supplai bahan makanan dan pakaian tentara di Teling. Berdekatan dengan gudang-gudang ini terdapat Arsenal, gudang senjata, yang ketika itu berada di bawah pimpinan Sersan S.D. Mais (Wuisan).

Melalui kampanye, maka dikalangan militer KNIL ditaburkan rasa kecewa terhadap pelayanan yang diskriminatif terhadap anak buah

bangsa Indonesia. Dari segi politik, dilancarkan desas-desus bahwa janji Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942 untuk memberikan persamaan hak dan pemerintahan sendiri kepada bangsa Indonesia, ternyata dikesampingkan oleh NICA. Jadi, satu-satunya jalan ke arah persamaan, keadilan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia termasuk tentara KNIL, adalah menggulingkan pemerintahan NICA.

Pembagian tugas yang ditetapkan oleh Ch. Ch. Taulu beserta kawan-kawannya adalah sebagai berikut:

1. Kompi VII dijadikan combattroop, dipimpin oleh Frans Bisman dan Mambi Runtukahu. Lain-lain pelopor adalah Jus Kotambunan, Mas Sitam, Lengkong Item, Gerson Andris dan Nico Anes. Mereka ini akan menguasai dan mengamankan perwira-perwira Belanda KNIL dan NICA.
2. Yang pertama-tama harus dikuasai adalah bahan makanan, senjata, mesiu, pakayan.
3. Kompi 148 dibawah pimpinan Wim Waney, dibantu oleh Wim Tamburian, Wangko Sumanti, Frans Lantu, Jan Sambuaga, Bert Sigarlaki, Samel Kumaunang, Osacar Rumambi setelah dapat menguasai tempat-tempat supply tersebut, harus menjalankan aksi-aksi penangkapan terhadap anggota tentara Belanda dan pejabat-pejabat NICA di rumah-rumah mereka.
4. Mais Wuisan menguasai kompi 143 dan akan mengawasi kamp tawanan Jepang di Girian-Bitung;
   Sigar Mende dan Polet Molanda menguasai kompi 144 di Manado dan Suparmin kompi 142 di Tomohon.
5. Pengamanan terhadap komunikasi ditugaskan kepada redio-telegrafist Rombot yang selanjutnya akan menguasai semua dinas radio. No Tooy mengawasi semua dinas telepon dan Maurits Rotinsulu dinas pengangkutan.
6. Kurir-kurir istimewa untuk menghubungi pemuda-pemuda di Manado, Tondano dan pedalaman Minahasa adalah No Korompis (Kompi VII), Gustaf Sumarauw (Kompi VII), Jan Sambuaga (Kompi 148) dan Wim Tamburian (Kompi 148).[46]

Pada tanggal 7 Februari 1946 seluruh rencana telah rampung sampai pada tindakan-tindakan darurat dan pengamanan bilamana terjadi sesuatu kemacetan. Rencana ini telah diberitahukan kepada B.W. Lapian dalam suatu rapat rahasia yang diadakan pada hari itu di Singkil.

Juga turut dalam perundingan ialah P.M. Tangkilisan, Ticoalu dan Dr. Tumbelaka. Pimpinan KNIL sudah dapat menduga bahwa suasana di kalangan tentara bangsa Indonesia bisa meletus menjadi suatu pemberontakan. Biang keladinya sedang dicurigai, sehingga rumah S.D. Wuisan diintai. Pada tanggal 9 Pebruari 1945 jam 17.00 petang suasana di Teling makin tegang dan akhirnya Ch. Ch. Taulu dan S.D. Wuisan ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Di samping itu diambil tindakan pengamanan terhadap Kompi VII dengan menarik semua peluru yang ada pada pasukan. Dengan demikian pimpinan KNIL sudah merasa agak lega dan tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu keonaran pada hari-hari berikut. Tetapi juga tindakan-tindakan Belanda ini telah diperhitungkan, maka sesuai rencana permulaan aksi dipercepat satu jam, jelasnya menjadi jam 01.00 tengah malam menjelang 14 Februari 1946.

Komandan Garnisun Manado Kapitein Blom yang berdiam di Sario dibangunkan oleh ajudannya dengan kata-kata: Kapten diminta datang ke Teling karena keadaan agak berbahaya. Letnan Ver Waayen mendesak supaya segera datang. Juga ditegaskan oleh ajudannya bahwa pengawal-pengawalnya sudah siap menunggu di luar dengan sebuah Jeep bahwa perjalanan aman dan penjagaan cukup kuat. Di sepanjang jalan dari Sario menuju ke Teling (melalui jalan yang dinamakan sekarang "jalan 14 Februari"). Kapten Blom dapat menyaksikan sendiri bahwa pos-pos melakukan kewajiban mereka dengan baik. Tiba di Markas Teling, penjaga pos memberi hormat, Piket datang menjmput dengan sikap-hormat, kemudian minta kepada Perwira Belanda supaya senjatanya diserahkan. Pengawal-pengawalnya mengawasi pelaksanaan permintaan piket itu. Barulah Kapten itu sadar bahwa ia sudah terjebak, tetapi mengikuti printah untuk masuk di tempat tahanan, di mana Letnan Ver Waayen, wakilnya sudah ada lebih dahulu setelah ia ditangkap oleh pengawalnya sendiri.

Sewaktu aksi penangkapan sedang berjalan, maka pada jam 04:00 bertempat di Markas Tentara Bukit Teling, Wangko Sumanti mengambil bendera belanda yang disimpan di Pos Penjagaan, merobek warna birunya dan bersama teman-temannya menaikkan bendera yang menjadi dwi-warna di tiang bendera Tangsi Teling, para pemuda lainnya juga mengikuti tindakan itu, sehingga di sana sini tampak merah putih berkibar[47]

Menjelang subuh Wim Kereh memimpin pasukan untuk membebaskan kaum nasionalis yang selama ini ditahanan di Penjara Manado. Para tawanan politik yang terlibat dalam rencana pemboikotan perayaan 10 Januari pagi itu dapat pulang ke rumah masing-masing, seperti John Rahasia, G.A. Maenkom, Kusno, Dhanu Pojo, G.E. Dauhan, O.H. Pantouw, A. Manoppo, Max Tumbel, dr. Sabu, F.W. Kumontoy, dan Mat Canon.

Di Tondano sejak tanggal 14 Februari 1945 malam, pos-pos pemuda telah mengadakan penjagaan di persimpangan jalan dan gedung-gedung penting. Ketika kode berhasil tembus di Tondano dengan letusan senjata beberapa kali, maka pejabat-pejabat pemerintah setempat yaitu H.M. Besar Bram Wenas dan komandan polisi, Inspekrur Brender A. Brandish dihubungi oleh pemimpin-pemimin pemuda, bahwa keamanan di Tondano akan dipegang oleh pemuda.

Kemudian dari Tomohon diterima berita bahwa di sana masih terdapat suatu kesulitan pokok. Komandan NICA Coomans D. Ruiter dan Troepen Commandant Overste de Vries berdiam di Kota ini. Kompi 142 masih tetap dikuasai oleh Belanda, sehingga penyelesaian kompi ini harus dilakukan dari Manado dan pucuk piminan NICA masih harus direbut. Frans Bisman ditugaskan oleh Taulu untuk menangkap kedua pembesar Belanda sesudah menguasai dan menertibkan kompi tersebut.[48]

Bermodalkan dua buah peleton tempur, Bisman berangkat menuju ke Tomohon, bendera merah-putih berkibar di mobil depan, suatu tanda untuk menyerbu. Tiba di kota ini Bisman menyiapkan steling untuk menyerang pertahanan KNIL. Tembakan pertama datang dari seorang Sersan Mayor Belanda yang mengenai tepat kepala sopir mobil depan. Ia gugur sebagai pahlawan 14 Februari 1945, tembakan ini dibalas oleh pasukan Bisman dan beberapa peluru bersarang dalam tubuh tentara Belanda. Waktu ia diangkut ke rumah sakit ternyata luka-luka itu tidak membahayakan nyawanya. Melihat keadaan demikian, maka komandan KNIL, melalui Kepala Polisi Tomohon, Inspektur Samsoeri, menyatakan menyerahkan diri bersama segenap Kompi 142 Corps NICA yang ada di Tomohon, maka Corps-NICA bersama seluruh stafnya dibawa ke Manado. Sebuah patroli tentara yang dipimpin oleh Freddy Lumanaw memasuki Kota Tondano dan mengadakan upacara

penaikan bendera merah putih di depan markas kepolisian, setelah dimabil tindakan-tidakan penertiban seperlunya.

Suatu pasukan di bawah pimpinan F. (wangko) Sumanti yang ditugaskan ke Girian mula-mula menemui kesulitan, karena komandan tawanan Jepang Letnan Van Emden tidak megakui penyerahan diri pimpinan KNIL, ia bertanggungjawab kepada pimpinan Sekutu. Tetapi dalam suatu percakapan bujukan, maka ia secara tiba-tiba disergap dari belakang, sehingga terpaksa menyerah dan mengalihkan tugas pengawasan kamp tersebut kepada tentara nasional Indonesia. Dengan demikian, Kompi 143 di Girian dapat ditertibkan, termasuk kamp tawanan yang menampung 8000 Serdadu Jepang. Hanya seorang pegawai perkebunan Belanda bernama van Loon dapat meloloskan diri dengan menggunakan sebuah perahu kecil ke Ternate.

Pada tanggal 15 Februari 1946 jam 8.00 pagi diadakan perundingan kilat antara pimpinan KNIL/NICA dan pimpinan Pejuang RI masing-masing dibawah pimpinan Letkol de Vries dan Ch.Ch. Taulu. Pertemuan dilangsungkan di Markas Teling Manado. Usaha de Vries untuk mempengaruhi Taulu dan kawan-kawannya supaya kekuasaan militer dikembalikan saja, dengan pelbagai janji, tidak berhasil. Overste Dr. Tumbelaka dan Kapten Keseger dapat memahami kesulitan-kesulitan dan beratnya konsekuensi yang akan dihadapi Taulu, jika ia bertahan dan mendukung ususl-usul de Vries. Tetapi tentara pemberontak tetap pada pendirian, bahwa kekuasaan sejak tanggal 14 Pebruari 1946 berada *de facto* di tangan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, suatu komando pemerintahan nasional ditetapkan untuk daerah Sulawesi Utara dan Tengah, yaitu wilayah Keresidenan Manado, di bawah pimpinan B.W. Lapian, yang menggantiakan NICA sebagai pimpinan pemerintahan sipil, dan Ch, Ch. Taulu, dibantu oleh S.D. Wuisan, F.H. Nelwan, dan Fr. Bisman sebagai pimpinan militer.[49]

Dengan pengambilan alihan pimpinan KNIL dan NICA secara sepihak ini, maka semua warga Belanda menjadi status tawanan dan mereka diasingkan dalam suatu kompleks perumahan di Sario Manado. Para keluarga dapat menggabungkan diri dengan mereka, sedang harta milik mereka tidak diganggu, kecuali kendaraan-kendaraan mereka yang semuanya dinyatakan dalam rekwirasi. Yang tidak memilih status tawanan adalah rohaniwan-rohaniwan Katolik, seperti Pastor, Frater,

Bruder, dan Suster yang tetap menjalankan tugas-tugas mereka dalam bidang paroki, sekolah dan perawatan.

Berkenan dengan peralihan kekuasaan ini, maka media yang maha penting, yaitu dinas penerangan yang sebelumnya dibina oleh NICA, berupa R.V.D., percetakan pemerintah dan siaran radio, dikuasai oleh pemerintah Nasional dan pimpinannya diserahkan kepada Wolter Saerang, dibantu oleh Jo Jocom, keduanya wartawan nasionalis.

Tujuan utama dari pada peristiwa perebutan kekuasaan ini ialah turut dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang sedang berkobar di seluruh tanah air dan berpusat di Yogyakarta. Kaum perintis nasional yang tidak banyak itu harus menyerahkan obor perjuangan kepada barisan pemuda yang akan dijuluki kemudian Angkatakn 45. Itulah sebabnya pembinaan jiwa pemuda yang bersifat menyeluruh di daerah ini harus dijalankan segera melalui media penerangan dan propaganda. Surat kabar dan selebara-selebaran menggunakan kesempatan untuk menanamkan dan menjelaskan tentang maksud perebutan kekuasaan ini. Bahwa darah dan rakyat disini adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Siaran-siaran kepada dunia luar, khususnya kepada pemerintah RI tentang *coup d'etat* di Manado sebagai pernyataan partisipasi dalam revolusi kemerdekaan di Jawa telah dilakuakan secara broadcasting oleh Dinas Telegraf Tentara. Berita telah diterima kemudian dari Markonis Kapal Patroli Australia S.S. Luna, bahwa radio-radio Sanfransisco dan Meulbourne telah mengetahui tentang peristiwa merah-putih di Sulawesi Utara itu dan telah menyiarkan ke seluruh dunia. Jelaslah bahwa berita ini telah menggemparkan pihak Sekutu, terutama pimpinannya di Makassar, yang dipegang oleh Brigjend Thornton. Soekarno melalui Radio Yogyakarta telah mengakui perjuangan rakyat di Sulawesi Utara dan merasa bangga atas saham dan bakti rakyat ini dalam memenangkan revolusi kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 16 Februari 1946 bertempat di Gedung Minahasa Raad Manado diadakan suatu rapat penting yang dihadiri oleh pimpinan militer, polisi dan sipil bersama pimpinan pemuda BPNI/PIN. Dalam rapat itu diumumkan keputusan bahwa KNIL dihapus dan selanjutnya menjadi Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara (TRISU). Pasukan ini akan berada di bawah komando Letkol Ch.Ch Taulu dengan stafnya Mayor S.D. Wuisan, Kapten H.V. Nelwan dan Kapten F. Bisman. Sedangkan Kaseger (yang tidak menyetujui perebutan kekuasaan KNIL ini) dimasukan juga dalam Staf Komando dengan diberi Pangkat Mayor.

Selanjutnya dalam rapat ini telah dibentuk Pemerintahan Sipil yang dipimpin oleh Residen B.W. Lapian. Sedang Staf Pemerintahan terdiri dari D.A. Th. Gerungan (Keperintahan), Alex I.A. Ratulangi (Keuangan), Dr. W.J Ratulangi (Perekonomian), dr.ch Singal (Kesehatan), S.D. Wuisan (Kepolisian), E. Katoppo (P.P. & K), Hidayat (Kehakiman), Wolter Saerang (Penerangan) dan Max Tumbel (Pelabuhan & Pelayaran). Terhadap pejabat-pejabat lama yang nasionalis pada masa NICA memimpin Dinas dan Jawatan, seperti R.C. Lasut, P.M. Tangkilisan, No Ticoalu, Fr. Walandouw, tetap dipertahankan. Di kalangan kepolisian diadakan reorganisasi di bawah pimpinan inspektur-inspektur Polisi Sorongan, Warikki dan lain-lain, dengan menempatkan anggota-anggota polisi yang nasionalis pada pos-pos penting di Sulawesi Utara.

Akhirnya dalam rapat ini dapat disetujui bahwa kekuasaan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, di samping polisi dan pamongpraja, diberikan kepada Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) yang berpusat di Tondano (Patang, 1975). Surat keputusan ini dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh komandan TRISU, Letkol Ch.Ch Taulu tertanggal 16 Februari 1946. Kepada PPI komandan TRISU menjanjikan pemberian senjata, setelah pemuda-pemuda mendapat latihan militer secukupnya dari pada instrukturnya. Markas besar PPI yang ditetapkan di Tondano disusun pula dalam bentuk komando dan pimpinan oleh seorang Hulubalang-besar, yakni E.D. Johannes, Penasehat BPNI/PIM. Kepala stafnya ialah Wim Pangalila.

Kotapraja Manado dalam kedudukannya sebagai gernisun diberikan juga status markas-besar dengan suatu wewenang yang otonom-taktis. Hulubalang ialah John Rahasia dan Wakilnya Mat Canon. Selanjutnya di tiap-tiap sektor di daerah Minahasa dibentuk Komando P.P.I yang lengkap dibawah pimpinan hulubalang, wakil Hulubalang dan kepala staf, dan seterusnya. Markas besar PPI di Tondano dibagi menurut asistensi atau urusan yang masing-masing.

Pimpinan pemeritahan sipil membahas isu-isu politik, mengurus administrasi dan organisasi pemerintah serta mengeluarkan keputusan-keputusan yang bertalian dengan itu. Dalam bidang keuangan, ekonomi dan sosial diusahakan supaya pembayaran gaji dan pensiun berjalan lancar, sekalipun NICA tidak meningggalkan persediaan uang yang cukup dalam kas Negara. Hal ini terlihat dalam serah-terima keuangan dari pemegangkas NICA Letn. Murk C. De Jong kepada A.I.A. Ratulangi, yang hanya berkisar 6 juta gulden. Ini berarti, bahwa kekuatan

keuangan hanya mampu sampai tiga bulan, jika diingat bahwa pensiunan KNIL sudah berjumlah 20.000 orang.

Demikian pula mengenai perbekalan, khususnya beras yang bagi pasukan-pasukan tentara hanya cukup untuk beberapa minggu saja. Masalah ini penting dan menentukan, sehingga pemimpin pemerintahan harus mencari jalan keluar, perlunya bentuan dari daerah-daerah lain. Namun demikian PPI melihat perampasan kekuasaan dari NICA itu dari segi lain, yaitu segi perjuangan dan revolusi kemerdekaan, yang terang membawa konsekwensi semacam ini.

Program PPI ialah supaya kepada 15.000 anggotanya diberikan latihan militer/tempur dan dipersenjatai. Persediaan cukup banyak dari persenjataan yang diserahkan oleh tentara Jepang kepada Sekutu. Tuntutan PPI ini mutlak, karena NICA dan Sekutu tidak akan membiarkan tanggungjawab dan tugas pengawasan mereka atas Sulawesi Utara ini dicopot begitu saja oleh anggota KNIL yang memberontak, oleh karena itu sedang menyiapkan diri untuk merebut kembali kekuasaan ini.

Latihan-latihan militer diberikan oleh para Instruktur dari Teling kepada PPI di Manado dan Tondano dengan mulai menggunakan senjata, sedang pemuda-pemuda PPI di tempat-tempat lainnya dilatih dengan kayu dan bambu oleh pelatih-pelatih setempat. Pada umumnya pemuda-pemuda sudah tahu memakai senjata karena sebagian mereka adalah bekas Tentara *Heiho*, *Tokubets-Tai* dan sebagainya. Pemuda-pemuda pelajar dari SMRK Kebangsaan di Tondano, dimobilisir menjadi pasukan pertahanan, sehingga mata pelajaran diganti dengan latihan baris-berbaris, memanggul senjata, dan lain-lain.

Seminggu sesudah perebutan kekuasaan dari NICA di Manado, maka pemerintah nasional di bawah pimpinan Residen Lapian mengumumkan secara resmi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Tengah, bekas wilayah Keresidenan Manado, berada di bawah kekuasaan pemerintah RI. Peristiwa ini dirayakan dalam suatu upacara resmi pada tanggal 22 Februari 1946 di Lapangan Tikala.[50] Pada 16 Februari 1946 berlangsung sidang darurat Dewan Minahasa di Manado menetapkan sesuai rencana semula Kepala Distrik Manado, BW Lapian sebagai Kepala Pemerintah Merah-Putih Merdeka. Selanjutnya barisan pemuda PPI dipercayakan memelihara keamanan di seluruh wilayah di bawah

hulubalang besar ED. Johannes dan para hulubalang dengan kota serta kecamatan, yakni untuk kota besar Manado John Rahasia.

Dalam tindakan Heroik di Sulawesi Utara tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasuka Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A Maengkom, Kusno Dhanupojo, G.E. Duhan, juga menahan Komandan Garnisun Menado dan semua pasukan Belanda di Teling dan Penjara Manado. Diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tordano. Berita dan perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat di Yogyakarta dan mengeluarkan maklumat no 1 yang ditandatangi oleh Ch.Ch.Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 sebagai rasiden dipilih B.W. Lapian.

Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Para pemuda tergabung dalam pasukan KNIL Kompeni VII bersama lasykar rakyat dari barisan pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan. Pada tanggal 16 Februari 1946 mereka mengeluarkan surat selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waisan. Bendera Merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama satu bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Pada malam hari tanggal 22 Pebruari 1946 bertempat di halaman rumah bekas Hukum-Besar Supit diadakan resepsi dan Pesta Rakyat untuk para pembesar yang baru tiba di Tondano dari Manado.

Di Gorontalo, setelah Jepang menyerah, mereka masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin Rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942, karena pada tanggal 23 Januari 1942, Rakyat Gorontalo telah mengumumkan Kemerdekaan dan mengibarkan bendera Merah Putih. Anehnya, setelah penyerahan kekuasaan dari Jepang, Nani Wartabone dan Rakyat Gorontalo belum mengetahui telah

terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Mereka baru mengetahuinya pada tanggal 28 Agustus 1945.

Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang, maka Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti dan Suwawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dikelilingi beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh Kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka.

Setelah menerima berita proklamasi dari Jakarta, maka pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua parpol. G. Maengkom dan Muhammad Ali adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut. Dalam upaya mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia, maka para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 Sepember 1945. Pada tanggal 30 November 1945 Nani Wartabone pun ditangkap ketika melakukan perundingan dan dipenjarakan di Jakarta.

Dalam perjuangan rakyat Sulawesi (terutama di Kolaka) nampak keikutsertaan kaum perempuan cukup meyakinkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sehingga, perjuangan rakyat dalam mempertahakan RI merupakan perjuangan seluruh rakyat dengan tidak membedakan jenis kelamin, kepercayaan, suku, dan asal-usul. Dalam wadah PRI misalnya, nampak persatuan antara golongan Islam dan Kristen dalam perjuangannya membela kemerdekaan. Begitupun suku Mekongga, Bugis, Manado, Ambon, Timor, dan lain lain bahu membahu dalam perjuangan. Kader-kader PSII, Muhammadiyah/Hisbul Wathan, PNI, bekas KNIL, bekas Heiho/Seinendan/Romusya bersatu dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

D. Konflik Tokoh Daerah

Sebelum Dr. G.S.S.J. Ratulangie datang ke Makassar, Nadjamuddin Daeng Malewa sudah menjadi tokoh pergerakan nasional

terkemuka di Sulawesi Selatan yang mengakar kuat di masyarakat. Bahkan, beberapa hal tokoh ini tidak tertandingi oleh tokoh pergerakan lokal pada zamannya. Sejak kedatangan Dr. G.S.S.J. Ratulangie di Makassar, tampak ada suatu persaingan yang kemudian akan menjadi kendala besar bagi jalannya sejarah kemerdekaan di Makassar.[51]

Nadjamuddin Daeng Malewa beserta pemimpin lokal lain merasa tersingkirkan, apalagi Dr. G.S.S.J. Ratulangie semakin menonjol, baik di kalangan tokoh pergerakan lokal maupun di kalangan Bangsawan yang banyak berpengaruh pada kelanjutan karier politiknya di Sulawesi Selatan. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, Dr. G.S.S.J. Ratulangie berusaha menggalang semua unsur kekuatan di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah awal, Dr. G.S.S.J. Ratulangi mendekati pihak bangsawan yang sangat berpengaruh di daerah ini. Pada awal pendudukan Jepang dia memprakarsai berdirinya SUDARA (Sumber Darah Rakyat) atas bantuan pemerintah pendudukan Jepang dan menempatkan Andi Mappanyukki sebagai Ketua dalam oraganisasi ini. Ratulangi sendiri bertindak sebagai wakil ketua sekaligus menjadi organisator yang efektif dalam SUDARA. Tokoh-tokoh lainnya antara lain adalah Lanto Daeng Pasewang sebagai kepala bagian umum, Mr. Tadjuddin Noor sebagai kepala bagian ekonomi, Sijaranamual dan Saelan ditunjuk sebagai biro pemuda. Hubungan Ratulangi dengan Raja Bone Andi Mappanyukki dalam SUDARA amat penting untuk memudahkan kerjasama antara kaum nasionalis Makassar yang kosmopolitan dan kaum bangsawan tradisional di kerajaan-kerajaan setempat untuk mendukung Republik dan untuk menentang kembalinya Belanda.[52]

Dalam perjalanannya, organisasi yang dimaksudkan oleh Jepang sebagai propaganda anti-Barat (Belanda) ini, ternyata diarahkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Sulawesi Selatan ke penumbuhan nasionalisme di kalangan rakyat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Terdapat tiga tokoh pergerakan lokal persatuan progressif SUDARA yang sangat aktif menanamkan propaganda dan menggalang perjuangan rakyat, baik di pelosok daerah maupun di Kota Makassar sendiri, yakni: Dr. G.S.S.J. Ratulangie, Mr. Tadjuddin Noor dan Nadjamuddin Daeng Malewa.[53]

Organisasi tersebut meluas ke seluruh daerah dalam bentuk komite perjuangan. Nadjamuddin Daeng Malewa seorang nasionalis yang mempunyai pengaruh luas sempat bekerjasama dengan Ratulangie dan termasuk pengurus di dalamnya. Namun kerjasama itu tidaklah

begitu baik. Ratulangie dan Tadjuddin Noor berada dalam persaingan, sedang kesetiaan Nadjamuddin diragukan. Terdapat kemungkinan, Nadjamuddin yang merasa dirinya mempunyai kemampuan dan banyak berjasa terhadap Pergerakan Nasional di Sulawesi Selatan, ternyata ditempatkan pada posisi tak berarti dalam SUDARA yang baru dibentuk oleh Ratulangi tersebut.[54]

Nadjamuddin Daeng Malewa dan Mr. Tadjuddin Noor semakin merasa disingkirkan oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangie setelah munculnya undangan dari pihak penguasa Angkatan Laut Jepang untuk menghadiri rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Dari nama-nama yang diberangkatkan, kedua tokoh itu tidak ada. Mereka yang diberangkatkan ke Jakarta adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi, disertai oleh Andi Pangerang Petta Rani (Anak Arumpone Andi Mappanyukki), Sultan Daeng Raja dan Mr. Zainal Abidin.[55]

Tidak diikutsertakannya Nadjamuddin Daeng Malewa dalam delegasi Ratulangie semakin menimbulkan kekecewaan yang sangat mempengaruhi sikap politiknya dikemudian hari. Nadjamuddin Daeng Malewa adalah putera Sulawesi Selatan sekaligus Walikota Makassar yang pernah menjadi anggota Partai Politik Parindra dan sangat besar pengaruhnya di dalam serikat-serikat buruh angkutan perahu. Dilihat dari sudut ini, Nadjamuddin Daeng Malewa adalah seorang tokoh politik yang terkemuka di daerah Sulawesi Selatan. Pengangkatan Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi mengundang berbagai pertanyaan, bukan saja Nadjamuddin, melainkan juga di kalangan raja-raja dan bangsawan Sulawesi Selatan. Namun, berkat dukungan aktif Andi Mappanyukki, maka sebagian besar bangsawan Sulawesi Selatan kemudian turut mendukungnya melalui Deklarasi Djongaya 15 Oktober 1945.[56]

Persaingan itu semakin jelas terlihat dari pembentukan organisasi oleh ketiga tokoh pergerakan masing-masing. Dr. G.S.S.J. Ratulangie yang lebih awal mendirikan Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKR) tidak memberikan kedudukan stategis bagi Mr. Tadjuddin Noor yang sejak awal setia mendampinginya. Sementara Nadjamuddin Daeng Malewa sama sekali tidak masuk dalam kepengurusan itu. PKR ini kemudian dianggap sebagai badan resmi dari pemerintah Gubernur Sulawesi. Dalam waktu yang bersamaan dibentuklah Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Mr. Tadjuddin Noor

sekaligus menjadi ketua partai itu, sedangkan Nadjamuddin sendiri tetap berada di Partai Sarekat Selebes dan mempertahankan cirinya sebagai organisasi nasional yang memperjuangkan kepentingan lokal.

Perjalanan keliling Ratulangi ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan, para raja-raja mendukung Proklamasi RI, tetapi belakangan hanya sedikit yang menolak menandatangani perjanjian kerja sama dengan NICA, di antara yang menolak adalah Raja Bone Andi Mappanyukki dan Datu Tempe Andi Ninong.[57]

Konflik antara elit bangsawan dengan elit terdidik yang diwakili oleh kaum pergerakan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Nadjamuddin Daeng Malewa yang kecewa terhadap sikap Dr. G.S.S.J. Ratulangie menyatakan diri bekerjasama dengan Belanda, dan pada tanggal 11 Nopember 1945 Belanda memberikan kedudukan *Handels Consulent*, suatu jabatan tinggi untuk orang Indonesia pada masa itu. Konflik tersebut akhirnya banyak berpengaruh terhadap kelanjutan revolusi di Sulawesi Selatan, atau sepanjang berdirinya Negara Indonesia Timur hingga menyatakan diri bergabung dengan RI dalan negara kesatuan.[58]

Di wilayah Kerajaan Bone, setelah NICA memasuki daerah ini, Raja Bone Andi Mappanyukki melepaskan jabatannya karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda, maka dia digantikan oleh Andi Pabbenteng. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Andi Ninnong Datu Tempe yang rela meninggalkan kedudukan sebagai Ranreng Towa karena tidak rela bekerjasama dengan Belanda, sekalipun Matowa Wajo akhirnya bekerja sama dengan NICA. Namun, para pemuda Wajo yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI) tetap berjuang di bawah pimpinan Andi Magga Amirullah Sulewatangpugi dan Andi Muh. Noor.

Di Wilayah Bulukumba Andi Sultan Daeng Raja menggalang para bangsawan dan rakyat untuk mengusir tentara NICA di awal Desember 1945 hingga tertangkap dan dibuang ke Manado selama lima tahun. Penangkapan Andi Sultan Daeng Raja terjadi karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri yaitu Andi Abdul Gani yang kemudian diangkat sebagai pejabat Karaeng Gantarang secara sepihak oleh NICA.

Berkonspirasi dengan NICA, pimpinan Raymond Westerling menghalau dan menindas gerakan pro-republik, dalam pembunuhan massal di Bantaeng dan beberapa wilayah Sulawesi yang terkenal sebagai peristiwa pembantaian korban 40.000 jiwa 1946–1947.

Di Wilayah Sulawesi Tenggara, pada tnggal 13 September 1945, mata-mata Tentara NICA melancarkan isu pemecah belah dalam perjuangan, antara lain Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanya untuk di Pulau Jawa (tidak masuk di luar Pulau Jawa). Barisan PETA/API bergerak pada malam Jumat pukul 01.00 menyadarkan atau menahan orang-orang yang dicurigai anti-Repubik Indonesia. Pada 14 September 1945, barisan PETA/API membentuk Barisan PI (Polisi Istimewa) dipimpin Abdul Kadir dibantu Usman Efendi (Keduanya Bekas Anggota Kempe Tai atau Polisi Meliter Angkatan Darat Tentara Jepang).[59]

Kedatangan pasukan Sekutu (Australia) dan membawa NICA pada awal Nopember 1945, yang disambut baik oleh Raja Tua Poso bernama W.L. Talasa, sehingga Raja Tua tidak mengizinkan pemuda-pemuda melakukan perlawanan di Poso, maka para pemuda PNI pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda menyerahkan senjatanya sebelum bertempur.[60]

Di Donggala sebelum tentara NICA mendarat terbentuklah PIM (Pemuda Indonesia Merdeka). Pemimpin PIM antara lain M.A. Pettalolo, Ladising, Usman Monoarfa, dan M. Amu. Tokoh utamanya adalah Alwi Mohammad. Akan tetapi, dengan tidak disangka di saat mereka sedang menyusun kekuatan untuk mengadakan pertahanan sebelum NICA mendarat, tiba-tiba muncul beberapa tokoh yang belum menginginkan kemerdekaan dan bekerja sama dengan bekas KNIL.

Pemuda PIM dan pemuda pro-republik Indonesia ditangkap serta rumah penduduk yang dicurigai digeledah untuk mencari dokumen. Tindakan liar ini dilakukan pemuda bekas KNIL yang tidak menginginkan kemerdekaan. PIM yang bekerja sama dengan Pemuda dari Mandar dipimpinan Andi Gani dan Jusuf, menyerbu Asrama Polisi di Donggala, menurunkan bendera Belanda dan menggantikannya dengan Merah Putih. Sementara dari Poso instruksi Gubernur Dr.

G.S.S.J. Ratulangie berupa: (1) Teks Prokiamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (2) Surat anjuran mempertahankan kemerdekan bangsa dan tanah air yang telah diproklamirkan, dan (3) Surat keputusan Kompereni raja-raja se Sulawesi Selatan yang menyatakan tidak ingin dijajah lagi.

Berita tersebut juga disebarluaskan ke Luwuk Banggai dengan mengutus Abdul Muis, M. Nasir pada awal November 1945. Waktu itu Raja Banggai S.A. Amir baru saja menerima kekuasaan pemerintanan NICA yang dipercayakan kepadanya. Ketika diperlihatkan ketiga surat dari Gubernur Sulawesi kepadanya, raja SA. Amir, merasa bingung dan bimbang. Permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan pemuda Gerakan Merah putih yang pernah berjuang bersamanya di tahun 1942, dihindarinya dengan meninggalkan Luwuk menuju Kampung Kintom dan mengajukan adiknya Sulaeman Amir sebagai wakil.

Pertemuan di rumah Sulaeman Amir pada tanggal 5 November 1945. Pembicaraan focus pada sikap peimerintah kerajaan terhadap isi surat tersebut. Akan tetapi, tanggapan pihak pemerintah kerajaan mengecewakan dengan mengemukakan alasan-alasan: (1) Raja Banggai diangkat dan diambil sumpahnya secara tradisionil oleh 4 orang kepala kampung atau disebut Basalo Sangkap, sedangkan mereka belum pernah dihubungi, (2) Telah beberapa kali terjadi perubahan pemerintahan, sehingga menyulitkan administrasi kerajaan Banggai, dan yang memikul tanggungjawab adalah Swapraja.

Mendengar itu maka, A.R. Lanasir kemudian menjawab: bahwa kalau memang begitu seharusnya prosedur yang ditempuh, mengapa menerima NICA tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Basalo Sangkap? Karena sikap pemerintah kerajaan demikian, maka Lamuis Lanasir, A.R. Lanasir dan TS. Bullah meninggalkan pertemuan dan menuju ke Pagimana dan Bunta seterusnya Lamuis Lanasir kembali ke Poso.[61]

Sejak 11 Januari 1946 seluruh wilayah Keresidenan Manado telah diduduki NICA. Administrasi dan personalia dikembalikan pada status yang lama sebelum perang dunia II. Rehabilitasi dan prioritas diberikan kepada pegawai-pegawai yang setia kepada Belanda. Rakyat

yang sebagian besar telah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diploklamirkan 17 Agustus 1945 di Jakarta, spontan mendukung RI dengan bimbingan dari tokoh-tokoh pergerakan setempat.

Setelah berlalu peristiwa 10 Januari 1946, maka NICA mengambil sikap lunak dan simpatik terhadap usul Comite van Initiatief (Badan Penyalur Kehendak Rakyat) supaya jiwa pemuda Indonesia dipahami, maka daerah Minahasa dan Manado dibentuk suatu oraganisasi penggabungan kaum muda, yang terdiri dari pelbagai golongan: Pemuda Kristen, Pemuda Katolik, Pemuda Islam dan Pemuda Nasionalis, masing-masing dalam tingkatan-tingkatan ranting, cabang dan pusat. Untuk menyukseskan konsepsi ini, maka dengan sendirinya pemuda-pemuda BPNI yang ditahan harus dilepaskan untuk disalurkan melalui organisasi yang dikehendaki NICA.

Dalam rapat pembentukan PIM ini telah dibacakan surat pesanan dari Dr. G.S.S.J. Ratulangi, yang menyerukan agar pemimpin-pemimpin rakyat menjauhkan dari pikiran dan tindakan provinsialistis. Beliau menyebutkan diri "Orang Indonesia dan Bukan Orang Minahasa". Dalam Kongres pemuda di Kinilow, delegasi pemuda menyiapkan rencana untuk mengadakan massa aksi untuk mengacaukan jalannya rapat. Namun maksud utama pembentukan PIM ialah memelihara kesiapan pemuda dalam rangka menggulingkan kekuasaan NICA itu di daerah ini.

Kongres pemuda di Kinilow pada tanggal 9 Februari 1946 berlangsung dalam suasana tegang. Ds Wim Rumambi ditetapkan untuk memimpin kongres, NICA amati jalannya rapat, gedung pertemuan penuh sesak dengan utusan tiap cabang, massa BPNI/PIM bercampuur dengan pelbagai utusan. Pada saat struktur organisasi dibacakan, suasana berubah mendadak dan lahirlah dua pihak yang bertentangan.

Chris Pontoh berbicara atas nama BPNI/PIM, menolak bentukan organisasi yang dipimpin oleh suatu badan yang bersifat penggabungan. Pada saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama, separuh hadirin mendengungkan "Indonees-Indonees mulia-mulia" sedang yang lainnya meneriakkan: Indonesia Raya, merdeka-merdeka". Kongres terpaksa

ditutup tanpa mencapai hasil yang diharapkan NICA. Bagi BPNI/PIM dua hasil yang diperoleh melalui Kongres Kinilow, yaitu:

1. Meyakinkan organisasi pemuda bahwa perjuangan kemerdekaan tidak mungkin berhasil melalui kompromi dengan Belanda dan perjuangan harus bersifat radikal.
2. Turut sertanya PIM dalam Kongres telah memperdaya NICA, bahwa pemuda secara diam-diam mempersiapkan suatu kudeta kedua yang akan diwujudkan oleh kekuatan bersenjata dengan ancer-ancer waktu tanggal 14 Pebruari 1946. [62]

Untuk membuktikan bahwa pemerintahan di Sulawesi Utara berjalan seperti biasa, maka pemerintah Lapian-Taulu mengirim Radiogaram melalui kapal peronda Australia S.S LUNA, yang mengundang Pimpinan Sekutu di Makassar untuk datang berunding di Manado. Pada tanggal 23 Februari 1946, kapal S.S. El Libertador (4000 ton) tiba di pelabuhan Manado dengan membawa sebuah delegasi pimpinan sekutu dan NICA yang dikepalai oleh Lekol. Colson (Inggris).

Perundingan ditetapkan tanggal 24 Februari 1946, mulai jam 9 pagi di atas kapal. Sebelumnya Mayor Wilson (Sekutu) turun ke darat untuk menjemput utusan Indonesia dan utusan Belanda. Delegasi NICA menghendaki supaya pihak Indonesia harus dihadiri pimpinan militer, yaitu Taulu Wuisan, Nelwan dan Bisman serta pejabat sipil, yaitu: B.W. Lapian, D.A. Gerungan, Dr. Singal dan E. Katoppo, ditambah lagi dengan wakil golongan Tionghoa, Kapitein der Chinezen, Oei Pek Yong. Personalia ini diubah oleh pemerintah Indonesia yang mengajukan delegsinya terdiri dari Lapian, Taulu, Gerungan, Katoppo, ditambah dengan Hidayat, Chris Pontoh dan A.B.H. Waworuntu. Susunan personalia ini diterima Sekutu. Delegasi Sekutu dipimpin oleh Lt. Col Colson, selanjutnya Chief Co-NICA Kol. De Rooy dan komanadan KNIL Kol. Gilberth serta Mayor Wilson. Pihak Indonesia dipimpin oleh Residen B.W. Lapian dan pihak NICA oleh Co-NICA Coomans de Ruyter, sebagai penerjemah bertindak A.B.H. Waworuntu.

Setelah rapat dibuka oleh Colson, maka Sekutu mengajukan tuntutannya, supaya kekuasaan dikembalikan kepada NICA, mengenai syarat yang diajukan Indonesia akan diambil perhatian. Cara peralihan

kekuasaan akan berlaku secara berangsur-angsur, dimulai dengan pelarangan pengibaran bendera Merah-Putih. Jawaban Chris Pontoh, jika merah putih hendak diturunkan, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah.

Tuntutan kedua Sekutu, supaya semua senjata yang ada pada anggota tentara yang direbut dari KNIL harus dikembalikan kepada Sekutu, dijawab oleh delegasi Indonesia bahwa senjata adalah syarat mutlak untuk memelihara keamanan dan yang bertanggung-jawab adalah Tentara Nasional Indonesia, termasuk jaminan keamanan terhadap kamp tawanan Jepang sebanyak 8000 orang.

Tuntutan ketiga, supaya delegasi dari darat turut serta dalam kapal menuju Makassar untuk melanjutkan perundingan, tetapi ditolak oleh Lapian. Untuk keluar dari jalan buntu, maka delegasi Indonesia diberi kesempatan mengadakan referendum melalui Kongres Rakyat dalam waktu 24 jam. Kongres berlangsung 25 Februari 1946 dihadiri oleh semua tokoh yang mewakili organisasi, golongan dan lapisan masyarakat.Timbullah perbedaan pendapat, ada suara kompromi. Namun, Mat Canon wakil PPI secara lantang menegaskan bahwa Bendera Merah-Putih harus tetap dikibarkan, lebih baik daerah ini tenggelam didasar samudera daripada sang Dwi-Warna dilarang berkibar". Nada ini menguasai rapat, Chris Pontoh merumuskan dua alternatif:

1. Bendera merah-putih dikibarkan bersama-sama dengan bendera Sekutu, seperti berlaku di Jakarta, sembil menunggu penyelesaian lebih lanjut pada tingkat pusat.
2. Menolak bentuk perundingan apapun dengan Belanda dan menerima segala konsekuensinya.[63]

Kongres rakyat memutuskan perundingan dengan Belanda dihentikan agar revolusi kemerdekaan berjalan terus. Akibat dari sikap pemuda dan NICA yang berbeda, sehingga gerakan perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan secara terang-terangan melalui organisasi politik maupun gerilya berlangsung terus hingga terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). NIT dilahirkan melalui Konferensi Denpasar tanggal 8 Desember 1946 sebagai kelanjutan dari

Konferensi Malino tanggal 15-25 Juli 1946. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1946 adalah tanggal berdirinya Negara Indonesia Timur dengan ibu kotanya Makassar dan Presidennya diangkat Tjokorde Gede Rake Sukawati.

Catatan Akhir :

[1] Maulwi Saelan. *Dari Revolui '45 sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa.* Jakarta: Visimedia Pustaka. 2008, hlm: 41

[2] Nugroho Notosusanto, dkk. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949.* Jakarta: Sekretariat Negara RI, hlm: 30.

[3] Maulwi Saelan, *op.cit.*, hlm: 6.

[4] Maulwi Saelan, *op.cit.*, hlm: 45.

[5] Lahadjdji Patang. *Sulawesi dan Pahlwan-Pahlawanya.* Makassar: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia. 1975, hlm: 59.

[6] Sarita Pawiloy, dkk. *Sejaran Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan 17 Agustus 1945-17 Agustus 1950.* Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan. 1987, hlm: 124.

[7] *Ibid*, hlm: 139.

[8] *Ibid*, hlm: 140.

[9] *Ibid*, hlm: 142.

[10] *Ibid*, hlm: 146.

[11] Anwar Hafid, dkk. *Sejarah Daerah Kolaka.* Bandung: Humaniora Utama Press. 2009, hlm: 138.

[12] Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 131

[13]Ali-Hadara. *Profil Pejuang Sulawesi Tenggara.* Kendari: Laporan Penelitian Kerjasama Barisda dan Unhalu. 2007, hlm: 58.

[14]Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 66.

[15] M. Sanusi Dg. Mattata. *Luwu dalam Revolusi.* Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu. 1967, hlm: 215.

[16] Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 68

[17] R.Z. Leirissa. *Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar harapan dan Yayasan Malesung Rondor. 1997, hlm: 118.

[18] *Ibid*, hlm: 117.

[19] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 285.

[20]Christian Pelras. *Manusia Bugis Makassar.* Jakarta: Forum Jakarta Paris-Ecole Francaise d'Extreme-Orient. 2006, hlm: 335.

[21] Anwar Hafid dan Safruddin. *Sejarah Daerah Konawe Utara.* Bandung: Alfabeta. 2014, Hlm: 144.

[22] Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 125.

[23] Anonim. *Lahirnya Tri. Devisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Tenggara.* Ujung Pandang: Tim Penelitian Sejarah Perjuangan Rakyat Sulselra Kerja Sama Kodam XIV Hasanuddin, Unhas dan IKIP Ujung Pandang. 1983, hlm: 34.

[24] *Ibid*, hlm: 130.

[25] M. Sanusi Dg. Mattata, 1967, *op.cit.*, hlm: 217.

[26] Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 133

[27] *Ibid*, hlm: 144.

[28] *Ibid*, hlm: 151.

[29] *Ibid*, hlm: 156.

[30] Teuku H. Ibrahim Alfian. *Perjuangan Datu Kerajaan Luwu Andi Djemma dalam Menancapkan Pilar Begara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional.* Dalam Andi Djemma Pahlawan Nasional dari Bumi Sawerigading. Editor. A. Mattingaragau T, dkk. Makassar: Unanda Press. 2003, hlm: 53.

[31] Nurhayati Nainggolan, 1982, *op.cit.*, hlm: 73.

[32] *Ibid*, hlm: 74.

[33] *Ibid*, hlm: 75.

[34] Anonim. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah.* Jakarta: Depdikbud. 1979, hlm: 165.

[35] *Ibid*, hlm: 101.

[36] Sarita Pawiloy, 1987, *op.cit.*, hlm: 126.

[37] Mukhlis PaEni, dkk. *Sejarah Sosial Daerah: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950.* Jakarta: Disjarahnitra Depdikbud. 1995, hlm: 34.

[38] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 196.

[39] Sarita Pawiloy, 1975, *op.cit.*, hlm: 157.

[40] B. Bhurhanuddin, 1980, hlm:24.

[41] Anwar Hafid, 2009. *op.cit.*, hlm: 146.

[42] *Ibid*, hlm: 146.

[43] *Ibid*, hlm: 161

[44] Nurhayari Nainggolan, 1982, *op.cit.*, hlm: 67.

[45] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 235.

[46] *Ibid*, hlm: 246.

[47] R.Z. Leirissa. *Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan dan Yayasan Malesung Rondor. 1997, hlm: 133.

[48] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 249.

[49] *Ibid*, hlm: 250.

[50] *Ibid*, hlm: 255.

[51] Manai Sophian. *Apa yang Masih Teringat*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Bangsa Sulawesi Selatan. 1991, hlm: 23.

[52] Audrey R. Kahin (ed.). *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti Perss. 1990, hlm: 72.

[53] Kementerian Penerangan RI. 1953. *Propinsi Sulawesi*. Makassar: Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi hlm: 39.

[54] Willem Ijzereef. *De Zuid-Celebes Affaire*, Dieren. 1984, hlm: 52.

[55] Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1985, hlm: 57.

[56] *Ibid*, hlm: 58.

[57]Christian Pelras, 2006, *op.cit.*, hlm: 332.

[58] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 109.

[59] Anwar Hafid, 2009. *op.cit.*, hlm: 156.

[60] Nurhayati Nainggolan, 1982, *op.cit.*, hlm: 80.

[61] *Ibid*, hlm: 84.

[62] Lahadjdji Patang, 1975, *op.cit.*, hlm: 241.

[63] *Ibid*, 258.

BAB IX
BERITA PROKLAMASI DI MALUKU

Bernarda Meteray

9.1. Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal satu ayat satu disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Cita- cita kesatuan pernah diikrarkan oleh para pemuda dalam pertistiwa yang terkenal yaitu sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Kesatuan yang dimaksud mencakup satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia.

Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk mengisi segala perlengkapan negara yang antara lain menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan Negara antara lain yaitu "melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Istilah tumpah darah tersebut berarti seluruh wilayah bekas Hindia Belanda meliputi 8 (delapan) propinsi yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku.

Maluku, termasuk Irian Barat, menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Sejak itu, baik orang Maluku maupun Irian Barat, merupakan bagian dari negara bangsa yang diproklamirkan itu. Kedudukan Irian Barat menurut rapat PPKI adalah bagian dari propinsi Maluku. Hal ini ditegaskan dalam pidato Sukarno pada 23 Agustus 1945 sebagai berikut "Bangsaku sekalian! Di Sumatera, di Djawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda

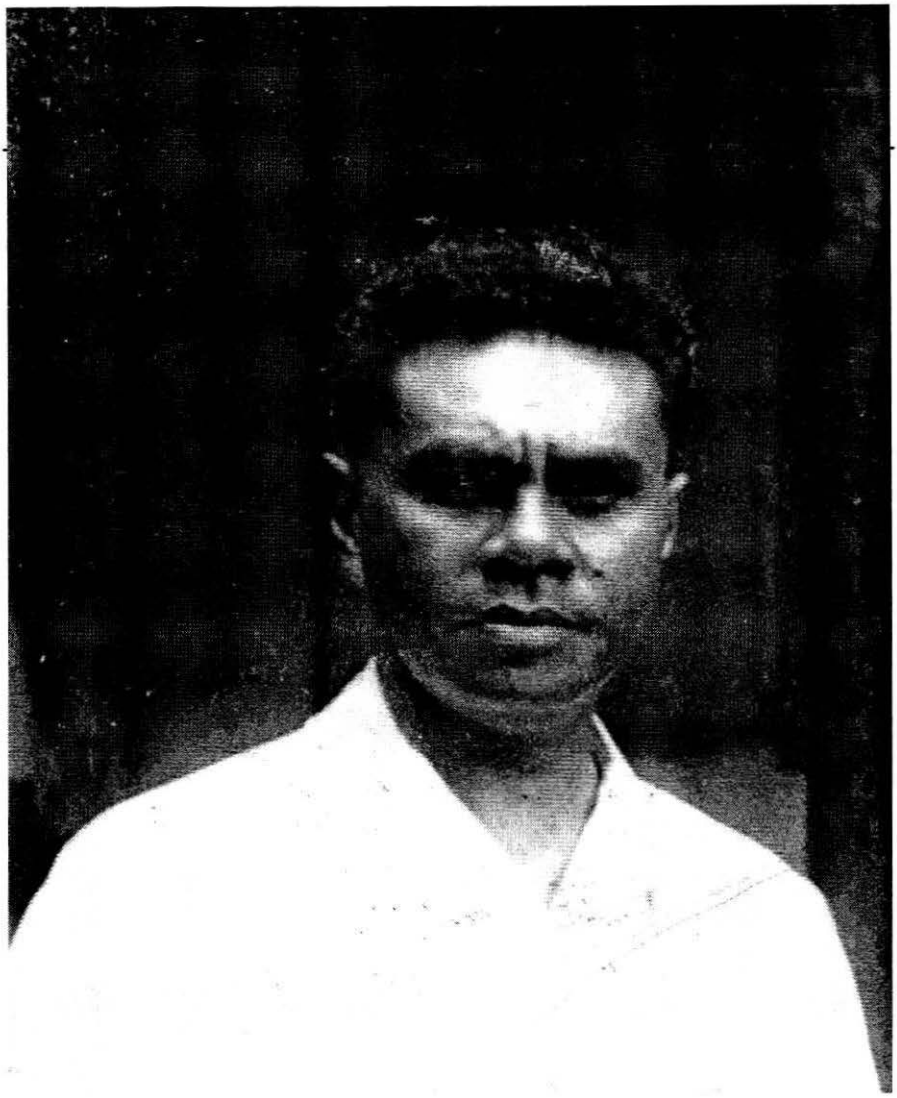
Ketjil, Maluku, dari Atjeh sampai Merauke!."[1] Pidato Soekarno ini memperlihatkan bahwa memang Irian Barat sebagai Karesidenan Nieuw Guinea sejak 1 April 1924 sudah dihapuskan dan digabungkan dengan Karesidenan Ambon sehingga Irian Barat dengan sendirinya menjadi *onderafdeeling* dari Karesidenan Ambon.

Namun, kenyataannya, berita proklamasi tidak dapat terima langsung dan dilaksanakan di kepulauan Indonesia Timur, termasuk Maluku dan Irian Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain baik Maluku maupun Irian Barat mengalami kehadiran tentara sekutu lebih awal dan lebih cepat sehingga mempengaruhi perjananan berita proklamasi di kedua wilayah ini. Faktor lainnya adalah geografis yang sangat berpengaruh hampir di sebagian besar di wilayah Maluku dan Irian Barat. Walaupun jumlah elit terdidik Maluku pada masa itu lebih banyak dari elit Irian Barat, namun Maluku merupakan wilayah yang terdiri dari 1.023 pulau-pulau besar dan kecil yang terbentang dari utara hingga selatan yang dipisahkan oleh lautan. Kondisi wilayah ini menyebabkan sulitnya hubungan antara satu tempat dan tempat lainnya. Faktor lainnya adalah terbatasnya sarana transportasi baik udara, laut maupun darat, dan juga terbatasnya sarana lain berupa media massa seperti radio dan surat kabar.

Sementara Irian Barat adalah wilayah daratan yang luas dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya, yang juga memiliki keterbatasan dan kesulitan sarana prasana transportasi udara, darat dan laut. Kondisi geografis wilayah Irian Barat yang sangat berat ini menyulitkan pula komunikasi antar-penduduk. Di samping itu, sangat terbatasnya kelompok elit asal Irian Barat yang terdidik mempengaruhi pemahaman orang di Irian Barat tentang Indonesia termasuk penyebaran berita proklamasi.

9.2. Gagasan Awal tentang Indonesia di antara Masyarakat Maluku

Sekalipun telah terjadi kontak antar orang Maluku dengan wilayah lain di Indonesia, diperkirakan sejak abad ke-15, perjalanan orang Maluku—baik di utara, tengah maupun tenggara—untuk menjadi bagian dari Indonesia melalui proses yang panjang. Pemahaman sebagai bagian dari masyarakat Indonesia diawali dengan kehadiran pemuda-pemuda Ambon yang mengikuti pendidikan di Jawa sejak 1890-an. Mereka melanjutkan kuliah di beberapa kota di tanah



Mr.Johanes Latuharhary, Gubernur Maluku
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)

Jawa (Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Semarang dan Surabaya), di samping Sulawesi (Makasar dan Tondano). Para pemuda asal Maluku yang lebih awal menginjak kakinya di Jawa antara lain Mr.Johanes Latuharhary,[2] Ir. Martinus Putuhena,[3] Dr. Jacob Bernardus Sitanala, Dr. Melkianus Haulussy, abdul Muthalib Sangaji, Wellem Johanes Latumeten, Herman Pieters, F.M. Pupella, Dr. J. Kayadoe, Prof. Dr. Jonas Latumeten,[4] Mohamad Padang,[5] dan Sultan Mudasfar Syah dari Ternate.

Sebagian dari pemuda-pemuda dari Maluku yang tinggal di berbagai tempat di Jawa dan Makasar pernah melanjutkan pendidikan

Belanda di bidang kedokteran dan hukum yang kemudian kembali ke Jawa dan Ambon. Pertemuan dengan berbagai pemuda inilah menyebabkan mereka secara perlahan mulai melibatkan diri secara sukarela dalam kegiatan politik.

Pada 9 Mei 1920 Aleksander Yacop Patty mendirikan Sarekat Ambon di Semarang. Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan kemakmuran penduduk Ambon. Melalui organisasi Sarekat Ambon, orang Maluku mulai pertama kali terlibat dalam organisasi politik dan memahami pentingnya nasionalisme. Organisasi ini melibatkan intelektual Ambon yang terus tumbuh, dan cabang organisasi ini juga dibuka di beberapa kota besar di Jawa.

Aleksander Yacop Patty lahir di desa Nolloh pulau Saparua. Dia menamatkan pendidikan dasar di Saparoeashe School di kota Saparua dan melanjutkan pendidikannya di Surabaya, yaitu di Sekolah Kedokteran NIAS (Nederlandsch Indische Aartsens School). Namun, dalam perjalanan studinya, Aleksander Yacop Patty dikeluarkan dari Sekolah Kedokteran dan pindah ke Semarang pada 1919. Dia menjadi wartawan seraya mendirikan perkumpulan Mena Muria dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Ambon yang kemudian, pada 9 Mei 1920, mendirikan Sarekat Ambon. Di sinilah Aleksander Yacop Patty mulai memperkenalkan dan memperluas ide nasionalisme Indonesia di antara orang Maluku.[6]

Di Maluku, ide-ide Sarekat Ambon mendapat dukungan dari kaum muda. Kedatangan Alexander Yacob Patty di Ambon 1923 disambut oleh para pemuda seperti E.U. Pupella, Wim Reawaru, D. Ayawaila, J. Tupamahu, J.D. Poetiray, L. Matulatuwa dan lainnya. Bersama dengan Alexander Yacob Patty, kelompok pemuda di Ambon melakukan propoganda ide-ide Sarekat Ambon untuk menanamkan benih-benih kebangsaan di wilayah sekitar Ambon dan sekitarnya. Menurut Patikaihattu,[7] Alexander Yacob Patty mendatangi beberapa organisasi seperti Christelijk Ambonsch volksbond, Sou Molokoe, Inlands Learaarsbond, Nusa Ina, Panji Naderland, Ambonsch Studiefond dan Ambon Raad. Organisasi-organisasi inilah yang sering dihubungi Alexander Yacob Patty untuk menyebarkan propoganda anti-Belanda.

Namun, perjalanan Sarekat Ambon di Ambon mendapat tantangan. Di bawah pimpinan residen Ambon, beberapa raja di Ambon ditugaskan untuk menghilangkan pengaruh Sarekat Ambon di Ambon. Raja-raja yang dianggap terlibat dalam organisasi ini diancam

akan diberhentikan, dan banyak guru-guru yang diberhentikan dan dari jabatan, sementara ada yang dipindahkan dengan alasan tertentu.[8] Oleh karena gerakan yang dilakukan Y.A.Patty ini dianggap sangat membahayakan pemerintahan Belanda, maka Patty ditangkap dan diadili di Makasar pada 1924 dan kemudian diasingkan ke Boven Digul di Irian Barat.

Perjuangan Patty dilanjutkan oleh Mr. J. Latuharhary yang membawa Sarekat Ambon bersama organisasi politik lainnya di pulau Jawa untuk mencapai tujuan Indonesia Merdeka. Sementara di Ambon, Sarekat Ambon tetap bertahan sekalipun mendapat tantangan dari lawan politiknya Regenten Bond dan Molukshe Politiek Verbond. Perjuangan terus dilakukan dengan mereorganisasi seperti dilakukan D. Ajawaila dengan bimbingan Mr. J. Latuharhary di Jawa. Setelah D. Ajawaila meninggal pada 27 Desember 1927, maka perjuangan ini terus dilanjutkan oleh E.U.Pupella yang juga seorang nasionalis dan dibantu oleh Ot Pattimaipau dan Wim Reawaru.

9.3. Maluku di Masa Pendudukan Jepang.

Kehadiran Jepang di berbagai tempat di Maluku bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Namun, perlakukan Jepang yang sangat kejam terhadap nasyarakat di Maluku tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya di Indonesia. Di Ambon, sebelum kedatangan Jepang, orang Ambon telah melakukan kontak dengan VOC dan pemerintahan Belanda sejak tiga abad dan hal ini mempengaruhi kehidupan orang Ambon di segala bidang. Chauvel[9] menyebutkan hubungan yang lama ini menunjukkan begitu lama dan intimnya orang Ambon dengan Belanda di wilayah Indonesia. Dengan demikian, kehadiran Jepang di Ambon memberikan dampak bagi orang Ambon dan orang Maluku lainnya di kemudin hari.

Sejak 1942, Jepang mulai menduduki Ambon dengan menjadikan Ambon sebagai bagian dari wilayah administrasi kelautan dengan pusat pemerintahannya di Makasar. Ambon pada masa itu di bawa kekuasaan Seram Minseifu yang kaitannya dengan Maluku sebagai residen tanpa Irian Barat dan Ambon sebagai pusat pemerintahan administrasi. Untuk memperoleh kemenangan perang melawan sekutu dan mendapat dukungan dari penduduk lokal, Pemerintahan Jepang menggunakan anggota Sarekat Ambon sebagai sarana untuk mendapat dukungan. Untuk itu, E.U. Pupella yang sejak 1938

menjadi pemimpin Sarekat Ambon segera ditunjuk sebagai bunkencho yaitu menjadi kepala subregency pulau Ambon. Pupella yang adalah seorang guru yang tidak mempunyai pengalaman di bidang administrasi, harus mempelajari politik Belanda untuk dapat memahami jalannya pemerintahan di Ambon. Pupella adalah seorang nasionalis Kristen yang mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat Islam Ambon. Pupella dibantu anggota Sarekat Ambon lainnya, yaitu Hamid bin Hamid yang mengurusi bidang ekonomi, Ot Pattimaipau yang menjadi editor surat kabar dukungan Jepang, Dr. Tahitu, Jan Toule, Tjokro, Willem Reawaru, J. Rehatta dan J.H. Manuhutu[10].

Selama masa pendudukan Jepang di Ambon, Pupella dan kelompoknya sulit menerapkan pemikiran-pemikiran mereka untuk melakukan perubahan. Pemerintahan Jepang lebih bersifat militer dan pada masa itu aparat pemerintahan sipil yaitu Minseibu Chokan (setingkat Kepala Daerah), tidak mempunyai pengaruh dan hanya tunduk kepada militer, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki wewenang sebagai pemerintahan sipil. Walaupun terdapat upaya pemerintah Jepang untuk membatasi pergerakan kemerdekaan Indonesia, Pupella pernah mengibarkan bendera merah putih selama sebulan sesudah kehadiran Jepang di Ambon, sementara Ot Pattimaipau sebagai editor pada surat kabar berbahasa Jepang Indonesia *Sinar Matahari* memanfaatkan surat kabar ini untuk memperlihatkan kondisi masyarakatnya. Melalui surat kabar inilah masyarakat Maluku memperoleh informasi dalam bahasa Indonesia, sementara Bahasa Belanda dilarang utnuk digunakan dalam komunikasi.[11]

Selama masa pendudukan Jepang ini, kondisi semakin diperparah dengan sistim yang mengubah struktur masyarakat yang sebelumnya dibina oleh Belanda. Semua orang kulit putih(Eropa) ditangkap dan ditawan, sementara pemerintah Jepang menerapkan strategi dengan cara menggunakan orang Maluku yang pernah bekerja semasa pemerintah Belanda. Masyarakat sangat takut terhadap aparat keamanan, dinas rahasia dan mata-mata Jepang. Organisasi sosial dapat berfungsi apabila mendapat ijin dari pemerintah Jepang. Akibatnya, pelbagai kegiatan yang mendukung kemerdekaan sebelum kedatangan Jepang tidak dapat dilaksanakan. Semua upaya yang dilakukan adalah untuk membantu Jepang memenangkan perang melawan sekutu. [12]

Bidang sosial dan ekonomi juga mengalami keterpurukan dan masyarakat sangat melarat karena dijadikan Romusha dan pekerja paksa. Rakyat disiksa dan dihukum diluar perikemanusiaan, termasuk kaum perempuan.[13] Di bidang pendidikan, sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dijadikan alat propoganda Jepang. Bahasa Jepang digunakan baik di sekolah-sekolah maupun kantor-kantor, para pemuda diwajibkan mengikuti latihan milter. Masyarakat Maluku baik di utara tengah dan Tenggara diwajibkan mengikuti budaya Jepang melalui sikap, cara berpakaian dan menghormati bendera dan menyanyikan laku kebangsaan Jepang. Di bidang keagamaan, masyarakat dibatasi dan diawasi bahkan banyak pendeta yang ditangkap dan dibunuh termaksuk bagian dakwah Islam tidak dapat berfungsi. Para intelektual yang dianggap berbahaya ditangkap dan dibunuh sehingga mempengaruhi hubungan antara Maluku dan dunia luar. Penggunaan radio sangat diawasi kecuali yang berhubungan dengan upaya yang dicapai meraih kemenangan Jepang.[14]

Sementara selama itu, gerakan kemerdekaan dilakukan secara sembunyi, yaitu melalui gerakan bawah tanah dan melalui mata-mata sekutu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hubungan kelompok pergerakan Ambon dengan tokoh pergerakan nasionalis di Jawa semakin sulit sebagai akibat dari ketatnya pengawasan pasukan Jepang.

9.4. Reaksi Warga Maluku di Luar Maluku terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945

Situasi di Maluku mulai mengalami masa transisi menyusul kekalahan Jepang atas Sekutut pada 15 Agustus 1945. Berita proklamsi 17 Agustus 1945 di Maluku mencapai para pemuda dan rakyat di Maluku melalui radio dan dan surat kabar. Mr J. Latuharhary yang sebelumnya adalah anggota BPUPKI (Badan Persiapan Umum Kemerdekaan Indonesia) diangkat presiden sebagai gubernur Maluku dengan kantornya berpusat di Jakarta melakukan berbagai upaya agar berita proklamasi ini dapat didengar dan dipahami rakyat Maluku di berbagai tempat termasuk di Maluku.

Dalam rapatnya di rumah, Mr. J. Latuharhary pada 8 Oktober 1945, angkatan Pemuda Indonesia menegaskan sikapnya sebagai berikut: "Perserikatan Pemoeda Ambon membentoek barisan jang aktip serta

membantoe barisan-barisan Indonesia lainnya oentoek membela dan mempertahankan Pemerintahan Repoeblik Indonesia". Adapun soesoenan badan pengoeroesnja jaitu Ketua N. Tanasale, wakil ketua J. de Fretes dan penulis J. Patty.[15]

Kemudian, pada besoknya 9 Oktober 1945, Gubernur Maluku Mr. J. Latuharhary menyampaikan pidatonya[16] yaitu :

Saudara-saudara dari Ambon.

Saat sekarang ini adalah saat jang terpenting dalam sedjarah bangsa Indonesia oemoemnja dan kaoem Ambon choesoesnja.

Sedjak permoelaan abad ke 17, maka kaoem kita dibawah pimpinan pahlawan-pahlawan kebangsaannja, ialah kapitan Hitoe Kakiali, Kapitan Hitoe Toeloekabessy, Patimoera (Thomas Matulessy) dan seteroesnja, berdjoeang dengan membawa korban djiwa raga dan harta bendanja, oleh karena tjinta akan bangsa dan tanah air, dengan kejakinan, bahwa hanjalah dengan dan dalam kemerdekaan dapat terjamin tjita-tjita kehidoepan manusia.

Kita sekarang sedang berada ditengah soeatoe peristiwa jang akan menentoekan nasib kita semoeanja, ja'ni hidoep sebagai manoesia jang merdeka atau sebagai bangsa jang hina.

Bangsa Indonesia jang dalamnja tergaboeng djoega kaoem Ambon pada tanggal 17 boelan Agustus 1945 telah memproklameerkan kemerdekannja dan djoega sudah membentoek djoega satoe pemerintahan Repoeblik Indonesia. Makloemlah saudara-saudara bahwa Repoeblik Indonesia terbagi dalam daerah-daerah, diantaranja daerah Maloekoe, jang mempoenjai pemerintahan sendiri(autonomi). Hal ini berarti bahwa roemah tangga bangsa kita diatoer oentoek kita dan oentoek kita; satoe-satoenja djalan oentoek mengembangkan tjita-tjita kehidoepannja manoesia. Lain djalan tidak ada. Berhoeboeng dengan itoe maka dari sendirinja nanti kita poelang semoea, soepaja bersama–sama kita membangoenkan poela kepoelaoean kita tjintai itoe.

Kemerdakaan bangsa dan negara Indonesia-dilipoeti oleh soeasana internasional jang amat menjenangkan – sekarang dipertahankan mati-matian oleh bangsa Indonesia di Djawa dan Madoera sini. Pemoeda-pemoeda Amboenpoen tidak ketinggalan, melainkan toeroet dalam pertempoeran, seperti telah terdjadi dalam pertempoeran antar bangsa Indonesia dan Balatentara Djepang, di Soerabaja dan Pekalongan, dimana pemoeda OENOES LIKLIKWATIL dan beberapa pemoeda lainnja(Soerabaja) djatoeh sebagai pahlawan, sedang poetranja Dr. Lisapaly dan Dr.Tupamahu(Pekalongan) mendapat loeka.

Maoekah kita mendjadi pengchianat terhadap Tetek-Nenek –Mojang dan tanah air kita? Tentoe tidak, karena dengan demikian kita akan berdosa. KITA TIDAK MAOE MENDJADI PENGCHIANAT. SEBAB BAGAIMANAPOEN DJOEGA DIDALAM DADA KITA MASIH TEROES BERKOBAR TJINTA AKAN BANGSA DAN TANAH AIR.

Oleh karena itu maka saja minta kepada saudara-saudara semoeanja: BERDIRILAH SERANTAK DIBELAKANG REPOEBLIK INDONESIA. BERDJOENGLAH BAHOE DENGAN BAHOE BERSAMA BANGSA INDONESIA LAINNJA OENTOEK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. PERTJAJALAH BAHWA PERDJOEANGAN INI AKAN MEMBAWA BERKAT KEPADA KITA SEMOEA SEBAB PERDJOEANGAN INI ADALAH SOEATOE PERDJOEANGAN JANG SOETJI.

M e r d e k a !
Goebernoer Maloekoe
Djakarta, 9-10-1945
Mr. J. LATUHARHARY

Pidato-pidato Mr. J. Latuharhary di atas ini bertujuan untuk menghimbau para pemuda dan masyarakat Ambon, baik di Jawa maupun luar Jawa, dan masyarakat Maluku bersama masyarakat Indonesia lainnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pidato ini juga memperlihatkan bahwa para pemuda Maluku yang ada di Jawa telah berjuang secara fisik melawan Jepang seperti yang terjadi di Surbaya dan Pekalogan yang tidak saja mendapat luka melainkan menjadi korban dalam pertempuran.

Salah satu upaya yang dilakukan para pemuda di Jawa menyebarluaskan berita proklamasi, yaitu melalui surat kabar. Surat kabar pada masa itu sangat bermanfaat sebagai sarana utama untuk menginformasikan berita proklamasi sehingga mampu memberi semangat bagi orang di Maluku dan di berbagai tempat. Surat kabar yang dimaksudkan antara lain *Merdeka* edisi 9-10 1945.[17]" Isi surat kabarnya sebagai berikut:

> Salah satoe berita radio jang disiarkan pada tanggal 5 Boelan Oktober tahoen 1945 pada djam 18.20 menjatakan bahwa keratoes-ratoes serdadoe Indonesia (sisa Balantera Bekanda dahoeloe) memadjoekan permintaan kepada pemerintah Australie soepaja mereka diangkoetkan ke – Indonesia oentuk berdjoeang bersama-sama saudara-sadudara di Indonesia oentoek mempertahankan Indonesia merdeka.
>
> Nah! Saudara-saudara ale Njong!
>
> Tjoba pikir sadiki tentang kabar diatas. Ale maoe dipake djadi alat-alat Belada kembali.
>
> Balong tjokoep ditjoetjoe idong lai?
>
> E, ingatan djangan sampe katong boenoe katoeng, tagal Nica poeng tahela.
>
> KITA BANGSA MERDEKA!
>
> HIDOEP SAMA RATA SAMA RASA
>
> Maski kasiang-kasiang katoeng oeroes sendiri!
>
> Angkatan Pemoeda Indonesia-Ambon

Pernyataan kelompok pemuda Ambon yang berpusat di Jakarta ini mempunyai dampak bagi pemuda-pemuda di daerah, misalnya di Surabaya. Para pemuda di kota ini mengadakan pertemuan untuk membentuk angkatan Muda Indonesia Ambon. Organisasi ini dipimpin oleh Sapija, wakil ketua Telusa, dengan anggota yaitu Laibahas, Manuputty, Saimina dan Waas. Tujuan organisasi ini adalah membela kemerdekaan dan keamanan Indonesia bersama-sama dengan warga Indonesia lainnya secara damai dalam persaudaraan. Perkumpulan ini

mempunyai dua orang penasehat yaitu Dr. Siwabessy dan Dr.Patiradjawani.[18] Sementara di Yogyakarta, pada 16 Oktober 1945, dalam rapat keluarga wanita Ambon, Nyonya Syaranamual [19] berpidato sebagai berikut:

'Merdeka".

Hadirin jang terthormat,

Marilah kita segenap wanita golongan Ambon jangan ketinggalan bersatoe padoe, seia sekata, saling mengarti sama lain, diikoet dengan perboeatan-perboeatan jang njata, mentjoerahkan fikiran dan tenaga, berdjoeang menegakkan kemerdekaan jang kita idam-idamkan bersama ialah Negara Repoeblik Indonesia. Segala tindakan jang akan kita kerdjakan wadjib kita fikir dahoeloe soepaya djangan membawa kita kearah djoerang kesengsaraan.

Tjoerahkanlah segala tenaga dan sikap tenteram dan tenang, siap sedia bekerdja menoeroet perintah dan penasehat dari pemipin-peminpin kita, sebagaimana nasehat dari P.J.M. Presiden Republik Idonesia.

Djaoekanlah segala fikiran salah faham, salah sangkah, soepaja sehala beban jang mendjadi pikoelan dan tanggoengan pemimpin kita moedah dan dapat lekas dikerdjakan.

Teman-temankoe sekalian.

Sekali lagi kita seroekan. Bersatoe padoelah kita berdjoeang menetapkan Kemerdekaan Indonesia.

Selang 31/2 tahoen kita selaloe menderita doeka dan soesah, kehilangan anak dan soeami, karena tipoe moeslihat Djepang jang amat litjin. Tetapi sekarang soesanah soesana kebahagiaan telah melipoeti kita ialah Indonesia Merdeka.

Kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan poelau kita bersama golongan oemoemnja kearah kemakmoeran dan kebahagiaan jang kekal dan abadi.

Maka oleh karena itoe insaflah, hai teman kita dari golongan Ambon dll.nja. Sekali lagi. Bersatoe-padoelah, kerdja dan berdjoeanglah oentoek menetapkan serta menegakkan Negara Repoeblik Indonesia, kekal dan abadi selama –lamanja.

"Merdeka"

Pidato Nyonya Syaranamual di atas ini merupakan bukti bahwa upaya mendukung proklamasi tidak saja digerakan oleh kaum laki-laki, melainkan juga oleh kaum perempuan. Himbauan perempuan Ambon ini menyadarkan orang Maluku untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia. Respon para warga Maluku di Jawa banyak dilakukan melalui pertemuan yang menitikberatkan pada himbauan-himbauan untuk mendapat dukungan. Namun, ada pula warga muda Maluku terlibat dalam pertempuran fisik di Surabaya pada 27 dan 28 Oktober yang melibatkan warga muda orang Maluku. Sehubungan dengan peristiwa pertempuran di Surabaya, maka Gubernur Mr. J. Latuharhary mengeluarkan maklumat sebagai berikut:[20]

MAKLOEMAT GOEBERNOER MALOEKOE No. 2.

Kabar resmi dari kantor Perwakilan goebernoer Maloekoe di Soerabaja menyatakan tentang pertempoeran pada tanggal 28/29 Oktober 1945 di Soerabaja bahwa:

1. Telah tewas sebagai pahlawan 18 pemoeda
2. Jang loeka 17 pemoeda

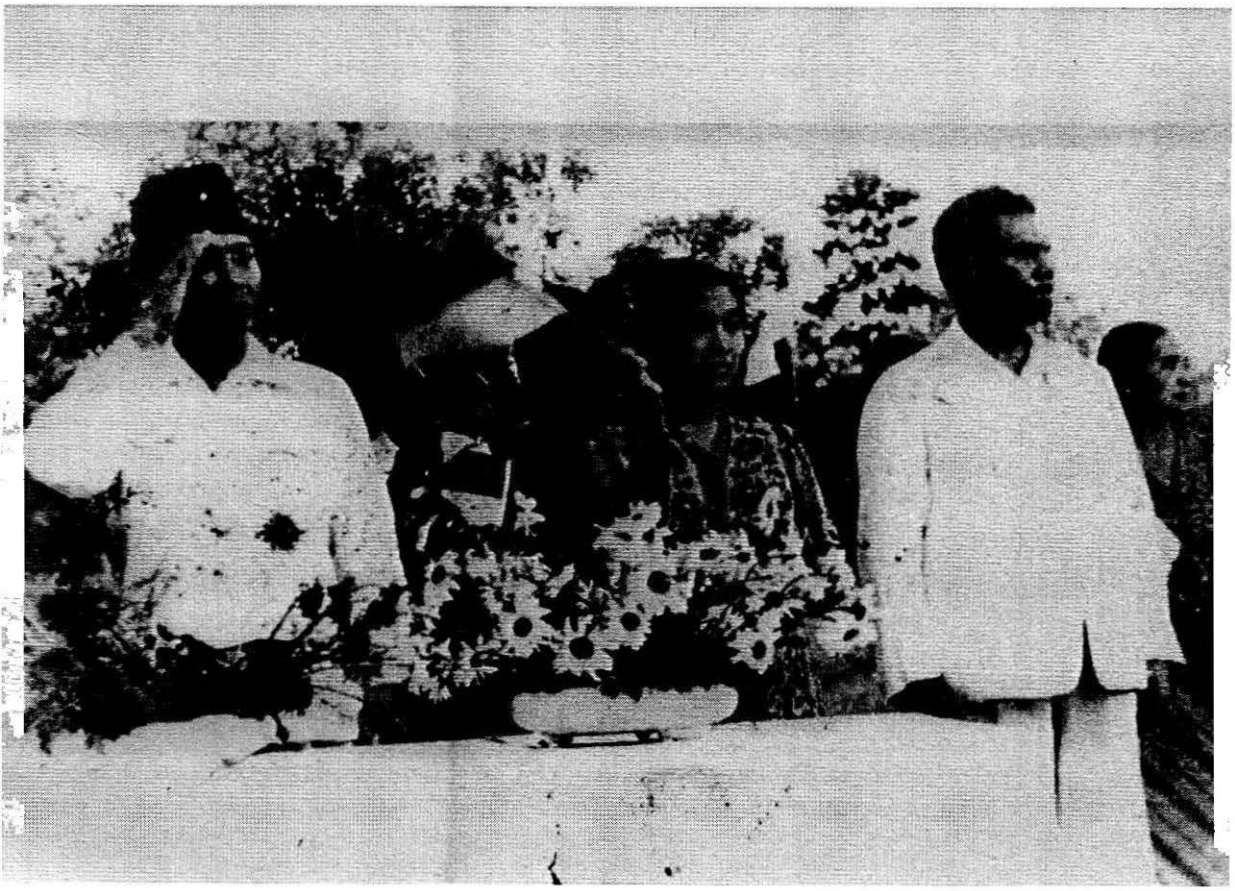
Dengan hati jang soetji moerni rakjat Indonesia Maloekoe mengutjapkan terima kasih atas djasanja pemoeda-pemoeda dari Maloekoe jang telah goegoer dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia itoe.

Kepada keloearga-keloearga jang berdoeka tjita, kami menjatakan toeroet serta dalam penderitaannja. Pertjajalah bahwa koerban dan penderitaan itoe tidak akan sia-sia.

Djakarta, 5-11-1945
Goeboernur Maloekoe
Mr. J. Latuharhary

Respon Rakyat di Maluku terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945.

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia seperti di Jawa, Sumatra dan Sulawesi, upaya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 di Maluku yang dilakukan kelompok nasionalis lebih



Presiden Soekarno, Ibu Negara Fatmawati, dan Mr. Latuharhary Nampak sedang menyaksikan pawai menyambut Proklamasi kemerdekaan RI pada 18 Agustus 1946 *(Sumber : Museum Perumusan Naskah Proklamasi)*

menggunakan jalan diplomasi dari pada konfrontasi fisik. Menurut Leirissa dkk,[21] penggunaan jalan diplomasi ini dilakukan terkait dengan masalah politik di Maluku.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Maluku memang mendapat tanggapan dari masyarakat terutama kelompok pemuda di Ambon. Namun, kondisi di Ambon yang pada Desember 1945 sudah berada di bawah kekuasaan pemerintahan NICA, maka para pemuda belum dapat melaksanakan aksi-aski mereka. Menurut Leirissa,[22] berita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah diterima oleh para pemimpin pergerakan dan para pemuda, namun mereka tidak dapat melakukan aksi karena politik dan militer di Ambon. Upaya ekspedisi Merah Putih dari Jawa merupakan suatu dorongan yang kuat untuk turut mempertahankan kemerdekaan.[23] Oleh karena itu, berita proklamasi hanya dimunculkan lewat surat kabar dan radio di luar Maluku dan akhirnya informasi tersebut dapat diketahui masyarakat di Maluku.

Di Ternate misalnya, upaya untuk menyebarluaskan berita proklamasi dilakukan melalui surat kabar *Menara Merdeka*. Para pemuda selalu memonitor kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta dan kemudian disampaikan kepada masyarakat. Upaya ini berlangsung dari Maluku Utara sampai ke Minahasa melalui organisasi politik persatuan Indonesia dan *Menara Merdeka*. Sebelum koran *Menara Merdeka* lahir, di Ternate telah ada koran-koran lain seperti *Maluku Utara* milik Po Su Poa dan *Utusan* dari F.Kansil yang berasal dari Sangihe Talaud. Pemimpin redaksi dari *Menara merdeka*, Arnold Mononutu, kemudian digantikan seorang pemuda keturunan Arab yaitu Umar.[24]

Dalam perkembangan kemudian, tampak Sultan Ternate Muhammad Djabir Syah cenderung mendukung pemerintah federal. Terdapat beberapa hal yang mendorong Sultan bersikap demikian: *pertama*, ada rasa hutang budi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang telah menyelamatkan; *kedua*, ada rasa kekhawatiran tersendiri bagi sultan, jika wilayah kesultanan Ternate dimasukkan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pengaruh sultan dengan sendirinya akan berkurang; *ketiga,* Sultan benar-benar menyadari apabila wilayah Kesultanan Ternate berintegrasi dengan NKRI, maka jabatan yang dipercayakan kepadanya di bawah pemerintahan kolonial Belanda dengan sendirinya akan hilang. [25]

Di Ambon, berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diketahui para pemimpin pergerakan dan terutama para pemuda. Tokoh pergerakan yaitu E.U. Pupella, Willem Reawaru dan Ot Pattimaipau, mulai menyusun kekuatan menentang Belanda yang ingin kembali berkuasa. Walaupun pada saat itu belum ada instruksi langsung dari Jakarta, rakyat yang mendukung prolamasi Indonesia mulai membentuk kekuatan dengan mengorganisir laskar-laskar perjuangan rakyat membela proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada 24 September 1945 tentara sekutu mendarat di Ambon dan mulai melucuti persenjataan Jepang dan membebaskan tawaban perang Sekutu. Kedatangan sekutu disertai pula dengan NICA. Kehadiran NICA di Ambon disambut dengan perasaan gembira oleh kelompok yang masih menginginkan berkuasanya pemerintah Belanda ini. Sementara di bagian lain, kehadiran NICA tidak mendapat dukungan bagi kelompok yang merasa tidak mau dikuasai dan dijajah lagi oleh pihak Belanda. Pada waktu itu terjadi tindakan balas dendam antara bekas tawanan dengan kelompok pro-Jepang. Ketika NICA kembali di Ambon, kelompok yang mendukung NICA mengibarkan bendera Tiga Warna di bandara Ambon. Kemudian pada 25 September 1945 kantor-kantor pemerintah mulai bekerja kembali.

Sementara itu, E.U. Pupella, Willem Reawaru, dan Hamid bin hamid dan pendukung lainnya mulai menyusun kekuatan menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di Maluku, tepatnya di Ambon. Pada Desember 1945, para tokoh nasionalis ini mengadakan rapat untuk menyusun kekuatan menentang kembalinya Belanda di Maluku. Organisasi yang bergerak pada waktu itu antara lain Romusha, Heiho, KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) dan polisi. Tujuan pertemuan-pertemuan ini adalah untuk menyerang Belanda di Ambon dan sekitarnya. Hasil dari rapat-rapat yang diadakan itu, maka dibentuklah Persatuan pemuda Indonesia (PPI) pada 15 Pebruari 1946 yang diketuai oleh Paul Maitimu, M.O. Marulapey dan beberapa pengikutnya. Kelompok inipun akhirnya membentuk pula Barisan Pembela Indonesia(BPI) yang kemudia menggantikan namanya menjadi Pasukan Terpendam (PT). Anggota dari perkumpulan-perkumpulan di atas ini berasal dari bekas Heiho, KNIL, Seimedon dan para Pemuda. Dalam perkembangan kemudian dibentuklah Pemuda Republik Indonesia (Prima) yang dipimpin Abdul Kadir Tuakia.[26] Perjuangan Prima lewat kegiatan bawah tanah ini menimbulkan kekhwatiran bagi pemerintah

Belanda di Ambon. Berbagai isu untuk melakukan penyerangan mempengaruhi perjalanan Prima sebagai organisasi yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Ambon.

Pada akhir 1945 dan awal 1946 pemerintah Belanda mendirikan dewan penasehat yang beranggotakan 8 (delapan) orang mewakili dua agama (Nasrani dam Islam). Beberapa anggotanya antara lain adalah Pupella, Dr. Tahitu, Hamid bin hamid, Achmad Sukur dan Steven Norimarna. Pendirian dewan penasehat ini berkaitan dengan janji Ratu Belanda pada 1942 untuk memberikan otonomisasi bagi Indonesia, seperti halnya dengan daerah kerajaan Belanda lainnya. Untuk mewujudkan janji ini, dewan penasehat mengingatkan pemerintah untuk tidak menunda reorganisasi internal di Ambon hingga situasi di Jawa memungkinkan.[27] Sehubungan dengan rencana kedatangan pejabat pemerintah Belanda di Ambon, maka beberapa pertemuan diadakan beberapa kelompok orang Ambon untuk membahas janji pemberian otonomi tersebut. Ada kelompok yang menginginkan Ambon mempunyai status seperti Curacao dan Suriname, sementara ada kelompok yang menginginkan Ambon menjadi bagian dari Indonesia karena secara ekonomis masih tergantung dengan Indonesia sehingga tetap menjadi bagian dari wilayah NKRI.[28]

Ketika pejabat pemerintah Belanda tiba di Ambon, De Waal, di hadapan Raja–raja Ambon terkesan dengan ide pembentukan persekmakmuran Maluku yang dipikirkan telah mendapat dukungan yang kuat. Persemakmuran yang dimaksud akan mencakup Maluku Utara dan Irian Barat serta Maluku Selatan. De Waal melihat bahwa munculnya ide persekmakmuran di antara orang Ambon dkarenakan kurang memberi perhatian pada pembentukan lembaga lokal yang merupakan cikal-bakal pembentukan struktur federal. Menurut De Waal, kekuatiran orang Ambon disebabkan karena pembentukan negera federal yang dibentuk Indonesia akan memperlihatkan dominasinya orang Jawa dan Sumatra. Sementara Dewan penasehat lebih cenderung membentuk lembaga yang meliputi seluruh Maluku daripada hanya berorientasi pada hanya orang Ambon.[29]

Ide pembentukan Persekmakmuran Maluku didukung ketika hadirnya tiga (tiga) pemimpin Perkoempoelan Kebangsaan Malokoe dari Jakarta pada pertengahan April 1946. Ketiga pemimpin itu adalah R.J. Metekohy, M.P. Harmusial dan J.S. Patty. Mereka berkeinginan

Maluku menjadi bagian dari Indonesia daripada bagian kerajaan Belanda. Pada 15 April 1946 diadakan pertemuan dan mendapat persetujuan agar Maluku membentuk otonomi penuh di dalam Indonesia, dan akan berdiri sendiri setelah beberapa periode kemudian. Yang paling penting adalah, Maluku tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Belanda.

Untuk mewujudkan ide Persekmamuran Maluku maka Dr. Tahitu memimpin delegasi ke Ternate untuk mendiskusikannya dengan Sultan Ternate pada bulan Mei 1946. Ketika ide Persekmakmuran bagi Maluku disampaikan kepada Sultan, Sultan Ternate tidak menanggapi tetang ide tersebut dan menolak karena ada kekuatiran dengan kehadiran lembaga ini akan memperlihatkan dominasi orang Ambon atapun oleh Indonesia lainnya. Sultan justru cenderung menginginkan Maluku menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT). Sementara di bagian lain, ketakutan orang Ambon adalah apabila Maluku menjadi bagian dari NIT atau NKRI maka akan didominasi oleh kelompok lain bukan Maluku.[30]

Selama masa ini, kelompok nasionalis tidak dapat beraktivitas seperti pertemuan atau rapat menyangkut petisi tersebut. Sebelum konfrensi Malino, ide persekmakmuran tidak dapat mendapat dukungan. Para nasionalis Indoensia mempunyai gagasan lain. Kelompok tersebut adalah Persatuan Pemuda Indoensia dan Sarekat kerja, PKBM (Perkumpulan Kaum Buruh Maluku). Kelompok ini didukung oleh F. Lattuperisa, dan L.J. Pattiselamo dan Wem Reawaru.

E.U. Pupella akhirnya mempunyai inisiatif mendirikan suatu partai untuk menampung berbagai aliran dalam masyarakat Ambon dan Maluku secara umum dalam suatu organisasi yang bernama Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada 17 Agustus 1946. PIM bertujuan untuk mempertahankan proklamasi di Ambon dan Maluku. Organisasi ini mendapat dukungan dari banyak pemuda Ambon yang beragama Islam dan juga yang beragama Kristen. Sekitar 1.500 orang menghadiri pertemuan tersebut dan ¾ berasal dari kelopok Muslim.[31] Perjuangan Pupella dilakukan melalui parlemen dan akhirnya pada 1946 Pupella berhasil dipilih menjadi anggota Dewan Maluku Selatan.

Salah satu tokoh yang juga penting dalam perkembangan PIM ke depan adalah Willem atau yang dikenal Wim Reawaru. Menurut Pattikayhatu,[32] Pupella cenderung memilih jalan parlementer sementara

Reawaru lebih berkonsentrasi ke arah perlawanan bersenjata. Organisasi yang sebelumnya sudah dibentuk bersama tokoh lain, Paul Maitimu dan M.O. Marulapey, diambil alih kepemimpinannya oleh Reawaru dengan memberi latihan-latihan dasar militer kepada anggotanya yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan senjata tiruan dari bahan kayu. Barisan pemuda ini sebagian besar berasal dari kampung-kampung di pulau Ambon. Dalam perjalanannya atas usul Reawaru agar PPI lebih mengarah pada pasukan pelopor sesuai dengan latihan-latihan fisik yang selama ini dijalankan dan bertujuan untuk melakukan perlawanan fisik.[33]

Namun, menurut Pupella, keinginan Reawaru dalam dua kali pertemuan dibahas dan akhirnya ini ditolak karena kondisi di Ambon pada masa itu tidak memungkingkan berhadapan dengan tentara KNIL yang sangat profesional. Pemikiran Pupella ini mempengaruhi perjalanan perjuangan rakyat di Maluku yang direncanakan baik secara fisik bersenjata maupun parlementer hingga penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS). Akibatnya, perjuangan yang dilakukan lebih bersifat gerakan bawah tanah.

Maluku Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus melalui KMB pada 27 Desember 1949 yang hasilnya sebagai berikut:[34]

Fasal 1

Kerajaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat,

Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinja; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada keradjaan Nederland.

Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Fasal 2

Tentang keresidenan Irian (Nieuw Guinea) telah tercapai persetudjuan sebagai berikut:

Disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal ini masih mendjadi pokok pertikaian;

disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949;

Mengingat faktor-faktor penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu;

Mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu;

Mengingat sukarnja tugas kewadjiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta uni, dan

Mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asa supaja semua perselisihan jang mungkin ternjata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun,

Maka *status quo* keresidenan Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

Isi KMB ini menunjukkan dengan jelas bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari wilayah yang dimaksudkan di atas, maka Maluku dengan sendiriya menjadi bagian dari wilayah RIS kecuali Irian Barat.

Namun dalam kenyataannya, upaya untuk mempertahankan Maluku sebagai bagian dari wilayah RIS mendapat tantangan di Ambon dan juga di Ternate. Dalam warta singkat[35] berbagai perstiwa di Ambon dan sekitarnya diinformasikan bahwa sejak Februari hingga Maret 1950

banyak anggota PIM mendapat penganiayaan dan ditangkap dan dipenjarakan di Ambon serta melakukan propaganda anti-RIS. Pada 17 Februari 1950, diberitakan adanya penganiayaan terhadap salah seorang anggota PIM di Tanjung Sial di Seram. Kemudian, pada 18 Februari polisi melakukan penganiayaan terhadap dua orang anggota PIM, yaitu Djafar Lumaila dan Abdulrrahman. Pada 19 Februari 1950, polisi di Ambon menganiaya anggota PIM Djafar Mewar dan kelompoknya. Pada 12 Maret 1950, sersan Tomasoa mengunjungi Assilulu dan membuat propaganda yang isinya antara lain mengatakan "djangan kamu ikut sama Rerawaru dan Pupella. Sekarang Kita sendiri perintah kita sendiri. Djawa buat Djawa. Ambon buat Ambon." Kemudian pada 16 Maret 1950 polisi menangkap anggota PIM Ibrahim Tangko, dan pada 17 Maret 1950 polisi juga menangkap Awat Betawi, Moh. Awan dan juga Ahmad Bangsawan Mahulete. Mereka ditangkap karena terlibat dalam organisasi PIM. Tindakan lain adalah polisi di Wakasihu menangkap seorang anggota PIM A. Ohorella bersama istrinya.[36]

Aksi menentang pemerintah RIS di Maluku mencapai puncak pada 25 April 1950 ketika J.H. Manuhutu memperoklamirkan kemerdekaan bagi Maluku Selatan lepas dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan RIS. Akibat dari proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) ini, respon dari warga Maluku di Makasar disambut dingin. Organisasi-organisasi Maluku di Makasar menganggap seolah-olah tidak ada apa-apa. Ikatan Pemuda Maluku Suleiman, Kebaktian Rakjat Indonesia Maluku Pattimura dan Ikatan Pemuda Indonesia Maluku di Makasar mengadakan rapat bersama pengurusnya dan mengeluarkan pernyataan menentang proklamasi tersebut.[37] Sementara pada 26 April 1950, keputusan rapat pengurus Kebaktian Rakyat Maluku memecat Mr. Dr. Soumokil dari kepengurusan KRIM.[38]

Sehubungan dengan keadaan di Ambon, maka pada 27 April 1950 tokoh-tokoh Maluku di Jawa diberangkatkan ke Ambon untuk menyelesaikan masalah Ambon dengan cara damai. Tim yang didatangkan yaitu Dr. Leimena, Menteri Kesehatan RIS, Ir. Putuhena plt. Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS, M.A Pelupessy sebagai ketua senat RIS dan Dr. Rehatta menjabat Kepala Jawatan Lepra.

Sementara respon dari daerah lain seperti warga Maluku di Malang, Pare-Pare, Sumbawa, dan Kupang menentang pembentukan RMS. Keterlibatan Mr. Dr. Soumokil yang merupakan bekas Jaksa Agung NIT yang melarikan diri ke Ambon ini menurut surat kabar *Mimbar Umum* (22-4-1950), mensabotase ketentraman umum di Indonesia. Surat kabar ini juga menginformasikan bahwa pernyataan Kepala Staf Tentara Belanda van Langen bahwa adanya ketidaksanggupan pihaknya menahan anggota KNIL yang melarikan Mr. Soumokil ke Ambon. Surat kabar ini juga mengatakan bahwa ada 120.000 penduduk Maluku Selatan yang keperluan hidupnya tergantung pada Jawa maka akan dilakukan blokir, sementara terdapat 15.000 APRIS yang akan didaratkan ke Ambon.[39]

Melalui wawancara *Antara* dengan Leimena di Makasar pada 6 Mei 1950 diberitakan bahwa banyak rakyat di Ambon yang melarikan diri ke gunung-gunung. Leimena Menjelaskan bahwa menurut keterangan rakyat di kota Ambon, banyak lari ke pegunungan dan telah diumumkan di Ambon bahwa kalau mereka tidak ke kota maka toko-toko di Ambon *dibeslag*. Rakyat di sana hidup dalam ketakutan, demikian djuga di Saparua. Kata Leimena seterusnya, "jang saja sedihkan ialah nasib rakjat di Ambon". Menurut wartawan A.P.B. dari Maluku, kebingungan yang terjadi di antara masyarakat di Ambon setelah mendengar berita akan masuknya angkatan perang RIS di Maluku menyebabkan penduduk mulai kuatir. Banyak penduduk di Maluku mulai meninggalkan kota menggungsi ke desa atau gunung-gunung termasuk kaum Islam dan Tionghoa.[40]

Menurut Let. Kol. Musch, Kepala staf komando tentara Belanda di Indonesia Timur menyatakan bahwa anggota KNIL yang terlibat dalam RMS sebagaian besar dari warga Indonesia asal Ambon, Manado, Timor dan Belanda. Sementara di Ambon, masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok. Hal ini terlihat dari siaran berita dari radio Ambon pada 17 Mei 1950 yang disampaikan oleh Kepala Departemen Urusan Bahan Makanan RMS, P.W. Lokolo tentang pendistribusian beras dan sagu mentah.

RMS terus berupaya memperkuat kedudukannya dengan serdadu –serdadu yang dilengkapi dengan alat penembak. Dalam surat kabar *Pedoman* (10 Juni 1950) dikabarkan bahwa serdadu-serdadu baret merah dan hijau mempunyai peranan penting dalam RMS.

Sementara itu, dalam surat kabar *Antara* (14 Juni 1950), Soumokil dalam suratnya melalui Sorong meminta bantuan Australia dan surat kabar *Antara* (16 Juni 1950) juga mengabarkan bahwa radio di Irian Barat pada 13 Juni 1950 terus memberitakan bahwa lapangan terbang di Ambon siap menerima kedatangan pesawat dari Australia. [41]

Rupanya kegiatan RMS semakin merajalela. Surat kabar *Menara Merdeka* (23 Juni 1950) menyatakan bahwa pasukan baret merah hijau atau dikenal serdadu KNIL merajalela terhadap penduduk dengan segala kebengisannya, penganiayaan, perkosaan hidup, perampasan hak milik, pembunuhan secara kejam terus-menerus terjadi. Kaum pengungsi dari Seram, Manipa, Ambon melarikan diri ke Ternate dengan pertolongan kapal APRIS. Para pemimpin RMS mengirim pasukan KNIL untuk menyerang rakyat di Ambon, Seram, Manipa dan Buru.[42]

Dalam surat kabar *Menara Merdeka* 23 Juni 1950 diberitakan bahwa pada 10 Juni 1950 sebanyak 36 orang Seram menumpang kapal Rajabassa meninggalkan Seram. Menurut surat kabar ini, anggota PIM dikejar dan dibunuh serta rumahnya dibakar oleh tentara RMS di Asilulu.[43]

Pemerintah RIS memerintahkan kapal Angkatan Laut APRIS untuk memonitor motor bot, perahu-perahu atau sampan kecil yang keluar masuk pulau-pulau Maluku Selatan. Dengan demikian pengiriman bahan makanan ke Ambon terhenti sama sekali. Keadaan di Ambon semakin mengkhawatirkan. Sementara itu, ada berita bahwa tentara APRIS telah mendarat di pulau-pulau di Kei, Aru dan Kisar.[44]

Berkaitan dengan keberadaan partai politik selama pemerintahan RMS, melalui radio diumumkan bahwa partai politik seperti PIM, PRI, Pemuda dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Bahkan, Reawaru bersama dengan para pemuda di Ambon ditangkap dan dianiaya. Wim Reawaru memiliki sifat patriotism dan nasionalis, maka dibenci separatis RMS. Pada 23 Juli 1950, Wem Reawaru bersama Dahlan, Mohamad Nur, Raja Ketapang Miring dari Seram Barat, dan Hasan bin Tahir, kopral Pattiasina dimasukan ke penjara dan disiksa dan dibunuh di dekat kampong Liang pulau Ambon dekat Pantai.[45]

Melihat berbagai kondisi di Maluku sampai dengan Juni 1950, pemerintah NIT dan RIS terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di Maluku dengan cara damai. Menghadapi RMS di Ambon, pemerintah RIS belum melakukan operasi militer dan berencana akan

melakukan blokade. Terdapat 3 cara yang dilakukan pemerintah RIS dan Angkatan Perang RIS, yaitu: (1) melakukan pembicaraan kearah perdamaian, (2) melakukan blockade, dan (3) melakukan operasi militer.

Di Semarang, pada 12 Juni 1950, diadakan konferensi masyarakat Maluku seluruh Indonesia untuk bersama pemerintah menyelesaikan masalah Maluku Selatan. Sebagai ketua, Siota menegaskan bahwa masalah Maluku Selatan bukan saja tanggug jawab pemerintah melainkan juga masyarakat Indonesia termasuk purtra–putri Maluku. Dalam seminar itu hadir pula A. Tahya selaku wakil dari Kementrian Dalam Negeri. Konferensi itu berlangsug selama 2 hari.[46]

Sebagai tindak lanjut konferensi rakyat Maluku di Semarang maka Radio Makasar pada 4 Juli 1950 mengumumkan bahwa Syarana Mual berupaya menyusun misi persaudaraan ke Maluku Selatan. Misi ini diketuai oleh Tupamahu dengan anggota 5 orang. Sementara berita dari Ambon mengabarkan bahwa pihak RMS menolak misi manapun. RMS akan menerima misi yang memakai kapal milik Amerika atau Belanda.[47]

Upaya untuk mempertahankan proklamasi di Maluku mulai dilakukan. Pada 14 Juli 1950, jam 09.00 waktu Maluku, Agkatan Darat RIS dengan berapa kapal perang Angkatan Laut RIS mendarat di Pulau Buru. Kemudian pada 16 Juli 1950, jam 08.30 waktu Maluku pasukan RIS memasuki kota Namlea maka tersebarlah pasukan di pulau Buru. Dalam operasi tersebut sebagian pasukan pemberontak tertangkap dan melalui penerangan, mereka mulai sadar atas perjuangannya selama itu. Sementara rakyat dikabarkan menyambut gembira kedatangan pasukan RIS.[48]

Dalam siaran radio di Makasar pada 20 Juli 1950 diberitakan bahwa pada 19 Juli 1950 Dr. G. Rehatta diangkat sebagai kepala daerah Maluku Selatan. Kemudian di surat kabar lainnya, *Mimbar Umum Medan* (24 Juli 1950) diinformasikan bahwa APRIS berhasil mendarat di pulau Buru, Kei, Aru, Seram sehingga Somukil dan kelompoknya terkepung. Akibat dari terkepungnya, maka Somokil diberitakan melarikan diri dan diduga ke Irian Barat. [49]

Pemimpin operasi militer di Maluku dipimpin oleh letkol Slamet Riyadi sebagai komandan divisi 17 Agustus di Solo. Pada 23 September 1950 pengiriman TNI ke wilayah Namlea pulau Buru. Tiga kapal KPM,

yaitu Waibalong, Waikelo menanti di Teluk Namlea untuk mengangkut pasukan TNI ke Ambon. Sementara di sebelah timur Ambon didaratkan 5 batalyon TNI. Upaya pengiriman pasukan ini mempersiapkan penyerangan ke Ambon.

Di bagian lain di Maluku, yaitu di Maluku Tenggara, tepatnya di Tual ibukota kepulauan Kei, sehari berlayar dari Banda, terdapat pula partai kebangsaan seperti Partai Islam Umum (PIU) yang dipengaruhi oleh para saudagar Arab, yang cenderung mempropogandakan tentang Negara RI akan menjadi Negara Islam dan sang merah putih adalah bendera Islam dan TNI adalah Islam mempengaruhi perkembangan kebangsaan penduduk di Kei yang beragama Kristen di mana terdapat pula pengikut PIM. Sesudah RMS didirikan maka di Kei terjadi pula pertentangan tajam antara kaum Islam dan Kristen yang akhirnya sering mengkaitkan Nasrani Protestan dengan agama Ambon. Situasi di Kei mulai berubah setelah kehadiran perahu dari Dobo yang menginformasikan datangnya tentara APRIS di Tual pada Juli 1950 untuk memulihkan keamanan di Maluku Tenggara. Kehadiran pasukan di Tual untuk meyakinkan adanya kebersamaan perkumpulan pemuda, baik dari Islam, Protestan maupun Katolik. Salah satu pemuda bernama Fogi Renwarin dan kawan-kawannya yang turut berjuang mempertahankan proklamasi 17 Agustus di Tual Maluku tenggara.[50]

Di wilayah lain, yaitu Maluku Utara, terdapat gerakan yang mendukung proklamasi Indonesia yang diawali dengan aksi kaum muda KNIL yang akhirnya sadar untuk melakukan perjuangan menentang penjajahan. Angkatan muda KNIL di Halmahera, misalnya, terdiri dari kelompok bintara Salendu dan kawan-kawan yang pernah ditahan Jepang di Rabaul dan di Filipina, berusaha melakukan aksi untuk menentang penjajah dengan melakukan gerilya. Pada 1943 mereka sebanyak 30 orang dibawa Jepang ke Morotai melarikan diri dan bergabung dengan teman-teman lain yang disusupkan dari Australia yang melancarkan gerilya melawan Jepang.[51]

Pada 1944, ketika Amerika merebut Morotai dan Halmahera, panglima sekutu memerintahkan para gerilya untuk melaporkan diri kepada kepala-kepala kampung. Ternyata, ketika mereka hendak melaporkan diri kepada komandan Asutralia, mereka justru ditangkap dan diserahkan kepada Belanda untuk dijadikan "tentara polisi kolonial". Di Morotai, didirikan LOC (Leger Organisatie Corps) yang

berasal dari bekas KNIL-interniran, *Heiho*, *Romusha* dan lainnya yang khusus dilatih menjadi militer penjajah. Angota LOC ini umumnya berasal dari para pemuda yang tidak mengetahui perkembangan perjuangan nasional yang terjadi di Jawa.[52]

Ketika berita proklamasi diketahui oleh salah satu petugas pada dinas perhubungan radio, Sersan Mayor Mauaya, maka berita proklamasi langsung diteruskan pada kawan-kawannya. Akibatnya, kelompok bintara seperti Mangundap, Lolain, dan Salendu meminta pandangan dari beberapa opsir NICA. Pada awalnya kelompok NICA ini mendukung aksi ini, namun meragukan keberhasil para bintara ini karena disadari upaya ini jauh dari pusat perjuangan di Jawa. Namun demikian, niat para bintara ini tetap melakukan aksi dengan maksud menguasai seluruh kesatuan.

Hanya saja, rencana ini akhirnya diketahui dinas rahasia, maka mereka semua diangkut ke kapal Ophir ke Jakarta. Upaya menolak bekerja tetap dilakukan sehingga yang bekerja hanya kelasi dari Cina dan Autralia. Keinginan kelompok untuk melakukan aksi di kapal akhirnya tidak berhasil karena, kapal Ophir yang sebenarnya bertujuan ke Jakarta akhirnya menuju ke Makasar. Hanya sangat disayangkan karena kapal ini tidak dapat ke Makasar karena pada saat itu sudah dikuasai Indonesia. Kapal tidak dapat ke Makasar, namun rencana mengadakan pemberontakan tetap direncanakan.[53]

9.5. Orang Irian Barat dan Berita Proklamasi 17 Agustus 1945

Kesadaran berpolitik orang Irian Barat secara perlahan tumbuh akibat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan oleh Pemerintah Belanda, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sementara kesadaran menjadi Indoensia di antara orang Irian Barat baru mulai bersemai pada akhir 1945, ketika J.P.K. Van Eechoud di Irian Barat merekrut beberapa orang Indonesia sebagai pegawai pemerintah serta beberapa tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan oleh Pemerintah Belanda di Batavia ke Irian Barat pada pertengahan 1946. Memang diakui bahwa pada 1935 Moh. Hatta dan Syarir pernah dibuang di Boven Digul, namun pemahaman orang Irian Barat sebagai bagian dari NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 baru tumbuh justru di Hollandia dan bukan di Boven Digul. Hal ini tampak pada berbagai aktivitas politik yang berlangsung selama periode 1945-49 dalam konteks perjuangan mempertahankan

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Irian Barat. Dalam periode ini aktivitas kegiatan politik umumnya baru terbatas di bagian utara seperti di Hollandia, Biak, Serui, Fak-Fak dan Sorong.

Dalam membenahi administrasi di Irian Barat, Pemerintah Belanda menggunakan tenaga asal Indonesia antara lain Soegoro Atmoprasodjo. Lahir di Yogyakarta pada 23 Oktober 1923, Soegoro adalah salah seorang bekas tawanan Digul yang ditunjuk oleh Van Eechoud menjadi pengajar dan sekaligus menjabat direktur asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di kota Nica (sekarang Kampung Harapan di Jayapura).[54] Di kota Nica, terdapat 12 barak yang, selain digunakan sebagai asrama, juga digunakan untuk menyelenggarakan kursus kilat pamong praja, kursus mantri, dan Sekolah Sambung untuk anak laki-laki (Jongens Vervolgschool=JVVS). Orang Irian Barat pertama yang mengikuti pendidikan di kota Nica ini antara lain Markus Kaisiepo, Lukas Rumkorem, Lisias Simbiak, Frans Kaisiepo, Nikolas Youwe, Marten Indey, Cornelis Krey, Silas Papare, Baldus, Mofu, O. Manupapami dan Herman Wayoi.

Soegoro Atmoprasodjo memperkenalkan sejarah dan budaya "Indonesia" ke peserta kursus. Corinus Krey menjelaskan bahwa Soegoro Atmoprasodjo merupakan orang pertama yang mengajarkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di kota Nica dengan cara antara lain mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.[55]

Untuk meyakinkan para siswa tentang ide keindonesiaan, Soegoro Atmoprasodjo membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini bertujuan bukan hanya untuk memotivasi siswa mudah mengikuti pelajaran, tetapi juga menjadikan ruang bagi mereka mendiskusikan berbagai masalah politik yang terjadi, baik di Irian Barat maupun Indonesia lainnya.[56] Marcus Kaisiepo mendengar berita proklamasi melalui radio di kota Nica, dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu bagi mereka di Irian Barat. Dalam diskusi tersebut, Silas Papare meminta Marcus Kaisiepo untuk menginformasikan hal ini pada Van Eechoud bahwa orang Irian Barat tidak menghendaki apa pun dengan adanya proklamasi tersebut.[57]

Di berbagai kesempatan, Soegoro selalu berusaha meyakinkan siswa di kota Nica bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dalam proses pengenalan itu, Soegoro menggambarkan Indonesia

sebagai suatu bangsa yang juga memiliki keanekaragaman seperti halnya orang Irian Barat yang juga berasal dari suku yang berbeda. Pemahaman ini penting, menurut Soegoro, agar para siswa sadar bahwa walaupun terdapat berbagai perbedaan—baik suku, bahasa, budaya maupun agama—bukanlah halangan untuk membangun hubungan dengan masyarakat lainnya di luar Irian Barat. Soegoro juga berusaha menekankan siswanya bahwa bangsa Indonesia yang juga terdiri dari berbagai suku memerlukan persatuan di antara sesama bangsa termasuk di Irian Barat dalam menentang Belanda. [58]

Soegoro akhirnya berusaha menggunakan berbagai strategi untuk dapat mewujudkan keinginannya menentang Pemerintah Belanda di Hollandia. Upaya dimulai dengan menjumpai ratusan tentara Jepang (*Heiho*) khususnya yang berasal dari luar Irian Barat, yaitu Jawa dan Sumatra, yang berada di Hollandia. Pada masa itu terdapat sejumlah besar orang Indonesia di Irian Barat yang didatangkan oleh tentara Jepang sebagai buruh. Sebagian dari mereka dibebaskan dan sebagian lagi dipekerjakan sebagai tentara Hindia-Belanda.[59] Sesudah mengadakan kontak dengan tentara *Heiho* asal Indonesia, Soegoro menyampaikan rencananya menentang pemerintah Belanda pada 15 dan 16 Desember 1945.[60] Soegoro juga melakukan mobilisasi dan merencanakan pemberontakan dengan melibatkan siswa di kota Nica dan anggota batalion Irian Barat. Rencana Soegoro ternyata mengalami kegagalan, akibatnya 250 anggota *Heiho* asal Jawa dan Sumatera ditahan sementara Soegoro dipenjarakan di Hollandia. [61]

Soegoro Atmoprasodjo tetap bersikeras melalukan aksi sekalipun berada dalam penjara. Pada Juli 1946 dan Januari 1947, Soegoro berencana melalukan dua aksi yang dikoordinirnya dari dalam penjara. Aksi yang direncanakan ini melibatkan para pemuda di luar penjara seperti Marthen Indey, Corinus Krey, Bastian Tauran dan sebelas orang Ambon yang profesinya adalah tukang reparasi, lima tentara KNIL, seorang anggota batalion Irian Barat dan tiga puluh orang pemuda Irian Barat yang berasal dari daerah di sekitar danau Sentani. Sementara peralatan amunisi akan dipersiapakan tentara KNIL. Rencana aksi ini akan dimulai dengan membebaskan Soegoro Atmoprasodjo dan tahanan lainnya dari penjara dan dengan didukung oleh sejumlah polisi dari barak dan segera menyerbu dan membunuh seluruh orang Eropa di Hollandia. Rencana ini diharapkan akan melibatkan kurang lebih 180 tentara KNIL.

Ternyata rencana ini kembali mengalami kegagalan karena terdapat anggota batalion yang menginformasikan pada pemerintah tentang aksi ini. Isu yang disampaikan kepada pemerintah adalah adanya upaya tentara KNIL yang beragama Islam hendak menyerang seluruh masyarakat di Hollandia yang beragama Kristen pada hari raya Natal. Informasi ini mengakibatkan pemerintah Belanda segera menangkap dan menginterogasi kurang lebih 25 orang termasuk Soegoro Atmoprasodjo, Sutan Hamid Siregar, Aran Panjaitan dan Corinus Krey.[62] Setelah mendapat keputusan dari pemerintah Batavia pada 11 Desember 1947, maka beberapa pelaku lainnya dibebaskan sementara Willem Nottan (asal Tual, Kei) ditahan 10 tahun, dan Muhamad Joesoef 8 tahun ditahan di penjara Hollandia. Soegoro Atmoprasodjo diberi hukuman 14 tahun dan ditahan di Hollandia dan rencana dipindahkan ke Tanah Merah (Merauke). Namun Nottan dan Soegoro Atmoprasodjo bersama lima tahanan lainnya akhirnya dapat melarikan diri dari penjara Merauke melalui Australia Nieuw Guinea (PNG) pada 5 April 1947 dan kemudian ke Australia.[63] Informasi tentang pelarian ini rupanya diketahui dari Muhamad Bondan, salah seorang bekas tawanan Digul yang berada di Melbourne yang dalam isi suratnya ke Usman Sastroamidjojo pada 1 September 1947 menginformasikan bahwa dia mendapat surat dari Soegoro Atmoprasodjo. Dalam suratnya Soegoro Atmoprasodjo ke Bondan, dikabarkan bahwa dia dan tujuh orang lainnya melarikan diri dari penjara Hollandia menuju PNG.[64]

Pemerintah Belanda di Irian Barat mengakui adanya rencana pemberontakan ini. Menurut laporan J.C. Noorlander kepada pemerintah Belanda di Batavia, telah terjadi tiga kali rencana pemberontakan sejak Maret hingga April 1947. Rencana pemberontakan ini disebabkan oleh adanya kerja sama antara berbagai lembaga khususnya polisi dan tentara serta para guru di Sekolah Pamong Praja. Marthen Indey, Willem Inuri, dan Patahan dianggap sebagai penanggung jawab utama. Menurut pejabat pemerintah Belanda J.C Noorlander, munculnya berbagai rencana aksi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah NICA yang membawa dan menempatkan begitu banyak para bekas tawanan Digul di berbagai pemerintahan. Kehadiran mereka berhasil membuat propoganda pada penduduk Irian Barat. Laporan ini juga menegaskan bahwa bekas tawanan Digul yang sangat berperan adalah Soegoro Atmoprasodjo dan Poedjosoebroto.[65]

Tindakan Soegoro Atmoprasodjo untuk menentang pemerintah Belanda di atas ternyata menimbulkan kekecewaan bagi Van Eechoud. Selama ini Soegoro Atmoprasodjo telah dianggap sebagai anak emas. Karena itu, menurut Van Eechoud, satu kesalahan menunjuk Soegoro Atmoprasodjo sebagai pengajar dan direktur pada Sekolah Pamong Praja di kota Nica. Van Eechoud mengakui bahwa kebanyakan yang melakukan aktivitas politik adalah penduduk non-Irian Barat yang dikoordinir oleh Soegoro Atmoprasodjo bersama repatriasi kelompok *Heiho* asal Jawa, Sumatra dan kelompok lainnya asal Ternate dan Tidore.[66]

9.6. Gerungan dan Pembentukan Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Hollandia.

Ketika J. Gerungan ditunjuk sebagai kepala Rumah Sakit pemerintah di Hollandia Binnen oleh Van Eechoud, J. Gerungan mulai memprakarsai pendirian KIM pada 16 November 1946. J. Gerungan adalah seorang dokter wanita yang sebelumnya bekerja pada beberapa rumah sakit di Indonesia seperti Centraal Burgelijk Ziekenhuis (CBZ) Surabaya pada 1937, rumah sakit Zending Immanuel di Bandung pada 1941, Rumah Sakit Gereja di Minahasa di Sonder 1945 dan Sanatorium rumah sakit Noongan di Minahasa dan akhirnya dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Irian Barat. Pada November hingga Maret 1945, J. Gerungan ditugaskan di rumah sakit umum kota Nica Sentani dan pada Maret 1945 hingga Agustus 1946 ditugaskan di rumah sakit Merauke. Kemudian pada Agustus 1946 hingga April 1947 bertugas di rumah sakit Umum di Hollandia Binnen(Abepura). Kehadiran J. Gerungan di Irian Barat dimaksudkan untuk mengurusi pasien-pasien bekas tentara KNIL yang kembali dari Rabaul, Tawao dan Guam (Wellikin Flassy, 1984).

Corinus Krey asal Biak dan perah mengikuti pendidikan di kota Nica pada 1945 menjelaskan bahwa untuk mendirikan KIM, dirinya bersama dengan Gerungan memohon ijin pada HPB setempat, yaitu W. J. H. Kouwenhoven.[67] Setelah ijin diberikan, maka segera didirikan KIM. KIM adalah organisasi politik pertama di Irian Barat yang didirikan di Hollandia Binnen dengan tujuan utama untuk memperjuangkan Indonesia merdeka di Irian Barat. Keanggotaan KIM berasal dari berbagai suku, antara lain Poedjasoebrata, asal Jawa dan bekas asisten HPB yang saat itu bertugas di dinas penerangan (RVD; Rijks Voorlichtingdients), Corinus Krey, salah seorang mantri di rumah sakit

Hollandia Binnen, Petrus Wettebossy asal Bintuni yang juga bertugas sebagai mantri di rumah sakit Hollandia Binnen, Marthen Indey Irian Barat asal Doromena (Sentani) yang pada saat itu sebagai pembantu asisten *bestuur* di Arso,[68] Latuperrisa asal Ambon salah satu bekas pengajar di Sekolah Pamong Praja, Pani Nasution asal Sumatra dan Bastian Tauran.[69] Pendirian KIM ini dihadiri sekitar lima puluh orang dan mereka umumnya mendukung program yang dicanangkan KIM. Menjelang akhir Nopember 1946, J. Gerungan dipindahkan ke Merauke maka kepengurusan KIM dipercayakan pada Marthen Indey.[70]

Pada 11 Desember 1946, Van Eechoud mengundang para tokoh-tokoh terkemuka Irian Barat, yaitu Corinus Krey, Spener Malibella asal Sorong, Alex Beratoboei asal Japen, dan Petrus Wetebossy. Tokoh Irian Barat Sementara yang berasal dari Hollandia dan sekitarnya adalah Nicolaas Jouwe dan Lucas Jouwe asal Kayu Pulau, Mallo asal Skou, Barnabas Jufuay asal Depapre, Andreas Mano asal Tobati dan Marthin Indey asal Doromena.[71] Pertemuan ini dimaksud untuk menjelaskan status Irian Barat dalam Linggajati.[72] Dalam penjelasan tersebut Van Eechoud menjelaskan dua pokok penting berkaitan dengan Linggajati, yaitu pertama Irian Barat akan mempunyai status khusus di luar Indonesia dan kedua menyangkut keputusan pemerintah Belanda untuk tidak mengirim wakil asal Irian Barat dalam konferensi Denpasar di Bali pada Desember 1946 karena tidak ada wakil yang tepat untuk dikirim.[73]

Rupanya hasil pertemuan mengecewakan para tokoh pejuang asal Irian Barat, maka pada 13 Desember 1946, Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe mengirim surat protes kepada residen. Isi surat protes tersebut yaitu[74] :

1. Irian harus dimasukkan dalam federasi Indonesia sesuai dengan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke yang sebelumnya dikenal Nederlands Indies
2. Menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian dalam konferensi di Bali. Orang Irian mempunyai hak untuk berbicara di depan parleman Negara Indonesia Serikat.
3. Selama menjadi koloni Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah mengakui hak orang Irian dalam hal pemilihan, berpendapat dan mengajukan pokok pikiran.

Isi surat protes ini memperlihatkan sikap elit Irian Barat yang tidak menyetujui pandangan pemerintah Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia. Pada awalnya tampak sikap elit Irian Barat seperti Nicolaas Jouwe, Lukas Jouwe, Marthen Indey dan Corinus Krey sependapat untuk terus berjuang mendukung Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Dari himbauan yang ditujukan pada rakyat Irian Barat agar "mulai sekarang rakyat Irian Barat bangunlah dan capailah kemerdekaan Anda dalam persamaannya dengan Indonesia".[75]

Dukungan terhadap upaya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 di Papua mulai melemah dalam diri Nicolaas Jouwe ketika pemerintah Belanda menolak mengirim utusan Irian Barat di konperensi Denpasar. Dalam surat protes kepada Van Eechoud pada 13 Desember 1946 Nicolaas Jouwe dan kawan-kawan menyatakan sikap mereka menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian Barat dalam konferensi di Bali. Terdapat keinginan elit Irian Barat pada waktu itu untuk dapat hadir dan berbicara di konperensi Denpasar.

Keinginan orang Irian Barat untuk menghadiri konferensi ini tersirat dalam pernyataan Marthen Indey ketika ditanyai oleh panitia gabungan yang disebut Komisi Nieuw Guinea yang anggotanya terdiri dari wakil Belanda dan Indonesia pada 1950. Dalam menjawab salah satu pertanyaan dari komisi tersebut tentang siapa yang menjadi pemimpin pemberontakan, maka Marthen Indey menjawab bahwa "pada 1946 saya untuk pertama kali yang menjadi pemimpin pemberontakan dan saya tahu bahwa saudara saya Jouwe menghadiri konferensi Denpasar untuk memprotes keberlangsungan kolonialisme Belanda di Irian Barat. Bahwa mengapa sekarang saya tidak mengerti alasan apa yang menyebabkan Jouwe mengubah pemikirannya dan memilih di pihak Belanda".[76] Ternyata apa yang dibayangkan Marthen Indey ternyata tidak terjadi karena Nicolaas Jouwe tidak pernah dikirim ke Denpasar.

Dalam perkembangan kemudian, baik Nicolaas Jouwe maupun Lukas Jouwe berubah pendapat dan mendukung usulan residen agar Irian Barat tetap menjadi koloni Belanda. Menurut Courtouis, kedua tokoh ini mengadakan kegiatan yang sifatnya memihak pemerintah Belanda dan tidak bekerja sama dengan kelompok Marthen Indey.[77] Courtouis tidak dapat menjelaskan adanya perubahan sikap yang dilakukan baik oleh Nicolaas Jouwe maupun Lukas Jouwe di atas ini,

namun dapatlah disimpulkan bahwa perubahan sikap kedua Jouwe ini dikaitkan dengan ketidakpastian status Irian Barat dalam isi Linggajati. Sikap Van Eechoud dengan tegas menolak mengirim wakil asal Irian Barat di konferensi Denpasar.

9.7. Aktivitas KIM di Hollandia dan Daerah sekitarnya .

Dalam laporan ke pemerintah pusat di Batavia, W.J.H. Kouwenhoven menegaskan bahwa, aktivitas KIM semakin luas ketika di bawah kepemimpinan Marthen Indey dan Corinus Krey. Bahkan, kedua tokoh ini dianggap mempunyai kontribusi besar pada masyarakat Hollandia dan sekitarnya dalam mensosialisasikan isi Linggajati dan mengupayakan Irian Barat masuk ke dalam federasi Indonesia. Kedua tokoh ini pun terus melakukan pertemuan internal KIM maupun dengan tokoh-tokoh Irian Barat lain. Pertemuan KIM yang diselenggarakan umumnya berlangsung antara lain di rumah kediaman Ondoafi Kaleb Hamadi yang terletak di teluk Yotefa dan yang juga sering dihadiri oleh salah satu pendeta asal kampung Kayu Pulau.[78]

Untuk memperoleh dukungan dari penduduk di sekitar Hollandia, Corinus Krey yang menjabat sebagai sekretaris KIM mengadakan pertemuan dan membuat edaran. Edaran-edaran tersebut kemudian ditandatangani oleh Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe dan dikirim ke distrik-distrik. Dalam edaran itu disampaikan hasil pertemuan dengan Residen Van Eechoud pada 11 Desember 1946 yang isinya tidak dikirimnya wakil dari Irian Barat ke Denpasar dan Irian Barat akan dipisahkan dari Indonesia serta Irian Barat akan tetap menjadi koloni Belanda.

Edaran-edaran ini kemudian dikirim melalui telegram ke Gubernur Jendral, Komisi Pemerintahan Umum Borneo, Pemerintah Timur Besar, Menteri Penerangan Republik Indonesia, RVD Makasar, Dewan Maloekoe Selatan Ambon, Dewan Maloekoe Oetara Ternate, Pupella, Nadjamoedin, Daeng Malewa dan lain-lain di Denpasar dan penduduk lainnya di Biak dan daerah-daerah lainnya di Irian Barat. Untuk dapat mengirim edaran tersebut maka KIM berupaya menggalang dana dengan mengedarkan daftar sumbangan ke kampung-kampung di sekitar Hollandia. [79]

J.W.N. Courtouis yang menjabat sebagai *controleur* di Hollandia menjelaskan bahwa ketika mengadakan perjalanan dinasnya ke distrik Nimboran, dia menemukan selebaran dari KIM dan daftar pungutan uang. Selebaran ini disampaikan oleh para *korano* namun menurut Courtouis, masyarakat umumnya menolak selebaran tersebut karena mereka tidak mengenal pembuat edaran dan KIM.[80]

Kegiatan lainnya yang dilakukan pengurus KIM adalah mengadakan pertemuan rahasia pada 20 Desember dengan para *korano* di sekitar Hollandia sekitar distrik Tobati, Enggros, Nafri, Skouw, Demta, Nimbokrang, Nimboran dan Sentani.[81] Dalam pertemuan yang diselenggarakan di rumahnya, Marthen Indey menghimbau kepada pendukungnnya agar jangan takut untuk melakukan aksi karena terdapat dukungan dari tentara KNIL dan polisi. Dalam pertemuan ini salah satu peserta rapat Samuel Tamaela asal Ambon menegaskan bahwa hanya terdapat tiga puluh orang Eropa, sementara Corinus Krey menambahkan bahwa apabila penyerangan terhadap orang Eropa berhasil maka bendera merah putih akan segera dinaikkan dan Irian barat tidak akan menjadi daerah kolonisasi. Maka Soegoro akan ditunjuk untuk menjadi residen dan Kaleb Hamadi akan menjadi Raja dari Tobati hingga Demta sementara Marthen Indey akan menjadi pemimpin Irian Barat. [82]

Kemudian pada 27 Desember 1946, diadakan pertemuan di rumah kepala distrik Tobati yaitu Josef di kampung Enggros. Pertemuan ini dihadiri oleh Josef, Demena calon kepala distrik, agen polisi Sahari dari Kayu Pulau, agen polisi Hanasby dari kampung Tobati, dan beberapa orang Ambon, serta para pendeta dan guru dari berbagai kampung termasuk Marthen Indey dan Corinus Krey. Setelah kebaktian, beberapa orang hadir di rumah Pieter salah seorang guru dari kampung Enggros untuk acara makan bersama. Namun acara makan bersama berubah menjadi pertemuan politik, di mana pertemuan diawali dengan pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok Linggajati dan keputusan pemerintah Belanda yang disampaikan oleh residen pada 11 desember 1946. Sesudah pembacaan butir-butir Linggajati, diedarkan daftar pertanyaan bagi masyarakat yang mendukung KIM. Dari pertemuan tersebut diperoleh data bahwa kampung Tobati dan Enggros mendukung KIM sementara kampung Nafri masih ragu sedangkan Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau tidak memberikan pernyataan. [83]

Aktivitas KIM terus berlangsung dengan dukungan dari assistent *bestuur* Tobati yang bernama Josef. Josef tidak pernah melaporkan pertemuan yang dilakukan Corinus Krey dan Marthen Indey kepada pemerintah. Pada 30 Desember malam 1946, Josef bahkan menyelenggarakan pertemuan dengan semua *korano* di Tobati. Setelah membahas permasalahan di kampung-kampung khususnya menyangkut gaji kuli yang terlalu rendah, pada kesempatan itu juga disampaikan keberadaan KIM dan aktifitasnya. Pertemuan ini diprakarsai oleh Marthen Indey untuk membicarakan hal–hal yang berkaitan dengan pertemuan 27 Desember lalu. Kaleb Hamadi sebagai adalah satu pejabat *korano* hadir dalam pertemuan tersebut. Kaleb Hamadi adalah orang kepercayaan Marthen Indey dan Corinus Krey dan selalu hadir di setiap kegiatan KIM.[84]

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan KIM, terdapat tiga kampung yang tidak mendukung, yaitu Kayu Pulau, Kayu Batu dan Skou. Di kampung-kampung tersebut, masyarakat cenderung mendukung sikap Nicolaas Jouwe dan menolak kehadiran Corinus Krey dan Marthen Indey serta aktivitas KIM. Sementara tiga kampung lainnya, yaitu Tobati, Enggros dan Nafri memperlihatkan sikap yang cenderung mendukung KIM. Menurut Courtouis, ada tiga faktor penyebab dukungan dari rakyat di tiga kampung terhadap KIM, yaitu: *pertama*; faktor jarak yang dekat dengan pusat kota Hollandia khususnya wilayah Base G yang merupakan pusat Sekolah Polisi yang memudahkan propoganda KIM menjangkau ketiga kampung tersebut. *Kedua* kedudukan keluarga ondoafi di Tobati, Hamadi dan di Enggros yang adalah marga Uyo yang menempati posisi penting di kampung sehingga mempengaruhi berkembangnya KIM. *Ketiga,* Asisten Bestuur Josef yang merupakan pegawai pemerintah turut mendukung KIM.[85]

Sementara di daerah Sentani, rakyat telah mengetahui adanya pengaruh Soegoro, Marthen Indey dan Corinus Krey dan juga menyangkut ketidakhadiran wakil asal Irian Barat di Denpasar. Hal ini terlihat ketika ditemukannya edaran yang ditemukan di Ifaar, Assey Besar dan Dobokaware. Namun rakyat di kampung-kampung tersebut tidak menanggapi edaran tersebut. Ketika Marthen Indey cuti di Ambon, Corinus Krey terus melakukan propoganda di Ifaar dan Ayapo agar Irian Barat harus masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dari berbagai upaya yang dilakukan ini ternyata banyak *korano* di daerah Sentani menolak propaganda Corinus Krey.[86]

Tidak semua pegawai distrik mendukung KIM. Salah satu pegawai pemerintah adalah Daniel Jouwe, salah seorang asisten *bestuur* dari distrik Ormu. Pada 2 Januari 1947, HPB Daniel Jouwe menemukaan surat edaran yang dikirim oleh pengurus KIM. Dalam surat tersebut dihimbau agar para *korano* dan pimpinan di kampung segera mengedarkan edaran dari KIM ke masyarakat. Daniel Jouwe tidak terpengaruh oleh edaran itu dan dengan tegas menentang oknum yang mengedarkan edaran tersebut. Daniel Jouwe mengatakan bahwa belum saatnya Irian Barat merdeka sehingga Irian Barat harus tetap dibawah kekuasaan Belanda.[87] Daniel Jouwe selanjutnya melaporkan kejadian ini kepada residen. Kemudian, dalam perjalanan dari Ormu ke Kota baru, Daniel Jouwe menghimbau rakyat agar tidak terlibat dalam kegiatan KIM. Sikap Daniel Jouwe ini didukung oleh Nicolaas Jouwe dan Lukas Jouwe.[88]

Sementara di Depapre, asisten *bestuur* Mallo yang sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan Van Eechoud, yang telah memahami materi yang dipropoganda itu, cenderung memilih untuk mengikuti perintah residen. Sementara Barnabas Yufuai, salah seorang guru yang pernah mengikuti kursus Pamong Praja di kota Nica dan pernah menghadiri pertemuan dengan Van Eechoud pada 11 Desember 1946, dapat memahami materi propoganda tersebut dan kemudian secara obyektif menjelaskan kepada rakyat. Namun, pada waktu itu telah terjadi gerakan Simson yang begitu hebat di Tanah Merah, maka sebagian besar rakyat di Depapre tidak mendukung KIM.[89]

Kemudian, pada 2 Januari 1947, di Hollandia diadakan rapat di rumah Marthen Indey yang dihadiri oleh Corinus Krey, Kaleb Hamadi sebagai Korano dari kampung Tobati dan beberapa *korano* dan *ondoafi* serta 30 orang lainnya.[90] Materi yang dibicarakan adalah rencana aksi pada 4 Januari malam untuk menangkap dan membunuh seluruh orang Eropa di Hollandia. Kemudian, pada 4 Januari jam 8 malam, berlangsung pula rapat di kediaman Kaleb Hamadi di kampung Tobati. Yang menghadiri rapat tersebut adalah Corinus Krey, Marthen Indey, Kaleb Hamadi, guru Laurens Mano dan sebagian masyarakat dari kampung Tobati, Enggros dan Nafri. Dalam pertemuan ini, Malo dan Daniel Jouwe dinilai juga mendukung aksi ini termasuk Fakdawer seorang polisi asal Biak, Petrus Wetebossy mantan perawat dan Demena. Menurut rencana, setelah penyerangan berhasil maka akan dikibarkan bendera merah putih. Dalam rapat tersebut dihimbau pula

apabila ada masyarakat yang tidak mengikuti perintah maka akan dibunuh. Diharapkan pada 1 Januari 1949, pemerintah Belanda akan meninggalkan Irian Barat sehingga tidak diperlukan berbagai aksi lagi. Kemudian pada 31 Desember 1946 akan dilakukan aksi membebaskan Soegoro Atmoprasodjo dan tahanan lainnya dari penjara.[91]

Menurut inspektur polisi G. Eenkhoorn KNIL, batalion Irian Barat dan polisi asal Indonesia yang dianggap terlibat dalam rapat 4 Januari adalah Marthen Indey, Corinus Krey, Bastian Tauran asal Seram, 11 ahli mesin asal Ambon, lima anggota KNIL asal Ambon, seorang anggota batalion Irian Barat dan 30 orang Irian Barat. Perlengkapan senjata dan amunisi akan disiapkan oleh anggota KNIL. Namun, aksi ini gagal dan segera diadakan penangkapan terhadap beberapa orang yang dianggap terlibat.[92] Mereka yang terlibat yaitu Marthen Indey sebagai kepala pos polisi di Hollandia ditahan pada 1 April 1947 dan diberi sanksi adminsitrasi, Corinus Krey ditahan pada 7 April 1947, agen polisi Johanis Fakdawer, CHBA (Candidaat Hulp Bestuur-assitent) Lukas Jouwe ditahan pada 24 Mei dan dibebaskan pada 3 Nopember, Eli Uyo *korano* dari Nafri ditangkap, Bastian Tauran, Petrus Wetebossy guru pada Sekolah Sambung khusus laki-laki (JVVS: Jongen Vervolgschool) di Yoka, Andreas Demena, dan Alex Manuhutu.[93]

Pada awal Januari 1947, Corinus Krey akhirnya diberhentikan dari rumah sakit dan akan dikirim ke Numfor, sementara Marthen Indey ditahan di Ambon. Keduanya dipindahkan ke Hollandia dan ditahan hingga 1948 bersama pendukung Indonesia.[94]

Dengan penangkapan para penggerak dan pendukung KIM, maka kegiatan KIM mengalami kemerosotan terutama setelah dipindahkannya Gerungan ke Ambon pada Maret 1947. Kepindahan Gerungan ke Ambon menurut Drooglever bukanlah atas kehendak Van Eechoud namun Drooglever berkesimpulan bahwa kepergian Gerungan merupakan hal yang tepat bagi Van Eechoud karena kehadirannya menyebabkan banyak orang Irian Barat mulai berani mengambil sikap berbeda dengan kebijakannya.[95]

Walaupun KIM akhirnya mengalami kemerosotan, kehadiran KIM sangat penting dalam mempengaruhi dan membentuk kelompok elit Irian Barat di Hollandia dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas politik. Peran KIM sangat besar pula dalam mensosialisasikan isi Linggajati bagi rakyat di Hollandia. Drooglever mengakui bahwa dalam

waktu singkat KIM dapat berkembang dan hal ini sangat dipengaruhi oleh peran Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe. Bahkan Drooglever menegaskan bahwa hampir sekitar seratus lima puluh pendukung hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan KIM (Drooglever, 2010). Begitu pula dengan Penders yang juga menyatakan bahwa kehadiran KIM menyebabkan banyak orang Irian Barat di Hollandia hadir dalam setiap pertemuan menolak rencana Van Eechoud yang menolak mengirim wakil dari Irian Barat di Denpasar. Masyarakat yang berada di Hollandia tidak hanya mendukung propoganda KIM agar Irian Barat masuk dalam federasi Indonesia yang terdiri dari Sabang hingga Merauke, tapi juga memohon dikirimnya wakil dari Irian Barat dalam konferensi Denpasar.

9.8. Ratulangi dan Pembentukan PKII dan Aktivitas di Serui.

Pada pertengahan Juni 1946 pemerintah Belanda di Batavia mengasingkan G. S.S J. Ratulangi ke Serui. Ratulangi adalah gubernur Sulawesi yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945. Alasan diasingkan ke Serui karena pemerintahan NICA di Makasar beranggapan bahwa Ratulangi dan beberapa anggota Pusat Keselamatan Rakyat di Makasar akan menghambat upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan di Makasar (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985). Oleh karena itu, ia diasingkan bersama tujuh orang Indonesia lainnya yaitu, Lanto Daeng Pasewang, Intje Achmad Saleh, J. Latumahina, Mayor Suwarno, Zainal Abidin S.H, P.L. Tobing,W.S.T. Pondaag. Sebulan kemudian istri Ratulangi dengan para istri lainnya diberangkatkan ke Serui sehingga diperkirakan terdapat 40 orang.[96]

Pada awalnya, Ratulangi dan kelompoknya dilarang untuk mengadakan kontak dengan penduduk sekitar karena pemerintah diaganggap"kriminal" dan sangat berbahaya. Namun, pemerintah Belanda akhirnya memberi kebebasan kepada kelompok Ratulangi untuk mengadakan kontak dengan penduduk Serui. Hal ini semakin dipermudah dengan peran dari istrinya Yakop Thung Tjing Ek yaitu Martha Raweyai yang pada saat itu bertugas mengasuh anak dari keluarga Ratulangi. Menurut Benjamin Kajai, pada langkah awalnya Yakop Thung Tjing Ek salah seorang keturunan Cina asal Makasar, Benjamin Kajai dan Alwi Rahman secara rahasia bergantian mulai mendatangi tempat tinggal Ratulangi dan pada kesempatan itu

diketahui dengan jelas latar belakang kehadiran Ratulangi dan kawan-kawan di Serui. Kesempatan ini kemudian digunakan Ratulangi dan Latumahina untuk mengadakan kontak dengan orang Irian Barat di Serui. Kontak ini dipermudah dengan kehadiran sejumlah orang Indonesia lainnya yang sudah berada di sana sebelum kehadiran Ratulangi.[97] Mereka adalah para guru asal Ambon dan Ternate serta pedagang yang berasal dari Sumatra dan Makasar.

Dalam setiap petemuan, Ratulangi dan Latumahina menjelaskan kepada elit Irian Barat di Serui tentang keadaan yang terjadi di Jakarta dan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ratulangi juga meyakinkan para elit Serui bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ratulangi berupaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat di Serui untuk mempertahankan persatuan dari Sabang hingga Merauke.[98] Dalam beberapa pertemuan, akhirnya diambil kesepakatan untuk membentuk partai. Di antara orang Irian Barat yang sering berhubungan dengan Ratulangi adalah Silas Papare, Stefanus Rumbewas dan Benjamin Kajai serta Yakop Thung Tjing Ek,[99] dan Alwy Rahman yang berasal dari Sumatera.[100]

Setelah mendapat kebebasan dari pemerintah setempat, maka diadakan beberapa pertemuan internal antara Ratulangi dan Latumahina secara terbuka dengan beberapa elit Irian Barat di Serui. Kemudian pada 27 November 1946 Silas Papare, Benjamin Kajai, dan Alwy Rahman memohon surat ijin berapat pada Den Hertog yang menjabat sebagai kepala distrik setempat. Pada akhirnya kelompok ini mendapat ijin mendirikan partai politik di Serui namun kelompok Ratulangi diperingatkan oleh pemerintah untuk tidak terlibat jauh dalam kegiatan PKII.[101] Maka pada 28 Nopember 1946 diadakan pertemuan dengan sekelompok elit di Serui untuk membentuk PKII. Pada 29 November 1946, bertempat di gedung Sekolah Rakyat di Serui Kota, didirikanlah PKII. Ratulangi terpilih sebagai pemimpin umum.[102]

PKII sebagai organisasi bertujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Serui dan mempromosikan perjuangan Indonesia merdeka di Serui dan di seluruh Irian Barat.[103] Keberadaan PKII di Serui diakui oleh pemerintah Belanda sebagai akibat dari peran Ratulangi dan Latumahina.[104] Kemudian, pada 23 Maret 1948, Ratulangi dan kawan-kawannya dibebaskan dari tahanan di Serui dan dipindahkan ke Yogyakarta.

Kehadiran Ratulangi menjadi tahapan penting bagi karir politik Silas Papare. Ratulangi telah memotivasi Silas Papare dan Elit Irian Barat di Serui untuk mengenal keindonesiaan.[105] Namun tidak kalah pentingnya adalah peran seorang Silas Papare. Dia adalah seorang perawat senior yang pernah bekerja pada perusahaan minyak Irian Barat di Sorong. Ketika itu, Papare dianggap mempunyai andil yang besar dalam melayani pasien yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang bekerja di Irian Barat Sorong. Silas Papare adalah tokoh yang sangat bertanggungjawab dalam tugasnya melayani para pasiennya di Irian Barat Sorong tanpa melihat asal usul pasiennya. Hal itu diungkapkan oleh Lammakah, salah seorang pekerja asal Buton yang bekerja di Irian Barat. Dalam suratnya yang dikirim dari Balikpapan tahun 1950 kepada Silas Papare di Yogyakarta, ia mengatakan bahwa Silas Papare telah merawatnya dengan baik sehingga dia bisa bebas dari penyakit matanya.[106]

Sebelum perang, Silas Papare juga mempunyai reputasi yang penting ketika membantu sekutu melawan Jepang. Dia dianugerahi penghargaan medali perunggu oleh menteri urusan luar negeri Belanda[107] dan surat penghargaan dari Dinas Intelijen Amerika Serikat.[108] Menurut pejabat Pemerintah Belanda di Hollandia, Courtouis, telah bertumbuh sikap anti-Indonesia dalam diri Silas Papare selama pendudukan Jepang. Hal ini terlihat ketika Silas Papare menolong kurang lebih 1.500 tentara Romusha di Inanwatan. Namun ia sering dicemohkan oleh orang Indonesia padahal Silas Papare telah menolong mereka. Pengalaman dengan orang Indonesia inilah yang membuat Silas Papare sangat anti *amberi* khususnya Indonesia.[109] Dengan didasarkan pada sikap anti-a*mberi* inilah maka Van Eechoud menolak Silas Papare dikirim ke Malino melainkan Frans Kaisiepo.[110]

Memang tidak begitu jelas apakah hubungan Ratulangi dengan Silas Papare di Serui mempengaruhi Pemerintah Belanda dalam hal ini Van Eechoud memutuskan untuk tidak mengirim Silas Papare di konferensi Malino. Atau keputusan Van Eechoud diambil sebelum kedatangan Ratulangi ke Serui karena dianggap bahwa Silas Papare memang sudah sangat anti-Indonesia. Kalau memang demikian, maka upaya apa yang dilakukan Ratulangi yang hanya dalam beberapa minggu dapat mentransformasikan ide keindonesiaan kepada Silas Papare? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Ratulangi dan kelompoknya tiba di Serui pada Juni 1946, sementara konferensi Malino

dimulai pada Juli 1946. Menurut Penders, perubahan sikap Papare yang dianggap anti-Indonesia dan kemudian menjadi pendukung Ratulangi disebabkan karena adanya kekecewaan Silas Papare terhadap keputusan pemerintah yang menolak dirinya menghadiri konferensi Malino dan karena kekecewaanya yang melihat begitu lambannya pertumbuhan sosial ekonomi pasca perang dibawah Pemerintah Belanda (Penders, 2002).

Sesudah perang, Silas Papare dipekerjakan di rumah sakit Hollandia. Di sinilah Silas Papare terlibat dalam berbagai diskusi menyangkut perkembangan tentang proklamasi Indonesia melalui radio dengan elit Irian Barat lainnya seperti Marcus Kaisiepo yang sedang mengikuti pendidikan singkat Pamong Praja. Dalam diskusi tersebut, seperti sudah dijelaskan di uraian sebelumnya, Silas Papare menunjukkan sikap bahwa orang Irian Barat tidak menghendaki apa pun dengan adanya proklamasi tersebut. Kemudian, pada Februari 1946, Silas Papare dikembalikan ke Serui dan bekerja di rumah sakit Kristen Serui.[111] Alasan kepulangannya ke Serui tidak disebutkan dalam berbagai sumber baik pemerintah maupun arsip pribadi.

9.9. Aktifas PKII di Serui dan Sekitarnya.

Sebagai akibat dari aktivitas PKII, beberapa pegawai pamong praja dihukum dan bahkan dipecat. Untuk meredam kegiatan ini, dikirim asisten *bestuur* asal Ambon untuk menempati kampung Waren dan Wonti. Pemecatan beberapa anggota PKII oleh pemerintah Belanda juga mengakibatkan pergantian susunan badan pengurus yang baru dengan Silas Papre sebagai ketua.[112]

Dengan perubahan struktur kepemimpinan ini, maka segera dibentuk PKII cabang di beberapa tempat di Serui. Diperkirakan sampai dengan 1948 anggota PKII di Serui mencapai 2. 000 orang.[113] Keanggotaan PKII melibatkan pegawai pemerintahan antara lain guru, pegawai di tingkat distrik dan kampung yang aktif berkampanye untuk kemerdekaan Indonesia.[114]

Perkembangan kesadaran politik di Serui pada 1948 menjadi isu penting bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menemukan bahwa akibat dari aktivitas PKII, masyarakat di Serui menjadi sadar akan pentingnya kemerdekaan Indonesia bagi Irian Barat. Lagerberg

mencatat bahwa PKII memperoleh dukungan dari berbagai kalangan di Serui dan Waropen.[115] Dampak dari PKII di Serui adalah bertambahnya dukungan masyarakat di luar Serui seperti di Sorong, Manokwari, dan Biak.[116]

Sebagai ketua PKII, Silas Papare kemudian berpendirian bahwa Irian Barat secara historis tidak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, dia tanpa henti memperjuangkan prinsip tersebut. Dia berpendapat bahwa sebelum proklamasi Indonesia, Irian Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Silas Papare berharap Indonesia akan membebaskan orang Irian Barat dari kolonialisme dan imperialisme dan membantu mereka untuk membangun Irian barat bersama Indonesia.[117] Dengan menerima fakta bahwa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, Silas Papare dan kelompoknya rela bekerja sama dengan masyarakat di luar Irian Barat menentang Belanda. Nasionalisme Indonesia yang dikenalkan Ratulangi mampu mengubah cara berpikir Silas Papare dan pendukungnya. Sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia termasuk Irian Barat tidak hanya mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun Irian Barat tetapi mereka mempunyai kesempatan yang lebih untuk menduduki posisi pada level pemerintahan yang lebih tinggi, yang tidak didapatkan selama pemerintahan Belanda. Silas Papare dan kelompoknya akhirnya melihat bahwa perbedaan suku antara orang Irian Barat dan Indonesia lainnya tidaklah merupakan isu penting.

Pada pertengahan 1948, terdapat upaya dari pemerintah Belanda di Serui untuk menghentikan aktivitas PKII. Pemerintah mulai mengawasi setiap gerakan yang dilakukan masyarakat pendukung PKII. Upaya ini dimulai dengan menahan dua pegawai administrasi yang dianggap terlibat dan mendukung PKII, yaitu Baldus Dumatubun dan Woriari. Alasan penahanan adalah bahwa kedua pegawai ini mengijinkan PKII melakukan kampanye di desa-desa. Kemudian pemerintah melakukan penangkapan terhadap dua guru asal Serui yaitu R. Mbaudadari dan B. Mangge.[118]

Pada 1948, Silas Papare akhirnya ditangkap oleh Pemerintah Belanda di Serui dan dikirim ke Penjara Hollandia karena dianggap menentang Pemerintah Belanda, tetapi kemudian dibebaskan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan peranannya selama

pendudukan sekutu.[119] Sesudah kembali ke Serui, Silas Papare tidak menghentikan kegiatannya menentang pemerintah Belanda.

Menjelang diselenggarakannya KMB, elit politik di Irian Barat berupaya untuk berpartisipasi menentukan masa depan Irian Barat, baik kelompok yang memihak Indonesia maupun kelompok yang mendukung Belanda. Melalui radio dan surat kabar, para elit politik di Irian Barat aktif mengikuti perkembangan khususnya menyangkut politik di Indonesia. Mereka merasa bebas mendiskusikan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masa depan daerah dan pandangan serta pilihan mereka.[120] Kedua kelompok ini masing-masing terus melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hasil akhir yang akan dicapai KMB. [121]

Walaupun mendapat tekanan ataupun penahanan dari Pemerintah Belanda, kelompok Elit Irian Barat yang mendukung Indonesia terus melakukan perjuangan. Elit politik Irian Barat di Serui seperti Silas Papare, Benjamin Kajai, Stevanus Rumbewas serta Alwy Rahman asal Medan berupaya mengadakan kontak dengan para pejuang di Yogyakarta. Pada 21 Juli 1949, terdapat radiogram yang menginginkan adanya perwakilan dari Irian Barat di Yogyakarta. Menindaklanjuti hal itu, pengurus PKII mengadakan rapat di Serui pada 21 Juli 1949 untuk memilih wakil Irian Barat. Berdasarkan rapat tersebut, dipilih dua orang yaitu Silas Papare dan Stefanus Rumbewas untuk diberangkatkan ke Jawa.[122] Namun, karena keterbatasan dana, hanya Silas Papare yang berangkat. Silas Papare berangkat ke Jawa pada 27 juli 1949 dengan dukungan dana dari para pengurus PKII dan pendukungnya. Salah satu penyumbang terbesar adalah salah seorang badan pengurus PKII, yakni Yakop Thung Tjing Ek yang menyumbangkan 400 gulden yang diperoleh dari kas perkumpulan Tiong Hoa di Serui.[123]

9.10. Petero Jandi dan Stefanus Josef pada Peristiwa 14 Maret 1948 di Biak.

Biak adalah salah satu derah di bagian utara Irian Barat yang sudah sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar Irian Barat. Andaya menjelaskan bahwa kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi migrasi orang Biak yang berada di sekitar teluk cenderawasih dan kepulauan Padaido di bagian timur Halmahera dan kepulauan Raja

Ampat.[124] Sementara kontak dengan bangsa barat, yaitu VOC, dimulai pada 1610 dan kemudian dengan masuknya agama Kristen di Biak pada 1908 dan bangsa Jepang pada 1942.

Sesudah Perang Dunia II, secara administratif Biak merupakan salah satu *onderafdeeling* dari *Afdeeling Noord* Nieuw Guinea. *Onderafdeeling* Biak terdiri dari distrik Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfoor. Biak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian utara Irian Barat berdekatan dengan Serui, mempunyai sumber daya alam yang terbatas namun jumlah penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan Sekutu, Biak menjadi tempat kedua sesudah Hollandia. Banyak penduduk asli Biak merasakan kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak seperti memperoleh makanan dan pakaian.

Pada September 1945, HBA (*Hulp Bestuur -Assistent*) Lukas Rumkorem membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas Rumkorem adalah bekas guru yang pernah mengikuti pendidikan pamong Praja di Hollandia. Courtouis menjelaskan bahwa Lukas Rumkorem pendiri Partai Politik Suara Rakyat yang bertujuan memajukan penduduk asli. Partai ini bertujuan pula untuk segera mengusir Belanda dan diserahkan ke Amerika Serikat.[125]

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dibuatlah surat kepada presiden Amerika Serikat Truman. Isinya menjelaskan bahwa penduduk tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Belanda yang menagih pajak sementara tidak memperlihatkan kemajuan dan pembangunan seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pendaratan sekutu. Lukas Rumkorem mengadakan rapat di Nusi pada September hingga Nopember 1945 dan pada Januari 1946 dilaksanakan pula di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan Lukas Rumkoren ini ternyata diketahui oleh HPB yang diinformasikan oleh beberapa orang asal Yapen. Dari orang asal Yapen tersebut diperoleh informasi tentang adanya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata api. Perkara ini tidak dilanjutkan dikarenakan HPB ini cuti sakit.[126] Namun, laporan ini akhirnya juga diketahui oleh residen sehingga Lukas Rumkorem dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai karena telah mengintimidasi rakyat.

Aktivitas Lukas Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada kepala distrik di Serui. Dalam suratnya itu, Lukas Rumkorem menyatakan bahwa "Bestuur2 anak Biak semoea soedah djatoe dalam boedjoekan

Belanda. Semoea telah balik poela kepada Belanda dan sekarang mereka soedah berdjalan bikin propoganda dengan pendoedoek."[127]

Berbagai tindakan yang dilakukan Lukas Rumkorem akhirnya juga disalahkan dengan tuduhan bahwa sebagai pegawai pemerintah Lukas Rumkorem telah beristri dua. Akibatnya Lukas Rumkorem ditahan pada pertengahan Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Hollandia sambil menunggu pengadilan.[128]

Menurut sumber yang lain, yaitu *Report of the committee New Guinea pada* 1950, Lukas Rumkorem adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) pada 7 Oktober 1945. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan komisi tersebut tentang PIM, Lukas Rumkorem menjelaskan alasan ditahan selama dua setengah tahun di penjara karena dituduh merencanakan membunuh Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo. Dalam wawancara dengan Hanoch Rumbrar, PIM yang didirikan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak, terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi kemerdekaan.

Namun dalam perkembangannya PIM tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena terdapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Partai ini akhirnya mendapat dukungan dari Corinus Krey setelah tiba di Biak dari Hollandia pada 7 Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan pertemuan di rumah kepala kampung Yenures yaitu David Rumaropen untuk mengadakan reorganisasi PIM.

Maka pada 5 Oktober 1949 diaktifkan kembali PIM di Bosnik di rumah kediaman Lukas Rumkorem, dengan ketua Lukas Rumkorem, Corinus Krey ditunjuk sebagai wakil ketua PIM, J. Tarumaselly sebagai penasehat sedangkan sekretarisnya adalah Petrus Warikar. Oleh karena kegiatan Lukas dianggap menentang Pemerintah Belanda maka Lukas Rumkorem ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia. Kehadiran PIM di Biak ini tampak dalam surat Inggamer sebagai angota PIM kepada Silas Papare pada 14 desember 1949.[129] Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan secara rahasia untuk menyebarluaskan upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah, maka Corinus dan kawan-kawannya ditahan dan dikirim ke penjara Hollandia dan bersama dengan tahanan-tahanan lain dari daerah-daerah, baik dari Irian Barat maupun non-Irian Barat yang

mendukung Indonesia di Irian Barat dipindahkan ke penjara Digul hingga 1957 barulah dibebaskan.

Bila mengacu pada *Report of the Committee New Guinea* 1950 yang menyatakan bahwa terdapat upaya mendukung proklamasi Indonesia di Biak dan ditahannya Lukas Rumkorem di penjara Hollandia, maka ketidakterlibatan orang Irian Barat di Biak bukanlah semata mata disebabkan oleh pergerakan *koreri* melainkan karena terdapat upaya menangkap pelaku-pelaku yang dianggap menentang Pemerintah Belanda.

Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi kontak secara intensif dengan Makasar di bidang politik, kehadiran Petero Jandi asal Makasar telah memperlihatkan bahwa secara tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan Makasar. Pada pertengahan 1947 Petero Jandi bekerja di dapur umum di pangkalan udara Biak. Namun, akibat minuman keras, maka Petero Jandi dipecat dan dikembalikan ke Makassar. Petero Jandi kembali lagi ke Biak pada Desember 1947.[130] Setelah mengadakan kontak dengan departemen sosial di Makasar, Petero Jandi memperoleh pekerjaan di Kamp NICA Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Josef yang juga merupakan pegawai kepercayaan de Bruijn. Kedekatan Stefanus Josef dengan de Bruijn berawal ketika de Bruijn bertugas sebagai pengawas di danau Wissel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Stefanus Josef bekerja dengan Jepang namun ketika kedatangan sekutu Stefanus Josef menjadi orang kepercayaan de Bruijn.

Sesudah perang, Stefanus Josef ditunjuk oleh de Bruijn sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Josef serumah dengan Petero Jandi setelah de Bruijn mendapat jaminan bahwa Petero Jandi adalah seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait, yang menjabat sebagai *bestuursassistent* di Biak, sedang berlibur di Ambon, Stefanus Josef ditunjuk sebagai *bestuursassistent* dan juga bertugas mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun, akibat dari pertemuannya dengan Petero Jandi, maka diadakanlah rencana untuk melakukan pemberontakan melawan Pemerintah Belanda di Biak.[131] Menurut keterangan dari Stefanus Josepf, Petero Jandi adalah seorang ektrimis yang yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya dikirim ke Biak. [132]

Hanya setahun di Biak, Petero Jandi dapat memobilisasi pemuda-pemuda di Biak. Stefanus Josef dan Petero Jandi berhasil mempengaruhi dua tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak yang bernama Hermanus Rumere dan seorang berasal Ambon yang bernama Watti. Stefanus Josef dan Watti memimpin penyerangan pada pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret 1948. Salah seorang tokoh penting dalam rencana penyerangan itu adalah Hanoch Rumbrar yang merupakan salah seorang juru tulis pamong praja di Korido dan bawahan langsung HPB yang juga dekat dengan Stefanus Josef.[133] Hanoch Rumbrar menjadi mediator antara Petero Jandi dan masyarakat. Sejak Januari hingga Februari, Hanoch Rumbrar ditugaskan untuk mengadakan kampanye di masyarakat dengan menyatakan bahwa *pertama*; dalam kaitan dengan kolonisasi, pemerintah Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang Irian Barat. *Kedua,* seluruh wilayah di kepulauan ini sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri sementara Irian Barat belum karena Belanda masih menginginkan mempertahankan kekuasaannya di sini. Selama pemerintahan Belanda masih di sini maka rakyat akan dipaksakan untuk membayar pajak.[134]

Sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret 1948, Petero Jandi bersama Stefanus Josef juga mengadakan propoganda di kampung-kampung, dengan mengunjungi beberapa keluarga untuk mendapat dukungan. Kampanye itu tentang perlunya perjuangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menentang Belanda. Dalam propoganda itu dikatakan bahwa apabila masyarakat tidak dapat dilepas dari Belanda maka Irian Barat tidak akan berdiri sendiri dan tidak akan pernah menjadi bagian dari "Republik Sukarno". Belanda akan menjadikan Irian Barat sebagai koloninya, sebagai salah satu propinsi dari negeri Belanda. Petero Jandi juga mencoba mengadakan pendekatan dengan beberapa kepala kampung di Biak, namun rakyat di kampung-kampung menolak untuk bekerja sama, bukan karena mereka pro-Belanda, melainkan karena rakyat masih mengalami trauma dengan peristiwa Manseren pada 1942-1943.[135] Keterlibatan dalam kegiatan PKII akan menimbulkan banyak resiko dan akan membangkitkan kembalinya gerakan Manseren Koreri.

Untuk memperkuat perlawanannya, Petero Jandi juga berupaya mencari dukungan dari PKII di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus Josef dan Petero Jandi pernah mengirim dua surat ke kelompok

Ratulangi khususnya kepada Saleh untuk menyampaikan rencana 14 Maret ini namun tidak pernah mendapat balasan. Namun terdapat telegram dari istri Saleh kepada Petero Jandi yang mengatakan "Toenggoe malam Djoemahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke Djokjakarta." Nampaknya, ada keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk bertemu dengan kelompok Ratulangi yang hendak kembali ke Jakarta melalui Biak. Namun sumber ini memberi kesimpulan bahwa kelompok Ratulangi seharusnya mengetahui aksi ini tetapi tidak terlibat di dalamnya.

Seminggu sebelum aksi ini dilaksanakan, de Bruijn sedang melakukan perjalanan dinas. Stefanus Josef menggunakan kesempatan tersebut untuk pertemuan dengan para tahanan di penjara. Dalam pertemuan ini direncanakan untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap beberapa tempat penting milik pemerintah Belanda di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan ini ditujukan untuk membunuh semua orang Eropa di Biak. Setelah menguasai Biak, aksi ini akan dilanjutkan membebaskan para tahanan di Serui, dan kemudian menyerang Manokwari dan Sorong.

Pada 13 Maret 1948, Petrus Korwa dan Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk menjemput beberapa putra Irian Barat yang sudah dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan penyerangan. Pada malam itu Petero Jandi menyerang stasion radio dengan dibantu enam pemuda Biak dari kampung Mokmer yang dipersenjatai. Namun, sebelum waktu yang ditentukan, salah seorang pemuda asal Biak, Terrianus, melakukan penembakan terhadap salah seorang sersan Belanda Schipper sehingga keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian, terjadi baku tembak antara pemuda asal Biak dengan tentara KNIL. De Bruijn diinformasikan bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada di tempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan Stefanus Josef ini dianggap sangat mengecewakan de Bruijn.

Pada hari senin, Stefanus Josef ditangkap sementara Petero Jandi dan Hanoch Rumbrar dan lainnya pada hari Selasa. Kejadian ini menyebabkan 40 orang Irian Barat, termasuk Stefanus Josef,

dipenjarakan di Hollandia dan kemudian di pindahkan ke penjara Cipinang Jakarta dan dibebaskan pada 1950. Sementara pelaku utama seperti Petero Jandi dihukum mati di Hollandia, Petrus Korwa dan Hanoch Rumbrar yang menyembunyikan diri di hutan selama seminggu akhirnya ditangkap dan dipenjarakan 10 hingga 15 tahun. Pelaku lainnya, yaitu Terianus Simbiak dihukum 15 tahun, Marcus Watimena 10 tahun, Petrus Korwa 8 tahun dan dipenjarakan di Digul.[136]

Menurut pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret 1948 semata-mata merupakan inisiatif orang Indonesia seperti Petero Jandi dan Stefanus Josef, dengan hanya melibatkan beberapa orang Irian Barat. Sumber ini juga menyebutkan bahwa terjadinya penyerangan ini disebabkan adanya konflik antara orang Ambon dan Irian Barat di Biak. Terdapat perbedaan yang tajam di antara mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari–hari. De Bruijn menemukan bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi penting daripada orang Irian Barat. Sehingga, menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya kesamaan dan perbaikan hidup orang Irian Barat di Biak.[137]

Namun, terdapat pula pendapat dari pihak pemerintah, bahwa aksi 14 Maret disebabkan kurang adanya kontrol oleh pemerintah setempat terhadap orang Indonesia yang tiba di Biak dengan kapal KPM. Terdapat dua anak buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari Kalianda. Bidan Ratulangi berpindah menjadi perawat Eropa yang bertugas di Serui tapi tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja di Biak selama dua bulan juga menunjukkan tidak ada pengawasan yang baik di Biak.[138]

Seperti sudah dijelaskan di atas, Stefanus Josef dan Petero Jandi mengakui bahwa mereka telah mengirim surat-surat ke Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi. Sementara menurut pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa 14 Maret merupakan aksi yang dimotori Petero Jandi dan pergerakan Palombangkeng di Sulawesi Selatan, sehingga menurut sumber ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKII di Serui.[139]

Meski demikian—bahwa peristiwa 14 Maret ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas PKII di Serui—aksi ini memperlihatkan keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk menentang pemerintah

Belanda, seraya bertujuan untuk menyatukan Irian barat dengan NKRI. Menurut de Bruijn, aksi 14 Maret ini terjadi karena perkembangan politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai pengaruh hingga di Irian Barat, khususnya di Biak. Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa pengunjung yang secara tidak langsung membawa benih-benih pemberontakan terhadap Pemerintah Belanda.[140] Aksi ini memperoleh dukungan dari para pemuda Irian Barat di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petero Jandi dan Stefanus Josef ini dapat disejajarkan dengan aksi Soegoro Atmoprasodjo.

Petro Jandi bertugas sebagai pemimpin di lapangan dan merupakan arsitek dari pemberontakan. Menurut Hanoch Rumbrar, Petero Jandi adalah buronan pemerintah Belanda di Makasar dan melarikan diri ke Biak. Dengan keberaniannya dia mengadakan konsolidasi dengan Stefanus Josef yang menjadi pemimpin utama pemberontakan, bersama dan juga beberapa pemuda asal Biak. Stefanus Josef yang saat itu ditugaskan mengawasi rumah tahanan di Nica kamp. Sementara tokoh penting lainnya adalah Hanoch Rumbrar asal Biak yang bertugas sebagai juru tulis di Korido, bekas siswa sekolah guru di Miei namun tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena pendudukan Jepang. Walaupun pemberontakan ini direncakan dengan baik, dukungan masyarakat di Biak terhadap upaya Petero, Josef dan Hanoch Rumbrar sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan dalam peristiwa 14 Maret ini hanya berasal dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat dukungan dari masyarakat Biak.

Kondisi yang menyebabkan kurang terlibatnya masyarakat adalah tidak ada figur nasionalis yang ideologis dari Indonesia maupun Irian barat seperti Soegoro dan Ratulangi serta didukung oleh putra Irian Barat seperti Marthen Indey, Silas Papare dan Lukas Rumkorem yang dapat melakukan berbagai pendekatan terhadap masyarakat secara terus menerus. Menurut Woria, aksi-aksi yang muncul di tempat-tempat lainnya di Irian barat umumnya dilakukan oleh para pelarian dari Indonesia termasuk peristiwa 14 Maret di Biak. Berbeda dengan kegiatan yang berlangsung di Serui dipimpin oleh seorang Ratulangi yang sangat nasionalis yang memahami baik cara–cara melakukan perjuangan menentang Belanda. Kehadiran Ratulangi di Serui setelah proklamasi sangat mempengaruhi proses transformasi keindonesiaan kepada

masyarakat Serui.[141] Pernyataan Woria ini mungkin penting untuk dikaji lebih dalam karena masyarakat Irian Barat di Irian Barat tidak pernah mengalami perjuangan fisik seperti di daerah luar Irian Barat.

9.11. Orang Irian Barat Menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB)

Setibanya di Yogyakarta, Silas Papare bersama seorang pemuda asal Jawa Soeparno serta tokoh-tokoh Indonesia lainnya di Jogya seperti J. Latumahina dan Nottan mendirikan Badan Perjuangan Irian (BPI) dan menerbitkan surat kabar *Suara Irian*.[142] Melalui surat kabar inilah isu Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia disebarluaskan oleh anggota PKII, baik di Irian Barat maupun di daerah Indonesia lainnya.

Di samping itu, surat menyurat antara pendukung RI di Irian Barat dan Silas Papare di Jakarta terus berlangsung. Inggamer, salah satu anggota PIM di Biak, melaporkan kepada Silas Papare tentang berbagai kejadian di Biak selama kedatangan kelompok pendukung Belanda. Dalam suratnya ke Silas Papare dikatakan bahwa Marcus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe dan Johan Ariks tiba di Biak untuk meyakinkan rakyat di Biak bahwa pemerintah Belanda adalah yang terbaik bagi orang di Irian Barat. Menurut mereka, pertemuan antara tokoh Irian Barat dengan Ratu Juliana memberi harapan tentang masa depan Irian Barat yang lebih baik. Ratu Juliana menjanjikan akan membangun Irian Barat dalam dua puluh tahun mendatang sehingga rakyat diharapkan jangan memilih Indonesia karena negaranya miskin dan akan mengalami banyak penderitaan. Masyarakat di Biak juga dihimbau agar jangan mengikuti Lukas Rumkorem, Corinus Krey, Warikar, Rumsayor dan Inggamer yang mendukung pemerintah Indonesia. [143]:

Di samping terdapat surat menyurat antara rakyat Irian Barat dengan Silas Papare di Jogja, badan pengurus BPI di Yogyakarta mendapat dukungan pula dari berbagai partai politik dan gerakan yang berada di Jawa. Dalam suratnya kepada Silas Papare di Jakarta, J. Latumahina memberitahukan berbagai upaya menyangkut dukungan dan resolusi yang dihasilkan oleh BPI dan partai politik pada 12 Oktober 1949, serta penunjukan Silas Papare dan Latumahina untuk membantu delegasi Indonesia di KMB. Dalam suratnya tanggal 14 Oktober 1949, Latumahina menyampaikan bahwa:[144]

Akan ketahuan dan kawan2 disitu, dikabarkan sebagai berikut:

1. Pengesahan dari mosi tertanggal 12 Oktober 1949, sesudah redaksinja diubah, telah diterima dan sekarang masih tengah ditanda tangani oleh sekalian partai2 dan gerakan2 disini. Dengan pos pertama dari sini, akan dikirim disitu."
2. Pada hari ini, kawat telah dikirim ke Serui meminta perdjoangan perlu sekali diperbesar2kan diseluruh Irian.
3. Mosi menetapkan:"Menuntut dari pemerintah Rep.Ind. delegasi Indonesia dan delegasi BFO, untuk memberikan keksempatan sepenuh2nja kepada saudara, dan saudara Latumahina untuk membantu delegasi Belanda.
4. Oleh sebab saudara sebagai ketua PKII telah diterima sebagai pembantu delegasi Rep. Ind, maka kami mendesak saudara untuk mendapat pergi bersama2. Lain dari ini, saudara sendiri telah mengerti bukan? Pada masa ini kami harus mempunjai pembantu2 jang memang ahli didalam soal ini, supaja dimana saja soal Irian dapat dipersoal2kan sekeliling Nederland."
5. Berikanlah segera-segera laporan tentang pertemuan jang saudara telah adakan dengan saudara2 Tahalele dan Tuasikal. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat kedudukan mereka di Djakarta."
6. Kepada sekalian saudara2 Irian dimana2 sadja, maklumkanlah kepada mereka, lahirnya Badang Perdjoangan Irian, serta meminta mereka setjepat mungkin mengambil perhubungan dengan BPI."
7. Mempermudahkan pekerjaan dari B.P.I. disini, kami meminta dari saudara, berikan alamat2 jang saudara rasa mereka mempunjai simpati terhadap perdjoangan Irian.
8. Mudah2an Tuhan menolong kami sekalian didalam usaha jang berat ini." Sekianlah!!!

Menjelang diselenggarakannya KMB, kelompok Johan Ariks dan Silas Papare terus mencari dukungan untuk terlibat dalam penentuan status Irian Barat. Dalam upaya mencari dukungan ini, terjadi persaingan antar kelompok elit Irian Barat baik yang pro-Indonesia maupun yang menolak Indonesia untuk mendapatkan pengaruh baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sementara, partisipasi mereka secara langsung

dalam KMB kurang diperhitungkan oleh pihak Pemerintah Indonesia dan Belanda. Memang, sulit bagi orang Irian Barat yang pada masa itu tidak banyak memiliki orang Irian Barat yang berpendidikan. Berdasarkan pada pengalaman di masa lalu, ketika hendak diselenggarakan konferensi Denpasar, pemerintah Belanda menolak mengirim wakilnya karena menganggap belum ada orang Irian Barat yang mampu mengikuti konferensi tersebut. Laporan rahasia pemerintah Australia di Hollandia tentang berbagai aktivitas dan reaksi orang Irian Barat menjelang KMB menyatakan bahwa Pemerintah Belanda pun masih beranggapan bahwa hingga saat ini, belum juga ada orang Irian Barat yang mampu berperan dalam skala politik tingkat tinggi. Penjelasan pemerintah ini diterima dengan cara *by acquiescing in this method of " about you and without you."*[145]

Dengan demikian tidak ada orang Irian Barat asli yang mewakili orang Irian Barat untuk membicarakan masalah Irian Barat. Yang mewakili orang Irian Barat adalah pihak pemerintah Belanda, tepatnya pegawai pemerintah Belanda, sementara di pihak Indonesia, terdapat wakil dari Irian Barat asli yaitu Silas Papare yang statusnya hanya sebagai pengamat di KMB.[146]

9.12. Orang Irian Barat Pasca Konferensi Meja Bundar.

Menurut Lageberg, "kekacauan politik yang terjadi di Irian Barat selama 1949 dan 1950 menghilang setelah berakhirnya KMB dan kembalinya banyak orang Indonesia ke tempat asal mereka".[147] Namun, pandangan Lageberg yang menegaskan bahwa hanya aktivitas orang Irian Barat yang mendominasi perjuangan politik sesudah KMB tidak sepenuhnya betul. Di beberapa tempat di Irian Barat ditemukan kelompok elit dan orang Irian Barat yang terlibat dalam partai politik seperti KIM dan PKII yang terus melakukan kegiatan bawah tanah menolak kelanjutan pemerintah Belanda di Irian Barat.

Drooglever menegaskan bahwa pada awal 1950-an masih ada simpati yang tersebar cukup luas terhadap Indonesia, khususnya di bagian-bagian barat Irian Barat. Tentu saja simpati ini paling kuat ada pada kira-kira seribu orang Indonesia yang bekerja di industri minyak di Sorong dan daerah penyanggahnya, orang-orang Buton dekat Fak-Fak, dan orang-orang Jawa di wilayah pertanian dekat Merauke. Namun, banyak juga orang-orang Irian Barat yang tidak bersikap menolak terhadap Indonesia, khususnya orang-orang Serui. Di antara mereka

adalah Silas Papare.[148] Pernyataan Drooglever ini menandakan bahwa dukungan terhadap perjuangan Indonesia juga datang dari orang Irian Barat termasuk Serui.

Di bagian lain dalam kajiannya, Drooglever juga menegaskan bahwa bukan saja orang Serui yang berada di Serui dan di beberapa tempat lainnya di Irian Barat terlibat dalam upaya mendukung Indonesia. Di Biak misalnya, ada Corinus Krey, Lucas Rumkorem dan putranya Zeth. Di pantai Waropen ada pemburu buaya Stephan Refasi. Begitupun dengan Petrus Wetebossy, Marthen dan Amos Indey dan Petrus Sembor. Mereka semua adalah *ambtenar* dan guru dari angkatan yang lebih tua.[149] Drooglever juga mengungkapkan bahwa pada 1956 Hermanus Wayoi dan Agus Nenepath yang berkerja pada dinas pemerintah "secara publik menyatakan diri pro-Indonesia".

Walaupun dukungan terus berlangsung terhadap Indonesia, baik oleh masyarakat Irian Barat maupun non-Irian Barat di Irian Barat, pemerintah Belanda di Irian Barat terus melakukan pengawasan bahkan penangkapan. Di Serui misalnya, sejak 1946 orang Serui telah menjadi sorotan pemerintah Belanda akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik mendukung Indonesia. Terdapat berbagai laporan telah tejadi pertemuan rahasia dan kegiatan kampanye. Pemimpin asal Irian Barat seperti Benjamin Kajai, Silas Kamarea, Willem Wajankau dan Mateus mengorganisir berbagai kegiatan ini, tetapi pemimpin sesungguhnya bukan orang Irian Barat melainkan Ahmad Djalali.[150]

Dalam catatan harian Stevanus Rumbewas, terdapat pula upaya lain yang dilakukan pemerintah Belanda di Hollandia untuk mendatangkan kapal Dreite di Serui yang membawa serta batalion Irian Barat untuk menakut-nakuti rakyat di kampung-kampung dan di kota, yang dianggap terlibat dalam partai politik. Selain itu, mereka mengambil benda-benda yang ada kaitan dengan merah putih. Pemerintah setempat, yaitu HPB, melarang berbagai aktivitas partai politik dan menangkap para pimpinan dan kemudian dipenjarakan.[151]

Sikap dan dukungan rakyat di Serui tetap tidak dapat diubah dan dipengaruhi oleh berbagai tindakan pemerintah Belanda. Perjuangan kelompok elit Serui untuk mempertahankan Serui dan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia terus berlanjut. Hal ini tampak ketika kehadiran Komisi Indonesia di Serui pada 29 Mei1950. Tim Komisi Indonesia yang hadir yaitu Mr. Muh. Yamin, Mr. Lauharhary,

Jusuf dan Silas Papare serta tujuh wartawan. Sementara dari Komisi Belanda Mr. Maarseven, Van Baal, Van den Boos dan Nicolaas Jouwe serta tujuh wartawan luar negeri. Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Serui yang diwakili oleh 16 orang termasuk Stevanus Rumbewas, disampaikan keteguhan rakyat Serui mendukung Indonesia.[152]

Kemudian pada 1951 pemerintah Belanda di Serui segera memanggil dan menangkap semua badan pengurus PKII serta anggota pejuang kemeredekaan RI untuk diminta keterangan.[153] Pengurus PKII yang ditangkap adalah: (1) Alwi Rahman yang menjabat wakil ketua, ditahan di penjara Serui dan kemudian dikirim ke penjara Hollandia selama 9 bulan; (2) Barnabas Animan, sebagai komisaris I dipenjara di Serui dan dikirim ke penjara Hollandia selama 2 tahun; (3) Stevanus Rumbewas sebagai Komisiaris I dipenjarakan 2 tahun di penjara Hollandia; (3) Alex Beratobui sebagai anggota dipenjarakan 2 tahun di Hollandia; (4) Benjamin Kajai sebagai komisiaris II ditahan 2 minggu di penjara Hollandia; (5) Achmad Djalali sebagai bendahara I dipecat sebagai juru bayar pegawai kantor HPB Serui; dan (6) Yakop Thung Tjing Ek, sebagai komisaris I diancam dan ditahan dalam keadaan sakit di kantor HPB Serui dan ditahan 1 hari.[154]

Walaupun terjadi penangkapan dan intimidasi terhadap pengurus dan pendukung PKII, mereka terus konsisten dengan perjuangannya. Hal ini terbukti ketika Yakop Thung Tjing Ek dan Benjamin Kajai memesan bendera merah putih ukuran 4X8 cm untuk dijadikan sebagai kartu anggota disita ketika bendera itu tiba di Pelabuhan Serui pada 12 Juli 1958. Akibatnya Thung Tjing Ek dan Benjamin Kajai harus membayar denda seratus rupiah Irian Barat (I.B.). Kemudian pada 4 Januari 1959, toko Cenderawasih milik Yakop Thung Tjing Ek yang bermodal 3 juta I.B yang dibangun sejak 1954 disita oleh Pemerintah Belanda di Serui pada 4 Januari 1959. Akibatnya, seluruh keluarga harus menempati kandang ayam milik Yakop Thung Tjing Ek hingga 1962.[155] Seperti dijelaskan oleh Yakop Thung Tjing Ek:[156]

> Sejak itu kami bernaung dibawah atap pondok kandang ayam hingga 1962 saat Irian kembali ke RI. Pada tahun 1962 itulah kami genapi niat kami bahwa jika Indonesia atau perjuangan kami berhasil kami akan mencari natsar

> 2 ekor kambing. Bendera sang merahputih kami kibarkan untuk pertama kali di Serui sehari sebelum diadakan upacara resmi oleh wakil pemerintah Indonesia di Serui untuk UNTEA. Didepan umum jam 13.00.'"

Upaya yang dilakukan pemerintah Belanda di atas tidak juga menghentikan rakyat Serui untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Yoris Raweyai, ketika usianya sekitar 8 tahun, ia sering ditugaskan ayahnya Yakop Thung Tjing Ek untuk mendengarkan siaran radio dari Jawa. Kemudian, untuk menghindarkan diri dari pengawasan pemerintah Belanda maka pada malam hari Yoris Raweyai diajak bersama para tokoh PKII seperti Stevanus Rumbewas, Roland, Benjamin Kajai dan Yakop Thung Tjing Ek dengan memakai perahu menuju tengah laut dan disuruh menuturkan berbagai informasi yang didengar lewat radio pada siang hari. Kegiatan ini sering dilakukan karena terjadi larangan terhadap berbagai kegiatan pro-Indonesia di Serui. Disamping peran Yoris Raweyai, salah seorang kakak perempuannya Reny Raweyai juga mendapat tugas khusus untuk mengantar surat ke luar Irian barat dengan menitipkan pada kurir di kapal KPM yang sebulan sekali singgah di Serui.[157]

Kehadiran kapal KPM di Irian Barat memberi peluang bagi pergerakan mendukung Indonesia. Hal ini terlihat pada uraian di atas bahwa di Biak dan di Serui terdapat berbagai upaya yang dilakukan secara rahasia oleh kelompok pro-Indonesia untuk membangun jaringan dengan daerah lain di Irian Barat dan luar Irian Barat Barat.

Di bagian wilayah lain dari perjuangan mendukung Indonesia, khususnya mendukung perjuangan Silas Papare di Jawa, dapat dilihat di Hollandia, Biak, Kaimana, Jakarta, Probolinggo dan Yokyakarta. Dari hasil wawancara antara anggota komisi Indonesia dengan beberapa elit Irian Barat di Hollandia, tampak bahwa banyak orang Irian Barat tidak menginginkan pemerintahan Belanda di Irian Barat. Akibatnya banyak elit Irian Barat dipenjarakan pasca KMB pada 1950.[158] S.D. Kawab misalnya, ditahan di Manokwari pada 1947 dan dipindahkan ke Hollandia. Pada 1948, S.D. Kawab dibebaskan dan kemudian dipekerjakan sebagai pegawai Pemerintah Belanda. Kemudian S.D. Kawab ditangkap kembali karena didapatkan menyebarkan surat kabar *Suara Irian*. Namun, sebelum kehadiran komisi Indonesia dan Belanda, S.D. Kawab dibebaskan. Hal ini juga ditegaskan oleh S. D. Kawab[159]

bahwa "sejak 1952, khususnya setiap 17 Agustus banyak elit Irian Barat ditahan dan dipenjarakan beberapa minggu di penjara. Tampaknya Pemerintah Belanda menyadari bahwa banyak elit Irian Barat yang terus mendukung pemerintah Indonesia sesudah KMB. Oleh karena itu untuk menghindari berkembangnya nasionalisme Indonesia maka pamerintah Belanda mengirim kelompok yang mendukung Indonesia ke dalam penjara.

Laporan pemerintah Belanda tentang kegiatan politik di Irian Barat pada 1957 menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi pemimpin adalah Ahmad Djalali, bukan orang Irian Barat. Namun, laporan ini juga menyatakan bahwa Benjamin Kajai dan Yakop Thung Tjing Ek sebagai pemilik toko Tjenderawasih sangat berperan membangun jaringan dan memiliki cabang di Manokwari, Sorong, Biak dan Hollandia. Salah satu kerjasama yang dilakukannya adalah dengan salah satu pedagang Cina di Biak bernama Kho Hong Gan. Kerja sama yang baik ini mempermudah hubungan yang selama itu terjalin antara warga keturunan Cina dengan orang Irian Barat. Hal ini juga didukung dengan adanya perkawinan antara pria keturunan Cina dengan wanita Irian Barat. [160]

Laporan pemerintah Belanda di atas ini menunjukkan bahwa tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa perluasan jaringan PKII di Irian Barat adalah juga akibat dari peran warga keturunan Cina yang beristrikan perempuan Irian Barat, antara lain seperti Yakop Thung Tjing Ek yang beristrikan perempuan Irian Barat asal Serui yaitu Marta Raweyai. Memang, harus diakui bahwa warga keturunan Cina lainnya di Irian Barat—seperti di Biak antara lain Kho Hong Gan dan di Kaimana yaitu Abubakar Tjan Koh Tjiang—terlibat dalam perluasan rasa keindonesiaan di Irian Barat. Keterlibatan bisnis mereka yang membutuhkan hubungan dengan daerah lain termasuk daerah-daerah di Indonesia sehingga turut membangun jaringan keindonesiaan di Irian Barat. Sebaliknya, melalui usaha bisnis mereka, para pendukung Indonesia memanfaatkan pula jaringan ini untuk memperluaskan berita proklamasi dari Makasar dan daerah lainnya di luar Irian Barat.

Sementara itu, Silas Papare yang masih berada di Jakarta, terus memperjuangkan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Pada tanggal 22 Februari 1950, Silas Papare diundang oleh Soeparmo yang

pada waktu itu sebagai menteri negara untuk menghadiri rapat panitia Irian di Gedung Dewan Menteri Pedjambon no 2.[161]

Ternyata dukungan terhadap Silas Papare dari berbagai pendukung PKII berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang berada di beberapa tempat di Irian Barat dan luar Irian Barat. Sesudah KMB, berbagai surat dikirim dengan cara rahasia dari berbagai tempat di Irian Barat dan wilayah Indonesia lainnya menyangkut dukungan orang Indonesia, di Irian Barat dan di luar, yang tidak berhenti menentang pemerintah Belanda di Irian Barat. Hal ini terlihat dalam beberapa surat yang ditujukan kepada Silas Papare. Salah satunya adalah surat salah seorang putra Irian Barat yang bernama Willem Thomas Marisan Vonataba yang saat itu berpangkat kopral Angkatan Laut Republik Indonesia yang bermarkas di Pasuruan. Isi surat tersebut merupakan dukungannya terhadap peran Silas Papare sebagai wakil Irian Barat di Jawa. [162]

Sehubungan dengan surat yang dikirim oleh Vonataba kepada Silas Papare, Papare juga mendapat surat dari anggota BPI yaitu Soeparno yang bermaksud menyampaikan perihal peran Vonataba sebagai putra Irian Barat yang saat itu berada di Jawa. [163]

Sementara itu, Silas Papare juga mendapat surat dari S. Kamarea yang merupakan salah satu pendukung PKII di Biak dan Abubakar Tjan Koh Tjiang di Kaimana. Kedua surat yang ditujukan kepada Silas Papare adalah untuk melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di daerah mereka di Irian Barat. Kehadiran surat-surat ini sangat penting bagi Silas Papare sehingga akan memudahkan melakukan berbagai konsolidasi dengan berbagai pihak di Jawa dan luar Jawa. Isi surat Kamarea sangat penting pula karena mengiformasikan tentang tindakan pemerintah Belanda menghalangi aktifitas PIM di Biak yang diparkarsai oleh lukas Rumkorem dan Corinus Krey.[164]

Kemudian, dalam suratnya Abubakar Tjan Koh Tjiang di Kaimana ke Silas Papare, diinformasikan tentang berbagai upaya yang dilakukan secara rahasia melalui kontak dan rapat rahasia yang dilakukan untuk mengetahui pandangan rakyat di Kaimana. Pada rapat tersebut rakyat Kaimana diwakili oleh para tokoh masyarakat, antara lain Radja Kaimana dan Radja di Namatota. Surat ini membuktikan bahwa pengaruh PKII pasca KMB telah menjangkau Kaimana dan Sorong. Surat ini memperlihatkan pula berbagai upaya yang dilakukan pendudukung PKII

yang tidak hanya di Serui dan terbatas pada orang Irian Barat dan melibatkan para raja Irian Barat di Kaimana, tapi juga masyarakat non-Irian Barat yang ada di Irian Barat. Abubakar Tjan koh Tjiang salah satu warga keturnan Cina dan beragama Islam bersama para pendukung RI di Kaimana terus melakukan berbagai aksi bawah tanah untuk menyebarkan informasi tentang ide keindonesiaan terutama menyangkut kiriman yang berisi teks Linggajati. [165]

Dari beberapa surat di atas, tampak bahwa PKII secara politis mendapat dukungan tidak saja dari masyarakat Irian Barat tetapi juga dari non-Irian Barat di berbagai tempat di Irian Barat dan luar Irian Barat dengan memanfaatkan sarana kapal KPM. Hal ini terlihat pula di beberapa tempat di Irian barat terdapat banyak anggota PKII yang berpindah ke beberapa tempat di Irian Barat untuk memobilisasikan rakyat menentang Belanda. Di Sorong, misalnya, sesudah pendirian N.N.G.P.M pada 1930-an terdapat ratusan pekerja yang berasal dari bagian barat dan timur Indonesia, antara lain dari Jawa, Kalimantan dan Buton yang dikontrak oleh Pemerintah Belanda.

Memang tidak dapat dihindari adanya kenyataan bahwa sesudah kehadiran Ratulangi di Serui 1946, pengaruh PKII meluas di daerah-daerah lain di Irian Barat. Pada 1 Maret 1948 di Fak-Fak misalnya, Raja Rumagesang Al Alam Ugar Sekar memerintahkan supaya semua bendera Belanda diturunkan di daerah Kokas. Akibat kejadian ini, terjadi konflik antara rakyat di Kokas dengan Belanda dan akhirnya Raja Rumagesang dipindahkan ke Sorong. Namun, setibanya di Sorong Rumagesang terus melakukan kegiatan menentang Belanda, sehingga akhirnya ditangkap dipindahkan ke Manokwari. Sementara di Manokwari, Rumagerasang ditahan di tangsi polisi namun kembali melakukan aksi menentang Belanda dengan cara mempengaruhi beberapa pemuda di tangsi polisi untuk menanggalkan seragam Belanda dan membakar tangsi polisi di Manokwari.

Namun, rencana ini diketahui pemerintah Belanda maka Rumagesang dan beberapa pemuda di tangsi polisi akhirnya dipindahkan ke penjara Hollandia. Tenyata di Hollandia, dalam sidang perkaranya, Rumagesang dihukum seumur hidup dan dikirim ke Makasar dengan Kapal dalam kedaan di borgol. Setelah di Makasar, Rumagesang yang dianggap sangat membahayakan dipindahkan ke

penjara Nusakambangan dan pada 1950 dibebaskan oleh pemerintah Indonesia.[166]

Dari uraian –uraian di atas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat di Maluku dan Irian Barat terhadap gema proklamasi 17 Agustus 1945 sangat beragam. Upaya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 di Maluku didominasi orang Maluku, baik yang berada di Ambon maupun di Jawa dan Makasar. Sementara di Irian Barat upaya mempertahankan dan menyebarkan berita proklamasi umumnya berasal dari Jawa, Sumatra, Makasar, Manado dan Maluku. Upaya mendukung Irian Barat menjadi bagian dari NKRI mendapat respon dari elit asal Irian yang sangat terbatas. Perbedaan inilah yang mewarnai perjalanan ke dua wilayah ini menjadi bagian dari NKRI. Sebagian masyarakat Maluku mendukung Maluku menjadi bagian dari NKRI, sebagian memihak NIT dan sebagian lagi mendukung pembentukan negara federal.

Catatan Akhir :

[1] Koentjaraningrat. *Penduduk Irian Barat.* Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963, hlm: 77

[2] Setamat Eerste Europeesche School di Ambon 1917, J. Latuharhary melanjutkan pendidikan di HBS Jakarta 1923 kemudian melanjutkan pendidikan Hukum dan merupakan orang Maluku pertama mendapat gelar Master in de Rechten pada 1927 di Belanda dan kembali bekerja sebagai ketua pengadilan Tinggi di Surabaya hingga 1929.

[3] Ketika melanjutkan pendidikannya di Bandung, Putuhena menjadi anggota *AlgemeeneStudie Club* 1925. Pada masa Jepang ditangkap dan terlibat dalam revolusi Indonesia.

[4] Setelah meraih gelar dokter di Stovia dan mendapat kesempatan mendalami pengetahuan di bidang psychiatri di Negeri Belanda dan terlibat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, dokter Latumenten akhirnya dipulangkan ke Ambon dan diasingkan ke Sabang pulau We pada 1924. Baru pada 1929 ditunjuk sebagai direktur Rumah Sakit Jiwa di Bogor.

[5] Lahir di Saparua, Mohamad Padang keturunan Padang dari garis ayahnya sedangkan Ibunya berasal dari Saparua dari keluarga Pattusahusiwa. Tamat MULO di Ambon dan merantau di Jawa aktif dalam berbagai organisasi politik.

[6] Dalam perjalanan kariernya, Aleksander Yacop Patty dipilih sebagai anggota Ambon Raad namun mendapat tantangan dari Regenten bond yang pada saat itu dituduh sangat berbahaya bagi pemerintah Belanda maka ditangkap dan diadili di Makasar pada 1942 kemudian diringkus di Bengkulu dan diasingkan ke Boven Digul , Irian Barat sampai perang dunia II. Pada masa Jepang Yacop Patty melarikan diri ke Australia kembali ke Jakarta dan meninggal di Bandung pada 15 Juli 1947.

[7] Mezak Wakim dan Stenli R.Lopatty. *Sejarah Kebangkitan Daerah Maluku.* Ambon: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.

[8] Teu Lususina. *Ambon Selayang Pandang.* Jakarta: Teu Lususina, 1950, hlm:13.

[9] Chauvel. *Nationalits, Soldiers and Separatist.* Leiden: KITLV Press, 1990. hlm, 173.

[10] *Ibid.* hlm:175.

[11] *Ibid.* hlm: 175.

[12] Leirissa R.Z., Pattykaihatu, dkk, *Ambonku: doeloe, kini, esok,* Ambon: Pemerintah Kota Ambon, 2004. hlm: 107.

[13] *Ibid.*, hlm:108.

[14] *Ibid.*

[15] Teu Lususina, *op.cit.,* hlm: 21.

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*, hlm: 17.

[18] *Ibid.,* hlm:18.

[19] *Ibid.*, hlm: 22.

[20] *Ibid.,* hlm: 26.

[21] Leirissa R.Z., Pattykaihatu, dkk., *op.cit.*, hlm: 108.

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] www.google.au.id, Melacak Gerakan Nasionalisme di Ternate.

[25] *Ibid.*

[26] Pattykaihatu,J.A., *Tokoh Pejuang Kemerdekaam Wellem Reawaru dan Peristiwa RMS di Maluku*, Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah Direktorial Jenderal Sejarah dan Purbakala Kemengrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, hlm: 4.

[27] Chauvel, *op.cit.* hlm: 216

[28] *Ibid.*

[29] *Ibid.* hlm: 217

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

[32] Pattykaihatu,J.A. *op.cit*, hlm: 5.

[33] *Ibid.*

[34] Katoppo, dalam Meteray Bernarda, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta: Kompas, 2011, hlm: 128.

[35] Teu Lusuina, *op.cit.,* hlm: 41.

[36] *Ibid.*, hlm: 42.

[37] *Ibid.,* hlm: 39.

[38] *Ibid.*, hlm:46.

[39] *Ibid.*, hlm: 47.

[40] *Ibid*, hlm: 65.

[41] *Ibid.* hlm:99 dan101.

[42] *Ibid.* hlm:99.

[43] *Ibid.* hlm 104.

[44] *Ibid.*

[45] Pattykaihatu, J.A. 2011, *op.cit.*, hlm: 9.

[46] *Ibid.*, hlm: 100.

[47] *Ibid.*, hlm:107.

[48] *Ibid.*, hlm:107-109.

[49] *Ibid.*, hlm: 108.

[50] *Ibid.*, hlm:138.

[51] Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan jilid.1*, Angkasa Bandung.

[52] *Ibid.*

[53] *Ibid.*

[54] NA, *Jaarsverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea*, Van Eechoud 23 April 1948, hlm: 5.

[55] Daftar Riwayat hidup, *Daftar Riwajat Hidup* Corinus Krey 7 Agustus 1990.

[56] *Ibid.*

[57] (Veur, 1963)

[58] *Ibid.*

[59] Frans H. Visman, Provisional Government in the Netherlans East Indies dalam *Pacific Affairs* Vol. XIII, no.2, June 1945, hlm: 184.

[60] NA, *Jaarsverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea*, Van Eechoud 23 April 1948, hlm: 5-6.

[61] *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948*, J.W.M. Courtouis, hlm: 126.

[62] N.A. *Jaaverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea*, Van Eechoud 23 April 1948. Lihat pula dalam Aditjondro. J. « 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no.2 tahun XVI February, 1997, hlm: 116.

[63] NA. *Marthin Indey, File, Dossier, PD 10, Title Politie Over Zicht, Januari 1947,* hlm: 2.

[64] NA. Algemene Secretarie Batavia-Nieuw Guinea 1919-1949 invent nr. 54, hlm: 3-4.

[65] *Ibid.* hlm: 1-3.

[66] NA. *Jaarsverslaag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea*, 23 April, 1948 *Invent Nr. 780* hlm: 5.

[67] *Daftar Riwajat Hidup* Corinus Krey , *op.cit.*, dan. lihat pula Aditjondro. J. « 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no.2 tahun XVI February, 1997, hlm: 116.

[68] Marthen Indey pernah menyelesaikan Sekolah Dasar di Ambon dan mengikuti Sekolah Pelaut di Makasar (*Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen;* KIS) pada 1932 dan kemudian pada 1934 mengikuti Sekolah Spion di Sukabumi 1934. Setelah menamatkan kurus tersebut Marthen Indey ditempatkan di Ambon dan pada 1941 dipindahkan ke Boven Digul sebagai asisten polisi. Lihat pula Aditjondro.J. 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no. 2 tahun XVI February, 1997, hlm: 116.

[69] *Daftar Riwajat Hidup* Corinus Krey, *op.cit.*, dan lihat Courtouis, *op.cit.*, hlm: 126.

[70] *Penyelesaian Persengketaaan Irian Barat. 1950, op.cit.*, hlm: 77. Lihat pula Aditjondro.J. « 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no. 2 tahun XVI February, 1997, hlm: 117.

[71] Courtouis, J.W.M, *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948,* hlm: 126-127. Lihat pula NA. File Archihe Centrale Veiligheidsdientst Dossier PD10 name Marthen Indey, Title *Politiek Overszicht Januari 1947*, Hollandia Author, WJK Kouwenhoven, HPB Hollandia. Date 7-3-1946.

[72] *Ibid.*, hlm: 126.

[73] NA.File Archihe Centrale Veiligheidsdientst Dossier D10 name Mathen Indey, Title *Politiek Overszicht Januari 1947*, Hollandia Author, WJK Kouwenhoven, HPB Hollandia. Date 7-3-1946.

[74] Courtouis, J.W.M, *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948*, hlm: 128. Lihat pula Aditjondro.J. « 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no. 2 tahun XVI February, 1997, hlm: 117.

[75] Courtouis, J.W. M *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948,* hlm: 137. Lihat pula. NA. Jaarverslag 1947 van de residentie Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948.

[76] *Report of the Commiteee Nieuw Guinea (1950) part II text and appendixes of the Netherlands main Constitute,* hlm: 84.

[77] *Ibid.*, hlm: 126.

[78] *Ibid.*, hlm: 84. Lihat juga, *Daftar Riwayat Hidup* S.D. Kawab.

[79] *Ibid.*, hlm: 128-129. Lihat pula Aditjondro. J. « 'Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura », *Prisma*, no.2 tahun XVI February, 1997, hlm: 117.

[80] *Report of the Commiteee Nieuw Guinea (1950) part II text and appendixes of the Netherlands main Constitute,* hlm: 129.

[81] *Ibid.* Lihat pula File Archihe Centrale Veiligheidsdientst Dossier PD10 name Marthen Indey, Title *Politiek Overszicht/anuari 1947*, Hollandia Author, WJK Kouwuenhoven, HPB Hollandia. Date 7-3-1946.

[82] NA. *Algemene Secretarie Batavia-Nieuw Guinea 1919-1949 invent* nr. 54.

[83] *Ibid.*

[84] *Ibid.*

[85] *Ibid.*

[86] *Ibid.*

[87] *Ibid.* Lihat pula NA. File Archihe Centrale Veiligheidsdientst Dossier PD10 name Marthen Indey, Title *Politiek Overszicht Januari 1947*, Hollandia Author, WJK Kouwenhoven, HPB Hollandia. Date 7-3-1946.

[88] NA. *Algemene Secretarie Batavia-Nieuw Guinea 1919-1949 invent* nr. 54.

[89] *Ibid.*

[90] *Korano* adalah istilah untuk kepala kampung di Hollandia dan sekitarnya sedangkan *Ondoafi* adalah kepala suku untuk masyarkat Sentani di Hollandia.

[91] NA. File Archihe Centrale Veiligheidsdientst Dossier PD10 name Marthen Indey, Title *Politiek Overszicht Januari 1947*, Hollandia Author, WJK Kouwenhoven, HPB Hollandia. Date 7-3-1946.

[91] *Ibid.*

[92] *NA. File, Dossier, PD 10, Name Marthen Indey, Title Politie Overzicht, Januari 1947,* OA Hollandia, the Author, W.J.H. Kouwenhoven, HPB Hollandia, 1-3-1946.

[93] *Daftar Riwajat Hidup* Corinus Krey , *loc.cit.*

[94] Lihat pula NA. *File, Dossier, PD 10, Name Marthen Indey, Title Politie Over Zicht, Januari 1947,* OA Hollandia, the Author, W.J.H. Kouwenhoven, HPB Hollandia, 1-3-1946.

[95] (Drooglever, 2010)

[96] Courtouis, J.W.M., *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948,* hlm:91 daN *136.* Lihat juga, ANRI, *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Japen, Noord Nieuw Guinea*, 31 Maart, 1954, Reel. 40, MvO Serie Ie, hlm: 55-59.

[97] *Catatan Harian* Benjamin Kajai, salah satu pengurus PKII, dan wawancara dengan Benjamin Kajai (4 Desember 1995). Lihat juga, *Naskah dan Lampiran dari Bagian Pokok dari Pihak Belanda*, Laporan Komisi Gabungan Irian/Nieuw Guinea (1950), hlm: 66.

[98] *Catatan Harian*, Benjamin Kajai, salah satu pengurus PKII, wawancara dengan Benjamin Kajai (4 Desember 1995). Lihat pula *Catatan Harian*, Stevanus Rumbewas, *Catatan* Harian Benjamin Kajai dan Dominggus Woria. (12 Desember 1995). Wawancara.

[99] Yacob Thung Tjing Ek, adalah seorang keturunan Cina Makasar yang sudah berada di Serui sejak 12 Mei 1942 sebagai pencari kulit buaya. Yacob Thung Tjing Ek kemudian menjadi pengurus PKII sebagai komisaris I dan sangat berperan selama pendirian dan pertumbuhan PKII di Serui. Pernah ditahan pada 1950 karena terlibat dalam berbagai kegiatan PKII.

[100] J.W.M. Courtouis, *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948,* hlm: 137.

[101] Benjamin Kajai (4 Desember 1995). Wawancara dan lihat Courtouis J.W.M. *Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948,* hlm: 128. Lihat juga Arsip pribadi Benjamin Kajai dan *Catatan Harian dan* Stevanus Rumbewas.

[102] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Riwayat Hidup,* dan lihat pula arsip pribadi Benjamin Kajai, lihat pula *Catatan Harian*, Stevanus Rumbewas.

[103] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Riwayat Hidup.*

[104] Courtouis J.W.M. *op.cit.,* hlm: 137.

[105] *Ibid.*

[106] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat Lammakah di Balikpapan ke Silas Papare, 18 Pebruari 1950.*

[107] Courtouis J.W.M. *loc.cit.*

[108] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai; *Salinan Surat Pujian kepada Silas Papare.* Lihat pula *The Future of West Irian*, Embassy of The republic of Indonesia London, printed by the Diplomatic Press and Publisisng Co., 153, Coctwold Gardens London, N.W.2. hlm: 17-18.

[109] Courtouis, J.W.M, *loc.cit.* Lihat pula ARA, Archief Centrale Veiligheidsdienst Dossier PD 9 Silas Papare, DOB.

[110] J.P.K. Van Eechoud, "Jaarverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea", *Rapportage Indonesia,* 3270, ANRI, Jakarta.

[111] *Suluh Indonesia*, 23 November 1954.

[112] *Catatan Harian*, Stevanus Rumbewas, salah satu pengurus PKII.

[113] *Ibid.*

[114] *De Tifa,* 29 June 1962. Lihat pula Courtouis, J.W.M, *op.cit.,*hlm: 138.

[115] Lagerberg (1979: 69)

[116] (de Bruijn, 1978)

[117] *Catatan Harian Stefanus Rumbewas, op.cit.*

[118] Courtouis. J.W.M., *loc.cit.*

[119] *Suluh Indonesia* , 9, 10,1954.

[120] NAA *Report on Activitiess, Reactions and Aims of the authochnomic Population of Neth. New Guinea conserning of the Future Political Status of Their Country in Conection with the Dutch-Indonesian Round-table-Talks*, Hollandia, September 1949. AEA, A 400/1/11/1. hlm: 2.

[121] *Ibid.*

[122] *Catatan Harian*, Stevanus Rumbewas. Lihat pula Rapportage Indonesia Invent 777 Title *Oversicht en Ontwikkeling Van den Toestand date December 1947- December 1948.*

[123] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Daftar Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek.*

[124] Andaya (1993: 104)

[125] Courtouis J.W.M, *op.cit.*hlm: 124.

[126] *Ibid.*, hlm: 125.

[127] *NA. Jaarsverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea,* Van Eechoud 23 April 1948, hlm:6.

[128] *Ibid.*

[129] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat Inggamer di Biak, 14-12-49, kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49.*

[130] NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title *Biak Affaire Date 1948.*

[131] (de Bruijn, 1978)

[132] NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title *Biak Affaire Date 1948,* dan Hanoch Rumbrar (1995, Desember 21). wawancara.

[133] *Ibid.*

[134] *Ibid.*

[134] *Ibid.*

[135] *Ibid.*

[136] *Ibid.*

[137] *De Bruijn, NA. Jaarsverlag 1947&1948, nr.*188.

[138] NA. Algemene Sevretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title *Biak Affaire Date 1948.*

[139] Rapportage Indonesia Invent 777 Title *Oversicht en Ontwikkeling Van den Toestand date December 1947-December 1948.*

[140](Bruijn, 1978)

[141] Dominggus Woria. (21 Desember 1995).Wawancara.

[142] *Suluh Indonesia*, 9, 10, Jakarta: 1954.

[143] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat Inggamer di Biak, 14-12-49, kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49.*

[144] Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat J. latumahina di Djokjakarta 17 October '49 kepada Silas Papare di Djakarta.*

[145] NAA *Report on Activitiess, Reactions and Aims of the authochnomic Population of Neth. New Guinea conserning of the Future Political Status of Their Country in Conection with the Dutch-Indonesian Round-table-Talks*, Hollandia, September 1949. AEA, A 400/1/11/1, hlm: 4.

[146] *West Irian And The World,* The Ministry of Foreign Affairs of The Republik of Indonesia Djakarta, hlm: 23-24.

[147] NAA. 3036/1/1/1 Monthly Report Australian Liaison Officer Netherlands Niew Guinea, Months ofAugust 1960, F.A. Bensted. 6th September 1961, 302/IIc/60. *Australian Liaison Officer* Netherlands New Guinea.

[148] (Drooglever, 2010:533)

[149] (Drooglever, 2010)

[150] NA. MVO Dossier G 14009, Politiek Overzicht IRIAN BARAT 1957, Parket van de Proucoureur-general bij het Hof van Justitie, February 1957.

[151] *Catatan Harian*, Stevanus Rumbewas, *op.cit.*

[152] *Ibid.*

[153] *Ibid.*

[154] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai, *Daftar Riwayat Hidup Yakop* Thung Tjing Ek dan lihat pula *Catatan Pribadi* Benjamin Kajai.

[155] *Catatan Pribadi* Stevanus Rumbewas dan lihat pula Arsip Keluarga Yoris Raweyai *Daftar Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek* dan Yoris Raweyai (13 April 2010), wawancara. Yoris Raweyai, anak ke tiga dari Yakop Thung Tjing Ek.

[156] Arsip Keluarga Yoris Raweyai *Daftar Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek.*

[157] Yoris Raweyai (13 April 2010), wawancara.

[158] Indonesian Commission Report 1950, *op.cit.* hlm:121

[159] *Riwayat Hidup,* S. D. Kawab.

[160] NA, MVO Dossier G 14009, Politiek Overzicht IRIAN BARAT 1957, Parket van de Proucoureur-general bij het Hof van Justitie, Febuary 1957.

[161] Arsip Keluarga Yoris Raweyai *Undangan kepada S. Papare di Hotel Centraal Djakarta, No.: 5/M.N./50..*

[162] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai,; *Surat kepada Tuan S. Papare dari W.M. Thm Vonataba, 8 Februari 1950.*

[163] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai,; *Surat kepada Tuan S. Papare dari Soeparno Djokja, 18/3-50.*

[164] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai,; *Surat kepada Tuan S. Papare dari S. Kamarea, Biak 14 Februari 1950.*

[165] Arsip Pribadi keluarga Yoris Raweyai; *Surat kepada Tuan S. Papare dari Abubakar Tjan koh Tjiang, Kaimana, 21 Februari 1950.*

[166] Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Dipanegoro, *Sejarah Kodam XVII/Tjenderawasih,* hlm: 35-36.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Rahman Rahim. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS, 1985.

Adam Malik. *Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.

Affandi, Umar. *Sejarah Pejuang Mohammad Ali Anyang : Seorang Pemuda Putra Daerah Kalbar Dalam Kancah Revolusi 1945-1950* . Pontianak : KOREM 121/ Alambhana Wanawai, 2010.

Agung, Ide A.A. Gde. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1985.

Alhaziri, Wasmi dan Petrus. "Bermain Api di Bawah Sinar Matahari Terbit", *Historia*, nomor 1 tahun 1991.

Ali-Hadara. *Profil Pejuang Sulawesi Tenggara*. Kendari: Laporan Penelitian Kerjasama Barida dan Unhalu. 2007.

Amar, Jen. *Bandung Lautan Api*. Bandung: Dhiwantara, 1963.

Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985.

Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Jatayu Sala, 1985.

Anderson, Benedict R.O.G. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Anonim. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Depdikbud. 1979.

Anonim. *Lahirnya Tri. Devisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Tenggara,*. Ujung Pandang: Tim Penelitian Sejarah Perjuangan Rakyat Sulselra Kerja Sama Kodam XIV Hasanuddin, Unhas dan IKIP Ujung Pandang, 1983.

Anwar Hafid dan Safruddin. *Sejarah Daerah Konawe Utara*. Bandung: Alfabeta, 2014.

....., *Sejarah Daerah Kolaka*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2009.

Anwar, Ali. "Revolusi di Daerah 1945: Insiden Kali Bekasi," *Histori*, Vol. I, No.1, 1991.

....., *Bekasi Dibom Sekutu: Pembumihanguan Kota dan Kampung-kampung di Bekasi oleh Tentara Sekutu-Inggris, 13 Desember 1945*. Bekasi: Komunitas Baca Bekasi, 2006.

....., *Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi*. Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2015.

Anwar, Ali. *KH Noer Alie Kemandirian Ulama Pejuang*. Bekasi: Yayasan Attaqwa, 2006.

Anwar, Rosihan. "Meninjau Sepoetar Daerah Tanggerang," *Negara Barat*, no. 34, Th. Rep. I, 13 Juni 1946.

ARC voor Borneo De Groeti Oost. *De Conferentie te Denpasar, Dell I, II*. Batavia: G. Kolff & Co, tth, *7-24 December 1946*.

....., *Kort Oversicht van het Behandelde ter Conferentie te Denpasar*. Batavia: G. Kolff & Co, tth.

Ardhana, I Ketut. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Audrey R Kahin (ed.). *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti Perss, 1990.

B. Bhurhanuddin. *Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Sulawesi Tenggara.* Jakarta: Depdikbud.

Bambang Sularto. *Wage Rudolf Supratman.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

BPRI Sanga-Sanga dan Jarahdam IX/ Mulawarman. *Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga-Sanga.* Balikpapan: Yayasan 27 Januari, 1998.

Budiarti, Tina. *Perkembangan Kota Tarakan: Sebuah Kajian Arkeologi Sejarah Bagi Sumber Daya Budaya (Desertasi S3).* Depok: Fak. Ilmu Pengetatuan Budaya Program Studi Arkeologi, 2010.

Christian Pelras. *Manusia Bugis Makassar.* Jakarta: Forum Jakarta Paris-Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2006.

Cindy Adams. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* (edisi revisi, terj.). Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2007.

Cribb, Robert B. *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan Otonomi dan Hegemoni.* Jakarta: Grafiti, 1990.

Dahrendorf. Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik.* Jakarta: Rajawali, 1986.

Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Depdikbud. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kaimantan Tengah.* Jakarta: Depdikbud, 1983.

Dinas Sejarah Militer Kodam V Jaya. *Sejarang Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang dan Bekasi.* Jakarta: Dinas Sejarah Militer Kodam V Jaya dan PT. Virgo Sari, 1975.

Disjarah VI/Siliwangi. *Siliwangi dari Masa ke Masa.* Bandung: Angkasa, 1979.

Djajusman. *Bandung Lautan Api.* Bandung: Angkasa, 1975. hlm: 14.

Doko, I.H. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur.* Jakarta: Balai Pustaka, 1981b.

Doko, Paul J.A. *100 Tahun I.H. Doko: Mengenang Perjuangan dan Pengabdian Sang Pahlawan Nasional.* Jakarta: Gramedia, 2013.

Ekadjati, Edi S. (et. all). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat.* Bandung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979/1980, 1980.

....., *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950).* Bandung: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Universitas Padjadjaran, 1981.

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (2de Deel). s'Gravenhage, Leiden: Martinus Nijhoff, E.J. Brill, 1918.

Fatimah Enar, et.al. *Sumatera Barat 1945-1949.* Padang: Pemda Sumatera Barat, 1978.

Finandar, Fidy. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme Di Kalimantan Timur.* Jakarta: Depdikbud, 1991.

Frans, Jacobus E. Pangsuma. *Sejarah Perang Mayang Desa.* Sanggau: DinasKebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, 2014.

George Mc Turnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia: Suatu Analisa tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Tjara-tjara Penjelesaiannja*, I, II. Djakarta: Gunung Agung, 1967-1968.

....., *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia.* Yogyakarta: Karya Kencana, 1977.

Gorda, I Gusti Ngurah. *Biografi Anak Agung Pandji Tisna: Raja Buleleng, Budayawan, Pendidik dan Pelopor Pariwisata.* Denpasar: Astabrata Bali, 2006.

Goudoever, W.A. van. *Malino Maakt Historie.* Batavia: RVD, 1946.

Groen, P.M.H. *Marsroutes en Dwaalsporen: Het Nederlands Militair-Strategisch beleid in Indonesië 1945-1950.* 's- Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1991.

Gusti Asnan. "Sumatra's Regional Governments" dalam Peter Post (ed.). *The Encyclopaedia of Indonesia in the Pacific War.* Leiden, Boston: E.J. Brill, 2010.

H. Suta, Bambang, dkk. *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak.* Pontianak: Pemkot Pontianak Kalimantan Barat, 2004.

Hardjawiganda, R. dkk. *Operasi Lintas Laut Banyuwangi-Bali.* Jakarta: Pusjarah ABRI, 1982.

Harun Kadir, dkk. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan.* Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda TK I Sul-Sel dengan UNHAS, 1984.

....., *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan.* Jakarta: Depdibud, 1982.

Heddy Shri Ahimsa-Putra. *Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural.* Yogyakarta: Kepel Press, 2007.

Hendri F. Isnaeni (ed.). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan; Kesaksian, Penyiaran dan Keterlibatan Jepang.* Jakarta: Kompas, 2015.

Idcham, Suriansyah dkk. *Sejarah Banjar.* Banjarmasin: Pemprop Kalimantan Selatan, 2003.

Ide A.A. Gde Agung. *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali.* Jakarta: YOI, 1993.

Imran, Amrin dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang Dan Revolusi.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve kerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012.

KODAM XII Tanjungpura. *Tanjungpura Berjuang.* Pontianak: SENDAM XII Tanjungpura Kalimantan Barat, 1970.

Irna, H. Suwito. *Chaerul Saleh Tokoh Kontroversial.* Jakarta: Mutiara Rachmat (distributor).

Ismail, M. Hilir. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara.* Mataram: Lengge, 2004.

Jaya, Ruyatna. *Sejarah Sukabumi.* Sukabumi: Yayasan Pendidikan Islam Sukabumi, 2002.

John D. Legge. *Sukarno Sebuah Biografi Politik* (terj. cet. ketiga). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Kahin, Audrey R. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan.* Jakarta: Grafiti, 1980.

Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca: Cornell Univ. Press, 1952.

Kamaly, M. Hussein. *Sejarah Rakyat di Bekasi Berjuang.* Bekasi: 1983.

Karya Lengkap Bung Hatta, Buku II: Kemerdekaan dan Demokrasi. Jakarta: LP3ES, 2000.

Kementerian Penerangan RI. *Propinsi Sulawesi.* Makassar: Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi, 1953.

Kempen RI. *Republik Indonesia: Sunda Ketjil.* Singaradja: 1953.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I, II.* Jakarta: UI Press, 1987, 1990.

Kraaf, G. & Ger Teitler. *De Verenigde Oost Indische Compagnie: Tussen Oorlog en Diplomatie.* Leiden: KITLV Uitgerij, 2002.

Lahadjdji Patang. *Sulawesi dan Pahlwan-Pahlawanya.* Makassar: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia, 1975.

Lasmidjah Hardi, dkk. *Jakarta-ku Jakarta-mu Jakarta-kita.* Jakarta: Yayasan Pecinta Sejarah dan DKI, 1987.

Lembaga Soekarno Hatta. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.* Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.

Lontaan, J.U. *Mengenal Kota Waringin Barat.* Pangkalan Bun: Pemda Tk.I Kabupaten Kota Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, 1976.

Lucas, Anton E. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi.* Jakarta: Grafiti, 1989.

M. Sanusi Dg., Mattata. *Luwu dalam Revolusi.* Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu, 1967.

Majid, Dien. *Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Reolusi: Perjuangan Moeffreni Moe'min.* Jakarta: Keluarga Moeffreni Moe'min, 1999.

Malik, Adam. *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.* Jakarta: Widjaja, 1975.

Manai Sophian. *Apa yang Masih Teringat.* Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Bangsa Sulawesi Selatan, 1991.

Maulwi Saelan. *Dari Revolui '45 sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa.* Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008.

Meraku Tirtayasa, I Gst. Bagus, dkk. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Buleleng, 1945-1950.* Bandung: Ganeça Exact, 2000.

Mestika Zed et. al. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya.* Padang: Citra Budaya, 2002.

....., *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950.* Jakarta: LP3ES, 2003.

Mochtar Lutfi, et. al. *Sejarah Riau.* Pekan Baru: Biro Bina Sosial Setwilda TK. I Riau, 1996 (ed. pertama 1976).

Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri. *Kedatuan Luwu.* Makassar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 2000.

Mohammad Hatta. *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi: Untuk Negeriku* (Jilid I). Jakarta: Gramedia, 2011.

....., *Menuju Gerbang Kemerdekaan: Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Kompas (Cet. III), 2013.

Mr. Ahmad Subadjo Djojoadisuryo. *Lahirnya Republik Indonesia.* Jakarta: tanpa penerbit, 2008.

Mukhlis PaEni dan Kathryn Robinson (ed.). *Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan di Desa.* Ujung Pandang: Lembaga Penerbit: UNHAS, 1985.

Mukhlis PaEni, dkk. *Sejarah Sosial Daerah: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950.* Jakarta: Disjarahnitra Depdikbud, 1995.

Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1-11. Bandung: Angkasa, 1977-1979.

....., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 1*, Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1994.

....., *Memenuhi Panggilan Tugas Jidil 1*, Jakarta: Masagung, 1990.

Nawawi, Ramli dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan.* Banjarmasin: Pemprop Kalimantan Selatan, 1991.

Notosusanto, Nugroho. *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.

....., dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949.* Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1985.

Nurhayati Nainggolan, dkk. *Sejarah Revolusi Kemedekaan Daerah Sulawesi Tengah.* Jakarta: Depdikbud, 1982.

Pendit, Nyoman S., 1979a, *Bali Berjuang.* Jakarta: Gunung Agung.

Penjoeloeh Bali, Denpasar: 1946-1947.

Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.

Pindha, I Gusti Ngurah X. *Gempilan Perjuangan Phisik Pasukan Induk Ngurah Rai.* Denpasar: Upada Sastra, 1946-1947.

Propinsi Sumatera Selatan. Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953.

Propinsi Sumatera Tengah. Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953.

Propinsi Sumatera Utara. Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953.

Puponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah NasionalIndonesia VI.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Purba, Juniar dkk. *Sanga – Sanga Kota Beresejarah Di Propinsi Kaliamantan Timur.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2006.

....., *Sejarah Balikpapan.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2004.

....., *Sejarah Kota Tarakan.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2008.

....., *Haji Umar Dachlan: Tokoh Pers Kalimantan Timur (Hasil Karya dan Pemikirannya).* Pontianak: BPSNT Pontianak, 2007.

....., *Samarinda dan Pasir Dalam Catatan Sejarah dan Budaya.* Pontinak: BPNB Pontianak, 2013.

Putra Agung, A.A. Gde, dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Bali.* Jakarta: Depdikbud, 1992/1993.

R.M. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

R.Z. Leirissa. *Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Malesung Rondor, 1997.

Rahman, Anshar dkk. *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan Dan Pemerintahan Daerah.* Sambas: Pemda Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, 2001.

Rai Mirsha, I Gst. Ngurah. "Revolusi Fisik 1945 di Bali", *Laporan Penelitian.* Denpasar: Universitas Udayana, 1985.

....., dkk. *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok sampai Revolusi Fisik di Bali.* Denpasar: Pusdok Bali, 1989.

Raliby, Osman. *Documenta Historica: Sedjarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perdjuangan Negara Republik Indonesia.* Djakarta: Bulan Bintang, 1953.

Reid, Anthony J.S. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra.* Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

....., *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV, 2011.

....., *Sumatera: Revolusi dan Elit Tradisional.* Jakarta: Komunintas Bambu, 2012.

Restu Gunawan. *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia.* Yogyakarta: Ombak, 2005.

Rivai, Mawardi Tt. *Kalimantan Barat Masa pendudukan Jepang.* Jakarta: Depdikbud.

Riwut, Tjilik dkk. *Kalimantan Membangun Alam dan Budaya*, Yogakarta: NR Publising, 2014 (cetakan 2).

Robinson, G. *Sisi Gelap Pulau Dewata*: *Sejarah Kekerasan Politik di Bali.* Yogyakarta: LKIS, 2006.

Rosidi, Ajip. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT.* Jakarta:

Idayu Press, 1986.

Rusdi Sufi et.al. *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.

Saafroedin Bahar (Peny.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Safaruddin. *Tanah Mandor Bersimbah Darah.* Pontianak: Kopma Untan Pontianak Kalimantan Barat, 1996.

Sagimun MD, dkk. *Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional.* Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.

Saleh, Mayjen TNI Pur. R.H.A. *Perjuangan Bersenjata dari Jakarta & Kembali ke Jakarta Semasa Perang Kemerdekaan Tahun 1945-1949.* Jakarta: Badan Kontak BKR/TKR Jakarta, 1989.

Sanusi Daeng Mattata. *Luwu Dalam Revolusi.* Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama Ikatan Palajar Mahasiswa Indonesia Luwu, 1967.

Sarita Pawiloy, dkk. *Sejaran Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan 17 Agustus 1945-17 Agustus 1950.* Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan, 1987.

Scott, James C. (penyunting). *Perlawanan Kaum Tani.* Jakarta: YOI, 1993.

Sejarah Daerah Riau. Jakarta: Dep. P dan K Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982.

Sejarah Daerah Sumatera Selatan. Jakarta: Dep. P dan K, Bagian Proyek Inventarisasi & Pembinaan Nila-nilai Budaya, Propinsi Sumatera Selatan, 1991/92.

Sejarah dan Peranan SUBKOSS dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950). Palembang: DHD-45 Propinsi Sumatera Selatan, 2003.

Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Dep P dan K, 1983.

Sejarah Daerah Sumatera Selatan. Palembang: Dep. P dan K, Bagian Poyek dan Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan, 1991/1992.

Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu. Jakarta: Dep. P dan K-Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984.

Setneg RI. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945.* Jakarta: Setneg RI, 1995.

Smail, John R.W. *Bandung Awal Revolusi 1945-1946.* Jakarta: Ka Bandung, 2011.

Sudarto, dkk. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat,* (naskah revisi). Pontianak: Pemprop Kalimantan Barat, 1989.

Suganda, Her. *Rengasdengklok Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945.* Jakarta: Kompas, 2009.

Supomo. *Negara Indonesia Serikat dan Uni Belanda Indonesia.* Djakarta: Jajasan Dharma, 1948.

Susanto Zuhdi. "Proklamasi Kemerdekaan" dalam Taufik Abdullah (ed.). *Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid VI.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

Tamam, Fatul Futuh. *Peranan Masyarakat Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Kajian Desa Pahandut di Palangka Raya tahun 1945 -1958.* Pontianak: BPSNT, 2009.

....., *Peranan Masyarakat Manuhing Dalam Mempertahankan Kemerdekaan.* Pontianak: STAIN Pontianak Press Tanjungpura Kalimantan Barat, 2011.

Tantri, K'tut. *Revolusi di Nusa Damai.* Djakarta: Gunung Agung, 1965.

Teuku H. Ibrahim Alfian. "Perjuangan Datu Kerajaan Luwu Andi Djemma dalam Menancapkan Pilar Begara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional", dalam Andi Djemma. *Pahlawan Nasional dari Bumi Sawerigading.* Makassar: Unanda Press, 2003.

Teuku Mohamad Isa (ed.). *Mr. Teuku Moehammad Hasan: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999.

Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution.* California: Addison Wesley Publishing Co., 1978.

....., *The Vendee.* Cambridge: Harvard Univ. Press, 1994.

Tim Penulis BPSNT. *Tokoh dan Peristiwa Sejarah Di Kalimantan Barat.* Pontianak: BPSNT Pontianak, 1997-1998.

Tim penyusun. *Sejarah Peristiwa Bojongkokosan 9 Desember 1945.* Sukabumi: Dewan Harian Cabang Angkaan '45 Kotamadya Dati II Sukabumi.

Tim Penyusun. *Monografi Daerah NTT.* Jakarta: Depdikbud, 1977.

Tim Penyusun. *Samodra Merah Putih.* Jakarta: Yayasan 19 September 1945, 1983.

Tim Penyusun. *Sejarah Bekasi sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru.* Bekasi: Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dan Yavitra, 1992.

Tim Penyusun. *Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.* Jakarta: Kodam V/Jaya, 1975.

Tirtoprodjo, Susanto. *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia.* Djakarta: Pembangunan, 1966.

....., *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.* Jakarta: Pembangunan, 1970.

Trunajaya, Herry dkk. *Gejolak Revolusi: Serpihan Sejarah Tercecer di Balikpapan.* Balikpapan: Vidya Karunia kerjasama dengan Disporabudpar Kota Balikpapan, 2013.

Umar, Rika. *Mr. I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya.* Jakarta: Depdikbud, 1986.

Wacana, Lalu, dkk. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat.* Jakarta: Depdikbud, 1984.

Wal, S.L. van der. *Officieel Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950,* I–X. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1971-1979.

Walentina Waluyanti de Jong. *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan,* Yogyakarta: Galangpress, 2015.

Warliyah, U. (et. all). *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950.* Karawang: Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, 2003.

Wedha, I Ketut. *Studi Tentang Revolusi Fisik di Daerah Jembrana.* Jembrana: tp, 1990.

Wertheim, W.F. *Gelombang Pasang Emansipasi: Evolusi dan Revolusi yang Diperbaharui.* Jakarta: Garba Budaya, tth.

Widiyatmika, Munandjar. dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Nusa Tenggara Timur.* Kupang: Proyek IDKD NTT Depdikbud, 1984.

Willem Ijzereef. *De Zuid-Celebes Affaire.* Dieren, 1984.

Zuhri, K.H. Saifuddin. *Berangkat Dari Pesantren.* Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Surat Kabar

Antara, Djakarta: 1946-1950.

Asia Raya, 21 Agustus 1945.

Kedaulatan Rakjat, Jogjakarta, 1946-1950.

Pemandangan, 1942.

Equator, Rabu 10 Agustus 2009.

Tjahaja, 1944-1945.

Warta Indonesia, Djoemat, Th. I, No. 20. Semarang: 26 Oktober 1945.

Peristiwa yang telah dinanti-nanti dengan harap-harap cemas itu akhirnya terjadi juga. Pada jam 10 pagi waktu Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945, di hadapan para anggota PPKI dan beberapa ratus pemuda Jakarta yang sempat diberi tahu, Bung Karno membacakan teks "Proklamasi kemerdekaan Indonesia" —sebuah teks keramat bangsa yang sebelumnya telah ditandatanganinya bersama Bung Hatta.

Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tersebarnya berita proklamasi dengan berbagai cara dan secara bertahap menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta respon daerah saat menerima berita proklamasi adalah soal yang penting untuk merekam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dukungan rakyat terhadap NKRI.

Buku ini mengungkapkan dinamika penyebaran berita proklamasi Republik Indonesia dan respon rakyat di daerah-daerah tersebut dalam menerima berita itu. Catatan sejarah tersebut dapat memberikan wawasan bagi generasi penerus sehingga melahirkan kesadaran untuk mencintai, berani berkorban, membangun dan memperkokoh integrasi bangsa-negaranya.

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN : 978-602-1289-25-9